KAJIAN FISKAL REGIONAL GABUNGAN **2018**

Khatulistiwa

SINERGI MENGAWAL PERTUMBUHAN & PEMERATAAN

82 ANALISIS **PENGELUARAN & PENERIMAAN APBN** ANTAR WILAYAH

108 ANALISIS **EKONOMI & FISKAL REGIONAL**

240 ANALISIS **KESEHATAN PEGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

252 KINERJA **PENYALURAN DAK FISIK & DANA DESA** SERTA **SINKRONISASI DENGAN BELANJA K/L**

KAJIAN FISKAL REGIONAL GABUNGAN **2018**

Khatulistiwa

SINERGI MENGAWAL PERTUMBUHAN & PEMERATAAN

KFR gabungan 2018

Khatulistiwa

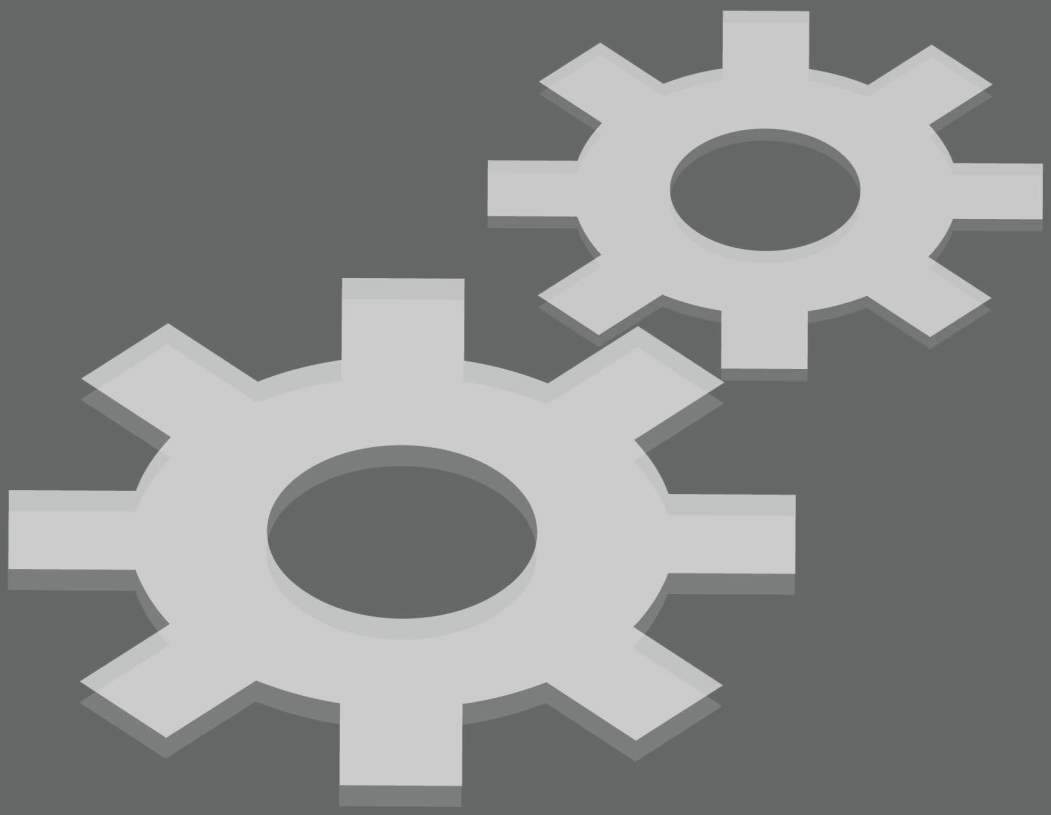

Sinergi Mengawal Pertumbuhan dan Pemerataan

copyright©2019
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Tahun 2019

TIM PENYUSUN

PENGARAH
Marwanto Harjowiryono
Direktur Jenderal Perbendaharaan

PENANGGUNG JAWAB
R. Wiwin Istanti
Direktur Pelaksanaan Anggaran

EDITOR
Heny Muryantini, Mochamad Chomnur Susanto, Junaedi, Wibawa Pram Sihombing,
Hari Utomo, Abdullah Syahidin

KONTRIBUTOR
Tommi Helmiwan, Susanti Dewi, Catur Ery Prabowo
Didi Setyopurwanto, Puji Astutik, Kurniawan Ari S, I Nyoman Enri, Indra Sulistyo, Rian Andriono,
Risa Rahajeng, Fatqur Hidayat, Sabar Sautomo
Sudi Bawa S, Tengku Yustisia AR
Daru Tri RJN, Hadiono Kurniawan, Kharisma Muhammad
Trisna Eka Wijaya, Syahrul Alamsyah, Adi Widyandana
M. Ulil Albab, Rifki Prangkoso, Sweeta Wulandari, Bonnet Denny VH
Andres Leiman S, Hariyanto
Asep Syamsu D, Heru Susanto, Agung Budi S, Ma'mun Anshori
Bagong Iswanto, Haryando Anil, Lely Dyah T, Catur Wayudi
Posma Amando S., Mashudi Adi N, Mursid Priyadi, Arif Novianto
Eko Erifianto, M. Falih Ariyanto, Lely Yalestiarini
Heru Priyantono, Ade Zul AL, Yusuf Prihantoro, Ferry Sutiono

DESAIN DAN LAYOUT
Dhika Habibi Z, Abdul Gafur, Muhammad Sahid S

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Salam sejahtera bagi kita semua

Laporan Khatulistiwa Tahun 2018 sebagai konsolidasi dari KFR Tingkat Wilayah memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang keterkaitan kebijakan fiskal dengan perekonomian regional dan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mengusung tema "*Sinergi Mengawal Pertumbuhan dan Pemerataan*", diharapkan momentum kinerja fiskal di pusat dan daerah yang telah tercapai dengan sangat baik di tengah tantangan perekonomian global tahun 2018 dapat dijaga dan ditingkatkan melalui penguatan sinergi, koordinasi, dan kerja sama yang erat antar-instansi pusat dan daerah, termasuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan dan pemerataan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama (*ultimate goal*) yang ingin dicapai melalui setiap perumusan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah baik di pusat maupun daerah. Keselarasan antara tumbuhnya perekonomian tentunya harus mampu diiringi oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN dan APBD harus memiliki peran strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi tumbuhnya investasi, dan memastikan distribusi pembangunan di Indonesia yang merata dan berkeadilan. Selain itu, sinkronisasi pembangunan daerah terutama yang dibiayai oleh APBN dan APBD mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya dorong dan optimalisasi penggunaan sumber daya fiskal yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Kita patut berbangga bahwa capaian kinerja fiskal di tahun 2018 telah berkontribusi dalam menjaga level pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17 persen, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Suatu capaian yang membanggakan dimana hal tersebut mampu dicapai di tengah kondisi ketidakpastian perekonomian global. Hal ini disertai pula dengan semakin membaiknya indikator kesejahteraan. Di tahun 2018, tingkat kemiskinan nasional berhasil diturunkan menjadi 9,66 persen, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat (gini ratio) berhasil mengalami penurunan dari 0,406 (2017) menjadi 0,389 (2018), tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami penurunan dari 5,70 persen pada Februari 2014 menjadi 5,34 persen pada Agustus 2018.

Laporan Khatulistiwa Tahun 2018 disusun berdasarkan 6 kelompok regional yaitu: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra, dan Maluku-Papua, sebagai kawasan yang memiliki karakteristik yang hampir sama ditinjau dari sisi ekonomi, sumber daya alam, maupun letak geografisnya. Hasil telaahan makro menunjukkan bahwa kebijakan fiskal pemerintah yang telah dilaksanakan turut mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional dan regional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, perekonomian nasional masih terlihat terkonsentrasi di Kawasan Indonesia Barat, khususnya regional Jawa dan Sumatera, sehingga upaya pemerataan pembangunan perlu untuk terus dilakukan secara berkesinambungan dengan menciptakan peluang-peluang baru guna menciptakan pusat-pusat pertumbuhan di luar kawasan Jawa-Sumatera.

Lebih lanjut, penerimaan dan alokasi belanja sebagian besar berada di Kawasan Indonesia Barat sebagai kontributor perekonomian nasional terbesar. Penerimaan terbesar dikontribusi dari provinsi-provinsi yang memiliki kegiatan perdagangan dan industri jasa serta kegiatan ekspor impor dengan skala masif. Pengeluaran negara sangat dominan untuk kawasan dengan jumlah penduduk besar dan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan dan pariwisata. Namun demikian, alokasi belanja pemerintah untuk Kawasan Indonesia Timur juga terus meningkat, didukung dengan kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), terutama penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa yang telah terdesentralisasi melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), serta sinkronisasinya dengan belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Selain itu, secara umum kami masih melihat bahwa ketergantungan fiskal pemerintah daerah masih cukup tinggi, namun demikian kemandirian fiskal semakin meningkat pula yang didorong oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya penerimaan pajak daerah yang cukup signifikan. Untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah tersebut, diperlukan kebijakan pengembangan potensi daerah secara spesifik sebagai

keunggulan masing-masing daerah.

Secara singkat, gambaran kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta kebijakan fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada masing-masing regional diulas relatif komprehensif dengan menggunakan analisis deskriptif dalam Laporan Khatulistiwa. Dengan demikian, Laporan Khatulistiwa Tahun 2018 diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian perkembangan ekonomi dan fiskal yang bersifat nasional dan regional.

Akhir kata kami menyadari bahwa dalam penyusunan ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan ini. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Laporan Khatulistiwa ini. Kami berharap Laporan Khatulistiwa Tahun 2018 dapat bermanfaat bagi para pemangku kepentingan khususnya dalam peningkatan peran fiskal bagi perekonomian nasional dan regional serta bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Wassalamu'alaikum WarohmatullahiWabarokatuh

JAKARTA, MEI 2019

MARWANTO HARJOWIRYONO
PLT. DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

Laporan Khatulistiwa merupakan gabungan dari Kajian Fiskal Regional (KFR) yang disusun oleh seluruh Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang mengulas mengenai dinamika perkembangan kebijakan fiskal baik pusat maupun daerah dalam rangka mendorong laju perekonomian dan perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat."

PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL TAHUN 2015-2018
(DALAM PERSEN)

Secara global, pertumbuhan ekonomi pada negara berkembang di tahun 2018 tercatat lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara maju. Untuk pertumbuhan ekonomi di kawasan asia tecatat sebesar 6,5% dan indonesia mencatatkan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%, jauh diatas pertumbuhan ekonomi dunia sebesar 3,7%, negera berkembang sebesar 4,6% dan negara maju yang hanya sebesar 2,3%.

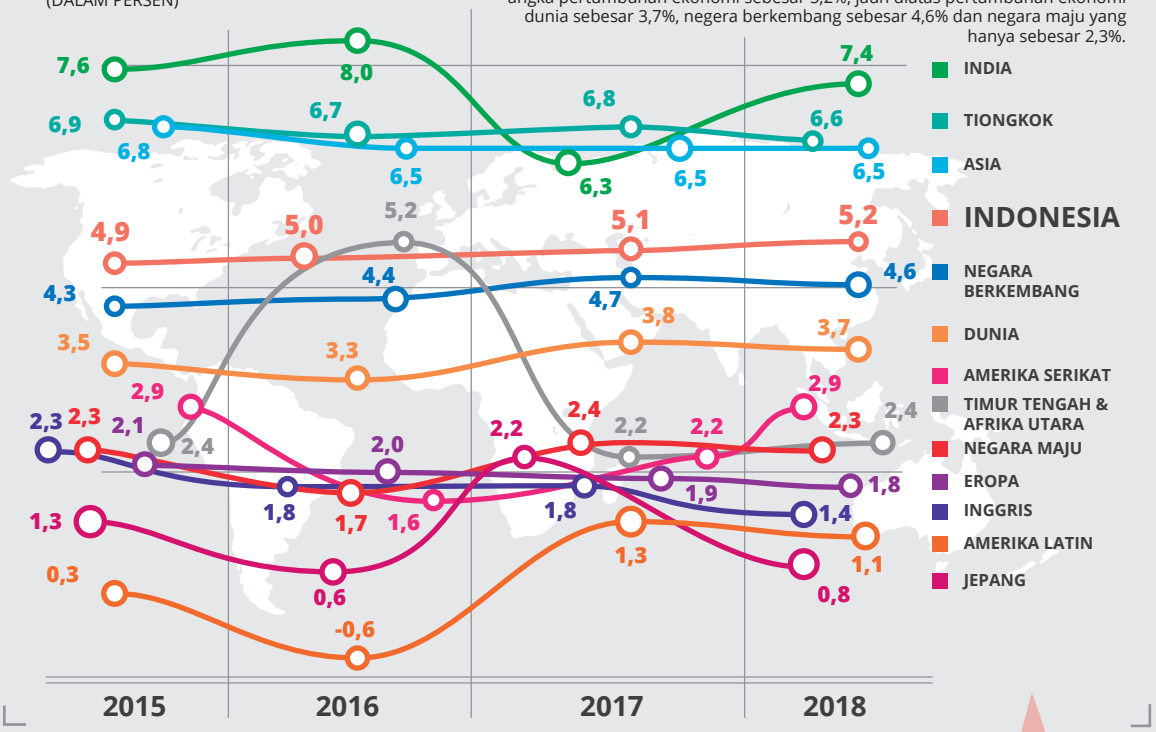

TREN PERTUMBUHA INDONESIA TAHUN 2
(DALAM PERSEN)

GAP PERTUMBUHAN PDB TAHUN 2018 SEBESAR
0,23%

PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH TAHUN 2018
(DALAM TRILIUN)

REALISASI PENDAPATAN NEGARA & HIBAH
Rp1.943,65

Dari realisasi pendapatan negara dan hibah tahun 2018, penerimaan perpajakan masih memiliki porsi realisasi terbesar yaitu 1.518,79 triliun atau 85,40%, akan tetapi dari target penerimaan yang ditetapkan hanya menvapai 93,26%. sedangkan meskipun memiliki porsi terkecil yaitu sebesar 0,80, penerimaan hibah memiliki realisasi terbesar atas target penerimaan yang ditentukan, yaitu sebesar 15,51 triliun, atau 1.296,29%. Dalam rangka meningkatkan penerimaan perpajakan, pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan dengan tetap memperhatikan daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industeri nasional

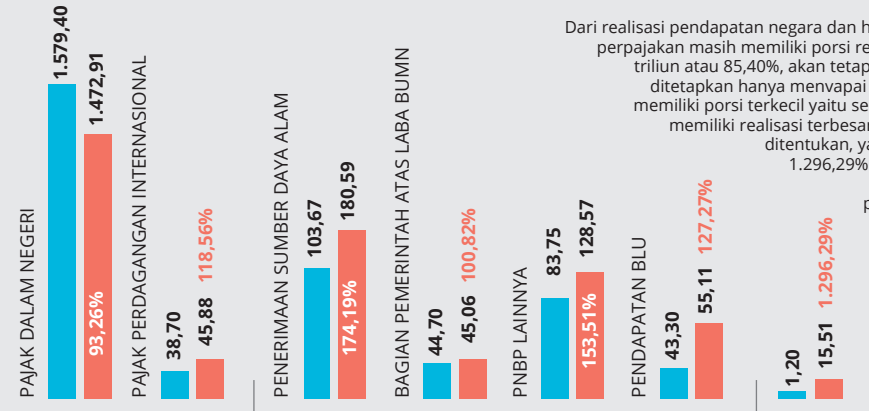

PERPAJAKAN
ANGGARAN **1.168,10**
REALISASI **1.518,79** 93,86%

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
ANGGARAN **275,43**
REALISASI **409,34** 148,62%

HIBAH
ANGGARAN **1.168,10**
REALISASI **1.518,79**

BELANJA NEGARA TAHUN 2018
(DALAM TRILIUN)

Belanja pen
ke Daerah
10,03
triliun
99,76% dan

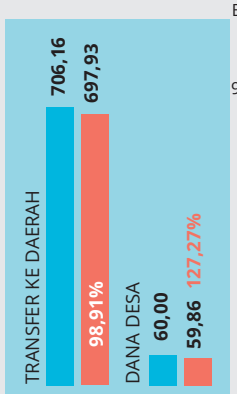

TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA
ANGGARAN **766,16**
REALISASI **757,79** 98,91%

PEGAWAI
BI
AN
RE

PERBANDINGAN PAD & TOTAL PENDAPATAN REGIONAL TAHUN 2017-2018
(DALAM TRILIUN)

Jika dibandingkan per kawasan, Jawa menjadi kawasan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi di tahun 2018. Tingkat Kemandirian Jawa sedikit membaik 1,17% dari tahun sebelumnya. Kawasan Balinusra menjadi yang kedua, disusul Kawasan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua.

Kawasan Maluku dan Papua menjadi yang terendah dengan tingkat kemandirian 4,67%. Hal ini akibat tingginya proprosi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang mencapai 71,7% dari Total Pendapatan. Hal ini wajar mengingat Daerah Timur Indonesia khususnya Regional Maluku dan Papua sedang mengejar ketertinggalan pembangunan dari regional lainnya.

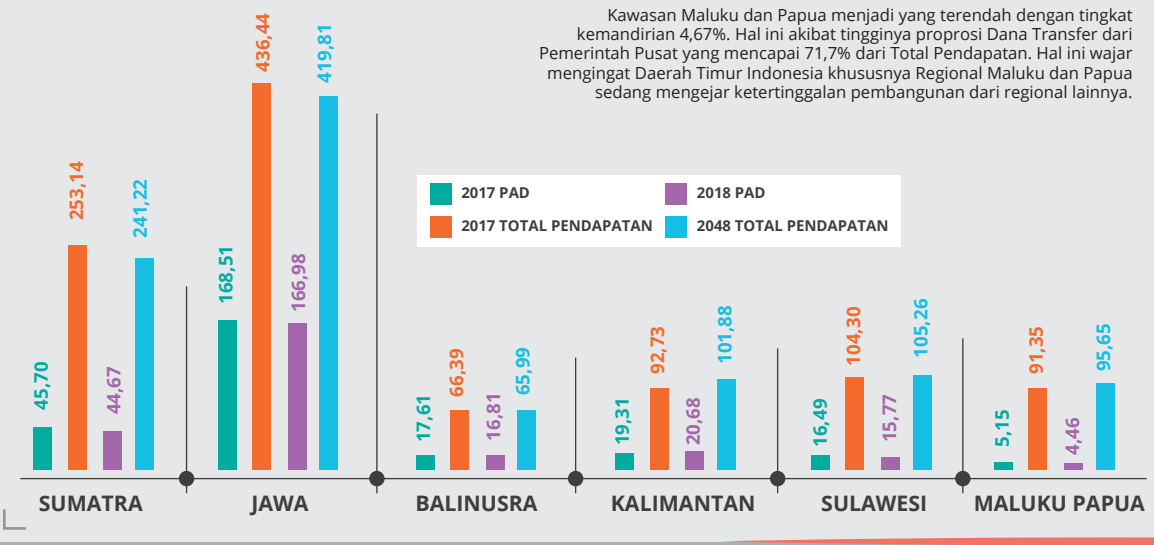

TRANSFER KE DAERA TAHUN 2018
(DALAM TRILIUN)

Untuk Tra
kompon
dari
sebe
tercatat
transfe
c

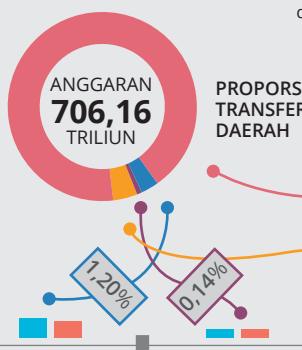

PROPORS
TRANSFER
DAERAH

DANA INSENTIF DAERAH
ANGGARAN **8,50**
REALISASI **8,23**
96,83%

DANA OTONOM KHUSUS
ANGGARAN **1,00**
REALISASI **1,00**
100%

DASHBOARD FISKAL REGIONAL TAHUN 2018

SINERGI MENGAWAL PERTUMBUHAN & PEMERATAAN

N PDB 2018

Melanjutkan tren positif sejak tahun 2015, pertumbuhan ekonomi 2018 berada di angka 5,17%, meningkat tipis dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,07%. Peningkatan tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia untuk menjaga inflasi pada titik aman. Terjaganya inflasi mendorong peningkatan konsumsi masyarakat sebagai variabel terbesar dalam struktur pembentuk PDB Indonesia dari sisi permintaan. Disisi lain pendapatan masyarakat yang membaik turut serta mendorong peningkatan konsumsi dan investasi seiring dengan keberlanjutan program pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

Beberapa even penting selama 2018 seperti Asian Games di Jakarta dan Palembang, penyelenggaraan pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank, serta penyelenggaraan pilkada serentak dan persiapan pemilu legislatif dan presiden mendorong perkembangan ekonomi nasional tumbuh.

PELAKSANAAN APBN TAHUN 2018

(DALAM TRILIUN)

APBN 2018 sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di tengah tantangan perekonomian global dan domestik. Pencapaian tersebut diwujudkan dalam strategi fiskal pemerintah yakni berupa optimalisasi pendapatan negara, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif, serta mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif dan berkelanjutan.

BELANJA NEGARA
2.220,66
TRILIUN

DEFISIT
(325,94)
TRILIUN

PENDAPATAN NEGARA & HIBAH
1.894,72
TRILIUN

REALISASI BELANJA NEGARA

Rp2.208,78

merintah pusat tahun 2018 mengalami kenaikan 6,40% dibandingkan APBNP 2017, sedangkan Transfer dan Dana Desa tahun 2018 turun tipis 0,02% dari alokasi tahun sebelumnya atau mengalami kenaikan %. Realisasi belanja negara tersebut terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.450,98 dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp757,79 triliun atau masing-masing sebesar 98,91% terhadap pagu APBN 2018.Tingginya tingkat realisasi belanja pemerintah pusat didukung oleh capaian penyerapan seluruh jenis belanja pada kisaran di atas 90% kecuali untuk belanja modal dan belanja lain-lain yang masing-masing sebesar 89,02% dan 24,04%.

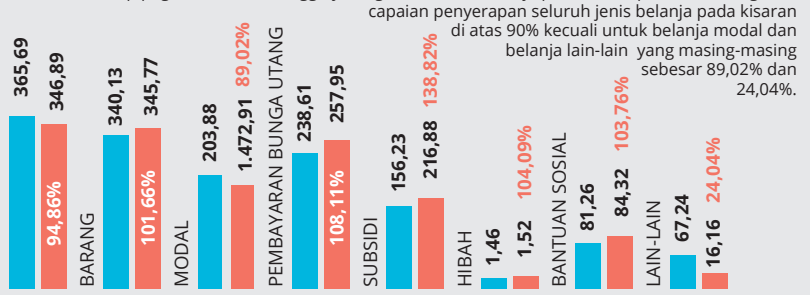

ELANJA PEMERINTAH PUSAT
NGGARAN **1.454,49**
EALISASI **1.450,98** 99,76%

PELAKSANAAN APBD TAHUN 2018

(DALAM TRILIUN)

TAHUN 2018
TURUN
140,94
TRILIUN

Secara nasional, pagu APBD 2018 mengalami sedikit penurunan sebesar 2,95% dari tahun sebelumnya, atau sebesar Rp.140,94 triliun. Penurunan terjadi pada seluruh komponen. Porsi terbesar terjadi pada Belanja Operasi, Transfer/Bagi Hasil ke Desa, dan Pengeluaran Pembiayaan. Sedangkan jika dilihat dari persentase realisasi terjadi kenaikan penyerapan jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,99% meskipun secara nominal turus sebesar Rp44,937 triliun.

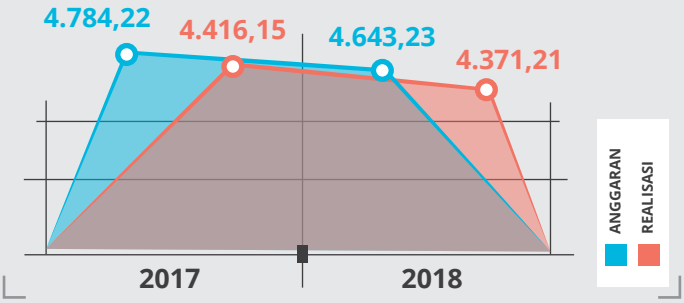

AH

ansfer ke Daerah dan Dana Desa, seluruh hen TKDD mencapai tingkat realisasi lebih i 90,00%. Jika dibandingkan dengan tahun elumnya kenaikan tingkat realisasi belanja pada hampir seluruh unsur TKDD, kecuali er Dana Insentif Daerah yang turun 3,17% dari tahun 2017 meskipun secara nominal realisasinya meningkat

I
R KE

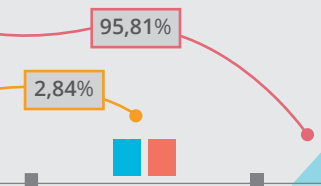

DANA TRANSFER UMUM
ANGGARAN **490,71**
REALISASI **495,19**
100,91%

DANA TRANSFER KHUSUS
ANGGARAN **185,89**
REALISASI **173,45**
93,31%

DANA KEISTIMEWAAN DIY
ANGGARAN **20,06**
REALISASI **20,06**
100%

DANA PERIMBANGAN
ANGGARAN **676,60**
REALISASI **668,64**
93,86%

ANGGARAN
REALISASI

TREN INFLASI TAHUN 2014-2018

(DALAM PERSEN)

Perkembangan inflasi nasional pada akhir 2018 berada pada kisaran rendah, yakni pada angka 3,13%, berada di bawah target inflasi dalam asumsi makro APBN 2018. Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi 2017 yakni 3,61%. Tercatat sejak kurun waktu 2015-2018 nilai inflasi selalu berada dibawah target. Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dan Bank Indonesia selama 2018 untuk menjaga tingkat inflasi pada kondisi aman.

BAB 1 KONDISI MAKRO DAN FISKAL NASIONAL 28

-PERTUMBUHAN EKONOMI
-INFLASI
-KESEJAHTERAAN
-PELAKSANAAN APBN
-PELAKSANAAN APBD
-POTENSI KEUNGGULAN DAERAH
-GLOBAL CHAIN: INDUSTRI DI ERA MODERN

BAB 2 ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN APBN ANTAR WILAYAH 82

-PENERIMAAN
-PENGELUARAN
-SURPLUS DEFISIT
-ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

BAB 3 ANALISIS EKONOMI DAN FISKAL REGIONAL 108

-REGIONAL SUMATERA
-REGIONAL JAWA
-REGIONAL KALIMANTAN
-REGIONAL SULAWESI
-REGIONAL BALI NUSRA
-REGIONAL MALUKU PAPUA

BAB 4 ANALISIS KESEHATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 240

-PENDAPATAN DAERAH
-BELANJA DAERAH

BAB 5 KINERJA PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA SERTA SINKRONISASI DENGAN BELANJA K/L 252

-PELAKSANAAN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA TAHUN 2018
-KETERKAITAN DAK FISIK DAN DANA DESA DENGAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

BAB 6 RESPON FISKAL PEMERINTAH 274

-REGIONAL SUMATERA
-REGIONAL JAWA
-REGIONAL KALIMANTAN
-REGIONAL SULAWESI
-REGIONAL BALI NUSRA
-REGIONAL MALUKU PAPUA

BAB 7 KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 290

-KESIMPULAN
-REGULASI

RINGKASAN EKSEKUTIF

KINERJA PEREKONOMIAN DAN FISKAL TAHUN 2018

Tujuan utama pembangunan adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pencapaian tujuan dilakukan melalui perumusan kebijakan fiskal oleh pemerintah, baik penerimaan, belanja maupun pembiayaan yang kredibel. Tumbuhnya perekonomian harus didukung dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan angka kemiskinan, rasio ketimpangan, dan angka pengangguran. Dalam rangka mencapai kondisi ideal, APBN sebagai alat kebijakan fiskal berperan strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi investasi, dan memastikan pembangunan di Indonesia didistribusikan merata dan berkeadilan.

Desain dan postur APBN diharapkan mampu mempersempit ketimpangan antarwilayah melalui pelaksanaan program-program prioritas nasional, terutama dengan output infrastruktur dan kesejahteraan, serta kebijakan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang proporsional dan terukur sebagai modal jangka panjang meningkatkan kemandirian fiskal daerah, terutama melalui dana transfer yang bersifat investasi berupa DAK Fisik dan Dana Desa yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat hingga level terendah yakni desa.

Pada tahun 2018, kondisi perekonomian nasional menunjukkan peningkatan pertumbuhan dan bahkan menjadi pertumbuhan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa nadi perekonomian Indonesia tetap menggeliat meskipun di tengah dinamika perekonomian global yang dibayangi ketidakpastian. Sementara itu, tingkat inflasi Indonesia terkendali dan lebih baik 0,48% dari tahun sebelumnya. Pengendalian inflasi sangat penting dalam pencapaian sasaran pembangunan maupun, penyusunan postur APBN, dan arah kebijakan fiskal karena tingkat inflasi akan berpengaruh pada daya beli dan

HUBUNGAN KINERJA FISKAL DENGAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN TAHUN 2018

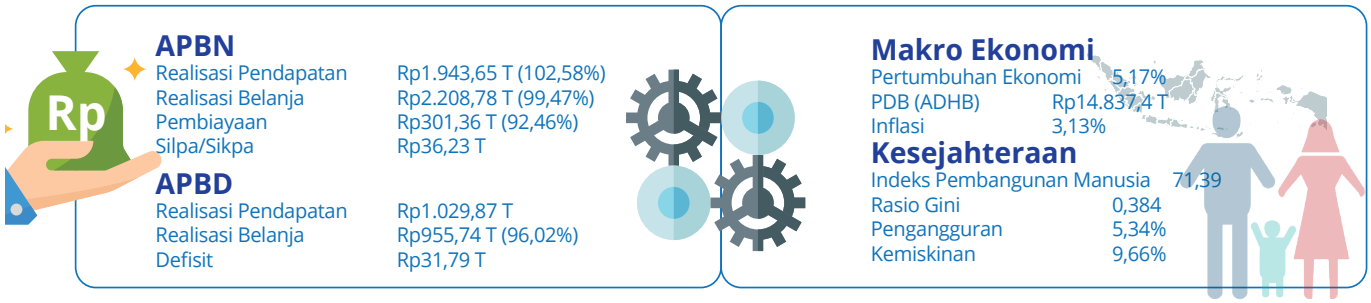

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN IV-2018

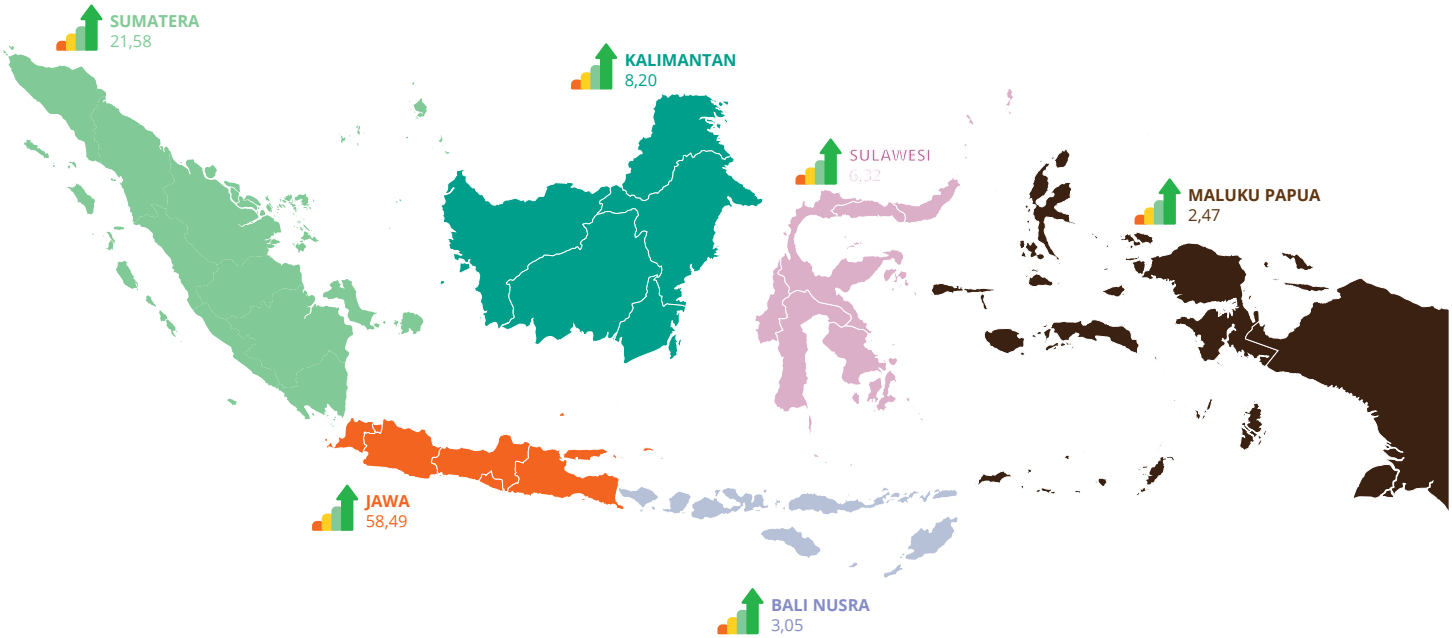

Sumber : BRS Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2018, BPS, 2019

konsumsi masyarakat, tingkat pendapatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi perekonomian Indonesia masih didominasi oleh perkembangan aktivitas ekonomi di regional Jawa yang memiliki populasi ±56,35% penduduk Indonesia. Sebagai penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB), Jawa diikuti regional Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali Nusra, dan Papua Maluku. Berdasarkan *share* PDB tersebut, variasi angka kontribusi PDB setiap regional menunjukkan bahwa tren komposisi distribusi PDB masih didominasi provinsi-provinsi di wilayah Indonesia bagian barat, meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan share kontribusi ekonomi Indonesia dari Jawa ke wilayah Sumatera dan Kawasan Indonesia Timur (KTI) melalui sejumlah program prioritas di sektor infrastruktur dan kesejahteraan.

Dari sisi kinerja fiskal, realisasi APBN 2018 sangat positif dan memiliki daya dorong dengan kesehatan dan kesinambungannya yang tetap terjaga. Realisasi pendapatan negara melewati target dan tumbuh lebih baik dari tahun lalu, yang didukung oleh kinerja perpajakan dalam negeri dan penerimaan sumberdaya alam yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi belanja negara yang hampir mencapai 100% dan tumbuh ±10% dari tahun lalu, yang didukung oleh adanya perbaikan eksekusi belanja K/L, terutama belanja barang dan modal. Dengan demikian, defisit APBN berada pada angka 1,79% PDB atau lebih rendah dari 2017 yang mecapai 2,49%. Peningkatan kinerja fiskal ini menghasilkan output yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat berupa pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bandara dan rel kereta api. Di bidang pendidikan, outputnya dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar, Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan penyaluran beasiswa Bidik Misi. Sedangkan di bidang

kesehatan dan perlindungan sosial terwujud dalam bentuk manfaat Kartu Indonesia Sehat dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Dari sisi fiskal daerah secara nasional di tahun 2018, Pendapatan APBD secara nasional (gabungan) mengalami kenaikan Rp14,51 triliun menjadi Rp1.029,87 triliun pada tahun 2018. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu indikator kemandirian fiskal daerah mengalami penurunan Rp3,41 triliun menjadi Rp269,39 triliun tentunya kurang menggembirakan karena menurunnya PAD di regional Sumatera dan Jawa yang merupakan kontributor utama. Tiga sumber PAD tertinggi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Dari sisi belanja daerah, terjadi peningkatan baik dari sisi jumlah dari maupun prosentase penyerapan belanjanya, yakni dari Rp896,95 triliun menjadi Rp955,74 triliun atau 96,02%. Agar dapat memberikan stimulus yang berasal dari APBD, proporsi serapan belanja modal idealnya harus lebih tinggi dari belanja pegawai dan belanja barang. Namun demikian terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada belanja barang dan jasa terutama untuk belanja bahan pakai habis, belanja jasa kantor, dan belanja perjalanan dinas. Hampir semua kawasan mengalami pertumbuhan positif pada sisi realisasi belanja daerah.

Dari sisi kemandirian fiskal daerah, regional Jawa memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan regional lainnya mencapai ±37%. Hal ini mengindikasikan bahwa regional Jawa lebih memiliki kemampuan lebih besar dalam memperoleh PAD. Hal ini akan berimbas pada fleksibilitas untuk mengalokasikan belanja, termasuk untuk infrastruktur atau belanja signifikan lain yang lebih banyak sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi regionalnya. Selain itu, terdapat empat provinsi yang termasuk dalam kategori kapasitas fiskal sangat tinggi yaitu Papua, Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta. Namun demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat di Papua masih belum sesuai harapan dan perlu untuk senantiasa didorong melalui program-program pemerintah yang tepat sasaran.

KINERJA INDIKATOR KESEJAH TERAAN 2018

Kesejahteraan masyarakat sebagai *ultimate goal* Pemerintah dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui kebijakan fiskal. Peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai ukuran pembangunan kualitas hidup manusia harus selaras dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. IPM diukur melalui akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kehidupan yang layak. Dalam sembilan tahun terakhir, pembangunan manusia Indonesia terus mengalami kemajuan, yakni meningkat dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 71,39 pada tahun 2018. Jakarta memiliki IPM tertinggi dan satu-satunya berkategori sangat tinggi mencapai 80,47, sedangkan provinsi Papua masih menjadi yang terendah dengan indeks sebesar 60,06 meskipun pada 2018 mengalami peningkatan tertinggi se-Indonesia

KINERJA PERTUMBUHAN DAN IPM REGIONAL TAHUN 2018

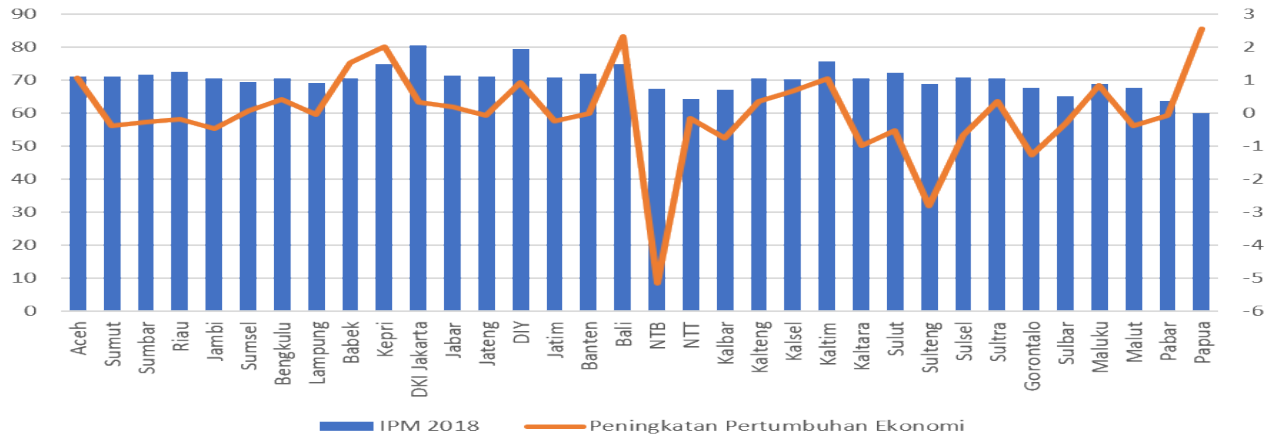

Sumber : BPS, 2018 (diolah)

dan menjadi berkategori sedang. Rata-rata IPM di wilayah Indonesia bagian barat lebih tinggi dibandingkan Indonesia bagian timur. Hal tersebut menunjukkan kurang meratanya pembangunan di wilayah di Indonesia.

Ketimpangan pendapatan mulai menurun dengan Ratio Gini Indonesia menunjukkan perbaikan dilihat dari turunnya angka rasio dari 0,391 menjadi 0,384 di tahun 2018. Sebagian besar provinsi menunjukkan indeks dibawah rata-rata nasional. Ketimpangan terendah terjadi pada Provinsi Bangka Belitung dengan gini rasio 0,272 sedangkan tertinggi terjadi di Provinsi D.I. Yogyakarta dengan gini rasio 0,440. Penurunan indeks gini ratio selaras dengan penurunan tingkat kemiskinan yakni dari 10,12% menjadi 9,66% di tahun 2018.

Sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan nasional, mayoritas provinsi di Indonesia mengalami penurunan tingkat kemiskinan kecuali Maluku Utara. Tingkat kemiskinan yang masih sangat tinggi dominan terjadi di wilayah Indonesia bagian timur seperti Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Gorontalo dengan tingkat kemiskinan di atas 15%. Sedangkan tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2018 (per-Agustus) mengalami penurunan dari 5,50% menjadi 5,34%. Capaian tersebut melampaui target APBN 2018 sebesar 5,4%. Penurunan jumlah pengangguran di Indonesia dipicu oleh semakin bertambahnya penyerapan jumlah tenaga kerja di sektor industri dan perdagangan seiring dengan munculnya sentra-sentra industri baru maupun industri kreatif di Indonesia.

Berdasarkan hubungan kedua indikator yakni pertumbuhan ekonomi dan pencapaian IPM tahun 2018, terdapat anomali pada enam provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, NTB, NTT, dan Kalimantan Barat dimana meskipun laju pertumbuhan ekonominya mengalami perlambatan dan berada di bawah rata-rata nasional, namun capaian IPM-nya cenderung mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor ekonomi mengalami kejenuhan dan membutuhkan investasi

baru, namun pemerintah telah berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program sosialnya seperti BOS, PKH, dan premi PBI untuk BPJS, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dipertahankan pada level dasar pada aspek pendidikan dan kesehatan.

ARUS KAS APBN ANTAR-REGIONAL DAN KESEHATAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2018

Dari analisis besaran arus kas penerimaan dan pengeluaran APBN antarwilayah tahun 2018, menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan sebagian besar disumbang oleh provinsi-provinsi yang memiliki kegiatan perdagangan dan industri jasa serta kegiatan ekspor impor dengan skala masif seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Banten. Sementara itu, penerimaan provinsi dengan kondisi defisit umumnya masih mengandalkan hasil sumberdaya alam dan bertumpu pada sektor hulu, seperti pada provinsi Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Selatan. Demikian pula sebagian besar daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan galian kurang memberikan kontribusi lebih terhadap penerimaan negara, terutama dari sektor pajak.

ARUS KAS APBN MENURUT REGIONAL TAHUN 2018

Regional	PENERIMAAN		PENGELUARAN		SELISIH
	Pajak	PNBP	K/L	TKDD	
Sumatera	83,31	9,51	99,65	205,98	-212,81
Jawa	1.342,04	387,85	1.188,21	248,12	293,56
Kalimantan	40,15	4,10	37,72	80,89	-74,36
Sulawesi	20,76	4,06	53,18	88,78	-117,14
Bali Nusra	16,37	2,47	28,71	48,59	-58,46
Maluku Papua	16,17	1,35	36,00	85,43	-103,91
TOTAL	**1.518,79**	**409,34**	**1.443,46**	**757,79**	**-273,12**

SUMBER: SPAN, 2018 (DIOLAH)

Ditinjau dari sisi pengeluaran negara, porsi besar masih dialokasikan untuk kawasan Jawa, Bali, dan Sumatera yang memiliki jumlah penduduk besar dan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan dan pariwisata. Namun demikian belanja pemerintah semakin meningkat untuk kawasan Indonesia Timur, meskipun jumlah penduduknya sedikit dan relatif jarang. Hal ini menunjukkan semakin besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan timur Indonesia tersebut.

Berdasarkan sebaran arus kas dana APBN, dapat diketahui bahwa untuk regional Jawa menyumbang surplus dana APBN yang didistribusikan kepada daerah-daerah lainnya yang mengalami defisit anggaran. Pemerintah banyak menggelontorkan dana dalam bentuk dana transfer ke wilayah Sumatera sejalan dengan banyaknya program-program untuk pengembangan kewilayahan, namun hal ini belum sebanding dengan peningkatan penerimaan negara yang diperoleh dari regional tersebut, sehingga perlu formulasi kebijakan fiskal yang tepat agar aliran dana APBN dapat bersifat lebih produktif untuk menarik investasi baru dan memunculkan pusat-pusat ekonomi di wilayah tersebut.

Dari sisi belanja daerah, pemerintah daerah (pemda) belum dapat mendukung program pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur, ini terlihat dari rasio belanja modal terhadap total belanja pada seluruh wilayah di Indonesia hanya berkisar 16-35%. Dari sisi rasio belanja pegawai pada sebagian besar wilayah berada pada kisaran 31-50%. Berdasarkan rasio

indikator yang ada, sebagian besar provinsi masih memiliki kesehatan pengelolaan keuangan yang belum optimal, baik itu dari sisi pendapatan daerah maupun dari sisi pemanfaatan dana melalui pengalokasian belanja daerah, sehingga upaya peningkatan kemandirian fiskal perlu untuk terus digali dari pemanfaatan potensi-potensi ekonomi daerah yang ada pada wilayah masing-masing. Selain itu, pentingnya pembangunan infrastruktur prioritas sangat penting untuk menurunkan biaya logistik dan distribusi, ditambah dengan optimalisasi program pengentasan kemiskinan yang harus lebih fokus di pedesaan melalui penggunaan Dana Desa dengan menguatkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan *cash to work* yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.

KINERJA PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA SERTA SINKRONISASI DENGAN BELANJA K/L

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan konsultasi antara pemda dengan Kementerian Keuangan, serta meningkatkan efektivitas monitoring, evaluasi dana analisis kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah, mulai 2017 penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui 172 KPPN yang berperan selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah kerjanya masing-masing.

Alokasi DAK Fisik dalam APBN 2018 sebesar Rp62,44 triliun terdiri dari (i) Rp61,68 triliun disalurkan secara bertahap, (ii) Rp328,81 miliar disalurkan secara sekaligus berdasarkan rekomendasi, dan (iii) Rp431,35 miliar disalurkan secara sekaligus. Total realisasi penyaluran DAK Fisik sampai dengan akhir TA 2018 adalah sebesar Rp58,15 Triliun atau 93,13% dari pagu sebesar Rp62,44 Triliun.

Penyaluran DAK Fisik Bertahap dilaksanakan pada 540 Pemda di 33 Provinsi (kecuali DKI

KETERKAITAN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA K/L, DAK FISIK DAN DANA DESA

	Kementerian dan Lembaga			DAK Fisik			Dana Desa		
	Kategori	Volume	Realisasi (miliar Rp)	Kategori	Volume	Realisasi (miliar Rp)	Kategori	Volume	Realisasi (miliar Rp)
1	Jalan Nasional	449.751,8 Km	24.082,50	Jalan Pemda	462.093 Km	15.870,00	Jalan Desa	71.653,5 Km	14.439,30
2	Irigasi	127.181 Ha	8.294,00	Pembangunan Jaringan Irigasi	1.012.803 Unit	1.044,90	Irigasi	813.807 Unit	652,7
3	Layanan Kesehatan	2.613.463 Layanan	500,9	Sanitasi	91.396 Unit	912,9	Sanitasi	867.741 Meter	81,6
4	Pasar	15.063 Unit	99,9	Pasar Rakyat	3.029 Unit	1.362,60	Pasar Desa	48.208 Unit	229,7
5	UMKM	1.130 Unit	102,9	Sentra Industri Kecil & Menengah	1.178 Unit	294,1	BUMDesa	591.507 Paket	1.135,60
6	SPAM Air Bersih	53.917 Unit	2.423,80	Pembangunan SPAM	171.732 Unit	245,9	Air Bersih	418.157 Unit	706,9
7	Rumah, Kawasan Permukiman	81.902 Unit	1.939,90	Pembangunan Rumah Swadaya	53.223 Unit	584,1	Rumah Layak Huni	161.544 Unit	2.217,60
8	Rumah Sakit (Sarana Kesehatan)	547 Unit	15,4	Puskesmas	91.603 Unit	9.000,80	Posyandu & Polindes	91.239 Unit	677,6

Sumber : OMSPAN, data diolah

Jakarta). Hingga akhir tahun 2018 penyaluran DAK Fisik bertahap mencapai Rp57,48 Triliun atau 93,20% dari pagu Rp61,68 Triliun

Sebagai satu kesatuan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan yang dilakukan oleh pemda harus sejalan dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Demikian pula pembangunan dibiayai melalui DAK Fisik dan Dana Desa. Dari berbagai kategori/bidang yang ada dan telah dialokasikan anggarannya baik oleh K/L maupun Pemda melalui DAK Fisik dan Dana Desa terdapat beberapa kategori/bidang yang dapat dikatakan selaras antara lain kategori/bidang yang terkait dengan Jalan, Irigasi, Sanitasi, Pasar, Sentra Industri Kecil dan Menengah, Air Minum, Rumah/Permukiman dan Kesehatan. Kegiatan DAK Fisik 2018 pada tujuh bidang sejalan dengan Bidang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018. Kegiatan DAK Fisik yang dapat dikatakan sejalan dengan pelaksanaan anggaran K/L, antara lain terdapat Bidang Jalan dengan output berupa jalan pemda, mendukung konektivitas dengan volume 462.093 Km senilai Rp15,87 Triliun. DAK Fisik Bidang Irigasi dengan output berupa Pembangunan Jaringan Irigasi dengan volume 1.012.803 Unit senilai Rp1,04 Triliun, mendukung program kedaulatan pangan. Bidang Sanitasi dengan output berupa terbangunnya Sarana Sanitasi dengan volume 91.396 unit senilai Rp912,9 Miliar, mendukung pengembangan kawasan industri. Bidang Pasar dengan output berupa Pembangunan Pasar Rakyat dengan volume 3.029 Unit senilai Rp1,36 Triliun, mendukung pengembangan kawasan ekonomi.

RESPON FISKAL PEMERINTAH

Pengembangan wilayah bertujuan untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi dalam meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, diharapkan Pemerintah Pusat dan pemda senantiasa memperhatikan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah dalam mengalokasikan dana (APBN dan APBD). Kemandirian fiskal daerah harus semakin ditingkatkan dengan upaya-upaya konstruktif, sehingga daerah makin mampu membiayai kebutuhan daerah. Disamping itu, sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan pemda sangat mendukung dalam merumuskan kebijakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam RKP 2018. Berdasarkan capaian kinerja perekonomian dan kesejahteraan di masing-masing regional, maka dapat dirumuskan respon fiskal pemerintah sebagai berikut:

1. SUMATERA

a. Kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara menggali potensi ekonomi daerah dengan memperhatikan karakteristik geografis dan potensi sumber daya di masing-masing daerah. Pemerintah perlu mendorong peningkatan sektor usaha yang dapat mendukung sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor jasa didukung pengembangan kawasan yang merupakan sektor dominan Sumatera.

b. Perlu upaya pemerintah untuk menurunkan

kesenjangan, khususnya kesenjangan antara wilayah barat dan timur Sumatera. Belanja pemerintah sebagian besar dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, dan fungsi pendidikan terutama bidang perekonomian dan pendidikan yang dapat meningkatkan IPM dan pertumbuhan ekonomi di regional Sumatera.

c. Dalam rangka memperbesar kapasitas perekonomian untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, langkah strategis telah dilakukan pemerintah melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan membuka peluang investasi yang lebih besar di daerah.

d. Selain itu, proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, jalur kereta api penting untuk menghubungkan daerah-daerah surplus dengan daerah-daerah minus sehingga dapat mengurangi biaya pertukaran, penyediaan sumber daya penunjang seperti pembangunan instalasi listrik dan penyediaan air bersih serta pembangunan pasar.

2. JAWA

a. Sebagai penyumbang utama ekonomi nasional, pengembangan Jawa diarahkan pada sektor potensial dan keunggulan wilayah berbasis industri serta peningkatan kualitas infrastruktur yang diupayakan untuk menurunkan kesenjangan antara wilayah utara dan selatan Jawa.

b. Selain itu, pembangunan disesuaikan dengan karakteristik geografis dan potensi sumber daya alam yang dimiliki yaitu: (1) Lumbung pangan nasional; (2) Pendorong sektor industri dan jasa nasional dengan pengembangan industri utama dan pendukung; (3) Salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia dengan pengembangan ekonomi kreatif; dan (4) Percepatan ekonomi berbasis maritim melalui pengembangan industri perkapalan dan pariwisata bahari.

c. Dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemda perlu mempermudah investasi pihak swasta (Non APBN/APBD). Investasi berupa pembangunan ifrastruktur seperti pembangunan bandara, jalan, ataupun pusat-pusat perdagangan/perkantoran yang secara tidak langsung akan banyak menyerap tenaga kerja. Adapun alokasi dari APBN/APBD selain untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga harus menyentuh potensi unggulan daerah setempat dengan konsep pembangunan dari hulu ke hilir sehingga komoditas unggulan daerah dapat segera terserap oleh pasar.

d. Pemberian stimulus fiskal berupa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai dan Subsidi Rastra dan beras program rastra maupun alokasi Dana Desa harus senantiasa dibangun dengan data yang valid sehingga penyaluran bantuan sosial maupun dana desa menjadi tepat sasaran dan efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Koordinasi

antara Pemerintah Pusat dan pemda menjadi sanggat vital dalam menyelaraskan program-program pemerintah pusat yang dijalankan di daerah melalui APBN dengan program-program yang juga dibuat oleh pemda dari Alokasi APBD.

3. KALIMANTAN

a. Untuk wilayah Kalimantan, pemerintah perlu mendorong pembangunan infrastruktur diupayakan untuk menurunkan kesenjangan intrawilayah, khususnya kesenjangan antara wilayah di daerah perbatasan dan dengan wilayah lainnya.

b. Melihat kondisi dan tantangan perekono mian di wilayah Kalimantan, pemda melalui APBD telah berupaya melalui berbagai kebijakan fiskal di daerah. Upaya dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara menggali potensi ekonomi daerah dengan membuka akses investasi bagi pihak swasta di Kalimantan. Upaya pemerintah yaitu penyediaan infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang handal sebagai pelaku-pelaku ekonomi. Penyediaan infrastruktur menjadi sangat penting untuk mendorong konektifitas antar wilayah khususnya di wilayah perbatasan, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Penyediaan Sumber Daya Manusia yang handal juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku ekonomi.

c. Pemda juga mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur termasuk peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan. Selain itu, alokasi dana fungsi pendidikan dan kesehatan dalam APBD makin ditingkatkan dan dipastikan efektif memberikan kontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang dapat bersaing dan sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Peningkatan alokasi APBN oleh Pemerintah Pusat untuk kedua bidang tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan porsi pengeluaran melalui dana transfer ke daerah. Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi yang ditujukan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah perbatasan juga ditingkatkan.

d. Sektor pertambangan yang masih menja di fokus dan ketergantungan pemda di Kalimantan perlu dikembangkan. Diversifikasi sudah saatnya dilakukan oleh setiap pemda dengan mempertimbangkan potensi lain yang ada di wilayahnya sehingga tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan. Sektor pertanian, industri, jasa dan pariwisata perlu mendapat perhatian lebih. Peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih dapat ditingkatkan sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan indikator kesejahteraan di wilayah tersebut dan mewujudkan wilayah tersebut sebagai lumbung pangan nasional. Untuk itu, guna mendukung pengembangan sektor tersebut diperlukan dukungan alokasi fiskal daerah maupun dari pemerintah pusat melalui DAK. Disamping itu juga dalam rangka mendukung program hilirasasi industri pengolahan kelapa

sawit dan pengembangan pariwisata dan mengingat luasnya geografis wilayah Kalimantan, pemerintah pusat dan daerah fokus membangun infrastruktur sarana dan prasarana transportasi baik jalur air maupun darat, disamping udara.

e. Optimalisasi penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah pusat melalui program-program pengentasan kemiskinan seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai dan Rastra yang tepat sasaran juga merupakan cara yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

4. SULAWESI

a. Arah pembangunan wilayah Regional Sulawesi tetap bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan yang menjadi keunggulan Pulau Sulawesi. Pengembangan di sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi serta pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi. Peningkatan peran di sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi untuk perdagangan ke luar Indonesia. Selain itu, pengembangan Kawasan Pariwisata diharapkan dapat mendorong peningkatan sektor jasa. Sedangkan peningkatan sektor industri pengolahan akan didorong dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao dan pengembangan industri barang dari rotan serta pembangunan industri pengolahan logam dasar dan non logam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

b. Untuk mengatasi berbagai persoalan fiskal dalam mencapai kemandirian ekonomi, secara garis besar respon fiskal wilayah Sulawesi ditunjukkan melalui peningkatan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prasyarat bagi tumbuh-kembangnya investasi terutama dari pihak swasta. Selanjutnya, perlu dilakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, terutama pada sektor ekonomi unggulan. Kemudian pemerintah dapat harus mengembangkan sektor yang selama ini belum secara optimal digarap yaitu pariwisata sebagai sektor potensial melalui integrasi perencanaan dan peningkatan alokasi anggaran sektor-sektor penggerak pariwisata seperti sektor penyediaan akomodasi dan makanan minum, sektor industri pengolahan, sektor informasi dan komunikasi dan sektor konstruksi.

5. BALI NUSRA

a. Pemerintah perlu tetap mendorong pengembangan potensi dan unggulan wilayah melalui pembagunan infrastruktur untuk menurunkan kesenjangan intra-wilayah Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara serta antar wilayah, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas wilayah kepulauan.

b. Melihat kondisi dan tantangan

perekonomian di Bali dan Nusa Tenggara, Pemerintah perlu mengembangkan regulasi, infrastruktur, dan kebijakan affirmasi bidang pertanian yang mendukung pariwisata (seperti industri agrowisata, penggunaan produk pertanian dan peternakan lokal) dan industri kreatif (seperti: usaha kuliner, barang souvenir dan usaha rintisan digital). Selain itu diperlukan pembangunan berkelanjutan infrastruktur khususnya masalah konektivitas antar wilayah seperti contoh dengan membangun bandara baru. Pertumbuhan ekonomi harus dapat diarahkan untuk pengurangan kemiskinan. Selain itu sinergitas program dan kegiatan dalam APBN dan APBD harus terus diupayakan sehingga berbagai instrumen fiskal seperti Program Keluarga Harapan, Dana Desa, Kredit Usaha Rakyat untuk UMKM dan Kredit Ultra Mikro dan Program pengurangan kemiskinan.

6. MALUKU PAPUA

a. Pemerintah perlu untuk terus mendorong akselerasi pengembangan infrastruktur guna mengurangi kesenjangan antarwilayah, khususnya wilayah pedalaman dan pesisir pantai.

b. Pengembangan wilayah Maluku Papua difokuskan pada potensi dan keunggulan wilayah ternyata belum mengalami peningkatan andilnya dalam perekonomian nasional. Hal ini dilihat dari masih besarnya defisit cash flow, yaitu di Provinsi Papua sebesar Rp102,61 triliun. Tingginya defisit tidak terlepas dari rendahnya PAD pada regional ini. Defisit ini menunjukkan bahwa 4 provinsi Maluku Papua masih membutuhkan subsidi silang dari daerah lain di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya.

c. Respon fiskal oleh Pemerintah Pusat difokuskan dalam pembangunan infrastruktur, terlihat dari tingginya alokasi belanja modal, adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia bagian timur. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah ini cukup beralasan, karena regional Maluku Papua masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan masyarakat Maluku Papua masih tinggi jika dibandingkan dengan regional lainnya, terutama Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain hal tersebut, Indeks Pembangunan Manusia untuk regional ini juga merupakan yang terendah dibandingkan dengan regional lainnya.

d. Pemerintah Pusat dalam respon fiskalnya, perlu melakukan sinergi dengan pemda untuk menentukan sektor-sektor mana yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Papua. Prioritas strategis yang perlu ditingkatkan lagi antara lain pengembangan infrastruktur, pengembangan pariwisata, stabilisasi kondisi sosial politik, pengembangan kapasitas SDM, pemanfaatan kondisi geografis, dan pemanfaatan sumber daya alam. Formulasi alokasi Dana Desa wilayah Maluku Papua, khususnya Papua dan Papua Barat, perlu mendapat perhatian khusus terutama pada besaran persentase

alokasi afirmasi, mengingat tingginya Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan masih tertinggalnya infrastruktur desa-desa di Papua.

KESIMPULAN

1. Perekonomian Indonesia tahun 2018 menunjukkan perbaikan dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi menjadi 5,17% dan tingkat inflasi terjaga yang relatif stabil di kisaran 3%. Perkembangan positif ini didukung dengan nilai indikator kesejahteraan yang lebih baik dari sebelumnya:
   a. Persentase penduduk miskin menurun menjadi 9,66% dari 10,12% pada tahun 2017.
   b. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 5,34% dari 5,50% pada 2017.
   c. IPM meningkat menjadi 71,39 dibanding tahun 2017 sebesar 70,81.
   d. Rasio Gini menurun menjadi 0,384 dari 0,391 pada tahun 2017.

   Walaupun indikator kesejahteraan menunjukkan peningkatan tetapi jika diteliti lebih mendalam maka indikator kesejahteraan masyarakat sejak 10 tahun yang lalu mengalami perlambatan pertumbuhan.

2. Provinsi dalam regional Jawa tetap menjadi kontributor terbesar untuk penerimaan negara karena merupakan pusat pemerintahan, bisnis dan kawasan industri. Kualitas penganggaran dan eksekusi belanja K/L menunjukkan peningkatan, tercermin dari realisasi belanja 2018 sebesar 99,47%, jauh lebih baik dibanding 2017 sebesar 93,9%.

3. Kemandirian keuangan daerah tahun 2018 masih menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini ditunjukan oleh 24 provinsi dengan rasio PAD kurang dari 21%. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan rasio PAD tertinggi. Sementara itu, regional Jawa berhasil mencapai rasio PAD tertinggi, sebesar 39%, sedangkan Maluku Papua memperoleh rasio terkecil sebesar 5%. Disamping itu, pertumbuhan PAD juga menunjukkan angka kurang menggembirakan, masih terdapat 20 provinsi dengan pertumbuhan PAD di bawah 0%. Kalimantan Timur berhasil membukukan pertumbuhan PAD tertinggi, yaitu sebesar 14%. Sedangkan di tingkat regional, Sulawesi merupakan regional dengan rasio pertumbuhan tertinggi yang mencapai 7%.

4. Dari sisi belanja, porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah tahun 2018 juga menunjukkan peningkatan jika dibanding 2017. Namun demikian, porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah menunjukan performa yang kurang baik dengan indikasi semakin banyak jumlah provinsi yang memiliki rasio belanja pegawai pada kisaran 41 s.d. 50%. Sebagian besar APBD digunakan untuk membiayai belanja pegawai mencapai 39,8% dari total belanja daerah, sedangkan untuk belanja modal

hanya teralokasi sebesar 21,9% dari total belanja daerah.

5. Kinerja penyaluran DAK Fisik mencapai Rp58,15 triliun atau 93,13% dari total pagu sebesar Rp62,43 triliun dengan capain output rata-rata mencapai 93,83%. Sementara itu, realisasi penyaluran dana desa mencapai Rp59,86 triliun atau mencapai 99,77% dengan persentase capaian output mencapai 87,07%.

6. Setiap regional memiliki sektor unggulan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh karakteristik geografis serta kebijakan arah pengembangan perekonomian di tiap regional. Adapun sektor unggulan untuk masing-masing regional adalah 1) sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang menjadi sektor unggulan di regional Sumatera dan Sulawesi; 2) sektor pertambangan dan penggalian untuk regional Kalimantan dan Maluku dan Papua; 3) sektor industri pengolahan untuk regional Jawa; dan 4) sektor pariwisata untuk regional Bali Nusra.

REKOMENDASI

1. Sinkronisasi proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan antara pempus dengan pemda sehingga program prioritas nasional yang telah dirumuskan oleh pempus dapat tercapai sesuai target. Dilakukan dengan berbagai strategi sebagai berikut:
   a. Penyederhanaan regulasi dan integrasi data perencanaan pembangunan di daerah ke dalam sistem teknologi informasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional.
   b. Meningkatkan peran serta pemda dalam perumusan program prioritas nasional yang tercantum dalam RKP.
   c. Pemberian insentif daerah bagi pemda dengan pengelolaan kinerja keuangan terbaik.
   d. Mengintegrasikan kebijakan pem bangunan daerah dengan kebijakan nasional berdasarkan perspektif pemberdayaan masyarakat dan kesinambungan pembangunan.
   e. Menyusun kerangka pembangunan jangka menengah di daerah secara komprehensif dengan mempertimbangan sektor unggulan dan kearifan lokal masing-masing daerah.
   f. Optimalisasi peran Musrenbang dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
   g. Dokumentasi dan validasi data yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Penetapan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu:
   a. Pemerintah Pusat: Mendorong peng gunaan teknologi informasi untuk peningkatan kapasitas produksi sektor dominan; Mendorong penggunaan energi baru terbarukan dalam proses produksi; Menyediakan sarpras

berbentuk bantuan pemerintah untuk sektor pertanian sehingga mendorong peningkatan produksi di regional Sumatera dan Sulawesi; Membuka pelatihan kewirausahaan, mempermudah akses terhadap instrumen permodalan, dan perumusan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan startup digital; dan Melakukan diversifikasi dan sekaligus ekstensifikasi jenis peminatan pada sekolah menengah vokasi yang berbasis teknologi informasi.

b. Pemerintah Daerah: Membuka pintu investasi dengan kemudahan perizinan usaha dan insentif pajak daerah; Memberikan perlindungan dan kepastian hukum pelaksanaan investasi; dan Mendirikan balai latihan kerja dengan pelatihan berbasis teknologi informasi untuk peserta usia produktif.

3. Penguatan tata kelola keuangan daerah melalui penyediaan anggaran yang proporsional sesuai dengan sektor unggulan dan potensi ekonomi wilayah yang dimiliki masing-masing daerah; memastikan pelaksanaan kegiatan secara proporsional sehingga tidak terjadi lagi penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun anggaran; dan Penguatan peran APIP dalam pengawasan pelaksanaan anggaran daerah.

4. Peningkatan kemandirian daerah melalui perumusan kebijakan ataupun regulasi sebagai berikut:
   a. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah melalui penetapan peraturan daerah yang mengatur diversifikasi subjek dan objek pajak daerah;
   b. Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah;
   c. Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah yang terkait dengan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah; dan
   d. Memberikan reward dalam bentuk insentif (tax holiday ataupun penurunan tarif) dan punishment berupa denda yang dinilai dari tingkat kepatuhan terhadap pembayaran pajak daerah.

5. Rekomendasi untuk meningkatkan perekonomian secara spesifik melalui pendekatan sektor unggulan dan kondisi fiskal pada masing-masing regional:
   a. Regional Sumatera: (a) Perbaikan jalur distribusi pemasaran hasil pertanian, pertambangan dan penggalian peningkatan infrastruktur perhubungan seperti jalan raya, jaringan kereta api, pelabuhan laut dan pelabuhan udara; (b) Pemenuhan infrastruktur pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan alokasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana, serta peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga pendidik dan kesehatan; (c) Memperluas target penerima bantuan sosial dan memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.
   b. Regional Jawa: Menciptakan iklim investasi kondusif melalui kepastian regulasi (misal penetapan tarif UMR/UMP/UMK secara win win solution),

kemudahan investasi, dan jaminan keamanan bagi para investor.

c. Regional Kalimantan: (a) Mengembang kan sektor perekonomian selain pertambangan dan penggalian yang selama ini menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi regional. Sektor tersebut antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata untuk mempersiapkan alternatif sumber PAD dalam jangka panjang; (b) Peningkatan infrastruktur transportasi untuk memperbesar kapasitas perekonomian regional; (c) Memastikan keterlibatan sektor swasta dan BUMN yang bergerak dalam bidang perkebunan, energi dan pertambangan untuk berperan dalam pemberdayaan masyarakat. (d) Pola kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha melalui pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibiity-CSR) untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di regional Kalimantan.

d. Regional Sulawesi: (a) Mendorong minat investor swasta menanamkan modal kepastian regulasi, kemudahan investasi, dan jaminan keamanan bagi para investor; (b) Membuka kawasan industri baru dengan prioritas tenaga kerja dan bahan baku lokal untuk industri pengolahan sehingga mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan tenaga kerja; (c) Peningkatan infrastruktur transportasi untuk memperbesar kapasitas perekonomian regional; (d) Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dengan memberikan prioritas terhadap penyediaan alokasi anggaran yang memadai oleh pemda.

e. Regional Bali Nusra: (a) Melakukan promosi pariwisata secara internasional melalui event olahraga otomotif berskala internasional selain MotoGP yaitu Asia Road Racing Championship, World Superbike, dan Formula 1; (b) Mempersiapkan masyarakat agar mampu mengembangkan UMKM dibidang ekonomi kreatif untuk mendukung sektor pariwisata dan kunjungan wisatawan mancanegara dalam gelaran event internasional di wilayah Bali Nusra; (c) Memperbanyak proyek pembangunan yang bersifat padat karya untuk memberikan lapangan kerja khususnya di Provinsi NTT.

f. Regional Maluku Papua: (a) Prioritas pembangunan infrastruktur yang dititikberatkan pada infrastruktur transportasi, jaringan komunikasi, ketersediaan energi listrik, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dan kualitas kehidupan masyarakat di regional Maluku dan Papua; (b) Mendorong investasi baru di sektor pertambangan dan perkebunan dengan memberikan kepastian hukum dan jaminan keamanan bagi para investor; (c) Meningkatkan rasio tenaga pendidik dan tenaga kesehatan terhadap

jumlah jumlah penduduk agar lebih proporsional; (d) Peningkatan peran komunitas masyarakat adat dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk mengurangi terjadinya konflik horizontal.

BAB 1

KONDISI MAKRO EKONOMI DAN FISKAL NASIONAL

hal. 28 ■ PERTUMBUHAN EKONOMI

hal. 35 ■ INFLASI

hal. 38 ■ KESEJAHTERAAN

hal. 46 ■ PELAKSANAAN APBN

hal. 56 ■ PELAKSANAAN APBD

Perekonomian global tahun 2018 diawali dengan rasa optimisme seiring perkembangan ekonomi global pada tahun 2017 yang tumbuh lebih kuat dari perkiraan. World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi global tahun 2018 akan meningkat 3,1 persen pada tahun 2018 sebagai akibat pemulihan berlanjut pada investasi, manufaktur, dan perdagangan, dan juga meningkatnya harga-harga komoditas yang akan memberikan keuntungan lebih bagi Negara-negara berkembang. Senada dengan itu, IMF pada bulan Januari memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global meningkat sebesar 3,9 persen pada tahun 2018 yang didorong oleh perbaikan ekonomi di beberapa Negara seperti Amerika Serikat (US) dan Tiongkok.

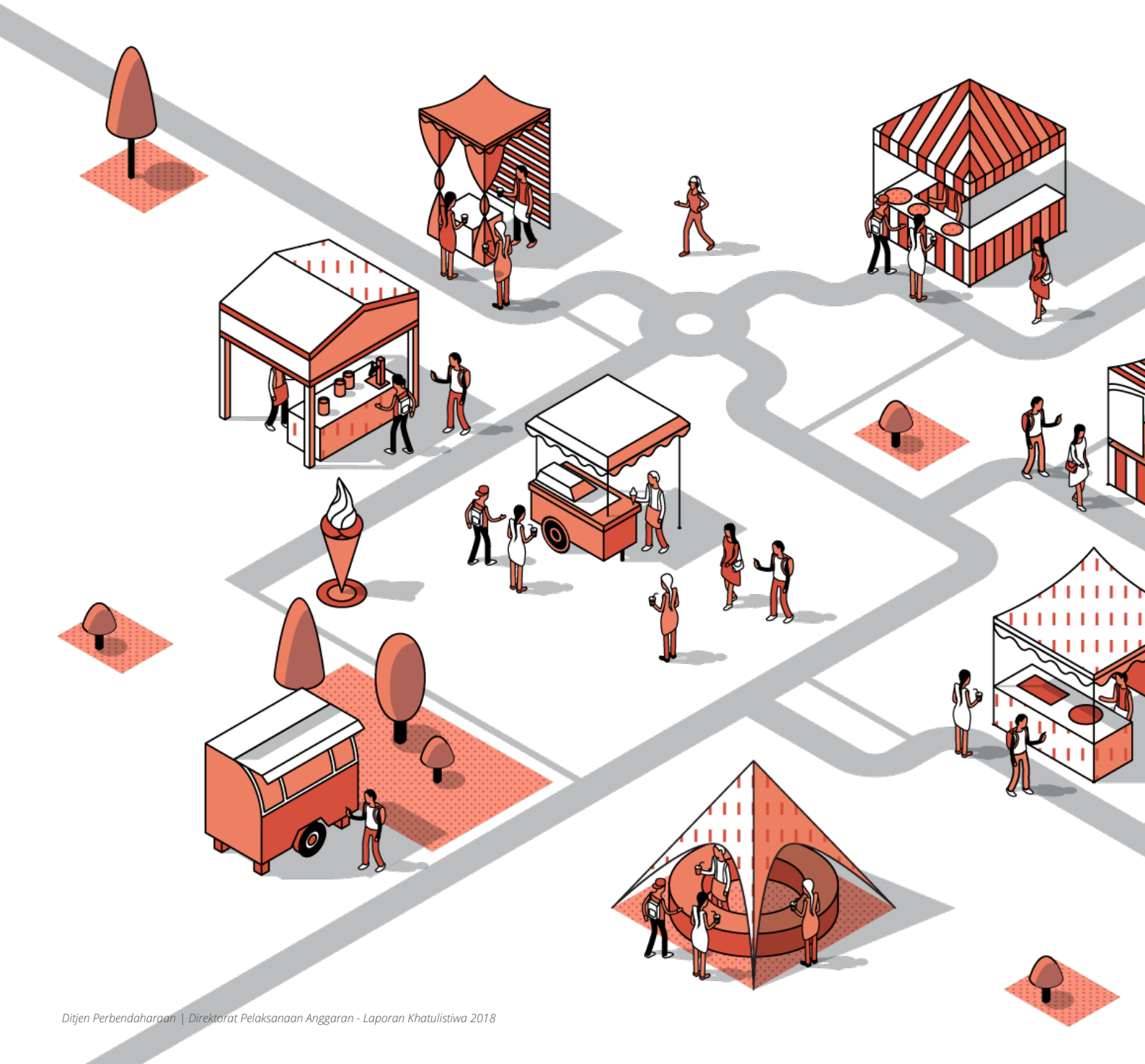

Perkembangan inflasi nasional pada akhir 2018 berada pada kisaran rendah, yakni pada angka 3,13%, berada di bawah target inflasi dalam asumsi makro APBN 2018. Capaian tersebut lebih rendah dibandingklan tingkat inflasi 2017 yakni 3,61%. Tercatat sejak kurun waktu 2015-2018 nilai inflasi selalu berada dibawah target. Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dan Bank Indonesia selama 2018 untuk menjaga tingkat inflasi pada kondisi aman.

Integrasi kebijakan fiskal pusat dan daerah tidak dapat terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Integrasi dilakukan melalui pembagian kewenangan pendanaan dalam mencapai berbagai target pembagunan termasuk prioritas nasional. Kebijakan fiskal yang baik dapat mengintegrasikan instrumen fiskal pusat dan daerah agar tidak tumpang tindih.

1. MAKROEKONOMI

1.I. PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL

Perekonomian global tahun 2018 diawalii dengan rasa optimisme seiring perkembangan ekonomi global tahun 2017 yang tumbuh lebih kuat dari perkiraan. World Bank memperkirakan pertumbuhan ekonomi global akan meningkat 3,1% pada tahun 2018 sebagai akibat pemulihan berlanjut pada investasi, manufaktur, dan perdagangan, dan juga meningkatnya harga-harga komoditas yang akan memberikan keuntungan lebih bagi Negara-negara berkembang. Senada dengan itu, IMF pada bulan Januari memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global meningkat 3,9% pada tahun 2018 yang didorong oleh perbaikan ekonomi di beberapa Negara seperti Amerika Serikat (US) dan Tiongkok.

Perekonomian global yang melaju di awal tahun mulai mengalami perlambatan sejak semester II 2018. Kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian utamanya dipicu oleh kebijakan-kebijakan perekonomian US, serta normalisasi kebijakan perdagangan US dengan Negara mitra, khususnya Tiongkok, yang tidak kunjung usai. Penurunan harga-harga komoditas sebagai dampak perang tarif harga dalam perdagangan internasional menyebabkan penurunan pendapatan di sejumlah Negara.

TABEL 1. TABEL PERTUMBUHAN EKONOMI GLOBAL

Negara	2015	2016	2017	2018
Dunia	3,5	3,3	3,8	3,7
Negara Maju	**2,3**	**1,7**	**2,4**	**2,3**
AS	2,9	1,6	2,2	2,9
Jepang	1,3	0,6	2,2	0,8
Eropa	2,1	2	1,9	1,8
Inggris	2,3	1,8	1,8	1,4
Negara Berkembang	**4,3**	**4,4**	**4,7**	**4,6**
Asia	6,8	6,5	6,5	6,5
Tiongkok	6,9	6,7	6,8	6,6
India	7,6	8	6,3	7,4
Indonesia	4,9	5,0	5,1	5,2
Timur Tengah & Afrika Utara	2,4	5,2	2,2	2,4
Amerika Latin	0,3	-0,6	1,3	1,1

Sumber : BPS, Laporan Perekonomian Indonesia 2018 Bank Indonesia (diolah)

Ketegangan hubungan perdagangan antara US dengan mitranya dimulai sejak awal 2018, yaitu ketika US mulai memberlakukan tarif impor pada panel surya dan mesin cuci, yang dilanjutkan dengan pemberlakuan tarif impor terhadap baja dan aluminium dari Eropa, Kanada, dan Meksiko pada bulan Juli, yang mendorong aksi retaliasi dari negara-negara tersebut. Sementara ketegangan dengan Tiongkok dimulai ketika US mulai mengumumkan rencana pengenaan tarif impor terhadap produk impor Tiongkok senilai USD250 Miliar. Atas kebijakan US tersebut, Tiongkok juga memberlakukan tarif impor terhadap produk impor dari US senilai USD110 Miliar. Penurunan aktivitas ekonomi sebagai dampak ketegangan atas perang dagang tersebut mendorong penurunan sebagian besar harga komoditas internasional. Penurunan harga komoditas tersebut sangat berpengaruh pada neraca perdagangan sebagian Negara yang mengandalkan ekspor komoditas.

Kecuali US, perekonomian Negara maju secara agregrat mengalami perlambatan ekonomi. Perekonomian Negara maju hanya mampu tumbuh 2,3% pada 2018, lebih rendah dari pertumbuhan 2017 sebesar 2,4%. Pertumbuhan ekonomi di US dipicu oleh stimulus fiskal yang cukup besar dari

pemerintah US melalui kebijakan pengurangan pajak dan ekspansi belanja yang mendorong kinerja perusahaan meningkat yang pada gilirannya mengurangi angka pengangguran di US. Peningkatan pendapatan pekerja mendorong peningkatan konsumsi dan investasi di US. Sebaliknya, negara-negara maju seperti negara di kawasan Eropa, Inggris serta Jepang tidak mampu mempertahankan tren positif di 2017.

Pertumbuhan ekonomi di Kawasan Eropa tahun 2018 melambat disebabkan karena aktifitas ekspor yang melemah. Pelemahan tersebut seiring dengan modernisasi pertumbuhan mitra dagang kawasan Eropa serta tensi perdagangan yang penuh ketidakpastian. Pelemahan ekonomi kawasan eropa juga disebabkan oleh pelemahan permintaan domestik sebagai akibat program konsolidasi fiskal di berbagai Negara kawasan Eropa yang berdampak pada penekanan konsumsi dan investasi.

Seperti halnya kawasan Eropa, laju pertumbuhan Negara Jepang juga mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Tercatat ekonomi Jepang hanya mampu tumbuh 0,8% lebih rendah dibanding pertumbuhan 2017 sebesar 1,9%. Perlambatan ekonomi Jepang setidaknya disebabkan berkurangnya stimulus fiskal pemerintah yang berdampak pada berkurangnya investasi pemerintah. Rentetan bencana alam seperti gempa bumi, longsor, banjir hingga topan dahsyat di sepanjang musim panas turut serta mengganggu roda perekonomian Jepang dengan terputusnya distribusi logistik dan pariwisata di Jepang. Pelemahan ekspor pada triwulan IV yang dibarengi dengan peningkatan impor sebagai akibat lonjakan harga energi menambah keterpurukan ekonomi Jepang di 2018.

Pelemahan ekonomi juga melanda negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang tumbuh 4,6%, melambat dibanding 2017 yang 4,7%. Perlambatan ekonomi negara-negara berkembang salah satunya didorong oleh perlambatan ekonomi Tiongkok. Perekonomian Tiongkok tumbuh 6,6% ditahun 2018, menurun dibanding 2017 yang 6,8%. Perlambatan ekonomi Tiongkok dipengaruhi oleh kebijakan *deleveraging* yang makin ketat serta memburuknya hubungan dagang dengan US. Sebaliknya, India mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2018 sebesar 7,4% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 6,3%. Kuatnya pertumbuhan di India dipicu oleh meningkatnya permintaan domestik dan investasi. Senada dengan itu, kinerja ekonomi Indonesia 2018 juga mengalami peningkatan tipis dari 5,1% menjadi 5,2%.

1.II. PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA

Ditengah kondisi perekonomian global yang mengalami perlambatan di 2018, kondisi perekonomian Indonesia mampu bertahan untuk tetap solid. Melanjutkan tren positif sejak tahun 2015, pertumbuhan ekonomi 2018 berada di angka 5,17%, meningkat tipis dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,07%. Peningkatan tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah

GAMBAR 1. TREN PERTUMBUHAN PDB INDONESIA (PERSEN) TAHUN 2018

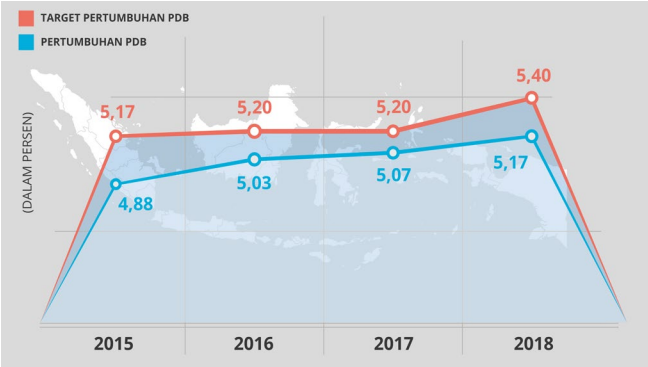

Sumber : BPS (diolah)

dan Bank Indonesia untuk menjaga inflasi pada titik aman. Terjaganya inflasi mendorong peningkatan konsumsi masyarakat sebagai variabel terbesar dalam struktur pembentuk PDB Indonesia dari sisi permintaan. Disisi lain pendapatan masyarakat yang membaik turut serta mendorong peningkatan konsumsi dan investasi seiring dengan keberlanjutan program pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional. Beberapa even penting selama 2018 seperti Asian Games di Jakarta dan Palembang, penyelenggaraan pertemuan tahunan *International Monetary Fund-World Bank*, serta penyelenggaraan pilkada serentak dan persiapan pemilu legislatif dan presiden mendorong perkembangan ekonomi nasional tumbuh.

Walaupun secara agregrat perkembangan ekonomi nasional meningkat, namun belum berhasil mencapai target pertumbuhan sebagaimana tercantum dalam asumsi makro APBN 2018. Hal tersebut melanjutkan tren tahun-tahun sebelumnya yang selalu dibawah target pertumbuhan nasional. Kondisi perekonomian global yang tidak menentu dalam bebeberapa tahun terakhir mempunyai andil dalam perkembangan ekonomi nasional. Hal tersebut berdampak pada pencapaian perekonomian yang kurang optimal. Beberapa kebijakan moneter dan fiskal yang dilaksanakan pemerintah dan BI belum mampu mendongkrak perekonomian secara signifikan.

Konsentrasi ekonomi nasional sampai dengan saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dimana kontribusi Regional Jawa terhadap PDB mencapai 58,48%, disusul Sumatera dengan kontribusi 21,58%. Penguatan ekonomi di level nasional merupakan kontribusi atas kinerja perekonomian wilayah. Perekonomian di regional Sumatera dan Jawa mengalami peningkatan yang cukup baik, bahkan di regional Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan yang tertinggi dari 4,89% di 2017 menjadi 6,99% di 2018.

Permintaan domestik yang kuat menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi di Jawa dan Sumatera. Pertumbuhan Jawa juga

GAMBAR 2. DISTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL

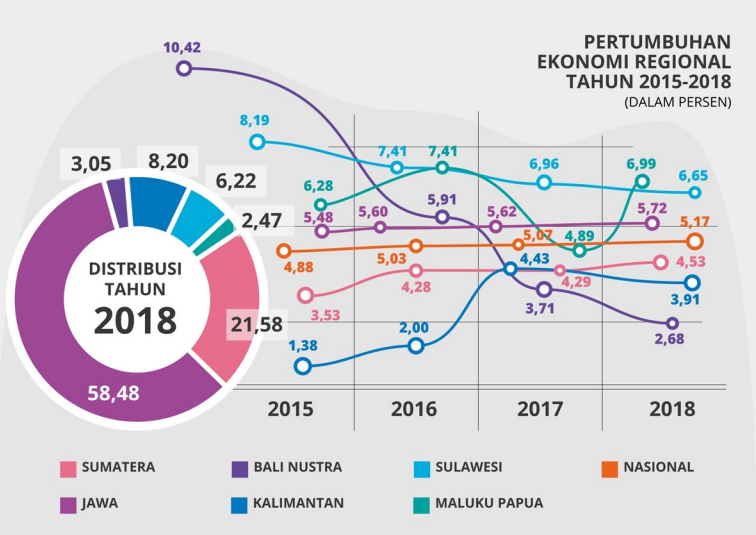

Sumber : BPS (diolah)

ditopang oleh membaiknya kinerja ekspor seiring dengan perkembangan industri pengolahan di Pulau Jawa. Sementara itu, peningkatan ekonomi di regional Maluku dan Papua didorong oleh peningkatan kinerja ekspor tambang di Papua, yang merupakan komoditas utama di Papua. Namun demikian, ketergantungan yang besar terhadap sektor pertambangan dan penggalian akan cukup riskan melihat harga komoditas pertambangan yang tidak stabil dalam beberapa tahun terakhir serta ketersediaanya yang terbatas. Kebijakan BBM satu harga yang telah dijalankan pemerintah khususnya di daerah Papua turut mendongkrak perekonomia Papua dari sisi konsumsi rumah tangga. Sementara peningkatan di Provinsi Maluku Utara lebih disebabkan karena peningkatan pada sektor perdagangan.

Sebaliknya, regional Bali Nusra tercatat mengalami pertumbuhan yang terus menurun. Pemicu utamanya adalah bencana gempa dan tsunami di NTB yang menyebabkan perekonomian NTB mengalami pertumbuhan minus 4,56% di tahun 2018. Selain Regional Bali Nusra, beberapa wilayah mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat. Pada regional Kalimantan dan Sulawesi, keseluruhan Provinsi lingkup regional tersebut tercatat memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Di Kalimantan, perlambatan disebabkan karena penurunan kinerja ekspor pertambangan batubara sebagai akibat harga yang menurun serta belum adanya penetapan tambahan kuota produksi batubara. Sementara perlambatan di Sulawesi lebih disebabkan oleh melambatnya investasi sebagai akibat perlambatan pada sektor konstruksi. Penurunan produksi padi dan jagung dan penurunan pertumbuhan penumpang khususnya penerbangan domestik di Sulawesi Utara menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perlambatan ekonomi di Sulawesi Utara. Sementara bencana tsunami disertai likuifaksi menyebabkan perlambatan ekonomi di Sulawesi Tengah. Secara umum dari 34 Provinsi, 3 Provinsi memiliki pertumbuhan ekonomi dibawah

GAMBAR 3. PETA PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL

Sumber : BPS (diolah)

3%, yakni Provinsi Riau, Kalimantan Timur dan NTB. Sementara tiga provinsi memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi diatas 7% yakni Provinsi Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Papua.

1.II.A. PDB ATAS DASAR PENGELUARAN/ PERMINTAAN

Sebagai Negara berkembang, konsumsi rumah tangga menjadi penyumbang terbesar perekonomian. Tercatat kontribusi konsumsi rumah tangga terhadap PDB 2018 sebesar 56,96%, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 57,37%. Sementara investasi melalui pembentukan modal tetab Bruto (PMTB) dan inventori masih menjadi penyumbang terbesar terhadap PDB setelah konsumsi rumah tangga.

Hampir semua variabel komponen pengeluaran pembentuk PDB nasional mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Satu-satunya yang mengalami penurunan adalah net ekspor impor. Kenaikan ekspor Indonesia tidak sebesar kenaikan impor pemerintah. Dibanding tahun 2017, kenaikan impor mecapai Rp236,53 Triliun atau 12,04%. Sebagian besar impor pemerintah merupakan impor non migas, dengan proporsi 72% terhadap total impor. Permintaan domestik yang tinggi menjadi pemicu meningkatnya nilai impor. Peningkatan impor terjadi di semua kategori, yakni bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi. Lebih dari 70% impor non migas merupakan impor dalam bentuk bahan baku.

Peningkatan aktivitas produksi yang tinggi seiring dengan perkembangan industri tanah air mendorong peningkatan kebutuhan bahan baku industri seperti besi baja, bahan kima organik, pakan ternak, dan emas, serta suku cadang dan peralatan untuk barang modal. Sementara peningkatan impor barang modal terutama pada mesin dan perlengkapan industri maupun konstruksi.

Iklim usaha yang kondusif serta stabilitas makroekonomi nasional menguatkan keyakinan para pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan PMTB dan inventori tahun 2018 dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya. Secara agregrat pertumbuhan PMTB 2018 sebesar 6,67% lebih tinggi dari capaian 2017 (6,15%), sedangkan inventori meningkat sangat signifikan pada tahun 2018 menjadi sebesar 55,55% dibandingkan tahun sebelumnya minus 4,88%. Pertumbuhan tersebut dipicu oleh peningkatan pertumbuhan investasi mesin dan perlengkapan yang tumbuh 19,53% dibanding periode tahun sebelumnya 9,52%. 74% investasi yang

GAMBAR 4. GRAFIK DISTRIBUSI DAN PERTUMBUHAN PDB SISI PERMINTAAN (PERSEN)

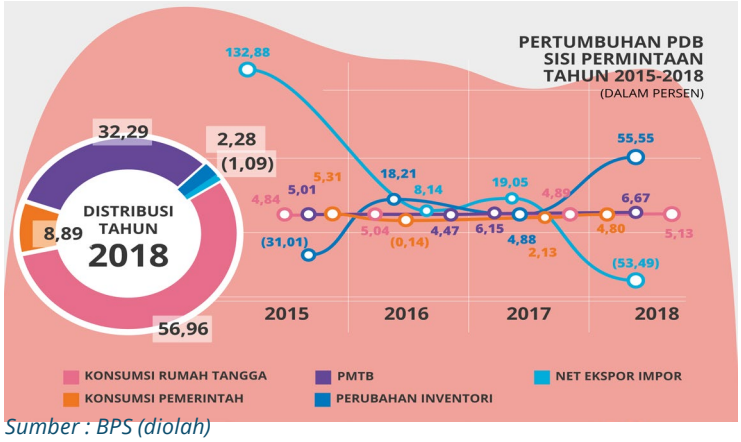

Sumber : BPS (diolah)

dilakukan masyarakat, pemerintah maupun swasta merupakan investasi dalam bentuk bangunan. Peningkatan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah selama beberapa tahun terakhir dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

Mencermati beberapa hal tersebut memperlihatkan bahwa perekonomian Indonesia masih sangat bergantung pada sektor konsumsi. Hal tersebut tentunya mamberikan konsekuensi tersendiri yang juga perlu mendapat perhatian. Konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan daya beli masyarakat. Sementara daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan masyarakat dan kondisi makroekonomi salah satunya inflasi. Oleh sebab itu penting bagi pemerintah untuk terus berupaya menjaga tingkat stabilitas pendapatan masyarakat dengan menjaga iklim dunia usaha serta ketersedian lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Sementara dari sisi inflasi, perlu pertimbangan yang matang atas beberapa kebijakan yang memiliki dampak signifikan terhadap kenaikan inflasi seperti kenaikan tarif dasar listrik, serta BBM, dengan terus berupaya memperlancar jalur distribusi logistik khususnya di wilayah Kawan Indonesia Timur (KTI).

1.II.B. PDB ATAS DASAR LAPANGAN USAHA / PENAWARAN

Kinerja ekonomi sektoral tahun 2018 masih didominasi oleh 5 sektor utama yang memiliki kontribusi paling besar terhadap PDB, yakni sektor industri pengolahan; sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (perdagangan); sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor konstruksi (pertanian); dan sektor pertambangan dan penggalian. Yang menarik adalah pergeseran sektor pertanian dari sektor terbesar kedua menjadi ketiga, sementara sektor perdagangan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar kedua. Walaupun keduanya mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibanding 2017, namun pertumbuhan sektor perdagangan tercatat lebih baik. Shifting sektor ekonomi tersebut disebabkan karena sektor perdagangan lebih menjanjikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, seiring dengan makin berkembangnya *e-commerce*/jual beli *online*. Sementara sektor pertanian yang pertumbuhannya semakin lambat sebagai akibat keterbatasan lahan, serta kebijakan-kebijakan impor komoditas pangan yang menyebabkan harga-harga komoditas jatuh.

Perkembangan ekonomi Nasional berdasarkan Lapangan Usaha didorong oleh penguatan beberapa sektor yang mengalami pertumbuhan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pada kelompok sektor primer, penguatan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan banyak ditopang oleh membaiknya produksi pertanian, peternakan dan perikanan di sejumlah wilayah di tanah air. pada sektor pertanian, puncak panen raya di beberapa wilayah serta kondisi cuaca yang lebih kondusif dibandingkan tahun 2017 menjadi faktor yang mendukung pertumbuhan di sektor pertanian. Selain itu, bantuan pemerintah kepada masyarakat dan pemda yang dialokasikan dalam APBN 2018 untuk peningkatan sarana

dan prasarana pertanian, bantuan benih, dan pengembangan teknologi pertanian turut serta mendongkrak perkembangan ekonomi di sektor pertanian. Sementara pada sektor perikanan, kebijakan pemberantasan *illegal fishing* yang digalakkan Kementerian Kelautan dan Perikanan menjadi salah satu faktor yang mendongkrak sektor perikanan. Faktor lain yang mendukung adalah peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Tercatat tahun 2018 kinerja sektor perikanan tumbuh 10,63%.

Sektor primer lainnya yakni sektor pertambangan dan penggalian juga mengalami kenaikan dibanding 2017. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tercatat 2,16%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan 2017 sebesar 0,66%. Peningkatan sektor pertambangan didukung oleh peningkatan produksi pertambangan minyak, gas dan panas bumi sebesar 17,55%, pertambangan batubara dan lignit sebesar 24,09%, serta pertambangan bijih logam sebesar 18,02%.

Pada sektor sekunder, pertumbuhan ditopang pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil sepeda motor yang menguat sebesar 4,97%, lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya 4,46%. Peningkatan permintaan domestik berkorelasi positif terhadap peningkatan aktivitas perdagangan. Beberapa even berskala internasional maupun nasional seperti Asian Games, pertemuan tahunan IMF-WB serta pilkada serentak turut menopang peningkatan sektor perdagangan.

Sementara itu, kinerja ekonomi sektor industri pengolahan 2018 sedikit mengalami perlambatan dibanding kinerja 2017.

TABEL 2. PDB LAPANGAN USAHA TAHUN 2015 - 2018

LAPANGAN USAHA	DISTRIBUSI				LAJU PERTUMBUHAN			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,49	13,48	13,15	12,81	3,75	3,37	3,87	3,91
Pertambangan dan Penggalian	7,65	7,18	7,58	8,08	-3,42	0,95	0,66	2,16
Industri Pengolahan	20,99	20,52	20,16	19,86	4,33	4,26	4,29	4,27
Pengadaan Listrik dan Gas	1,13	1,15	1,19	1,19	0,90	5,39	1,54	5,47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0,07	0,07	0,07	0,07	7,07	3,60	4,60	5,46
Konstruksi	10,21	10,38	10,38	10,53	6,36	5,22	6,80	6,09
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	13,30	13,19	13,02	13,02	2,54	4,03	4,46	4,97
Transportasi dan Pergudangan	5,02	5,20	5,41	5,37	6,71	7,45	8,49	7,01
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,96	2,93	2,85	2,78	4,31	5,17	5,39	5,66
Informasi dan Komunikasi	3,52	3,62	3,78	3,77	9,70	8,88	9,63	7,04
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,03	4,19	4,20	4,15	8,58	8,93	5,47	4,17
Real Estate	2,84	2,83	2,81	2,74	4,11	4,69	3,66	3,58
Jasa Perusahaan	1,65	1,71	1,75	1,80	7,69	7,36	8,44	8,64
Adm.Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wajib	3,90	3,84	3,67	3,65	4,63	3,20	2,06	7,02
Jasa Pendidikan	3,36	3,37	3,28	3,25	7,33	3,84	3,70	5,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,07	1,06	1,06	6,69	5,16	6,84	7,13
Jasa lainnya	1,65	1,70	1,76	1,81	8,08	8,01	8,73	8,99
PDRB	100	100	100	100	4,88	5,03	5,07	5,17

SUMBER : BPS (DIOLAH)

Pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan tahun 2018 sebesar 4,27%, turun 0,02% dibanding pertumbuhan 2017. Pertumbuhan sektor industri pengolahan ditopang oleh perkembangan sektor industri tekstil dan pakaian jadi serta industri kulit yang tumbuh diatas 10%. Industri lain yang mengalami kinerja lebih baik adalah industri pengolahan tembakau, industri kayu, industri barang galian bukan logam, industri logam, industri mesin dan perlengkapan, industri alat angkutan serta industri pengolahan lainnya. Sementara sektor lainnya mengalami perlambatan dengan perlambatan terendah pada industri kimia, farmasi dan obat.

Pergeseran/*shifting* struktur ekonomi tidak hanya pada sektor primer dan sekunder namun pada beberapa tahun kebelakang juga merambah ke sektor tersier. Sektor jasa mengalami pertumbuhan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir, tercatat kenaikannya lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan sektor primer dan sekunder. Selama kurun waktu 2000-2018 kinerja sektor jasa konsisten meningkat sementara kinerja sektor primer dan sekunder cenderung mengalami pertumbuhan yang lebih lambat. Keterbatasan lapangan pekerjaan utama mendorong masyarakat untuk mencari alternatif pekerjaan, salah satunya di sektor jasa. Secara karakter, sektor jasa merupakan penghubung antar beberapa sektor serta penghubung antara konsumen dan pemilik modal. Sektor yang mendapatkan input dari sektor jasa antara lain sektor pertanian, pertambangan, manufaktur dan sektor jasa lainnya.

2. INFLASI

Perkembangan inflasi nasional pada akhir 2018 berada pada kisaran rendah, yakni pada angka 3,13%, berada di bawah target inflasi dalam asumsi makro APBN 2018. Capaian tersebut lebih rendah dibandingklan tingkat inflasi 2017 yakni 3,61%. Tercatat sejak kurun waktu 2015-2018 nilai inflasi selalu berada dibawah target. Hal tersebut tidak lepas dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dan Bank Indonesia selama 2018 untuk menjaga tingkat inflasi pada kondisi aman.

GAMBAR 5. TREN INFLASI TAHUN 2014-2018 (PERSEN)

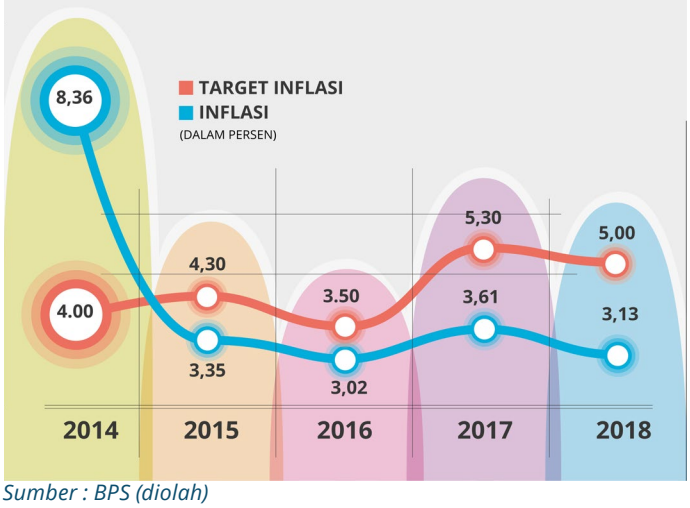

Sumber : BPS (diolah)

Menurut Bank Indonesia, inflasi nasional yang berada pada kisaran rendah dipengaruhi oleh faktor global maupun domestik. Dari global, inflasi yang rendah dipengaruhi oleh harga pangan global yang menurun, yang kemudian berpengaruh positif terhadap terkendalinya harga pangan domestik. Sementara dari sisi domestik, permintaan yang terkendali menyebabkan inflasi berada pada kondisi yang terus menurun. Beberapa faktor domestik lainnya yang turut berpengaruh adalah perbaikan transparansi pembentukan

GAMBAR 6. GRAFIK TREN BULANAN PERKEMBANGAN KOMPONEN INFLASI TAHUN 2017-2018

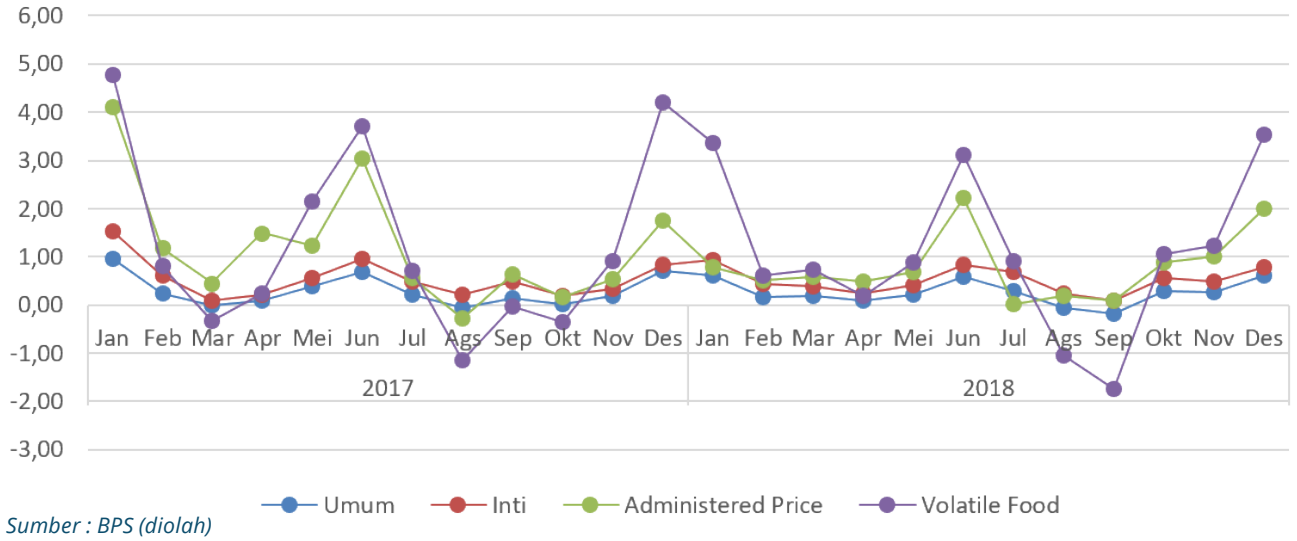

Sumber : BPS (diolah)

harga pangan di tingkat konsumen, seperti dengan adanya Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, serta distribusi dan logistik yang lebih lancar.

Untuk menggambarkan faktor yang berpengaruh terhadap inflasi secara fundamental, BPS mengelompokkan inflasi berdasarkan diagregrasi inflasi, meliputi 3 jenis, yakni inflasi inti, *Volatile Food*/VF (Inflasi komponen bergejolak) dan *Administered Price* (komponen harga yang diatur pemerintah). Inflasi inti merupakan komponen inflasi yang cenderung persisten dalam pergerakan inflasi, seperti interaksi permintaan-penawaran, nilai tukar, harga komoditi internasional maupun ekspektasi inflasi dari pedagang dan konsumen. VF adalah inflasi yang dipengaruhi *shocks* dalam kelompok makanan, seperti panen, gangguan alam atau faktor perkembangan harga komoditas. Sementara *administered price* adalah inflasi yang disebabkan *shocks* akibat kebijakan pemerintah, seperti kenaikan BBM dan tarif dasar listrik.

Inflasi inti pada akhir 2018 berada pada level 3,07%. Catatan positif tersebut dipengaruhi oleh kemampuan respon penawaran atas kenaikan permintaan, sehingga tidak terlalu berdampak pada pergerakan harga-harga. Depresiasi terhadap nilai tukar rupiah sebagai akibat penguatan kurs dollar serta penurunan kinerja ekspor impor pada tahun 2018 hanya berdampak minimal terhadap inflasi. Beberapa faktor tersebut menyebabkan inflasi inti hingga akhir 2018 tetap terjaga.

Pada komponen VF, hingga 2018 terjaga pada level 3,39%. Terkendalinya inflasi pada komponen VF banyak dipengaruhi oleh membaiknya pasokan pangan dari dalam maupun luar negeri, serta perbaikan jalur distribusi logistik yang berhasil menekan ongkos distribusi sehingga inflasi tertahan pada level aman. Selain itu pemerintah juga melakukan intervensi melalui kebijakan pengawasan dan pengendalian harga serta koordinasi yang intensif antara Bank Indonesia, Pemerintah Pusat serta Pemda. Kenaikan inflasi VF sudah terjadi pada awal tahun paska

TABEL 3. INDEKS HARGA KONSUMEN TAHUN 2017-2018 (PERSEN)

KOMPONEN INDEKS HARGA KONSUMEN	2017	2018
Bahan Makanan	1,26	3,41
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	4,1	3,91
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	5,14	2,43
Sandang	3,92	3,59
Kesehatan	2,99	3,14
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	3,33	3,15
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	4,23	3,16
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,30	13,19
Transportasi dan Pergudangan	5,02	5,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,96	2,93
Informasi dan Komunikasi	3,52	3,62
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,03	4,19
Real Estate	2,84	2,83
Jasa Perusahaan	1,65	1,71
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,90	3,84
Jasa Pendidikan	3,36	3,37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,07	1,07
Jasa lainnya	1,65	1,70
PDRB	100	100

SUMBER : BPS (DIOLAH)

tahun baru sebagai akibat kenaikan harga cabai, bawang merah serta sayuran. Kenaikan berikutnya terjadi pertengahan tahun karena hari raya Idul Fitri, serta pada akhir tahun (November-Desember) terutama menjelang Natal dan tahun baru, sebagai akibat lonjakan pada kebutuhan bahan makanan.

Inflasi komponen *administered price* selama kurun waktu 2018 berada pada level 3,36%, jauh lebih baik dibanding kondisi pada tahun 2017. Hal tersebut didorong oleh kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan BBM. Tidak seperti tahun sebelumnya yang terjadi berapa kali kenaikan TDL selama 2017, selama 2018 pemerintah tidak menaikkan TDL. Sementara kebijakan kenaikan bahan bakar non subsidi pada Juli dan Oktober 2018 tidak terlalu berdampak terhadap inflasi nasional.

Data pergerakan komponen IHK menunjukkan setidaknya ada dua variabel komponen yang mengalami perubahan signifikan pada tahun 2018. Pertama adalah komponen bahan makanan yang melonjak dibanding 2017. Komponen bahan makanan berada pada level 3,41%, jauh lebih tinggi dibanding 2017 yang hanya 1,26%. Yang kedua adalah penurunan yang juga signifikan pada komponen perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar menjadi 2,43% dibanding 2017 yang sebesar 5,14%.

GAMBAR 7. PETA PERSEBARAN INFLASI REGIONAL TAHUN 2018

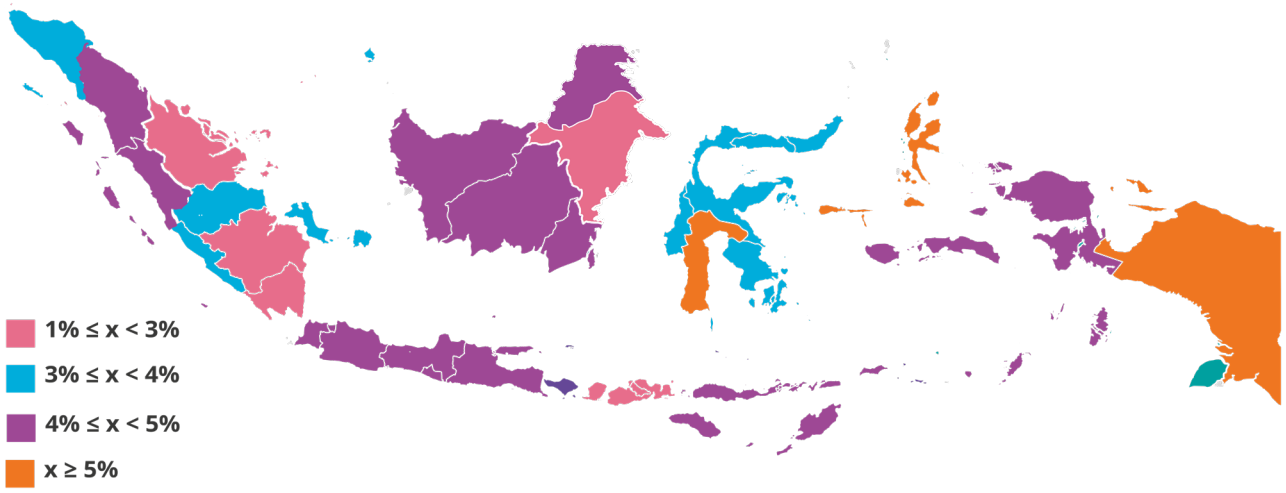

Sumber : Laporan Perekonomian Indonesia 2018 Bank Indonesia

2.I. PERKEMBANGAN INFLASI REGIONAL

Perkembangan inflasi di beberapa wilayah di Indonesia mengalami kondisi berbeda-beda. Sebagian besar wilayah Sumatera dan Jawa memiliki tingkat inflasi dibawah inflasi nasional. Tingkat inflasi terendah Sumatera di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1,2%, sementara tertinggi pada provinsi Jambi yang pada level 3%. Pada regional Jawa, tingkat inflasi terendah tercatat pada Provinsi Jawa Timur dan DIY sebesar 2,7%, sedangkan inflasi tertinggi di Provinsi Jawa Barat sebesar 3,5%. Jakarta sebagai Provinsi yang memiliki kontribusi besar terhadap inflasi nasional tercatat juga pada level aman walaupun berada diatas tingkat inflasi nasional, yakni 3,3%.

3. PERKEMBANGAN INDIKATOR KESEJAHTERAN

3.I. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pergeseran paradigma pembangunan kini tidak hanya berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, namun juga pembangunan kualitas hidup manusia melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan dan kehidupan yang layak. Peran SDM teramat penting karena selain sebagai objek/sasaran pembangunan, namun juga sebagai subyek utama pembangunan. Tentunya keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh SDM yang berkualitas dan kompetitif terhadap segala tantangan perkembangan global maupun domestik.

Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan fiskal tahun 2018 diarahkan dalam rangka pemantapan pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan yang berkeadilan. Dua hal penting dalam kebijakan fiskal pemerintan adalah bagaimana fiskal pemerintah diarahkan dalam hal, pertama: peningkatan pertumbuhan nasional di segala bidang, kemudian yang kedua adalah berkeadilan, dalam artian hasil pembangunan dapat dinikmati secara merata di seluruh wilayah serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Pada akhirnya, output dan *outcome* pembangunan nasional akan berdampak pada peningkatan kualitas SDM dari sisi pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari peningkatan pendapatan masyarakat.

GAMBAR 8. PERKEMBANGAN IPM TAHUN 2014-2018

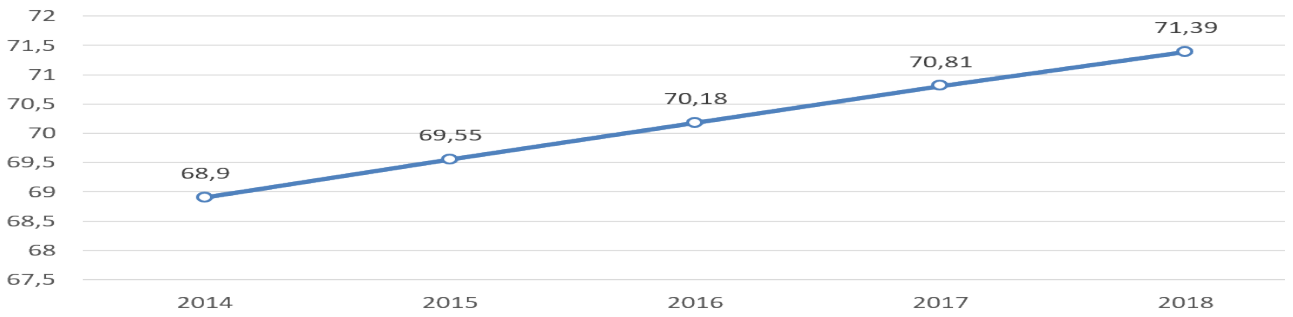

SUMBER: BPS, 2019

Keberhasilan pembangunan manusia diukur melalui IPM. Konsep dalam IPM menggunakan pendekatan 3 dimensi dasar, yakni harapan hidup saat lahir (dimensi kesehatan), harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (dimensi pendidikan), serta pengeluaran per kapita (dimensi sstandar hidup layak.

IPM Indonesia tahun 2018 menguat 0,58 di level 71,39, meningkat dari capaian 2017. Peningkatan IPM Indonesia didorong peningkatan semua dimensi IPM. Umur harapan hidup bayi saat lahir mencapai 71,20 tahun, meningkat 0,14 tahun dibanding capaian 2017. Dimensi pendidikan ditandai dengan peningkatan rata-rata lama sekolah menjadi 8,17 tahun serta angka harapan lama sekolah meningkat menjadi 12,91 tahun atau setara diploma I. Peningkatan dimensi standar hidup layak ditunjukkan oleh peningkatan indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan mencapai Rp11,06 juta perkapita.

Peningkatan IPM Indonesia merupakan akumulasi dari peningkatan IPM wilayah. IPM di seluruh wilayah Provinsi mengalami peningkatan. DKI Jakarta menjadi Provinsi dengan IPM tertinggi, mencapai 80,47, menjadi satu-satunya Provinsi yang masuk pada kategori sangat tinggi. Sebagai pusat pemerintahan dan pusat ekonomi Indonesia, sarana dan prasarana yang lengkap, kemudahan akses pendidikan dan kesehatan serta didukung oleh alokasi APBN dan APBD yang tinggi, menjadi faktor-faktor yang mendukung pencapaian IPM Jakarta. Sebaliknya KTI khususnya Papua masih menjadi wilayah dengan IPM rendah. Kondisi geografis yang sulit menjadi faktor utama masih rendahnya IPM di Papua. Namun demikian, Papua tercatat memiliki pertumbuhan IPM yang paling tinggi dibanding Provinsi lainnya. Pertumbuhan IPM di Papua sebesar 0,97 meningkatkan status pembangunan manusia dari rendah menjadi sedang. Setidaknya hal tersebut menunjukkan bahwa proses pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat terus membaik.

Dimensi harapan hidup tertinggi berada di Provinsi D.I Yogyakarta dengan capaian

GAMBAR 9. IPM DI SELURUH WILAYAH PROVINSI

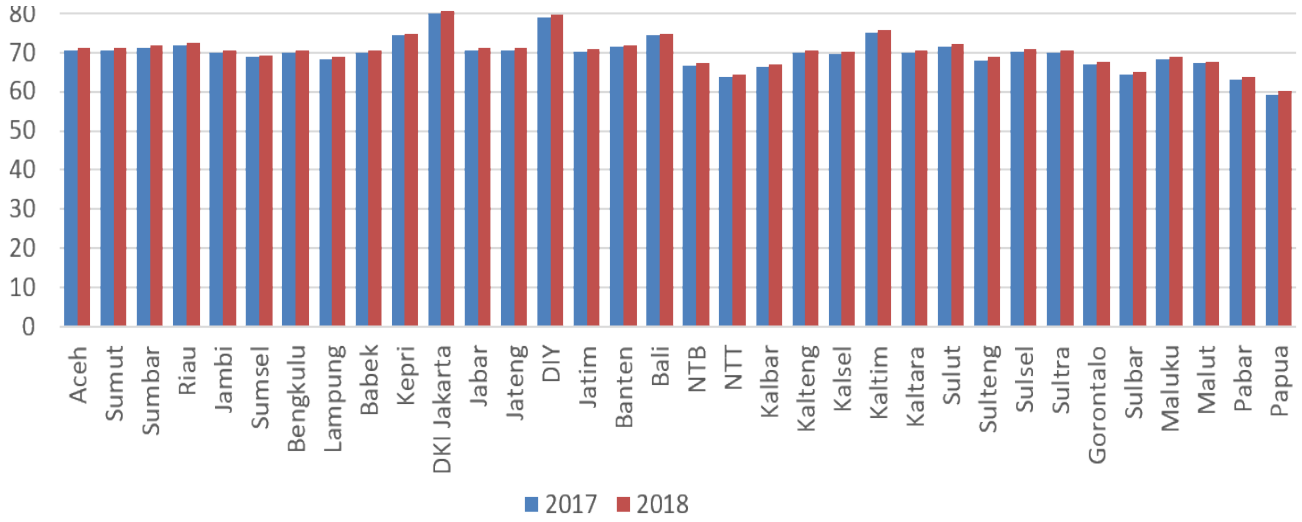

SUMBER: BPS, 2019

sebesar 74,80 tahun, sementara capaian terendah pada Provinsi Sulawesi Barat sebesar 64,60 tahun. Sementara peningkatan angka harapan hidup tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,46 tahun sementara terendah pada Provinsi Kalimatan Utara sebesar 0,03 tahun. Pada dimensi standar hidup layak, pengeluaran perkapita tertinggi pada Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp18,13 juta per kapita per tahun, jauh diatas pengeluaran perkapita Provinsi Papua yang tercatat sebagai Provinsi dengan standar hidup paling rendah. Namun Provinsi Papua memiliki peningkatan standar hidup layak tertinggi dibandingkan provinsi lainnya sebesar 5,41%, sementara 2 provinsi yakni Bangka Belitung dan Jambi memilki pertumbuhan standar hidup yang paling rendah.

Pada dimensi pendidikan yang diwakili oleh rata-rata lama sekolah, tertinggi pada provinsi DKI Jakarta dengan capaian sebesar 11,05 tahun, sedangkan Papua memiliki capaian rata-rata sekolah paling rendah, yakni hanya sebesa 6,52 tahun. Namun demikian, Papua memiliki pertumbuhan rata-rata sekolah tertinggi sebesar 0,25 tahun sama dengan Kalimantan Utara, relatif tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan rata-rata lama sekolah nasional yang hanya sebesar 0,7 tahun. Untuk indikator harapan lama sekolah, tertinggi pada Provinsi DIY sebesar 15,56 tahun, sementra terendah pada Provinsi Papua dengan capaian harapan sebesar 10,83 tahun.

3.II. GINI RATIO

Rasio Gini merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat distribusi pendapatan masyarakat, semakin tinggi koefisien rasio gini (mendekati 1) menunjukkan ketimpangan yang besar antara penduduk masyarakat. Idealnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu wilayah disertai dengan penurunan rasio gini. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Rasio Gini per September 2018 tercatat pada level 0,384, lebih rendah dari kondisi gini rasio September 2017 sebesar 0,393. Menurunnya gini rasio menandakan tingkat kesenjangan pendapatan masyarakat semakin menurun. Penurunan kondisi ketimpangan juga tercermin dari distribusi pengeluaran perkapita untuk kelompok masyarakat 40% terbawah yang tumbuh paling tinggi dibandingkan dengan kelompok 40 menengah dan 20% teratas. Tingkat inflasi yang terjaga, serta peningkatan bantuan sosial dan bantuan pemerintah yang dialokasikan pemerintah dalam APBN 2018 berperan dalam peningkatan pendapatan kelompok masyarakat 40% terbawah.

Penurunan ketimpangan terjadi baik di kota maupun di desa. Tercatat ketimpangan di kota mengalami penurunan yang cukup tinggi dari 0,404 pada 2017 menjadi 0,391 di 2018. Sementara ketimpangan di desa mengalami penurunan tipis 0,01 dibandingkan 2017 menjadi 0,319. Ketimpangan di kota cenderung lebih tinggi biasanya karena banyaknya penduduk desa yang berpindah ke kota untuk bekerja, namun justru banyak yang menjadi pengangguran karena keterbatasan lapangan pekerjaan yang sesuai dengan

GAMBAR 10. PERKEMBANGAN GINI RATIO TAHUN 2015-2018

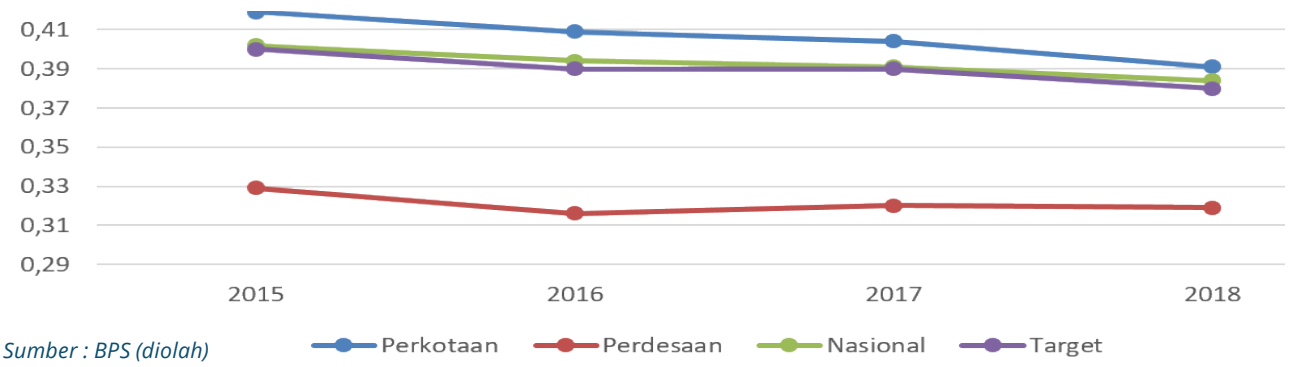

Sumber : BPS (diolah)

skill dan kemampuan. Selain itu, diduga juga disebabkan karena kebijakan penganggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD yang tidak mampu menjangkau kelompok masyarakat 40% kebawah. Akibatnya, hasil pembangunan hanya dinikmati oleh kelompok 40% menengah dan 20% teratas.

Rasio gini di seluruh Provinsi sebagian besar memiliki capaian yang lebih baik dibandingkan tahun 2107. Sebanyak 20 Provinsi mengalami penurunan rasio gini. Penurunan terbesar terdapat pada Provinsi Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan dimana penurunannya mencapai lebih dari 0,04 poin, jauh dibanding Provinsi lainnya. Ketimpangan pendapatan di Jawa Timur sebagian besar terjadi di kota-kota besar yang menjadi pusat industri pengolahan dan sektor perdagangan. Meningkatanya pendapatan tenaga kerja yang berkerja di sektor tersebut berdampak pada peningkatan *gap* pendapatan yang semakin meningkat dengan masyarakat yang bekerja di luar sektor tersebut. Sementara itu, dua Provinsi yang mengalami kenaikan rasio Gini tertinggi pada Provinsi Sulawesi Barat dan Riau. Kedua provinsi tersebut mengalami kenaikan lebih dari 0,02 poin.

Provinsi DI Yogyakarta tercatat memiliki rasio gini tertinggi yakni pada level 0,422. Capaian tersebut lebih baik dibandingkan tahun 2017 yang berada pada level 0,440. Provinsi selanjutnya yang memiliki rasio gini terbesar

GAMBAR 11. GINI RATIO REGIONAL TAHUN 2018

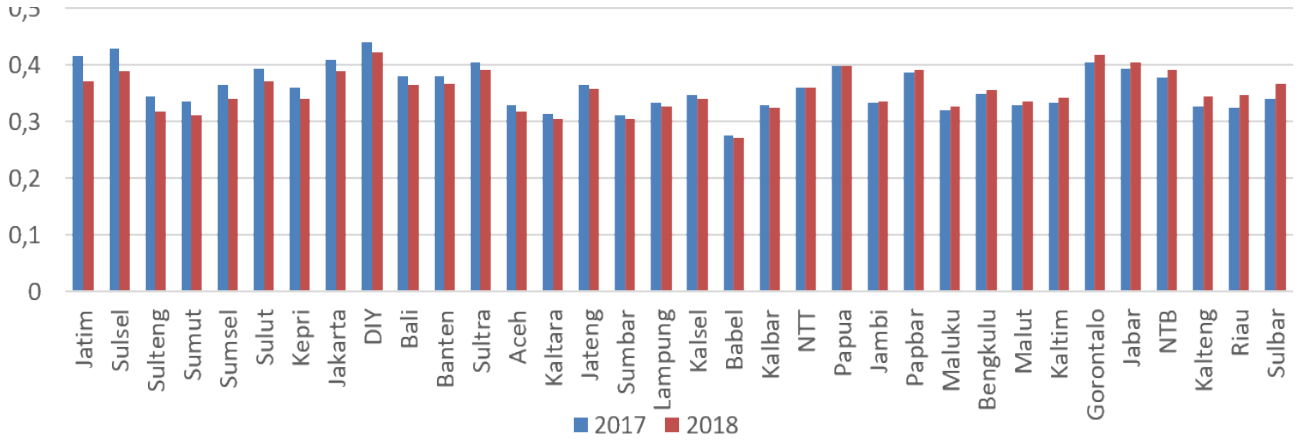

Sumber : BPS (diolah)

adalah Provinsi Gorontalo (0,417) dan Provinsi Jawa Barat (0,405). Kedua provinsi tersebut mengalami kenaikan dibandingkan 2017, masing-masing mengalami kenaikan sebesar 0,012. Sebaliknya, tingkat kesenjangan pendapatan di Provinsi Bangka Belitung merupakan yang terkecil dibandingkan provinsi lainnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan rasio gini yang berada pada level 0,272. Provinsi berikutnya yang juga memilki rasio gini gerendah adalah Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Sumatera Barat.

3.III. KEMISKINAN

Tingkat kemiskinan di Indonesia secara konsisten terus mengalami penurunan walaupun dengan tingkat penurunan yang kecil. Tahun 2018, Tingkat kemiskinan mencapai 9,66%, menurun 0,46% dibanding tahun 2017, masih dalam rentang target dalam nota keuangan APBN 2018 yang ditetapkan sebesar 9,5-10%. Dengan persentase tersebut, jumlah penduduk miskin di Indonesia sampai dengan September sejumlah 25,67 juta jiwa. Kategori penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan pada September 2018 sebesar Rp302.022,07. 60,54% penduduk miskin di Indonesia merupakan penduduk yang tinggal di perdesaan yang sebagian besar penduduknya mengandalkan sektor primer, yakni pertanian, kehutanan dan peternakan sebagai mata pencaharian utama.

Penurunan tingkat kemiskinan terjadi baik di desa maupun di kota dengan penurunan paling tinggi di wilayah perdesaan. Jumlah penduduk miskin di perdesaan tahun 2018 berkurang sebanyak 767,13 ribu jiwa, jauh lebih tinggi dibandingkan penurunan penduduk miskin di perkotaan yang hanya sebanyak 141,27 ribu jiwa. Walaupun demikian, secara persentase penurunan penduduk miskin di perkotaan dan perdesaaan sama, yakni berkurang sebesar 0,37%.

Selain tingkat kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan pada 2018. Indeks kedalaman merupakan merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, sementara indeks keparahan merupakan ukuran yang menunjukkan ketimpangan pengeluaran

GAMBAR 12. GRAFIK PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2018 (PERSEN)

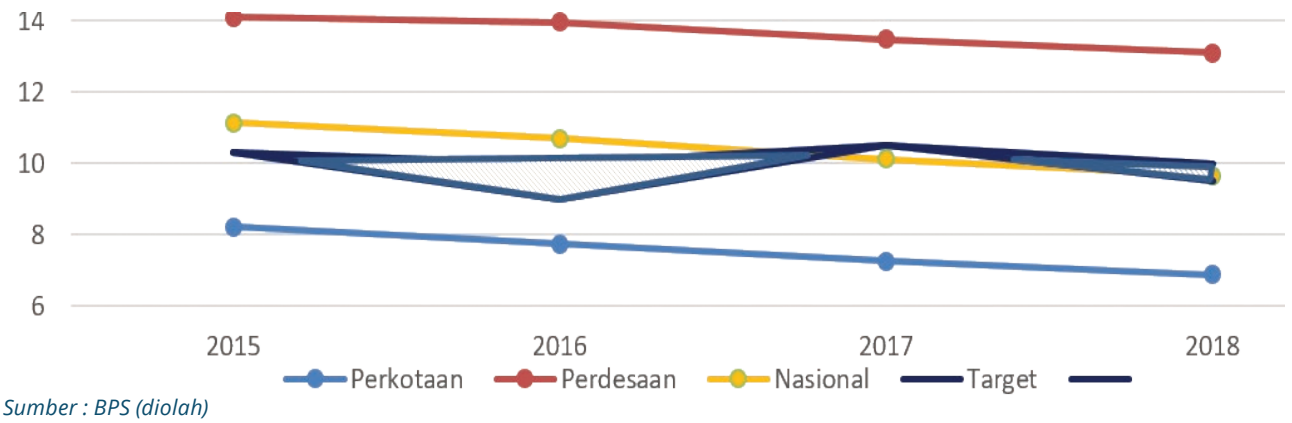

Sumber : BPS (diolah)

GAMBAR 13. PERKEMBANGAN INDEKS KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN TAHUN 2014-2018

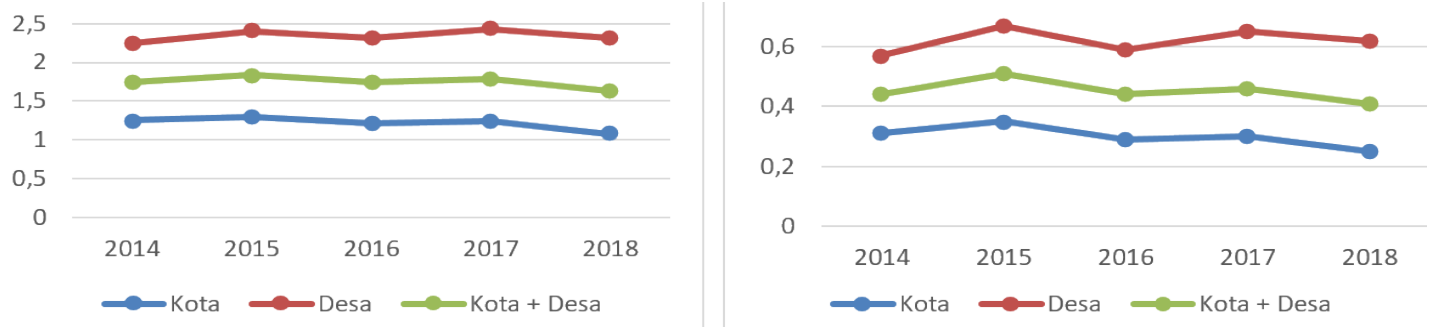

Sumber : BPS (diolah)

diantara penduduk miskin. Pada september 2018, indeks kedalaman tercatat sebesar 1,63 yang merupakan level terendah dalam lima tahun terakhir. Dibandingkan tahun 2017, indeks kedalaman mengalami penurunan sebesar 0,16. Sementara indeks keparahan juga mengalami penurunan sebesar 0,05 dibanding tahun 2017 menjadi sebesar 0,41. Penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan terjadi di semua wilayah baik di perkotaan maupun perdesaan.

Hampir di semua wilayah Provinsi mengalami penurunan tingkat kemiskinan. Satu-satunya Provinsi yang mengalami peningkatan kemiskinan adalah Provinsi Maluku Utara. Dibandingkan 2017, tingkat kemiskinan di Maluku Utara meningkat 0,18% menjadi 6,62%. Adalah sebuah anomali mengingat pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara tercatat sebagai provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar yakni 7,92%, serta tingkat pengangguran yang berkurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi di Maluku Utara tidak inklusif, karena hasilnya tidak bisa menjangkau masyarakat kelas bawah. Disisi lain, berkurangnya pengangguran di Maluku Utara juga tidak berkorelasi positif dengan penurunan tingkat kemiskinan. Artinya bahwa pendapatan yang diterima masyarakat belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok

GAMBAR 14. TINGKAT KEMISKINAN REGIONAL TAHUN 2017-2018

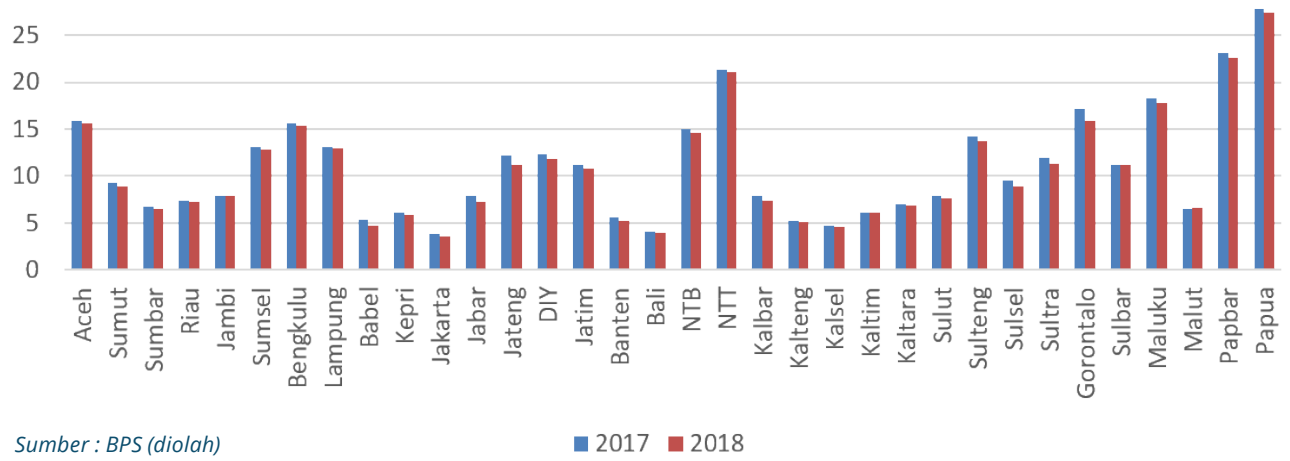

Sumber : BPS (diolah)

masyarakat. Berdasarkan data, tingginya inflasi di Maluku Utara menjadi salah satu faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan bertambah, tercatat inflasi di Maluku Utara mencapai 4,12%, diatas tingkat inflasi nasional. Selain inflasi, penurunan nilai tukar petani juga menjadi pemicu bertambahnya penduduk miskin, mengingat sebagain besar penduduk Maluku Utara mengandalkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan untuk mencukupi kehidupannya.

Kawasan Indonesia Timur masih menjadi wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi. Provinsi NTT, Papua dan Papua barat memiliki tingkat kemiskinan diatas 20%, tertinggi di Papua dengan tingkat 27,43%. Tingkat kemiskinan di Papua hanya sebesar 0,33%, sangat kecil apabila dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan tertinggi di Indonesia. Provinsi yang didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian sebagai penyumbang terbesar PDRB papua tidak mampu menurunkan kemiskinan secara signifikan. KecilNya kontribusi sektor pertambangan terhadap penurunan kemiskinan menunjukkan bahwa pertama tingginya sumber tambang di Papua yakni emas dan tambang tidak bisa dinikmati oleh masyarakat Papua, hasil kekayaan mengalir ke luar Papua; kedua, penyerapan tenaga kerja di pertambangan jauh lebih sedikit apabila dibandingkan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian, perdagangan maupun industri pengolahan, sehingga kalaupun sektor pertambangan mencatat pertumbuhan yang tinggi tidak memiliki dampak yang luas kepada masyarakat.

3.IV. PENGANGGURAN

BPS menyatakan bahwa jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas pada Agustus 2018 sebanyak 194,78 juta orang, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 1,4%. Tingkat pertisipasi kerja menurun dibandingkan periode Februari 2018, namun meningkat apabila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perubahan tersebut biasanya disebabkan karena peralihan pekerja wanita menjadi ibu rumah tangga. Angkatan kerja pada Agustus 2018 sebanyak 131,01 juta orang, naik 2,95 juta orang dibandingkan kondisi Agustus 2017. Peningkatan tersebut berbanding lurus dengan peningkatan tingkat partisipasi kerja.

Sebagian besar penduduk Indonesia mengandalkan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama. Setidaknya hal tersebut tergambar dari jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut. HIngga Februari 2018, jumlah tenaga kerja di sektor ini sejumlah 38,70 Juta orang atau 30% dari total tenaga kerja. Jumlah tersebut meningkat dibanding data per-Agustus 2017 sebesar 35,92 juta orang. Sektor penyumbang tenaga kerja terbesar selanjutnya adalah sektor perdagangan sebanyak 23,55 juta dan sektor industri pengolahan sebanyak 17,92 juta jiwa.

Berdasar status pekerjaan, 39% lebih tenaga kerja bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Jumlah tersebut meningkat dibanding periode yang sama 2017. Sementara pekerja yang berusaha sendiri juga meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

TABEL 4. TENAGA KERJA PER SEKTOR

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	2017		2018
	Februari	Agustus	Februari
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	39.683.855	35.924.541	38.700.530
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor	23.249.255	22.477.345	23.546.668
Industri Pengolahan	17.084.305	17.558.632	17.924.002
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	7.082.086	6.904.745	8.095.891
Konstruksi	7.162.968	8.136.636	7.058.350
Sektor Lainnya	30.276.380	30.020.524	31.742.394
TOTAL	**124.538.849**	**121.022.423**	**127.067.835**

Sumber : BPS (diolah)

Dalam Nota Keuangan APBN 2018, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 5,0-5,3%. Sementara tingkat pengangguran di Indonesia sampai dengan agustus 2018 sebesar 5,34%, atau sejumlah 7 juta orang, capaian tersebut masih dalam batasan target yang ditetapkan pemerintah. Jumlah tersebut menurun dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang berada pada level 5,50%. Sebagian besar pengangguran berada pada kisaran umur 15-19 tahun yang merupakan lulusan sekolah menengah (SMP dan SMA/ SMK) serta penduduk umur 20-24 tahun (lulusan perguruan tinggi) sebesar 16,73%. Berdasarkan data, kenaikan pengangguran ada pada lulusan SMA dan SMK, sementara dari pengangguran dari tingkat pendidikan lainnya mengalami penurunan. Tingginya tingkat pengangguran dari lulusan SMK pada khususnya menunjukkan bahwa pendidikan kejuruan yang diajarkan di SMK belum mampu masuk ke dunia usaha dunia industri (DUDI) di tanah air.

Revitalisasi pendidikan vokasi sebenarnya telah dilaksanakan Pemerintah sejak Tahun 2016 melalui Inpres Nomor 9 tahun 2016. Hal tersebut dilaksanakan dengan memberikan keterampilan bagi siswa agar mampu bersaing dengan dunia kerja. Tercatat sebanyak 2.700 SMK telah bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Beberapa strategi yang dilaksanakan adalah melalui:

a. Evaluasi penyusunan kurikulum, kurikulum ditentukan oleh DUDI dan Kemendikbud, dari 60-70% konten kurikulum ditentukan oleh partner sekolah/DUDI, 40% belajar di

GAMBAR 15. PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN DI INDONESIA TAHUN 2015-2018 (PERSEN)

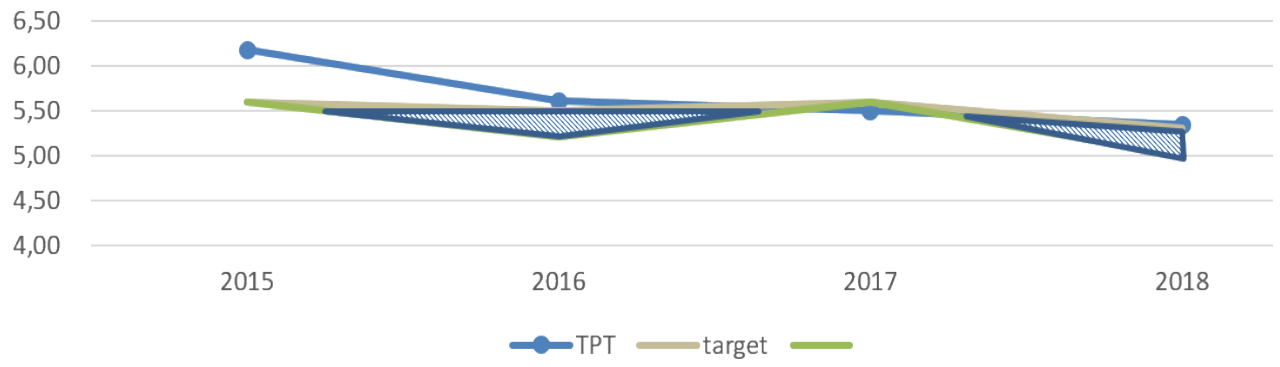

Sumber : BPS (diolah)

kelas, sementara 60% praktek kerja. *Supply base* ke *demand base*.

b. SMK didorong untuk memiliki *teaching factory*, siswa diajarkan untuk berproduksi sesuai standar industri, menjadi *counterpart* industri sehingga produk yang dihasilkan bisa langsung dipasarkan.

c. Ke depan, SMK menjadi BLUD, sehingga keuntungan hasil siswa dari hasil produksi menjadi pemasukan sekolah untuk pengembangan sekolah.

Namun demikian, melihat perkembangan tingkat pengangguran yang didominasi oleh lulusan dari SMA dan SMK, maka perlu di lakukan evaluasi atas kebijakan tersebut agar lebih tepat sasaran dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Sejalan dengan penurunan tingkat pengang guran nasional, hampir semua provinsi di Indonesia mengalami penurunan tingkat pengangguran. Satu-satunya Provinsi yang justru mengalami kenaikan adalah NTB dan DIY. Kenaikan tingkat pengangguran erat kaitannya dengan bencana alam gempa dan tsunami yang membuat sebagian wilayah di NTB mengalami kerusakan. Kondisi tersebut menyebabkan roda perekonomian jatuh. Sementara rekonstruksi pasca gempa ber jalan lambat, yang kemudian berdampak pada perlambatan pemulihan perekonomian NTB.

4. PELAKSANAAN APBN

APBN 2018 sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di tengah tantangan perekonomian global dan domestik. Pencapaian tersebut diwujudkan dalam strategi fiskal pemerintah yakni berupa optimalisasi pendapatan negara, efisiensi belanja dan peningkatan belanja produktif, serta mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif dan berkelanjutan. Kebijakan optimalisasi pendapatan dilaksanakan melalui optimalisasi program (ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum) serta tindak lanjut pasca *tax amnesti* dengan tetap menjaga iklim investasi. Dalam pengelolaan belanja

GAMBAR 16. PERKEMBANGAN TINGKAT PENGANGGURAN REGIONAL TAHUN 2017-2018

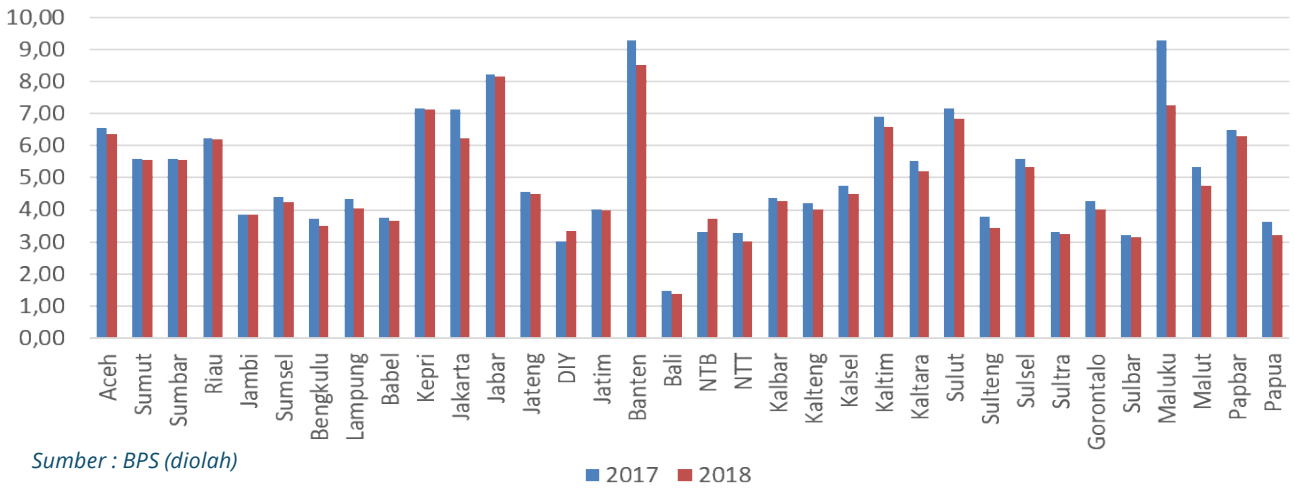

Sumber : BPS (diolah)

negara, realokasi belanja subsidi energi dalam jumlah signifikan yang dialihkan untuk belanja produktif, prioritas dan *mandatory* merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Alokasi anggaran infrastruktur semakin ditingkatkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur konektivitas antar daerah, serta anggaran pendidikan dan kesehatan tetap dijaga masing-masing 20% dan 5% demi menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selanjutnya alokasi Dana Desa dalam APBN 2018 ditetapkan sebesar Rp60 triliun guna membangun dan memberdayakan desa serta mewujudkan "*Desa Memajukan Indonesia*".

Dalam perjalanan pelaksanaan APBN 2018 yang terus menghadapi tantangan perekonomian global, diperlukan kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang solid guna menjaga capaian indikator ekonomi makro di tahun 2018. Dalam perjalanannya, ber bagai kebijakan dikeluarkan guna menjaga kredibilitas pengelolaan APBN yang salah satunya adalah dengan tidak adanya APBN Perubahan (APBNP). Pada sisi pendapatan negara diimplementasikan beberapa kebijakan, salah satunya penyesuaian tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 terhadap barang impor untuk mendorong penggunakan barang produksi dalam negeri serta menekan angka defisit transaksi berjalan. Pada sisi belanja negara pemerintah sejak awal tahun telah menerapkan serangkaian kebijakan seperti efisiensi belanja non-prioritas, belanja barang dan subsidi harus tepat sasaran, reficusing angggaran prioritas seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, serta penguatan kualitas desentralisasi fiskal. Adapun dari sisi pembiayaan, pemerintah berfokus pada efisiensi dan keberlanjutan pembiayaan melalui pengendalian defisit dan rasio utang, menjaga angka keseimbangan primer, serta mengembangkan skema pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Perpaduan langkah-langkah tersebut telah berhasil memberikan dampak yang positif pada kinerja pengelolaan anggaran, yang dibuktikan dengan capaian realisasi pendapatan negara yang pertama kali berhasil melebihi target sejak tahun 2011, serta pesentase realisasi belanja negara tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Bukti lainnya adalah tingkat defisit APBN yang tercatat turun ke angka 1,76% terhadap PDB, serta keseimbangan primer meningkat dan semakin mendekati nol (negatif Rp1,8 triliun).

4.I. PENDAPATAN NEGARA

Dalam rangka optimalisasi pendapatan negara, pemerintah terus berupaya untuk memperluas basis pajak dan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk mencapai hal tersebut, pada tahun 2016 dan 2017 telah diimplementasikan kebijakan pengampunan pajak dan penegakan hukum di bidang perpajakan. Pemerintah juga menerapkan kebijakan penyesuaian tarif perpajakan khususnya PPh yang diantaranya adalah pemberian fasilitas pengurangan PPh badan (*tax holiday*) serta pengaturan PPh dari penghasilan usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu. Serangkaian kebijakan tersebut

TABEL 5. REALISASI APBN 2017-2018

URAIAN	TA 2018 Anggaran	TA 2018 Realisasi	TA 2018 %	TA 2017 Realisasi	Perubahan	%
A. Pendapatan Negara dan Hibah						
I. Penerimaan Perpajakan	1.618,10	1.518,79	93,86%	1.343,53	175,26	13,04%
1. Pajak Dalam Negeri	1.579,40	1.472,91	93,26%	1.304,32	168,59	12,93%
2. Pajak Perdagangan Internasional	38,70	45,88	118,56%	39,21	6,67	17,00%
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	275,43	409,34	148,62%	311,22	98,13	31,53%
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	103,67	180,59	174,19%	111,13	69,46	62,50%
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	44,70	45,06	100,82%	43,90	1,16	2,63%
3. PNBP Lainnya	83,75	128,57	153,51%	108,83	19,74	18,14%
4. Pendapatan BLU	43,30	55,11	127,27%	47,35	7,77	16,41%
III. Penerimaan Hibah	1,20	15,51	1296,29%	11,63	3,89	33,41%
IV. Suspen Pendapatan						
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II+A.III)	**1.894,72**	**1.943,65**	**102,58%**	**1.666,38**	**277,27**	**16,64%**
B. Belanja Negara						
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.454,49	1.450,98	99,76%	1.265,36	185,62	14,67%
1. Belanja Pegawai	365,69	346,89	94,86%	312,73	34,16	10,92%
2. Belanja Barang	340,13	345,77	101,66%	291,46	54,31	18,63%
3. Belanja Modal	203,88	181,49	89,02%	208,66	-27,17	-13,02%
4. Pembayaran Bunga Utang	238,61	257,95	108,11%	216,57	41,38	19,11%
5. Subsidi	156,23	216,88	138,82%	166,40	50,48	30,34%
6. Belanja Hibah	1,46	1,52	104,09%	5,45	-3,93	-72,08%
7. Bantuan Sosial	81,26	84,32	103,76%	55,30	29,02	52,48%
8. Belanja Lain-lain	67,24	16,16	24,04%	8,80	7,36	83,62%
II. Transfer ke Daerah Dan Dana Desa	766,16	757,79	98,91%	741,99	15,80	2,13%
Transfer ke Daerah	706,16	697,93	98,83%	682,23	15,71	2,30%
a. Dana Perimbangan	676,60	668,64	98,82%	654,48	14,16	2,16%
1) Dana Transfer Umum	490,71	495,19	100,91%	486,81	8,38	1,72%
a. Dana Bagi Hasil	89,23	93,70	105,02%	88,23	5,47	6,20%
b. Dana Alokasi Umum	401,49	401,49	100,00%	398,58	2,91	0,73%
2) Dana Transfer Khusus	185,89	173,45	93,31%	167,67	5,78	3,45%
a. Dana Alokasi Khusus	62,44	58,15	93,13%	62,10	-3,95	-6,37%
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	123,45	115,30	93,40%	105,56	9,74	9,22%
b. Dana Insentif Daerah	8,50	8,23	96,83%	7,50	0,73	9,74%
c. Dana Otonomi Khusus	1,00	1,00	100,00%	0,80	0,20	25,00%
d. Dana Keistimewaan DIY	20,06	20,06	100,00%	19,44	0,62	3,17%
Dana Desa	60,00	59,86	99,77%	59,77	0,09	0,16%
III. Suspen	-	-		0,00	0,00	-
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)	**2.220,66**	**2.208,78**	**99,47%**	**2.007,35**	**201,43**	**10,03%**
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	**-325,94**	**-265,13**	**81,34%**	**-340,98**	**75,85**	**-22,24%**
D. Pembiayaan						
I. Pembiayaan Dalam Negeri	354,95	302,52	85,23%	386,89	-84,38	-21,81%
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	-29,01	-1,15	3,97%	-20,27	19,11	-94,31%
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)	**325,94**	**301,36**	**92,46%**	**366,62**	**-65,26**	**-17,80%**
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SILPA (SIKPA) (D+C)	**0,00**	**36,23**	**-**	**25,65**	**10,58**	**41,27%**

SUMBER: KEMENTERIAN KEUANGAN (DIOLAH)

diambil untuk meningkatkan pendapatan perpajakan namun tetap memperhatikan daya beli masyarakat, meningkatkan iklim investasi dan daya saing industri nasional. Di sektor non pajak khususnya PNBP, pemerintah menjalankan 5 strategi peningkatan PNBP yakni pengelompokan objek wajib bayar, pengaturan tarif, tata kelola, pengawasan, hingga peningkatan kualitas atas hak wajib bayar.

Pada postur APBN 2018, target Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp1.894,72 triliun meningkat dibanding 2017 sebesar Rp1.736,06 triliun. Kenaikan terget pendapatan negara tersebut dipengaruhi oleh kenaikan target penerimaan perpajakan yang ditetapkan yakni meningkat sebesar 9,87% dibanding target APBNP tahun 2017. Kenaikan tersebut didorong untuk percepatan pencapaian target Prioritas Nasional, termasuk program di bidang infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Asian Games XVIII pada bulan Agustus 2018. Di samping itu, target penerimaan cukai sebesar Rp155,40 triliun sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp153,17 triliun. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan sebesar Rp275,43 triliun lebih tinggi 5,84% dibandingkan target PNBP 2017 seiring proyeksi kenaikan penerimaan PNBP dari SDA. Dengan porsi mencapai 85,40% dari total pendapatan negara, sektor perpajakan masih dijadikan tumpuan utama pemerintah dalam menghimpun pendapatan negara.

Realisasi pendapatan negara tahun 2018 sebesar Rp1.943,65 triliun atau mencapai 102,58% terhadap APBN 2018. Realisasi pendapatan tersebut meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.518,79 triliun, penerimaan PNBP sebesar Rp409,34 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp15,51 triliun, atau masing-masing sebesar 93,86%, 148,62% dan 1.296,29% dari target APBN 2018. Beberapa faktor yang menjadi stimulus peningkatan realisasi pendapatan negara diantaranya meningkatnya basis pajak tahun 2018, kenaikan harga komoditas khususnya minyak bumi dan batubara, serta tingginya penerimaan hibah dari Pemda dalam rangka

TABEL 6. RINCIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

URAIAN	TA 2016			TA 2017	Perubahan	%
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi		
A. Pendapatan Negara dan Hibah						
I. Penerimaan Perpajakan	1.618,10	1.518,79	93,86%	1.343,53	175,26	13,04%
1. Pajak Dalam Negeri	1.579,40	1.472,91	93,26%	1.304,32	168,59	12,93%
2. Pajak Perdagangan Internasional	38,70	45,88	118,56%	39,21	6,67	17,00%
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	275,43	409,34	148,62%	311,22	98,13	31,53%
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	103,67	180,59	174,19%	111,13	69,46	62,50%
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	44,70	45,06	100,82%	43,90	1,16	2,63%
3. PNBP Lainnya	83,75	128,57	153,51%	108,83	19,74	18,14%
4. Pendapatan BLU	43,30	55,11	127,27%	47,35	7,77	16,41%
III. Penerimaan Hibah	1,20	15,51	1.296,29%	11,63	3,89	33,41%
IV. Suspen Pendapatan						
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II+A.III)	**1.894,72**	**1.943,65**	**102,58%**	**1.666,38**	**277,27**	**16,64%**

SUMBER: KEMENTERIAN KEUANGAN (DIOLAH)

mendukung persiapan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.

Penerimaan perpajakan masih didominasi oleh pajak dalam negeri yaitu sebesar Rp1.472,91 triliun atau mencapai 96,98% dari total penerimaan perpajakan. Tingginya pajak dalam negeri terutama didukung kenaikan signifikan PPh Migas sebesar 28,59% seiring meningkatnya harga komoditas pertambangan. Sementara penerimaan PNBP didominasi oleh penerimaan sumber daya alam sebesar Rp180,59 triliun atau 44,11% dan PNBP Lainnya sebesar Rp128,57 triliun atau 31,40% terhadap total penerimaan PNBP. Tingginya realisasi penerimaan sumber daya alam terutama distimulasi oleh perbaikan harga komoditas pertambangan khususnya minyak mentah dan batu bara, sedangkan realisasi PNBP Lainnya sebesar didorong oleh upaya peningkatan layanan yang diimbangi penyempurnaan tata kelola PNBP oleh K/L.

4.II. BELANJA NEGARA

Di sisi belanja negara, seluruh kebijakan yang ditempuh pemerintah ditujukan untuk tetap menjaga keseimbangan antara pencapaian sasaran prioritas pembangunan dan kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan jangka panjang. Pemerintah tetap konsisten melakukan kebijakan efisiensi belanja non-prioritas dan dialihkan untuk membiayai kegiatan yang bersifat produktif dan prioritas, sehingga kredibilitas dan kualitas APBN tetap terjaga.

Total belanja negara yang ditetapkan dalam APBN 2018 adalah sebesar Rp2.220,66 triliun, meningkat 4,10% dari alokasi pada APBNP 2017. Belanja negara tersebut meliputi komponen belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454,49 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp766,16 triliun. Belanja pemerintah pusat tahun 2018 mengalami kenaikan 6,4% dibandingkan APBNP 2017, sedangkan TKDD tahun 2018 turun tipis 0,02% dari alokasi tahun sebelumnya.

Realisasi belanja negara tahun 2018 sebesar Rp2.208,78 triliun atau mencapai 99,47% terhadap APBN 2018. Tingkat realisasi anggaran belanja negara 2018 tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat realisasi tahun 2017 yang sebesar 94,10% atau mengalami kenaikan 10,03%. Realisasi belanja negara tersebut terdiri atas realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.450,98 triliun dan realisasi TKDD sebesar Rp757,79 triliun atau masing-masing sebesar 99,76% dan 98,91% terhadap pagu APBN 2018.

Tingginya tingkat realisasi belanja pemerintah pusat didukung oleh capaian penyerapan seluruh jenis belanja pada kisaran di atas 90% kecuali untuk belanja modal dan belanja lain-lain yang masing-masing sebesar 89,02% dan 24,04%. Tingkat realisasi belanja modal tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan penundaan pengadaan pesawat tempur sehingga alokasi anggarannya tidak dapat diserap. Pada belanja barang realisasi anggaran tahun 2018 tercatat melebihi alokasi APBN 2018 yakni mencapai 101,66%. Hal tersebut terjadi karena adanya pergeseran anggaran dalam rangka penanganan bencana alam yang terjadi di beberapa wilayah pada tahun 2018.

Pada pos belanja subsidi tingkat realiasinya juga melebihi APBN 2018 yakni mencapai 138,82%. Tingginya belanja subsidi didorong oleh adanya kebijakan untuk menaikkan subsidi energi, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang semula Rp500 perliter menjadi Rp2.000 perliter. Disamping itu, realisasi pembayaran bunga utang juga lebih besar dari APBN 2018 yakni sebesar 108,11%. Untuk TKDD, seluruh komponen mencapai tingkat realisasi lebih dari 90%. Jika dibanding tahun sebelumnya, kenaikan tingkat realisasi belanja tercatat pada hampir seluruh unsur TKDD, kecuali transfer Dana Insentif Daerah yang turun 3,17% dari tahun 2017 meskipun secara nominal realisasinya meningkat.

Tingkat realisasi anggaran belanja negara tahun 2018 yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 didukung beberapa kebijakan yang ditetapkan pemerintah, antara lain adanya percepatan proses lelang atau lelang dini, penyampaian DIPA pada awal bulan Desember 2017 dan perbaikan tata kelola keuangan negara. Selain itu, untuk mendukung pengelolaan belanja negara secara produktif dan berkualitas khususnya belanja K/L, pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis pelaksanaan anggaran pada awal tahun 2018 melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-67/MK.05/2018 tentang Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun Anggaran 2018. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan kredibilitas APBN melalui kualitas belanja yang efektif dan efisien didukung likuiditas kas negara yang terjaga. Tujuh langkah strategis tersebut meliputi (1) Reviu atas DIPA dan rencana kegiatan, (2) Peningkatan ketertiban penyampaian data suplier dan data kontrak, (3) Ketepatan waktu penyelesaian tagihan, (4) Peningkatan akurasi rencana penarikan dana dengan realisai pembayaran, (5) pengendalian uang persediaan/tambahan uang persediaan, (6) Antisipasi dan penyelesaian pagu minus, dan (7) Akurasi penyaluran dana bantuan sosial dan bantuan pemerintah secara tepat waktu dan tepat sasaran. Perpaduan kebijakan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran dan simplifikasi pertanggungjawaban LPJ/SPJ penyaluran bantuan pemerintah dan bantuan sosial, diharapkan mampu mendorong dampak dari realisasi belanja dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial.

4.II.A. BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

Satuan kerja Badan Layanan Umum merupakan instansi pemerintah dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang lebih, memiliki tantangan untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih efisien dan produktif tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Fleksibilitas satker BLU memberikan peluang bagi satker tersebut untuk memenuhi kebutuhan anggarannya secara mandiri yang berasal dari PNBP satker bersangkutan, sehingga kebutuhan alokasi anggaran dari rupiah murni PNBP dapat berkurang.

Tingkat kemandirian satker BLU dalam membiayai kebutuhannya terus menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini tercermin pada semakin rendahnya ketergantungan/porsi pendanaan

GAMBAR 17. TREN PORSI SUMBER PENDANAAN SATKER BLU

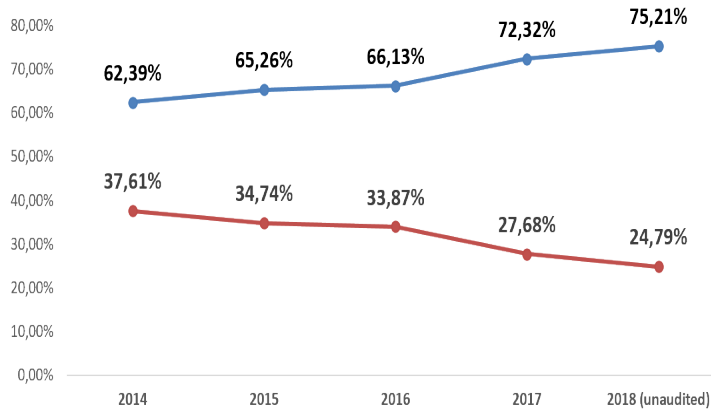

Sumber: Direktorat PPK-BLU, DJPb (diolah)

satker BLU yang bersumber dari rupiah murni (RM) APBN. Pada tahun 2018 (data LKPP *unaudited*) porsi pendanaan RM pada satker BLU sebesar 24,79% atau lebih baik dibanding tahun 2017 sebesar 27,68%, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 37,61%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan satker skema BLU yang dijalankan secara efisien dan optimal, dapat menjadi solusi di masa mendatang dalam menyediakan layanan masyarakat dengan biaya lebih murah tanpa harus membenani APBN.

GAMBAR 18. TREN PENINGKATAN JUMLAH SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM

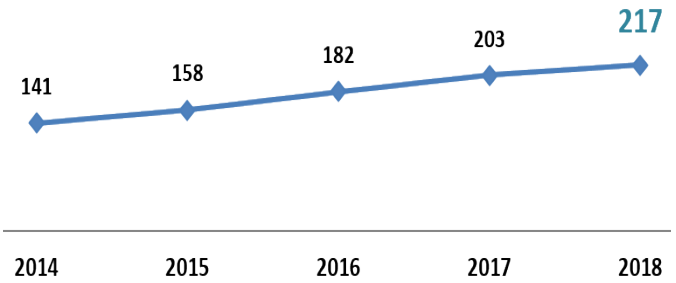

Sumber: Direktorat PPK-BLU, DJPb (diolah)

Pada tahun 2018 jumlah satker BLU bertambah 14 satker atau meningkat 6,90% dibanding tahun 2017. Peningkatan tersebut berasal dari pembentukan 15 sakter baru dan pencabutan status BLU pada 1 satker. Satker baru yang dibentuk terdiri dari 6 satker rumpun pendidikan (42,86%) dan 9 satker rumpun kesehatan (64,29%). Adapun satker yang dicabut statusnya terdapat pada rumpun pendidikan yang berlokasi di Provinsi Aceh.

Penambahan jumlah satker terdapat pada 4 regional yakni 7 satker (46,67%) di regional Jawa, 5 satker (33,33%) di regional Sumatera, 2 satker (13,33%) di regional Maluku dan Papua, serta 1 satker (6,67%) di regional Sulawesi. Penambahan jumlah satker rumpun pendidikan terdapat pada regional Sumatera sebanyak 3 satker (50%), regional Jawa sebanyak 2 satker (33,33%), dan regional Maluku Papua 1 satker (16,67%). Adapun penambahan satker pada rumpun kesehatan terdapat pada regional Jawa sebanyak 5 satker (55,56%), regional Sumatera 1 satker (22,22%), regional Sulawesi 1 satker (11,11%), dan regional Maluku dan Papua 1 satker (11,11%). Sebaran satker BLU baru pada tahun 2018 sebagian besar berada di luar pulau Jawa khususnya di Provinsi Maluku, dimana pada tahun sebelumnya provinsi tersebut belum memiliki satker BLU. Dengan dibangunnya 2 satker baru di Provinsi Maluku pada rumpun pendidikan dan kesehatan, menunjukkan bahwa tujuan pemerataan fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah Indonesia Timur semakin meningkat.

Jika dilihat dari Kementerian Negara/Lembaga pengampunya, satker BLU rumpun pendidikan terdapat pada 7 K/L dengan jumlah BLU

GAMBAR 19. REKAPITULASI SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM MENURUT RUMPUN

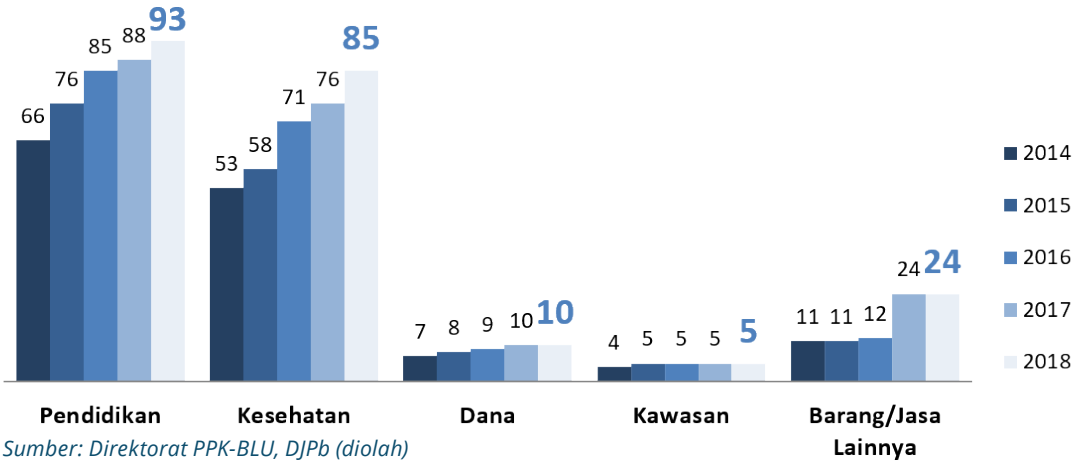

Sumber: Direktorat PPK-BLU, DJPb (diolah)

terbanyak terdapat pada Kementerian Ristek-Dikti sebanyak 44 satker. Satker BLU rumpun kesehatan paling banyak terdapat pada Kementerian Kesehatan dengan jumlah 39 satker, sedangkan rumpun pengelola dana paling banyak di Kementerian Keuangan sebanyak 3 satker. Adapun satker BLU rumpun pengelola kawasan banyak terdapat di Kementerian Sekretariat Negara yakni 2 satker, sedangkan rumpun barang/jasa lainnya paling banyak terdapat pada Kementerian Perhubungan dengan 10 satker. Banyaknya Satker BLU pada Kementerian Ristek-Dikti dan Kementerian Kesehatan yang pelayanan utamanya adalah bidang pendidikan dan kesehatan, merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dengan biaya yang lebih terjangkau.

4.II.B. KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Sampai dengan akhir Desember 2018, dana KUR yang telah disalurkan sebesar Rp117,58 triliun mengalami kenaikan 24,03% dari sebelumnya yang sebesar Rp94,80 triliun. Nilai *outstanding* hingga akhir tahun 2017 mencapai Rp92,03 triliun atau naik 17,03% dari akhir tahun lalu senilai Rp75,00 triliun. Peningkatan tersebut dibarengi dengan penurunan *Non Performaning Loan* (NPL) sebesar 0,24% atau menurun 0,065% dari tahun lalu.

Secara regional, penyaluran KUR tahun 2018 sebagian besar disalurkan kepada debitur di regional Jawa dengan nilai sebesar Rp64,68 triliun (55,0%), regional Sumatera Rp24,30 triliun (20,66%), regional Sulawesi Rp11,44 triliun (9,37%) selebihnya tersebar pada regional Bali Nusa, Kalimantan, serta Maluku Papua. Kecilnya jumlah penyaluran KUR di regional Bali Nusa, Kalimantan dan Maluku

TABEL 7. GRAFIK TREN PENYALURAN KUR (DALAM MILIAR)

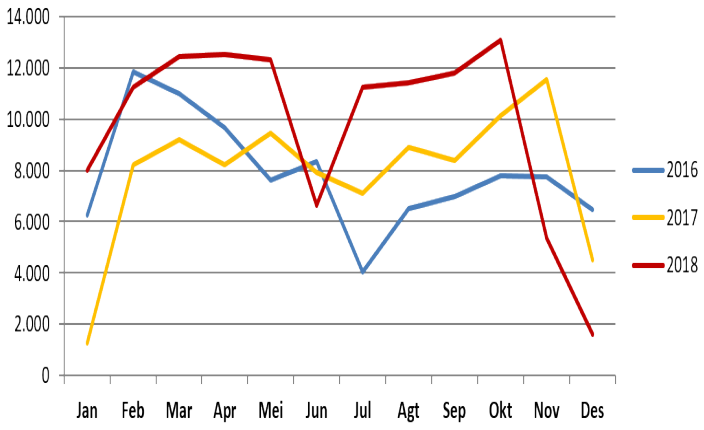

Sumber: Direktorat SMI, DJPb (diolah)

TABEL 8. TABEL PENYALURAN KUR PER REGIONAL (DALAM MILIAR)

REGIONAL	2017		2018		Perubahan	
	Debitur	Nilai	Debitur	Nilai	Debitur	Nilai
Jawa	2.817.196	52.151,22	3.017.702	64.680,13	200.506	12.528,90
Sumatera	675.929	18.717,49	787.056	24.297,29	111.127	5.579,80
Sulawesi	408.458	9.932,38	438.754	11.442,30	30.296	1.509,92
Bali Nusra	232.029	6.399,67	255.648	7.942,94	23.619	1.543,28
Kalimantan	197.389	5.658,83	218.075	7.097,71	20.686	1.438,88
Maluku Papua	64.927	1.941,75	67.108	2.123,97	2.181	182,22
TOTAL	**4.395.928**	**94.801,34**	**4.784.343**	**117.584,34**	**388.415**	**22.783,00**

Sumber: Direktorat SMI, DJPb (diolah)

Papua mengindikasikan masih sedikitnya masyarakat yang memanfaatkan dana KUR. Rendahnya penyaluran KUR di wilayah timur Indonesia khususnya Papua antara lain dikarenakan mayoritas usaha di daerah tersebut bergerak di sektor pertambangan, dimana pertambangan merupakan salah satu sektor yang dikecualikan dalam pemberian KUR. Penyaluran KUR yang tanpa mempersyaratkan adanya jaminan juga menjadi faktor yang mendorong perbankan untuk lebih selektif guna menghindari kredit macet. Disamping itu, ketidaktahuan masyarakat akan adanya program KUR juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi rendahnya realisasi program KUR.

GAMBAR 20. REKAPITULASI NILAI PENYALURAN KUR MENURUT BANK/LEMBAGA PENYALUR (DALAM MILIAR)

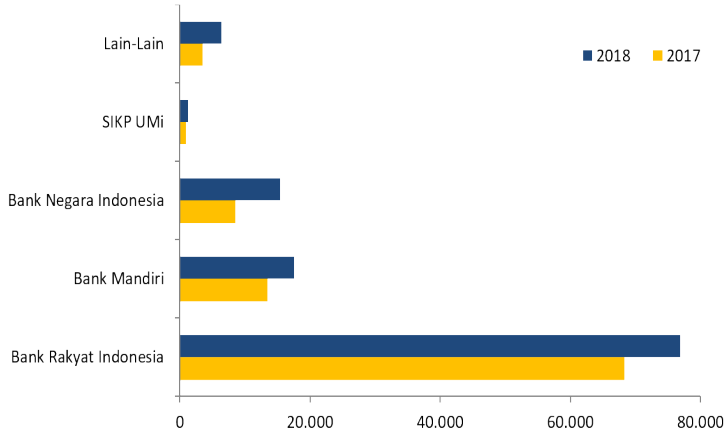

Sumber: Direktorat SMI, DJPb (diolah)

Hingga akhir Desember 2018, dari 42 bank dan lembaga keuangan yang menyalurkan KUR, Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyalur kredit pinjaman KUR dengan nilai terbesar yakni mencapai Rp76,88 triliun atau 65,38% dari total kredit yang disalurkan secara nasional. Angka tersebut meningkat dibanding tahun 2017 sebesar Rp68,33 triliun. Demikan pula bila dilihat dari sisi jumlah debitur, BRI memiliki jumlah debitur terbanyak yaitu 3,82 juta penerima atau 79,96% dari seluruh debitur penerima KUR, meningkat dibandingkan tahun 2017 sebanyak 3,67 juta penerima.

Penyaluran KUR ditujukan pada sektor riil sehingga diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terdapat 11 sektor ekonomi yang dapat memanfaatkan dana KUR, diantaranya *real estate*, usaha persewaan, dan jasa perusahaan, perikanan, pertanian, perburuan dan kehutanan, industri pengolahan, dan perdagangan besar dan eceran.

Menurut sektor usaha, penyaluran KUR tahun 2018 mengalami peningkatan pada seluruh sektor usaha dibandingkan tahun sebelumnya. Perdagangan mendapatkan

GAMBAR 21. REKAPITULASI NILAI PENYALURAN KUR MENURUT SEKTOR USAHA (DALAM NMILIAR)

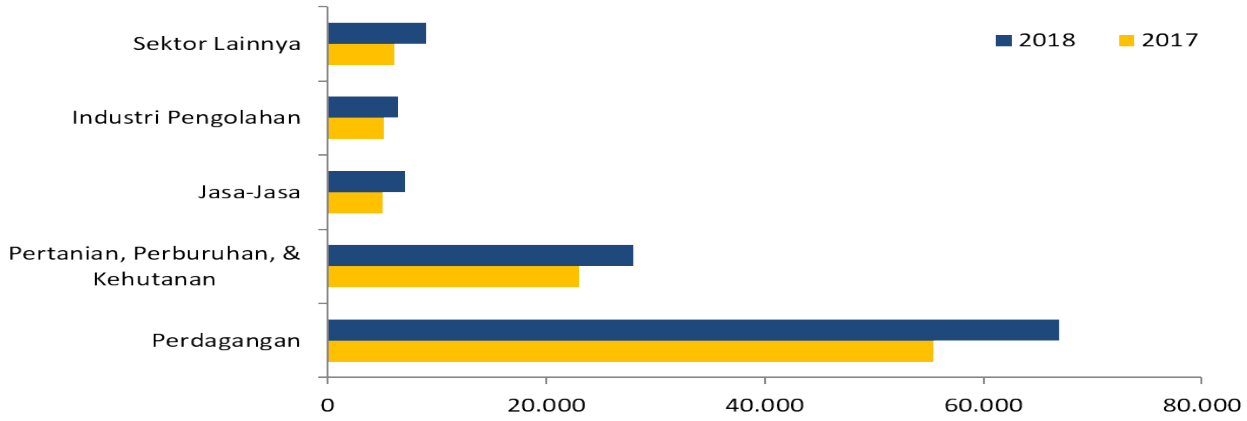

Sumber: Direktorat SMI, DJPb (diolah)

porsi penyaluranan KUR terbesar yaitu mencapai 56,97% atau sedikit turun dari tahun 2017 yang porsinya 58,45%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih banyak pedagang besar dan eceran yang memanfaatkan dana KUR guna mengembangkan usahanya. Nilai penyaluran pada sektor jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya meningkat signifikan yakni sebesar Rp4,99 triliun atau 40% dibanding tahun sebelumnya.

4.II.C. PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah, yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). UMi memberikan fasilitas pembiayaan maksimal Rp10 juta per nasabah dan disalurkan oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Penyaluran pembiayaan UMi merupakan kolaborasi program Pemerintah di sektor-sektor strategis seperti pertanian, perikanan, perdagangan, dan pariwisata. Selain itu, Pembiayaan UMi juga merupakan salah satu instrumen Pemerintah untuk mewujudkan keadilan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Penyaluran pembiayaan Umi tahun 2018 mengalami kenaikan signifikan dibanding tahun 2017 baik dari segi jumlah debitur

TABEL 9. REKAPITULASI PENYALURAN PEMBIAYAAN UMI MENURUT REGIONAL

REGIONAL	2017		2018		Perubahan	
	Debitur	Nilai Penyaluran	Debitur	Nilai Penyaluran	Debitur	Nilai Penyaluran
Sumatera	95.948	207.356.810.160	136.407	336.617.720.866	40.459	129.260.910.706
Jawa	192.653	496.600.983.148	603.900	1.658.669.259.208	411.247	1.162.068.276.060
Kalimantan	3.566	9.924.600.000	7.523	28.432.236.688	3.957	18.507.636.688
Sulawesi	5.088	15.170.400.000	14.708	51.308.100.000	9.620	36.137.700.000
Bali Nusra	8.959	22.282.100.000	18.376	57.006.000.000	9.417	34.723.900.000
Maluku Papua	819	1.905.000.000	1.582	5.178.600.000	763	3.273.600.000
JUMLAH	**307.033**	**753.239.893.308**	**782.496**	**2.137.211.916.762**	**475.463**	**1.383.972.023.454**

SUMBER: DIREKTORAT SMI, DJPB (DIOLAH)

maupun nilai penyalurannya. Jumlah debitur Umi tahun 2018 mencapai 782.496 nasabah atau meningkat 154,86% dibandingkan tahun 2017 sebanyak 307.033 nasabah. Jumlah debitur tahun 2018 mencapai 97,81% dari target sebanyak 800.000 pelaku usaha mikro. Adapun nilai penyaluran tahun 2018 mencapai Rp2.137,21 miliar atau meningkat 183,74% dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp753,24 miliar. Peningkatan signifikan tersebut sejalan dengan percepatan pencapaian tujuan program Umi, yakni memberikan bantuan permodalan yang menjangkau pengusaha ultra mikro namun tetap memiliki kemampuan untuk memonitor dan membimbingnya serta melakukan penguatan dan peningkatan kapasitas usaha mereka.

Pembiayaan UMi disalurkan melalui tiga lembaga penyalur yakni PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), dan PT Bahana Artha Ventura (BAV). Sepanjang tahun 2018 PT PMN telah menyalurkan pembiayaan kepada 593.794 debitur melalui 1.759 kantor cabangnya, dengan total nilai penyaluran sebesar Rp1.345,31 miliar atau 62,95% dari total penyaluran tahun 2018. Adapun tingkat pertumbuhan jumlah debitur dan nilai penyaluran yang tertinggi terdapat pada PT Pegadaian dengan kenaikan jumlah debitur sebesar 269,86% dan kenaikan nilai penyaluran sebesar 273,39%. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan permodalan oleh pelaku usaha khususnya usaha mikro, pembiayaan UMi terus dikembangkan dengan mengakomodasi skema transaksi secara elektronik atau *cashless*. Kedepannya debitur Pembiayaan UMi dapat melakukan transaksi usaha secara *cashless*, serta menyediakan *market place* untuk usaha mikro di era digital ekonomi.

TABEL 10. LEMBAGA PENYALUR UMI

Regional	2017		2018	
	Debitur	Nilai	Debitur	Nilai
PT BAV	46.848	167.759.193.308	151.461	542.491.416.762
PT Pegadaian	10.069	66.795.200.000	37.241	249.406.500.000
PT PNM	250.116	518.685.500.000	593.794	1.345.314.000.000
JUMLAH	**307.033**	**753.239.893.308**	**782.496**	**2.137.211.916.762**

SUMBER: DIREKTORAT SMI, DJPB (DIOLAH)

5. APBD

5.I. KONDISI APBD SECARA NASIONAL

Integrasi kebijakan fiskal pusat dan daerah tidak dapat terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Integrasi dilakukan melalui pembagian kewenangan pendanaan dalam mencapai berbagai target pembagunan termasuk prioritas nasional. Kebijakan fiskal yang baik dapat mengintegrasikan instrumen fiskal pusat dan daerah agar tidak tumpang tindih.

Dalam APBD terdapat komponen pendapatan transfer yang merupakan wujud nyata desentralisasi dan integrasi fiskal. Pendapatan transfer diperoleh dari Transfer Pemerintah Pusat (terdiri dari Dana Perimbangan, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus), Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, serta Transfer Bantuan Keuangan.

Secara nasional, pagu APBD 2018 mengalami sedikit penurunan sebesar 2,95% dari tahun sebelumnya, atau sebesar Rp140,94 triliun. Penurunan terjadi pada seluruh komponen. Porsi terbesar terjadi pada Belanja Operasi,

GAMBAR 22. APBD NASIONAL 2017-2018

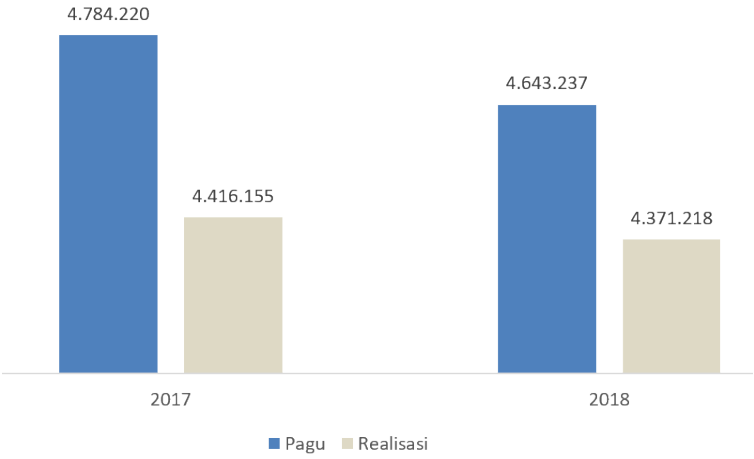

Transfer/Bagi Hasil ke Desa, dan Pengeluaran Pembiayaan. Sedangkan dari sisi realisasi terjadi kenaikan penyerapan jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018 realisasi APBD secara nasional meningkat sebesar1,99% akan tetapi secara nominal turun sebesar Rp44,937 triliun. Hal ini merupakan indikasi penyerapan APBD berjalan lebih efektif dibanding tahun sebelumnya.

5.II. PENDAPATAN, BELANJA, DAN DEFISIT APBD

Terdapat 6 komponen dalam APBD yaitu Pendapatan Pemda, Belanja Daerah, Transfer, Surplus/Defisit, Pembiayaan dan Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran.

Dari sisi Pendapatan Pemerintah Daerah, terjadi peningkatan realisasi 1,74% dari tahun lalu. Peningkatan terbesar terjadi pada proporsi realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar 5,35%. Sedangkan penurunan terjadi pada komponen Pendapatan Transfer sebesar 0,60%. Peningkatan pendapatan tersebut menunjukkan tren yang baik di tengah tantangan perekonomian global sepanjang tahun 2018.

Di sisi Belanja Negara terjadi peningkatan realisasi 27,82% dari tahun 2017. Peningkatan presentasi Belanja Pemerintah Daerah tersebut mengindikasikan bahwa Pemda lebih efektif dalam membelanjakan APBD. Peningkatan terbesar terjadi pada pos Belanja Operasi. Hal ini disebabkan seluruh komponen Belanja Operasi mengalami peningkatan terutama pada Belanja Subsidi.

Pada tahun 2018, defisit meningkat hingga Rp31,79 triliun. Defisit tersebut meningkat 62,90% dari tahun sebelumnya. Hal ini

GAMBAR 23. PENDAPATAN, BELANJA, DAN DEFISIT APBD 2017-2018

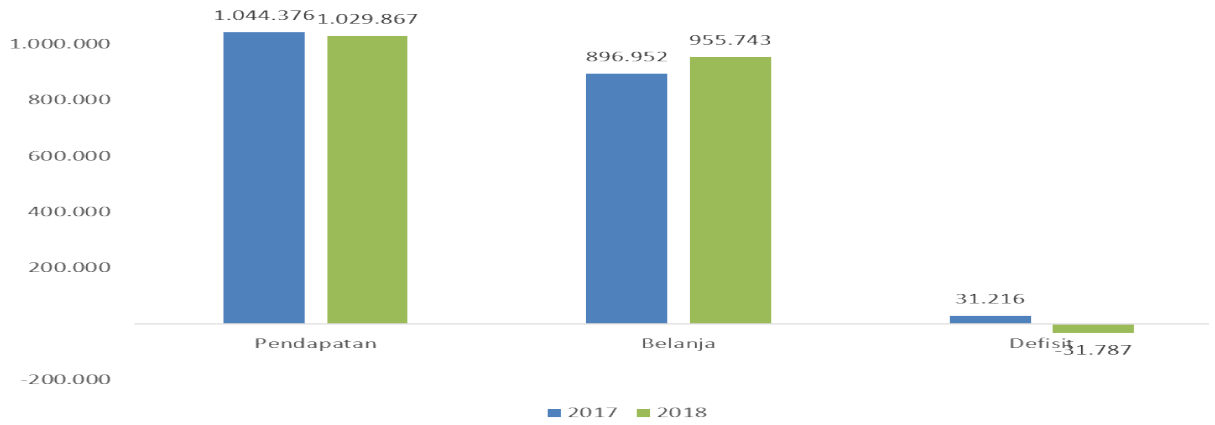

merupakan indikasi Pemda melakukan kebijakan fiskal ekspansif untuk memicu pertumbuhan ekonomi di daerah. Sejalan dengan kebijakan ekspansif tersebut, di tahun 2018 terjadi peningkatan pada sisi Pembiayaan sebesar Rp6,87 triliun. Pembiayaan tersebut digunakan untuk menambah kapasitas fiskal daerah. APBD 2018 secara agregat mengalami penurunan jumlah SILPA sebesar Rp56,13 triliun atau sebesar 57,49% dari tahun lalu. Hal ini merupakan imbas dari ketentuan PMK Nomor 18/PMK.07/2017 tentang Konversi Penyaluran DBH dan/atau DAU Dalam Bentuk Non Tunai). Kebijakan konversi penyaluran DBH dan/atau DAU dilakukan agar Pemda dapat segera memulai melaksanakan kegiatan/ proyek fisik dari sejak awal tahun, sehingga realisasi anggaran meningkat dan posisi dana simpanan Pemda di perbankan juga turun.

5.III. RASIO BELANJA PEGAWAI PADA APBD

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, secara agregat Pemda telah mampu meningkatkan realisasi Belanja Daerah baik secara proporsi maupun nominal. Pada tahun 2018, Pemda telah mampu memaksimalkan belanja hingga mencapai 96,02%. Akan tetapi, peningkatan realisasi Belanja Daerah tersebut belum mengindikasikan Pemda mampu membelanjakan secara efisien.

Efisiensi Belanja pada APBD dapat dilihat dari sejauh mana Pemda mampu menentukan prioritas. Salah satu indikator Pemda mampu menyusun prioritas belanja adalah rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja APBD. Proporsi Belanja Pegawai diharapkan cenderung menurun seiring dengan peningkatan Belanja secara keseluruhan.

Pada tahun 2018, jika dibandingkan dengan tahun 2017, Rasio Belanja Pegawai masih berkisar pada angka 39%. Hal ini menunjukkan belum ada perbaikan. Meskipun masih dibawah 50% akan tetapi mengindikasikan belanja Pemda masih didominasi oleh belanja pegawai. Kondisi ini harus menjadi perhatian, karena Pemda hanya menganggarkan sebagian kecil APBDnya untuk program-program prioritas yang bersinergi dengan Program Prioritas Nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Dilihat dalam skala regional, hanya kawasan

GAMBAR 24. PERBANDINGAN BELANJA PEGAWAI DAN TOTAL BELANJA NASIONAL 2017-2018

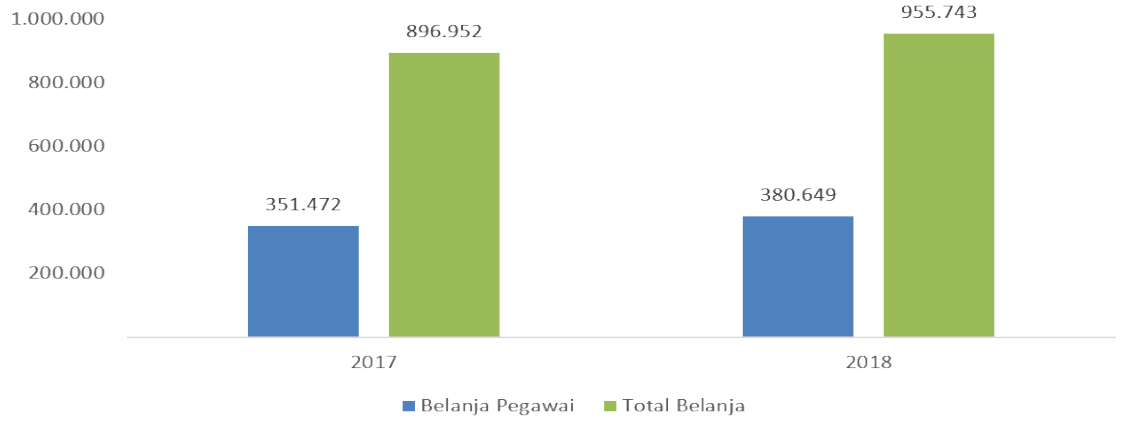

GAMBAR 26. PERBANDINGAN PER JENIS BELANJA

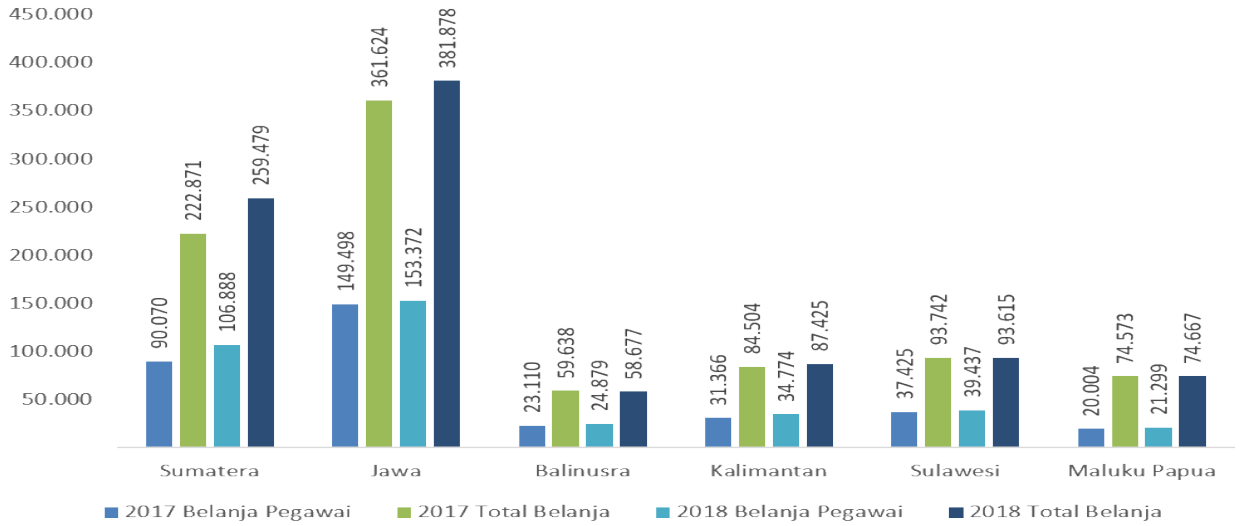

Jawa yang mulai dapat menurunkan Rasio Belanja Pegawai di tahun 2018. Rasio Belanja Pegawai di Jawa mengalami penurunan sebesar 1,18% menjadi Rp381,88 triliun. Sedangkan proporsi Belanja Pegawai Terendah berada pada kawasan Maluku Papua, hanya sebesar 26,82% di tahun 2017 dan 28,52% di tahun 2018. Hal ini sejalan dengan data BPS Jumlah Pegawai Negeri Sipil Regional Maluku Papua di tahun 2016 tercatat hanya berkisar 5% dari total seluruh PNS.

Menurut data tersebut jumlah PNS pada Regional Sumatera 25,63%, Regional Jawa 40,78%, Regional Balinusra 7,17%, Regional Kalimantan 8,37%, dan Regional Sulawesi 12,08%.

5.IV. RASIO KEMANDIRIAN APBD

Meskipun dalam APBD terdapat komponen desentralisasi dan intergrasi kebijakan fiskal antara pusat dan daerah. Namun perlu dipahami bahwa Pemda juga harus mandiri dari sisi pendanaan. Semakin besar tingkat kemandirian Pemda dalam pendanaan maka semakin leluasa dalam mengalokasikan APBD untuk program-program sesuai misi yang telah ditetapkan Gubernur dan Bupati/Walikota.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan Total Pendapatan. Di tahun 2018, secara agregat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah belum beranja pada angka 26%. Meskipun terjadi peningkatan proporsi realisasi PAD sebesar 5,35%, namun belum mampu mendongkrak besaran Rasio Kemandirian

GAMBAR 25. PERBANDINGAN PAD DAN TOTAL PENDAPATAN NASIONAL 2017-2018

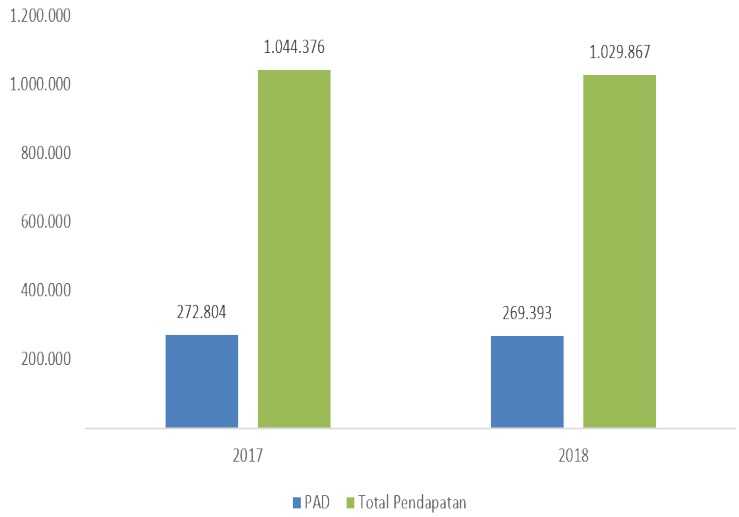

GAMBAR 27. PERBANDINGAN PAD DAN TOTAL PENDAPATAN REGIONAL 2017-2018

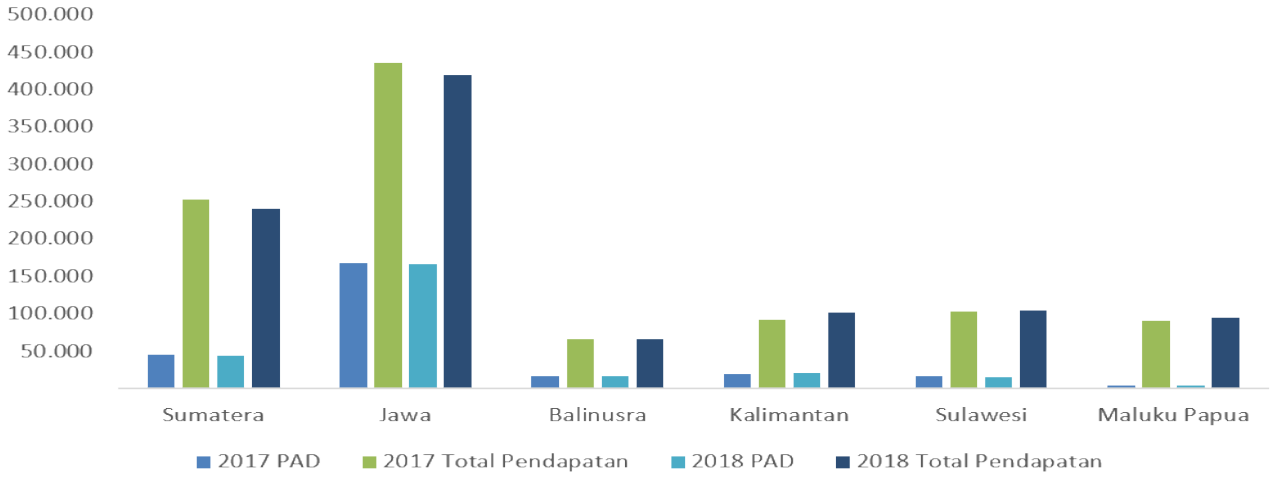

Daerah. Hal ini disebabkan secara nominal PAD 2018 lebih kecil 1,25%, sebesar Rp.269,89 triliun.

Jika dibandingkan per kawasan, Jawa menjadi kawasan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah tertinggi di tahun 2018. Tingkat Kemandirian Jawa sedikit membaik 1,17% dari tahun sebelumnya. Kawasan Balinusra menjadi yang kedua, disusul Kawasan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua.

Kawasan Maluku dan Papua menjadi yang terendah dengan tingkat kemandirian 4,67%. Hal ini akibat tingginya proprosi Dana Transfer dari Pemerintah Pusat yang mencapai 71,7% dari Total Pendapatan. Hal ini wajar mengingat Daerah Timur Indonesia khususnya Regional Maluku dan Papua sedang mengejar ketertinggalan pembangunan dari regional lainnya.

5.V. PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH (KFD)

Kapasitas Fiskal Daerah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

Sedangkan Peta Kapasitas Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Peta tersebut ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 107/PMK.07/2018 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

Peta Kapasitas Fiskal Daerah terdiri atas Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/Kota. Peta tersebut dapat digunakan untuk pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; dan/atau penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat lima kategori kapasitas fiskal provinsi. Suatu daerah termasuk dalam kategori sangat tinggi jika daerah memiliki indeks Kapasitas

Fiskal Daerah lebih dari atau sama dengan 1,531 (IKFD≥1,531). Suatu daerah termasuk dalam kategoti tinggi jika daerah memiliki indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 0,823 sampai kurang dari 1,531 (0,823≤IKFD<1,531). Suatu daerah termasuk sedang jika daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 0,530 sampai kurang dari 0,823 (0,530≤IKFD<0,823). Suatu daerah termasuk rendah jika daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 0,351 sampai kurang dari 0,530 (0,351≤IKFD<0,530). Suatu daerah termasuk sangat rendah jika daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kurang dari 0,351 (IKFD<0,351).

Merujuk Peta Kapasitas Fiskal Daerah, terdapat 11,76% Provinsi dengan kategori kapasitas sangat tinggi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sedangkan pada kategori tinggi, sedang, dan rendah dari 34 provinsi berturut-turut sebesar 14,71%, 23,53%, dan 23,53%.

Sedangkan yang termasuk dalam kategori rendah sebanyak 9 provinsi (26,47%) yaitu Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Bengkulu, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku Utara, dan Maluku.

6. POTENSI KEUNGGULAN DAERAH

6.I. SEKTOR UNGGULAN SECARA KEWILAYAHAN

Masing-masing Kawasan di Indonesia memiliki keunggulan dan potensi masing-masing yang memberi sumbangan positif terhadap perekonomian di setiap Kawasan. Namun demikian, secara umum keunggulan dan potensi daerah daerah di Indonesia masih didominasi oleh sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Sektor ini menjadi komoditas utama di Kawasan Sumatera, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Maluku-Papua dan sebagian Bali-Nusa Tenggara. Hanya di kawasan Jawa saja sektor ini tidak terlalu dominan. Meskipun tetap dominan, namun laju pertumbuhannya melambat karena mulai semakin berkembangnya sektor-sektor lain, terutama industri pengolahan yang didukung dengan pembangunan sarana infrastruktur dan teknologi yang semakin modern.

Sektor industri dan pengolahan sendiri semakin memberikan kontribusi yang signi fikan terhadap perekonomian, terutama hampir di seluruh kawasan Jawa dan semakin berkembang di beberapa daerah di kawasan Kalimantan, terutama Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Sementara itu Sektor pertambangan dan penggalian mulai menggeser dominasi sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan di kawasan Kalimantan, terutama di provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Di kawasan Papua. Hal ini merubah peta sebaran sektor-sektor unggulan di kawasan Kalimantan di mana sektor pertanian sangat dominan di tahun 2017. Kawasan lain yang mempunyai keunggulan dan potensi di sektor pertambangan dan galian adalah kawasan Maluku-Papua, khususnya di wilayah Papua. Pergeseran terjadi wilayah NTB (kawasan

GAMBAR 28. PETA SEBARAN SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSI DAERAH TAHUN 2017

Bali-Nusa Tenggara) di mana sektor pertambangan dan galian yang sebelumnya berkontribusi besar terhadap perekonomian NTB, mengalami kelesuan. Hal ini dikarenakan minimnya industri hilir, yang mengolah hasil tambang menjadi produk akhir di daeerah tersebut. Selain itu diversifikasi sektor ekonomi, terutama di bidang pertanian dan pariwisata telah berhasil menggerakkan perekonomian khususnya di NTB dan Kawasan Bali-Nusa Tenggara pada umumnya.

Sektor pariwisata sendiri masih menjadi andalan di kawasan Bali-Nusa Tenggara, Kawasan Sumatera (Sumatra Barat, Bangka-Belitung dan Bengkulu) serta menjadi potensi yang sangat menjanjikan untuk berkembang di Kawasan Maluku-Papua (Maluku Utara dan Papua Barat). Kawasan Bali-Nusa Tenggara diperkirakan kian berkembang dengan adanya

GAMBAR 29. PETA SEBARAN SEKTOR UNGGULAN DAN POTENSI DAERAH TAHUN 2018

Kawasan Ekonomi Khusus – Mandalika, dan ditambah dengan infrastruktur yang sedang dibangun berupa sirkuit bertaraf internasional yang akan menggelar seri balap motor Moto GP di tahun 2021. Hal ini membawa potensi besar akan kembali berjayanya sektor pariwisata di kawasan Bali-Nusa Tenggara. Ini diharapkan menjadi triger dan memberikan *multiplier effects* bagi perkembangan industri pariwisata Indonesia. Sedangkan DKI Jakarta masih menjadi pusat perekonomian dan penggerak perekonomian nasional. Hal ini karena DKI Jakarta terkondisikan menjadi pintu masuk utama perdagangan nasional maupun internasional.

Dari peta sebaran sektor unggulan dan potensi daerah untuk tahun 2017 dan 2018 terdapat beberapa pergeseran yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan masih merupakan sektor unggulan yang mendominasi perekonomian Indonesia, hanya saja pertumbuhannya cenderung melambat dan mulai digantikan sektor lain. Beberapa hal yang menyebabkan turunnya dominasi sektor ini antara lain:
   a. Permasalahan hulu, beberapa komoditas hasil dari sektor ini masih menggunakan bibit yang kualitasnya rendah, kesusahan memperoleh pupuk dan banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan dan penggalian.
   b. Kurangnya dukungan dari penyuluh-penyuluh pertanian untuk memberikan pembinaan kepada petani.
   c. Kurangnya dukungan Lembaga keuangan untuk memberikan pembiayaan kepada para petani.
   d. Masih belum optimalnya peran lembaga-lembaga penelitian untuk memberi solusi kepada petani dalam halpenemuan bibit unggul.
   e. Permasalahan hilir, pengolahan hasil pertanian sebagian besar masih menggunakan cara-cara tradisional, belum adanya standardisasi dan manajemen mutu, serta belum adanya differensiasi produk mengakibatkan rendahnya *bargaining power* petani ketika menjual hasil panennya.
   f. Adanya pesaing dari produk sejenis dari luar negeri dan tingginya fluktuasi harga komoditas pertanian di pasaran luar negeri, contohnya rendahnya harga lada dan *crude palm oil* (CPO) di pasaran dunia mengakibatkan sulitnya petani menjual hasil panennya.
2. Sektor pariwisata semakin berkembang dan menjadi unggulan baru di beberapa kawasan seperti NTB dan Sumatera Barat. Program 10 Bali Baru yang dijalankan pemerintah semakin memacu perkembangan dunia industri pariwisata. Pengelolaan situs-situs pariwisata yang semakin baik juga memberikan dampak positif dalam perkembangan dunia pariwisata di Indonesia.
3. Adanya pengalihfungsian lahan menjadi lahan pertambangan dan galiandi satu sisi melemahkan sektor pertanian namun berdampak positif pada perkembangan sektor pertambangan dan galian. Seperti

yang tampak jelas pada perubahan peta sebaran potensi dan sektor unggulan di kawasan Kalimantan dan sebagian kawasan Sumatera.

3.I. KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL: KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Dalam rangka mencapai tujuan percepatan ekonomi nasional dengan memaksimalkan kegiatan industri, ekspor, impor dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi, pemerintah mengupayakan peningkatan penanaman modal melalui penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi dan geostrategis. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan pengembangan kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Penyelenggaraan KEK dilaksanakan oleh Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus yang dibentuk oleh Presiden.

Dengan adanya KEK, potensi daerah dapat lebih dikembangkan dan meningkatkan daya saing komoditas unggulan dari sumber daya yang dimiliki masing-masing kawasan. Sampai sat ini telah ditetapkan 12 KEK yang terdiri dari 4 KEK Pariwisata dan 8 KEK Ekonomi. Arah kebijakan pengembangan kawasan ekonomi khusus antara lain KEK:

1. Sei Mangkei di Provinsi Sumatera Utara sebagai pusat pengembangan industri kelapa sawit dan karet hilir yang berskala besar dan internasional.

GAMBAR 30. PETA SEBARAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

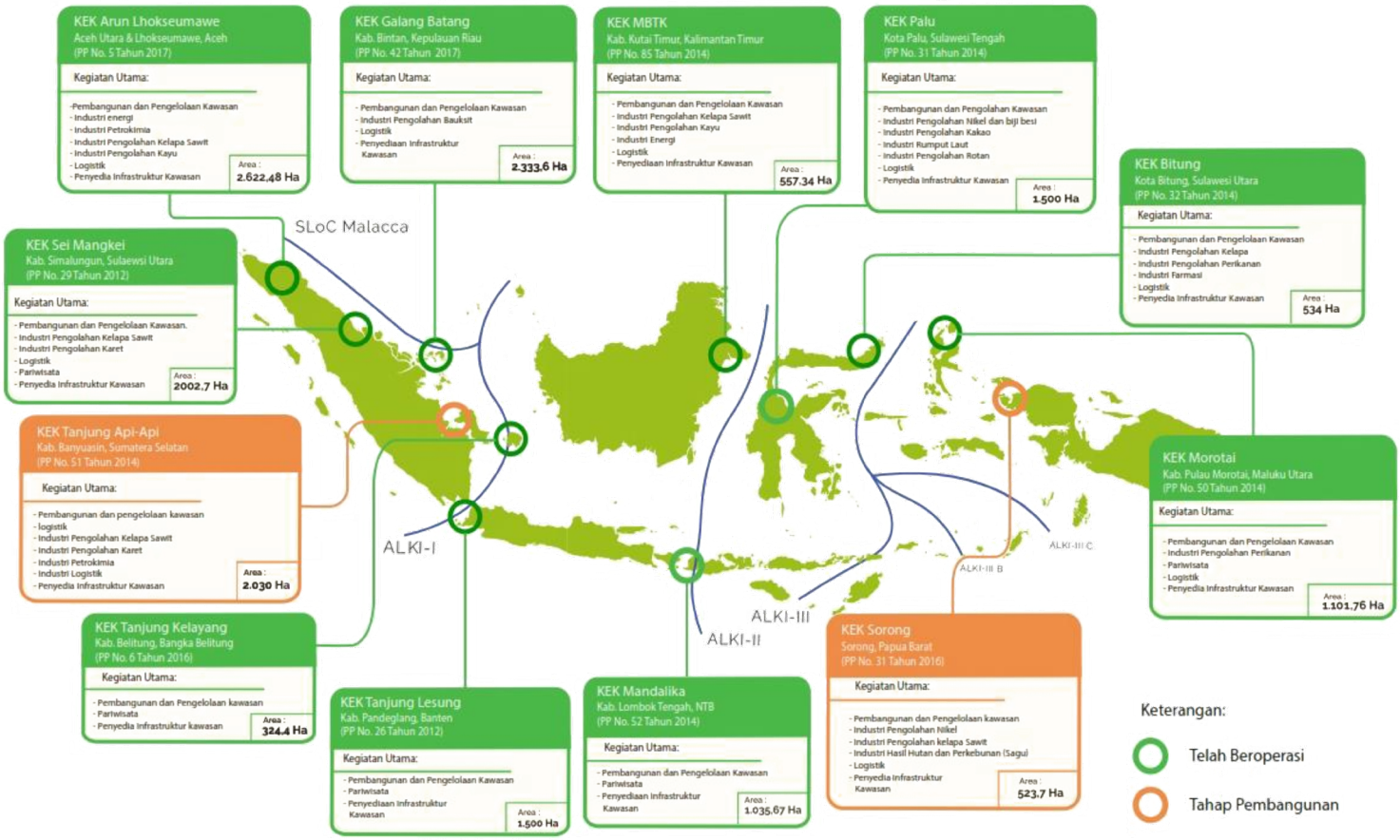

2. Tanjung Kelayang sebagai KEK Pariwisata yang mengedepankan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Kawasan pantai di pulau Belitung. Pantai memiliki keunggulan geostrategis yang berlokasi di antara Indonesia dan Negara ASEAN yang merupakan target *captive market*.
3. Tanjung Lesung merupakan KEK Pariwisata yang memiliki keunggulan yang beragam berupa wisata pantai, keragaman flora dan fauna dan kekayaan budaya.
4. Mandalika juga merupakan KEK pariwisata di kawasan selatan lombok
5. Maloy Batuta Trans Kalimantan merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam berupa kelapa sawit kayu dan energi, dan memiliki keunggulan geostrategis yaitu berlokasi di lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II). Jalur ini merupakan jalur perdagangan internasional yangmenghubungkan Sulawesi, serta jalur regional lintas trans Kalimantan dan transportasi penyeberangan Tarakan-Tolitoli dan Balikpapan-Mamuju.
6. Palu dirancang untuk menjadi pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan untuk perekonomian di kawasan Sulawesi. Lokasi KEK Palu juga memiliki keunggulan geostrategis yang berlokasi di jalur ALKI II yang berperan vital dalam lalu lintas distribusi dan perdagangan baik kawasan regional maupun internasional.
7. Bitung merupakan KEK yang diarahkan untuk mengoptimalkan komoditas unggulan dari provinsi Sulawesi Utara yang berfokus pada industri pengolahan perikanan untuk menghasilkan komoditi ekspor yang berkualitas internasional.
8. Morotai merupakan KEK Pariwisata yang didukung dengan keunggulan keindahan wisata bahari dan panorama bawah laut. KEK Morotai juga memberikan nilai tambah bernuansa sejarah sebagai salah satu basis militer selama Perang Dunia ke II.
9. Arun Lhokseumawe berfokus pada industri energi, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, logistik serta industri penghasil kertas kraft. nfrastruktur logistik juga dikembangkan untuk mendukung input dan output dari industri minyak dan gas, petrokimia dan agro industri, melalui peningkatan infrastruktur pelabuhan dan dermaga berstandar Internasional. Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe juga akan menjadi kawasan basis industri pertanian dengan dukungan komoditas unggulan seperti sawit, kopi, kakao, karet, kelapa dan minyak atsiri.
10. Galang Batang merupakan KEK yang dikembangkan sebagai sentra industri pengolahan mineral sebagai industri hilir dari hasil tambang (bauksit) dan produk turunannya baik dari *refinery* maupun dari proses smelter
11. KEK Sorong yang memberikan keuntungan geoekonomi di sektor industri perikanan dan perhubungan laut, serta sangat strategis untuk perkembangan industri logistik, agro industri dan pertambangan.
12. Tanjung Api Api dengan kegiatan utama di bidang industri karet, kelapa sawit dan petrokimia.

3.II. POTENSI UNGGULAN BERDASARKAN KAWASAN

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa masing-masing kawasan memiliki sektor unggulan yang berbeda-beda antara satu kawasan dengan kawasan yang lainnya. Kalaupun ada yang mempunyai sektor unggulan yang sejenis, namun komoditas atau produk yang dihasilkan berbeda-beda. Masing-masing komoditas memberikan daya saing yang lebih besar terhadap kemajuan perekonomian regional Kawasan yang bersangkutan.

3.II.A. KAWASAN SUMATERA

Kawasan sumatera secara garis besar me ngandalkan sektor pertanian sebagai sektor unggulan yang memberikan sumbangan terhadap PDRB. Namun terdapat juga beberapa sektor unggulan lain yang menjadi andalan beberapa propinsi di kawasan regional Sumatera.

3.II.A.1. SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Sektor ini mengedepankan komoditas-komoditas seperti padi, rempah-rempah, kopi, karet dan kelapa sawit. Meskipun dominasi sektor ini mulai menurun namun dengan semakin majunya sektor lain, seperti pertambangan dan pariwisata, sektor pertanian, perkebunan, peternakan keutanan masih menjadi sektor andalan di kawasan sumatera.

Salah satu komoditas yang sudah mendunia adalah komoditas lada Bangka Belitung yang dikenal dengan *Muntok White Pepper.* Menurut Komite Ekonomi dan Industri Nasional Republik Indonesia, lada ini mempunyai kualitas terbaik dunia dengan tingkat kepedasan 6% sampai 7%. Namun dalam dua tahun terakhir nilai ekspor lada menurun karena menurunnya produksi lada dan melemahnya harga lada di pasaran internasional. Penurunan produksi lada dsebabkan adanya permasalahan hulu terkait permasalahan hama tanaman, semakin tingginya biaya produksi dan perubahan iklim global. Selain itu kualitas *Muntok White Pepper* mulai diragukan dengan adanya praktik pengoplosan/pencampuran lada local dengan lada dari daerah lain.

3.II.A.2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Sektor pertambangan dan penggalian semakin menggeliat di 2018. Pada tahun 2017 sektor ini hanya menjadi unggulan di Provinsi Sumatera Selatan, namun pada tahun 2018 sektor pertambangan dan penggalian juga menjadi sektor unggulan di provinsi Jambi. Komoditas utama dari sektor ini di kawasan sumatera adalah minyak bumi, gas bumi dan batu bara. Permintaan yang semakin tinggi akan hasil pertambangan dan galian ini berdampak pada semakin menggeliatnya sektor ini dan mulai menggantikan sektor pertanian sebagai sektor andalan dalam perekonomian di kawasan sumatera.

3.II.A.3. PARIWISATA

Sektor Pariwisata menjadi sektor unggulan ke tiga setelah pertanian dan pertambangan, yang paling signifikan kontribusinya di provinsi Bangka Belitung dan Sumatera Barat. Sektor pariwisata memang semakin berkembang terlihat dari jumlah wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Barat yang

semakin meningkat, terutama di tahun 2017 yang peningkatannya mencapai 14,03%. Meski mengalami penurunan 10,4% di tahun 2018, yang kemungkinan besar disebabkan oleh melonjaknya harga tiket pesawat setelah Idul Fitri bulan Agustus 2018, namun demikian sektor ini tetap menjadi sektor unggulan dengan mengedepankan wisata halal yang sudah mendapatkan pengakuan dari dunia internasional. Sementara di Provinsi Bangka Belitung geliat pariwisata menjadi semakin besar dengan diresmikannya KEK Tanjung Kelayang oleh pemerintah dan menjadi salah satu bagian dari proyek 10 Bali baru.

3.II.B. KAWASAN JAWA

Jawa sebagai Kawasan yang paling maju mempunyai sektor-sektor unggulan yang cukup beragam antara provinsi yang satu dengan provinsi yang lainnya. Namun secara keseluruhan, sektor industri pengolahan menjadi yang paling dominan diantara sektor yang lainnya, sedikit di atas sektor perdagangan. Kemajuan di bidang industri dan perdagangan ini tidak lepas dari besarnya investasi yang sebagian besarnya memang berada di Kawasan Jawa. Sebagai contoh, berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa dari total penanaman modal asing asing (PMA) selama tahun 2018, lebih dari setengahnya diinvestasikan di Kawasan Jawa.

3.II.B.1. INDUSTRI PENGOLAHAN

Provinsi Jawa Barat dan Banten sangat mengandalkan sektor industri pengolahan sebagai penggerak roda perekonomian di wilayah provinsinya sendiri dan sekitarnya. Industri pengolahan pada intinya merubah barang dasar menjadi barang jadi atau barang setengah jadi yang lebih tinggi nilainya dan lebih dekat kepada pengguna akhir. Industri pengolahan menjadi salah satu favorit untuk berinvestasi. Dari total nilai investasi PMA di tahun 2018 sebesar US$ 29.307.901.40, sebesar US$ 5.573.518,00 (19,02%) berlokasi di provinsi Jawa Barat dan US$ 2.827.276,10 (9,65%) berlokasi di provinsi Banten. Investasi ini sangat berperan dalam pesatnya laju industri pengolahan di ke dua provinsi tersebut, dan juga secara tidak langsung berdampak positif pda daerah di sekitarnya. Beberapa contoh industri pengolahan tersebut antara lain:

1) Industri logam, mesin dan elektronika
2) Industri reparasi
3) Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lainnya
4) Industri tekstil
5) Industri kimia dan farmasi

3.II.B.2. B. PERDAGANGAN

Perdagangan menjadi sektor unggulan bagi ekonomi di provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Seperti halnya pada industri pengolahan, besarnya investasi di Pulau jawa, termasuk di provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah berdampak pada majunya sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor. Komoditas utama perdagangan antar wilayah dalam negeri adalah tekstil, bahan makanan, hasil perkebunan. Sedangkan Komoditas utama perdagangan internasional adalah tekstil dan kendaraan beserta bagian-bagiannya.

3.II.B.3. PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Sebagaimana telah disebutkan di atas, sektor unggulan di kawasan Jawa cukup beragam, selain sektor industri pengolahan dan perdagangan, sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan juga cukup berpotensi untuk berkembang, terutama di provinsi Jawa Timur. Karena mtingginya produk pertanian dari provinsi Jawa Timur, banyak hasil pertaniannya didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan provinsi lainnya. Majunya sektor pertanian di Jawa Timur ditandai dengan meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) di tahun 2018, yaitu dari 104,10 di tahun 2017 menjadi 106,62. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani.

Besarnya perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada sektor pertanian dan agro industri, terlihat dalam berbagai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas produk pertanian. Salah satunya adalah dengan memberikan *combine harvester* yang membantu petani dalam mempercepat dan mempermudah melakukan panen. Bantuan ini selalu dianggarkan dalam APBD semenjak 2009. Pemerintah pusat juga menaruh perhatian terhadap kemajuan sektor pertanian dengan mengalokasikan dana sebesar Rp1,15 triliun.

TABEL 11. SEBARAN INVESTASI PMA SELAMA TAHUN 2018

Kawasan	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US$)	Persentase
Sumatera	2356	4,839,350.00	16.51%
Jawa	15533	17,045,948.30	58.16%
Kalimantan	914	1,954,440.70	6.67%
Sulawesi	608	2,323,900.70	7.93%
Bali-Nusa Tenggara	2316	1,354,376.10	4.62%
Maluku-Papua	245	1,789,885.60	6.11%
TOTAL	**21.972**	**29,307,901.40**	**100%**

SUMBER: BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (DIOLAH)

3.II.B.4. PARIWISATA

Sektor pariwisata menjadi sektor yang memiliki potensi untuk terus berkembang, termasuk di kawasan Jawa. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mulai mengedepankan sektor ini, mengingat banyak potensi pariwisata yang dimiliki daerah tersebut. Wisata sejarah seperti situs Candi Borobudur dan candi-candi lain peninggalan jaman kerajaan menjadi magnet yang menarik minat wisatawan dalam dan luar negeri untuk berkunjung. Selain itu, pemerintah juga telah menetapkan satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata Tanjung Lesung yang berlokasi di provinsi Banten. KEK Tanjung Lesung memiliki luas area 1.500 Ha dengan potensi pariwisata yang beragam, antara lain keindahan alam pantai, keragaman flora dan fauna serta kekayaan budaya yang eksotis. KEK Tanjung Lesung juga dekat dengan atraksi wisata Banten lainnya seperti Kawasan Tua Banten, Budaya Badui dan Debus, Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Krakatau serta wisata kepulauan.

3.II.C. KAWASAN KALIMANTAN

Perbandingan peta sebaran sektor unggulan tahun 2017 dan 2018 menunjukkan hal menarik yang terjadi di kawasan Kalimantan, terjadi perubahan yang cukup signifikan pada sektor yang menjadi unggulan di kawasan ini. Sektor pertanian yang sebelumnya mendominasi dan menjadi unggulan hampir semua provinsi di 2017, di tahun 2018 digantikan oleh sektor pertambangan dan penggalian. Hampir

semua provinsi mulai mengandalkan sektor ini dan hanya menyisakan provinsi Kalimantan Barat yang masih mengandalkan pertanian sebagai sektor unggulan.

Perubahan besar ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain

1. Semakin meningkatnya permintaan hasil tambang batu bara dari negar partner ekspor, terutama tiongkok dan india.
2. Meningkatnya permintaan bahan galian seperti pasir, batu dan lain lain.
3. Tingginya investasi yang ditanamkan di industri perdambangan. Sebagai contoh di Provinsi Kalimantan Timur, sebanyak US$ 188,76 juta dollar dari US$ 587,5 juta dollar investasi dari Penanaman modal asing (PMA), diinvestasikan pada industri pertambangan.

Geliat industri pertambangan ini selain memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan kali mantan, juga sangat berdampak positif pada serapan tenaga kerja. Akan tetapi, sisi negative dari maju pesatnya pertambangan di kawasan Kalimantan ini adalah menurunnya lahan pertanian yang digarap oleh petani. Banyak petani menjual lahan pertanian mereka untuk kemudian beralih fungsi menjadi lahan pertambangan.

Di saat semakin tingginya geliat sektor pertambangan dan galian di kawasan Kalimantan, Provinsi Kalimantan Barat masih mengandalkan sektor pertanian sebagai sektor unggulannya. Hal ini dikarenakan kondisi geografis Kalimantan barat yang sangat cocok untuk aktivitas pertanian. Kalimantan barat sebagai provinsi dengan luas wilayah 146.807 m2 (terluas ke empat di Indonesia) memiliki kondisi tanah yang sangat cocok untuk perkebunan dan pertanian dalam skala besar

3.II.D. KAWASAN BALI-NUSA TENGGARA

3.II.D.1. PARIWISATA

Sektor pariwisata menjadi unggulan utama kawasan Bali-Nusa Tenggara dalam menggerakkan roda perekonomiannya. Anugerah keindahan alam dan keragaman budaya yang dimiliki Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik dalam maupun luar negeri untuk dating berlibur. Bali masih dianggap sebagai barometer pariwisata Indonesia, sehingga terkadang menjadi inspirasi untuk melahirkan Bali-bali yang baru di Indonesia. Pemerintah yang menyadari pentingnya sektor pariwisata untuk menyokong perekonomian meluncurkan beberapa program.

Salah satunya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di kawasan selatan pulau Lombok. KEK pariwisata ini bertujuan untuk semakin meningkatkan citra Lombok sebagai destinasi baru pariwisata di provinsi Nusa Tenggara Barat. Kawasan pariwisata tersebut dikelola secara lebih baik, baik pemeliharaan situs pariwisata maupun penyelenggaraan event-event pariwisata, salah satunya adalah festival Bau Nyale di Pantai Seger, Kuta – Lombok. Kegiatan tahunan ini sudah menjadi top 10 Event Nasional Kementerian Pariwisata Republik Indonesia,

dan selalu berhasil mengget banyak wisatawan dalam dan luar negeri setiap tahunnya. KEK Mandalika juga diproyeksikan menjadi salah satu destinasi utama pariwisata Indonesia, dengan dibangunnya sirkuit Internasional Mandalika yang akan menggelar event balap motor MotoGP di tahun 2021.

3.II.D.2. PERTANIAN

Selain sektor pariwisata, kawasan Bali-Nusa tenggara juga masih mempunyai potensi di sektor pertanian yang bisa membantu menyokong perkembangan perekonomian di ke tiga provinsi di kawasan ini. Pertanian juga masih dipandang sangat penting berkaca pada sempat ambruknya sektor pariwisata di Bali dan NTB akibat bencana alam di tahun 2018. Di Bali, Pemerintah Pusat dan Pemda juga bersinergi dalam bentuk pengalokasian dana untuk sektor pertanian secara merata dalam Dana Alokasi Khusus untuk semua kabupaten/kota di bali.

Padi menjadi komoditas utama pertanian di provinsi bali, sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Barat selain juga mempunyai komoditas padi, juga masih mengandalkan perkebunan tembakau. Sedangkan untuk Provinsi NTT, jagung dan Ubi Kayu menjadi hasil pertanian yang paling menonjol.

3.II.E. KAWASAN SULAWESI

3.II.E.1. PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN

Kawasan Sulawesi masih mengandalkan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai sektor utama penggerak perekonomian. Komoditas hasil pertanian yang utama yang dihasilkan di kawasan Sulawesi adalah padi, jagung dan ubi kayu. Masih ada juga palawija sebagai hasil pertanian yang tidak kalah menjanjikan.

Selain subsektor pertanian, subsektor perikanan juga memberikan dorongan positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan Sulawesi. Sulawesi tengah menjadi pusat pengelolaan perikanan yang memiliki tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) sekaligus yang tidak dimiliki oleh provinsi-provinsi lainnya di Kepulauan Sulawesi, berupa perairan-perairan di Teluk Tomini, Teluk Tolo dan Selat Makassar/Laut Sulawesi. Potensi unggulan dapat dikembangkan dari berbagai jenis ikan laut ekonomis seperti ikan pelagis besar (tuna, cakalang dan tongkol), ikan pelagis kecil (layang, selar, teri, tembang dan kembung) dan non ikan seperti udang windu, rajungan, jenis udang lain, tiram, cumi-cumi, sotong dan teripang.

3.II.E.2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Sektor pertambangan menjadi potensi yang semakin berkembang dalam perekonomian di kawasan Sulawesi. Pemerintah yang menyadari besarnya potensi pertambangan dan penggalian ini merespon dengan membangun KEK Palu yang kawasan pertama yang didesain oleh pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. Secara geografis, KEK Palu yang terintegrasi dengan Pelabuhan Pantoloan dan dilalui jalur strategis Alur Laut Kepulauan Indonesia 2 (ALKI II) memiliki potensi strategis sebagai penghubung antara kawasan barat dan timur Indonesia. Teluk Palu yang dalam dan lebar

memampukan kawasan ini untuk menjadi jalur perdagangan nasional dan internasional, antara lain menghubungkan kota-kota di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua serta negara-negara ASEAN. Lebih jauh, adanya KEK palu ini diharapkan tidak hanya mendukung industri hilir pertambangan seperti nikel dan bijih besi, namun juga produk-produk agro industri seperti kakao, rumput laut dan rotan.

3.II.F. KAWASAN MALUKU-PAPUA

3.II.F.1. PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN

Sektor Pertanian, perkebunan dan perikanan masih menjadi sektor unggulan yang dominan berkontribusi terhadap perekonomian di kawasan Maluku-Papua. Tiga propinsi, yaitu Maluku Utara, Maluku dan Papua Barat menjadikan sektor ini sebagai sektor unggulannya. Hal ini dikarenakan tersedianya lahan yang cukup dan kondisi tanah yang sesuai untuk pertanian dan perkebunan. Hasil utama dari sektor ini adalah padi, kelapa, pala dan cengkeh, palawija dan jagung.

3.II.F.2. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Selain sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, sektor pertambangan juga berperan besar dalam perekonomian di kawasan Maluku-Papua, khususnya di provinsi Papua. Menindaklanjuti potensi pertambangan tersebut, pemerintah menetapkan KEK Sorong. Penetapan KEK Sorong diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di timur Indonesia yang turut sejalan dengan salah satu prinsip Nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran. KEK Sorong yang berlokasi di Distrik Mayamuk secara strategis berada pada jalur lintasan perdagangan internasional Asia Pasifik dan Australia. KEK yang terletak di Selat Sele memberikan keunggulan geoekonomi yaitu potensi di sektor perikanan dan perhubungan laut. Lokasi tersebut juga sangat strategis untuk pengembangan industri logistik, agro industri serta pertambangan.

4. PERILAKU VARIABEL FISKAL

4.I. VARIABEL FISKAL DAN PENGARUH TERHADAP PENDAPATAN NASIONAL

Agregat Demand (AD) bertanggungjawab terhadap pendapatan disamping pengaruh dari *Agregat Supply* (AS) sehingga perlu mempertimbangkan pengaruh antara permintaan agregat dan permintaan agregat. Secara long run, harga akan berubah (*flexible*) seiring waktu dan output akan ditentukan oleh faktor produksi dan teknologi. Sementara, secara *short run* harga akan cenderung *fixed* dan output ditentukan oleh *agregat demand.*

Output belanja keseluruhan (Y) ditentukan oleh beberapa variabel sebagai berikut:

- Y = C+I+G+(X-M)
- Produk Domestik Bruto (Y): jumlah nilai seluruh produksi barang jasa yang dihasilkan sebuah negara dalam jangka waktu tertentu
- Konsumsi (C) : pengeluaran sektor rumah tangga (konsumsi masyarakat)
- Investasi (I) : investasi yang dilakukan sektor swasta
- Pemerintah (G) : Pengeluaran pemerintah
- *Nett Export* (X-M) : Nilai Bersih Ekspor (Ekspor-Impor)

Diawal tahun 2018, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan kembali meningkat sebesar 3,6% dan diikuti oleh peningkatan pertumbuhan volume perdagangan global yang mencapai 3,9%. Pertumbuhan ekonomi global tersebut akan ditopang oleh ekonomi maju yang tumbuh sebesar 1,9% dan ekonomi negara berkembang yang tumbuh sebesar 4,8%. Perekonomian global masih menjadi tantangan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dirasakan oleh semua sektor ekonomi, baik pemerintah maupun swasta.

Di level domestik, sejak 2013 pertumbuhan ekonomi domestik cenderung tumbuh melambat dan belum mampu mencapai tingkat di atas 6%. Diawal tahun 2018, Pemerintah memperkirakan perekonomian akan kembali melanjutkan momentum peningkatan pertumbuhan. Dalam RKP 2018, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,2% s.d 5,6%. Sementara dalam APBN 2018, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5,4%.

Hingga akhir tahun 2018, pemerintah berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% meningkat dari tahun sebelumnya yang berada dikisaran 5,07%. Meskipun sedikit melenceng dari target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan di awal tahun, kenaikaan terjadi pada seluruh komponen pembentuk PDB baik untuk jumlah nominal PDB maupun pertumbuhan ekonomi tahunannya.

Bila dilihat secara kewilayahan, terlihat bahwa kawasan Jawa dan Sumatera menyumbang proporsi PDB terbesar dengan angka 58% dan 22%. Bila dilihat dari pertumbuhan ekonominya, terlihat bahwa pertumbuhan tertinggi di pulau jawa. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa selalu berada di atas pertumbuhan nasional dengan rata-rata sebesar 5,8%. Sementara Pulau Sulawesi dan Bali-Nusa Tenggara menunjukkan kinerja perekonomian yang cukup baik. Sementara, kinerja perekonomian Pulau Kalimantan dan Maluku-Papua juga cenderung melambat dalam lima tahun.

PDB perkapita Indonesia 2018 sebesar USD 3.927 atau sekitar Rp56 juta perkapita pertahun. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dimana Rp51,9 juta pada 2017, Rp 47,9 juta pada 2016.

- Pada sisi permintaan, konsumsi RT masih menjadi tumpuan perekonomian dengan

TABEL 12. PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) PER KAPITA INDONESIA PADA 2014 - 2018

KOMPONEN PENGELUARAN	PDB				
	2014	2015	2016	2017	2018
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	4.651.018	4.881.631	5.126.308	5.379.753	5.651.230
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	99.420	98.800	105.362	112.664	122.894
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	736.283	775.398	774.305	790.789	828.714
4. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.772.471	2.911.356	3.041.585	3.228.763	3.444.118
5. Perubahan Inventori	163.583	112.848	133.400	126.884	197.370
6. Ekspor Barang dan Jasa	2.047.887	2.004.467	1.971.183	2.146.803	2.285.872
7. Dikurangi Impor Barang dan Jasa	1.987.114	1.862.939	1.818.133	1.964.602	2.201.127
Diskrepansi Statistik	81.318	60.957	100.604	91.650	96.245
8. PRODUK DOMESTIK BRUTO	**8.564.867**	**8.982.517**	**9.434.613**	**9.912.704**	**10.425.316**

Sumber : BPS (diolah)

kontribusi 56,96% terhadap PDB. Sektor ini memiliki pertumbuhan yang lebih baik dibanding 2017. Peningkatan konsumsi RT sebagai indikator membaiknya daya beli masyarakat, terutama terkait konsumsi makanan dan minuman. Hal itu sejalan dengan tingkat harga yang stabil, terutama harga kebutuhan pokok. Kinerja konsumsi RT didukung oleh tingkat inflasi yang rendah di 2018.

- Sementara itu, meningkatnya konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga disinyalir sebagai dampak aktivitas persiapan pemilu legislatif dan presiden, serta tingginya aktivitas sosial.
- Sementara kontribusi konsumsi pemerin tah hanya 8,98%, menurun dibanding 2017. Namun, laju pertumbuhan naik signifikan dibanding 2017 sebesar 4,8%, sejalan dengan tingginya belanja pemerin tah pusat dan transfer daerah.
- Aktivitas investasi mengacu pada realisasi Pembentukan Modal Tetap Bruto yang meningkat pada paruh pertama 2018, justru sedikit melambat memasuki kuartal III. Di sisi permintaan domestik, investasi membaik ditopang proyek infrastruktur pemerintah dan peran investasi swasta yang terus meningkat
- Perlambatan juga terjadi pada kinerja ekspor, yang pertumbuhannya terus menu run sejak awal 2018. Hal ini ditengarai akibat dari lemahnya permintaan negara mitra dagang Indonesia.

4.II. KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2018

Sesuai dengan aliran ekonomi Keynesian, Pemerintah perlu ikut campur tangan dalam mempengaruhi makro ekonomi baik melalui kebijakan moneter dengan mempengaruhi suplai uang beredar, maupun melalui kebijakan fiscal. Kebijakan Fiskal yang diambil diambil oleh Pemerintah utamanya adalah kebijakan di bidang perpajakan dan anggaran belanja negara, yang diambil dengan tujuan untuk mempengaruhi pengeluaran agregat.

Terdapat dua jenis kebijakan fiskal, yaitu (1) kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan output perekonomian dan (2) kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi output perekonomian. Sebagai negara berkembang yang berupaya untuk meningkatkan pendapatan nasional beserta pertumbuhan ekonominya, sekaligus dalam rangka meningkatkan laju ekonomi akibat adanya perlambatan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir,

Pemerintah Indonesia menggunakan kebijakan ekspansif untuk meningkatkan pendapatan nasional, sebagaimana terlihat pada penetapan target pertumbuhan ekonomi tahun 2018. Sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi tahun 2018, Pemerintah melaksanakan kebijakan yang bersifat ekspansif melalui beberapa kebijakan fiscal berupa kebijakan belanja negara dan kebijakan pajak.

Pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu tantangan yang telah teridentifikasi oleh pemerintah adalah adanya

potensi permasalahan yang bersumber dari keterbatasan sisi penawaran, dimana dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi lebih didorong dari sisi permintaan. Hal ini tentunya berpotensi pada permasalahan yang dapat timbul seperti dorongan impor beserta potensi inflasi kedepan.

Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran dengan usaha peningkatan kapasitas produksi dan produktivitas perekonomian nasional antara lain dengan program pembangunan infrastruktur, perbaikan dan efisiensi pasar dan ekonomi, peningkatan produktivitas sumberdaya dan tenaga kerja. Untuk itu dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah begitu gencar meningkatkan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya pada tahun 2019, pemerintah memfokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Khusus pada pembangunan infrastruktur, hal ini cukup tepat mengingat dampaknya yang cukup besar bagi peningkatan kapasitas produksi nasional dan perbaikan produktivitas nasional. Pemerintah telah berupaya untuk menggeser kebijakan subsidi energi untuk penguatan belanja infrastruktur. Namun demikian, pemerintah masih membutuhkan banyak pendanaan untuk pembangunan infrastruktur. Untuk itu, pemerintah mendorong keikutsertaan swasta untuk ikut serta dalam pembangunan infrastruktur dengan berbagai mekanisme kerjasama pemerintah swasta yang dimungkinkan.

Selain hal tersebut, pemerintah mulai menyadari bahwa Indonesia sampai saat ini masih sangat mengandalkan ekspor produk-produk primer atau Sumber Daya Alam. Faktor eksternal seperti pertumbuhan harga komoditas memang berdampak pada peningkatan pertumbuhan nasional dan penambahan pendapatan nasional, baik dari sektor minyak dan gas bumi, barang tambang atau hasil pertanian mentah. Namun demikian, potensi permintaan global untuk bahan mentah cenderung terbatas sehingga pangsa pasarnya tidak bisa banyak bergerak.

Saat ini, potensi besar permintaan global adalah ekspor manufaktur. Namun demikian, Indonesia masih merupakan salah satu negara yang tidak mengambil keuntungan pada permintaan produk manufaktur. Ekspor di negara kita masih mengandalkan sektor komoditas seperti batu bara sebesar 49%, minyak sawit mentah 44%, dan migas 21%. Untuk ekspor produk manufaktur hanya tumbuh 2,5%.

Untuk itu pemerintah perlu berupaya dalam mendorong sektor tersebut. Salah satu usaha yang telah dilakukan dalam mengurangi ketergantungan produk komoditas dengan menerbitkan 16 paket reformasi kebijakan dalam dua tahun terakhir. Hingga akhirnya Indonesia mendapatkan peringkat 72 dalam E*ase of Doing Business* oleh World Bank. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing untuk investasi dan peningkatan ekspor sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kedepan.

Untuk kebijakan fiskal, pada Tahun 2018 Pemerintah menerapkan beberapa strategi yaitu (1) melakukan optimalisasi pendapatan negara dan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, (2) melakukan penguatan kualitas belanja melalui peningkatan kualitas belanja modal, efisiensi belanja barang, serta sinergi program perlindungan sosial, serta (3) menjaga kesinambungan dan efisiensi pembiayaan, yang diwujudkan antara lain melalui pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas yang aman. Secara umum, APBN Tahun 2018 menorehkan capaian yang bagus, dan Dan untuk pertama kalinya dalam 15 tahun, Pemerintah tidak mengajukan perubahan APBN. Hal ini mendorong semua Kementerian/Lembaga untuk focus menjalankan rencana anggaran secara penuh dan bekerja secara maksimal

Realisasi pendapatan negara pada tahun 2018 sebesar Rp1.943,64 triliun, atau 102,58% dari target dalam APBN tahun 2018 sebesar Rp1.894,72 triliun. Realisasi Pendapatan negara tercapai dan melampaui target 100%, sebagai capaian sejak tahun 2011. Hal ini didorong didorong oleh terlampauinya target PNBP dan lonjakan nilai penerimaan hibah.

Khusus untuk penerimaan perpajakan, realisasi penerimaan perpajakan tahun 2018 mencapai Rp1.518,78 triliun atau sebesar 93,86% dari target APBN tahun 2018. Pemerintah terus mendorong peningkatan kinerja penerimaan perpajakan secara konsisten setiap tahunnya demi mewujudkan stabilitas Keuangan Negara. Hasil positif yang diraih pemerintah tidak lepas dari pelaksanaan reformasi kebijakan dan transformasi organisasi perpajakan dalam rangka membangun *awareness* masyarakat terhadap pelaksanaan perpajakan secara berkesinambungan yang diwujudkan antara lain melalui penyempurnaan sistem informasi dan teknologi informasi perpajakan.

Pemerintah cukup baik dengan penyusunan kebijakan perpajakan dengan berbagai kebijakan reformasi perpajakan dan bukan dengan peningkatan tarif/besaran pajak. Hal tersebut menghasilkan capaian peningkatan pajak yang tentunya tidak menimbulkan dampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Sementara, bila kebijakan yang diambil adalah peningkatan tarif/besaran pajak, maka atas peningkatan pajak, maka sector lain akan menanggapi dengan penurunan peningkatan sehingga berpotensi pada penurunan kegiatan dan penurunan pendapatan nasional.

GAMBAR 31. KEBIJAKAN TARIF PERPAJAKAN

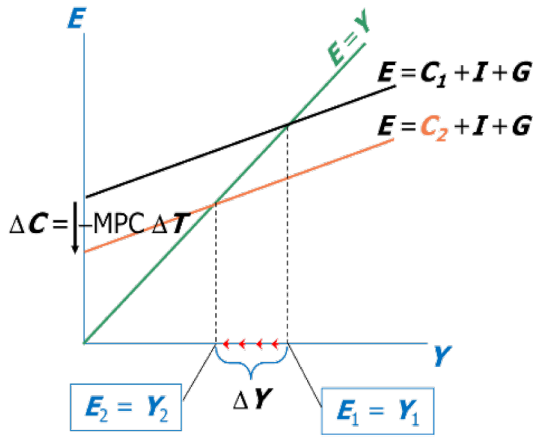

Sementara, dari sisi belanja untuk TA 2018 belanja pemerintah pusat dan TKDD terealisasi sebesar Rp 2.208,77 triliun atau sebesar 99,20%. Secara umum kebijakan belanja neg-

ara 2018 diarahkan untuk penguatan kualitas belanja negara melalui peningkatan belanja produktif dan prioritas yang disertai dengan efisiensi belanja negara non prioritas, dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta memperluas kesempatan kerja.

GAMBAR 32. KEBIJAKAN PENGENDALIAN BELANJA

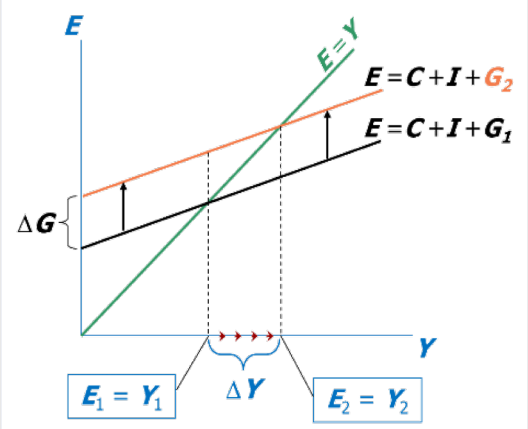

Meningkatnya belanja negara pada tahun 2018 mencerminkan akselerasi kinerja pemerintah dalam mengeksekusi anggaran untuk ketercapaian keluaran yang optimal. Selain itu, melalui kebijakan pemerintah yang tidak melakukan perubahan APBN pada tahun 2018, yang merupakan pertama kalinya dalam 15 tahun terakhir, memberikan dampak positif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah yang secara fokus mampu menjalankan perencanaan dengan konsisten sehingga berhasil mengoptimalkan penyerapan anggaran. Konsistensi pelaksana an APBN hingga akhir tahun 2018, tanpa adanya perubahan APBN, juga telah menunjukkan adanya peningkatan kualitas perencanaan penganggaran.

Konsumsi Pemerintah tumbuh cukup tinggi sebesar 4,80%, sejalan dengan realisasi belanja Pemerintah Pusat tahun 2018 yang meningkat dibandingkan realisasi 2017. Peningkatan terbesar terjadi pada belanja lain-lain terkait dengan komponen dana kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana alam serta kenaikan dana cadangan subsidi. Belanja pegawai juga mengalami kenaikan hingga 10,87% terutama didorong oleh adanya perluasan pemberian gaji ke-13. Belanja barang juga tumbuh cukup tinggi, yaitu sebesar 15,61% antara lain didorong oleh adanya beberapa event internasional yang diselenggarakan pada tahun 2018 misalnya pelaksanaan Asian Games di Jakarta dan Palembang, Asian Para Games di Jakarta, serta *Annual Meetings World Bank – IMF* di Bali.

Kenaikan belanja pada tahun 2018 ini tentunya juga sesuai dengan kebijakan belanja pemerintah, dimana atas peningkatan belanja pemerintah, maka sektor lain akan menanggapi dengan peningkatan kegiatan dan tercapai peningkatan output nasional (pendapatan nasional).

Untuk tahun 2018, berdasarkan jenis belanja, nilai realisasi terbesar terjadi pada belanja pegawai diikuti Belanja Barang yang. Kinerja realisasi belanja pegawai selama 2018 antara lain dipengaruhi adanya kenaikan tunjangan kinerja pada beberapa K/L dalam rangka mendukung pemantapan reformasi birokrasi serta adanya pemberian gaji ke-13 dan THR (termasuk bagi para pensiunan) untuk mempertahankan kesejahteraan aparatur negara.

Untuk belanja barang dan modal, realisasi anggaran didorong oleh akselerasi kegiatan dan pengadaan barang dan jasa, termasuk penyaluran berbagai program bantuan pemerintah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan pemerintah berbasis infrastruktur kepada masyarakat, keperluan operasional Pemilihan Umum (Pilkada serentak tahun 2018 dan persiapan Pemilu tahun 2019), serta operasional penyelenggaraan Asian Games XVIII, Asian Para Games, dan sidang tahunan IMF – World Bank. Khusus pada belanja modal, realisasi anggaran didorong oleh pembayaran atas prestasi progress pada berbagai proyek infrastruktur konektivitas pada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pengadaan Alat Material Khusus (Almatsus) untuk program keamanan dan ketertiban pada Kepolisian RI.

Pada APBN tahun 2018, pemerintah telah menetapkan alokasi TKDD sebagai komitmen Pemerintah untuk melanjutkan progress pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI, sebagaimana pelaksanaan Nawa Cita ke-3 Pemerintah. Alokasi TKDD tahun 2018 tersebut diikuti dengan adanya perbaikan mekanisme penyaluran TKDD antara lain melalui perbaikan penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa yang berbasis output yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017, penerapan sistem terintegrasi dalam rangka sinkronisasi pengalokasikan DAK dan belanja K/L, serta percepatan penyelesaian pembayaran kurang bayar DBH.

BAB 2

ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN APBN ANTAR WILAYAH

hal. 82 ■ PENERIMAAN

hal. 86 ■ BELANJA PEMERINTAH PUSAT

hal. 89 ■ BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

hal. 96
SURPLUS DEFISIT

hal. 98
ANALISIS PENERIMAAN
DAN PENGELUARAN

Analisis ini menggambarkan seberapa besar cash inflow-outflow suatu daerah dan mengukur subsidi silang antara wilayah surplus dan defisit pada tahun tertentu. Hasil analisis penerimaan dan pengeluaran APBN antar wilayah tahun 2018 menunjukkan bahwa penerimaan perpajakan sebagian besar disumbang oleh provinsi-provinsi yang memiliki kegiatan perdagangan dan industri jasa serta kegiatan ekspor impor dengan skala masif seperti DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kontribusi penerimaan negara terbesar berasal dari DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis di Indonesia dan aktivitas ekonominya ditopang dari kawasan industri penyangga yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Penerimaan provinsi dengan kondisi defisit umumnya masih mengandalkan hasil SDA dan bertumpu pada sektor hulu. Pada saat terjadi gejolak penurunan bahan tambang atau komoditas tertentu, maka akan berpengaruh terhadap kontribusi provinsi tersebut terhadap penerimaan negara, sebagaimana terjadi seperti pada provinsi Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatera Selatan. Demikian pula sebagian besar daerah yang bertumpu pada sektor pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, dan galian kurang memberikan kontribusi lebih terhadap penerimaan negara, terutama dari sektor pajak.

Di sisi pengeluaran negara, porsi besar masih dialokasikan untuk kawasan Jawa, Bali, dan Sumatera yang memiliki jumlah penduduk besar dan menjadi pusat kegiatan industri, perdagangan dan pariwisata. Namun demikian belanja pemerintah semakin meningkat untuk kawasan Indonesia Timur, meskipun jumlah penduduknya sedikit dan relatif jarang. Hal ini menunjukkan semakin besarnya perhatian pemerintah pusat terhadap kawasan tersebut.

1. PENERIMAAN

Penerimaan negara terdiri dari penerimaan pajak, PNBP, dan lainnya. Kontribusi masing-masing daerah terhadap total penerimaan negara menjadi penting untuk mengukur *cash inflow* sekaligus menggambarkan aktivitas ekonomi pada suatu daerah.

1.I. PENERIMAAN PERPAJAKAN

Penerimaan perpajakan terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, BPHTB, cukai, dan pajak lainnya. Pajak perdagangan internasional terdiri dari pendapatan bea masuk dan pendapatan bea keluar.

Provinsi dengan kontribusi penerimaan perpajakan terbesar kepada Pemerintah Pusat yaitu DKI Jakarta (59,50%), Jawa Timur (12,29%), Jawa Barat (7,45%) dan Jawa Tengah (3,57%). DKI Jakarta memberikan kontribusi penerimaan perpajakan terbesar kepada Pemerintah Pusat senilai Rp905,30 triliun dengan penyumbang terbesar dari penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp523,42 triliun dan penerimaan pajak pertambahan sebesar Rp341,38 triliun. Tingginya penerimaan pajak untuk DKI Jakarta disebabkan wajib pajak besar terpusat di Jakarta sehingga penerimaan pajaknya melebihi daerah-daerah lain.

Sementara itu, Jawa Timur berada pada posisi kedua penyumbang penerimaan perpajakan terbesar kepada Pemerintah Pusat senilai Rp186,96 Triliun, terdiri dari penerimaan cukai sebesar Rp92,30 triliun, pajak pertambahan nilai sebesar Rp49,58 triliun dan penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp39 triliun. Secara khusus perekonomian Jawa Timur didukung adanya industri rokok yang telah lama berkembang. Industri rokok tersebut menjadi bagian penting dalam peningkatan kontribusi penerimaan negara dari Jawa Timur khususnya penerimaaan cukai yang merupakan penerimaan terbesar. Menurut

GAMBAR 33. PETA SEBARAN PENERIMAAN PERPAJAKAN TAHUN 2018 - PER PROVINSI

Sumber: Kementerian Keuangan 2019

TABEL 13. LIMA PROVINSI DENGAN PENERIMAAN PAJAK TERTINGGI TAHUN 2018 (DALAM TRILIUN RUPIAH)

	PROVINSI	PPN	PPH	PBB	BEA	CUKAI	PAJAK LAINNYA	TOTAL
1	DKI JAKARTA	340,34	531,67	10,91	19,30	0,41	2,66	905,30
2	JAWA TIMUR	49,57	38,99	0,32	5,16	92,30	0,62	186,96
3	JAWA BARAT	41,73	42,63	0,45	0,99	26,77	0,78	113,35
4	JAWA TENGAH	19,32	18,10	0,22	2,34	36,43	0,45	76,84
5	BANTEN	23,73	22,28	0,02	6,14	1,84	0,25	54,25

SUMBER: KEMENTERIAN KEUANGAN, 2019

data dari Kementerian Perindustrian, tidak kurang dari 300 industri rokok yang tersebar di wilayah Jawa Timur dan jumlahnya makin menurun di tahun 2018.

Di sisi lain, penerimaan perpajakan di Jawa Timur dipengaruhi oleh akselerasi kinerja sektor industri pengolahan, perdagangan, konstruksi dan transportasi yang semakin dominan. Percepatan berbagai kawasan industri Jawa Timur pada beberapa tahun terakhir tidak lepas dari pembentukan Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) "Gerbangkertosusila" (Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan). Wilayah "Gerbangkertosusila" yang berpusat di Surabaya ini selain merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua di Indonesia, juga sebagai akselerator dalam pengembangan industri serta berperan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah. Kondisi tersebut berdampak pada penyebaran industri baik itu industri hulu maupun hilir ke daerah - daerah lainnya sehingga mempengaruhi peningkatan kontribusi penerimaan negara dari sektor perpajakan baik dari pajak penghasilan maupun dari pajak pertambahan nilai di Jawa Timur.

Jawa Barat memberikan kontribusi penerimaan perpajakan terbesar ketiga senilai Rp113,35 triliun yang berasal dari kontribusi penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp42,63 triliun, penerimaan pajak pertambahan nilai sebesar Rp41,73 Triliun, dan penerimaan cukai sebesar Rp26,77 Triliun. Perekonomian Jawa Barat saat ini ditopang oleh tiga sektor utama yaitu industri pengolahan, perdagangan dan pertanian. Kondisi Jawa Barat yang merupakan daerah penyangga untuk DKI Jakarta memberikan keuntungan terhadap masuknya investasi dan berkembangnya industri. Kelebihan dari Jawa Barat selain dekat dengan DKI Jakarta adalah kemudahan energi dan akses transportasi bagi pengiriman hasil produk perusahaan dari kawasan industri maupun untuk penyediaan bahan bakunya. Selain itu, dengan dibangunnya pelabuhan Patimban di Subang sebagai Proyek Strategis Nasional dengan target kapasitas 7,5 juta teus peti kemas serta 600.000 CBU kendaraan, diharapkan perekonomian di Jawa Barat akan semakin meroket yang pada akhirnya berpengaruh pada peningkatan penerimaan Negara.

Secara umum, kontribusi penerimaan pajak per provinsi kepada pemerintah pusat pada tahun 2018 masih sangat timpang. Dari 34 provinsi, hanya 7 provinsi yang persentase kontribusi penerimaan pajak di atas 1%, sisanya masih dibawah angka tersebut. Total hanya tujuh provinsi yang kontribusi penerimaan perpajakannya diatas 1%, yaitu provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Sumatera Utara dan Kalimantan Timur. Tujuh provinsi tersebut merupakan provinsi

dengan realisasi penerimaan perpajakan diatas Rp17 Triliun. Hanya DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat yang merupakan provinsi dengan realisasi penerimaan perpajakan diatas Rp100 Triliun. Secara parsial, DKI Jakarta merupakan penyumbang terbesar hampir semua penerimaan perpajakan dari Penerimaan PPN, PPh, PBB, Bea dan Pajak Lainnya kecuali untuk penerimaan cukai tertinggi yang disumbangkan oleh Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ketiga Provinsi tersebut menyumbangkan 97,43% penerimaan cukai nasional dengan penerimaan tertinggi terutama untuk cukai tembakau.

1.II. PENERIMAAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Total penerimaan PNBP Nasional tahun 2018 sebesar Rp409,34 Triliun. PNBP tersebut berasal dari pendapatan Sumber Daya Alam (SDA) baik Migas maupun Non Migas, BMN, Jasa, Pendapatan Kementerian/Lembaga, BLU, Laba BUMN dan Lainnya. Penerimaan PNBP Nasional masih didominasi dari penerimaan SDA yaitu sektor migas. Sektor Migas menyumbang penerimaan terbesar yaitu sebesar Rp189,07 Triliun, disusul oleh penerimaan PNBP dari K/L dan penerimaan dari BMN masing masing sebesar Rp47,96 Triliun dan Rp45,27 Triliun.

GAMBAR 34. PNBP TAHUN 2018 - PER JENIS PENERIMAAN (DALAM TRILIUN RUPIAH)

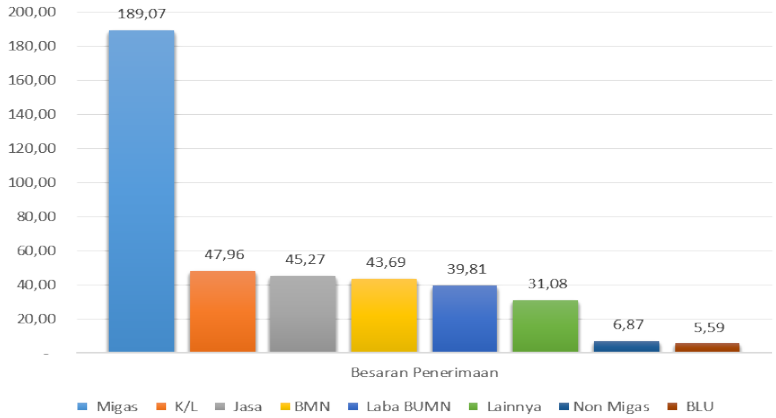

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

TABEL 14. LIMA PROVINSI DENGAN PENERIMAAN PNBP TERTINGGI TAHUN 2018 (DALAM TRILIUN RP)

	PROVINSI	JASA	BMN	K/L	MIGAS	NON MIGAS	BLU	LABA BUMN	LAIN NYA	TOTAL
1	DKI JAKARTA	26,20	43,28	30,17	189,07	6,86	4,39	39,81	29,23	369,02
2	JAWA TIMUR	2,68	0,06	3,28	0,00	-	0,21	-	0,12	6,35
3	JAWA TENGAH	2,80	0,05	1,81	-	0,00	0,20	-	0,20	5,06
4	JAWA BARAT	1,59	0,08	2,21	0,00	-	0,03	-	0,14	4,05
5	BANTEN	1,11	0,01	0,44	-	0,00	0,20	-	0,06	1,82

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

DKI Jakarta mempunyai kontribusi terbesar dalam menyumbang PNBP di tahun 2018 yaitu sebesar Rp 369,02Triliun atau 90,15% dari total Penerimaan PNBP Nasional. Tingginya angka kontribusi DKI Jakarta terhadap penerimaan PNBP Nasional dikarenakan Penerimaan PNBP untuk sektor SDA (Migas dan non Migas) dan Laba BUMN menggunakan kode lokasi pusat yaitu DKI Jakarta. Penerimaan PNBP Kementerian/Lembaga juga sebagian besar dilakukan secara terpusat sehingga penerimaan untuk DKI Jakarta menjadi sangat besar. Kondisi ini menyebabkan kajian untuk menetukan kontribusi PNBP daerah menjadi bias apabila hanya melihat dari penerimaan Non Pajak saja.

Penerimaan PNBP tertinggi kedua secara nasional terdapat di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp6,35 Triliun dengan penerimaan terbesar yang berasal dari Penerimaan PNBP

GAMBAR 35. PETA SEBARAN PENERIMAAN NEGARA - PENERIMAAAN NEGARA BUKAN PAJAK TAHUN 2018

Sumber: Kementerian Keuangan, 2019

Kementerian/Lembaga dan penerimaan Jasa dengan nominal masing-masing sebesar Rp3,28 Triliun dan Rp2.68 Triliun.

Dengan sifat penyetoran PNBP untuk beberapa penerimaan yang terpusat seperti penerimaan dari sektor SDA misalnya, akan sulit untuk menentukan sektor-sektor yang menjadi unggulan dan perlu diperkuat untuk masing-masing daerah. Apabila dilihat dari kondisi geografis dan kekayaan alamnya, maka seharusnya PNBP Sektor Sumber Daya Alam yang paling tinggi di antara seluruh provinsi di Indonesia berada di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Papua dan Sumbawa. Hal ini dikarenakan provinsi-provinsi diatas merupakan daerah pertambangan yang kaya akan sumber daya alamnya.

1.III. PENERIMAAAN ANTAR WILAYAH

Mencermati realisasi penerimaan negara (*cash inflow*) antar kawasan/regional, menunjukkan bahwa saat ini perekonomian secara umum masih terpusat di kawasan Jawa. Sedangkan kawasan yang semakin jauh dari pusat kawasan ekonomi (Jawa) menunjukkan kontribusi terhadap penerimaan negara yang masih relatif kecil. Kontribusi daerah kepada penerimaan negara jika disajikan berdasarkan kawasan/regional adalah sebagai berikut:

Penerimaan negara yang tidak merata baik di lingkup provinsi maupun regional sedikit banyak menunjukkan tingkat perekonomian suatu daerah masih belum merata. Salah satu upaya memeratakan perekonomian antar wilayah selain dengan memberikan bantuan ke pemerintah daerah (melalui dana transfer) juga dengan menyeimbangkan kondisi infrastruktur di masing-masing wila yah tersebut. Pembangunan infrastruktur merupakan penopang utama dalam kemajuan perekonomian suatu wilayah. Kondisi geografis wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan menyebabkan biaya distribusi untuk barang dan jasa menjadi tinggi. Selain itu keberadaan sumber energi, transportasi dan

TABEL 15. PERBANDINGAN REALISASI PENERIMAAN MENURUT KAWASAN/REGIONAL TAHUN 2018 (DALAM TRILIUN)

NO	WILAYAH	PERPAJAKAN	PNBP	TOTAL
1	JAWA	1.342,04	387,85	1.729,89
2	SUMATERA	83,31	9,51	92,82
3	KALIMANTAN	40,15	4,10	44,24
4	SULAWESI	20,76	4,06	24,82
5	BALI NUSRA	16,37	2,47	18,84
6	MALUKU PAPUA	16,17	1,35	17,52
TOTAL		**1.518,79**	**409,34**	**1.928,13**

SUMBER: KEMENTERIAN KEUANGAN, 2019

lokasi pasar yang tidak merata juga mempengaruhi perekonomian suatu wilayah. Oleh sebab itu, saat ini pemerintah berusaha untuk memeratakan kondisi infrastruktur yang dalam dekade sebelumnya masih terpusat di wilayah Jawa dan sebagian Sumatera.

Dengan infrastruktur yang baik dan merata diharapkan dapat mendorong percepatan arus barang serta menurunkan biaya transportasi (distribusi barang/jasa) dan biaya transaksi. Dengan sistem distribusi yang baik dan ditunjang oleh infrastruktur yang memadai, maka akan tercipta kondisi efisiensi logistik. Efisiensi logistik akan berdampak pada turunnya biaya produksi yang dampaknya diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan investasi di suatu daerah dan pada gilirannya dapat meningkatkan penerimaan negara.

2. BELANJA PEMERINTAH PUSAT

Kewenangan pelaksanaan anggaran dari APBN dilaksanakan oleh Satker Pemerintah Pusat dan Satker Pemerintah Daerah. Sesuai dengan kewenangan pelaksanaan anggaran dari dana APBN, Satker Pemerintah Pusat melaksanakan kewenangan Kantor Pusat (KP) dan Kewenangan Kantor Daerah (KD). Sementara itu, kewenangan pelaksanaan anggaran dari dana APBN yang dilaksanakan oleh Satker Pemerintah Daerah meliputi kewenangan Dana Dekonsentrasi (DK), kewenangan Tugas Pembantuan (TP), dan kewenangan Urusan Bersama (UB).

2.I. KEWENANGAN KP/KD

Kewenangan KP yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA yang diberikan kepada Satker lingkup kantor pusat K/L, termasuk di dalamnya Satker Badan Layanan Umum (BLU) pada kantor pusat, dan Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT). Sementara itu, kewenangan KD yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA yang diberikan kepada Kantor / Instansi Vertikal K/L di daerah termasuk di dalamnya untuk Satker BLU di daerah.

Total realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2018 melalui kewenangan KP/KD yang dilaksanakan oleh kementerian negara/ lembaga adalah sebesar Rp1.424,76 Triliun. Angka tersebut meningkat sebesar Rp187,36 Triliun atau 15,14% dibandingkan tahun 2017 yang mencapai Rp1.237,39 Triliun. Adapun realisasi belanja paling tinggi pada provinsi di pulau Jawa, yaitu dengan urutan tertinggi pada DKI Jakarta sebesar Rp1.032,33 Triliun, Jawa Barat sebesar Rp46,43 Triliun, Jawa Timur sebesar Rp44,81 Triliun, dan Jawa Tengah sebesar Rp39,41 Triliun.

Realisasi belanja pemerintah pusat pada DKI Jakarta sangat tinggi karena semua kantor

GAMBAR 36. PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK DAERAH MELALUI DIPA KANTOR PUSAT DAN KANTOR DAERAH TAHUN 2018

Sumber: OM SPAN (data per tanggal 9 April 2019)

pusat K/L berlokasi di DKI Jakarta. DIPA dengan kewenangan Kantor Pusat (KP) pada K/L yang memiliki pagu besar seperti Kementerian Pertahanan, Kepolisian Negara RI, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Keuangan berada di DKI Jakarta.

TABEL 16. LIMA PROVINSI DENGAN BELANJA KEWENANGAN KP/KD TERTINGGI TAHUN 2018 (DALAM MILIAR RP)

	PROVINSI	KANTOR PUSAT	KANTOR DAERAH	JUMLAH
1	DKI JAKARTA	1.002.865,50	29.466,24	1.032.331,75
2	JAWA BARAT	13.320,28	33.106,68	46.426,97
3	JAWA TIMUR	7.469,67	37.345,63	44.815,30
4	JAWA TENGAH	12.099,62	27.312,67	39.412,29
5	SUMATERA UTARA	6.589,18	15.618,26	22.207,44

SUMBER: OM SPAN (DATA PER TANGGAL 9 APRIL 2019)

Beberapa provinsi di luar Jawa yang mencatatkan angka realisasi belanja KP/KD cukup tinggi yaitu Sumatera Utara sebesar Rp22,21 Triliun, Sulawesi Selatan sebesar Rp19,07 Triliun, dan Papua sebesar Rp15,06 Triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat untuk kewenangan KP/KD yang dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga pada seluruh provinsi mencatatkan angka rata-rata diatas Rp4 Triliun kecuali pada empat provinsi yaitu Gorontalo, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Kepulauan Bangka Belitung (berada dibawah Rp4 Triliun). Keempat provinsi terendah yang merealisasikan belanja KP/KD merupakan provinsi-provinsi baru hasil pemekaran, sehingga sebagian K/L belum memiliki banyak kantor vertikal di provinsi-provinsi tersebut untuk menyalurkan dana kewenangan KP/KD. Empat provinsi yang mencatatkan dana KP/KD diatas Rp30 Triliun yaitu DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Hal tersebut sejalan dengan kondisi provinsi yang selama ini menjadi pusat pemerintahan atau menjadi provinsi yang memiliki banyak kantor vertikal dari kementerian negara/lembaga.

2.II. KEWENANGAN DK/TP/UB

Kewenangan DK yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA

Dekonsentrasi yang diberikan kepada SKPD Provinsi yang ditunjuk oleh Gubernur. Kewenangan TP yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA Tugas Pembantuan yang diberikan kepada SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang memberi tugas pembantuan. Kewenangan UB yaitu kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dalam DIPA Urusan Bersama yang diberikan kepada SKPD Provinsi/Kabupaten /Kota yang ditunjuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga berdasarkan usulan Kepala Daerah.

Realisasi belanja pemerintah pusat untuk kewenangan DK/TP/UB paling tinggi terealisasi di Jawa Tengah sebesar Rp1,26 Triliun, diikuti Jawa Timur sebesar Rp1,33 Triliun, Sulawesi Selatan sebesar Rp1,28 Triliun, Jawa Barat sebesar Rp1,05 Triliun, dan Lampung sebesar Rp830,03 Miliar. Realisasi DIPA DK/TP/UB untuk Pemda pada kawasan Indonesia bagian Timur dengan nilai realisasi yang cukup tinggi, yaitu pada Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp713,35 Milyar. Dana dekonsentrasi digunakan untuk kegiatan bersifat non fisik berupa keluaran yang tidak menambah aset, diberikan relatif merata pada seluruh provinsi di Indonesia yaitu berkisar ratusan miliar rupiah. Tercatat lima provinsi yang mendapatkan dana dekonsentrasi di bawah Rp100 Miliar, yaitu Sulawesi Barat, Kalimatan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta. Sedangkan dana TP sebagian besar untuk kegiatan yang bersifat fisik dan menghasilkan keluaran yang menambah nilai aset pemerintah.

TABEL 17. LIMA PROVINSI DENGAN REALISASI BELANJA DANA DK/TP/UB TERBESAR TAHUN 2018 (DALAM MILIAR RP)

	PROVINSI	DEKON SENTRASI	TUGAS PEM BANTUAN	URUSAN BERSAMA	JUMLAH
1	JAWA TENGAH	437,54	1.025,14	-	1.462,68
2	JAWA TIMUR	468,48	855,99	2,65	1.327,11
3	SULAWESI SELATAN	274,15	1.003,57	-	1.277,73
4	JAWA BARAT	393,08	652,61	4,23	1.049,91
5	LAMPUNG	211,64	618,39	-	830,03

Sumber: OM SPAN (data per tanggal 9 April 2019)

Nilai penyaluran belanja pemerintah pusat menurut kewenangan DK/TP/UB yang mencapai Rp18,70 Triliun jauh lebih rendah dibandingkan kewenangan KP/KD sebesar Rp1.424,76 Triliun. Namun demikian, angka realisasi atas kewenangan DK/TP/UB yang disalurkan kepada pemerintah daerah tersebut seharusnya dapat menjadi pendukung dana transfer ke daerah bagi provinsi/kabupaten/kota. Belanja pemerintah kewenangan KP/KD tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp187,36 Triliun atau 15,14% dari tahun 2017 yang mencapai Rp1.237,39 Triliun. Adapun belanja kewenangan DK/TP/UB tahun 2018 justru mengalami penurunan sebesar Rp1,28 Triliun atau 6,41% dari belanja tahun 2017 sebesar Rp19,98 Triliun. Penyaluran belanja pemerintah pusat melalui dana DK/TP/UB yang dilaksanakan oleh SKPD di provinsi/kabupaten/kota melalui DIPA kementerian negara/lembaga terealisasi antara Rp85,14 Miliar sampai dengan Rp1,46 Triliun untuk setiap provinsi.

Nilai penyaluran belanja pemerintah pusat menurut kewenangan DK/TP/UB yang mencapai Rp18,70 Triliun jauh lebih rendah dibandingkan kewenangan KP/KD sebesar Rp1.424,76 Triliun. Namun demikian, angka realisasi atas kewenangan DK/TP/UB yang disalurkan kepada pemerintah daerah tersebut

GAMBAR 37. PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK DAERAH MELALUI DIPA DANA DEKONSENTRASI, TUGAS PEMBANTUAN

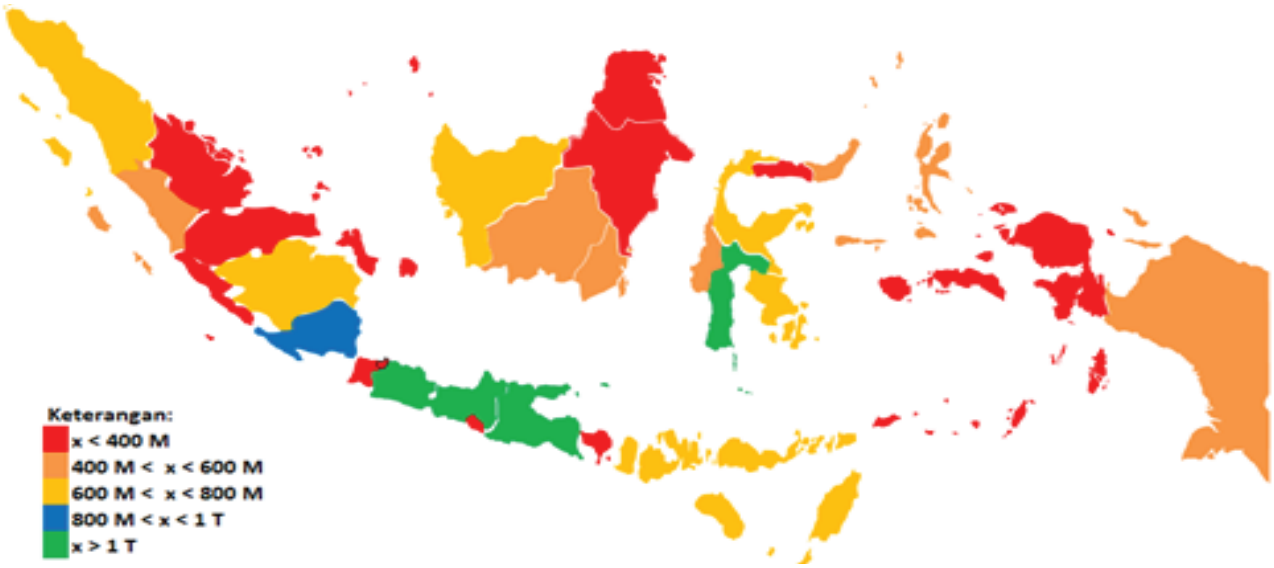

Sumber: OM SPAN (data diolah)

seharusnya dapat menjadi pendukung dana transfer ke daerah bagi provinsi/kabupaten/kota. Belanja pemerintah kewenangan KP/KD tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp187,36 Triliun atau 15,14% dari tahun 2017 yang mencapai Rp1.237,39 Triliun. Adapun belanja kewenangan DK/TP/UB tahun 2018 justru mengalami penurunan sebesar Rp1,28 Triliun atau 6,41% dari belanja tahun 2017 sebesar Rp19,98 Triliun. Penyaluran belanja pemerintah pusat melalui dana DK/TP/UB yang dilaksanakan oleh SKPD di provinsi/kabupaten/kota melalui DIPA kementerian negara/lembaga terealisasi antara Rp85,14 Miliar sampai dengan Rp1,46 Triliun untuk setiap provinsi.

3. BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan bagian belanja negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa. Belanja TKDD terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dana Desa, dan Transfer Lainnya (Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY, dan Dana Insentif Daerah). Pada tahun 2018 total realisasi belanja TKDD mencapai Rp757,79 triliun, atau mengalami kenaikan sebesar Rp15,80 Triliun atau 2,13% dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang mencapai Rp741,99 Triliun.

3.I. DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Realisasi DAU pada tahun 2018 mencapai Rp401,48 Triliun, atau mengalami kenaikan sebesar Rp2,90 Triliun atau 0,73% jika dibandingkan dengan belanja DAU tahun 2017 sebesar Rp398,58 Triliun. Dari 34 provinsi yang ada, DKI Jakarta adalah satu-satunya provinsi yang tidak menerima DAU karena memiliki kemandirian fiskal yang sangat tinggi. Selain itu, hampir seluruh provinsi penerima DAU (32 provinsi) mengalami kenaikan dana berkisar

antara 0,02% s.d. 6,11% dibandingkan tahun 2017. Satu-satunya provinsi yang mendapatkan alokasi DAU sama dengan tahun lalu adalah Provinsi DI Yogyakarta yakni tetap sebesar Rp5,59 Triliun.

GAMBAR 38. LIMA PROVINSI PENERIMA DAU TERTINGGI TAHUN 2018

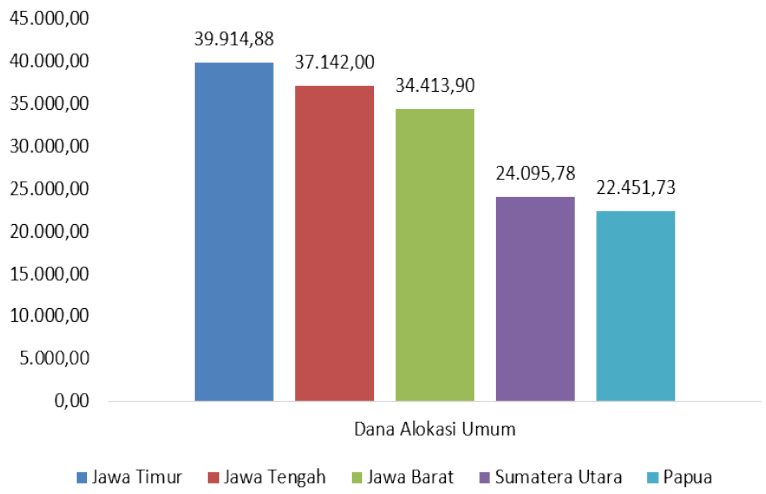

Sumber: OM SPAN (data per tanggal 9 April 2019)

Dari total realisasi DAU sebesar Rp401,48 Triliun, tiga provinsi di Pulau Jawa menjadi penerima DAU terbesar yaitu JawaTimur sebesar Rp39,91 Triliun, diikuti Jawa Tengah sebesar Rp37,14 Triliun, dan Jawa Barat sebesar Rp34,41 Triliun. Daerah yang paling sedikit menerima DAU adalah Kalimantan Utara sebesar Rp3,70 Triliun, Gorontalo sebesar Rp4,02 Triliun, dan Sulawesi Barat sebesar Rp4,22 Triliun.

Penentuan daerah untuk perhitungan DAU adalah berdasarkan formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar. Provinsi atau daerah yang menerima DAU besar memiliki celah fiskal yang besar yaitu kebutuhan fiskal daerah jauh lebih besar dibandingkan kapasitas fiskal daerah dan jumlah gaji PNS daerah terkait sangat besar untuk dijadikan dasar perhitungan alokasi dasar DAU.

3.II. DANA ALOKASI KHUSUS

DAK merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik dan non fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah menerima penyaluran DAK Fisik secara triwulanan per bidang sedangkan penyaluran DAK Non Fisik disesuaikan dengan jenisnya.

GAMBAR 39. PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK DAERAH MELALUI DANA ALOKASI UMUM TAHUN 2018

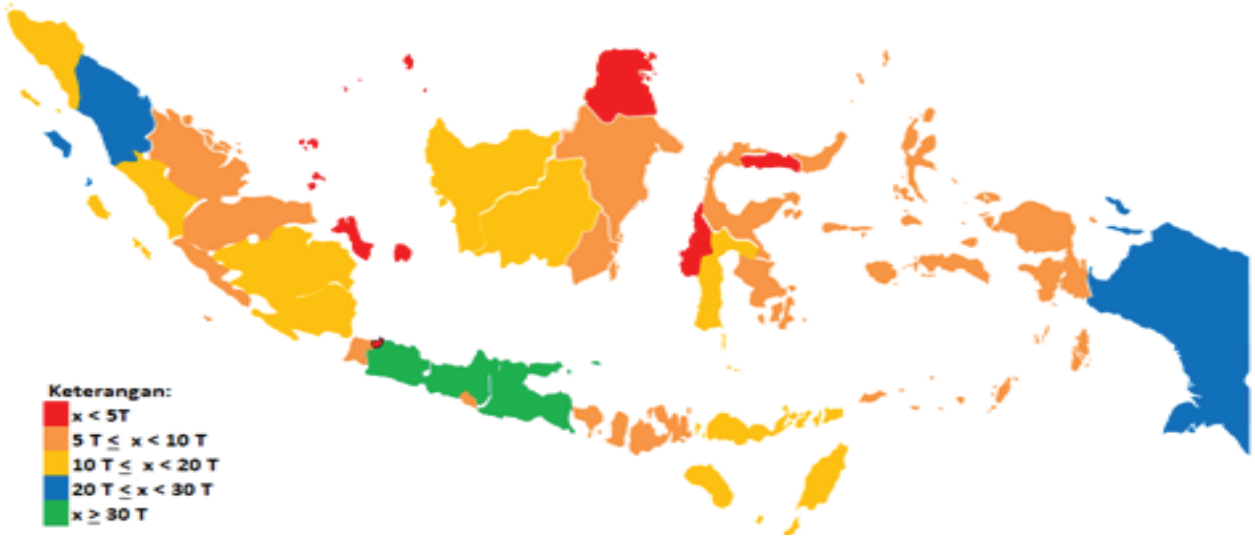

Sumber: OM SPAN (data per tanggal 9 April 2019)

GAMBAR 40. LIMA PROVINSI PENERIMA DAK TERTINGGI TAHUN 2018

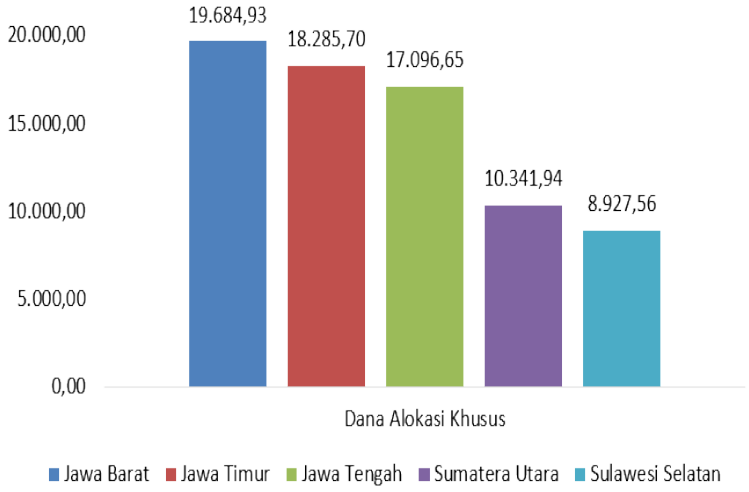

Sumber: OM SPAN (data per tanggal 9 April 2019)

Realisasi DAK tahun 2018 mencapai Rp173,45 Triliun, atau mengalami sedikit kenaikan sebesar Rp5,78 Triliun atau 3,45% dari realisasi tahun 2016 sebesar Rp167,67 Triliun. Kenaikan/ penurunan porsi penyaluran DAK tahun 2018 relatif lebih beragam. Dari 34 provinsi penerima DAK, terdapat 28 provinsi yang mendapatkan tambahan dana, sedangkan sisanya sebanyak 6 provinsi mengalami penurunan. Provinsi yang mengalami kenaikan terbesar secara nominal adalah Papua mencapai Rp705,00 Miliar atau 13,18% (tahun 2017 sebesar Rp5,37 Triliun menjadi Rp6,05 Triliun di tahun 2018).

Adapun tiga daerah yang memperoleh DAK terbesar di tahun 2018 yaitu Jawa Barat sebesar Rp19,68 Triliun, Jawa Timur sebesar Rp18,28 Triliun, dan Jawa Tengah sebesar Rp17,09 Triliun. Meskipun penerima DAK terendah bukan daerah di kawasan timur Indonesia, namun ketiga penerima DAK terbesar adalah provinsi di daerah Jawa yang sudah dikenal lebih maju dibandingkan daerah-daerah lainnya, sehingga nampak DAK masih lebih banyak terealisasi di Pulau Jawa. Terkait dengan hal tersebut, diperlukan penyesuaian prioritas pembangunan fisik dan non fisik pemerintah daerah dengan prioritas nasional, sehingga suatu daerah akan mendapatkan DAK yang lebih besar.

Penyaluran DAK pada seluruh provinsi tersebar merata berdasarkan kesesuaian kegiatan fisik dan non fisik di daerah dengan skala prioritas nasional. Terdapat lima provinsi yang menerima DAK di bawah Rp2 Triliun yaitu: Sulawesi Barat, Gorontalo, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Kalimantan Utara.

GAMBAR 41. PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN 2018

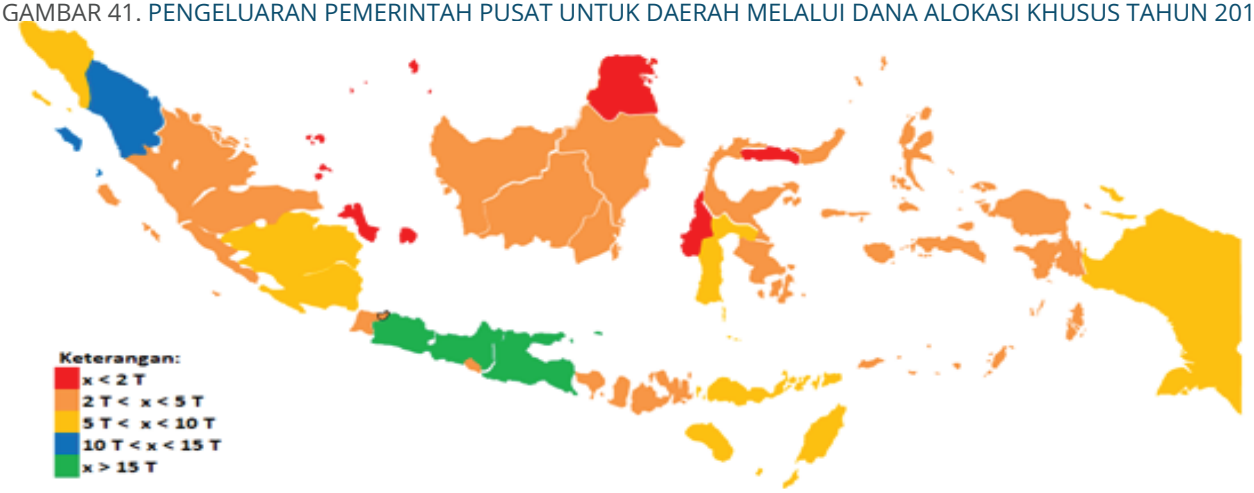

Sumber: OM SPAN (data per tanggal 9 April 2019)

3.III. DANA BAGI HASIL (DBH)

DBH merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH Pajak terdiri dari PBB, PPh Pasal 21 dan PPh Pajak Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). DBH SDA merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan SDA kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.

Realisasi belanja DBH tahun 2018 sebesar Rp93,70 Triliun, atau mengalami kenaikan sebesar 6,20% jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 yang mencapai Rp88,23 Triliun. Provinsi Kalimantan Timur menerima DBH dengan kenaikan nilai tertinggi yakni sebesar Rp3,56 Triliun, atau meningkat sebesar 39,77 % dibandingkan tahun 2017.

GAMBAR 42. LIMA PROVINSI PENERIMA DBH TERTINGGI TAHUN 2018

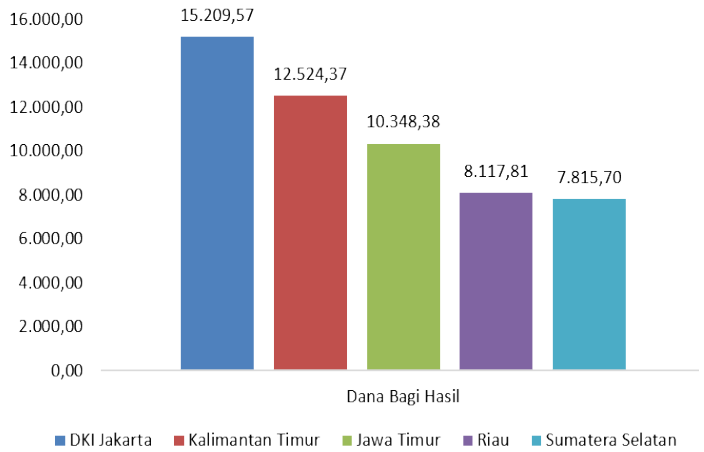

Sumber: OM SPAN (data per tanggal 9 April 2019)

Pada tahun 2018 Provinsi Kalimantan Timur menerima DBH yang mencapai Rp12,52 Triliun, dimana pada tahun 2017 hanya sebesar Rp8,96 Triliun. Adapun penurunan nilai DBH terbesar terjadi pada Provinsi DKI Jakarta yakni sebesar Rp1,65 Triliun, atau mencapai 9,83% dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta hanya menerima DBH sebesar Rp15,21 Triliun, sedangkan pada tahun 2017 DBH yang diterima mencapai Rp16,86 Triliun.

GAMBAR 43. PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK DAERAH MELALUI DANA BAGI HASIL (DBH) TAHUN 2018

Sumber: OM SPAN (data per tanggal 9 April 2019)

3.IV. DANA DESA (DD)

Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Realisasi Dana Desa tahun 2018 mencapai Rp59,86 Triliun, atau mengalami sedikit kenaikan yakni 0,16% atau Rp92,83 Miliar dari realisasi tahun 2017 sebesar Rp59,76 Triliun.

Sama halnya dengan belanja DAU, Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya provinsi yang tidak menerima DD. Hal ini dikarenakan Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat level Pemerintah Desa yang merupakan terget penerima Dana Desa. Hanya 16 provinsi penerima DD yang memperoleh kenaikan nilai alokasi berkisar antara 0,69% s.d. 13,39% pada tahun 2018. Kenaikan terbesar secara persentase diperoleh oleh Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar 13,39% atau Rp115,75 Miiar. Pada 17 provinsi lainnya mengalami penurunan alokasi DD berkisar antara 0,05% s.d. 8,99% pada tahun 2018. Penurunan terbesar secara persentase dialami oleh Provinsi Bengkulu dari alokasi tahun 2017 sebesar Rp1,03 Triliun menjadi Rp941,83 Miliar pada tahun 2018.

GAMBAR 44. LIMA PROVINSI PENERIMA DANA DESA TERTINGGI TAHUN 2018

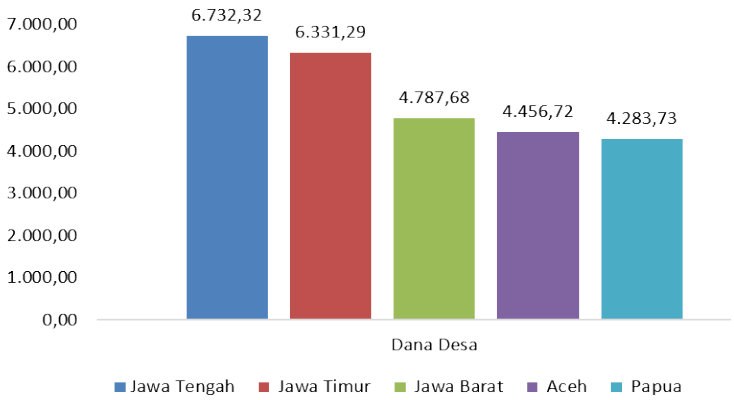

Sumber: OM SPAN (data per tanggal 9 April 2019)

Secara keseluruhan, alokasi Dana Desa pada tahun 2018 terserap sebesar Rp59,86 Triliun yang tersebar pada seluruh desa. Dari 33 provinsi penerima Dana Desa, sebanyak 11 provinsi menerima dana desa antara Rp1,60 Triliun sampai dengan Rp6,7 Triliun, 17 provinsi menerima dana desa antara Rp500 Miliar sampai dengan Rp1,60 Triliun, dan 5 provinsi menerima dana desa di bawah Rp500 Miliar.

GAMBAR 45. PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK DAERAH MELALUI DANA DESA (DD) TAHUN 2018

Sumber: OM SPAN (data per tanggal 9 April 2019)

3.V. TRANSFER LAINNYA

Pemerintah Pusat melakukan transfer Dana Otonomi Khusus meliputi Transfer Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dan Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, Dana Keistimewaan DIY, serta Dana Insentif Daerah.

Pengeluaran Pemerintah Pusat untuk daerah melalui DIPA transfer ke daerah berupa dana lainnya yang mencakup Dana Otonomi Khusus yang diperuntukkan Provinsi Aceh sebesar Rp8,03 Triliun, Provinsi Papua sebesar Rp8,02 Triliun, dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp4,01 Triliun. Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dana Otonomi Khusus terdiri atas Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, Papua, dan Papua Barat, serta Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua dan Papua Barat.

GAMBAR 46. LIMA PROVINSI PENERIMA TRANSFER LAINNYA TERTINGGI TAHUN 2018

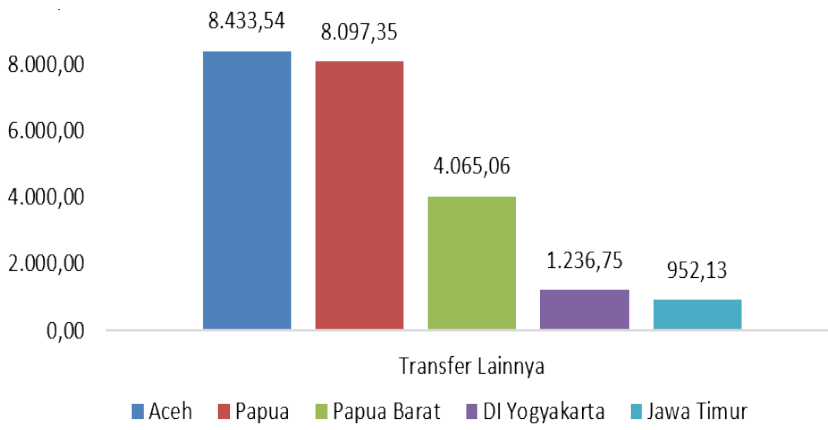

Sumber: OM SPAN (data per tanggal 9 April 2019)

Alokasi Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Dana Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh. Dana Otonomi Khusus merupakan dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan. Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh digunakan untuk membiayai pembangunan terutama ditujukan untuk pembangunan dan pemeliharaan

GAMBAR 47. PENGELUARAN PEMERINTAH PUSAT UNTUK DAERAH MELALUI DANA TRANSFER LAINNYA TAHUN 2018

Sumber: OM SPAN (data per tanggal 9 April 2019)

infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat terutama ditujukan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan.

Pada tahun 2018, belanja Transfer Lainnya juga meliputi Dana Keistimewaan (Danais) DIY sebesar Rp1,00 Triliun atau meningkat signifikan sebesar Rp200,00 Miliar atau mencapai 25% dari tahun 2017 sebesar Rp800,00 Miliar. Peningkatan Danais DIY tersebut dimaksudkan untuk mendorong kegiatan perekonomian yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Selain itu, Pemerintah Pusat juga memberikan Dana Insentif Daerah. Penerima Dana Insentif Daerah terbesar pada tahun 2018 yaitu Provinsi Jawa Timur sebesar Rp952,12 Miliar. Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat pada urutan kedua dan ketiga sebagai penerima DID terbesar masing-masing sebesar Rp788,75 Miliar dan Rp563,62 Miliar.

Pada bagian sebelumnya, telah diulas mengenai pengeluaran pemerintah pusat kepada daerah yang disajikan berdasarkan provinsi. Selanjutnya, apabila pengeluaran pemerintah pusat kepada daerah disajikan berdasarkan kawasan/regional didapatkan data sebagai berikut:

Kawasan/Regional Kalimantan memperoleh kenaikan alokasi belanja yang terbesar secara persentase pada Belanja Pemerintah Pusat dan Belanja Transfer Daerah masing-masing sebesar 17,08% dan 7,85%. Kenaikan tersebut sebagian besar pada bidang/fungsi pariwisata dengan kenaikan sebesar 83,58% dan bidang infrastruktur perumahan dan fasilitas umum sebesar 45,69%. Peningkatan belanja tersebut cukup berdampak pada perkembangan pariwisata di regional Kalimantan, diantaranya:

Peningkatan promosi dan even wisata serta semakin berkembangnya infrastruktur jalan dan bandara, meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Kalimantan Barat yang mencapai 51.797 orang, angka ini meningkat 28,43% dibandingkan periode yang sama tahun 2017.

Terjadi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara menjadi pada tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 yang semula 26.159 orang menjadi 39.610, sementara kunjungan

TABEL 18. PERBANDINGAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH MENURUT KAWASAN/REGIONAL TAHUN 2017-2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

Kawasan/ Regional	BELANJA PEMERINTAH PUSAT				BELANJA TRANSFER KE DAERAH & DANA DESA			
	2017	2018	Kenaikan	% Kenaikan	2017	2018	Kenaikan	% Kenaikan
Sumatera	87.999,09	99.645,10	11.646,01	13,23%	204.254,39	205.980,65	1.726,27	0,85%
Jawa	1.034.531,44	1.188.207,90	153.676,46	14,85%	244.975,51	248.119,42	3.143,91	1,28%
Kalimantan	32.220,86	37.724,40	5.503,54	17,08%	75.003,68	80.891,98	5.888,31	7,85%
Sulawesi	46.095,90	53.179,29	7.083,38	15,37%	87.456,79	88.779,85	1.323,06	1,51%
Bali Nusra	25.131,09	28.706,34	3.575,25	14,23%	48.280,35	48.594,63	314,28	0,65%
Maluku Papua	31.401,50	36.001,00	4.599,50	14,65%	82.021,67	85.426,41	3.404,73	4,15%
Total	**1.257.379,89**	**1.443.464,03**	**186.084,14**	**14,80%**	**741.992,38**	**757.792,94**	**15.800,56**	**2,13%**

Sumber: OM SPAN (data per tanggal 9 April 2019)

wisatawan domestik pada tahun 2017 berjumlah 839.915 orang meningkat menjadi 952.389 orang pada tahun 2018 .

4. SURPLUS DEFISIT

Surplus/defisit merupakan selisih antara kontribusi penerimaan negara pada suatu daerah terhadap penerimaan nasional dengan pengeluaran pemerintah pusat pada daerah. Kondisi surplus mengindikasikan bahwa daerah tersebut memberikan subsidi silang kepada daerah lain di Indonesia. Sementara itu, kondisi defisit mengindikasikan bahwa daerah tersebut menerima subsidi silang dari daerah lain di Indonesia. Kondisi surplus/defisit ini akan menunjukkan kemandirian fiskal dari daerah tersebut.

Provinsi DKI Jakarta menjadi penyumbang surplus terbesar yakni mencapai Rp419,74 Triliun. Selanjutnya diikuti Provinsi Kalimantan Timur, Banten dan Kalimantan Selatan masing-masing menyumbang surplus sebesar Rp49,43 Triliun, dan Rp21,24 Triliun dan 12,99 Triliun. Surplus dari keempat provinsi tersebut memberikan subsidi silang kepada wilayah lain di Indonesia.

Sementara itu, empat provinsi yang menjadi penyumbang selisih defisit paling besar yaitu Provinsi Jawa Tengah, Papua, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Masing-masing provinsi tersebut menyumbang defisit secara berurutan sebesar Rp64,79 Triliun, Rp46,09 Triliun, Rp43,29 Triliun dan Rp40,25 Triliun. Pada Provinsi Jawa Tengah meningkatnya defisit pada tahun 2018 disebabkan oleh menurunnya penerimaan, terutama

GAMBAR 48. SURPLUS/DEFISIT PROVINSI TAHUN 2018

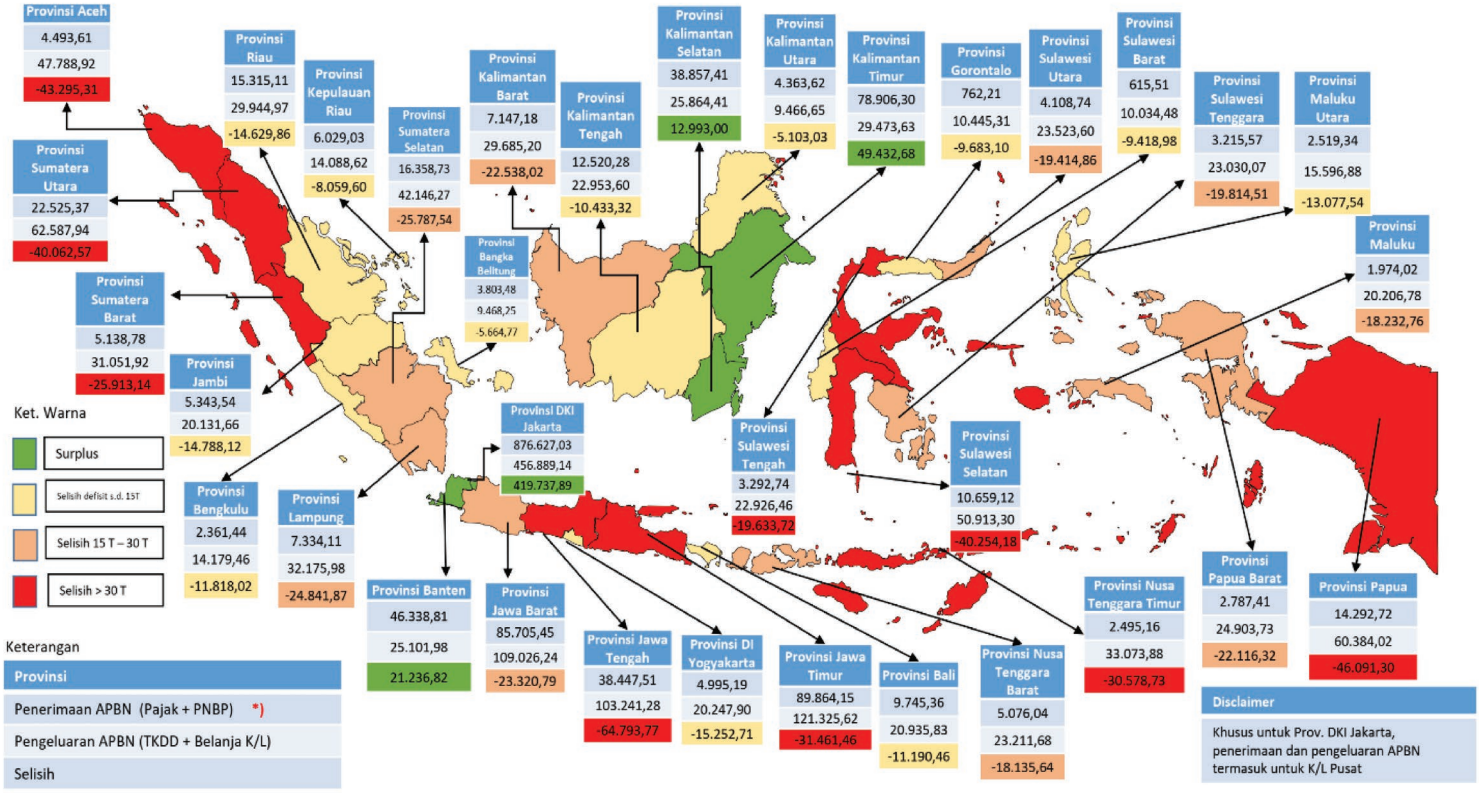

Sumber: DJP, DJA, DJPB dan DJPK

TABEL 19. ANGKA SURPLUS/DEFISIT PROVINSI TAHUN 2018 (DALAM MILIAR RP)

No	Provinsi	Surplus/Defisit 2017	Surplus/Defisit 2018	No	Provinsi	Surplus/Defisit 2017	Surplus/Defisit 2018
1	Aceh	(42.217,11)	(43.295,31)	18	Kalimantan Tengah	(16.640,48)	(10.433,32)
2	Sumatera Utara	(35.000,07)	(40.062,57)	19	Kalimantan Selatan	(15.072,81)	12.993,00
3	Sumatera Barat	(23.618,96)	(25.913,14)	20	Kalimantan Timur	(8.687,60)	49.432,68
4	Riau	(13.356,23)	(14.629,86)	21	Sulawesi Utara	(18.294,85)	(19.414,86)
5	Kepulauan Riau	(5.663,09)	(8.059,60)	22	Sulawesi Tengah	(27.885,98)	(19.633,72)
6	Jambi	(14.636,09)	(14.788,12)	23	Sulawesi Selatan	(35.674,48)	(40.254,18)
7	Sumatera Selatan	(29.201,41)	(25.787,54)	24	Sulawesi Tenggara	(19.335,99)	(19.814,51)
8	Lampung	(21.373,50)	(24.841,87)	25	Sulawesi Barat	(9.023,63)	(9.418,98)
9	Bengkulu	(11.834,73)	(11.818,02)	26	Gorontalo	(8.971,12)	(9.683,10)
10	Kepulauan Bangka Belitung	(6.631,74)	(5.664,77)	27	Bali	(9.035,63)	(11.190,46)
11	Banten	22.407,63	21.236,82	28	NTB	(18.294,85)	(18.135,64)
12	DKI Jakarta	442.384,80	419.737,89	29	NTT	(27.885,97)	(30.578,73)
13	Jawa Barat	(1.657,14)	(23.320,79)	30	Maluku	(17.202,58)	(18.232,76)
14	Jawa Tengah	(17.184,24)	(64.793,77)	31	Maluku Utara	(12.652,26)	(13.077,54)
15	Di Yogyakarta	(12.326,70)	(15.252,71)	32	Papua	(47.486,01)	(46.091,30)
16	Jawa Timur	61.778,06	(31.461,46)	33	Papua Barat	(21.875,65)	(22.116,32)
17	Kalimantan Barat	(21.589,66)	(22.538,02)	34	Kalimantan Utara	(6.792,33)	(5.103,03)

Sumber: DJP, DJA, DJPB dan DJPK

penerimaan Perpajakan dan Kepabeanan Cukai, sementara realisasi belanja meningkat dibanding tahun 2017. Penyebab turunnya penerimaan perpajakan antara lain disebabkan oleh : Short Fall penjualan Produk Hasil Tembakau di Kabupaten Kudus dan turunnya tarif PPh Final untuk UMKM dari 1% menjadi 0,5% pertahun per 1 Juli 2018 dengan berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018 yang sedikit menghambat pertumbuhan penerimaan perpajakan. Pada ketiga provinsi provinsi lainnya, provinsi tersebut yang sebagian besar mengandalkan penerimaan dari SDA yang sangat terpengaruh atas penurunan harga minyak dunia dan komoditas.

Porsi belanja negara yang diterima sebuah kawasan memberikan informasi mengenai arah pengembangan pembangunan didasarkan atas berbagai hal antara lain konsentrasi jumlah penduduk, konsentrasi arus barang/jasa, dan konsentrasi aktivitas ekonomi. Arus pergerakan barang/jasa yang dihasilkan dari kawasan Jawa relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kawasan yang lain. Kondisi tersebut memiliki magnet untuk menarik alokasi anggaran belanja yang relatif lebih besar dari Pemerintah Pusat.

Kawasan Jawa, Bali dan Sumatera mendominasi pengeluaran belanja negara dengan berbagai daya tarik bidang pariwisata, perdagangan, dan kegiatan industri. Tingginya belanja negara dalam jangka panjang akan mendorong peningkatan pembangunan di Kawasan Jawa Bali dan Sumatera. Sementara, kawasan diluar Jawa, Bali dan Sumatera yang menerima lebih sedikit cenderung dibanding kawasan tersebut, meskipun porsinya semakin meningkat.

5. ANALISIS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN

5.I. AKTIVITAS EKONOMI

Hubungan antara perekonomian dengan penerimaan perpajakan bersifat searah, dalam arti bahwa ketika aktivitas perekonomian suatu daerah tersebut tinggi, maka penerimaan sektor perpajakan akan tinggi. Aktivitas perekonomian lebih tinggi pada mayoritas provinsi yang berada di regional Jawa mempunyai dampak positif terhadap penerimaan di sektor perpajakan. Dukungan sarana dan prasarana yang lebih lengkap di pulau Jawa menyebabkan para investor lebih tertarik untuk menanamkan modalnya di regional Jawa dibandingkan dengan wilayah lain. Selain itu, pasokan energi dan distribusi di wilayah Jawa jauh lebih baik. Pertimbangan terhadap orientasi pasar, dimana mayoritas wilayah pemasaran berada di wilayah Jawa. Itulah sebabnya wilayah Jawa perekonomiannya lebih didominasi industri dan jasa.

Dari data penerimaan yang ada di tiap wilayah, penerimaan dari sektor perpajakan tertinggi untuk PPN dan PPh adalah DKI Jakarta yang tercatat sebesar Rp920.338,98 miliar. Tingginya penerimaan dari kedua sektor tersebut dapat ditarik hipotesis bahwa sektor yang dominan di Wilayah DKI Jakarta adalah penerimaan sektor usaha utama seperti perdagangan dan industri yang tumbuh signifikan. DKI Jakarta merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis di Indonesia, sehingga memiliki kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian nasional.

Besarnya kekuatan ekonomi Jakarta membuat ibukota sebagai magnet bagi para investor baik dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya dan berinvestasi. Berdasarkan data BKPM, investasi PMDN maupun PMA untuk DKI Jakarta pada tahun 2018 mencapai 114,2 triliun, mencakup 15% dari investasi nasional dan tertinggi di Indonesia untuk realisasi PMDN. Adapun tiga sektor yang paling diminati investor adalah transportasi, gudang dan telekomunikasi serta konstruksi. Tidak dapat dipungkiri bahwa penggerak perekonomian nasional berada di ibukota, mulai dari perusahaan nasional maupun asing, pusat perbankan, sektor jasa dan perdagangan, hingga pada aktivitas usaha kecil dan menengah. Aktivitas perekonomian di DKI Jakarta dominan ditopang oleh industri di kawasan Jabodetabek serta kegiatan ekspor impor dari pelabuhan Tanjung Priok. Perekonomian Jakarta banyak didominasi dari sektor pelayanan jasa. Besarnya perekonomian Provinsi Jakarta ini tidak terlepas dari lengkapnya sektor infrastruktur yang tersedia.

Besarnya sumbangan DKI Jakarta terhadap penerimaan negara dapat juga dilihat dari jumlah wajib pajak badan dari perusahaan-perusahaan besar maupun orang pribadi yang tercatat di DKI Jakarta. Tentunya hal ini juga menjadi salah satu faktor penerimaan negara di bidang perpajakan untuk wilayah DKI Jakarta sangat besar. Kenaikan PPh tercatat 20,16% dibanding tahun sebelumnya, tercatat realisasi penerimaan Pajak Penghasilan pada tahun 2018 sebesar Rp543.181,74 miliar. Kenaikan tersebut didorong oleh

bertambahnya kesadaran para wajib pajak serta program-program strategis perpajakan. Selain itu, semakin berkembangnya sektor barang kebutuhan industri berdampak pada peningkatan PPN. Kenaikan PPN tercatat sebesar 22,84% dibanding tahun sebelumnya, tercatat penerimaan PPN pada tahun 2018 sebesar Rp377.157,24 miliar. Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan pajak-pajak impor karena kenaikan impor atas bahan baku dan material untuk proyek-proyek infrastruktur serta impor bahan makanan.

Jika dilihat dari besarnya penerimaan cukai, maka kita akan melihat bahwa Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan penerimaan cukai terbesar. Dengan melihat penerimaan ini, bisa kita lihat bahwa perekonomian Jawa Timur sangat dipengaruhi oleh industri yang menghasilkan penerimaan cukai yaitu industri rokok. Jawa Timur menyumbang Rp92,26 Triliun atau 57,83% dari total penerimaan cukai nasional. Data dari kementerian perindustrian menyebutkan bahwa tidak kurang dari 291 industri rokok terdapat di wilayah Jawa Timur. Industri rokok sudah menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat di Jawa Timur, dari hulu sampai hilir, perusahaan rokok menyerap tenaga kerja yang tidak sedikit. Beberapa pabrik rokok berdiri di Jawa Timur, tetapi sampai dengan saat ini hanya PT Gudang Garam yang merupakan pabrik terbesar di wilayah Jawa Timur. Keberadaan PT Gudang Garam di Jawa Timur telah membuka lapangan usaha bagi masyarakat sekitar khususnya pertanian dengan menanam tembakau sebagai bahan dasar pembuatan rokok dan di sektor lapangan pekerjaan sebagai pekerja di pengolahan rokok. Industri rokok di Jawa Tengah dan Jawa Barat juga cukup tinggi. Industri rokok di Jawa Tengah memberikan sumbangan penerimaan cukai sebesar Rp36,42 Triliun atau 22,82% dari total penerimaan cukai nasional, angka tersebut merupakan penyumbang cukai terbesar kedua dibawah Jawa Timur. Sadangkan industri rokok di Jawa Barat yang memberikan sumbangan penerimaan cukai sebesar Rp26,76 Triliun.

Dari segi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Provinsi DKI Jakarta masih mendominasi penerimaaan dengan total penerimaan sebesar Rp142.851,50 Miliar. Secara nasional, pendapatan PNBP pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2018 setara dengan 30,82% pada pendapatan PNBP Nasional sebesar Rp.463.448,87 Miliar.

Tingginya penerimaan negara di sektor non pajak pada Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh penerimaan laba BUMN sebesar Rp43 Triliun. Penerimaan ini hanya ada di Jakarta karena penerimaan laba BUMN terpusat di DKI Jakarta. Selain itu besarnya PNBP dari sektor lain juga tercatat masih besar disebabkan sebagian besar instansi pemerintah yang mengelola PNBP berlokasi di DKI Jakarta.

Khusus untuk penerimaan negara bukan pajak dari sektor Sumber Daya Alam, Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Hal ini mengingat potensi sektor pertambangan di kedua provinsi tersebut sangat melimpah. Kedua provinsi ini sangat menggantungkan perekonomiannya pada kekayaan sumber daya alamnya. Sebagai

provinsi yang kaya dengan potensi SDA harus dapat dioptimalkan, sehingga mampu menopang percepatan pembangunan yang muaranya untuk mensejahterakan masyarakat serta kemajuan daerah. Oleh karena itu, mengolah potensi unggulan yang ada perlu dilakukan terobosan, menciptakan karya dan inovasi yang dapat mendukung kemajuan perekonomian daerah yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi Pengeluaran Negara, hanya ada satu Provinsi yang tidak menerima Dana Alokasi Umum dan Dana Desa yakni Provinsi DKI Jakarta. Kondisi ini menunjukkan bahwa DKI Jakarta merupakan provinsi dengan kondisi keuangan daerahnya yang sudah mandiri. Kemandirian keuangan daerah DKI Jakarta diindikasikan dengan tingginya pendapatan asli daerah. Rasio PAD pada Provinsi DKI Jakarta senantiasa lebih besar dari pada Rasio Transfer. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun menerima alokasi transfer, sumber utama pendapatan untuk pembiayaan belanja pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Pendapatan Asli Daerah. Kondisi ini juga berarti pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kemandirian dalam pengelolaan keuangan yang cukup tinggi.

Jawa Timur juga tercatat sebagai salah satu provinsi yang memiliki PAD yang relatif besar. Kondisi tersebut tentunya akan berdampak pada perhitungan kemandirian keuangan daerah, sehingga Jawa Timur memperoleh DAU dari Pemerintah Pusat relatif besar. Dari perhitungan secara keseluruhan maka Jawa Timur dapat dikelompokkan sebagai provinsi yang surplus keuangan daerahnya. Jawa Timur memiliki rasio PAD sebesar 0,30 sedangkan rasio dana transfer sebesar 0,67. Dengan rasio PAD lebih kecil daripada rasio dana transfer, menunjukkan bahwa pemda yang ada di Provinsi Jawa Timur masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana transfer.

Sementara itu, Provinsi Banten yang berada dekat daerah DKI Jakarta menyebabkan aktivitas ekonomi di provinsi ini tumbuh semakin pesat. Fasilitas pelabuhan yang menjadi pintu keluar untuk ekspor hasil industri dari Banten juga menjadi alasan lain perekonomian Banten semakin kondusif. Pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di provinsi ini salah satunya adalah kemudahan dalam distribusi barang dan jasa. Banten memiliki fasilitas infrastruktur yang cukup lengkap seperti jalan, pelabuhan dan bandar udara serta kedekatan dengan daerah-daerah pemasaran dan sumber energi menjadikan daerah ini menarik bagi para investor. Kemudahan akses hasil industri tersebut akan menambah daya tarik bagi investor untuk terus berinvestasi di Provinsi Banten. Investasi di propinsi Banten secara tidak langsung akan meningkatkan penerimaan negara khususnya dari sektor penerimaan perpajakan.

5.II. PROPORSI BELANJA

Belanja pemerintah dilaksanakan melalui belanja pemerintah pusat dan belanja transfer ke daerah, total belanja pemerintah sebesar Rp2.201,25 Triliun untuk seluruh wilayah Indonesia dengan proporsi realisasi untuk

setiap kawasan/regional sebagaimana Tabel II.8. Proporsi belanja pemerintah tahun 2017 paling tinggi di pulau Jawa (62,25%), diikuti Sumatera (13,88), Sulawesi (6,45%), Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat (5,52%), Pulau Kalimantan (5,39%), dan Bali-Nusa Tenggara (3,51%). Besaran belanja pemerintah pada suatu daerah dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

5.III. JUMLAH PENDUDUK

Perbandingan antara porsi alokasi anggaran belanja pemerintah dengan jumlah penduduk suatu kawasan di Indonesia pada umumnya masih berbanding lurus dengan jumlah penduduk.

Pengalokasian belanja pemerintah disesuaikan dengan jumlah dan kepadatan penduduknya. Kawasan Jawa dengan proporsi jumlah penduduk paling besar (56,46%) mendapatkan proporsi belanja pemerintah paling besar (62,25%), pulau Sumatera (proporsi jumlah penduduk 21,80% searah dengan proporsi belanja pemerintah (13,88%), kawasan Sulawesi (proporsi jumlah penduduk 7,34% searah dengan proporsi belanja pemerintah (6,45%), dan kawasan Kalimantan (proporsi jumlah penduduk 6,12% searah dengan proporsi belanja pemerintah 5,39%).

Untuk kawasan Bali-Nusa Tenggara serta Maluku-Papua terdapat kondisi tidak searah antara perbandingan proporsi jumlah penduduk dengan proporsi belanja pemerintah. Hal ini dipengaruhi, pertama oleh luas wilayah Maluku dan Papua yang jauh lebih besar daripada wilayah Bali-Nusa Tenggara. Kedua, kawasan Maluku dan Papua yang berada di posisi paling timur Indonesia yang menjadi salah satu prioritas pembangunan Indonesia. Ketiga, daerah di Papua juga mendapatkan dana otonomi khusus dari pemerintah pusat. Pemerintah menaruh perhatian terhadap wilayah timur Indonesia dengan memberikan porsi belanja negara yang cukup besar (5,52%) meskipun setoran penerimaan ke pusat sangat kecil dan jumlah penduduk kawasan timur yang sangat sedikit dengan tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah. Kawasan timur seperti Papua dan Papua Barat juga mendapatkan perhatian khusus dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan dan bandara.

TABEL 20. PERBANDINGAN PROPORSI JUMLAH PENDUDUK KAWASAN DENGAN PROPORSI BELANJA PEMERINTAH TAHUN 2018

	KAWASAN	Proporsi Jumlah Penduduk	Proporsi Belanja Pemerintah
1	Sumatera	21,80%	13,88%
2	Jawa	56,46%	62,25%
3	Kalimantan	6,12%	5,39%
4	Sulawesi	7,34%	6,45%
5	Bali Nusra	5,54%	3,51%
6	Maluku Papua	2,74%	5,52%
		100%	**100%**

Sumber: BPS dan OM SPAN

5.IV. KONDISI GEOGRAFIS DAN SOSIAL EKONOMI

Sebagai negara yang diapit dua samudera dan dua benua, Indonesia menjadi wilayah yang sangat strategis. Hal ini menimbulkan terjadinya lalu lintas internasional, baik itu di darat ataupun di laut. Dengan demikian maka Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai negara dengan tingkat perekonomian yang besar.

Kondisi geografis dan sosial ekonomi akan mempengaruhi sumber-sumber serta jenis perekonomian suatu daerah. Perekonomian tersebut diantaranya di bidang perikanan dimana Indonesia memiliki sumber penghasilan ikan yang baik, dimana hasil laut sebagian besar akan di ekspor ke luar negeri. Dalam bidang seni antara lain adalah seni membatik yang dapat dipamerkan kepada dunia dan tentunya dapat dijadikan sebagai ciri khas negara, dalam bidang kerajinan antara lain adalah ukiran dari kayu, perak atau emas yang menarik sehingga dapat menarik perhatian dunia untuk mengkoleksi benda-benda tersebut.

Dalam bidang pariwisata, Indonesia memiliki berjuta tempat yang indah yang pantas untuk dijadikan sebagai tempat tujuan wisata dengan harga yang terjangkau, misalnya Bali. Provinsi Bali dengan kekayaan alamnya berupa keindahan alam, seni dan budaya menjadi pusat industri pariwisata. Sedangkan wilayah Jawa yang memiliki geografis yang landai menjadi pusat bisnis, industri, jasa, dan perdagangan. Wilayah Kalimantan yang kaya akan sumber daya alam menjadi pusat pertambangan di Indonesia.

Keanekaragaman sumber perekonomian masyarakat akibat perbedaan geografis wilayah mencerminkan adanya perbedaan kondisi sosial ekonomi antar wilayah. Di satu sisi beberapa kawasan Indonesia memiliki masyarakat dengan pendapatan yang tinggi, sebagian di wilayah lain masih menunjukkan masyarakat dengan tingkat pendapatan yang rendah. Wilayah dengan sumber daya alam dan sektor industri yang telah mapan sangat berbeda kondisi ekonominya dengan daerah yang tidak mempunyai kekayaan alam maupun sektor unggulan. Selain itu masih timpangnya kondisi infrastruktur untuk mendukung percepatan perekonomian antara kawasan Indonesia bagian barat dengan timur, mengakibatkan hasil bumi/tambang, pariwisata, sumber daya lain serta potensi yang dimiliki wilayah timur tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sebagian besar kawasan di Indonesia seperti Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua masih mengandalkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dan sektor pertambangan dan penggalian sebagai sektor utama penyumbang angka produk domestik regional bruto. Sektor-sektor yang lebih dominan menjadi penggerak ekonomi seperti sektor industri pengolahan, perdagangan besar, dan sektor konstruksi belum dapat berkembang dengan baik di kawasan-kawasan tersebut. Minimnya infrastruktur juga menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di wilayah itu.

Hal yang sangat berbeda dengan kondisi di wilayah Jawa dan Sumatera, sektor perekonomian yang menjadi tumpuan utama adalah sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Sektor-sektor tersebut menjadi daya tarik yang kuat bagi investor maupun tenaga kerja untuk melakukan aktifitas ekonomi di kawasan tersebut. Selain itu, infrastruktur untuk mendukung kelancaran kegiatan ekonomi yang memadai sudah

tersedia di wilayah tersebut.

Penyediaan infrastruktur di Indonesia yang tidak merata karena adanya kendala di berbagai tahapan proyek, mulai dari penyiapan sampai implementasi. Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan seringkali mengakibatkan mundurnya pengambilan keputusan. Pada tahap penyiapan, terdapat masalah akibat lemahnya kualitas penyiapan proyek dan keterbatasan alokasi pendanaan. Selanjutnya, proyek sering terkendala masalah pengadaan lahan yang berakibat pada tertundanya pencapaian financial close untuk proyek KPBU. Keterbatasan jaminan Pemerintah yang dapat diberikan pada proyek infrastruktur juga menurunkan minat investasi di Indonesia.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah perbaikan dari sisi regulasi, fiskal dan kelembagaan. Diharapkan dengan kebijakan pemerintah dengan prioritas membangun infrastruktur di wilayah-wilayah yang sebelumnya minim tersentuh pembangunan dapat meningkatkan roda perekonomian, sehingga dapat terwujud pemerataan ekonomi.

Rp
1 + 1
Rp
store
school

BAB 3

ANALISIS EKONOMI DAN FISKAL REGIONAL

hal. 108
REGIONAL SUMATERA

hal. 136
REGIONAL JAWA

hal. 156
REGIONAL KALIMANTAN

hal. 174
REGIONAL BALI-NUSRA

hal. 192
REGIONAL SULAWESI

hal. 214
REGIONAL MALUKU-PAPUA

Secara umum, tingkat perekonomian dan kesejahteraan daerah di tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan komposisi regional, kontribusi terbesar perekonomian Indonesia masih didominasi oleh perkembangan aktivitas ekonomi di regional Jawa sebagai penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB) dengan share angka PDB nasional sebesar 58,59 persen, diikuti regional Sumatera (21,34 persen), Kalimantan (8,43 persen), Sulawesi (6,04 persen), Bali Nusra (3,03 persen), dan Papua dan Maluku (2,57 persen). Variasi angka kontribusi PDB pada setiap regional tersebut menunjukkan bahwa tren komposisi distribusi PDB selama ini yang masih didominasi provinsi-provinsi di wilayah Indonesia bagian barat meskipun pemerintah berupaya untuk meningkatkan share kontribusi ekonomi Indonesia dari Jawa ke wilayah Sumatera dan Kawasan Indonesia Timur (KTI) melalui sejumlah program prioritas di sektor infrastruktur dan kesejahteraan.

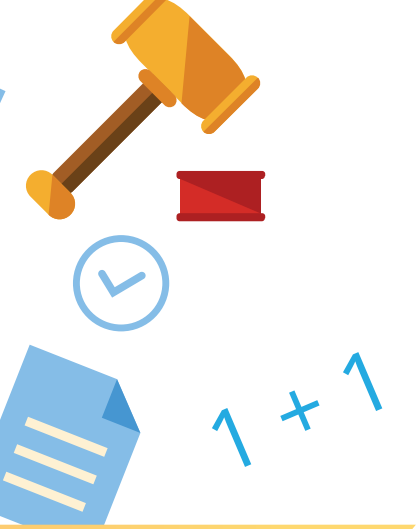

Dari sisi kemandirian fiskal daerah, regional Jawa memiliki kemandirian keuangan daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan regional lainnya dalam rentang waktu 2016-2017 dimana untuk tahun 2017 mencapai 37%. Hal ini mengindikasikan bahwa regional Jawa lebih memiliki kemampuan lebih besar dalam memperoleh PAD. Hal ini akan berimbas pada fleksibilitas untuk mengalokasikan belanja, termasuk untuk infrastruktur atau belanja signifikan lain yang lebih banyak sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi regionalnya. Selain itu, pada tahun 2017 terdapat empat provinsi yang termasuk dalam kategori kapasitas fiskal sangat tinggi yaitu Papua, Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta.

Namun demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat di Papua masih belum sesuai harapan dan perlu untuk senantiasa didorong melalui program-program pemerintah yang tepat sasaran. Sedangkan, dari sisi kesejahteraan, sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan nasional, mayoritas propinsi di Indonesia mengalami penurunan tingkat kemiskinan di tahun 2017. Tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia dominan terjadi di wilayah Indonesia bagian timur, seperti NTT, Gorontalo, Maluku, Papua dan Papua Barat dengan tingkat kemiskinan di atas 15 persen. Oleh sebab itu, pemerintah harus terus memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan daerah melalu belanja negara yang bersifat investasi dan produktif.

Fiskal Regional Sumatera

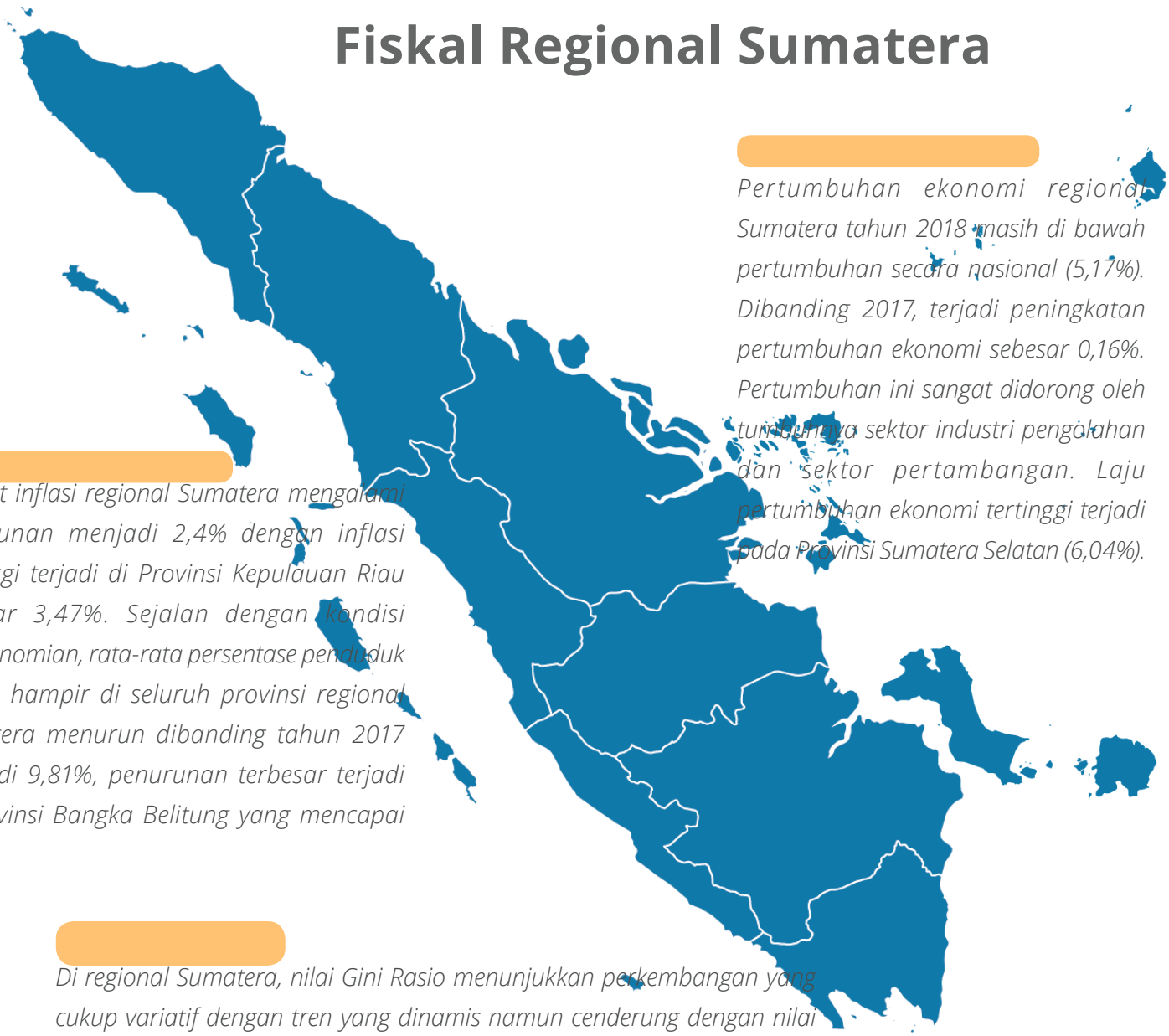

Pertumbuhan ekonomi regional Sumatera tahun 2018 masih di bawah pertumbuhan secara nasional (5,17%). Dibanding 2017, terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,16%. Pertumbuhan ini sangat didorong oleh tumbuhnya sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada Provinsi Sumatera Selatan (6,04%).

Tingkat inflasi regional Sumatera mengalami penurunan menjadi 2,4% dengan inflasi tertinggi terjadi di Provinsi Kepulauan Riau sebesar 3,47%. Sejalan dengan kondisi perekonomian, rata-rata persentase penduduk miskin hampir di seluruh provinsi regional Sumatera menurun dibanding tahun 2017 menjadi 9,81%, penurunan terbesar terjadi di Provinsi Bangka Belitung yang mencapai 0,53%.

Di regional Sumatera, nilai Gini Rasio menunjukkan perkembangan yang cukup variatif dengan tren yang dinamis namun cenderung dengan nilai yang semakin menurun dan selalu berada di bawah angka Rasio Gini nasional sebesar 0,384 pada tahun 2018. Dari 10 provinsi yang ada di Regional Sumatera, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah provinsi yang tingkat ketimpangan pendapatannya paling rendah dengan angka Rasio Gini pada tahun 2018 sebesar 0,272.

Pada tahun 2018, terjadi peningkatan 11,42% pendapatan negara menjadi Rp94,29 triliun dengan masih didominasi oleh penerimaan perpajakan, sedangkan realisasi belanja negara meningkat 5,86% menjadi Rp305.089,62 miliar yang sebagian besarnya digunakan untuk TKDD. Dari sisi APBD, realisasi pendapatan daerah tahun 2018 mengalami penurunan 0,1% dan masih didominasi oleh pendapatan transfer, sedangkan realisasi belanja daerah pada APBD seluruh pemerintah daerah di regional Jawa menunjukkan penurunan dengan rata-rata 1,1% dan masih didominasi oleh belanja pegawai.

1. MAKROEKONOMI REGIONAL SUMATERA

1.I. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pada regional Sumatera tingkat pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 telah menunjukkan pertumbuhan yang positif dengan adanya kenaikan laju pertumbuhan ekonomi dari 4,30% pada tahun 2017 menjadi 4,46% pada tahun 2018. Namun demikian, capaian angka pertumbuhan regional Sumatera masih lebih rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang telah mencapai 5,17% atau meningkat 0,10% dari tahun 2017 lalu sebesar 5,07%. Sedangkan dari sisi kontribusi nominal PDRB Regional terhadap PDB Nasional, wilayah Sumatera secara nominal mengalami penurunan kontribusi terhadap PDB Nasional sebesar -0,15%, dari sebelumnya 21,73% di tahun 2017 menjadi 21,58% di tahun 2018.

TABEL 21. NILAI PDB NASIONAL DAN PDRB SUMATERA TAHUN 2017 DAN 2018

Uraian	Tahun 2017 (Jutaan Rp)	Tahun 2018 (Jutaan Rp)	Selisih
PDRB Sumatera	2,986,505,033	3,233,901,799	247,396,766
PDB Nasional	13,742,287,344	14,986,613,449	1,244,326,106
Porsi	21.73%	21.58%	-0.15%
PDB Nasional	13,742,287,344	14,986,613,449	1,244,326,106
Porsi	21.73%	21.58%	-0.15%

Sumber: BPS

Lebih lanjut, jika dilihat lebih jauh per provinsi maka akan terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada masing-masing provinsi menunjukkan angka yang variatif. Loncatan kenaikan pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Provinsi Kepulauan Riau dimana tahun sebelumnya tumbuh 2,00% (2017) menjadi 4,56% di tahun 2018, sedangkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang signifikan terjadi di Provinsi Riau dari 2,68% (2017) menjadi 2,34% pada tahun 2018.

GAMBAR 49. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017 DAN 2018

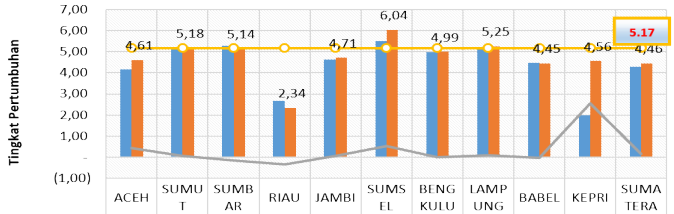

	ACEH	SUMUT	SUMBAR	RIAU	JAMBI	SUMSEL	BENGKULU	LAMPUNG	BABEL	KEPRI	SUMATERA
Tahun 2017	4,18	5,12	5,29	2,68	4,64	5,51	4,98	5,16	4,47	2,00	4,30
Tahun 2018	4,61	5,18	5,14	2,34	4,71	6,04	4,99	5,25	4,45	4,56	4,46
Selisih	0,43	0,06	(0,15	(0,34	0,07	0,53	0,01	0,09	(0,02	2,56	0,16
Nasional 2018	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17	5,17

Sumber: BPS

Di tahun 2018, pertumbuhan yang akseleratif di regional Sumatera lebih ditopang oleh peningkatan seluruh komponen permintaan domestik, termasuk diantaranya meningkatnya konsumsi RT dan belanja pemerintah yang didorong oleh pelaksanaan program infrastruktur Trans Sumatera, penyelenggaraan Asian Games 2018, pelaksanaan program bantuan sosial pemerintah, belanja untuk tahapan Pemilu, kebijakan pemberian THR dan gaji ketigabelas, maupun ekspansi sektor swasta dalam mendorong peningkatan kinerja investasi. Provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berada dia atas rata-rata nasional diraih oleh Provinsi Sumatera Selatan dengan laju 6,04%, Sumatera Utara dengan laju 5,18%, dan Lampung dengan laju 5,25%.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan didukung oleh mulai meningkatnya harga beberapa komoditas unggulan Sumatera Selatan, semakin berkembangnya sektor sekunder/ tersier serta berbagai event skala besar yang

TABEL 22. KONTRIBUSI NOMINAL PDRB PER PROVINSI PADA REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018

No	Provinsi	Nominal PDRB 2018 (Juta Rp)	Porsi
1.	ACEH	155,912,315	4.82%
2.	SUMATERA UTARA	741,192,694	22.92%
3.	SUMATERA BARAT	230,528,813	7.13%
4.	RIAU	755,274,285	23.35%
5.	JAMBI	208,378,559	6.44%
6.	SUMATERA SELATAN	420,374,584	13.00%
7.	BENGKULU	66,412,895	2.05%
8.	LAMPUNG	333,681,431	10.32%
9.	BANGKA BELITUNG	73,069,313	2.26%
10.	KEP. RIAU	249,076,910	7.70%
TOTAL		3,233,901,799	100%

SUMBER: BPS

dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan yang membuat perekonomian semakin menggeliat. Ditambah lagi dengan penyelenggaraan Asian Games 2018 dimana Kota Palembang akan menjadi tuan rumah sehingga hal ini berpengaruh besar terhadap perekonomian Sumatera Selatan diberbagai sektor, misalnya konstruksi, industri pengolahan, transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan, dan lain-lain.

Dilihat dari kontribusi PDRB Provinsi terhadap PDRB Regional Sumatera, maka dapat diketahui bahwa terdapat 4 provinsi yang menjadi penyumbang terbesar bagi Sumatera yang umumnya berada di wilayah pesisir timur Sumatera, yaitu: Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung. Geliat ekonomi sektor industri dan infrastruktur, maraknya komoditas pertambangan dan hasil perkebunan, serta posisi strategis sebagai pintu gerbang perdagangan dengan pelabuhan-pelabuhan lautnya merupakan pendorong utama atas signifikannya kontribusi terhadap PDRB Sumatera. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa provinsi-provinsi yang berada di wilayah pesisir barat Sumatera memiliki potensi untuk pertumbuhan yang lebih baik dan meningkat dengan potensi pariwisata dan budaya yang terus dilestarikan dan dikembangkan.

GAMBAR 50. KONTRIBUSI NOMINAL PDRB PER PROVINSI PADA REGIONAL SUMATERA TAHUN 2018

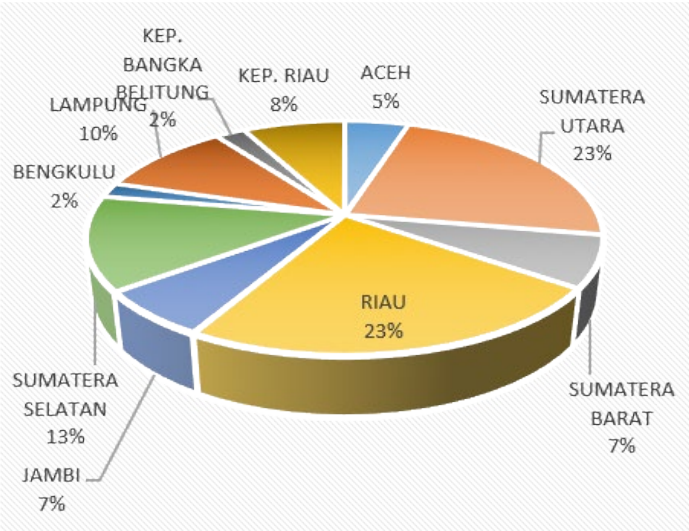

Sumber: BPS

TABEL 23. NILAI PDB NASIONAL DAN PDRB SUMATERA TAHUN 2017 DAN 2018

No	Indikator Makro Ekonomi Daerah	2017	2018	Selisih
	Inflasi IHK (%,yoy)	3.30	2.40	-0.90
1.	Provinsi Aceh	4.25	1.84	-2.41
2.	Provinsi Sumatera Utara	3.20	1.23	-1.97
3.	Provinsi Sumatera Barat	2.03	2.60	0.57
4.	Provinsi Riau	4.20	2.45	-1.75
5.	Provinsi Kepulauan Riau	4.02	3.47	-0.55
6.	Provinsi Jambi	2.83	2.97	0.14
7.	Provinsi Sumatera Selatan	2.96	2.74	-0.22
8.	Provinsi Bengkulu	3.56	2.35	-1.21
9.	Provinsi Lampung	3.02	2.73	-0.29
10.	Provinsi Kep. Bangka Belitung	3.12	3.19	0.07

Sumber: BPS dan BI (diolah)

1.II. INFLASI

Secara umum, tingkat inflasi pada regional Sumatera cukup terkendali, bahkan tekanan inflasi pada tahun 2018 cenderung mengalami penurunan dari 3,30% di tahun 2017 menjadi

GAMBAR 51. PERKEMBANGAN TINGKAT INFLASI PROVINSI DAN NASIONAL TAHUN 2017 DAN 2018 (%)

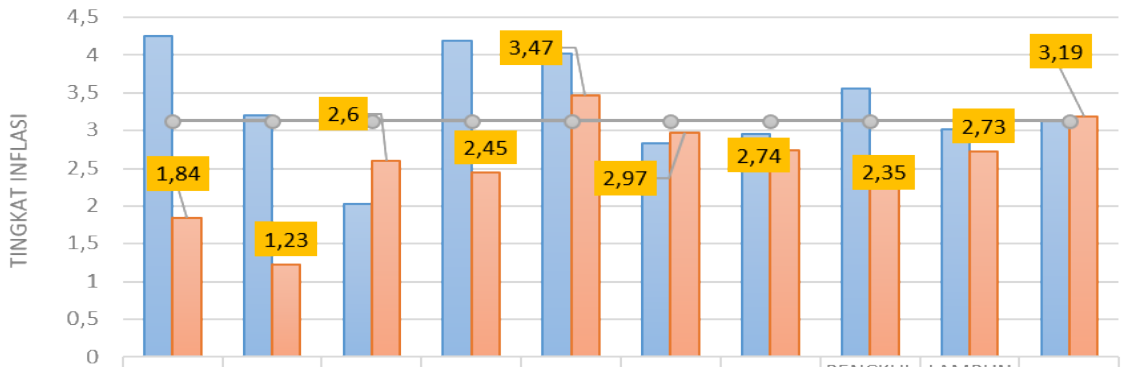

	ACEH	SUMUT	SUMBAR	RIAU	KEPRI	JAMBI	SUMSEL	BENGKULU	LAMPUNG	BABEL
Tahun 2017	4,25	3,2	2,03	4,2	4,02	2,83	2,96	3,56	3,02	3,12
Tahun 2018	1,84	1,23	2,6	2,45	3,47	2,97	2,74	2,35	2,73	3,19
Nasional 2018	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13	3,13

Sumber: BPS dan BI (diolah)

2,40% di tahun 2018 atau telah terjadi menurun sebesar 0,90%. Bahkan dari 10 provinsi pada regional Sumatera, 7 provinsi mengalami penurunan tingkat inflasi pada tahun 2018, sedangkan 3 provinsi lainnya mengalami peningkatan tingkat inflasi. Pun tingkat inflasi per provinsi di Sumatera pada tahun 2018 pada umumnya cukup terkendali dengan rentang yang tidak begitu jauh dari capaian laju inflasi nasional sebesar 3,13%. Pada tahun 2018, secara regional, inflasi Sumatera mencapai 2,40% (yoy) atau turun jika dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 3,30%. Hanya terdapat 2 provinsi yang tingkat inflasinya melebihi laju inflasi nasional, yaitu pada provinsi dengan wilayah kepulauan yakni Provinsi Kepulauan Riau (3,47%), dan Bangka Belitung (3,19%).

Lebih lanjut, masih tingginya inflasi di Kepulauan Riau terjadi pada kelompok bahan makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta pendidikan,komunikasi dan jasa keuangan tercatat sebesar 5,11% dan 4,53%. Pada kelompok pertama inflasi yang tinggi berasal adanya peningkatan kebutuhan akan bahan makanan di Kepulauan Riau. Pada kelompok kedua, inflasi yang tinggi didorong oleh tahun ajaran baru sekolah yang terjadi pada bulan Juli dan September. Hal ini diindikasikan dengan tingginya inflasi tahun 2018 yang mencapai 4,79% di kota Batam. Sementara itu, penyumbang inflasi tertinggi di Kepulauan Riau adalah angkutan udara dengan kontribusi angkutan udara di Kota Batam sebesar 13,97% dan di Kota Tanjung Pinang sebesar 50,69%. Peningkatan tarif angkutan udara yang terjadi di Kota Batam maupun Kota Tanjung Pinang didorong oleh tinggi permintaan tiket angkutan udara menjelang hari Natal dan Tahun Baru serta masa libur anak sekolah. Selain kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, inflasi Kepulauan Riau juga didorong kelompok bahan makanan terutama harga komoditas bawang merah dan bayam. Peningkatan harga komoditas bawang merah disebabkan oleh berkurangnya pasokan di wilayah

sentra penghasil seiring dengan curah hujan. Sedangkan kenaikan harga bayam, merupakan lanjutan tren sepanjang tahun 2018 sebagai dampak dari musim hujan dengan intensitas tinggi sehingga mengakibatkan kegagalan panen dan keterbatasan pasokan di Kepulauan Riau.

Sedangkan di Provinsi Bangka Belitung, penyumbang utama inflasi berasal dari kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau;kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; serta kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Fluktuasi inflasi dan deflasi pada 4 kelompok pengeluaran utama penyumbang inflasi tersebut, sangat dipengaruhi oleh: 1) Faktor cuaca yang sulit diprediksi terutama berdampak pada jumlah produksi (gagal panen produk lokal dan berkurangnya hasil tangkapan ikan) serta kelancaran distribusi berbagai kebutuhan rumah tangga yang mayoritas dipasok dari luar pulau (terhambatnya pengangkutan di pelabuhan dan bandara); 2) Terjadinya peningkatan harga komoditas global yang mendorong kenaikan harga BBM non-subsidi (termasuk avtur), kelangkaan BBM baik bensin, solar, maupun gas elpiji 3 kg; dan 3) Tingkat permintaan dari konsumen yang dipengaruhi faktor musiman seperti perayaan hari keagamaan (Idul Fitri, Idul Adha, Natal dan tahun baru, Imlek, ritual Ceng Beng), liburan sekolah, serta masuknya tahun ajaran baru.

2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

2.I. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM merupakan salah satu indikator untuk mengukur perkembangan kualitas manusia yang dilihat dari aspek kesehatan (Umur harapan hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat), aspek pendidikan (Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama sekolah (RLS)), dan aspek ekonomi (pengeluaran perkapita). Pada tahun 2018, IPM di tingkat nasional mengalami peningkatan menjadi sebesar 71,39 atau meningkat dari tahun 2017 sebesar 70,81. Peningkatan IPM tersebut juga terjadi di semua provinsi pada regional Sumatera (*yoy*), namun dari 10 provinsi yang ada pada regional tersebut, hanya 3 provinsi yang nilai IPM nya lebih tinggi dari nilai nasional, yaitu: Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, selebihnya yakni 7 provinsi lain harus mengejar ketertinggalan peningkatan nilai IPM di masa mendatang agar setidaknya setara dengan capaian pada tingkat nasional.

Lebih lanjut, terdapat 2 provinsi yang nilai IPM-nya masih berada di bawah 70, yaitu: Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung. Kedua wilayah ini memerlukan akselerasi pelaksanaan program-program pembangunan ekonomi dan peningkatan kualitas SDM. Di wilayah Sumatera Selatan, kualitas pembangunan manusianya masih tertinggal yang mengindikasikan bahwa kualitas hidup manusia di Sumatera Selatan dilihat dari angka harapan hidup, pendidikan, dan kelayakan hidup relatif masih tertinggal dibanding daerah sekitar. Nilai IPM yang cukup

GAMBAR 52. IPM REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017 DAN 2018

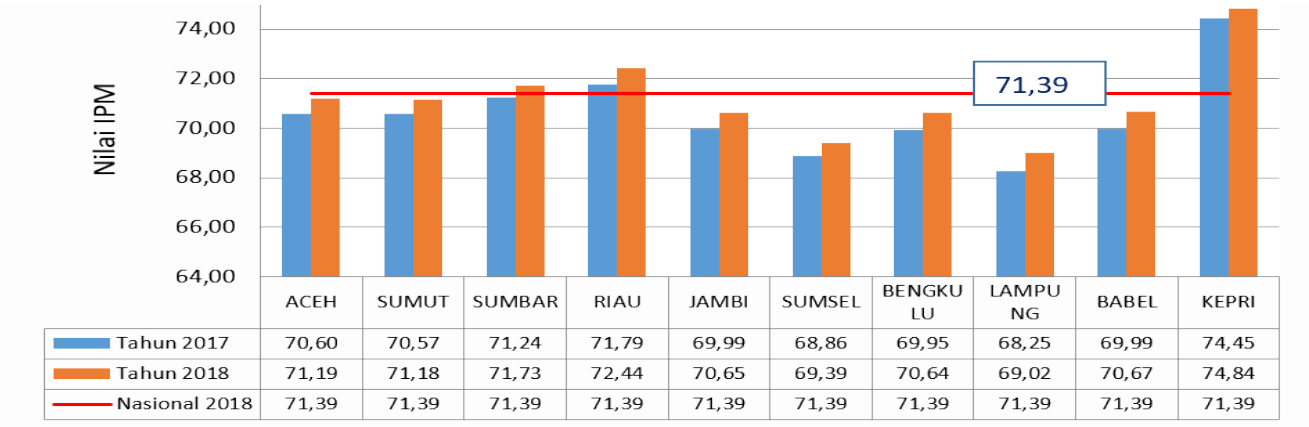

	ACEH	SUMUT	SUMBAR	RIAU	JAMBI	SUMSEL	BENGKULU	LAMPUNG	BABEL	KEPRI
Tahun 2017	70,60	70,57	71,24	71,79	69,99	68,86	69,95	68,25	69,99	74,45
Tahun 2018	71,19	71,18	71,73	72,44	70,65	69,39	70,64	69,02	70,67	74,84
Nasional 2018	71,39	71,39	71,39	71,39	71,39	71,39	71,39	71,39	71,39	71,39

Sumber: BPS

tinggi secara rata-rata terlihat pada daerah perkotaan terutama di Kota Lubuk Linggau, Kota Prabumulih dan yang paling tinggi adalah Kota Palembang. Tingginya IPM di perkotaan menunjukkan bahwa akses yang lebih mudah terhadap berbagai fasilitas yang ada di perkotaan, seperti pendidikan dan kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembangunan manusia yang lebih baik jika dibandingkan daerah pedesaan yang banyak tersebar di berbagai wilayah kabupaten.

Demikian pula dengan disparitas capaian IPM antara kabupaten dan kota di Provinsi Lampung, dimana IPM di Kota Bandar Lampung dan Kota Metro telah mencapai level tinggi bahkan lebih baik dari IPM nasional. Namun, IPM di level kabupaten masih jauh dari rata-rata nasional, seperti di Kabupaten Mesuji (61,87) meskipun di sisi lain tercatat paling cepat kemajuannya (1,89%). Untuk mengejar ketertinggalan dari IPM nasional, pemerintah daerah harus mengurangi kesenjangan ini diantaranya dengan mempermudah akses pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil. Dari seluruh komponen pembentuk IPM, dimensi pengetahuan yang diproksi dari HLS dan RLS termasuk yang paling rendah, misalnya HLS terendah 11,59 tahun di Kabupaten Mesuji yang berarti anak di Mesuji diperkirakan tidak dapat menuntaskan sekolah hingga kelas 12 atau tingkat SMA. Angka ini mengindikasikan Kabupaten Mesuji belum berhasil dalam program wajib belajar (wajar) 12 tahun yang telah dicanangkan sejak tahun 2015. Pemerintah di level kabupaten perlu memfokuskan program untuk meningkatkan ketercapaian program wajar 12 tahun dengan mengurangi jumlah anak putus sekolah.

Selain itu, fenomena menarik lainnya adalah tingginya jumlah pekerja anak di Provinsi Lampung. Berdasarkan basis data terpadu TNP2K, jumlah pekerja anak (usia 5-14 tahun) dengan status kesejahteraan 40% terendah di Lampung mencapai 7.333 orang, terbesar kedua se-Sumatera. Data ini menunjukkan nilai ekonomis anak pada keluarga miskin, dimana anak usia sekolah terpaksa membantu perekonomian keluarga dengan menjadi pekerja anak dibanding melanjutkan sekolah. Lebih lanjut, pekerja anak di Lampung

terutama berada di sektor pertanian dengan status sebagai pekerja keluarga atau tidak dibayar. Hal ini menunjukkan keterkaitan antara angka putus sekolah, kemiskinan, dan sektor pertanian. Oleh karenanya, program menurunkan jumlah angka putus sekolah juga perlu mempertimbangkan kondisi tersebut.

Besarnya alokasi dana pendidikan perlu diarahkan untuk mengembalikan pekerja anak ke sekolah. Selain memberikan bantuan melalui BOS yang hanya menyasar anak yang bersekolah, pemerintah daerah juga perlu berkoordinasi dengan lurah/kepala desa untuk mendata pekerja anak di wilayahnya. Selanjutnya, perlu disiapkan program untuk mengembalikan pekerja anak ke sekolah diantaranya melalui penyuluhan ke masyarakat mengenai pentingnya pendidikan anak serta skema bantuan untuk keluarga miskin yang menjamin anak dapat sekolah tanpa biaya. Selain itu, sebagai upaya meningkatkan RLS, pemerintah harus menyiapkan program untuk mendorong partisipasi penduduk usia 25 tahun ke atas agar kembali melanjutkan pendidikan formal melalui program Kejar Paket A, B, dan C.

2.II. RASIO GINI

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, biasanya digunakan koefisien Gini (*Gini Ratio*). Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Ketimpangan pendapatan masyarakat dikatakan rendah apabila koefisien Gini berada di bawah 0,3. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap sedang apabila koefisien Gini berada pada rentang 0,3 sampai dengan 0,5. Ketimpangan pendapatan masyarakat berada pada tahap tinggi atau sangat timpang, apabila koefisien Gini di atas 0,5.

Di regional Sumatera, pada periode 2017 hingga 2018 nilai Gini Rasio menunjukkan perkembangan angka yang cukup variatif dengan tren yang dinamis namun cenderung dengan nilai yang semakin menurun dan selalu berada di bawah angka Rasio Gini nasional sebesar 0,384 pada tahun 2018. Dari 10 provinsi yang ada di Regional Sumatera, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah provinsi yang tingkat ketimpangan pendapatannya paling rendah dengan angka Rasio Gini pada tahun 2018 sebesar 0,272. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Provinsi Bangka Belitung lebih merata dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Sedangkan tingkat Rasio Gini yang tertinggi di regional Sumatera terjadi di Provinsi Bengkulu dengan angka 0,355. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain berkurangnya lapangan kerja dan peningkatan pengangguran.

Rasio Gini di Provinsi Riau tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi sebesar 0,347 atau naik 0,022 poin dari tahun sebelumnya sebesar 0,325. Di tingkat regional Sumatera, Gini ratio Provinsi Riau merupakan yang terbesar kedua setelah Provinsi Bengkulu, angka terendah adalah

GAMBAR 53. RASIO GINI REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017 DAN 2018

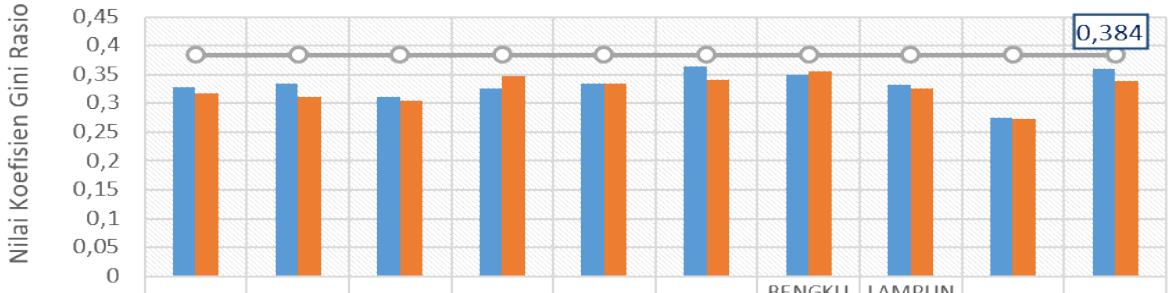

	ACEH	SUMUT	SUMBAR	RIAU	JAMBI	SUMSEL	BENGKULU	LAMPUNG	BABEL	KEPRI
Tahun 2017	0,329	0,335	0,312	0,325	0,334	0,365	0,349	0,333	0,276	0,359
Tahun 2018	0,318	0,311	0,305	0,347	0,335	0,341	0,355	0,326	0,272	0,339
Nasional 2018	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384	0,384

Sumber: BPS

Kepulauan Bangka Belitung dan Sumatera Barat dengan angka masing-masing 0,272 dan 0,305. Jika dibandingkan secara nasional, gini rasio Provinsi Riau masih berada di bawah angka nasional yang mencapai 0,384. Kondisi saat ini angka gini ratio Provinsi Riau masih berada pada tahap sedang namun diperlukan antisipasi dan upaya yang sungguh-sungguh pemerintah secara terus menerus untuk mengambil kebijakan yang tepat agar kesenjangan pendapatan masyarakat semakin dapat diturunkan.

Gini Rasio di Provinsi Bengkulu periode September 2018 tercatat 0,355, dibawah rasio gini Nasional yang sebesar 0,384. Angka ini menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan tertinggi ke-17 dari 34 di Indonesia. Berdasarkan daerah tempat tinggal, walaupun ketimpangan masih rendah karena indeks masih berada dalam kisaran 0-1, namun fenomena tidak meratanya pengeluaran perkelompok penduduk berpengeluaran rendah, menengah dan tinggi baik yang berada pada perkotaan dan perdesaan masih menjadi penyebab terjadinya ketimpangan.

Sedangkan nilai Rasio Gini di Provinsi Bangka Belitung pada September 2018 sebesar 0,272 atau turun 0,004 poin dibandingkan September 2017 pada angka 0,276. Angka tersebut sekaligus merupakan yang terendah di tingkat nasional yang rata-rata berada pada angka 0,384. Hal ini berarti tingkat ketimpangan ekonomi masyarakat di Provinsi Bangka Belitung adalah yang terendah se-Indonesia. Berdasarkan daerah tempat tinggal, Rasio Gini di daerah perkotaan selalu menunjukkan angka lebih tinggi dibandingkan Rasio Gini di daerah perdesaan. Sebagaimana berlaku hampir secara nasional, tingginya Rasion Gini di perkotaan lebih dikarenakan banyaknya para pelaku usaha dan orang kaya di perkotaan dibandingkan di perdesaan. Jika dilihat dari parameter ketimpangan versi Bank Dunia, pada September 2018 persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Provinsi Bangka Belitung adalah sebesar 23,59% yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah (>17%). Berdasarkan ukuran distribusi pengeluaran penduduk,

semakin rendah nilai persentase pengeluaran pada penduduk 40% terbawah, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran. Persentase pengeluaran pada kelompok 40% terbawah pada September 2018 naik jika dibandingkan September 2017 yang sebesar 23,39%. Persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40% terbawah di daerah perkotaan pada September 2018 adalah sebesar 22,5% dan di perdesaan sebesar 26,05%.

Baik berdasarkan Rasio Gini maupun ukuran distribusi pengeluaran dapat disimpulkan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi di perkotaan lebih tinggi daripada di perdesaan. Secara umum kinerja pemerintah daerah cukup efektif dalam mengendalikan ketimpangan ekonomi. Meskipun demikian, pemerintah masih tetap berupaya untuk menjaga tingkat Rasio Gini yang telah dicapai dan meningkatkan redistribusi ekonomi kepada 40% masyarakat ekonomi terbawah secara berkelanjutan. Program tersebut dapat dilaksanakan antara lain melalui pemberian bantuan sosial, program beras sejahtera, kartu sehat, kartu pintar, bantuan alat produksi, pemberian akses permodalan dan optimalisasi KUR, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang memungkinkan perekonomian tidak hanya dikuasai oleh pemilik modal besar.

2.III. KETENAGAKERJAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah penganggur terbuka dengan jumlah angkatan kerja. TPT dapat digunakan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan angka pengangguran, karena TPT mencerminkan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Pada tahun 2018, angka TPT di semua provinsi pada regional Sumatera semuanya semakin menurun. Jika dibandingkan dengan TPT nasional yang telah mencapai angka 5,13%, maka di regional Sumatera masih terdapat 5 provinsi yang angka TPT-nya masih berada diatas angka nasional, yaitu: Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Sedangkan 5 provinsi lainnya berhasil mempertahankan angka TPT lebih rendah dari angka TPT nasional, yaitu: Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Bangka Belitung. Namun, perlu diperhatikan selain dari sudut pandang tingkat pengangguran yang rendah tersebut dari sisi kualitas pekerjaan dan besaran pendapatan pun harus diperhatikan, karena meskipun menyandang status sebagai orang bekerja namun tingkat upahnya belum memadai.

Lebih lanjut, pada kasus masih tingginya angka TPT di Provinsi Aceh pada Agustus 2018 sebesar 6,35%, sebenarnya turun cukup signifikan jika dibandingkan dengan periode Agustus 2017 yang mencapai 6,57%. Tren TPT Aceh terus mengalami penurunan secara berkelanjutan dari sejak periode Agustus 2015. Meskipun demikian, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angka TPT Aceh masih selalu tinggi jika dibandingkan TPT secara nasional. Diharapkan pemerintah dapat lebih memprioritaskan pada program-program untuk menurunkan pengangguran, misalnya dengan mendukung sektor UMKM melalui penurunan suku bunga KUR

GAMBAR 54. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017 DAN 2018 (%)

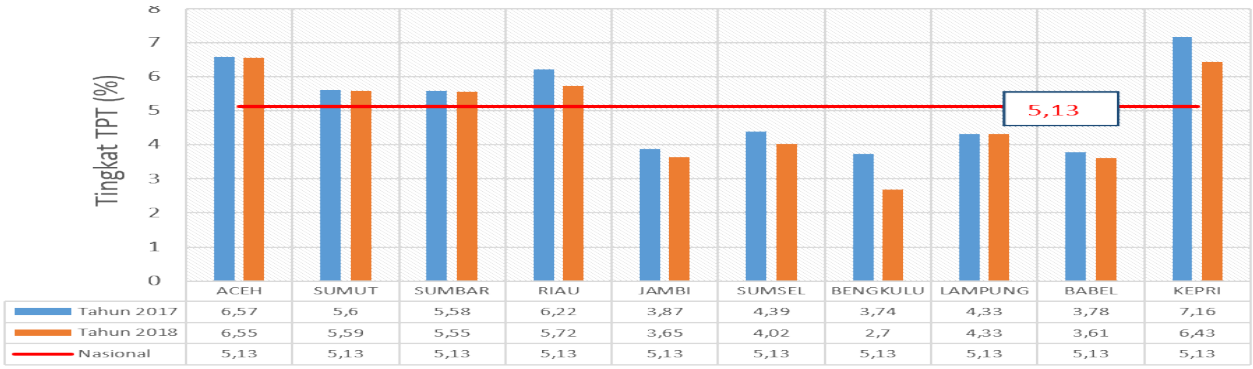

	ACEH	SUMUT	SUMBAR	RIAU	JAMBI	SUMSEL	BENGKULU	LAMPUNG	BABEL	KEPRI
Tahun 2017	6,57	5,6	5,58	6,22	3,87	4,39	3,74	4,33	3,78	7,16
Tahun 2018	6,55	5,59	5,55	5,72	3,65	4,02	2,7	4,33	3,61	6,43
Nasional	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13	5,13

Sumber: BPS

dan mengembangkan kredit Ultra Mikro, serta mengembangkan beberapa sektor-sektor usaha lain seperti pariwisata serta pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selain itu, apabila dilihat berdasarkan lapangan kerja utama di Provinsi Aceh, pada tahun 2018 sektor jasa-jasa masih menjadi sektor usaha dengan serapan tenaga kerja terbanyak yaitu sebesar 44,54% dari seluruh tenaga kerja di Provinsi Aceh, sedangkan sektor industri manufaktur menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja paling kecil yaitu sebesar 16,19% dari total jumlah tenaga kerja di Aceh.

Sedangkan perkembangan penyerapan tenaga kerja di Kepulauan Riau menunjukkan tren perbaikan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Adanya perbaikan TPT Agustus 2018 di Kepulauan Riau dibandingkan periode yang sama tahun lalu disebabkan oleh baiknya kinerja sektor Industri akibat tingkat upah yang mengalami kenaikan 10,73% pada tahun 2018. Dampaknya tercermin dari kenaikan tenaga kerja pada sektor industri sebanyak 8,25% dalam satu tahun terakhir. Di saat yang sama, tenaga kerja pada sektor informal juga menjadi penyerap kelebihan tenaga kerja dengan kenaikan hingga 4,83%. Masih relatif tingginya TPT ini berbanding lurus dengan tingginya tingkat kriminalitas di Kepulauan Riau. Jumlah kriminalitas dari tahun 2014 sampai dengan 2017 belum mengalami perubahan yang signifikan. Hal ini nampak bahwa meskipun tingkat pengangguran terbuka tahun 2018 mengalami penurunan, namun dikarenakan masih banyak jumlah penduduk yang belum mendapat pekerjaan, kecenderungan masyarakat melakukan tindak kriminal masih tinggi dikarenakan faktor ekonomi dan masyarakat lebih cenderung dalam mendapatkan hasil untuk kebutuhan melalui tindakan kriminalitas. Pemerintah dapat segera dan melakukan upaya dan usaha untuk membuka lapangan pekerjaan melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang nantinya diharapkan dapat menekan tingkat pengangguran terbuka dan menekan jumlah kriminalitas.

Diantara seluruh provinsi pada regional Sumatera, angka TPT di Provinsi Bengkulu adalah yang paling rendah, bahkan selama kurun waktu 2014-2018 TPT Provinsi Bengkulu selalu lebih rendah dari TPT Nasional, dimana

pada periode Agustus 2018 ini tercatat sebesar 3,50%. Ini artinya dari 100 angkatan kerja terdapat sekitar 3 orang pengangguran. Namun demikian, penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2018 masih didominasi oleh penduduk bekerja yang berpendidikan rendah yakni tamat SD kebawah sebanyak 39,51% dan tamat SMP sebanyak 20,47%, sedangkan yang berpendidikan tinggi hanya sebanyak 12,11%. Hal ini menyebabkan meskipun TPT rendah tapi tingkat kesejahteraan belum optimal karena minimnya upah yang diterima karena rendahnya kualitas pekerja. Oleh sebab itu, kualitas tenaga kerja di Bengkulu perlu mendapatkan perhatian lebih dari sisi pendidikan, agar usia sekolah hendaknya diselesaikan minimal sampai dengan jenjang SMA, sehingga upah yang diterima pekerja bisa lebih baik dan kompetitif.

2.IV. KEMISKINAN

Metode pengukuran kemiskinan di Indonesia masih menggunakan pendekatan ekonomi, yaitu diukur dengan pendekatan pengeluaran atau pendekatan kebutuhan dasar minimum (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan makanan adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kkal perkapita perhari). Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan adalah nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok nonmakanan lainnya.

Pada regional Sumatera, terdapat 4 provinsi yang tingkat kemiskinannya masih berada diatas rata-rata nasional sebesar 9,66%, yaitu: Provinsi Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Sedangkan 6 provinsi lainnya memiliki persentase penduduk miskin yang lebih rendah daripada nasional, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Tingkat kemiskinan yang terendah pada regional Sumatera berada di Provinsi Bangka Belitung yakni pada September 2018 sebesar 4,77% atau turun 0,53 poin dibandingkan September 2017 (5,33%). Tren pergerakan tingkat kemiskinan sejak 2006 hingga 2018 berfluktuasi namun menunjukkan kecenderungan turun. Relatif stabil sejak 2011 di bawah 6%, tingkat kemiskinan pada September 2018 menyentuh angka terendah, bahkan sejak 12 tahun terakhir. Meskipun demikian, garis kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung adalah yang tertinggi di Indonesia. Pada September 2018, garis kemiskinan nasional sebesar Rp410.670 perkapita per bulan dan garis kemiskinan Sumatera sebesar Rp486.643 perkapita perbulan, sementara garis kemiskinan Provinsi Bangka Belitung sebesar Rp664.120 perkapita perbulan. Jika ditinjau berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Tingkat kemiskinan di perkotaan sebesar 2,78%, atau turun 0,22 poin dibanding 2017. Sedangkan tingkat kemiskinan di perdesaan sebesar 7,16%, atau turun 0,76 poin dibandingkan 2017. Namun demikian, meskipun tingkat penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi, namun laju

GAMBAR 55. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017 DAN 2018

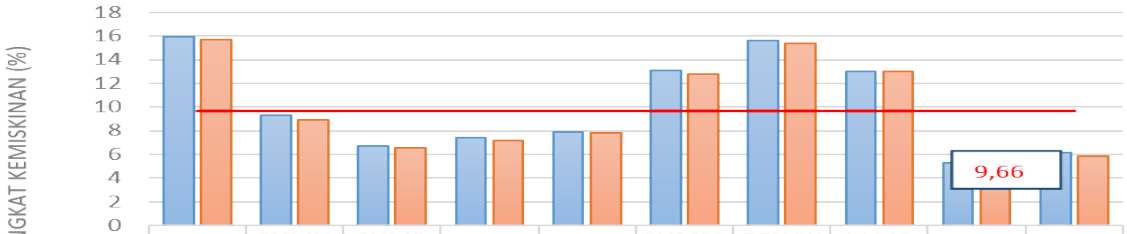

	ACEH	SUMUT	SUMBAR	RIAU	JAMBI	SUMSEL	BENGKULU	LAMPUNG	BABEL	KEPRI
Tahun 2017	15,92	9,28	6,75	7,41	7,9	13,1	15,59	13,04	5,3	6,13
Tahun 2018	15,68	8,94	6,55	7,21	7,85	12,82	15,41	13,01	4,77	5,83
Nasional	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66	9,66

Sumber: BPS

penurunan tingkat kemiskinannya lebih cepat dibandingkan di perkotaan. Tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan didorong oleh kecenderungan Garis Kemiskinan di perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Faktor utama pendorong tingginya Garis Kemiskinan Provinsi Bangka Belitung berasal dari komponen garis kemiskinan komoditas makanan (GKM) yang memberi kontribusi sebesar 72,59%. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah Garis Kemiskinan. Tingginya rata-rata pengeluaran perkapita masyarakat untuk membeli komoditas makanan seiring dengan tingginya tingkat inflasi di Provinsi Bangka Belitung mendorong kenaikan garis kemiskinan secara keseluruhan. Penurunan signifikan tingkat kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung didorong oleh kenaikan Upah Minimum Provinsi, pertumbuhan PDRB lapangan usaha pertanian, dan penurunan tingkat pengangguran selama 2018.

Upaya pengendalian inflasi bahan makanan akan sangat berdampak bagi pengendalian garis kemiskinan karena komoditas makanan memberikan kontribusi terbesar pada garis kemiskinan secara keseluruhan baik di perkotaan maupun perdesaan. Di samping itu, upaya meningkatkan perbaikan ekonomi masyarakat kiranya juga perlu memperoleh perhatian memadai karena persoalan kemiskinan bukan hanya terkait dengan berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, namun juga tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Meskipun persentase penduduk miskin rendah, namun jika rata-rata pendapatan perkapita penduduk dekat dengan garis kemiskinan, maka masyarakat sangat rentan menjadi miskin ketika terjadi kenaikan garis kemiskinan. Kebijakan pemerintah perlu diarahkan untuk mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan perkapita penduduk.

Beberapa hal yang kiranya dapat ditempuh untuk dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung, yaitu: melakukan intervensi terhadap sektor

ekonomi yang memberikan lapangan kerja besar bagi masyarakat dan melakukan upaya untuk menjaga pasar komoditas terbesar; modernisasi lapangan usaha pertanian yang berfokus menurunkan biaya produksi melalui pemberian bantuan peralatan bagi petani/nelayan, pembangunan infrastruktur pertanian, mematenkan produk unggulan lokal khususnya komoditas ekspor untuk menjaga stabilitas harga; menekan inflasi dengan pembangunan sentra produksi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan dari luar pulau; dan sinkronisasi pemanfaatan DAK Fisik dan Dana Desa dengan program yang dibiayai dengan APBD seperti optimalisasi *Cash for Work*.

Kondisi kemiskinan di Provinsi Aceh hingga September 2018 terus berfluktuasi sampai level 15,68%. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin secara nasional, yang bahkan selalu terjadi dalam beberapa periode terakhir. Jika diuraikan berdasarkan perkotaan dan pedesaan, persentase penduduk miskin di perkotaan sempat mengalami kenaikan pada periode Maret 2018 dan mengalami penurunan pada periode September 2018, sedangkan persentase penduduk miskin di pedesaan terus mengalami kenaikan pada periode Maret 2018 sampai September 2018. Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, indikator lain dalam permasalahan kemiskinan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Meskipun secara angka mengalami penurunan, namun jika dilihat dari persentase penduduk miskin di seluruh Provinsi di Indonesia, persentase penduduk miskin Provinsi Aceh berada di urutan tertinggi keenam, dibawah Papua, Papua Barat, NTT, Maluku, dan Gorontalo. Angka tersebut bahkan merupakan yang tertinggi jika dibandingkan seluruh provinsi di Pulau Sumatera. Hal ini mengindikasikan bahwa Provinsi Aceh cenderung lambat dalam mengentaskan kemiskinan. Beberapa upaya perlu difokuskan pemerintah dalam rangka penurunan angka kemiskinan di Aceh, misalnya menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, mengembangkan sektor UMKM, serta memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat/swakelola.

Sedangkan perkembangan nilai nominal garis kemiskinan Provinsi Bengkulu selama periode 2015-2018 cenderung terus meningkat, dan selalu lebih tinggi dibanding garis kemiskinan nasional. Pada periode September 2018, garis Kemiskinan Provinsi Bengkulu tercatat sebesar Rp366.889,- meningkat sebesar 3,34% bila disbanding periode yang sama tahun sebelumnya, dan meningkat 0,88% jika dibanding Maret 2018. Peningkatan ini seiring sejalan dengan inflasi barang dan jasa kebutuhan rumah tangga September 2017 ke September 2018 yang mencapai 0,59%. Dalam kurun waktu tahun 2015-2018, meski berpola fluktuatif, namun perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bengkulu cenderung menurun. Pada periode September 2015 jumlah penduduk miskin masih sebanyak 322,83 ribu jiwa (17,16%),

terus menurun hingga menjadi 303,55 ribu jiwa (15,41%) di bulan September 2018. Persoalan kemiskinan tidak hanya mencakup urusan jumlah dan persentase penduduk miskin, namun perlu diperhatikan pula indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan indeks keparahan kemiskinan (P2). Secara sederhana, P1 menggambarkan sejauhmana pendapatan kelompok penduduk miskin menyimpang dari garis kemiskinan. Sedangkan P2 menyatakan ketimpangan pendapatan diantara penduduk miskin, yang berarti semakin tinggi nilai P1 dan P2 menunjukkan persoalan kemiskinan yang semakin parah. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Bengkulu cenderung menurun meski tercatat sekali mengalami peningkatan (Maret 2017). Sama halnya dengan indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Penyebab kenaikan kedua indeks tersebut adalah pertumbuhan garis kemiskinan lebih cepat dibanding pertumbuhan pengeluaran kelompok penduduk miskin. Berdasarkan wilayah, baik P1 maupun P2 perdesaan terlihat selalu lebih tinggi dibanding perkotaan. Kondisi tersebut mencerminkan persoalan kemiskinan di perdesaan lebih kompleks dibanding perkotaan. Nilai P1 dan P2 Provinsi Bengkulu periode September 2018 masing-masing sebesar 2,35 dan 0,51. Dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, nilai P1 dan P2 terlihat menurun. Hal ini terkait faktor tingkat pengangguran yang menurun 0,23 poin pada Agustus 2018 (3,51%) dari Agustus 2017 (3,74%). Dan pertumbuhan ekonomi triwulan III sebesar 4,98% cukup membantu menekan laju kemiskinan di Provinsi Bengkulu.

3. PELAKSANAAN APBN

Target pendapatan regional Sumatera tahun 2018 sebesar Rp117,06 triliun sedangkan realisasi pendapatan sebesar Rp94,29 triliun. Pendapatan tersebut utamanya berasal dari penerimaan pajak yaitu sebesar Rp82,41 triliun atau 87,41% dari total realisasi pendapatan. Target penerimaan Perpajakan tahun 2018 di regional Sumatera ditetapkan lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu Rp92,95 triliun di tahun 2017 menjadi Rp97,94 triliun di tahun 2018. Realisasi penerimaan tahun 2018 masih dibawah target meskipun melampaui capaian tahun 2017.

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2018 mencapai 84,15% dari target yang ditetapkan, lebih tinggi dari capaian realisasi penerimaan tahun 2017 yang hanya mencapai 83,16%.

TABEL 24. REALISASI APBN REGIONAL JAWA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara						
Penerimaan Perpajakan	92.950,22	75.440,48	81,16%	97.937,71	82.410,72	84,15%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	8.866,43	9.004,44	101,56%	18.117,09	10.561,38	58,30%
Pendapatan Hibah	262,58	180,38	68,70%	1.006,17	1.314,13	130,61%
Jumlah Pendapatan Negara	**102.079,23**	**84.625,29**	**82,90%**	**117.060,97**	**94.286,23**	**80,54%**
Belanja Negara						
Belanja Pemerintah Pusat	93.765,88	83.936,31	89,52%	107.634,65	99.102,89	92,07%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	231.661,96	204.254,39	88,17%	223.424,84	205.986,73	92,20%
Jumlah Belanja Negara	**325.427,84**	**288.190,70**	**88,56%**	**331.059,49**	**305.089,62**	**92,16%**

Sumber: DJPb, DJP, DJBC, dan DJPK (diolah)

Pencapaian realisasi pendapatan di regional Sumatera masih lebih rendah dibandingkan dengan pencapaian penerimaan perpajakan secara nasional, dimana pemerintah mampu merealisasikan 92,4% dari total target penerimaan perpajakan nasional tahun 2018. Realisasi Penerimaan Perpajakan di Sumatera tahun 2018 masih jauh di bawah capaian realisasi nasional. Hal ini dipengaruhi dengan belum pulihnya harga komoditas utama yang menjadi sumber pendapatan terbesar Sumatera akibat penurunan ekonomi global.

Penerimaan perpajakan terbesar berada pada pusat perekonomian terbesar di Sumatera yaitu di Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp24,91 triliun kemudian disusul Provinsi Riau sebesar Rp14,64 triliun.

Dari sisi pengeluaran, Belanja Negara di Wilayah Sumatera didominasi oleh Transfer ke Daerah. Kinerja realisasi Belanja Negara tahun 2018 secara nominal di regional Sumatera mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumya. Kenaikan total realisasi di tahun 2018 disebabkan oleh penambahan alokasi pada Belanja Pemerinah Pusat. Selain secara nominal meningkat, total persentase realisasi Transfer ke Daerah pada tahun 2018 dan Belanja Negara di Sumatera meningkat masing-masing sebesar 4,03% dan 3,60% dibandingan tahun 2017. Kenaikan ini disebabkan antara lain oleh adanya pengaruh semakin meningkatnya ketaatan satuan kerja di wilayah Sumatera terhadap peraturan terkait pelaksanaan anggaran dan meningkatnya kepatuhan Pemerintah Daerah memenuhi persyaratan pencairan dana transfer ke daerah dibanding tahun sebelumnya. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya rata-rata nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) satuan kerja di wilayah Sumatera dari 82,83 di tahun 2017 menjadi 93,68 di tahun 2018.

Pada periode tahun 2018, sebagian besar anggaran Belanja Pemerintah Pusat di regional Sumatera dialokasikan untuk fungsi ekonomi, pendidikan dan ketertiban keamanan. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan prioritas Pemerintah secara nasional yaitu untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur

TABEL 25. REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI (TANPA DAK FISIK DAN DANA DESA) REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

KODE	URAIAN	TA 2017			TA 2018		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
01	PELAYANAN UMUM	40.754,56	38.660,49	94,86%	11.811,12	10.941,58	92,64%
02	PERTAHANAN	7.699,39	7.449,17	96,75%	8.612,34	8.458,23	98,21%
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	8.406,89	8.130,85	96,72%	17.250,87	17.299,36	100,28%
04	EKONOMI	23.004,00	20.940,47	91,03%	31.718,33	27.425,45	86,47%
05	LINGKUNGAN HIDUP	2.236,02	1.832,06	81,93%	2.663,89	2.304,77	86,52%
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	2.858,15	2.658,70	93,02%	5.040,72	4.839,74	96,01%
07	KESEHATAN	3.328,55	2.903,33	87,23%	5.081,59	4.273,13	84,09%
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	81,61	71,67	87,82%	99,29	67,36	67,85%
09	AGAMA	1.722,68	1.595,13	92,60%	2.222,56	2.175,08	97,86%
10	PENDIDIKAN	21.069,51	19.648,24	93,25%	22.841,68	21.037,05	92,10%
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	241,24	229,64	95,19%	292,26	281,14	96,19%

Sumber: DJPb dan DJPK (diolah)

(pembangunan jalan tol trans Sumatera) dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Alokasi pada Fungsi prioritas pemerintah tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Fungsi Ekonomi naik sekitar Rp8,71 triliun dan Fungsi Pendidikan naik sebesar Rp1,77 triliun. Tren yang serupa juga terjadi pada Ketertiban dan Keamanan, Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum, dan Fungsi kesehatan, dimana alokasi pada Fungsi Ketertiban dan Keamanan mengalami kenaikan yang cukup besar, yaitu sebesar Rp8,41 triliun di tahun 2017 menjadi Rp17,25 triliun di tahun 2018. Peningkatan alokasi pada fungsi ketertiban dan keamanan ini untuk mengawal proses pemilu yang akan dilakukan bulan April 2019.

Tingginya alokasi untuk fungsi ekonomi di wilayah Sumatera sesuai dengan arah pengembangan wilayah pulau Sumatera serta kegiatan prioritas di wilayah Sumatera, yaitu pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur di Pulau Sumatera sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim.

Namun jika komponen DAK Fisik dan Dana Desa dimasukkan ke dalam alokasi perfungsi, alokasi tertinggi adalah pelayanan umum, yaitu sebesar Rp156,89 Triliun. Besarnya tambahan alokasi belanja ke daerah dalam bentuk dana Transfer di tahun 2018 sesuai dengan komitmen pemerintah untuk membangun dari pinggiran.

Alokasi untuk fungsi pariwisata dan budaya di Sumatera sangat rendah, yaitu Rp99,29 Miliar. Wilayah Sumatera menyimpan potensi wisata yang sudah dikenal dunia internasional, yang jika dikembangkan dapat menjadi salah satu sumber pendapatan dimasa datang. Provinsi Aceh mempunyai Sabang yang terkenal sebagai daerah wisata bahari yang banyak disinggahi kapal-kapal pesiar. Sumatera Utara mempunyai Danau Toba yang sedan dikembangkan menjadi Kawasan Strategi Pariwisata Nasional. Lampung mempunyai Pesisir Barat yang menjadi daerah tujuan para peselancar internasional. Selain Pesisir Barat, Lampung juga mempunyai Teluk Semangka yang saat ini menjadi daerah tujuan wisata baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Provinsi Bangka Belitung juga mempunyai potensi wisata yang sangat besar. Kawasan Ekonomi Kreatif Tanjung Kelayang telah ditetapkan pemerintah sebagai ali Baru" di Indonesia. Besarnya potensi wisata di kawasan Sumatera seharusnya mendapat perhatian besar dari Pemerintah untuk

TABEL 26. REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

BELANJA	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pegawai	33.901	32.450	95,72%	36.092	35.340	97,92%
Barang	33.671	30.436	90,39%	43.807	39.837	90,94%
Modal	25.474	22.989	90,24%	27.571	23.767	86,20%
Bansos	342	332	97,11%	164	159	96,94%
Jumlah	**93.388**	**86.208**	**92,31%**	**107.635**	**99.103**	**92,07%**

Sumber: DJPb (diolah)

dikembangkan dengan memberikan alokasi lebih pada fungsi pariwisata dan budaya. Baik penyediaan infrastruktur daerah wisata dan infrastruktur menuju daerah wisata tersebut, maupun edukasi masyarakat sekitar daerah wisata dan promosi pariwisata.

Komposisi Belanja Pemerintah Pusat di regional Sumatera tahun 2017 dan 2018 mengindikasikan bahwa sebagian besar belanja masih berfokus pada kegiatan bersifat rutin dan operasional, antara lain untuk belanja gaji, belanja operasional, belanja swakelola (non fisik) untuk mendukung tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi. Porsi belanja modal untuk wilayah Sumatera tahun 2018 hanya sebesar 25,62%. Dibandingkan dengan tahun 2017, Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar 8,23% atau sebesar Rp2,10 Triliun. Namun kenaikan belanja modal tersebut masih jauh dibanding kenaikan belanja belanja barang, yaitu 30,11%. Sedangkan belanja pegawai hanya naik sebesar 6,48%, namun jika dilihat secara nominal, kenaikan alokasi belanja pegawai lebih tinggi dibanding dengan kenaikan alokasi belanja modal.

Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp8,24 triliun atau 3,56% dibandingkan tahun 2017. Penurunan ini disebabkan karena penurunan besaran Dana Bagi Hasil. Banyaknya pelaku usaha yang mempunyai kantor pusat di Jakarta menyebabkan setoran pajak dari hasil usaha di wilayah Sumatera disetor di luar wilayah Sumatera, sehingga mempengaruhi besarnya persentase Dana Bagi Hasil. Alokasi terbesar transfer ke daerah setiap tahun sama yaitu Dana Alokasi Umum yang mencapai 49,09% dari total alokasi anggaran tersebut. Alokasi transfer ke daerah terbesar terdapat di Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah total sebesar Rp41,88 triliun sedangkan alokasi terkecil terdapat di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu sebesar Rp7 triliun.

Secara umum realisasi Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa mencapai 92,19%. Rendahnya realisasi Transfer ke Daerah dibanding tahun 2017 dipengaruhi oleh rendahnya realisasi DBH yaitu 56,88%. Rendahnya realisasi DBH tersebut mengindikasikan adanya penurunan realisasi penerimaan di lingkup regional Sumatera. Rendahnya realisasi DBH juga dipengaruhi oleh adanya perubahan/koreksi rincian DBH dan penetapan lebih bayar/kurang bayar DBH Tahun 2018. Selain itu, pihak pelaku kegiatan ekonomi di wilayah regional Sumatera yang

TABEL 27. REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Dana Bagi Hasil	48.948,55	25.542,39	52,18%	41.373,18	25.051,02	56,88%
Dana Alokasi Umum	107.979,10	107.979,10	100%	109.673,82	108.927,29	90,86%
Dana alokasi Khusus	46.720,57	42.822,07	91,66%	45.283,66	44.696,00	90,21%
Dana Otonomi Khusus & Dana Insentif Daerah	10.016,47	10.016,47	100%	9.829,29	10.118,04	98,87%
Dana Desa	17.997,27	17.894,35	99,43%	17.264,88	17.188,30	94,16%
JUMLAH	**231.661,96**	**204.254,39**	**88,17%**	**223.424,84**	**205.980,65**	**92,19%**

Sumber: DJPb & DJPK (diolah)

berskala besar mayoritas berkedudukan di luar Pulau Sumatera, sehingga bagi hasil pajak yang didasarkan pada NPWP tidak dinikmati daerah di wilayah regional Sumatera.

4. BADAN LAYANAN UMUM

Satker Badan Layanan Umum (BLU) tahun 2018 di regional Sumatera berjumlah 43 satker. Satker BLU terbanyak berada di Provinsi Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, yaitu 8 Satker BLU. Provinsi Bangka Belitung yang di tahun 2017 tidak mempunyai Satker BLU, tahun 2018 mendapat penetapkan 1 satker BLU, yaitu Bandar Udara A.S Hanandjoeddin di Tanjung Pandan. Berdasarkan jenis pelayanannya, terdapat 23 satker layanan pendidikan, 14 satker layanan kesehatan, 4 satker layanan barang/jasa Lainnya, dan 2 satker layanan kawasan.

Tingkat kemandirian BLU dapat dilihat dari persentase belanja yang dibiayai oleh BLU. Semakin tinggi nilai belanja yang dibiayai dari sumber dana BLU, semakin mandiri BLU tersebut. Salah satu tujuan ditetapkannya satuan kerja menjadi BLU adalah tingginya kemandirian BLU tersebut dalam membiayai belanjanya dengan ditunjukkan semakin kecilnya prosi pembiayaan rupiah murninya. Persentase ideal tingkat kemandirian BLU adalah 65% belanja dibiayai dari sumber dana BLU.

Di Wilayah Sumatera, rata-rata tingkat kemandirian BLU tahun 2018 sebesar 46,11%. BLU dengan tingkat kemandirian tertinggi di wilayah Sumatera adalah BLU rumpun kesehatan, khususnya BLU Rumah Sakit. Namun secara BLU dengan tingkat kemandirian tinggi dengan pagu besar yang berpengaruh terhadap total pagu BLU adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Mohammad Hoesin Palembang, dan Rumah Sakit Umum Dr. M. Jamil Padang. Berikut adalah daftar tingkat kemandirian BLU di wilayah Sumatera.

GAMBAR 56. JUMLAH SATKER BLU MENURUT LAYANAN REGIONAL SUMATERA TAHUN 2014 S.D. 2018

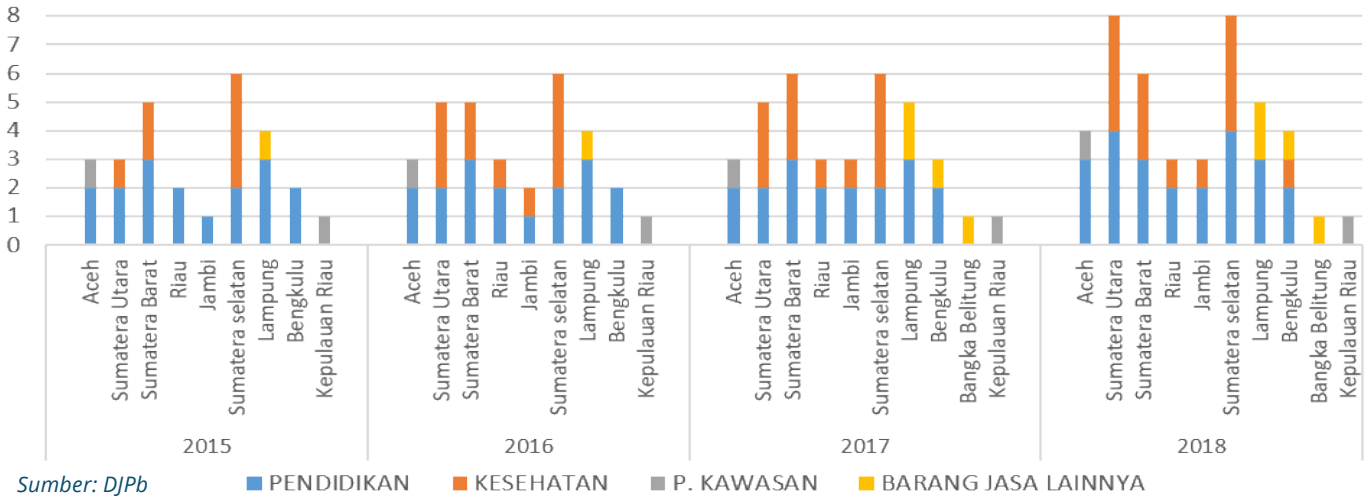

Sumber: DJPb

TABEL 28. REALISASI BELANJA BLU REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

Nama BLU	Pagu RM	Realisasi RM	Pagu BLU	Realisasi BLU	Keman dirian
Rumkit Bhayangkara Bengkulu	5,83	6,61	56,00	39,65	90,57%
Rumkit Bhayangkara Tebing Tinggi	4,37	4,60	32,30	31,38	88,08%
Rumkit Bhayangkara Palembang	9,84	8,69	41,70	31,91	80,91%
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang	151,89	147,18	583,80	489,54	79,35%
Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam	428,53	395,07	1.522,34	1.110,67	78,03%
Rumkit Bhayangkara Pekanbaru	5,08	4,68	17,48	16,46	77,48%
RSU Dr M Jamil Padang	139,36	135,39	477,13	446,00	77,39%
RSU H. Adam Malik Medan	154,39	150,40	485,25	409,82	75,86%
Rumkit Bhayangkara Medan	11,72	12,69	21,46	19,28	64,68%
Rumkit Bhayangkara Padang	8,70	9,17	15,68	16,73	64,32%

Sumber: DJPb (diolah)

5. PELAKSANAAN APBD

Apabila belanja pemerintah daerah yang dialokasikan memiliki nilai lebih besar dibandingkan dengan pendapatan daerah yang ditargetkan akan diperoleh dalam APBD maka pemerintah sedang menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, seperti APBD Pemerintah daerah di Sumatera yang menunjukkan adanya defisit dalam APBD. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara mendorong peningkatan output perekonomian. Defisit APBD tersebut harus ditutup dengan pembiayaan.

Secara umum, realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017 baik secara persentase maupun secara nominal. Berdasarkan sisi pendapatan, kemampuan daerah dalam mengumpulkan PAD mengalami penurunan dengan semakin meningkatnya pendapatan transfer. Hal ini merupakan indikasi kemandirian fiskal daerah mengalami pelemahan. Pendapatan transfer yang merupakan komponen utama

TABEL 29. REALISASI APBD REGIONAL SUMATERA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan						
PAD	46.349,00	45.707,51	98,62%	50.678,27	44.935,17	88,67%
Pendapatan Transfer	171.007,60	169.988,06	99,40%	175.448,69	174.957,83	99,72%
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	46.713,72	37.445,30	80,16%	41.949,06	32.965,55	78,58%
Jumlah Pendapatan	**264.070,32**	**253.140,87**	**95,86%**	**268.076,03**	**252.858,55**	**94,32%**
Belanja						
Belanja Pegawai	91.732,35	90.069,91	98,19%	92.590,58	92.494,95	99,90%
Belanja Barang	59.035,55	61.510,46	104,19%	68.107,46	63.091,75	92,64%
Belanja Modal	55.404,09	55.263,38	99,75%	54.762,07	48.464,92	88,50%
Belanja Lainnya	56.237,61	44.676,54	79,44%	64.600,24	44.619,07	69,07%
Jumlah Belanja	**262.409,59**	**251.520,30**	**95,85%**	**280.060,35**	**248.670,70**	**88,79%**
Surplus/Defisit	*1.660,73*	*1.620,57*	*97,58%*	*-11.984,32*	*4.187,85*	*-34,94%*

Sumber: DJPb (diolah)

pendapatan daerah masih tetap tinggi dan nilainya semakin meningkat sejalan dengan komitmen pemerintah dalam desentralisasi fiskal. Peningkatan pendapatan tersebut juga berimbas pada penurunan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada sisi Belanja, hanya belanja pegawai dan barang yang nilai realisasinya mengalami peningkatan dengan penyerapan tertinggi adalah Belanja Pegawai.

5.I. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah secara persentase maupun nominal pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 dengan nilai mencapai Rp772,34 miliar (-1,69%). Perkembangan negatif tersebut disumbang oleh besarnya nilai penurunan lain-lain PAD yang sah yang mencapai Rp3.282,84 miliar meskipun pajak daerah meningkat sebesar Rp2.328,87 miliar. Penurunan sebesar Rp1,276,91 miliar terjadi pada enam provinsi di Sumatera yakni Provinsi Sumatera Barat (38,76%), Aceh (28,03%), Jambi (16,93%), Sumatera Utara (10,73%), Riau (3,71), dan Bengkulu (1,83%). Peningkatan Rp504,58 miliar tersebut sebesar 65,47% didorong oleh meningkatnya PAD Provinsi Kepulauan Riau.

Pendapatan transfer mengalami peningkatan relatif signifikan mencapai Rp4.969,77 miliar (2,9,2%). Perkembangan positif tersebut didukung oleh meningkatnya realisasi DAK sebesar 8,29% (porsi 65,83%) dan DBH 10,81% (porsi 49,75%) meskipun terdapat penurunan DAU sebesar-0,72% (porsi -15,58%). Peningkatan pendapatan transfer sebesar Rp4.131,02 miliar terjadi pada delapan provinsi yakni Provinsi Lampung (41,64%), Sumatera Selatan (35,95%), Sumatera Barat (7,85%), Sumatera Utara (4,69%), Bangka Belitung (4,18%), Kepulauan Riau (3,02%), Jambi dan Riau (2,65%).

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 mencapai Rp4,479,75 miliar (-11,96%). Penurunan tersebut didorong oleh menurunnya Lain-lain sebesar -38,11% (porsi 59,81%), dan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar -7,12% (porsi 40,82%) meskipun hibah mengalami peningkatan 34,78% (porsi -17,79%). Perkembangan negatif dipengaruhi oleh menurunnya pendapatan sebesar Rp2.918,59 miliar pada sebesar tersebut terjadi pada lima provinsi yakni Provinsi Lampung (42,36%), Aceh (34,26%), Sumatera Selatan (20,78%), Bengkulu dan Riau (2,61%). Peningkatan pendapatan sebesar Rp1.027,83 miliar pada lima provinsi lainnya belum mampu mengimbangi penurunan pendapatan ini.

Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan perubahan komposisi pendapatan daerah di wilayah Sumatera. Pendapatan daerah mengalami perkembangan negatif yang diakibatkan oleh penurunan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (85,29% penurunan) dan sisanya adalah PAD, sedangkan peningkatan Pendapatan Transfer belum mampu mendorong perkembangan pendapatan daerah menjadi positif. Dibanding tahun 2017, terjadi penurunan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 0,29% menjadi 17,77% dari 18,06%.

Hal tersebut menunjukkan melemahnya kemandirian keuangan daerah dengan kontribusi pendapatan transfer semakin dominan meningkat 2,04% menjadi 69,19%. Selain penurunan PAD, penurunan lain-lain pendapatan daerah yang sah turut menunjang peningkatan porsi pendapatan transfer pada APBD Sumatera.

5.II. BELANJA DAERAH

Realisasi anggaran di regional Sumatera pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2016 baik secara nominal maupun persentase. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyerapan anggaran mengalami penurunan. Penurunan realisasi ini seluruhnya disebabkan oleh menurunnya realisasi belanja modal pada APBD di Sumatera.

Dari total belanja APBD di Regional Sumatera pada tahun 2018, hampir 40% digunakan untuk Belanja Pegawai, hanya sekitar 25% yang dialokasikan untuk Belanja Barang dan sekitar 20% untuk Belanja Modal sedangkan sisanya untuk Belanja Lainnya. Terdapat tiga provinsi yang 40% lebih APBDnya direalisasikan hanya untuk belanja pegawai yaitu Provinsi Sumatera Barat sebesar 42,36%, Jambi sebesar 40,83%, dan Bengkulu sebesar 40,47%. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja yang besar akan menekan porsi untuk belanja produktif seperti Belanja Modal menjadi lebih kecil. Rata-rata rasio belanja modal terhadap belanja APBD berkisar pada 19%.

Alokasi anggaran dan belanja pemerintah daerah yang terbesar masih merupakan alokasi dana untuk mandatory spending seperti sektor pendidikan minimal 20% dari total pagu. Sementara itu, dalam sektor pelayanan publik dan birokrasi terdapat belanja gaji pegawai yang juga termasuk dalam belanja wajib pemerintah yang jumlahnya cukup dominan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat keleluasaan pemerintah daerah di Sumatera untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka mendorong pembangunan relatif kecil. Salah satu hal positif adalah sebagian pemerintah daerah di Sumatera menempatkan belanja infrastruktur sebagai prioritas setelah mandatory spending terpenuhi. Dengan demikian, sebagian pemerintah daerah telah menyadari pentingnya pembangunan infrastruktur sebagai katalisator dalam pembangunan perekonomian secara menyeluruh dan berkesinambungan.

5.III. SURPLUS/DEFISIT

APBD di regional Sumatera pada tahun 2018 pada awalnya diperkirakan mengalami defisit, namun dalam realisasinya menghasilkan surplus. Surplus tersebut diakibatkan oleh realisasi Belanja APBD yang tidak optimal dan realisasi Pendapatan yang signifikan dengan persentase terhadap target yang cukup tinggi. Surplus APBD tersebut berasal dari enam Provinsi meskipun provinsi lainnya masih mengalami defisit APBD. Surplus terjadi di Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp2.295,83 miliar, Riau sebesar Rp1.293,99 miliar, Aceh sebesar Rp1.248,73 miliar, Bangka Belitung sebesar Rp320,56 miliar, Kepulauan Riau sebesar Rp222.92 miliar dan Jambi sebesar Rp72,78 miliar. Surplus APBD tersebut dapat digunakan untuk Pengeluaran Pembiayaan,

namun dalam kondisi dimana belanja negara maupun daerah yang bersifat ekspansif, maka anggaran defisit dapat lebih mendorong laju pertumbuhan ekonomi tentunya dengan risiko fiskal yang terukur.

6. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL

Sumatera dikenal memiliki sektor unggulan dan potensi ekonomi dari kekayaan alam yang melimpah berupa lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan hutan yang sangat luas serta potensi minyak dan gas bumi.

6.I. SEKTOR PERTANIAN

Sektor ini merupakan kontributor terbesar di Sumatera pada tahun 2018 dengan kontribusi mencapai 20,29% perekonomian Sumatera yang didukung Provinsi Riau, Sumatera Utara, Lampung, dan Aceh. Produk pertanian terdiri dari tanaman padi/beras, kopi, kelapa sawit, saret, kayu, tembakau, dan ikan.

Sektor pertanian Riau merupakan penyumbang sektor pertanian sumatera namun menempat urutan ketiga sektor pendukung PDRB-nya (24,43%; Rp42,01 triliun). Produk utama berupa kelapa sawit yang menghasilkan 2,77 juta Ha pada lahan perkebunan 2.01 juta Ha. Perkebunan sawit di Riau adalah perkebunan sawit rakyat terbesar dunia dengan persentase pemilik lahan sebesar 60% petani swadaya maupun plasma dan 40% perkebunan swasta. Rasio keterlibatan petani sawit paling tinggi di dunia karena sawit merupakan industri padat karya yang melibatkan banyak petani sehingga pertumbuhan industri ini sangat berperan penting pada kesejahteraan masyarakat.

Sektor pertanian di Sumatera Utara merupakan penyumbang terbesar dengan kontribusi 20,55% PDRB-nya (Rp39,28 triliun) yang didominasi oleh produk pertanian, kehutanan, perikanan, dan perkebunan. Produksi padi mencapai 1,91 juta ton pada 360,7 ribu ha. Capaian tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan petani dengan menurunnya nilai tukar petani (NTP) sebesar 0,34% menjadi 97,31. Dukungan pemerintah dengan alokasi cukup signifikan tiap tahunnya sebesar 2,61% alokasi APBN dan APBD dimaksudkan untuk meningkatkan produksi beras. Produksi hasil hutan meningkat mengalami peningkatan 32% menjadi 46,5 ribu m3 meskipun luas lahan produksi hutan dan ijin HPH cenderung menurun. Produk hutan terdiri dari kelompok meranti (MRT) dan rimba campuran (KRC) berupa kayu log, kayu gergajian, kayu lapis, PULP, dan hasil ikutan lainnya (rotan, arang, dan getah tusam). Dukungan pemerintah dengan alokasi terus meningkat tiap tahunnya rata-rata sebesar 40% menjadi Rp383,94 miliar dari APBN dan APBD. Perikanan tangkap laut meningkat 2,7% produksinya menjadi 439,3 ribu ton didukung oleh peningkatan alokasi APBN yang digunakan untuk penebaran benih ikan dan peningkatan pengawasan kawasan ZEE Sumut dari *illegal fishing*. Produksi hasil perkebunan meningkat 5,3% menjadi 6,44 juta ton didukung peningkatan lahan 0,45% menjadi 881,4 ribu ha. Hasil perkebunan adalah sawit 6,07 juta ton, karet 0,31 juta ton, kopi 0,06 juta ton, dan tembakau 0,001 juta

ton. Sawit sangat dominan karena terdapat tiga perkebunan besar PTPN dan ratusan perkebunan besar milik swasta.

Sektor pertanian di Provinsi Aceh menyumbang 39,95% PDRB-nya (Rp11,77 triliun) menyerap 865.803 tenaga kerja (39,29% penduduk bekerja). Meskipun menjadi *leading sector* dalam perekonomian Aceh, namun kesejahteraan petani di Aceh masih berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini terjadi karena produk pertanian yang dipasarkan sebagian besar dalam bentuk bahan mentah tanpa diolah yang meyebabkan nilai tambah produk menjadi sangat kecil, dominan terjadi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat dan tanaman pangan. Produksi tanaman padi Aceh sebesar 2,57 juta ton setara 4,54% produksi nasional dengan surplus kebutuhan local 547 ribu ton. Kontribusi perkebunan kopi sangat besar dengan menjadi andalan ekspor dengan varietas Arabika pada Kopi Gayo yang digemari berbagai kalangan dunia. Dalam tiga tahun kebelakang, produksi kopi meningkat namun luas lahan perkebunan mengalami penyempitan akibat dari rantai pemasaran yang sangat panjang melalui pelabuhan Belawan, diversifikasi produk masih rendah, banyak petani termotivasi alih komoditi, dan tidak adanya peralatan pengolahan kopi yang memadai sehingga tidak terwujud *value added* produk kopi.

6.II. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Sektor ini merupakan kontributor terbesar kedua di Sumatera pada tahun 2018 dengan kontribusi mencapai 20,24% perekonomian Sumatera yang didukung Provinsi Riau, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Industri pengolahan di Kepulauan Riau didominasi oleh industri logam dasar; industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik; angkutan laut; dan penyediaan akomodasi. Industri logam dasar meliputi kegiatan pengolahan logam dasar besi dan baja, logam dasar mulia, dan logam dasar bukan besi lainnya seperti alumunium, tembagam nikel. Industri komputer meliputi kegiatan pembuatan komputer, perlengkapan komputer, peralatan komunikasi, dan barang- barang elektronik sejenis beserta komponennya. Industri angkutan laut meliputi usaha pengangkutan penumpang atau barang pada kapal, termasuk angkutan penarik atau pendorong tongkang, kapal minyak, dan kapal angkutan lainnya. Industri penyediaan akomodasi meliputi penyediaan akomodasi jangka pendek (hotel, losmen, hostel, vila, bungalo, dan penginapan lainnya), dan penyediaan akomodasi untuk jangka yang lebih lama (kamar atau asrama untuk pelajar, pekerja musiman dan sejenisnya). Pemusatan industri logam dasar di Kepulauan Riau yang berada di jalur perdagangan internasional akan mempercepat proses ekspor sehingga biaya logistik dapat ditekan dan hasil produksi semakin kompetitif. Pemerintah dapat membantu pembentukan pusat industri logam dasar tersebut dengan memberikan fasilitas *tax holiday* khusus untuk perusahaan yang bergerak di bidang industri logam dasar. Selain itu, pemerintah juga dapat merancang PPP untuk membangun

kawasan industri khusus. Alternatif lainnya, rencana pembentukan KEK Batam dengan bentuk enclave dapat dimanfaatkan untuk mendedikasikan salah satu *enclave* menjadi pusat industri logam dasar.

6.III. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Sektor ini merupakan salah satu unggulan di regional Sumatera sebagai penggerak roda perekonomian. Kontribusi sektor ini mencapai 13,47% terhadap perekonomian Sumatera. Sektor ini didominasi oleh gas bumi, minyak bumi, dan batu bara.

Sektor pertambangan dan penggalian di Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi memiliki kontribusi PDRB Pertambangan Sumatera sebesar 47,81%, 20,36%, dan 10,05%. mencapai Rp85,80 triliun. Sektor ini merupakan penyumbang tertinggi PDRB di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan. Tingginya nilai berkat dukungan peningkatan harga minyak bumi dan batu bara. Komoditas utama pertambangan Riau adalah batubara. Hasil-hasil pertambangan yang dihasilkan dari Provinsi Sumatera Selatan yaitu minyak bumi, gas bumi, dan batubara dengan jumlah produksi masing-masing 16,92 juta barel, 0,58 juta MSCF, dan 35 juta ton sedangkan Jambi sebesar 7,62 ribu barel, 84,75 juta MMBTU, dan 4,6 juta ton. Sektor ini terus berkembang setiap tahunnya sehingga mampu berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dukungan pemerintah di Sumsel mengalami penurunan tiap tahunnya hingga mencapai Rp82,5 miliar.

6.IV. SEKTOR PARIWISATA

Regional Sumatera mempunyai obyek-obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi sehingga dapat dikembangkan untuk menjadi penopang perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan. Terdapat dua kawasan ekonomi khusus (KEK) yang mendukung tema pembangunan pariwisata pada tahun 2018. KEK tersebut dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara dan Bangka Belitung. KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara mendukung logistik pariwisata aneka industri antara lain elektronika dan pupuk dengan fasilitas pengembalian PPN (*duty free shop*). KEK Tanjung Kelayang di Bangka Belitung mendukung pariwisata bahari dengan pantai berpasir putih dan panorama yang eksotis. Konsep pengembangan KEK pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, diharapkan menarik investasi sebesar Rp20 triliun dan 59.000 wisatawan pertahun. Insentif yang ditawarkan adalah fasilitas dan kemudahan perpajakan (*tax holiday* dan *tax allowance*), kepabeanan dan cukai (kemudahan perijinan lalu lintas barang).

7. TANTANGAN FISKAL REGIONAL

Secara umum, regional Sumatera sedang menghadapi tantangan fiskal yang sifatnya klasik, yaitu terkait dengan kemandirian fiskal dan kualitas belanja.

7.I. KEMANDIRIAN FISKAL

Dana transfer dari Pemerintah Pusat masih sebagai sumber utama penerimaan Pemda di Sumatera dengan porsi yang sangat dominan

dibanding sumber lainnya. Bila dibandingkan dengan PAD, Porsi pendapatan transfer masih sangat besar, bahkan rendahnya kontribusi PAD menunjukkan pola yang menurun. Oleh karena itu, Pemda harus terus berusaha mengoptimalisasikan sumber-sumber pendapatan yang ada selain dari dana transfer yaitu melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sumber-sumber PAD seperti pajak daerah dan retribusi daerah harus terus digali melalui upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi serta memperbaiki penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat mendorong peningkatan PAD secara optimal.

7.II. KUALITAS BELANJA PEMERINTAH

Regional Sumatera masih menghadapi tekanan pasar global terkait harga komoditas-komoditas unggulannya. Tentunya akan berimbas pada pertumbuhan sektor-sektor besar seperti pertambangan dan penggalian serta pertanian, kehutanan, dan perikanan yang cenderung *stagnan*. Kondisi ini turut berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat baik secara ekonomi maupun kualitas pembangunan manusia itu sendiri.

Menghadapi kondisi yang terjadi, tantangan utama yang dihadapi adalah mewujudkan respon fiskal pemerintah yang tepat dalam bentuk eksekusi belanja pemerintah baik APBN maupun APBD berkualitas. Tingginya realisasi belanja APBN belum diimbangi oleh belanja APBD, padahal kondisi global yang berimbas pada kesejahteraan masyarakat tentunya harus direspon dengan proporsi dan alokasi belanja APBN dan APBD yang tepat dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi.

Kinerja pelaksanaan anggaran mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan peningkatan realisasi dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan realisasi terjadi pada seluruh jenis belanja. Namun belanja pegawai memiliki porsi sangat dominan dibanding porsi belanja barang dan belanja modal. Struktur ini menunjukkan bahwa belanja masih dialokasikan lebih untuk belanja operasional dibandingkan untuk belanja produktif. Selain hal tersebut, realisasi APBD masih belum optimal seluruhnya seperti belanja modal yang menurun namun belanja pegawainya meningkat, sehingga alokasi anggaran yang seharusnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat masih belum dapat dirasakan manfaatnya secara optimal.

7.III. KEK SEBAGAI MOMENTUM KEBANGKITAN SEKTOR INDUSTRI

KEK belum dapat meningkatkan capital inflow yang mengindikasikan masih minimnya investasi yang masuk dibandingkan dengan belanja yang telah dikeluarkan pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena hasil dari investasi, digunakan untuk belanja di luar provinsi tersebut. KEK seperti KEK Arun Lhokseumawe (industri energi, petrokimia, agro industri kelapa sawit dan kayu, dan logistik), KEK Sei Mangkei (industri pengolahan kelapa sawit dan karet, logistik, dan pariwisata), KEK Tanjung Api-Api (industri pengolahan kelapa sawit dan karet, petrokimia, dan logistik), KEK Galang

Batang (Industri pengolahan bauksit dan logistik), dan KEK Kelayang (pariwisata) masih belum dioptimalkan sepenuhnya sehingga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

8. SOLUSI FISKAL REGIONAL

Solusi yang dapat diberikan atas tantangan fiskal regional tersebut diatas dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, APBN, APBD, dan sektor unggulan di regional Sumatera diantaranya sebagai berikut:

Pertama, optimalisasi pendapatan dapat dilakukan dengan melalui pemetaan potensi-potensi penerimaan daerah. Pemetaan dilakukan terhadap potensi-potensi dari sektor-sektor penyumbang perekonomian di Sumatera misalnya dari sektor pertanian, sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan energi. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan dapat difokuskan pada sektor-sektor yang mempunyai potensi besar dalam peningkatan penerimaan. Optimalisasi pendapatan semisal dalam rangka peningkatan PAD seiring dengan besarnya porsi pendapatan transfer dapat dilakukan dengan memprioritaskan belanja publik yang bersifat investasi. Dalam rangka membantu rendahnya kemandirian fiskal daerah, pemerintah pusat dapat melakukan pemberian insentif tambahan dana transfer bagi daerah yang memiliki kemandirian fiskal rendah namun berhasil meningkatkan angka capaian indikator makro daerah.

Kedua, untuk mendukung optimalisasi pendapatan, pemerintah baik pusat dan daerah turut melakukan pembangunan infrastruktur penunjang/pendukung sektor-sektor unggulan. Diharapkan dapat menumbuhkembangkan sektor tersebut sehingga menjadi penyumbang perekonomian. Sebagai contoh, dukungan pemerintah terhadap pengembangan integrasi industri mulai hulu hingga hilir, dari titik produksi hingga ekspor pada KEK Sei Mangkei. Beberapa infrastruktur pendukung yang telah dibangun meliputi jaringan listrik tegangan menengah 20 kv sepanjang 2.700 m, jalan sepanjang 1.704 m, drainase induk sepanjang 1.920 m, dan sarana pengolahan air bersih kapasitas 250 m3/jam dengan panjang pipa 3.374 m. Selain itu dukungan pemerintah sebesar Rp2,9 triliun digunakan untuk membangun infrastruktur wilayah seperti rel kereta api, dermaga curah, dan jalan.

Ketiga, dalam rangka perbaikan kualitas belanja pemerintah maka dalam penyusunan kebijakan fiskal harus turut mempertimbangkan aspek keunggulan kompetitif daerah. Pemda dapat mempertimbangkan potensi ekonomi unggulan yang dapat menjadi penyumbang PAD sesuai keunggulan daerahnya masing-masing. Kajian dan pemetaan sumber daya yang dimililki sangat diperlukan untuk mendukung hal tersebut. Berdasarkan hasil kajian dan pemetaan tersebut, daerah dapat mengidentifikasi sektor-sektor prioritas yang memiliki potensi ekonomi di daerahnya disertai tanpa mengabaikan kearifan lokal. Sektor tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan PDRB yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan pemerintah serta

memperluas ruang fiskal.

Selain itu, kualitas belanja pemerintah dapat ditingkatkan dengan mendorong alokasi belanja produktif dan dengan melihat kembali dan realokasi dari belanja kurang produktif ke belanja modal jangka panjang. Belanja bersifat produktif dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur, mengembangkan industri hilir dan sektor UMKM serta menumbuhkan sektor-sektor potensial untuk menjadi sumber kekuatan perekonomian, serta menumbuhkan sektor industri dengan tetap memberdayakan tenaga kerja.

Keempat, KEK sebagai pendukung perekonomian daerah. KEK yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan regional perlu didukung pemerintah dengan pemberian fasilitas fiskal bagi investor seperti *tax holiday* serta *investment allowance* sebagai pusat daya tarik investasi, fasilitas tersebut harus disosialisasikan secara masif didukung dengan keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi. Diharapkan *multiplier effect* dari aktivitas perekonomiannya dapat berdampak pada berbagai indikator pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Dukungan infrastruktur penunjang mutlak diperlukan untuk menunjang kelancaran distribusi hasil pembangunan dan mendorong perekonomian. KEK diharapkan dapat berperan besar dan berkontribusi dalam perekonomian daerah dengan menggerakkan perekonomian, menyerap tenaga kerja, dan memberikan nilai tambah pada produk unggulan daerah sehingga memberikan daya saing pada produk tersebut

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Fiskal Regional Jawa

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi regional Bali Nusra turun dari 3.71% pada tahun 2017 ke angka 2,68%. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada Provinsi NTB yang mengalami kontraksi hingga 4,56% menjadi penyumbang utama perlambatan ekonomi regional ini. Sektor pertambangan dan penggalian (bijih logam) menjadi faktor utama merosotnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB. Selain itu lapangan usaha pengadaan air dan lapangan usaha penyediaan akomodasi makan minum juga mengalami kontraksi. Kedua lapangan usaha ini terdampak langsung oleh bencana alam gempa bumi terutama dalam hal infrastrukturnya. Perkembangan inflasi regional berada berada pada kisaran angka yang sama dengan inflasi nasional, kecuali untuk Provinsi NTB yang mencapai 3,17%. Indikator kesejahteraan regional Bali Nusra pada tahun 2018 menunjukkan perkembangan yang positif dimana IPM, Rasio Gini, TPT, dan Tingkat Kemiskinan membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, IPM dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTB dan NTT masih memerlukan perhatian khusus mengingat angkanya yang masih jauh dari rata-rata nasional.

Realisasi pendapatan negara di regional Bali Nusra sebagian besar masih didukung dari penerimaan perpajakan dengan komposisi sebesar 85,62% dari total pendapatan negara. Pagu belanja negara yang dianggarkan untuk regional Bali Nusra pada tahun 2018 sebesar Rp80,1 triliun (meningkat 32,57% dibanding tahun sebelumnya) dengan realisasi sebesar Rp77,1 triliun atau meningkat sebesar 36,93% dibanding realisasi tahun sebelumnya. Dari postur pendapatan pada APBD Regional Bali Nusra TA 2018 menunjukkan bahwa terjadi penurunan ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat menjadi sebesar 61,95% yang semula pada TA 2017 sebesar 63,08%. Pemerintah daerah pada Provinsi NTT memiliki ketergantungan terbesar kepada Pemerintah Pusat, yaitu sebesar 76,1%. Sejalan dengan peningkatan ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat, pertumbuhan PAD pada regional Bali Nusra TA 2018 dibandingkan dengan TA 2017 menunjukkan minus 4,58%. Dibandingkan tahun 2017, terjadi peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dari 72,3% menjadi 72,4% yang didorong oleh peningkatan kontribusi PAD di Provinsi Bali dan NTT.

1. MAKROEKONOMI REGIONAL JAWA

1.I. PERTUMBUHAN EKONOMI

Laju pertumbuhan ekonomi regional Jawa tahun 2018 sebesar 5,72%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,61%. Laju pertumbuhan ekonomi pada masing-masing provinsi di Jawa masih berada di atas rata-rata nasional. Hal ini menunjukkan Jawa masih mendominasi perekonomian Indonesia, bahkan untuk tahun 2018 ini rata-rata persentasenya menunjukkan tren peningkatan dibandingkan dengan tahun lalu.

GAMBAR 57. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL JAWA 2017 DAN 2018

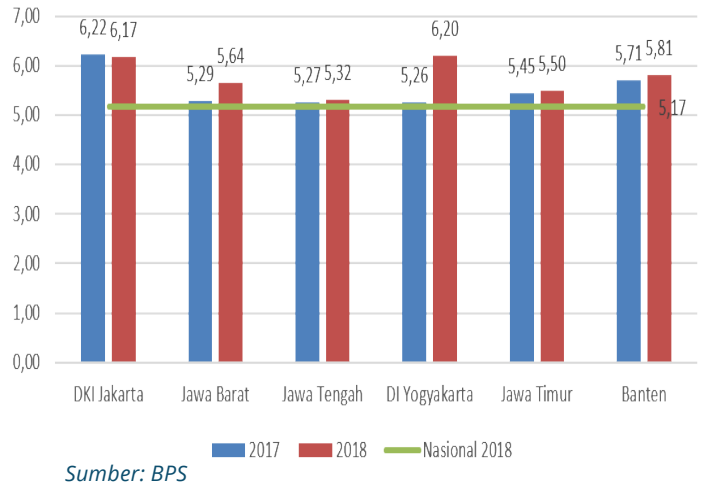

Sumber: BPS

Berbeda dengan tahun 2017 dimana laju pertumbuhan tertinggi terdapat pada Provinsi DKI Jakarta, laju pertumbuhan ekonomi tahun 2018 tertinggi masih terjadi di Provinsi DIY Yogyakarta (6,20%) yang mengalami kenaikan cukup tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (5,26%). Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Provinsi Jawa Tengah dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 5,32%. Akan tetapi angka tersebut meningkat 0,05% jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Komponen konsumsi rumah tangga berkontribusi paling besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluaran. Masih tingginya porsi konsumsi rumah tangga memberikan sinyal bahwa daya beli masyarakat di Pulau Jawa masih cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi 2017 per provinsi, laju pertumbuhan ekonomi Provinsi DI Yogyakarta mengalami peningkatan tertinggi pada tahun 2018 sebesar 0,94% dari 5,26% di tahun 2017 menjadi 6,20%. Pada Tahun 2018 peningkatan pertumbuhan Provinsi DI Yogyakarta tersebut dipengaruhi oleh positifnya tingkat pertumbuhan di semua komponen pengeluaran. Andil pertumbuhan terbesar pada tahun 2018 berasal dari pengeluaran komponen PMTB sebesar 2,73% .

Sedangkan Provinsi DKI Jakarta justru mengalami perlambatan yaitu sebesar 0,05%. Laju pertumbuhan Provinsi DKI Jakarta di tahun 2018 sebesar 6,17% sementara di tahun 2017 sebesar 6,22%. Perlambatan pertumbuhan perekonomian Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2018 terjadi s.d. Triwulan II yang lebih disebabkan oleh perlambatan

TABEL 30. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI PERMINTAAN, REGIONAL JAWA TAHUN 2017 DAN 2018

URAIAN	2017	2018
Konsumsi Rumahtangga	4,91	6,40
Konsumsi LNPRT	7,87	9,29
Konsumsi Pemerintah	3,90	10,65
PMTB	6,36	6,70
Change in Stock	6,00	13,20
Ekspor Barang dan Jasa	2,51	6,75
Impor Barang dan Jasa	9,30	12,13
Inter-region Net Ekspor	26,79	18,28

Sumber: BPS

GAMBAR 58. KOMPOSISI PDRB ADHB DARI SISI PERMINTAAN, REGIONAL JAWA TAHUN 2018

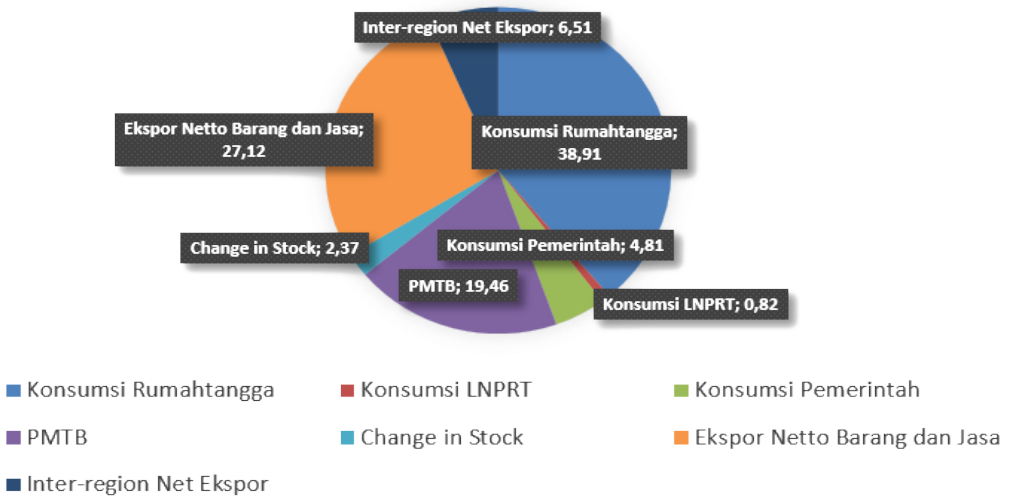

Sumber: BPS

kinerja PMTB khususnya investasi bangunan, sejalan dengan adanya pembangunan infrastruktur ibukota yang rata-rata telah mencapai progress 90% sebagai kelanjutan dari pembangunan tahun sebelumnya.

Dari sisi Permintaan pada tahun 2018 Konsumsi Pemerintah mengalami peningkatan laju pertumbuhan terbesar. Hal tersebut disebabkan dengan adanya peningkatan dan pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembayaran THR untuk pensiunan yang tidak diberikan pada tahun 2017 dan adanya kenaikan tunjangan kinerja ASN untuk menunjang Reformasi Birokrasi serta peningkatan Belanja Subsidi dan Bansos.

GAMBAR 59. KOMPOSISI PDRB ADHB DARI SISI PENAWARAN, REGIONAL JAWA TAHUN 2018

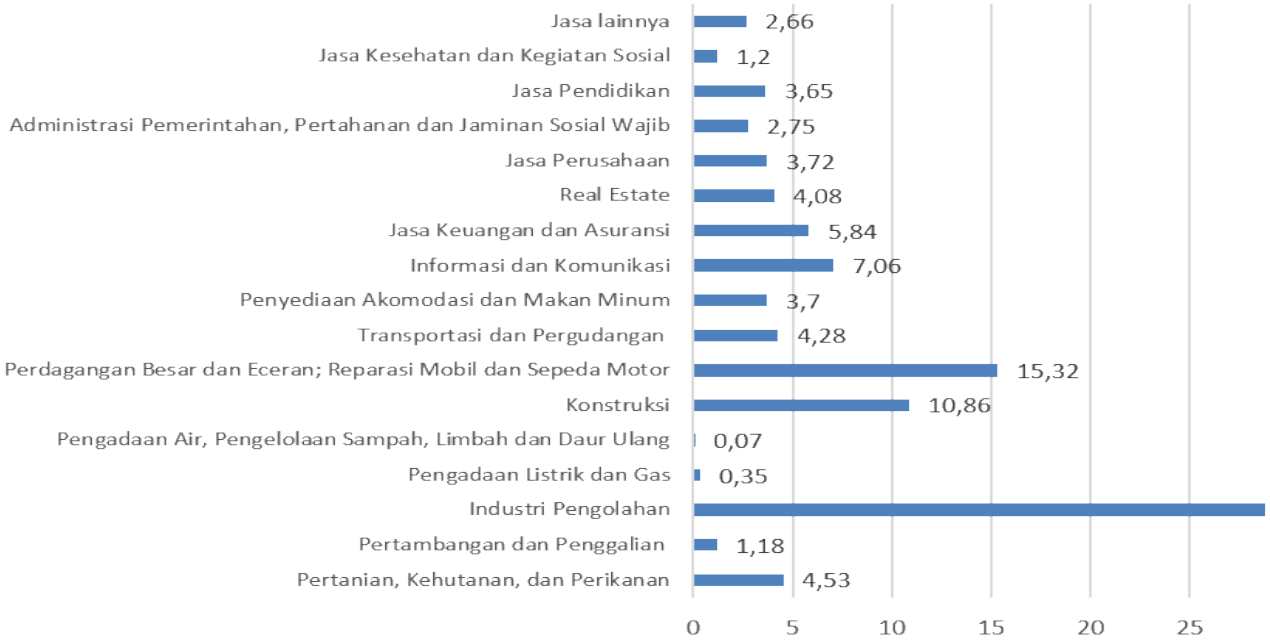

Sumber: BPS

TABEL 31. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI PENAWARAN, REGIONAL JAWA TAHUN 2017 DAN 2018

URAIAN	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,72%	3,14%
Pertambangan dan Penggalian	4,75%	-0,63%
Industri Pengolahan	5,36%	2,36%
Pengadaan Listrik dan Gas	-0,36%	1,58%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,06%	1,91%
Konstruksi	6,51%	1,45%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,66%	2,87%
Transportasi dan Pergudangan	6,81%	2,32%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,06%	1,10%
Informasi dan Komunikasi	9,97%	2,49%
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,65%	7,71%
Real Estate	5,41%	1,38%
Jasa Perusahaan	8,00%	17,34%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,39%	-0,67%
Jasa Pendidikan	5,35%	-3,26%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,21%	1,27%
Jasa lainnya	8,30%	3,74%

Sumber: BPS

Dari sisi penawaran atau lapangan usaha, PDRB Jawa masih tetap didominasi oleh tiga sektor besar, yaitu Industri Pengolahan (28,75%), Perdagangan Besar dan Eceran (15,32%), dan Konstruksi (10,86%). Sumbangan ketiga sektor tersebut disebabkan Jawa hingga saat ini merupakan pusat kawasan industri pengolahan dan perdagangan. Sedangkan sektor konstruksi pada umumnya disumbang dari berbagai realisasi pembangunan infrastruktur seperti *Mass Rapid Transit* (MRT) dan *Light Rail Transit* (LRT), proyek pengurai kemacetan seperti Jalur Lingkar Semanggi, jalan tol trans dan non trans Jawa, serta peningkatan kapasitas beberapa bandara dan pembangunan bandara baru dan pelabuhan seperti bandara Kertajati dan Pelabuhan Belawan juga memberikan peran sektor konstruksi dalam peningkatan pembentukan PDRB Jawa tahun 2018.

Laju pertumbuhan tertinggi di Jawa tercatat pada bidang Jasa Perusahaan. Bidang ini meningkat 17,34% jika dibanding tahun 2017. Kemudian disusul oleh sektor jasa keuangan dan asuransi. pertumbuhan pada sektor jasa keuangan dan asuransi terutama didorong oleh semakin banyaknya penggunaan transaksi perbankan secara non tunai dan peningkatan jumlah pengguna jasa asuransi.

1.II. INFLASI

Angka inflasi di setiap Provinsi di regional Jawa pada tahun 2018 semuanya mengalami penurunan dibandingkan angka inflasi pada tahun sebelumnya. Inflasi regional Jawa terendah terdapat pada Provinsi DIY Yogyakarta yaitu sebesar 2,66%. Relatif rendah dan terkendalinya inflasi DIY tahun 2018 tersebut karena terjaganya kelompok inflasi inti, meskipun terdapat tekanan pada kelompok komponen inflasi harga yang diatur pemerintah. Selain itu, terkendalinya inflasi DIY pada tahun 2018 tersebut juga tidak terlepas dari upaya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY dalam menjaga stabilisasi inflasi DIY

GAMBAR 60. TINGKAT INFLASI REGIONAL JAWA TAHUN 2017 DAN 2018

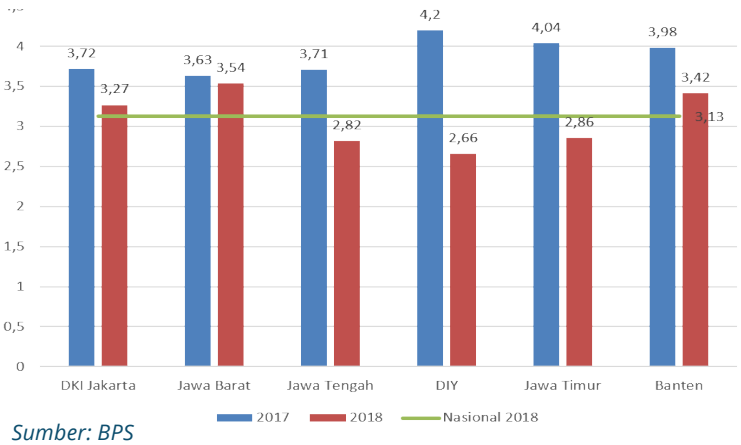

Sumber: BPS

sepanjang tahun antara lain melalui strategi melakukan penguatan tata niaga pangan dan melakukan pembenahan distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada penerapan sistem logistik dan distribusi yang terintegrasi. Sementara itu Provinsi Jawa Barat menjadi provisi di regional jawa dengan tingkat inflasi tertinggi yaitu sebesar 3.54% meskipun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami penurunan. Tingginya inflasi pada Provinsi Jawa Barat disebabkan selama tahun 2018 seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi dan memberikan andil terhadap inflasi provinsi Jawa Barat.

2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

2.I. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Berdasarkan data IPM pembangunan sumber daya manusia di regional Jawa selama 2013 s.d. 2018 terus mengalami peningkatan, dengan indeks rata-rata Jawa selalu di atas Nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kualitas manusia di Jawa terus membaik yang dapat dilihat berbagai aspek yaitu dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

Secara nasional, angka capaian IPM 2018 adalah sebesar 71,39. Akan tetapi pada tingkat Provinsi di regional Jawa, angka capaian IPM cukup bervariasi mulai dari indeks terendah 70,77 yang dicapai oleh Provinsi Jawa Timur sampai dengan indeks tertinggi 80,47 yang dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta. Hal serupa juga terjadi di tahun sebelumnya, yang mana struktur IPM termasuk indeks tertinggi dan terendah disusun dengan komposisi yang

GAMBAR 61. IPM REGIONAL JAWA TAHUN 2013 - 2018

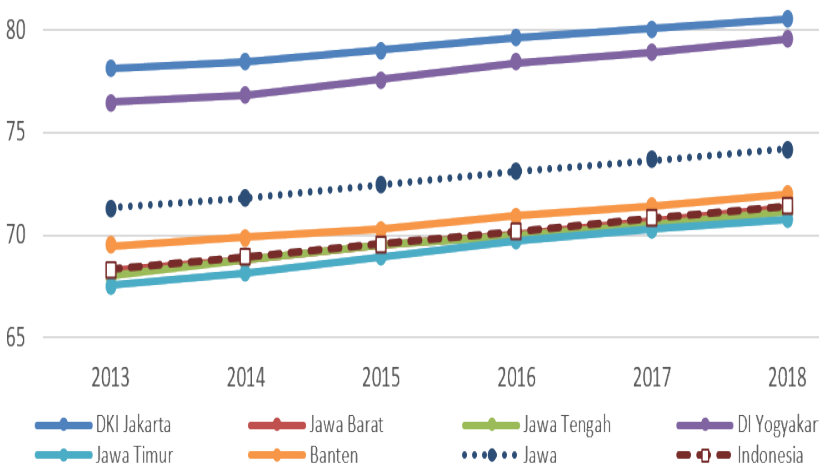

Sumber: BPS

sama. Besarnya gap pencapaian IPM tertinggi dengan IPM terendah mengalami penurunan, pada tahun 2018 dari 9,70 menjadi 9,79. Disparitas pembangunan manusia antara satu provinsi dengan provinsi lainnya pada regional Jawa relatif terus menurun.

2.II. RASIO GINI

Rasio Gini di setiap Provinsi di Jawa terus berfluktuasi sejak tahun 2013 hingga tahun 2018. Pada tahun 2018, provinsi dengan rasio Gini terendah adalah Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 0,357, selanjutnya provinsi dengan rasio Gini terendah kedua adalah Provinsi Banten yang memiliki rasio gini sebesar 0,367. Sedangkan rasio Gini tertinggi dicapai oleh Provinsi DI Yogyakarta dengan rasio Gini sebesar 0,422, disusul oleh Provinsi Jawa barat dengan rasio Gini sebesar 0,405. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, rasio Gini tahun 2018 pada provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan sebesar 0,012 sedangkan untuk Provinsi lainnya pada regional Jawa mengalami penurunan. Secara umum rasio gini untuk regional pada tahun 2018

GAMBAR 62. RASIO GINI REGIONAL JAWA TAHUN 2013- 2018

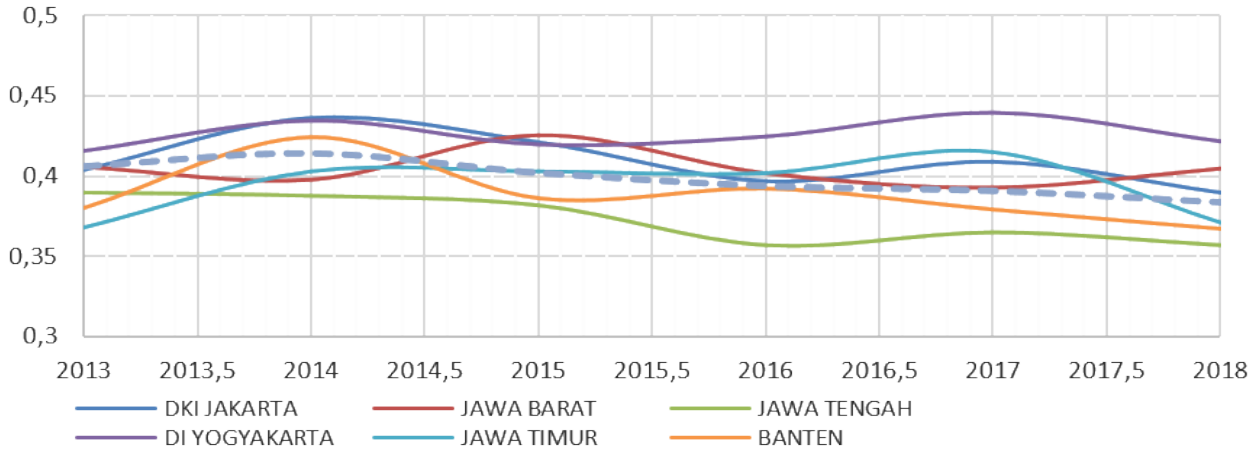

Sumber: BPS

mengalami penurunan dibanding tahun 2017. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2018, tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat di sebagian besar provinsi di Pulau Jawa relatif semakin kecil, meskipun distribusi pendapatan masih belum merata.

2.III. KETENAGAKERJAAN

Pada tahun 2018, angka persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi di regional Jawa masih berada di Provinsi Banten sebesar 8,52% dan terendah di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 3,35%. Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi regional Jawa mengalami penurunan kecuali pada provinsi DI Yogyakarta yang justru mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Provinsi DI Yogyakarta tersebut tampaknya berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan PDRB pada Provinsi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumuhan Lapangan Usaha (LU) Kontruksi sektor informasi dan komunikasi, dan Industri pengolahan yang berkontribusi besar dalam peningkatan PDRB di Provinsi DI Yogyakarta kurang berkontribusi terhadap lapangan kerja mengingat kedua sektor tersebut umumnya hanya menyerap tenaga kerja dengan skill khusus yang relatif sedikit.

GAMBAR 63. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA REGIONAL JAWA TAHUN 2013 - 2018 (DALAM %)

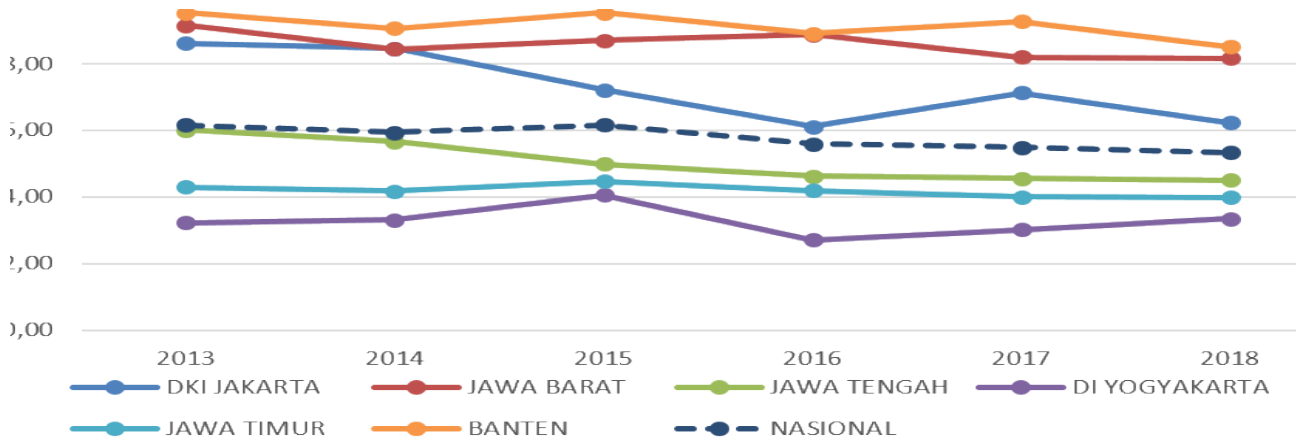

Sumber: BPS

GAMBAR 64. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN REGIONAL JAWA TAHUN 2013 - 2018

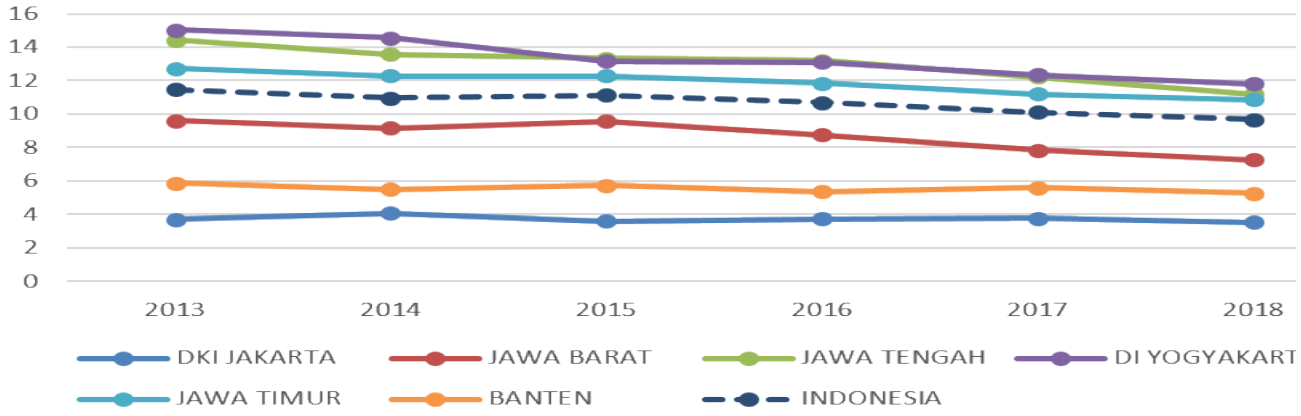

Sumber: BPS

Tingkat penganggguran terbuka pada Provinsi DKI Jakarta justru mengalami penurunan di saat adanya koreksi laju pertumbuhan PDRB pada provinsi tersebut. penyerapan tenaga kerja didominasi oleh penduduk yang berpendidikan SMA sederajat yaitu sebanyak 1.999 ribu orang (42,29%). Sedangkan menurunnya tingkat penganggguran terbuka pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur tahun 2017 sejalan dengan peningkatan laju pertumbuhan PDRB pada provinsi tersebut.

2.IV. KEMISKINAN

Pada tahun 2018 masih terdapat *gap* yang tinggi dalam tingkat kemiskinan pada regional Jawa. Tingkat kemiskinan terendah berada di Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,55% diikuti Provinsi Banten sebesar 5,25% dan Provinsi Jawa Barat 7,25%. Selain ketiga Provinsi tersebut, tingkat kemiskinan di provinsi lainnya masih relatif tinggi yaitu Provinsi Jawa Tengah (11,19%), DI Yogyakarta (11,81%) dan Jawa Timur (10,85%). Tingginya tingkat kemiskinan di ketiga provinsi ini antara lain karena sebagian besar penduduk miskin adalah warga pedesaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa tingkat penganggguran terbuka yang rendah di Yogyakarta, ternyata tidak diikuti dengan rendahnya persentase penduduk miskin. Hal ini umumnya diakibatkan oleh lapangan kerja yang terisi di Yogyakarta merupakan pekerjaan sektor non formal yang penghasilannya masih di bawah angka upah minimum regional atau besaran penghasilan pada sektor non formal tersebut belum bisa terdata dengan baik.

3. PELAKSANAAN APBN

Kondisi ekonomi global di pertengahan tahun 2018 mulai membaik dibandingkan dengan tahun 2017 ditandai dengan peningkatan laju perekonomian Indonesia memberikan dampak yang cukup positif terhadap APBN terutama di regional Jawa.

3.I. PENDAPATAN NEGARA

Realisasi pendapatan negara regional Jawa tahun 2018 sebesar Rp1.534,48 triliun Pendapatan tertinggi berasal dari penerimaan pajak yaitu sebesar Rp1.370,41 triliun atau 89,3% dari total realisasi pendapatan.

TABEL 32. REALISASI APBN REGIONAL JAWA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara						
Penerimaan Perpajakan	1.175.793,64	1.185.347,52	100,81	1.424.387,91	1.370.413,87	96,21
Penerimaan Negara Bukan Pajak	107.779,64	290.240,32	269,29	156.286,55	163.707,61	104,75
Pendapatan Hibah	6.271,80	11.187,72	178,38	373,73	366,26	98,00
Jumlah Pendapatan Negara	**1.289.845,08**	**1.486.775,55**	**115,27**	**1.582.686,18**	**1.534.487,74**	**96,95**
Belanja Negara						
Belanja Pemerintah Pusat	1.118.402,83	1.042.847,59	93,24	608.125,40	598.964,11	98,49
Transfer ke Daerah Dana Desa	662.291,09	650.934,66	98,29	176.658,60	239.095,26	135,34
Jumlah Belanja Negara	**1.780.693,92**	**1.693.782,25**	**95,12**	**849.738,98**	**838.168,37**	**98,64**

Sumber: DJPBN (diolah)

Penerimaan perpajakan tersebut melampaui penerimaan perpajakan 2017. Jika dibanding dengan pendapatan pajak secara nasional yang mencapai Rp1.942,3 triliun, pendapatan pajak di regional Jawa berkontribusi sebesar 70.55% dari pendapatan pajak nasional. Selain pendapatan dari sektor pajak, pendapatan di wilayah Jawa juga berasal dari PNBP sebesar Rp163,7 triliun dan pendapatan hibah sebesar Rp366,26 miliar.

3.II. BELANJA NEGARA

Pada sisi belanja, persentase realisasi Belanja Negara pada Tahun 2018 sebesar 98,64% meningkat 3,52% jika dibanding dengan realisasi di Tahun 2017. Peningkatan tingkat realisasi tersebut terjadi pada Belanja Pemerintah Pusat maupun Transfer ke daerah dan Dana Desa.

Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp64,47 triliun jika dibandingkan dengan tahun 2017. Penurunan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tersebut disebabkan karena mulai tahun anggaran 2017 penyaluran Dana Transfer berupa DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan melalui KPPN Mitra kerja masing-masing Pemerintah Daerah. Sedangkan Dana Transfer Jenis lainnya masih tetap melalui KPPN Jakarta II.

Pada tahun 2018 alokasi transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 180,50 Triliun mengalami penurunan 64,47 Triliun dibanding 2017, dimana alokasi terbesar terdapat pada Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu sebesar 47,23% dari total belanja TK-DD Regional Jawa. Realisasi belanja pada tahun 2018 sebesar

TABEL 33. REALISASI BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA REGIONAL JAWA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Dana Bagi Hasil	68.340,64	35.265,34	51,60	27.627,62	29.636,29	107,27
Dana Alokasi Umum	125.078,72	125.078,72	100,00	85.319,59	85.263,26	99,93
Dana Alokasi Khusus	68.456,03	62.593,76	91,40	48.823,32	45.594,11	93,39
Dana Otsus, Dana K. DIY, DID	3.395,18	3.395,18	100,00	1.949,25	1.849,32	94,87
Dana Desa	18.649,59	18.642,52	100,00	18.228,13	18.161,90	99,64
Jumlah	**283.920,15**	**244.975,51**	**86,30**	**181.947,91**	**180.504,88**	**99,21**

Sumber: DJPBN (diolah)

99,21% lebih tinggi dibanding tahun 2017 dimana kenaikan tingkat realisasi terbesar terdapat pada Belanja Dana Bagi Hasil yaitu dari semula 51,60% di tahun 2017 menjadi 107,27% pada tahun 2018. Terkait dengan Dana Desa, Tahun 2018 merupakan tahun keempat dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014.

3.III. BADAN LAYANAN UMUM

Pada tahun 2018, jumlah Satker BLU di Jawa mencapai 126 satker meningkat sebesar 5% dari tahun 2017 yang berjumlah 120 satker. Satker BLU mayoritas merupakan BLU layanan kesehatan dan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari data BLU berdasarkan jenis layanan yang diberikan, yaitu BLU layanan kesehatan sejumlah 55 satker (bertambah 2 satker dari tahun 2017), BLU pendidikan 53 satker (bertambah 5 satker dari tahun 2017), BLU barang dan jasa lainnya 15 satker (sama dengan tahun 2017), BLU Kawasan 3 satker (sama dengan tahun 2017), dan BLU pengelola dana 10 satker (sama dengan tahun 2017). Jika

GAMBAR 65. JUMLAH SATKER BLU MENURUT LAYANAN REGIONAL JAWA TAHUN 2018

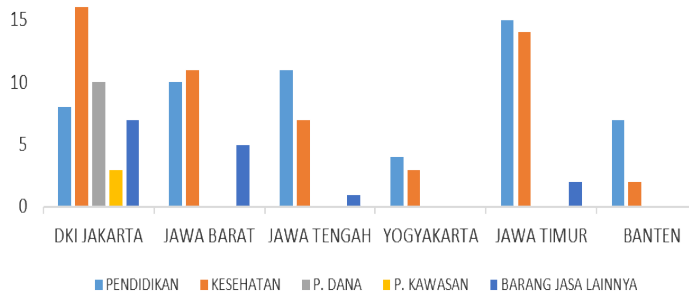

Sumber: DJPBN

dilihat berdasarkan lokasi, Provinsi DKI Jakarta masih menjadi Provinsi dengan jumlah satker BLU terbanyak yaitu sebanyak 43 satker dan disusul oleh Provinsi Jawa Timur dengan 29 satker (bertambah 3 satker dari tahun 2017).

3.IV. PELAKSANAAN APBD

Secara keseluruhan di regional Jawa, realisasi pendapatan daerah tahun 2018 melampaui target dengan capaian 101,53%. Jumlah realisasi pendapatan ini meningkat 10,6% jika dibanding dengan pendapatan di tahun 2017. Sedangkan realisasi belanja daerah pada APBD seluruh pemerintah daerah di regional Jawa menunjukkan penurunan nominal Rp160,6 triliun. Jika dilihat dari persentase, realisasi

TABEL 34. REALISASI APBD REGIONAL JAWA TA 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan						
PAD	145.891,25	165.873,97	113,70	163.552,21	166.051,31	101,53
Pendapatan Transfer	228.170,95	274.211,39	120,18	273.879,23	270.476,91	98,76
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	45.421,07	10.211,47	22,48	12.732,52	17.803,85	139,83
Jumlah Pendapatan	**419.483,26**	**450.296,84**	**107,35**	**450.163,96**	**454.332,07**	**100,93**
Belanja						
Belanja Pegawai	166.550,28	145.533,34	87,38	164.465,27	130.986,53	79,64
Belanja Barang	79.565,29	73.076,74	91,85	83.867,66	61.340,23	73,14
Belanja Modal	92.423,54	188.313,33	203,75	115.552,01	91.232,07	78,95
Belanja Lainnya	102.293,07	99.744,94	97,51	100.859,43	62.447,53	61,92
Jumlah Belanja	**440.832,18**	**506.668,36**	**114,93**	**464.744,37**	**346.006,36**	**74,45**
Surplus/Defisit	-21.348,92	-56.371,52	264,05	-14.580,42	108.325,71	

Sumber: DJPb (diolah)

di Tahun 2018 turun dari tahun sebelumnya, yaitu dari 114,93% menjadi 74,45%. Akan tetapi penurunan belanja tersebut, ternyata tidak mengakibatkan defisit sebagaimana tahun sebelumnya karena terdapat surplus sebesar 108,3 triliun. Realisasi belanja pemerintah daerah yang lebih rendah dari pendapatan menunjukkan bahwa perlambatan ekonomi nasional tidak terlalu berpengaruh terhadap penurunan kegiatan ekonomi di regional Jawa.

3.V. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan APBD regional Jawa pada tahun 2018 sebesar Rp454,3 triliun, naik 10,6% dari tahun 2017 sebesar Rp450,2 triliun. Kenaikan realisasi pendapatan ini dikontribusikan antara lain dari realisasi PAD dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang melampaui target dengan capaian 101,53% dan 139,8%. Sedangkan realisasi penerimaan dari pendapatan transfer di tahun 2018 justru mengalami penurunan dari realisasi di tahun 2017. Berdasarkan perbandingan komponen pendapatan terhadap total pendapatan, persentase PAD dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah di Tahun 2018 hanya mencapai 40,4%. Sedangkan sisanya sebesar 59,5% merupakan pendapatan transfer. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya alokasi DAK Fisik dan Dana Desa.

Dari sisi kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dengan membandingkan PAD terhadap pendapatan transfer. Pada tahun 2018 rasio kemandirian keuangan daerah regional Jawa sebesar 61,3% naik dibandingkan tahun 2017 sebesar 60,5%. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah regional Jawa pada tahun 2018 semakin baik dibanding tahun sebelumnya.

3.VI. BELANJA DAERAH

Ditinjau dari sisi belanja, pada tahun 2018 belanja terbesar terdapat pada Jenis Belanja Pegawai yaitu sebesar 37,8% dari keseluruhan total belanja, sedangkan belanja terkecil terdapat pada jenis Belanja Modal yaitu sebesar 17,7% dari total belanja. Hal tersebut berbeda jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu belanja terbesar terdapat pada Jenis Belanja Barang dan Jasa yaitu sebesar 37% dari total belanja. Penurunan realisasi belanja dibandingkan tahun sebelumnya terjadi di seluruh jenis belanja.

3.VII. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL

Secara umum terdapat empat sektor unggulan di Jawa yang paling dominan yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor konstruksi, dan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

3.VII.A. SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN

Perekonomian di seluruh provinsi di regional Jawa ditopang oleh sektor industri pengolahan terutama di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah. Secara keseluruhan, sektor tersebut memberikan andil sebesar 28,15% terhadap PDRB regional Jawa. Jika dilihat per provinsi, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang menyumbang peran terbesar terhadap industri secara nasional terutama industri

pengolahan. Di Jawa Barat sendiri, industri pengolahan menyokong PDRB 43,78%. Dengan kontribusi itu, industri pengolahan di Jawa Barat memberikan andil sebesar 2,80% terhadap pertumbuhan PDRB di tahun 2018.

Perekonomian Provinsi Banten juga disokong oleh industri pengolahan. Di Banten, industri tersebut berkontribusi terhadap PDRB sebesar 33,5%. Hal ini menjadikan industri sebagai salah satu ciri khas Banten. Terdapat sejumlah industri besar yang berlokasi di Banten seperti Krakatau Steel. Hal yang sama juga terjadi di Provinsi DKI Jakarta, industri pengolahan masih berkontribusi secara cukup signifikan dengan andil sebesar 17,52% meskipun tidak sebesar kontribusi di Jawa Barat. Kinerja sektor industri pengolahan tahun 2018 di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar ditopang oleh industri pakaian jadi, industri karet, barang dari karet dan plastik. Industri percetakan dan reproduksi media rekaman serta industri barang logam bukan mesin dan peralatannya. Meskipun bukan penyumbang terbesar PDRB Tahun 2018 secara persentase, namun secara nominal industri pengolahan di Provinsi DKI Jakarta berperan besar diantara sektor lainnya, sebagai contoh pada Triwulan IV tercatat dari total PDRB sebesar Rp2193,3 triliun, disumbang oleh sektor Industri Pengolahan sebesar Rp219,74 triliun.

Sementara itu, sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur, selama tahun 2018 tumbuh sebesar 7,55%. Sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Timur bukan merupakan penyumbang terbesar PDRB pada provinsi tersebut. Sektor industri pengolahan di Jawa Timur berada dibawah sektor-sektor lainnya, antara lain sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (7,63%), serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (7,61%). Dengan angka perbandingan persentase yang tidak terlalu signifikan diantara sektor-sektor tersebut menunjukkan sinyal positif bahwa pembangunan sektor-sektor lapangan usaha di Provinsi Jawa Timur mencapai tingkat pertumbuhan yang relatif merata apabila dibandingkan dengan pembangunan sektor-sektor lapangan usaha di provinsi lainnya dalam regional Pulau Jawa. Pertumbuhan lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum di Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh tingginya tingkat hunian hotel dan tingkat konsumsi di hotel dan restauran serta tingkat permintaan masyarakat pada momentum ramadhan, lebaran, natal tahun 2018 dan menjelang tahun baru 2019.

Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta juga termasuk provinsi dengan sektor industri pengolahan sebagai penopang utama PDRB. Selain sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi, Jawa Tengah juga mampu untuk menurunkan angka kemiskinan melalui sektor ini. Kontribusi Industri pengolahan terhadap PDRB Jawa Tengah mencapai 34,54%, jauh lebih besar daripada kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran (14,47%) dan sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (13,21%). Sedangkan pada Provinsi DI Yogyakarta, sektor industri pengolahan menyumbang andil sebesar Rp16.869,99 miliar atau 12,99% dari total PDRB

DI Yogyakarta. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar Rp15.635,87 miliar. Laju pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan tumbuh sebesar 5,12%, lebih rendah jika dibandingkan dengan pertumbuhan 2017 yang sebesar 13,12%.

3.VII.B. SEKTOR PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN, REPARASI MOBIL DAN SEPEDA MOTOR

Penopang kedua sektor lapangan usaha di regional Jawa adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, terutama di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Secara keseluruhan, sektor tersebut memberikan andil sebesar 15,92% terhadap PDRB regional Jawa. Jika dilihat per provinsi, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi yang menyumbang peran terbesar terhadap sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor secara nasional. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi dengan kharakteristik sektor tersebut dengan parameter jumlah penduduk dan volume kendaraan bermotor di Pulau Jawa yang relatif lebih banyak dibandingkan regional lainnya. Di Provinsi DKI Jakarta sendiri sektor tersebut merupakan peringkat teratas penyumbang capaian PDRB Tahun 2018, sebagai contoh pada Triwulan IV Tahun 2018, capaian sektor tersebut sebesar Rp276,06 trliun atau sebesar 15,90% dari total PDRB Triwulan IV sebesar Rp1.736,2 triliun.

Pada tahun anggaran 2018, perkembangan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Provinsi Jawa Barat menunjukkan trend positif dengan laju pertumbuhan sebesar 4,19% dibandingkan dengan tahun 2017. Dengan laju pertumbuhan sebesar 4,19% tersebut, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan sumbangan sebesar 18,27% dari total PDRB Provinsi Jawa Barat tahun 2018.

Pada Provinsi Jawa Tengah dan Banten, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga menduduki peringkat kedua penyumbang terbesar capaian PDRB tahun 2018. Di Provinsi Jawa Tengah, dengan capaian PDRB sebesar Rp136.673,49 miliar, sektor tersebut menyumbang 13,5% PDRB tahun 2018. Sedangkan pada Provinsi Banten, sektor tersebut telah mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 7,25% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, capaian sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di Provinsi Banten menyumbang capaian PDRB 12,49%.

Pada provinsi Jawa Timur dan DIY, walaupun sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor bukan merupakan penyumbang terbesar capaian PDRB, namun sektor tersebut tetap mendukung capaian pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pada Provinsi Jawa Timur, sektor tersebut menyumbang 6,29% capaian PDRB tahun 2018. Sedangkan pada Provinsi DIY, pada tahun 2018 sektor tersebut telah tumbuh 5,54% dibanding tahun sebelumnya dengan nominal capaian PDRB sebesar Rp11.156,43 miliar (8,59% dari total PDRB tahun 2018 sebesar Rp129.877,46 miliar).

3.VII.C. SEKTOR KONSTRUKSI

Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor unggulan lain yang cukup penting di regional Jawa terutama di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Secara keseluruhan, sektor konstruksi menyumbang sebesar 10,48% terhadap total PDRB. Capaian persentase terhadap PDRB regional Jawa tersebut, sangat dipengaruhi dengan capaian sektor Konstruksi di Provinsi DKI Jakarta. Sebagai contoh pada Triwulan IV 2018 sendiri capaian sektor tersebut mencapai Rp215,89 triliun atau sebesar 12,43% dari total PDRB Provinsi DKI Jakarta pada triwulan tersebut sebesar Rp1.736.2 triliun. Sedangkan pada Provinsi Jawa Barat, sektor Konstruksi menduduki peringkat ketiga penyumbang PDRB Jawa Barat atau sebesar 6,69%.

Di Provinsi DKI Jakarta, sektor konstruksi menduduki peringkat ketiga penyumbang PDRB sebesar 12,43%. Sektor tersebut memegang peran penting dalam pembangunan nasional sebagai barometer pertumbuhan ekonomi disamping memperluas lapangan kerja. Menurut data Dalam RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 terdapat rencana Penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) beserta fasilitas pendukungnya, bedah kampong, penyediaan perumahan layak huni melalui kerjasama pemda dan masyarakat, dan penyediaan ruang terbuka hijau (RTH), serta penyediaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).

3.VII.D. SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan salah satu sektor unggulan lain yang cukup penting di regional Jawa terutama di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Secara keseluruhan, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menyumbang sebesar 7,75% terhadap total PDRB. Capaian persentase terhadap PDRB regional Jawa tersebut, sangat dipengaruhi dengan capaian sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Provinsi Jawa Barat (7,17 % dari PDRB) dan Provinsi Jawa Tengah (14,03% dari total PDRB).

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memiliki lahan pertanian cukup luas menjadi potensi besar bagi kedaulatan pangan nasional. Luas baku lahan pertanian di Jawa Barat mencapai 2.768.414 ha yang terdiri atas sawah seluas 30.324 ha dan pertanian bukan sawah 1.839.320 ha. Jawa Barat menyokong penyaluran pangan ke berbagai daerah. sektor ini menopang kebutuhan pokok pangan, ketersediaan lahan di bagian Selatan, menyerap banyak tenaga kerja (2,87 Juta Orang), dan mengalami pertumbuhan tertinggi pada triwulan IV tahun 2018 (*yoy*) yaitu sebesar 13,49% serta peranan Jawa Barat sebagai daerah penyangga Ibu Kota.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi yang memiliki sumber daya alam potensial dengan lahan subur serta minat masyarakat yang cukup tinggi di sektor pertanian. Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi lumbung dan penyangga pangan nasional. Tingginya alokasi untuk PUPR di Jawa Tengah salah satunya untuk mendukung suksesnya program "*Jateng 1.000 Embung*". Hingga tahun 2018 di Jateng telah terbangun 1.126 embung (Tandon air) dan 19 *Long Storage*.

Jawa Tengah Tahun 2018, dengan sinkronisasi APBN, dan APBD maupun dana CSR mampu mewujudkan "*Program Jateng 1000 Embung*", bahkan melebihinya. Sampai dengan tahun 2018 telah tercapai jumlah 1.126 embung dan 19 buah *Long Storage* telah terselesaikan. *Long Storage* dan Embung tersebut mampu mendukung sektor Pertanian dengan mengurangi ketergantungan sektor pertanian pada cuaca. Kenaikan produktivitas pertanian bisa dilihat dari pertumbuhan PDRB sektor pertanian yang tumbuh 6% atau Rp4.023 miliar tahun 2017 dan 6% atau sebesar Rp9.540 miliar pada tahun 2018. Peranan Sektor Pertanian untuk PDRB Jateng sebesar 15% pada tahun 2016, 14% pada tahun 2017 dan 2018. Naiknya PDRB ADHB sektor pertanian yang disertai turunnya sumbangan terhadap PDRB Jateng, menunjukan laju pertumbuhan PDRB dari sektor lain diluar pertanian yang lebih cepat.

Provinsi Jawa Timur, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki struktur PDRB sebesar 10,48% mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 32,49%. Sedangkan sub sektor perikanan Jawa Timur juga dikelilingi wilayah laut yang cukup luas dengan potensi komoditi perikanan yang cukup besar. Keuntungan geografis ini akan sangat menunjang tumbuhkembangnya industri perikanan baik industri perikanan laut, industri perikanan tangkap maupun industri perikanan budidaya.

Sedangkan pada Provinsi Banten, eksistensi sektor pertanian dapat dilihat dari data PDRB. Sektor pertanian merupakan sektor penyumbang dengan besar pertumbuhan 3,58 (*yoy*). Dana Desa yang telah dikucurkan melalui APBN telah memberikan dampak yang positif bagi pembangunan desa terutama pada pembangunan sarana prasarana infrastruktur dasar, penyediaan layanan dasar publik di desa, serta pengembangan perekonomian desa. Output pembangunan sarana prasarana infrastruktur dasar seperti jalan desa, jembatan, drainase dan irigasi diharapkan dapat meningkatkan hasil pertanian/perkebunan dan mempermudah konektivitas masyarakat antar desa/antar wilayah. Sedangkan output dukungan pengembangan ekonomi desa diharapkan dapat menyediakan fasilitas pemasaran hasil produksi desa di pasar desa.

4. TANTANGAN FISKAL REGIONAL

4.I. TINGKAT KETERGANTUNGAN FISKAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP DANA TRANSFER MASIH RELATIF TINGGI DAN POLA BELANJA DAERAH YANG BELUM OPTIMAL

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, masing-masing pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi pendapatan asli daerah, sehingga tingkat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat dapat dikurangi. Sampai dengan akhir tahun 2018 masih terdapat banyak pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat yang tinggi (40%-50%) bahkan sangat tinggi (>50%). Sebagai contoh di Provinsi Banten, diantara sembilan pemerintah daerah, hanya satu pemerintah

daerah mempunyai tingkat ketergantungan dengan kategori cukup (<40%), selebihnya terdapat tiga pemerintah daerah dengan tingkat kategori ketergantungan tinggi dan lima pemerintah daerah dengan kategori sangat tinggi.

Disisi lain perilaku pola belanja atas alokasi APBD pada pemerintah daerah belum dapat berjalan secara efektif dan efisien. Penumpukan realisasi penyerapan belanja dan terdapatnya SILPA yang cukup tinggi pada akhir tahun anggaran menjadi indikator seberapa efektifnya peran APBD dalam memberikan stimulus fiskal pertumbuhan ekonomi daerah.

4.II. DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

Masih terdapat tingkat perbedaanyang cukup tinggi tingkat laju pelaksanaan pembangunan dan capaian atas pelaksanaan pembangunan tersebut diantara masing-masing daerah. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator, antara lain perbedaan tingkat distribusi PDRB, perbedaan tingkat Indeks Pembangunan Manusia antar daerah, dan perbedaan persentase penduduk miskin antar daerah yang cukup tinggi. Sebagai contoh untuk wilayah Provinsi Banten yang secara geografis dapat dibedakan antara wilayah Banten Selatan (Pandeglang dan Lebak) dan Banten Utara (Tangerang, Serang, Cilegon, dan Tangerang Selatan), laju pelaksanaan pembangunan dan capaian pelaksanaan pembangunan antara Banten Selatan dan Banten Utara menunjukkan perbedaan cukup signifikan. Wilayah Banten Selatan hanya menyumbang 8,64% dari total PDRB Provinsi Banten dengan rata-rata tingkat PDRB Perkapita Rp16,63 juta per tahun, sedangkan wilayah Banten Utara telah menyumbang 91,34% dari total PDRB Provinsi Banten dengan rata-rata tingkat PDRB Perkapita Rp63,63 juta pertahun. Demikian juga dengan tingkat IPM dan persentase jumlah penduduk miskin. Pada wilayah Banten Selatan, capaian IPM sebesar 62,39 dengan persentase penduduk miskin sebesar 9,56%, sedangkan pada wilayah Banten Utara, capaian IPM sebesar 72,12 dengan persentase penduduk miskin sebesar 4,44%.

4.III. AKSESIBILITAS DAN INTERKONEKSI ANTAR DAERAH YANG MASIH BELUM MERATA

Aksesibilitas dan interkoneksi antar daerah yang cukup memadai sangat menentukan tingkat pemerataan capaian pembangunan ataupun pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Sehingga belum maksimalnya ketersediaan sarana/prasarana penunjang konektivitas antar wilayah menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terhambatnya mobilitas penduduk dan pemasaran hasil-hasil produksi antar daerah. Sebagai contoh di wilayah Provinsi Jawa Barat, selama ini pembangunan jalan tol trans jawa masih terpusat di Jawa Barat bagian utara, terutama dari Jakarta sampai dengan Cirebon. Hal ini berakibat pembangunan kawasan industri juga relatif terpusat di Jawa Barat bagian utara, seperti daerah sekitar Bekasi, Karawang dan Subang dan saat ini sudah mulai bergeser ke Indramayu dan Cirebon. Pada sektor transportasi laut, sampai dengan saat ini Provinsi Jawa

Barat belum mempunyai pelabuhan laut yang representatif dan hampir semua hasil produksi Jawa Barat didistribusikan melalui pelabuhan Tanjung Priok sehingga kurang maksimal memberikan *multiplier effect* bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Barat.

4.IV. KAPASITAS PENDIDIKAN SDM YANG MASIH RELATIF RENDAH

Sumberdaya manusia menjadi ujung tombak penggerak utama pembangunan ekonomi di suatu daerah. SDM yang unggul akan mampu berkreatifitas, bersaing mengikuti perkembangan jaman terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi yang berkembang secara masif untuk mendukung perkembangan dunia usaha. Tingkat kapasitas SDM yang belum merata dari sisi formal maupun non formal merupakan permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh masing-masing daerah.

4.V. AKSESIBILITAS TERHADAP JASA KEUANGAN YANG MASIH RELATIF RENDAH

Ketersediaan dan/atau kecukupan modal usaha sebagai salah satu faktor produksi sangat menentukan baik bagi masyarakat yang akan memulai terjun dalam dunia usaha maupun mengembangkan usaha yang sudah dimilikinya. Keterbatasan pengetahuan ataupun aksesibilitas perolehan modal menjadi permasalahan tersendiri yang dihadapi oleh sumber daya manusia di setiap wilayah. Sebagai contoh di walayah Provinsi Jawa Barat, nampak dari nilai indeks Literasi Keuangan/kesanggupan dalam hal layanan jasa keuangan berada pada angka sebesar 38,70% dan indeks inklusi/orang yang menjadi nasabah/mempunyai akses ke lembaga keuangan sebesar 68,31%. Indikasi ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Jawa Barat yang belum mempunyai pengetahuan dan aksesibilitas jasa keuangan yang berakibat upaya penciptaan/*start-up* dan/atau pengembangan/ekspansi usaha ekonomi kreatif banyak terkendala dari sisi permodalan.

4.VI. KONVERSI LAHAN PERTANIAN YANG SANGAT MASIF DAN RATA-RATA KEPEMILIKAN LAHAN YANG SEMPIT

Seiring berjalannya waktu, pertambahan jumlah penduduk tentunya harus dibarengi dengan peningkatan ketersediaan hasil-hasil produksi pertanian untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat. Menjadi permasalahan tersendiri sementara diperlukan peningkatan jumlah produksi pertanian, disisi lain terjadi penurunan luas lahan pertanian yang disebabkan beralihnya fungsi tanah yang sebelumnya merupakan persawahan/perkebunan menjadi pemukiman warga maupun lahan tempat industri berada. Sebagai contoh di wilayah Provinsi Jawa Barat, tiga kabupaten terbesar penghasil/lumbung padi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Indramayu, Sibang, dan karawang terancam adanya alih fungsi lahan pertanian yang digunakan untuk industri maupun perumahan. Upaya pencetakan lahan sawah baru di wilayah Jawa Barat bagian selatan melalui swadaya masyarakat maupun pemerintah belum dapat direalisasikan secara signifikan dengan salah satu penyebabnya pada wilayah Jawa Barat

bagian selatan mempunyai kontur alam yang berbukit-bukit sehingga kurang cocok untuk pertanian sawah.

5. SOLUSI FISKAL REGIONAL

Berdasarkan tantangan fiskal regional yang dihadapi regional Jawa tersebut, solusi yang dapat diberikan dengan memperhatikan kondisi perekonomian, APBN, APBD, dan sektor unggulan yang ada di regional Jawa, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, masing-masing pemerintah daerah harus berusaha meningkatkan pendapatan asli daerah. Walaupun hal ini tidak mudah karena untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut pemerintah daerah dibatasi ruangnya untuk meng kreasikan sumber-sumber penerimaan dan memperluas basis penerimaan hanya sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Maka diperlukan perbaikan formulasi kebijakan di bidang pendapatan daerah melalui pengembangan pajak dan retribusi daerah yang harmonis dengan pajak pusat agar menjadi signifikan untuk dijadikan andalan sebagai pendapatan daerah. Seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat, terbuka peluang bagi masing-masing daerah untuk semakin mengembangkan sektor pariwisata dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah. Selanjutnya dalam rangka peningkatan *multiplier effect* alokasi dana APBD bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah perlu dilakukan upaya peningkatan pola belanja daerah yang ideal baik dari sisi waktu pelaksanaan kegiatan maupun tingkat capaian penyerapan/nilai realisasi belanja APBD itu sendiri.

Kedua, Perlu peningkatan intervensi dan peran pemerintah untuk mengurangi bahkan menghilangkan disparitas pembangunan antar daerah. Hal tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan pengeluaran pemerintah secara lebih tepat sasaran dalam rangka memberikan stimulus laju pertumbuhan ekonomi regional melalui peningkatan permintaan agregat. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi suntikan perekonomian regional melalui program-progam dan kegiatan-kegiatan untuk mendorong produktivitas sumber daya yang ada, sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan antar wilayah.

Ketiga, Kondisi adanya ketimpangan sarana prasarana konektivitas antar daerah yang dapat berdampak pada perkembangan sektor pariwisata dan industri harus segera ditemukan solusinya oleh pemerintah pusat/daerah. Pembangunan infrastruktur secara masif senantiasa diperlukan untuk mengatasi hal tersebut. Dalam jangka pendek insentif-insentif tertentu dapat diberikan untuk menekan peningkatan jumlah biaya yang berhubungan dengan mobilitas penduduk ataupun barang-barang hasil produksi maupun bahan baku untuk proses produksi itu sendiri.

Keempat, Diperlukan upaya peningkatan SDM oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah melalui peningkatan aksesibilitas seluruh masyarakat usia produktif melalui pendidikan

formal maupun non formal bersifat keahlian/ keterampilan. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai diharapkan setiap penduduk dengan usia produktif dapat dengan mudah mendapatkan akses pekerjaan yang layak maupun membuka lapangan usaha sendiri. Selain kemudahan terhadap akses lapangan pekerjaan, juga diharapkan tercipta SDM yang selalu mampu berkreasi, berinovasi menghasilkan gagasan/temuan baru mengikuti tuntutan perkembangan teknologi informasi.

Kelima, Upaya pemerintah untuk memberikan sosialisasi terhadap aksesibilitas perolehan modal kepada seluruh masyarakat selalu diperlukan untuk meningkatkan kemampuan permodalan bagi masyarakat yang akan mulai dan/atau mengembangkan usaha yang dimilikinya. Selain sosialisasi, tentunya juga upaya peningkatan ketepatan sasaran pemberian aksesibilitas dan fasilitas permodalan selalu perlu diupayakan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang berhak atau yang membutuhkan.

Keenam, Selalu diperlukan upaya pemerintah baik pusat maupun daerah untuk peningkatan produksi pertanian baik dengan cara pencetakan lahan pertanian baru maupun upaya diversifikasi hasil-hasil produksi pertanian dengan lahan yang ada termasuk perbaikan tata niaga pangan. Diperlukan juga upaya pembatasan terhadap adanya proses peralihan lahan pertanian yang akan digunakan untuk permukiman, kawasan industri maupun lokasi pembangunan infrastruktur.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Fiskal Regional Kalimantan

Komposisi APBD Kalimantan tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya, dimana pemerintah daerah sangat mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah, yaitu sebesar 77%. Kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah ini bertambah 11,32% dibandingkan dengan tahun 2017.

Pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan pada tahun 2018 sebesar 3,91%, lebih rendah dibanding tahun 2017 yang mencapai 4,33%, dan juga lebih rendah dari Nasional sebesar 5,17%. Aktivitas ekonomi ini didukung konsumsi rumah tangga (16,55%), PMTB (22,39%), dan Ekspor Barang dan Jasa (32,97%). Dilihat dari sisi penawaran komposisi PDRB Regional Kalimantan didominasi oleh Pertambangan dan Penggalian (31,08%), Sektor Pertanian,Perhutanan, dan Perikanan (12,67%), Industri pengolahan (16,42%). Angka inflasi tahun 2018 di regional Kalimantan secara umum berada diatas tingkat inflasi nasional kecuali untuk Kalimantan Selatan. Secara umum, rasio gini provinsi lingkup regional Kalimantan berada dibawah rasio gini nasional, baik untuk daerah perkotaan maupun perdesaan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masyarakat di Kalimantan masih lebih baik dibanding distribusi pendapatan tingkat nasional.

Selama beberapa tahun terakhir, Kalimantan merupakan wilayah di Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk miskin paling sedikit dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia yakni hanya berkisar 3,79% dari keseluruhan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Disamping itu, rata-rata gini rasio regional ini juga berada dibawah gini rasio nasional yang berarti bahwa pemerataan pendapatan sudah lebih baik dibanding daerah lain di Indonesia. Potensi sumber daya manusia Kalimantan juga patut diperhitungkan melihat tren pertumbuhan IPM-nya yang postif.

Dari sisi kinerja APBN, kontrbusi belanja barang/jasa dan belanja modal terhadap belanja konvensional di luar TKDD tahun 2018, masing-masing sebesar 39,96% dan 28,92%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat komit terhadap peningkatan belanja modal dan belanja barang/jasa yang memiliki dampak berkelanjutan tehadap pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan. Komitmen pemerintah pusat ini ternyata belum direspon dengan baik oleh satuan kerja instansi vertikal/dekon/TP di wilayah Kalimantan dalam melakukan eksekusi belanja negara. Hal ini terbukti, dimana realisasi belanja negara, terutama belanja modal mengalami penurunan persentase penyerapan belanja modal terhadap pagunya, yang semula sebesar 94,71% menjadi 91,39%.

1. MAKROEKONOMI REGIONAL KALIMANTAN

1.I. PERTUMBUHAN EKONOMI

Ekonomi regional Kalimantan tumbuh sebesar 3,91% pada tahun 2018. Laju pertumbuhan tersebut menurun dibandingkan tahun lalu yang berhasil tumbuh mencapai 4,33%. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi di Kalimantan tersebut sekaligus menjadikan perekonomian regional ini tumbuh dibawah ekonomi nasional. Penurunan ini dipengaruhi menurunnya laju perekonomian di seluruh provinsi dalam regional Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah yang mengalami laju penurunan terbesar yaitu mencapai 19,51%.

Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, tidak semua pertumbuhan ekonomi di Kalimantan di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional. Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara masih berada di atas pertumbuhan ekonomi Nasional.

Dari sisi permintaan, penurunan laju pertumbuhan ekonomi pada regional Kalimantan secara umum antara lain disebabkan menurunnya permintaan ekspor yang berkontraksi sebesar 0,71%.

TABEL 35. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI PERMINTAAN, REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017 DAN 2018

KOMPONEN PDRB	2017	2018
Konsumsi Rumah Tangga	3.58	4.30
Konsumsi LNPRT	5.08	5.01
Konsumsi Pemerintah	-3.26	5.09
PMTDB	3.15	6.32
Perubahan Inventori	-74.37	444.45
Ekspor	7.49	-0.71
Impor	6.00	12.00
Inter-region Net Ekspor	4.79	31.45

Sumber: BPS

Lesunya ekspor tersebut sebagai akibat dari menurunnya permintaan komoditas pertambangan dari luar negeri, antara lain Tiongkok dan India, terutama di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

GAMBAR 66. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL KALIMANTAN 2017 DAN 2018

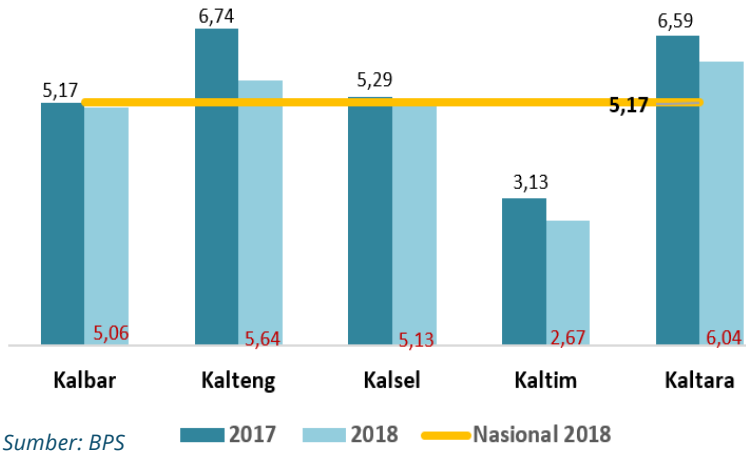

Sumber: BPS

Menurunnya ekspor dan meningkatnya impor pada tahun 2018 memberi dampak yang besar bagi perekonomian Kalimantan mengingat kedua komponen tersebut menjadi komponen terbesar dalam membentuk PDRB dari sisi permintaan.

Hampir setengah dari permintaan agregat regional Kalimantan dibentuk dari kedua komponen ini (32,97% ekspor dan 10,15% impor) dan sisanya dibentuk dari kegiatan konsumsi, investasi, dan ekspor antar daerah. Komponen perubahan inventori mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu 444% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan jumlah inventori yang masuk jauh lebih besar daripada yang keluar untuk periode yang sama, namun karena porsi dari komponen ini hanya sebesar 0,37% pada perekonomian Kalimantan sehingga kenaikan yang signifikan

GAMBAR 67. KOMPOSISI PDRB ADHB DARI SISI PERMINTAAN REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2018

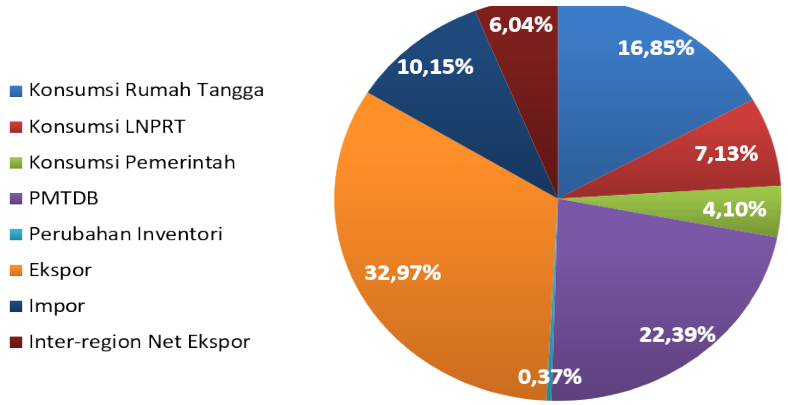

Sumber: BPS

pada inventori tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan laju perekonomian Kalimantan pada tahun 2018.

Dari sisi penawaran, Sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan masih ditopang oleh sektor pertambangan, industri pengolahan, dan pertanian. Kontribusi ketiga sektor tersebut sangat mendominasi pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan. Ketiga sektor ini secara umum mengalami perlambatan pada tahun 2018, terutama untuk sektor pertambangan.dan penggalian.

Dengan banyak diversifikasi dan alternatif lapangan usaha yang mulai bermuculan di Kalimantan seperti sektor perdagangan, transportasi, dan pergudangan, maka pemerintah daerah segera mengambil inisiatif untuk menyediakan berbagai fasilitas dan insentif bagi investor yang menanamkan modalnya untuk lapangan usaha yang bersifat padat karya.

GAMBAR 68. KOMPOSISI PDRB ADHB DARI SISI PENAWARAN, REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2018

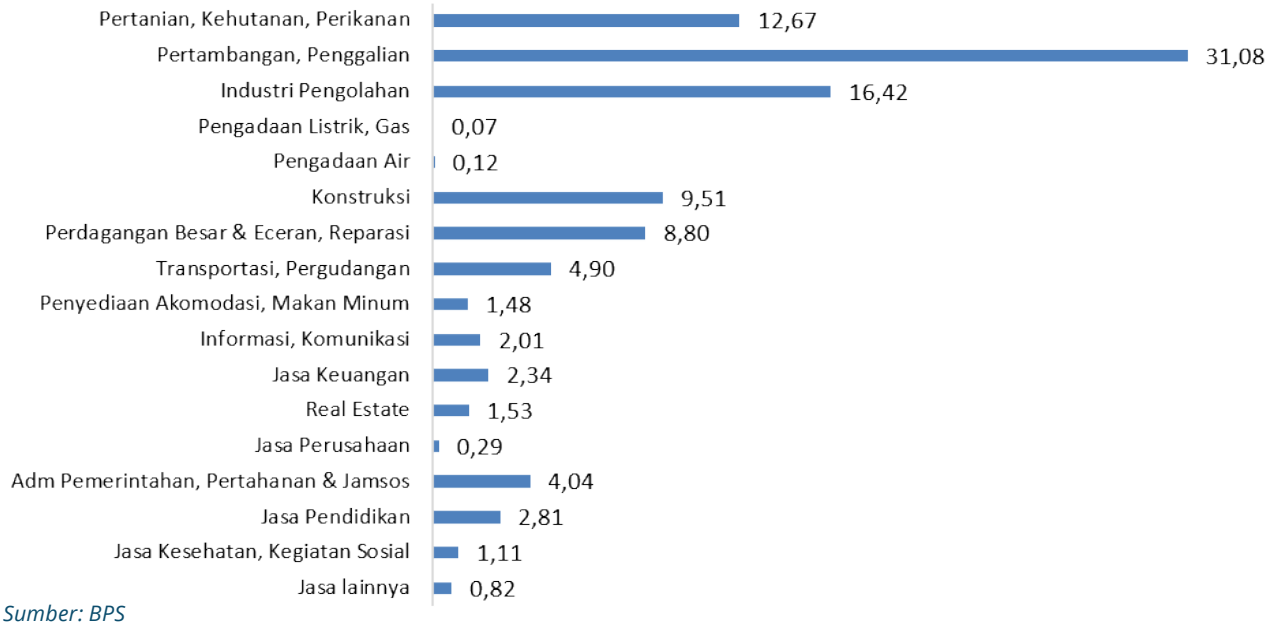

Sumber: BPS

1.II. INFLASI

Dari semua provinsi di Kalimantan, hanya Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan yang pararel mengalami penurunan inflasi sejalan dengan penurunan inflasi Nasional yang 15,34%. Penurunan terbesar dialami Kalimantan Selatan sebesar 41,44% sedangkan Kalimantan Barat hanya menurun 6,23%.

Namun demikian, hanya Kalimantan Selatan yang tingkat inflasinya di bawah rata-rata Nasional, yaitu sebesar 2,63%, sedangkan provinsi lain yang masih di atas rata-rata Nasional. Tingkat inflasi terbesar dialami oleh Kalimantan Utara, yaitu senilai 5%. Hal ini wajar mengingat Kalimantan Utara merupakan provinsi yang relatif baru. Disamping itu, belum banyak kegiatan perekonomian yang dilakukan di wilayah tersebut sehingga nilai harga barang dan jasa yang diperdagangkan relatif tinggi disebabkan sedikitnya komoditas barang dan jasa yang diperjualbelikan.

Dari sisi waktu, kenaikan inflasi tertinggi masih terjadi pada bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri serta dibarengi dengan masa libur panjang sekolah dan menjelang masa pendaftaran sekolah dan kuliah. Sedangkan, dari sisi komoditas barang dan jasa, penyebab inflasi dipengaruhi naiknya harga bahan makanan, peralatan dan biaya pendaftaran sekolah, serta tiket transportasi, terutama yang menggunakan pesawat udara menjelang lebaran dan libur panjang anak sekolah.

GAMBAR 69. TINGKAT INFLASI REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM %)

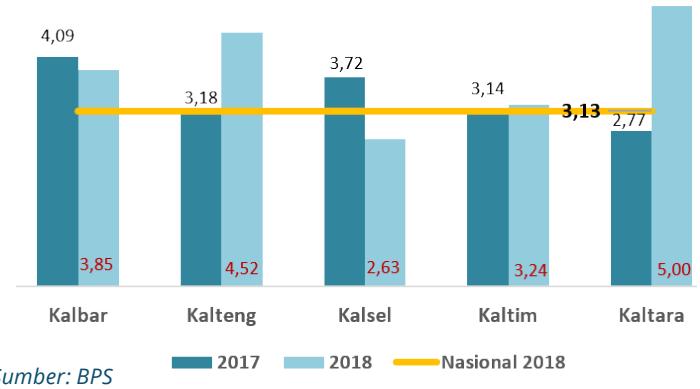

Sumber: BPS

1.III. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

1.III.A. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan sejak tahun 2014 mengalami tren peningkatan yang stabil, sama seperti kondisi yang terjadi dalam tataran Nasional. Pengeluaran negara yang ditujukan untuk investasi sumber daya manusia mulai kelihatan hasilnya. IPM tertinggi di wilayah Kalimantan dicapai Provinsi Kalimantan Timur. Capaian Kalimantan Timur melebihi capaian IPM secara Nasional yang berada di kisaran angka 70,81. Dengan capaian di atas 70, maka Kalimantan Timur telah memasuki level *High Human Development* selama tujuh tahun terakhir dengan *growth* pertahun sebesar 0,71%. Tiga provinsi lain (Kalimantan Tengah, Kalimantan, Selatan, dan Kalimantan Utara sudah di angka 70, sedangkan untuk Kalimantan Barat masih berada di angka 66. Jika dilihat dari tren positifnya, tidak mustahil keempat provinsi tersebut dapat mengejar capaian IPM Kalimantan Timur. Apabila dilihat dari komponen pembentuk IPM, Rata-rata nilai IPM Kalimantan masih berada dibawah rata-rata IPM Nasional untuk seluruh komponen baik angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran perkapita.

GAMBAR 70. IPM REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2016 DAN 2018

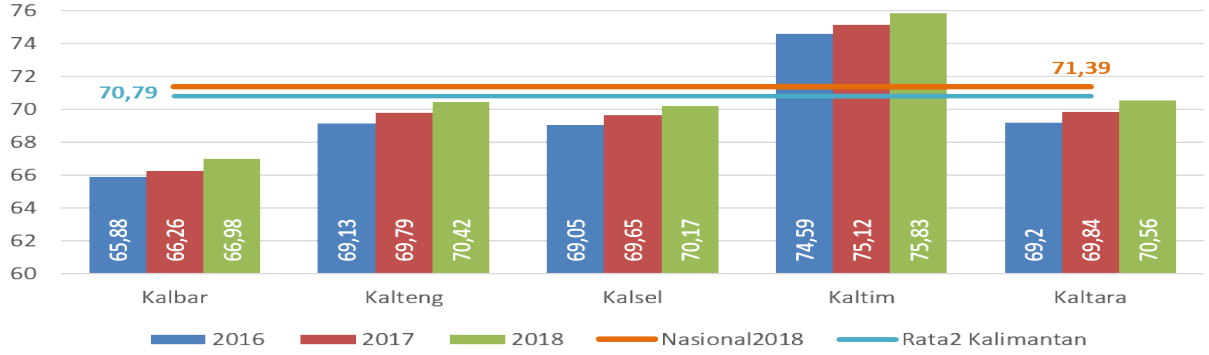

Sumber: BPS

1.IV. RASIO GINI

Rasio gini lingkup regional Kalimantan berada dibawah rasio gini nasional. Hal tersebut mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan masyarakat di Kalimantan masih lebih baik dibanding tingkat nasional. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kalimantan tahun 2018 cenderung stabil selama tiga tahun terakhir, yaitu di kisaran 0,33. Sedang rasio gini nasional selama tiga tahun terakhir rata-rata berada di level 0,38.

Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan rasio gini tertinggi sebesar 0,009 poin dibanding provinsi lainnya. Hal ini menandakan ketimpangan distribusi pendapatan tersebut semakin menyempit. Rasio gini menurun signifikan dikarenakan adanya kenaikan pendapatan masyarakat ekonomi lapisan bawah. Melihat naiknya rata-rata tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan maka turunnya deviasi rasio gini juga bisa berarti menurunnya kesejahteraan secara keseluruhan pada setiap lapisan masyarakat.

Penurunan rasio gini tidak terjadi di seluruh provinsi, namun terdapat dua provinsi yang mengalami kenaikan rasio gini yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Kenaikan rasio gini tersebut tidak serta merta terjadi penurunan kondisi perekonomian di masyarakat. Buktinya, meskipun terjadi kenaikan rasio gini, pada kedua provinsi tersebut, terjadi penurunan tingkat kemiskinan.

GAMBAR 71. RASIO GINI REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2016 - 2018

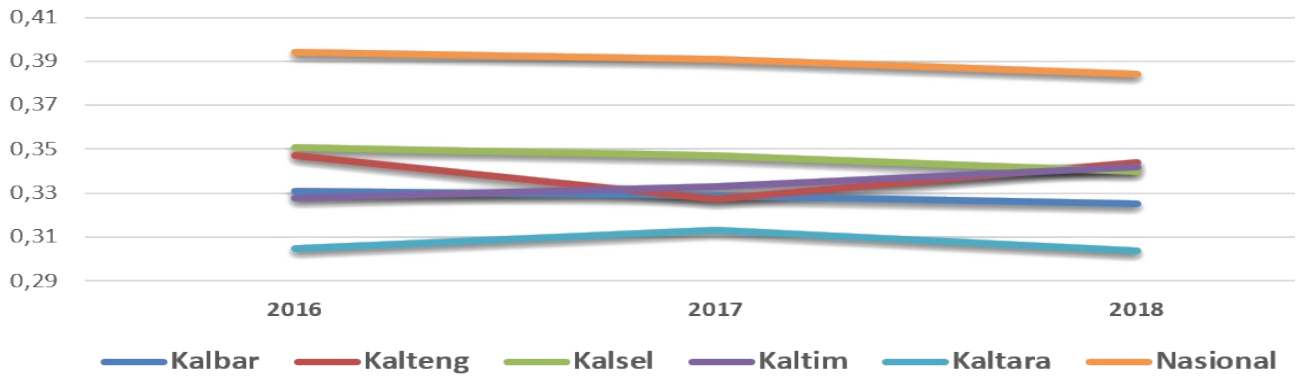

Sumber: BPS

1.V. KETENAGAKERJAAN

Pada tahun 2018, persentase tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Kalimantan masih berada di Provinsi Kalimantan Timur sebesar 6,60% dan terendah di Kalimantan Tengah sebesar 4,01%. Sebagai perbandingan, tingkat pengangguran terbuka secara nasional berada di level 5,34%. Data memperlihatkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Timur berada di atas angka nasional.

GAMBAR 72. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM %)

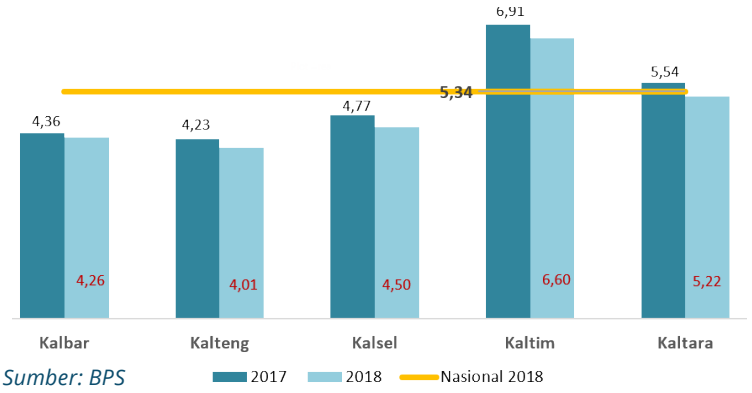

Sumber: BPS

Pada tahun 2018, tingkat pengangguran seluruh provinsi di Kalimantan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Penurunan tingkat pengangguran ini menjadi suatu pencapaian terutama untuk Provinsi Kalimantan Utara yang mampu turun di bawah Nasional. Namun penurunan ini tetap perlu diperhatikan oleh Pemerintah. Tingkat pengangguran saat ini lebih banyak dialami oleh lulusan SMA/Diploma/Sarjana dibanding lulusan SD. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang dibutuhkan saat ini masih berupa pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian atau dengan kata lain pekerjaan yang masih membutuhkan ketrampilan.

Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan masih menjadi idola bagi masyarakat Kalimantan karena sektor tersebut masih menawarkan lapangan usaha yang luas dengan penghasilan yang relatif menjanjikan dibandingkan dengan sektor lain. Sebaliknya sektor usaha akomodasi, rumah makan, listrik, gas, dan air bersih memiliki lapangan usaha yang sedikit menyerap tenaga kerja lokal dikarenakan lokasi pemukiman penduduk yang tidak terlalu padat dan sulitnya akses pengusaha di sektor tersebut untuk menjangkau masyarakat Kalimantan yang kebanyakan bermukim di pedalaman.

1.VI. KEMISKINAN

Selama beberapa tahun terakhir, Kalimantan merupakan wilayah di Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk miskin paling sedikit dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Jumlah penduduk miskinnya hanya berkisar 3,79% dari keseluruhan jumlah penduduk miskin di Indonesia yang sebanyak 25,67 juta. Hasil ini dibuktikan dengan rata-rata jumlah penduduk miskin di Kalimantan pada tahun 2019 sebanyak 194,63 ribu jiwa per provinsi, dimana Kalimantan Barat memiliki

GAMBAR 73. JUMLAH PENDUDUK MISKIN REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM RIBU JIWA)

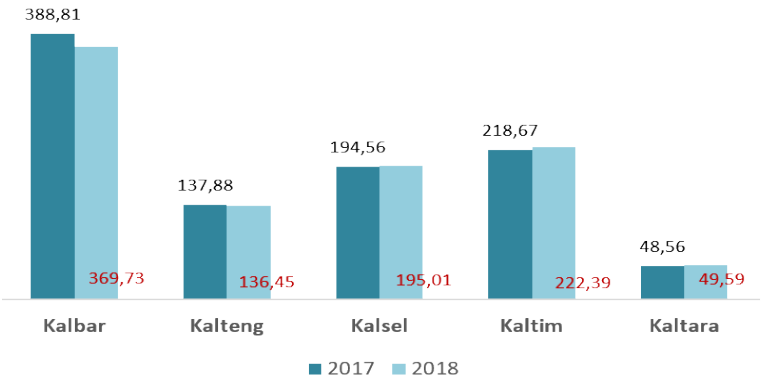

Sumber: BPS

jumlah penduduk miskin terbanyak sebesar 369,73 ribu jiwa. Sebaliknya Kalimantan Utara memiliki jumlah penduduk miskin terendah sebesar 49,59 ribu jiwa.

Secara rata-rata, seluruh provinsi di Kalimantan mengalami penurunan tingkat kemiskinan sebesar 2,44%, sebagaimana halnya yang terjadi pada penurunan kemiskinan di tingkat nasional yang sebesar 4,55%. Penurunan terbesar tingkat kemiskinan berada di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebesar 6,23%. Sebaliknya penurunan terendah tingkat kemiskinan berada di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar 0,33%.

Secara persentase, tingkat kemiskinan di Kalimantan menurun untuk seluruh provinsi. Namun jika ditilik dari jumlah penduduk miskin, pada provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin. Kalimantan Timur mengalami pertambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 3,72 ribu. Sebaliknya penurunan jumlah penduduk miskin terbesar terjadi di provinsi Kalimantan Barat yakni 19,08 ribu jiwa.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan alasan dibalik tingkat kemiskinan seluruh provinsi di Kalimantan mengalami penurunan namun sebaliknya di beberapa provinsi mengalami pertambahan jumlah penduduk miskin. Salah satu faktor yang melatarbelakanginya adalah, bertambahnya jumlah penduduk miskin di wilayah perdesaan (rural) yang tidak mampu lagi membeli beras sebagai bahan makanan utama masyarakat perdesaan yang mata pencahariannya bukan sebagai petani padi dikarenakan harganya yang tidak terjangkau lagi bagi mereka yang tingkat penghasilannya masih stagnan.

2. PELAKSANAAN APBN

Secara umum, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dan 2018 seluruh satuan kerja/instansi vertikal di regional Kalimantan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

2.I. PENDAPATAN NEGARA

Kinerja realisasi pendapatan negara di wilayah Kalimantan selama tahun 2018 mengalami peningkatan senilai Rp1.234,87 miliar atau sebesar 2,89% dari realisasi pendapatan negara tahun sebelumnya. Peningkatan pendapatan negara dihasilkan dari kontribusi

GAMBAR 74. REALISASI APBN REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara						
Penerimaan Perpajakan	42.304,95	38.383,71	90,73	42.853,26	39.840,16	92,97
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.003,28	4.276,43	142,39	3.788,37	4.121,96	108,81
Pendapatan Hibah	210,20	67,11	31,93	-	-	
Jumlah Pendapatan Negara	**45.518,43**	**42.727,25**	**93,87**	**46.641,63**	**43.963,11**	**94,26**
Belanja Negara						
Belanja Pemerintah Pusat	36.395,85	32.468,79	89,21	39.349,14	36.517,80	92,80
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	89.166,78	78.905,27	88,49	83.050,33	80.624,79	97,08
Jumlah Belanja Negara	**125.562,63**	**111.374,06**	**88,70**	**122.399,47**	**117.142,59**	**95,71**

Sumber: DJPBN 2019 (diolah)

realisasi penerimaan perpajakan yang mencapai Rp39.840,16 atau meningkat 3,79% dari realisasi tahun sebelumnya.

Penerimaan perpajakan di wilayah Kalimantan masih mendominasi pendapatan negara di wilayah Kalimantan dibanding dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baik dari sisi target maupun realisasi penerimaannya. Rasio realisasi perpajakan terhadap PNBP di Kalimantan yaitu 90,62% berbanding 9,38%. Penerimaan perpajakan mayoritas dihasilkan dari sektor pertambangan dan penggalian.

Tingginya persentase realisasi penerimaan pajak terhadap target serta meningkatnya jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan tahun sebelumnya disebabkan membaiknya sektor pertambangan dan penggalian serta kinerja ekspor barang/jasa yang meningkat.

2.II. BELANJA NEGARA

Secara total, alokasi pagu belanja negara tahun 2018 di Kalimantan mengalami penurunan 1,22% dibanding tahun 2017. Penurunan belanja negara terjadi pada belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp6.116,45 miliar atau turun senilai 6,86%. Sedangkan pagu belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan Rp4.605,97 atau senilai 13,26% terhadap alokasi belanja tahun yang lalu.

Apabila dirinci per jenis belanja, hampir semua jenis belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan alokasi pagu kecuali belanja bantuan sosial yang turun Rp23,11 miliar atau senilai 28,92%. Kenaikan belanja sebagian besar disumbang kenaikan belanja barang dan jasa serta belanja modal, yang masing-masing memberikan pengaruh kenaikan Rp2.815,1 miliar dan Rp1.194,37 miliar atau senilai 21,81% dan 11,72%.

Dilihat dari komposisinya, kontribusi belanja barang/jasa dan belanja modal terhadap belanja konvensional di luar TKDD tahun 2018, masing-masing sebesar 39,96% dan 28,92%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat komit terhadap peningkatan belanja modal dan belanja barang/jasa yang memiliki dampak berkelanjutan tehadap pertumbuhan ekonomi di Kalimantan.

Komitmen pemerintah pusat ini ternyata belum direspon dengan baik oleh satuan kerja instansi vertikal/dekon/TP di wilayah Kalimantan dalam melakukan eksekusi belanja negara. Hal ini terbukti, dimana

TABEL 36. REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pegawai	11.566,92	11.118,39	96,12	12.186,52	11.812,98	96,93
Barang dan Jasa	12.907,54	11.600,95	89,88	15.722,64	14.246,84	90,61
Modal	10.188,81	9.650,14	94,71	11.383,18	10.403,17	91,39
Bansos	79,91	70,31	87,99	56,80	54,80	96,48
Lainnya *)	89.166,78	78.934,27	88,52	83.050,33	80.624,79	97,08
Total Belanja	**123.909,95**	**111.374,06**	**89,88**	**122.399,47**	**117.142,58**	**95,71**

**) termasuk TKDD Sumber: DJPBN (diolah)*

TABEL 37. REALISASI BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Dana Alokasi Umum	38.571,78	38.571,95	100,00	38.802,43	38.802,49	100,00
Dana Bagi Hasil	28.369,89	19.411,69	68,42	20.757,22	20.757,22	100,00
Dana Alokasi Khusus	16.228,99	14.938,59	92,05	16.422,49	15.174,07	92,40
Dana Insentif Daerah	698,46	698,46	100,00	888,75	621,64	69,95
Dana Desa	5.297,66	5.284,60	99,75	6.179,44	5.269,36	85,27
Total TKDD	**89.166,78**	**78.905,27**	**88,49**	**83.050,33**	**80.624,79**	**97,08**

Sumber: DJPBN dan DJPK (diolah)

realisasi belanja negara, terutama belanja modal mengalami penurunan persentase penyerapan belanja modal terhadap pagunya, yang semula sebesar 94,71% menjadi 91,39%. Padahal belanja modal inilah yang efektif menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Kenaikan belanja negara tidak hanya pada belanja modal, tetapi juga transfer ke daerah dan dana desa. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan pagu hampir di seluruh jenis transfer ke daerah dan dana desa. Kenaikan tertinggi pada dana insentif daerah yakni sebesar 27,24% dan diikuti oleh dana desa yang naik 16,64%. Kenaikan dana insentif daerah ini dipengaruhi oleh beberapa prestasi dan capaian kinerja keuangan wilayah di Kalimantan yang cukup bagus, sehingga Pemerintah Pusat memberi insentif untuk memotivasi dan mendorong kinerja keuangan pemerintah daerah yang lebih baik lagi. Sebaliknya, penurunan pagu dana transfer terjadi pada dana bagi hasil yakni sebesar 26,83%. Meskipun terjadi penurunan pagu dana bagi hasil, namun realisasinya mengalami kenaikan sebesar 6,93%.

Dari sisi penyerapan, realisasi TKDD mengalami kenaikan persentase penyerapan dari 88,49% di tahun 2017 menjadi 97,08% di tahun 2018. Persentase kenaikan penyerapan ini didorong oleh kenaikan realisasi dana bagi hasil dari Rp19.411 miliar meningkat menjadi Rp20.757 miliar atau meningkat dari 68,42% menjadi 100%. Kenaikan realisasi TKDD tidak terjadi di seluruh jenis transfer malah sebaliknya penurunan terjadi pada realisasi dana desa dari 99,75% menjadi 85,27%.

3. PELAKSANAAN APBD

Penurunan target pendapatan daerah pada tahun anggaran 2017 di Kalimantan masih berlanjut untuk tahun 2018, walaupun target PAD mengalami kenaikan sebesar 12,66%. Apabila target pendapatan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 11% terhadap target pendapatan tahun 2016, maka pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 2,37% terhadap target pendapatan tahun 2017. Namun yang menjadi perhatian adalah bahwa sebagian besar penurunan tersebut berasal dari penurunan target lain-lain pendapatan yang sah yang mencapai 72%.

Komposisi pendapatan daerah juga tidak mengalami perubahan dibanding tahun sebelumnya, dimana pemerintah daerah

sangat mengandalkan dana perimbangan sebagai sumber utama pendapatan daerah, yaitu sebesar 77%. Kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah ini bertambah 11,32% dibanding tahun 2017.

Menurunnya target pendapatan daerah dikuti dengan penurunan target belanja daerah sebesar 8,41% terhadap tahun sebelumnya. Hampir semua jenis belanja daerah mengalami penyesuaian. Yang paling berdampak terhadap penyesuaian belanja daerah adalah belanja modal, yaitu sebesar 23,62%. Penurunan alokasi belanja modal tersebut sangat berdampak terhadap terwujudnya program pembangunan infrastruktur serta sumber daya manusia di wilayah Kalimantan, utamanya program pembangunan yang mendukung prioritas nasional. Meski alokasi dana belanja daerah berkurang, namun pemerintah daerah semestinya memprioritaskan alokasi jenis belanja mana yang mestinya dikurangi, terutama jenis belanja yang tidak/kurang mempunyai *multiplier effect* terhadap pembangunan fisik dan sumber daya manusia.

TABEL 38. REALISASI APBD REGIONAL KALIMANTAN TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

REALISASI	TA 2017		TA 2018	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pendapatan				
Pendapatan Asli Daerah	18.049	19.594	20.334	19.052
Dana Perimbangan	77.472	66.791	84.197	71.723
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	16.176	12.637	4.516	13.117
Jumlah Pendapatan	**111.697**	**99,022**	**109.047**	**103.892**
Belanja				
Belanja Pegawai	39.473	32.134	38.847	39.015
Belanja Barang dan jasa	25.991	24.431	28,192	24,738
Belanja Modal	35.384	22.398	27.027	25.282
Belanja Lainnya	21.125	20.953	17.646	21.238
Jumlah Belanja	**121.973**	**99.916**	**111.712**	**110.273**
Surplus/Defisit	*(10.276)*	*(894)*	*(2.665)*	*(6.381)*
Persentase Surplus/ Defisit dibanding Pendapatan	-9.20%	-0.90%	-2.44%	-6.14%

Sumber: Ditjen Perbendaharaan (diolah)

4. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL

4.I. PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Wilayah Kalimantan telah lama dikenal sebagai wilayah yang kaya akan hasil tambang, minyak bumi, dan gas alam. Potensi di sektor ini mampu mengungguli bahkan mendominasi sektor ekonomi lainnya, seperti Pertanian dan Industri Pengolahan. Meskipun dibayangi isu kerusakan lingkungan dan harga komoditas yang cenderung fluktuatif, namun bagi beberapa provinsi di wilayah Kalimantan seperti Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sektor ini masih menjadi andalan untuk memutar roda perekonomian, paling tidak sampai ada sektor lain yang bisa menggantikan peran sektor ini dalam menggerakkan roda perekonomian.

Di Kalimantan Timur misalnya, sektor yang bersifat ekstraktif ini mendominasi struktur perekonomian sebesar 46,35%. Selain itu, minat investor yang masuk ke Kalimantan Timur juga masih mengarah pada sektor ini. Pada tahun 2018, realisasi investasi pada sektor pertambangan sebesar Rp12,56 triliun. Jumlah investasi ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lain di Kalimantan Timur dengan andil mencapai 48,41%.

Di Kalimantan Selatan, sektor pertambangan menyumbang 25,74% dari struktur PDRB Kalimantan Selatan, paling mendominasi

dibanding sektor lapangan usaha lainnya. Potensi batubara di Kalimantan Selatan sebesar 14,45 miliar ton atau 20,8% cadangan batubara nasional. Sebaran cadangan batubara nasional terbesar berada di Kalimantan Timur (47,96 miliar ton/69%). Dengan demikian cadangan batubara Kalimatan Selatan merupakan yang terbesar kedua. Selanjutnya diikuti Kalimantan Tengah berada diurutan ketiga (4,1 miliar ton/5,9%), Kalimantan Utara (2 miliar ton/2,9%), dan Kalimantan Barat (0,5 miliar ton/0,7%).

Meskipun dibayangi isu kerusakan lingkungan dan harga komoditas yang cenderung fluktuatif, bagi Kalimantan sendiri, sektor ini masih menjadi andalan untuk memutar roda perekonomian, paling tidak sampai ada sektor lain yang bisa menggantikan peran sektor ini dalam menggerakkan roda perekonomian

Dengan demikian, apabila batubara dihentikan penambangannya maka akan berpengaruh terhdapa pertumbuhan ekonomi di Kalimantan. Melihat dampak yang sangat signifikan dari penghentian penambangan batubara terhadap perekonomian Kalimantan, tidak rasional untuk serta merta menghentikan penambangan batubara. Langkah yang lebih tepat adalah mulai merintis upaya pengembangan sektor usaha lain sebagai antisipasi apabila cadangan batubara habis.

4.II. PERTANIAN

Sebagai lapangan usaha terbesar ketiga, setelah sektor pertambangan dan industri pengolahan, yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekononomi di Kalimantan, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kalimantan menunjukkan tren yang fluktuatif, terutama bagi provinsi Kalimantan Tengah. Ditunjang dengan masih sangat luasnya wilayah yang dapat dijadikan lahan pertanian dan dan perkebunan, Kalimantan dapat dijadikan role model bagi pengembangan produk pertanian dan perkebunan di tengah semakin menyempitnya luas lahan pertanian dan perkebunan di pulau Jawa. Alasan klasik yang melatarbelakangi usaha pengembangan produksi pertanian dan perkebunan tidak berkembang dengan baik sejauh ini adalah kontur tanah yang berbeda dengan kontur tanah di pulau Jawa yang relatif subur. Kalimantan dianugerahi tanah gambut yang dinilai kurang produktif bagi jenis tanaman yang berproduksi dengan jumlah massal, seperti tanaman padi dan palawija. Hal ini diakibatkan keadaan biofisik lahan yang berbeda dengan lahan yang ada di Jawa. Keadaan biofisik lahan gambut ditandai pH rendah, tinggi konsentrasi asam organik seperti zat auminium dan besi segingga pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Namun saat ini kendala tersebut telah disiasati dengan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh kelompok masyarakat, pemerintah daerah, maupun institusi lainnya.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memberikan kontribusi terbesar pada PDRB Kalimantan Tengah. Kontribusi di sektor ini sebesar Rp27,54 triliun (ADHB) yang juga merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Kalteng. Tenaga kerja yang diserap pada tahun 2018 sebesar 499,14%.

Namun demikian, apabila dibandingkan dengan capaian produksi tanaman padi, hasil produksi tanaman padi Kalimantan Tengah sangat kecil, hanya berkontribusi sekitar 1,3% dari capaian produksi tanaman padi secara Nasional. Padahal sebagai provinsi dengan luas lahan pertanian terbesar kedua di Indonesia, area yang berpotensi dijadikan sebagai lahan pertanian dapat mencapai 17,4%.

Selain ekstensifikasi lahan, penggunaan varietas padi dengan masa tanam yang pendek dan tahan terhadap penyakit terus dikembangkan melalui kerja sama dengan lembaga penelitian, seperti Institut Pertanian Bogor (IPB). Dengan menggunakan varietas spesifik lokal seperti (IPB 1R Dadahup) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas lahan menjadi dua kali tanam dalam setahun.

4.III. PERKEBUNAN

Kelapa Sawit merupakan produk unggulan utama kedua setelah batubara bagi sebagian provinsi di wilayah Kalimantan, Keunggulan kelapa sawit yang terjangkau harganya, proses produksinya cukup efisien, serta permintaan pasar yang selalu tinggi menjadi daya tarik bagi investor, pekebun, dan pemilik pabrik pengolah minyak kelapa sawit.

Kelapa Sawit merupakan komoditas yaang memberikan kontribusi cukup signifikan bagi Kalimantan karena selain dikonsumsi dalam negeri, juga hasilnya diekspor ke luar negeri. Kontribusi minyak kelapa sawit beserta olahannya di Kalimantan Tengah merupakan yang tertinggi kedua setelah Provinsi Riau, yaitu 15,12% dari produksi Nasional.

Sebanyak 85,9% penguasaan lahan perkebu nan kelapa sawit dikuasai oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit dan sisanya dikuasai oleh pekebun rumah tangga yang tidak berbentuk badan hukum. Tiadanya partisipasi perkebunan besar yang diusahakan negara (PTPN) disebabkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pembukaan lahan dan penggunaan peralatan berteknologi tingkat tinggi untuk memudahkan penanaman bibit kelapa sawit pada lahan gambut. Dengan adanya kendala seperti itu, maka harga kelapa sawit di pasaran seringkali menjadi mahal karena tidak adanya campur tangan Pemerintah untuk mengendalikan harga kelapa sawit yang tinggi.

Oleh karena diperlukan usaha dari Pemerintah untuk menjaga stabilitas harga produk perkebunan di tingkat petani kebun contohnya melalui penerbitan peraturan pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Kalbar telah menerbitkan peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalbar. Para pekebun Kalbar harus bermitra dengan perusahaan kelapa sawit sesuai dengan harga yang telah disepakati.

Keberadaan BUMDes diharapkan dapat menampug hasil getah karet petani dan sekaligus memfasilitasi penjualan karet langsung ke pabrik karet sehingga jalur perdagangan yang semula panjang dan berbelit-belit menjadi terpangkas karena tidak harus melalui pengepul.

4.IV. INDUSTRI PENGOLAHAN

Sektor industri pengolahan merupakan sektor lapangan usaha yang berpotensi untuk menggantikan sektor pertambangan dan penggalian pada masa depan dikarenakan semakin gencarnya penerapan hilirisasi komoditas sumberdaya alam di beberapa tempat. Dengan semakin terbatasnya cadangan batubara dan bahan mineral lainnya di Kalimantan, maka pemerintah daerah berinisiatif untuk memberikan insentif bagi investor yang membangun pabrik pengolahan sumber daya alam. Keberadaan industri pengolahan akan memberikan *multiplier effect* bagi masyarakat di sekitarnya seperti lapangan pekerjaan semakin terbuka, berdirinya restoran dan warung makan di sekitar lokasi industri, dan banyaknya transportasi umum yang melintasi lokasi industri untuk mengangkut pekerja pabrik.

Selain itu, hilirisasi industri akan menambah nilai jual/manfaat bagi suatu komoditas. Apabila sebelumnya, suatu komoditas dihasilkan dalam bentuk mentah dan utuh untuk diperdagangkan bahkan diekspor ke luar negeri dengan harga yang relatif rendah, maka dengan kondisi komoditas yang dihasilkan menjadi setengah jadi atau menjadi barang jadi, maka akan menambah nilai ekonomis bagi barang yang akan diperdagangkan atau diekspor.

Perkembangan sektor ini menjadi perhatian serius pemerintah, terbukti dengan visi dan strategi pemerintah provinsi untuk mereal isasikan transformasi ekonomi, baik secara vertikal maupun horizontal. Transformasi horizontal dengan cara mendiversifikasi sektor penopang pertumbuhan, tidak hanya pertambangan dan penggalian. Transformasi vertikal dengan cara malakukan hilirisasi produk, dalam hal ini terutama komoditas hasil tambang yang cenderung dijual tanpa diolah. Di sinilah peran sektor industri untuk mengolah bahan baku sehingga memberikan nilai tambah bagi perekonomian regional. Industri hilir hasil tambang batubara yang dimungkinkan salah satunya adalah gasifikasi batubara untuk selanjutnya diolah menjadi bahan pengganti elpiji.

Untuk itu, dalam rangka mendorong program hilirisasi, pemda perlu menyiapkan infrastruktur jalan/jembatan dan sarana transportasi besar serta pelabuhan untuk menampung komoditas unggulan di daerah tersebut.

4.V. PARIWISATA

Sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat berpotensi untuk meraup devisa. Taman Nasional (TN) Tanjung Puting di Kab. Kotawaringin Barat merupakan tempat konservasi orang utan terbesar di dunia dengan populasi mencapai 30.000-40.000 orang utan. TN Tanjung Puting mempunyai luas area sebesar 415.040 Hektar. Selain orang utan, terdapat juga satwa endemik yang dilindungi semisal bekantan, lutung merah, dan beruang. TN Tanjung Puting telah diusulkan juga menjadi destinasi prioritas wisata '*Bali Baru ke-11*', satu-satunya di Pulau Kalimantan.

Jumlah pengunjung TN Tanjung Puting tahun

2018 mencapai 29.283 orang, sebanyak 64,3% merupakan wisatawan mancanegara dan semakin meningkat setiap tahunnya. Bertambahnya jumlah wisatawan akan menggerakkan sektor perekonomian yang lain seperti sektor transportasi dan meningkatnya jumlah hunian kamar hotel. Peningkatan jumlah pengunjung berpengaruh terhadap PNBP TN Nasional Tanjung Puting, dimana pada tahun 2018 naik 28,6% dari capaian tahun 2017 menjadi senilai Rp7,7 miliar.

Selain Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai menggalakan sektor pariwisatanya sebagai alternatif penggerak ekonomi disamping sektor pertambangan dan industri pengolahan. Kalimantan Selatan dikenal sebagai wilayah yang banyak dialiri sungai besar sampai dengan sungai kecil. Selain sebagai jalur transportasi sungai yang mengangkut masyarakat dan sumber daya alam seperti kayu gelondongan dan batubara, beberapa sungai dimanfaatkan sebagai obyek wisata unggulan Kalimantan Selatan sebagaimana Sungai Barito dan Sungai Martapura. Sungai tersebut dimanfaatkan untuk menggaet minat masyarakat luar, baik domestik maupun mancanegara, yang ingin mendapatkan sensasi menyusuri sungai tersebut untuk menuju ke obyek wisata lain, seperti Masjid Sultan Suriansyah dan Pulau Kembang. Masjid Sultan Suriansyah atau Masjid Kuin merupakan sebuah masjid bersejarah di Kota Banjarmasin yang merupakan masjid tertua di Kalimantan Selatan. Masjid ini dibangun pada masa pemerintahan Sultan Suriansyah (1526-1550), Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Masjid yang didirikan di tepi sungai Kuin ini memiliki bentuk arsitektur tradisional Banjar, dengan konstruksi panggung dan beratap tumpang. Pada bagian mihrab masjid ini memiliki atap sendiri yang terpisah dengan bangunan induk.

Pulau Kembang adalah sebuah delta yang terletak di tengah sungai Barito yang termasuk di dalam wilayah administratif Kabupaten Barito Kuala, provinsi Kalimantan Selatan. Pulau Kembang terletak di sebelah barat Kota Banjarmasin.Pulau Kembang merupakan habitat bagi kera ekor panjang (monyet) dan beberapa jenis burung. Kawasan pulau Kembang juga merupakan salah satu objek wisata yang berada di dalam kawasan hutan di Kabupaten Barito Kuala.

4.VI. ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

Salah satu prasyarat pertumbuhan ekonomi tetap tinggi dan mempunyai daya saing global adalah tersedianya pasokan energi yang murah. Hal ini disadari Pemerintah Indonesia dengan menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) tahun 2018-2027, dimana komposisi target bauran energi pembangkit listrik akhir tahun 2025 adalah batubara (54,4%), Energi Baru dan Terbarukan (23,0%), Gas (22,2%), dan BBM (0,4%).

Wilayah Kalimantan Barat mempunyai potensi untuk memanfaatkan sumber daya alamnya sebagai sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan sekitar, antara lain Biomassa, Air, Surya, dan Nuklir. Sumber EBT tersebut

dimanfaatkan oleh Pemerintah Kalimantan Barat untuk pembangkit tenaga listrik.

Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) di Kalimantan Barat memanfaatkan cangkat, hasil residu/limbah produksi pengolahan kelapa sawit. Dengan semakin meningkatnya produksi *Crude Palm Oil* (CPO), maka akan semingkat meningkatkan ketersediaan limbah cangkang sawit. Pembangunan listrik berbahan baku cangkang kelapa sawit merupakan pembangkit biomassa pertama yang dibangun di wilayah Kalimantan Barat.

Kondisi geografis Kalbar yang ditunjang sungai-sungai besar serta jeram dan air terjun yang mengalir sepanjang tahun berpotensi untuk dimanfaatkan pemerintah setempat sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Hingga saat ini di wilayah Kalbar belum satupun dibangun PLTA, hanya ada pembangkit listrik berskala kecil, seperti Pembangkit Listrk Tenaga Minihidro (PLTM) dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Upaya pengembangan PLTM/PLTMH dapat memanfaatkan dana desa serta menambah usulan alokasi DAK Fisik, khususnya alokasi Bidang energi berskala Kecil, ke Pemerintah Pusat.

Letak geografis Kalbar yang tepat berada di garis khatulistiwa sangat menguntungkan bagi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Sinar matahari yang bersinar terik hampir sepanjang tahun ditampung dalam solar panel yang selanjutnya akan dikonversi menjadi energi listrik bagi kawasan perumahan dan industri di sekitarnya.

Kalbar juga mempunyai cadangan sumber EBT yang sangat besar dengan ditemukannya cadangan uranium dan thorium terbesar se-Indonesia di wilayah Kabupaten Malawi dan Ketapang. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sangat memungkinkan untuk dibangun pada salah satu pulau kecil di wilayah Kalbar yang jauh dari pemukiman. Mengingat wilayah Kalbar tidak pernah mengalami bencana gempa, maka pembangunan reaktor nuklir PLTN dapat segera direalisasikan dengan mempertimbangkan faktor keamanan yang sangat tinggi.

5. SOLUSI FISKAL REGIONAL

Berkenaan dengan beberapa tantangan fiskal regional wilayah Kalimantan tersebut, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain:

Pertama, Menstimulasi pertumbuhan melalui langkah diversifikasi sektor dan komoditas andalan pertumbuhan ekonomi. Mengurangi dominasi sektor pertambangan dan penggalian dalam struktur ekonomi menjadi keharusan agar tercipta pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan tidak rentan mengalami guncangan. Kebijakan konkrit yang direkomendasikan adalah serangkaian kebijakan untuk membatasi usaha pertambangan dan memberikan dukungan penuh pengembangan sektor industri pengolahan dan pertanian.

Kedua, Meningkatkan kualitas anggaran sebagai respon atas semakin terbatasnya kapasitas fiskal ditengah upaya pembangunan yang membutuhkan pembiayaan besar. Upaya

struktural dan sistematis yang berkelanjutan untuk mengoptimalkan serta merealisasikan potensi pendapatan menjadi langkah pertama yang harus dilakukan. Dan selanjutnya kualitas belanja juga harus ditingkatkan dengan langkah pemilihan prioritas belanja yang menjamin proyek/kegiatan yang dibiayai merupakan hal-hal yang terpenting dan akan berdampak optimal. Pengendalian belanja menjadi penting agar belanja yang dikeluarkan segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berdampak besar pada perbaikan kondisi perekonomian.

Ketiga, Pemanfaatan skema pembiayaan non konvensional diluar APBN/APBD juga direkomendasikan untuk dilaksanakan. Peluang untuk membiayai prioritas pembangunan terbuka melalui pola kemitraan dengan pihak swasta (*public private partnership*) sehingga tidak selalu harus bergantung pada anggaran pemerintah semata.

Keempat, Penggalian berbagai pajak daerah dan retribusi tanpa mengganggu atau membatasi kegiatan ekonomi, diantaranya adalah kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama.

Kelima, Potensi *idle cash* agar diminimalisir dengan mengoptimalkan pengelolaan kas daerah melalui perencanaan kegiatan dan realisasi belanja yang lebih akurat.

Keenam, Diperlukan pengaturan tentang perlindungan lahan pertanian tanaman pangan, sehingga masyarakat pemilik lahan tidak perlu khawatir terhadap intervensi dari pihak lain yang mencoba mengambil alih fungsikan lahan pertanian menjadi lahan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Sebagai contoh hal ini sudah terdapat pada provinsi Kalimantan Selatan dan selanjutnya bisa menjadi acuan provinsi lainnya untuk membuat pengaturan tentang perlindungan lahan pertanian tersebut.

Ketujuh, Stimulus fiskal pemerintah selalu diperlukan untuk meningkatkan volume produksi pertanian, utamanya padi sebagai bahan pangan utama penduduk Indonesia. Salah satu kebijakan yang ditempuh adalah melalui dua skema bantuan pembiayaan ketahanan pangan, yaitu Skema Subsidi Bunga Kredit (Kredit Program Ketahanan Pangan dan energi) dan Skema Penjaminan (Kredit Usaha Rakyat).

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi regional Bali Nusra turun dari 3.71% pada tahun 2017 ke angka 2,68%. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada Provinsi NTB yang mengalami kontraksi hingga 4,56% menjadi penyumbang utama perlambatan ekonomi regional ini. Sektor pertambangan dan penggalian (bijih logam) menjadi faktor utama merosotnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB. Selain itu lapangan usaha pengadaan air dan lapangan usaha penyediaan akomodasi makan minum juga mengalami kontraksi. Kedua lapangan usaha ini terdampak langsung oleh bencana alam gempa bumi terutama dalam hal infrastrukturnya. Perkembangan inflasi regional berada berada pada kisaran angka yang sama dengan inflasi nasional, kecuali untuk Provinsi NTB yang mencapai 3,17%. Indikator kesejahteraan regional Bali Nusra pada tahun 2018 menunjukkan perkembangan yang positif dimana IPM, Rasio Gini, TPT, dan Tingkat Kemiskinan membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, IPM dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi NTB dan NTT masih memerlukan perhatian khusus mengingat angkanya yang masih jauh dari rata-rata nasional.

Fiskal Regional Bali Nusra

Realisasi pendapatan negara di regional Bali Nusra sebagian besar masih didukung dari penerimaan perpajakan dengan komposisi sebesar 85,62% dari total pendapatan negara. Pagu belanja negara yang dianggarkan untuk regional Bali Nusra pada tahun 2018 sebesar Rp80,1 triliun (meningkat 32,57% dibanding tahun sebelumnya) dengan realisasi sebesar Rp77,1 triliun atau meningkat sebesar 36,93% dibanding realisasi tahun sebelumnya. Dari postur pendapatan pada APBD Regional Bali Nusra TA 2018 menunjukkan bahwa terjadi penurunan ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat menjadi sebesar 61,95% yang semula pada TA 2017 sebesar 63,08%. Pemerintah daerah pada Provinsi NTT memiliki ketergantungan terbesar kepada Pemerintah Pusat, yaitu sebesar 76,1%. Sejalan dengan peningkatan ketergantungan pemerintah daerah terhadap Pemerintah Pusat, pertumbuhan PAD pada regional Bali Nusra TA 2018 dibandingkan dengan TA 2017 menunjukkan minus 4,58%. Dibandingkan tahun 2017, terjadi peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dari 72,3% menjadi 72,4% yang didorong oleh peningkatan kontribusi PAD di Provinsi Bali dan NTT.

1. MAKROEKONOMI REGIONAL BALI NUSRA

1.I. PERTUMBUHAN EKONOMI

Secara umum pertumbuhan ekonomi regional Bali Nusra pada tahun 2018 lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional.

GAMBAR 75. PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM PERSEN)

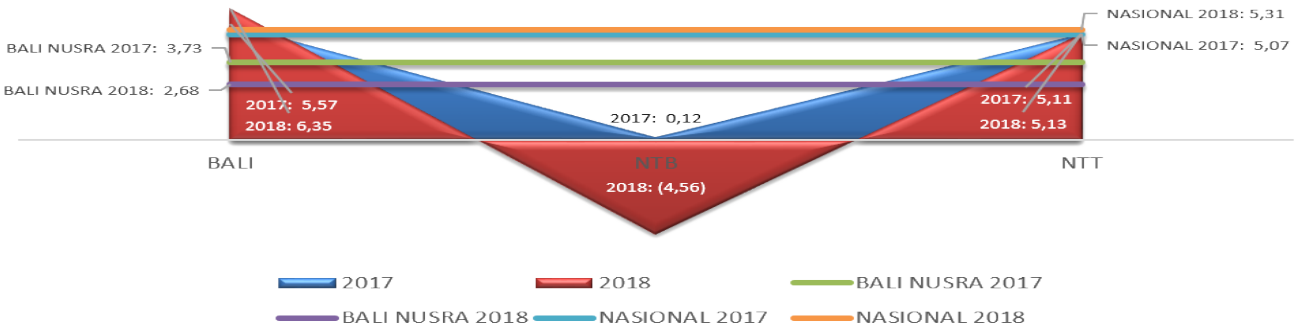

Sumber: BPS

Penurunan pertumbuhan ekonomi pada regional Bali Nusra didorong oleh penurunan pertumbuhan ekonomi pada Provinsi NTB terutama karena rendahnya pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian (bijih logam) di NTB yang pada tahun 2018 mengalami kontraksi sebesar 33,71%. Selain itu lapangan usaha pengadaan air dan lapangan usaha penyediaan akomodasi makan minum juga mengalami kontraksi masing-masing sebesar 3,43% dan 5,90%. Kedua lapangan usaha ini terdampak langsung oleh bencana alam gempa bumi terutama dalam hal infrastrukturnya.

Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto mengalami kenaikan laju pertumbuhan 9,99% pada tahun 2018. Laju pertumbuhan tertinggi adalah komponen impor barang/jasa (luar negeri) sebesar 36,63%. Di sisi lain, komponen ekspor netto antar daerah mencatatkan laju negatif sebesar minus 2,13%. Kondisi laju pertumbuhan yang membaik ditunjukkan oleh komponen Ekspor Barang dan Jasa yang pada tahun 2018 mencatatkan laju pertumbuhan sebesar 5,85%.

GAMBAR 76. KOMPOSISI PDRB ADHB DARI SISI PERMINTAAN REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2018

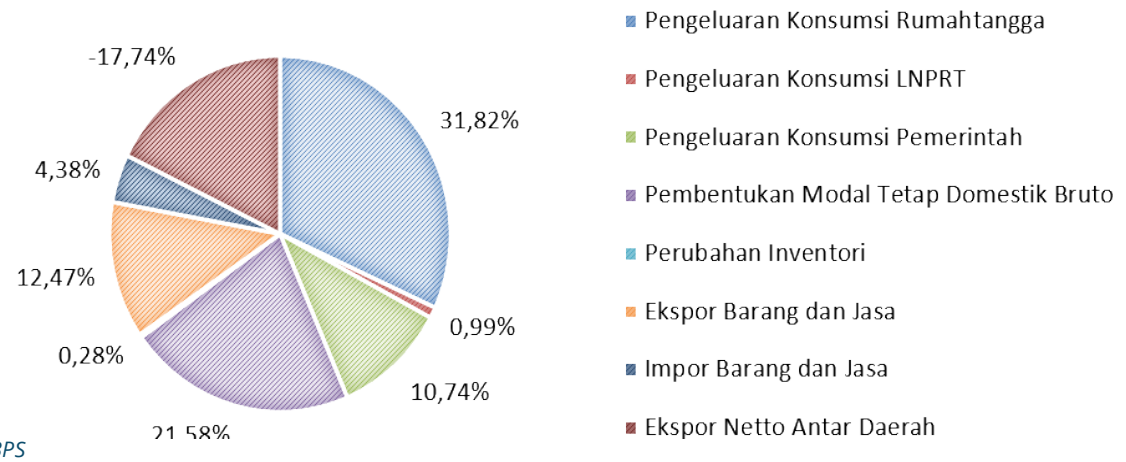

Sumber: BPS

GAMBAR 77. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI PERMINTAAN ADHB REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM PERSEN)

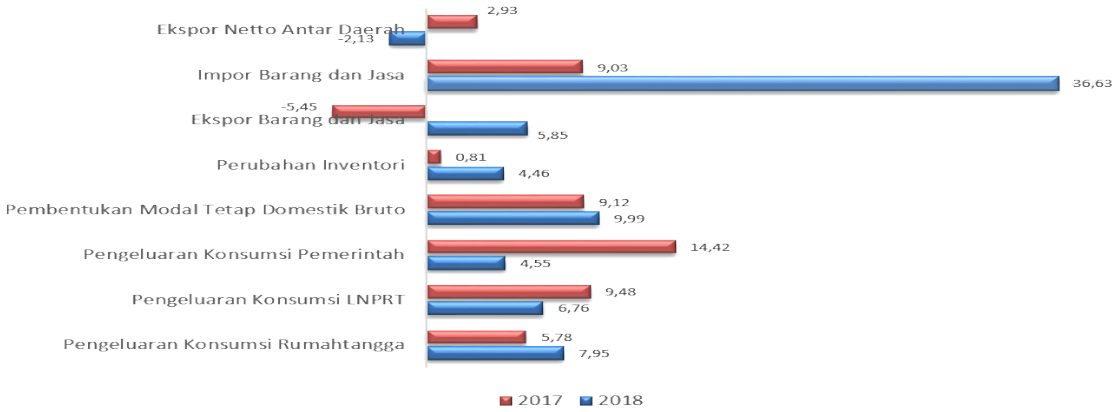

Sumber: BPS

Komposisi PDRB dari sisi penawaran regional Bali Nusra cukup merata. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi sebesar 19,57% ,dan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum sebesar 12,71%. Tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya posisi ketiga komposisi PDRB yakni sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sebesar 10,67%. Hal ini menunjukan bahwa struktur perekonomian regional Bali Nusra tidak mengalami perubahan, meskipun terjadi pelambatan pada sektor pertambangan dan penggalian.

Perlambatan sektor pertambangan dan penggalian disumbang pertumbuhan minus 33,71% sektor pertambangan dan penggalian pada provinsi NTB. Perlambatan di sektor ini diperkirakan akan terus terjadi mengingat PT AMNT sebagai penyumbang terbesar kegiatan ekonomi sektor ini sudah memasuki fase ke tujuh yang merupakan tahapan terakhir dari kegiatan pertambangan bijih logam.

Pembangunan sektor pariwisata di regional Bali Nusra yang selama ini menjadi sektor unggulan regional, pada tahun 2018 mencatatkan pertumbuhan yang kurang begitu baik dibandingkan tahun-tahun

GAMBAR 78. KOMPOSISI PDRB ADHB DARI SISI PENAWARAN REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2018

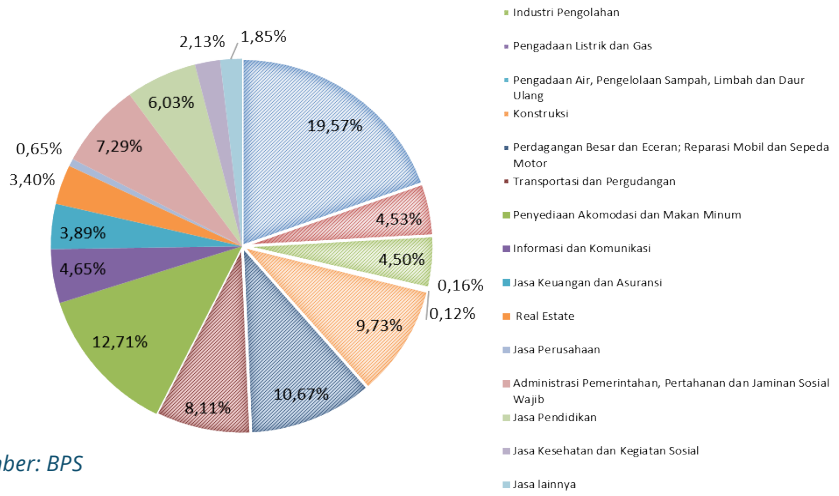

Sumber: BPS

sebelumnya. Hal ini tercermin dari laju pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum di regional Bali Nusra yang hanya tumbuh 5,72% dari 9,22% di tahun sebelumnya. Penurunan pertumbuhan ini utamanya disebabkan faktor bencana alam gempa bumi Lombok yang berdampak langsung pada infrastruktur sektor pariwisata di provinsi NTB.

Sementara itu laju pertumbuhan positif sektor-sektor lain yang menjadi komposisi terbesar PDRB regional Bali Nusra belum mampu menutupi perlambatan laju pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian yang pada tahun 2018 hanya tumbuh minus 30,16%. Momen melemahnya pertumbuhan pertambangan perlu dimanfaatkan untuk memperkuat lapangan usaha lain yang potensial di regional. Dengan penguatan lapangan usaha lain, maka ke depannya fluktuasi pertambangan tidak akan banyak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional Bali Nusra secara umum.

TABEL 39. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI PENAWARAN ADHK, REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM PERSEN)

Uraian	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,79	3,22
Pertambangan dan Penggalian	-18,11	-30,16
Industri Pengolahan	2,67	4,43
Pengadaan Listrik dan Gas	4,74	2,62
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,91	1,44
Konstruksi	7,30	7,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,36	6,69
Transportasi dan Pergudangan	6,09	5,42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,22	5,72
Informasi dan Komunikasi	7,24	6,58
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,05	3,44
Real Estate	4,73	4,37
Jasa Perusahaan	6,31	7,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,18	4,82
Jasa Pendidikan	6,66	5,33
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,83	8,17
Jasa lainnya	7,52	6,90

Sumber: BPS

1.II. INFLASI

Tingkat inflasi rata-rata regional Bali Nusra berada pada kisaran yang sama dengan tingkat inflasi nasional yakni sebesar 3,13%. Provinsi NTT berhasil mencatatkan tingkat inflasi di bawah tingkat inflasi nasional (3,07%), namun angka ini lebih tinggi dari tingkat inflasi tahun 2017 yang sebesar 2,00%. Kenaikan ini dipicu oleh naiknya indeks harga dari seluruh kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan paling tinggi terjadi pada kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan yang naik sebesar 6,61%, diikuti kelompok bahan makanan yang selama tahun 2018 mengalami kenaikan indeks harga sebesar 3,89%.

GAMBAR 79. TINGKAT INFLASI REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2017 S.D. 2018 (DALAM PERSEN)

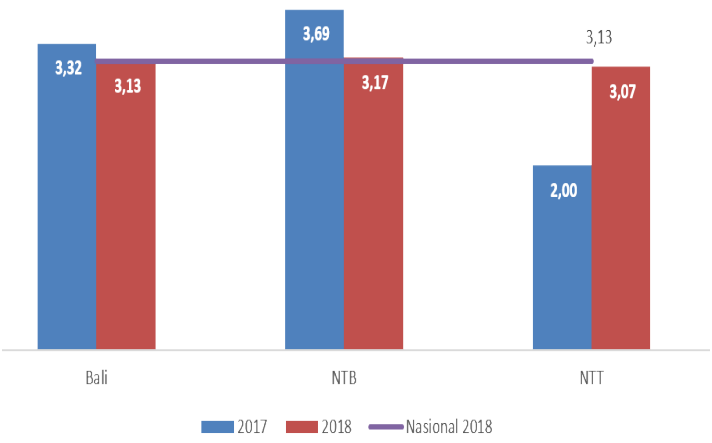

Sumber: BPS

2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

2.I. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Perkembangan IPM regional Bali Nusra selama rentang waktu tahun 2013 hingga 2018 cenderung meningkat. Provinsi Bali memiliki nilai IPM terbaik di tingkat regional dan berada diatas nilai IPM Nasional. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan nilai IPM pada Provinsi NTB dan Provinsi NTT menunjukkan berkurangnya *gap* pembangunan manusia di NTB dan NTT. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah semakin mendorong program-program di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Di samping itu, pembangunan infrastruktur yang tepat sangat diperlukan untuk meningkatkan keterjangkauan terhadap akses layanan pendidikan dan kesehatan.

GAMBAR 80. IPM REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2013 - 2018

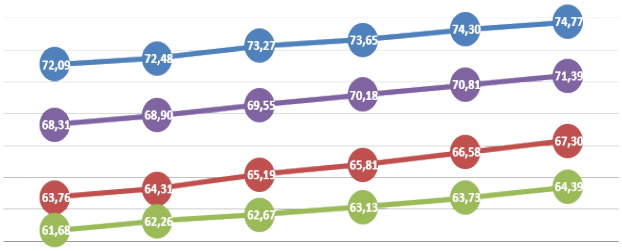

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bali	72,09	72,48	73,27	73,65	74,30	74,77
NTB	63,76	64,31	65,19	65,81	66,58	67,30
NTT	61,68	62,26	62,67	63,13	63,73	64,39
Nasional	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81	71,39

Bali NTB NTT Nasional

Sumber: BPS

2.II. RASIO GINI

Secara umum ukuran ketimpangan masing-masing provinsi meskipun masih tergolong pada level menengah, berhasil mencatatkan capaian yang lebih baik dibandingkan tingkat nasional. Selama periode tahun 2013 hingga 2018, Provinsi Bali mencatatkan penurunan yang cukup signifikan dari 0,442 pada tahun 2013 menjadi 0,364 pada tahun 2018. Lain halnya dengan Provinsi NTB, trend kenaikan ketimpangan terjadi sejak tahun 2015 dari 0,360 menjadi 0,391 pada tahun 2018.

GAMBAR 81. RASIO GINI REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2013-2018

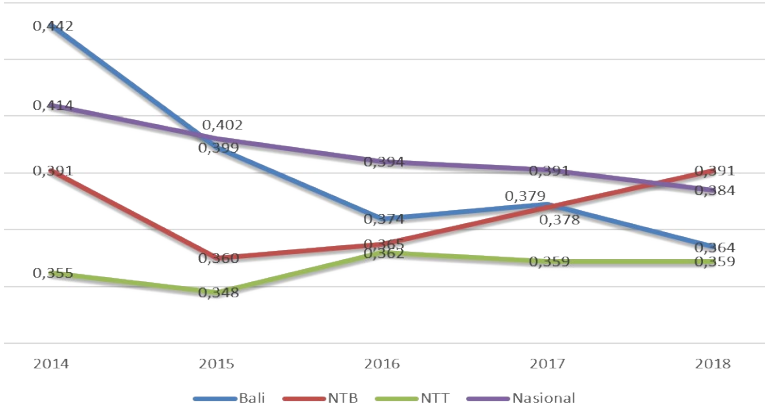

Sumber: BPS

Sementara pada Provinsi NTT setelah tahun-tahun sebelumnya berfluktuasi, nilai pada tahun 2018 sama dengan tahun 2017 yakni berada pada posisi 0,359. Ketimpangan distribusi pendapatan harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat melalui kebijakan belanja subsidi dan bantuan sosial secara selektif dan efisien.

2.III. KETENAGAKERJAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) regional Bali Nusra selama 3 tahun terakhir berada dibawah TPT nasional. Lebih lanjut, TPT pada Provinsi Bali dan NTT pada tahun 2018 menunjukkan penurunan dibanding tahun 2017 yang didukung oleh penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor penyediaan akomodasi

makan dan minum yang berkorelasi positif dengan pengembangan kawasan pariwisata sebagai dua komponen terbesar PDRB. Sementara itu, TPT pada Provinsi NTB menunjukkan peningkatan pada tahun 2018 dibanding 2017. Hal tersebut tidak lepas dari bencana gempa bumi yang melanda NTB pada tahun 2018. Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah daerah perlu memberikan insentif dalam bentuk kemudahan investasi pada sektor pariwisata, selain program revitalisasi sektor pertanian dari pemerintah pusat.

GAMBAR 82. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2017 S.D 2018 (DALAM PERSEN)

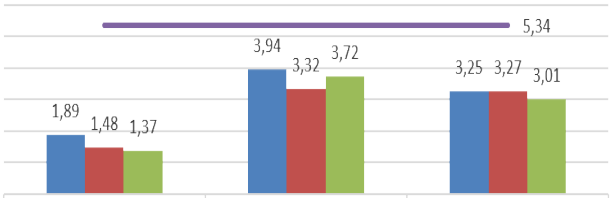

	Bali	NTB	NTT
2016	1,89	3,94	3,25
2017	1,48	3,32	3,27
2018	1,37	3,72	3,01
Nasional	5,34	5,34	5,34

2016 2017 2018 Nasional

Sumber: BPS

2.IV. KEMISKINAN

Persentase kemiskinan pada regional Bali Nusra pada tahun 2018 menunjukkan penurunan dibanding tahun 2017. Namun demikian, persentase kemiskinan pada Provinsi NTB dan NTT berada di atas persentase kemiskinan nasional. Persentase kemiskinan pada Provinsi NTB tahun 2017 sebesar 15,05% menjadi 14,63% pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk miskin 735,62 ribu jiwa. Sementara itu di Provinsi NTT pada tahun 2017 persentase penduduk

GAMBAR 83. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN REGIONAL BALI NUSRA TAHUN 2017 DAN 2018

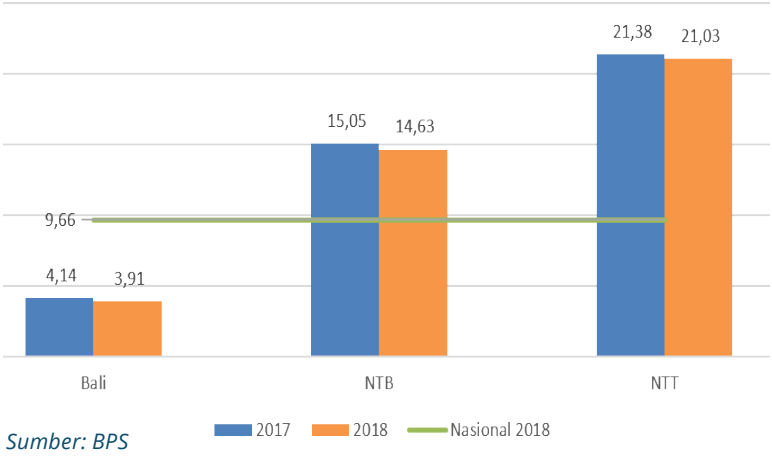

Sumber: BPS

miskin sebesar 21,38% menjadi 21,03% pada tahun 2018 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 1.134,11 ribu jiwa. Dengan demikian regional Bali Nusra berhasil menurunkan tingkat kemiskinan secara perlahan walaupun masih berada diatas tingkat kemiskinan secara nasional.

3. PELAKSANAAN APBN

3.I. PENDAPATAN NEGARA

Penerimaan perpajakan pada regional Bali Nusa Tenggara pada TA 2018 didukung oleh penerimaan perpajakan dari pemerintah daerah pada Provinsi Bali sebesar 64,23%. Kinerja penerimaan perpajakan yang cukup memuaskan ditunjukkan oleh realisasi penerimaan perpajakan selama 2 tahun terakhir mencapai di atas 90%. Sementara itu, kinerja PNBP juga menunjukkan kinerja positif ditunjukkan dengan realisasi mencapai di atas 100% dari target yang telah ditetapkan. PNBP berasal dari PNBP fungsional yang dikelola oleh instansi vertikal kementerian negara/ lembaga.

TABEL 40. APBN REGIONAL BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara						
Penerimaan Perpajakan	16.874,09	15.184,05	90,0%	17.489,13	16.289,18	93,1%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.734,35	2.238,43	129,1%	1.738,33	2.734,92	157,3%
Pendapatan Hibah	228,06	57,32	25,1%	-	-	0,0%
Jumlah Pendapatan Negara	**18,836,50**	**17.479,80**	**92,8%**	**19277,46**	**19.024,10**	**98,94%**
Belanja Negara						
Belanja Pemerintah Pusat	26.946,16	24.719,91	91,7%	30.934,95	28.612,50	92,5%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	33.592,26	31.701,42	94,4%	49.260,99	48.548,91	98,6%
Jumlah Belanja Negara	**60.538,42**	**56.421,33**	**93,2%**	**80.195,94**	**77.161,41**	**96,22%**

Sumber: DJPBN dan SIMTRADA (diolah)

3.II. BELANJA NEGARA

Prioritas belanja negara pada APBN 2017 untuk regional Bali Nusa Tenggara diprioritaskan untuk tiga fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi, pendidikan dan ketertiban umum. Secara umum, alokasi setiap fungsi mengalami kenaikan dengan kenaikan yang signifikan pada fungsi pelayanan umum (Rp1.721,41 miliar) dan fungsi ketertiban dan keamanan (Rp842,66 miliar). Tingginya alokasi untuk fungsi ekonomi di wilayah Bali Nusa Tenggara sesuai dengan arah pengembangan wilayah, yaitu pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur.

Komposisi Belanja Pemerintah Pusat di regional Bali Nusa Tenggara tahun 2017 dan 2018 mengindikasikan bahwa sebagian besar belanja masih berfokus pada kegiatan bersifat rutin dan operasional, antara lain untuk belanja gaji, belanja operasional, belanja swakelola (non fisik) untuk mendukung tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

Sejalan dengan peningkatan pengalokasian pada fungsi ekonomi, Pemerintah Pusat terus berupaya meningkatkan alokasi belanja

TABEL 41. REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI REGIONAL BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pelayanan Umum	1.706,41	1.292,94	75,8%	3.427,82	2.903,01	84,7%
Pertahanan	1.774,35	1.749,15	98,6%	2.047,96	2.022,62	98,8%
Ketertiban Dan Keamanan	4.476,59	4.440,06	99,2%	5.319,25	5.193,68	97,6%
Ekonomi	9.277,45	8.442,77	91,0%	9.488,78	8.894,04	93,7%
Lingkungan Hidup	912,36	722,47	79,2%	986,12	854,05	86,6%
Perumahan Dan Fasilitas Umum	1.230,70	1.160,80	94,3%	1.537,46	1.459,92	95,0%
Kesehatan	1.352,66	1.272,21	94,1%	1.728,92	1.552,23	89,8%
Pariwisata Dan Budaya	5,08	4,95	97,6%	8,47	7,72	91,2%
Agama	474,38	425,57	89,7%	488,53	456,63	93,5%
Pendidikan	5.647,61	5.122,97	90,7%	5.796,34	5.167,34	89,1%
Perlindungan Sosial	88,58	86,00	97,1%	105,29	101,26	96,2%
Total	**26.946,16**	**24.719,91**	**91,7%**	**30.934,95**	**28.612,50**	**92,5%**

Sumber: DJPb (diolah)

TABEL 42. REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA REGIONAL BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	9.293,10	8.966,60	96,5%	10.100,93	9.699,00	96,0%
Belanja Barang	10.037,90	8.756,68	87,2%	13.114,69	11.699,74	89,2%
Belanja Modal	7.506,78	6.898,01	91,9%	7.667,85	7.164,26	93,4%
Belanja Bantuan Sosial	108,37	98,62	91,0%	51,49	49,50	96,1%
Total	**26.946,16**	**24.719,91**	**91,7%**	**30.934,95**	**28.612,50**	**92,5%**

Sumber: DJPb (diolah)

modal. Penyerapan belanja modal pada Tahun Anggaran 2018 juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan pada Tahun Anggaran 2017. Hal tersebut merupakan sinyal positif bagi peningkatan peran pemerintah pusat dalam membangun infrastruktur di daerah dan hal tersebut tentunya akan memberikan *multiplier effect* terhadap pertumbuhan ekonomi ekonomi regional.

Regional Bali Nusa Tenggara pada Tahun Anggaran 2018 menerima alokasi transfer ke daerah dan dana desa dari Pemerintah Pusat meningkat sebesar 46,6% dibanding Tahun Anggaran 2017. Unsur Dana Alokasi Umum memiliki porsi terbesar terhadap peningkatan transfer ke daerah. Sementara itu, untuk unsur alokasi Dana Bagi Hasil mengalami penurunan sebesar 34,8%. Peningkatan alokasi Dana Desa yang tinggi memberikan kesempatan bagi wilayah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur untuk mengoptimalkan penggunaannya dalam rangka mengentaskan kemiskinan masyarakat yang teridentifikasi memiliki tingkat kemiskinan di atas tingkat kemiskinan nasional.

Secara keseluruhan bahwa tingkat penyerapan transfer ke daerah dan dana desa pada regional Bali Nusa Tenggara Tahun Anggaran 2018 menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun Anggaran 2017. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pada regional Bali Nusa Tenggara.

TABEL 43. REALISASI TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA REGIONAL BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Dana Bagi Hasil	2.947,38	2.037,67	69,1%	1.920,36	1.850,05	96,3%
Dana Alokasi Umum	15.621,62	15.622,58	100,0%	29.135,30	29.138,30	100,0%
Dana Alokasi Khusus Fisik	6.367,02	5.640,16	88,6%	8.808,65	8.321,93	94,5%
Dana Otsus,Keistimewaan DIY,DID	455,76	455,92	100,0%	750,75	750,75	100,0%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	4.437,85	4.187,42	94,4%	4.585,91	4.429,27	96,6%
Dana Desa	3.762,63	3.757,67	99,9%	4.060,01	4.058,62	100,0%
Total	**33.592,26**	**31.701,42**	**94,4%**	**49.260,99**	**48.548,91**	**98,6%**

Sumber: DJPb (diolah)

3.III. BADAN LAYANAN UMUM

Pada tahun 2018, tidak terdapat penambahan Satker BLU di regional Bali Nusa Tenggara sehingga jumlah keseluruhan BLU tetap sepuluh. Dari sepuluh BLU di regional Bali Nusa Tenggara, empat merupakan BLU Kesehatan dan enam lainnya merupakan BLU Pendidikan.

GAMBAR 84. JUMLAH SATKER BLU MENURUT LAYANAN REGIONAL BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2017-2018

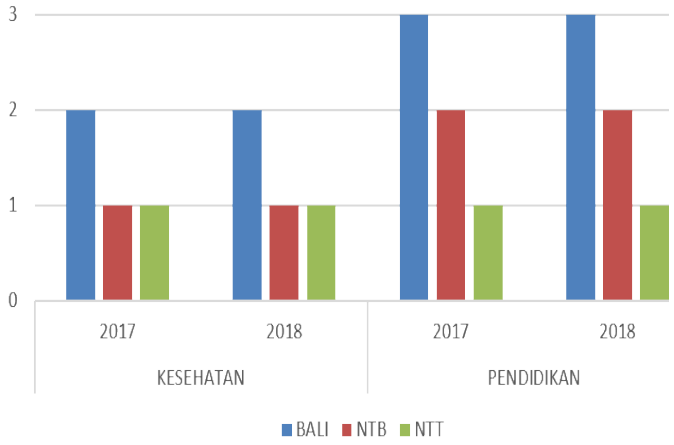

Sumber: DJPb (diolah)

Berdasarkan lokasinya, lima BLU berada di Provinsi Bali, tiga di Provinsi NTB, dan dua di Provinsi NTT. Penerapan pola pengelolaan keuangan (PPK) BLU pada Satker memberikan fleksibilitas keuangan sehingga diharapkan layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat ditingkatkan.

Di tahun 2018, porsi belanja Satker BLU yang dibiayai dari PNBP mengalami penurunan yang mengindikasikan adanya penurunan tingkat kemandirian BLU. Penurunan tingkat kemandirian Satker BLU di regional Bali Nusa Tenggara didorong karena adanya penambahan jumlah Satker BLU dari tahun 2014 ke tahun 2018. Satker BLU dikatakan mandiri bila 65% anggaran belanjanya dibiayai oleh PNBP yang dikelolanya dan 35% dari sumber dana Rupiah Murni.

4. PELAKSANAAN APBD

Jika dibandingkan antara target pendapatan daerah dengan pagu belanja daerah pada APBD pemerintah daerah di Bali Nusa Tenggara menunjukkan bahwa belanja lebih besar daripada pendapatan, hal tersebut menyebabkan defisit APBD yang harus ditutup dengan pembiayaan. Kebijakan defisit bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara umum, realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah pada tahun 2018 lebih rendah dibandingkan tahun 2017 baik secara persentase maupun secara nominal.

GAMBAR 85. TINGKAT KEMANDIRIAN SATKER BLU MENURUT REALISASI BELANJA REGIONAL BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2014 – 2018

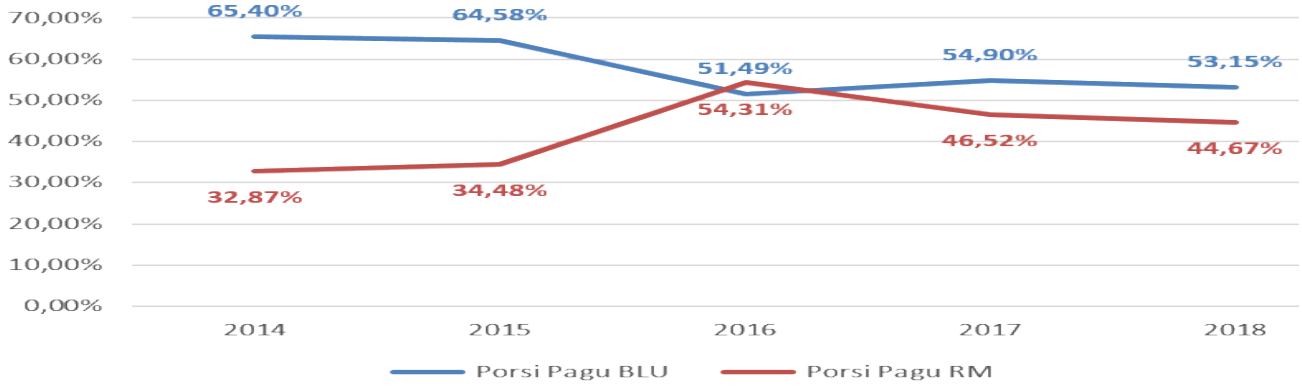

Sumber: DJPb (diolah)

TABEL 44. REALISASI APBD BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH) PER APRIL 2019

URAIAN	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan						
PAD	17.793,86	17.616,58	99,0%	18.149,83	16.809,73	92,6%
Pendapatan Transfer	43.675,74	48.005,69	109,9%	44.760,59	47.772,09	106,7%
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	7.771,01	771,16	9,9%	9.340,10	1.409,13	15,1%
Jumlah Pendapatan	**69.240,61**	**66.393,43**	**95,9%**	**72.250,52**	**65.990,95**	**91,3%**
Belanja						
Belanja Pegawai	23.583,08	23.109,56	98,0%	27.460,76	24.879,25	90,6%
Belanja Barang	15.491,74	15.981,82	103,2%	17.423,47	15.299,37	87,8%
Belanja Modal	13.642,56	13.504,46	99,0%	13.677,23	11.565,61	84,6%
Belanja Lainnya	16.919,34	14.770,40	87,3%	17.550,24	15.008,22	85,5%
Jumlah Belanja	**69.636,71**	**67.366,24**	**96,7%**	**76.111,70**	**66.752,45**	**87,7%**
Surplus/Defisit	*(396,10)*	*(972,81)*	*245,6%*	*(3.861,18)*	*(761,50)*	*19,7%*

Sumber: DJPb dan DJPK (diolah)

Pada sisi pendapatan, kemampuan daerah dalam mengumpulkan PAD mengalami penurunan. Hal ini merupakan indikasi kemandirian fiskal daerah yang menurun dari tahun sebelumnya. Pendapatan transfer yang merupakan komponen utama pendapatan daerah masih tetap tinggi dan nilainya semakin meningkat sejalan dengan komitmen pemerintah dalam desentralisasi fiskal. Pada tahun 2018 terjadi lain-lain pendapatan daerah yang sah meskipun realisasinya masih jauh di bawah target yang telah ditentukan. Pada sisi Belanja, realisasi belanja mengalami peningkatan dan penurunan dengan perubahan yang tidak terlalu signifikan. Peningkatan belanja secara nominal terdapat pada pos belanja pegawai.

4.I. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Asli Daerah secara persentase maupun nominal pada tahun 2018 menga lami penurunan dibandingkan tahun 2017. Penurunan terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), sedangkan Bali mengalami kenaikan. Penurunan tersebut didorong oleh menurunnya jumlah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Provinsi NTB (Rp254,25 miliar) dan jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah di Provinsi NTT (Rp801,75 miliar). Penerimaan pajak daerah meningkat di seluruh provinsi dalam regional Bali Nusa Tenggara dengan peningkatan yang signifikan di provinsi Bali sebesar Rp812,65 miliar.

Pendapatan transfer juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017 secara persentase maupun nominal pada tahun 2018. Penurunan terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), sedangkan Bali mengalami kenaikan. Peningkatan pendapatan transfer di Bali didorong oleh kenaikan Jumlah Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yang cukup signifikan (Rp692,72 miliar). Sedangkan Penurunan di NTB disebabkan turunnya jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dan jumlah Transfer Pemerintah

Pusat-Lainnya yang sangat signifikan (Rp726,41 miliar). Provinsi NTT hanya mengalami penurunan pendapatan transfer sebesar Rp17,08 miliar.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017. Peningkatan terjadi di seluruh provinsi di regional Bali Nusa Tenggara. Kenaikan signifikan terdapat pada pos pendapatan hibah sebesar Rp380,84 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 0,6% yang didorong oleh penurunan Pendapatan Asli Daerah (4,6%), penurunan Pendapatan Transfer (0,5%), dan peningkatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah (82,7%). Dibandingkan tahun 2017, terjadi peningkatan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dari 72,3% menjadi 72,4% yang didorong oleh peningkatan kontribusi PAD di Provinsi Bali dan NTT.

4.II. BELANJA DAERAH

Realisasi anggaran di regional Bali Nusa Tenggara pada tahun 2018 secara total lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yaitu dari sebelumnya 96,7% menjadi 87,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyerapan anggaran mengalami penurunan. Dari total Rp76,11 triliun alokasi belanja pada APBD di Regional Bali Nusa Tenggara pada tahun 2018, lebih dari sepertiganya (36,1%) dialokasikan untuk Belanja Pegawai, sekitar 22,9% yang dialokasikan untuk Belanja Barang dan 18% untuk Belanja Modal sedangkan sisanya sekitar 23% untuk Belanja Lainnya.

Dari sisi pengeluaran, perkembangan struktur belanja tahun 2018 tidak menunjukkan kinerja yang membaik dengan indikasi terjadinya penurunan proporsi realisasi belanja modal terhadap nilai total belanja menjadi sebesar 17,3% yang semula pada TA 2017 sebesar 20,0%.

Di Provinsi Bali, penurunan realisasi belanja secara umum disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran pada Tahun 2018, yang disebabkan karena hasil perhitungan SiLPA 2017 diperkirakan tidak dapat ditutupi dari SiLPA sehingga dilakukan penghematan belanja. Sedangkan di Provinsi NTT, Belanja yang bersifat operasional masih merupakan mendapat alokasi signifikan, bahkan belanja pegawai masih mendapat alokasi tertinggi. Kondisi ini mengakibatkan ruang Pemda untuk mengalokasikan belanja modal bagi percepatan pembangunan masih sangat terbatas.

5. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL

Sektor pertanian dan pariwisata menjadi sektor unggulan dari regional Bali Nusa Tenggara. Berdasarkan PDRB Bali Nusa Tenggara dari sisi penawaran, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memiliki kontribusi terbesar (18%).

5.I. PERTANIAN

Pada regional Bali Nusa Tenggara, sektor pertanian merupakan sektor terbesar dengan kontribusi pada PDRB masing-masing Provinsi Bali, NTB dan NTT berturut-turut dengan nilai 13,8%, 24,6%, dan 28,4%. Komoditas terbesar

yang dihasilkan dari sektor pertanian adalah padi dan jagung.

5.I.A. BALI

Tantangan untuk tidak menggantungkan sepenuhnya ekonomi Bali terhadap sektor pariwisata semakin dirasakan oleh masyarakat Bali. Salah satu yang mendasarinya adalah erupsi Gunung Agung yang membuat terpuruknya pariwisata di Bali. Walaupun dari sudut pandang kontribusi PDRB yang diberikan, potensi dari sektor pertanian masih kalah dibandingkan dengan kontribusi yang berasal dari potensi sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Berdasarkan data yang dilansir oleh Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Provinsi Bali, lahan persawahan di Pulau Bali mengalami penurunan luasan bahkan hingga 2.539 ha untuk periode tahun 2013 hingga 2017. Tingkat penurunan tertinggi adalah pada tahun 2017 yang mencapai 900 ha sawah, dan daerah yang mengalami penurunan areal sawah terbesar adalah Kabupaten Tabanan hingga mencapai 1.095 ha. Lebih lanjut diketahui bahwa penurunan luasan disebabkan adanya pengalihan fungsi lahan persawahan di Bali menjadi areal pemukiman, hotel, retoran, serta pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, maupun pelabuhan. Dan pengalihan yang terbesar adalah untuk kebutuhan pemukiman penduduk.

Upaya Pemda Bali dalam meningkatkan produksi sektor pertanian dan perkebunan di Bali dengan melaksanakan kegiatan peningkatan indeks pertanaman (IP) dengan cara perbaikan jaringan irigasi, percepatan pengolahan tanah dan tanam dan pemilihan varietas umur pendek. Pemda juga melaksanakan kegiatan peningkatan produktivitas dengan cara penggunaan varietas hibrida, penanaman dengan sistem jarwo dan sri, pemupukan berimbang, pengamanan standing crop, pengamanan hasil selain peningkatan kapasitas SDM pegawai dan petani.

Pemerintah Pusat juga bersinergi dengan Pemerintah Daerah dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus di bidang pertanian secara merata di seluruh kabupaten/kota di Bali. Terkecuali Tabanan yang menerima porsi DAK terbesar untuk mendukung daerah ini agar menjadi pusat lumbung padinya Bali.

5.I.B. NUSA TENGGARA BARAT

Sedangkan di Provinsi NTB, Sektor Pertanian masih menjadi salah satu pemicu pertumbuhan ekonomi dengan tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan bijih logam/konsentrat. Pada Tahun 2018, Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih mampu tumbuh sebesar 0,36 poin dan memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Provinsi NTB yaitu mencapai 23,40%. Namun demikian, capaian tersebut masih lebih rendah dibandingkan Tahun 2017 yang tumbuh sebesar 1,35 poin.

Pemerintah pusat melalui APBN telah berhasil menyelesaikan proyek bendungan Tanju dan bendungan Mila (Rababaka Kompleks) di Kabupaten Dompu. Diharapkan dengan

adanya bendungan tersebut dapat menjadi sumber irigasi bagi masyarakat sekitar dan dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Dengan demikian, saat ini NTB memiliki 9 bendungan dan masih 2 bendungan lain yang masih dalam tahap pembangunan.

5.I.C. NUSA TENGGARA TIMUR

Subsektor tanaman pangan juga memiliki potensi dan keunggulan untuk dapat dikembangkan secara optimal. Berdasarkan data kapasitas ketersediaan domestik, provinsi Nusa Tenggara Timur, provinsi ini memiliki surplus atas komoditas jagung sebesar 489 ribu ton dan ubi kayu sebesar 431 ribu ton, namun demikian untuk jenis komoditas beras yang menjadi makanan pokok masyarakat masih harus mendatangkan dari luar NTT dikarenakan masih mengalami defisit sebesar 178 ribu ton.

Berdasarkan data peranan subsektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2013 s.d 2017 menunjukkan bahwa dalam dua tahun terakhir subsektor peternakan mampu menggeser dominasi sektor tanaman pangan. Data tahun 2017, populasi hewan ternak di Wilayah Nusa Tenggara Timur sudah mulai diperhitungkan produktivitasnya secara nasional. Jumlah populasi Babi, Kuda, Kerbau dan Sapi di NTT sudah masuk dalam jajaran 5 besar nasional. Untuk populasi hewan ternak babi, 23% populasi nasional ada di wilayah NTT dengan jumlah 1,8 Juta ekor dan menjadi yang terbanyak secara nasional

5.II. PARIWISATA

Regional Bali Nusa Tenggara merupakan wilayah yang sudah terkenal akan daerah-daerah wisatanya tidak hanya terkenal di dalam negeri tetapi sampai ke manca negara. Keindahan alam dan budaya yang masih terus dipelihara oleh masyarakat adat setempat menjadi keunggulan tersendiri yang dapat menarik minat wisatawan. Pariwisata sudah sangat berkembang di regional Bali Nusa Tenggara adalah wisata pantai, gunung, dan budaya.

Untuk wilayah Bali, perkembangan sektor pariwisata sudah baik, namun untuk daerah NTB dan NTT masih belum optimal. Peningkatan sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar baik secara langsung maupun tidak seperti peningkatan penginapan, restoran, tempat makan, akses jalan, dan permintaan kerajinan tangan. Meningkatnya permintaan tersebut dapat meningkatkan permintaan tenaga kerja. Sebagai upaya peningkatan sektor pariwisata, Pemerintah terus mempromosikan NTB dan NTT sebagai tujuan wisata salah satunya yakni Mandalika (NTB) dan Labuan Bajo (NTT).

5.II.A. BALI

BPS Bali merilis data bahwa sejak tahun 2008 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali terus meningkat rata-rata 2% setiap tahun, dan mencapai 6,1 juta orang pada tahun 2018. Jumlah tersebut sedikit lebih rendah dari target yang ditetapkan pemerintah daerah yaitu sebesar 7 juta. Akan tetapi jumlah tersebut telah mengambil porsi mencapai 40% dari jumlah seluruh wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia.

Demikian pula dengan wisatawan domestik. Jumlahnya terus mengalami peningkatan bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara, rata-rata 14% setiap tahun.

5.II.B. NUSA TENGGARA BARAT

Alokasi baik APBN maupun APBD bagi sektor Pariwisata di NTB masih terbilang kecil, dimana untuk APBN melalui Program Pengembangan Kepariwisataan di Tahun 2018 sebesar Rp2,50 Miliar, meningkat 46,51% dibandingkan tahun sebelumnya. Jika diukur dari tingkat penyerapannya, pada Tahun 2018 hanya mampu mencapai 81,84% (Rp2,05 Miliar) dibandingkan dengan Tahun 2017 sebesar 98,01% sebagaimana ditunjukkan dalam grafik di bawah. Dengan terjadinya bencana gempa bumi, mengakibatkan beberapa program tidak dapat diselenggarakan.

Sementara, dari realisasi APBD Provinsi NTB Tahun 2018 Fungsi Pariwisata, pada Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp26,18 Miliar, lebih kecil dibandingkan Tahun 2017 yang mencapai Rp39,82 Miliar. Realisasi tersebut digunakan untuk Program Pelaksanaan Promosi Pariwisatan Nusantara di Dalam dan Luar Negeri dan Peningkatan Pembangunan Saranan dan Prasarana Wisata. Hal tersebut dalam rangka untuk meyakinkan kembali kepada para wisatawan bahwa kondisi di Lombok telah pulih pasca terjadinya bencana gempa.

6. TANTANGAN FISKAL REGIONAL

6.I. TEKNOLOGI PERTANIAN

Potensi produksi dari sektor pertanian yang masih dapat terus tumbuh perlu didukung dengan peningkatan teknologi pertanian. Peningkatan teknologi pertanian dapat menciptakan efisiensi penggunaan sumber daya. Teknologi pertanian perlu dikembangkan ke arah teknologi yang ramah lingkungan. Saat ini kebanyakan pertanian yang ada banyak menggunakan bahan kimia yang kurang ramah terhadap lingkungan. Penggunaan teknologi yang tidak tepat pada jangka panjang dapat menyebabkan kesuburan lahan pertanian menjadi berkurang yang akan berdampak pada hasil produksi pertanian. Teknologi pertanian tidak hanya perlu ditingkatkan di sisi input tetapi juga dari sisi output yakni teknologi pengelohan hasil pertanian, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.

6.II. PENDIDIKAN MANUSIA

Dalam upaya Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di regional Bali Nusra, khususnya sektor pertanian dan pariwisata, peningkatan pendidikan manusia perlu terus diupayakan. Pendidikan sumber daya manusia yang memadai akan menciptakan peluang usaha dan inovasi-inovasi yang dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke NTT dan NTB. Kondisi yang ada saat ini, Indeks Pembangunan Manusia di NTB dan NTT masih rendah (peringkat 29 dan 32 nasional).

6.III. INFRASTRUKTUR DAN SARANA TRANSPORTASI

Infrastruktur perlu terus dikembangkan sehingga dapat mendukung dan menggerakan perekonomian masyarakat di sektor pariwisata. Tidak hanya sektor pariwisata,

sektor pertanian pun membutuhkan infrastruktur dan sarana transportasi yang memadai untuk mengangkut produksi pertaniannya. Dengan infrastruktur dan sarana transportasi yang memadai maka akan mengurangi ekonomi biaya tinggi sehingga para petani memiliki selisih hasil penjualan dengan pengeluaran yang cukup untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, masing-masing Provinsi memiliki permasalahan yang perlu diatasi seperti dampak bencana alam di NTB, kemacetan di wilayah Bali Selatan, kurangnya konektivitas destinasi wisata di Bali, NTB dan NTT.

7. SOLUSI FISKAL REGIONAL

Solusi yang dapat diberikan atas tantangan fiskal regional tersebut di atas dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, APBN, APBD, dan sektor unggulan di regional Bali Nusra di antaranya sebagai berikut:

Pertama, terkait sektor pertanian, Pemerintah daerah perlu mengembangkan regulasi, infrastruktur, dan kebijakan affirmasi bidang pertanian yang mendukung pariwisata (seperti industri agrowisata, penggunaan produk pertanian dan peternakan lokal) dan industri kreatif (seperti: usaha kuliner, barang souvenir dan usaha rintisan digital). Selain hal tersebut, peningkatan sektor pertanian dan peternakan dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur pendukung, menjamin ketersediaan input, penguatan jejaring pasar, serta kerjasama dan keberpihakan terhadap sektor UMKM.

Kedua, terkait sektor pariwisata, Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan ke Pemerintah Pusat untuk melakukan revisi UU No. 33 Tahun 2004 agar pendapatan daerah yang berasal dari dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tidak hanya fokus terhadap potensi daerah yang memiliki sumber daya alam dan jumlah penduduk miskin, tetapi juga memperhatikan potensi daerah pariwisata yang saat ini menjadi ujung tombak pertumbuhan ekonomi. Pemerintah daerah juga perlu melakukan usaha nyata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara pemetaan potensi dan pajak dan retribusi daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, dan retribusi parkir dan tempat wisata.

Ketiga, terkait infrastruktur dan sarana transportasi, diperlukan pembangunan berkelanjutan infrastruktur khususnya masalah konektivitas untuk mengurangi adanya kesenjangan antara wilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur koneksivitas, penambahan rute dan frekuensi penerbangan, serta penambahan kapasitas bandara dan pelabuhan dapat menarik wisatawan yang lebih banyak untuk berkunjung ke destinasi wisata di regional Bali Nusa Tenggara untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

8. FISKAL REGIONAL TAHUN 2019

Peran Pemerintah sangat diperlukan dalam mengatur ekonomi. Salah satu peran pemerintah dalam mengatur perekonomian adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal dengan mengalokasikan pengeluaran

pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat.

Regional Bali Nusra yang selama ini identik dengan sektor pariwisata masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Sektor ini menyumbang 12,71% nilai nominal PDRB wilayah Bali Nusra, dengan rata-rata pertumbuhan 9,24% per tahun sejak 2010. Namun data APBN menunjukkan, sektor penyumbang PDRB terbesar kedua setelah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ini selama TA. 2018 hanya mendapat alokasi sebesar Rp7,7 Milyar atau 0,03% dari keseluruhan pagu APBN yang dialokasikan untuk regional Bali Nusra. Disinilah dibutuhkan komitmen kuat dari pihak pemerintah dan swasta untuk lebih menggerakkan pertumbuhan ekonomi di sektor ini. Pemda diharapkan lebih berperan aktif untuk menarik investasi dari pihak swasta dan tidak menggantungkan pendanaan dari APBN. Terutama di Provinsi NTB, pertumbuhan ekonomi di sektor ini diharapkan mampu menggeser dominasi sektor pertambangan yang selama beberapa tahun terakhir mencatatkan pertumbuhan minus.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Fiskal Regional Sulawesi

Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi pada tahun 2018 sebesar 6,65% atau berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional (5,17%). Aktivitas ekonomi sebagian besar ditopang oleh konsumsi rumah tangga (29,19%) dan PMTB (22,09%). Namun demikian, dibanding tahun 2017 laju pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi tahun 2018 melambat sebesar 0,34%. Perlambatan perekonomian regional Sulawesi tersebut terjadi pada tingkat inflasi regional Sulawesi tahun 2018 yang naik cukup signifikan di atas tingkat inflasi nasional pada tahun 2018, kecuali tingkat inflasi pada Provinsi Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo. Selaras dengan kondisi perekonomian tahun 2018, IPM seluruh provinsi regional Sulawesi meningkat dibanding tahun 2017, walaupun hanya Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki IPM di atas IPM nasional. Demikian pula dengan persentase penduduk miskin dan TPT relatif menurun dibanding tahun sebelumnya, kecuali persentase penduduk miskin pada Provinsi Sulawesi Barat. Perkembangan rasio Gini regional Sulawesi bervariatif dan cenderung menurun dibanding tahun 2017, kecuali Provinsi Sulawesi Barat dan Gorontalo yang naik sebesar 0,01-0,02.

Kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2018 di regional Sulawesi mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017. Realisasi pendapatan negara masih jauh dari target pendapatan yaitu hanya mencapai 63,84%. Rendahnya realisasi pendapatan tersebut disebabkan oleh rendahnya pencapaian penerimaan pajak yang hanya sebesar 59,86% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp23,219 triliun. Kinerja realisasi pelaksanaan anggaran pemerintah pusat tahun 2018 menurut jenis belanja menunjukkan bahwa belanja pegawai dan belanja bantuan sosial memiliki tingkat penyerapan tertinggi yaitu masing-masing sebesar 97,10% dan 99,06%. Adapun realisasi belanja barang dan belanja modal masih berada pada angka di bawah 92% dari pagu yang ditetapkan. Realisasi pendapatan APBD regional Sulawesi pada tahun 2018 sebesar Rp76,778 triliun, turun 18,37% dari tahun sebelumnya sebesar Rp94,054 triliun. Kenaikan realisasi pendapatan terbesar dikontribusikan oleh kenaikan Pendapatan Asli Daerah yang mencapai 3,6% dari pendapatan tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat realisasi belanja daerah (APBD) pada regional Sulawesi sebesar 91,2% dari total pagu Rp84,182 triliun. Secara nominal realisasi tersebut menurun sebesar Rp17,276 triliun dan tingkat penyerapan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat realisasi belanja pemerintah daerah (APBD) tahun 2017 sebesar 86,24%,.

1. MAKROEKONOMI REGIONAL SULAWESI

1.I. PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi tahun 2018 mencapai 6,65% atau berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional (5,17%). Akan tetapi, angka tersebut menunjukkan perlambatan 0,34% dibandingkan dengan tahun 2017 yang mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 6,99%. Terlihat jelas dalam data statistik pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi. Pada tahun 2018, seluruh Provinsi di regional Sulawesi mengalami perlambatan petumbuhan ekonomi yang beragam. Diawali dari Provinsi Sulawesi Utara mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,31%, berlanjut ke Provinsi Gorontalo mengalami perlambatan sebesar 0,23%, Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 0,84%, Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,39%, Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,44%, dan diakhiri dengan Provinsi Sulawesi Selatan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,16% sebagai akibat dari menguatnya permintaan domestik yang mengakibatkan tingginya kenaikan impor, menurunnya kinerja lapangan usaha pertanian yang disebabkan oleh gagalnya panen tabama sehingga pendapatan masyarakat menurun, serta bencana alam (gempa) yang memengaruhi penurunan lapangan usaha industri pengolahan region Sulawesi.

Permintaan untuk konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Sulawesi pada tahun 2018 yaitu sebesar 29,19% yang mana laju pertumbuhannya menurun dibanding tahun sebelumnya. Dan berada di posisi berikutnya adalah komponen investasi Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto yang memiliki komponen terbesar kedua dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di regional Sulawesi. Disisi lain, dengan adanya permintaan yang besar dari rumah tangga tersebut maka akan mempengaruhi permintaan Ekspor serta Impor Barang dan Jasa Netto yang masing-masing berkontribusi sebesar 18,27% dan 19,75%. Komposisi ini tidak jauh berbeda dengan komposisi permintaan secara nasional.

Dibandingkan tahun 2017, konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, ekspor netto barang/jasa, dan impor barang/jasa

GAMBAR 86. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017 DAN 2018

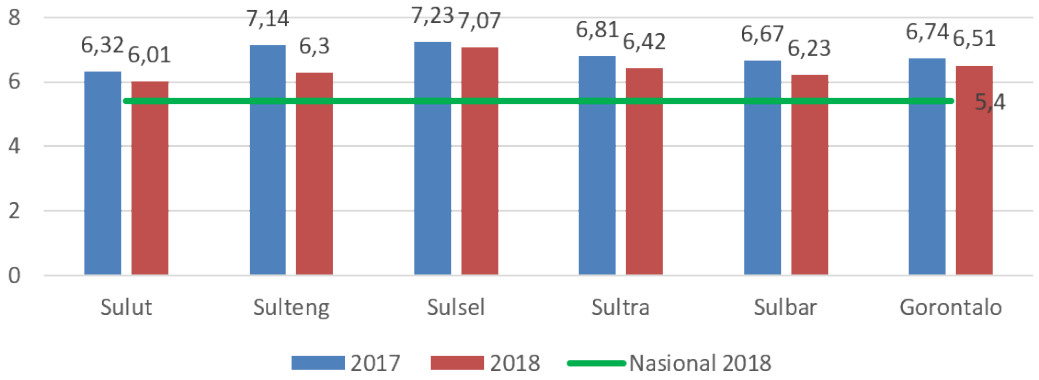

Sumber: BPS

GAMBAR 87. KOMPOSISI PDRB ADHB DARI SISI PERMINTAAN, REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018

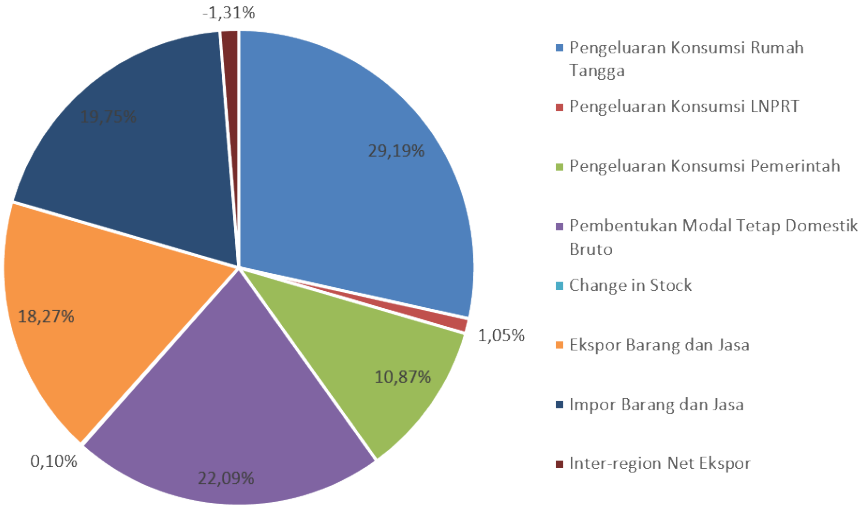

Sumber: BPS

mengalami percepatan laju pertumbuhan pada tahun 2018. Percepatan pertumbuhan tertinggi pada impor barang dan jasa yaitu sebesar 119,8%. Komoditas impor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan tersebut diantaranya adalah impor besi dan baja sebagai bahan baku industri stainless steel yang mengalami peningkatan sebesar 446,25% di Provinsi Sulawesi Tengah serta impor minuman, makanan olahan, pupuk, Kapal Laut, alat-alat mekanik, barang-barang jadi, barang industri, dan barang konsumsi di Provinsi Sulawesi Selatan.

TABEL 45. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI PERMINTAAN, REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017 - 2018

Uraian	2017	2018
Konsumsi Rumah Tangga	5,92%	7,86%
Konsumsi LNPRT	7,32%	1,50%
Konsumsi Pemerintah	3,66%	6,32%
PMTB	6,70%	2,70%
Change in Stock	3,96%	-24,98%
Ekspor Netto Barang/Jasa	30,39%	31,16%
Impor Barang dan Jasa	36,12%	119,80%
Inter-region Net Ekspor	3,97%	-114,61%

Sumber: BPS

Di sisi lain, Konsumsi Lembaga NonProfit Pelayan Rumah Tangga (LNPRT) dan investasi dalam bentuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami penurunan laju pertumbuhan. Khusus investasi dalam bentuk PMTB, penurunan tersebut sebagai akibat dari Penurunan aktivitas pembentukan kapital dan berakhirnya pembangunan PLTB Sidrap dan Jeneponto pada triwulan pertama tahun 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan serta pembangunan infrastruktur yang masih berjalan/terbatas berupa penyediaan sarana dan prasarana publik. Meskipun demikian, melalui komitmen pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur di daerah diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan pada periode berikutnya di regional Sulawesi.

Berdasarkan komposisi PDRB regional Sulawesi dari lapangan usaha pada tahun 2018, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (31,6%), sektor konstruksi (12,25%), dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (11,09%) menjadi sektor-sektor yang memberikan

GAMBAR 88. KOMPOSISI PDRB ADHB DARI SISI PENAWARAN, REGIONAL SULAWESI TAHUN 2018

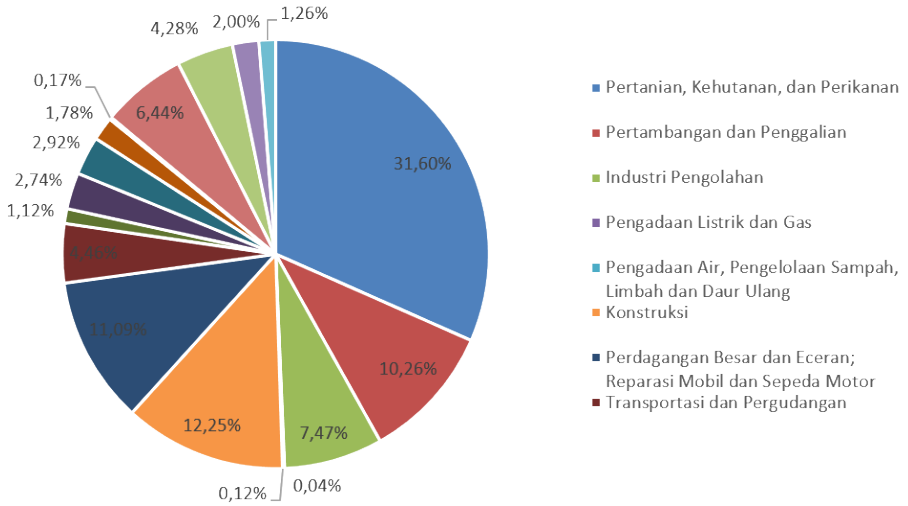

Sumber: BPS

kontribusi paling besar pada pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi. Tidak berbeda dengan tahun 2017, usaha pengadaan listrik dan gas masih merupakan sektor yang paling rendah kontribusinya pada tahun 2018 ini yaitu hanya sebesar 0,04%.

TABEL 46. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI PENAWARAN, REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017 DAN 2018

Uraian	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25,31%	17,99%
Pertambangan dan Penggalian	8,11%	5,51%
Industri Pengolahan	10,19%	13,93%
Pengadaan Listrik dan Gas	0,06%	0,10%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,32%	0,12%
Konstruksi	12,35%	12,98%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,29%	15,29%
Transportasi dan Pergudangan	5,16%	3,82%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,23%	1,54%
Informasi dan Komunikasi	3,91%	7,18%
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,29%	3,40%
Real Estate	2,61%	3,54%
Jasa Perusahaan	0,81%	0,46%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,51%	4,50%
Jasa Pendidikan	4,53%	6,05%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,99%	2,06%
Jasa lainnya	1,32%	1,53%

Sumber: BPS

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi tahun 2018 menyebar pada seluruh lapangan usaha. Penyebaran ini didukung oleh adanya potensi usaha yang berbeda-beda di tiap provinsi di regional Sulawesi. Di Sulawesi lapangan usaha dengan percepatan laju pertumbuhan tertinggi adalah sektor Industri Pengolahan yang mengalami peningkatan sebesar 3,74%. Pada tahun yang sama, lapangan usaha yang paling mengalami perlambatan laju pertumbuhan adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang semula memiliki laju pertumbuhan sebesar 25,31% pada tahun 2017 menjadi 17,99% pada tahun 2018.

1.II. INFLASI

Tahun 2018 pada regional Sulawesi, inflasi tertinggi dialami oleh Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 6,46%, sedangkan inflasi terendah dialami oleh Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,80%. Sebanyak 50% provinsi pada regional Sulawesi memiliki tingkat inflasi lebih tinggi dari inflasi nasional (3,13%) sedangkan 50%

GAMBAR 89. TINGKAT INFLASI REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM %)

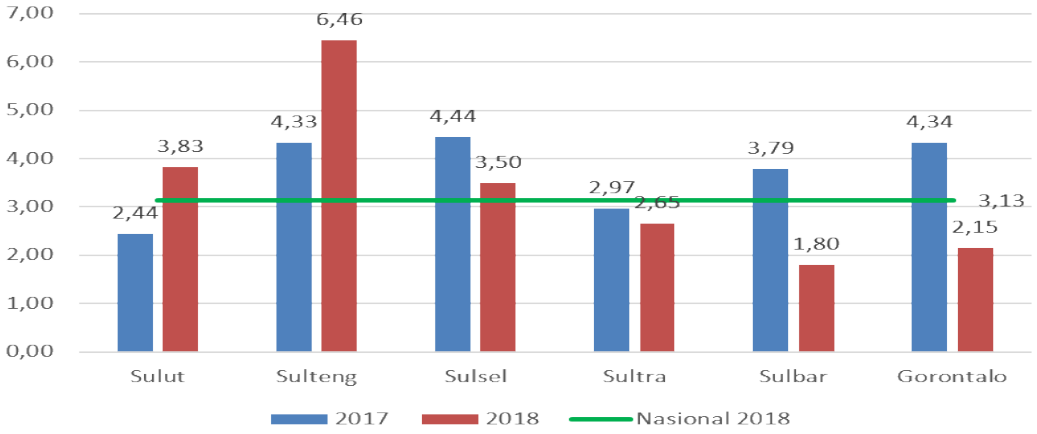

Sumber : BPS

lainnya memiliki tingkat inflasi yang sebaliknya. Sehingga, secara umum pada tahun 2018 hanya sebagian (50%) provinsi di Sulawesi yang mengalami peningkatan inflasi dibandingkan tahun 2017.

Kenaikan tingkat inflasi tertinggi dicapai oleh Provinsi Sulawesi Tengah dengan kenaikan inflasi sebesar 2,13%. Kenaikan tingkat inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh: (1) hari Raya Idul Fitri; (2) dampak dari adanya bencana alam berupa gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang melanda Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi; dan (3) banyaknya kerusakan yang dialami sejumlah sentra produksi dan banyaknya daerah yang terisolir sehingga akses makanan dan kebutuhan lainnya terbatas. Harga elpiji melon tercatat pernah mencapai Rp35.000,- hingga dari harga eceran tertinggi sebesar Rp16.500,-. Kemudian harga telur ayam Rp4.000,- perbutir dari harga normal sekitar Rp1.500,-. Makanan jadi dan lauk pauk menjadi komoditas menyumbang kenaikan sebesar 0,49%, tiket angkutan udara sebesar 0,41%, serta harga ikan dan semen sebesar 0,1%.

Hal sebaliknya terjadi pada Provinsi Gorontalo. Jika pada tahun 2017, Provinsi Gorontalo tercatat sebagai provinsi di region Sulawesi yang mengalami Kenaikan tingkat inflasi tertinggi, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan tingkat inflasi yang terbesar sebanyak -2,19%. Penurunan tingkat inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh penurunan harga bahan makanan pasca perayaan Idul Fitri yang mendorong penurunan inflasi *volatile food* seiring pasokan yang relatif terjaga.

2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

2.I. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Pembangunan manusia di regional Sulawesi selama periode 2013-2018 terus mengalami peningkatan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan kualitas manusia yang dilihat dari aspek kesehatan, pendidikan dan ekonomi di regional Sulawesi semakin membaik. Pada kurun 2013-2018 hanya Provinsi Sulawesi Utara yang secara konsisten mempunyai IPM lebih tinggi dari IPM nasional.

GAMBAR 90. IPM REGIONAL SULAWESI TAHUN 2013 - 2018

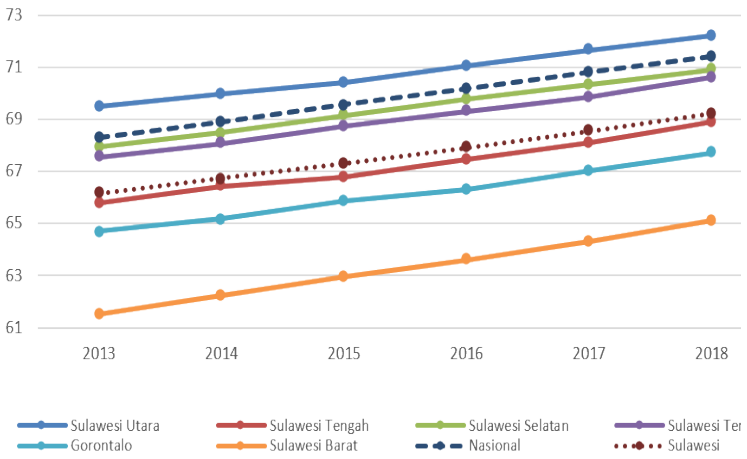

Sumber: BPS

Kenaikan IPM tahun 2018 dibandingkan tahun 2017 tertinggi dicapai oleh Provinsi Sulawesi Barat sebesar 0,80 poin. Kenaikan nilai IPM tersebut terutama dipengaruhi oleh (1) pertumbuhan pengeluaran perkapita masyarakat yang didorong oleh peningkatan kinerja pertanian sebagai dampak dari upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi dan ekspor jagung pipilan; dan (2) peningkatan kinerja pertanian oleh Pemerintah Daerah yang memberikan peningkatan pendapatan bagi masyarakat serta hasil dari efektifitas pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa sebagai stimulus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Namun demikian, angka harapan hidup di Provinsi Gorontalo menjadi variabel yang paling rendah laju pertumbuhannya. Dalam jangka waktu lima tahun tercatat pertumbuhan angka harapan hidup hanya mencapai 0,33%. Hal ini harus menjadi perhatian utama dari Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo untuk meningkatkan angka harapan hidup.

Adapun Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi paling muda yang memiliki IPM terendah di regional ini mengalami kenaikan IPM sebesar 0,80 poin. Sedangkan Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki IPM tertinggi mengalami peningkatan sebesar 0,54 poin. Perbedaan pencapaian IPM tertinggi dengan IPM terendah pada tahun 2017 sekitar 7,1 poin. Dibandingkan dengan perbedaan pencapaian IPM tahun 2013 yang sebesar 7,96 poin maka perbedaan pencapaian IPM tahun 2017 relatif lebih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa disparitas pembangunan manusia di tingkat provinsi pada regional Sulawesi relatif menurun..

2.II. RASIO GINI

Rasio Gini di regional Sulawesi kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2018 berfluktuasi. Pada tahun 2018, Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Gorontalo memiliki rasio Gini di atas rasio gini nasional (0,26). Dibandingkan tahun 2017, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami penurunan angka gini rasio dengan range penurunan sebesar 0,01-0,03. Penurunan gini rasio tersebut seiring dengan semakin meningkatnya IPM di keempat Provinsi tersebut pada tahun 2017 yang meningkat sebesar 0,55-0,64 poin dibandingkan tahun 2016. Hal tersebut mengindikasikan bahwa upaya pembangunan manusia berjalan secara merata di tiap daerah pada Provinsi Sulawesi Barat. Di sisi lain, meskipun terjadi percepatan pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Sulawesi Barat dan

GAMBAR 91. RASIO GINI REGIONAL SULAWESI TAHUN 2016 S.D. 2018

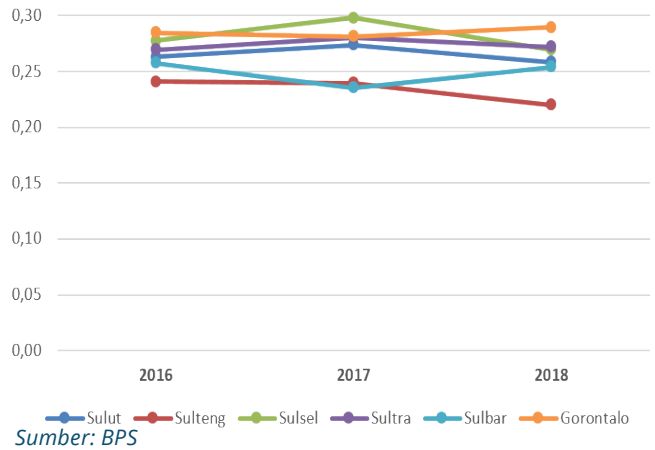

Sumber: BPS

Gorontalo, angka gini rasio pada kedua provinsi tersebut mengalami kenaikan yaitu masing-masing sebesar 0,7 dan 0,72. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pada tahun 2018 meski terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat dan Gorontalo, namun pertumbuhan tersebut belum terdistribusi secara merata.

2.III. KETENAGAKERJAAN

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2018 pada regional Sulawesi pada umumnya

GAMBAR 92. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM %)

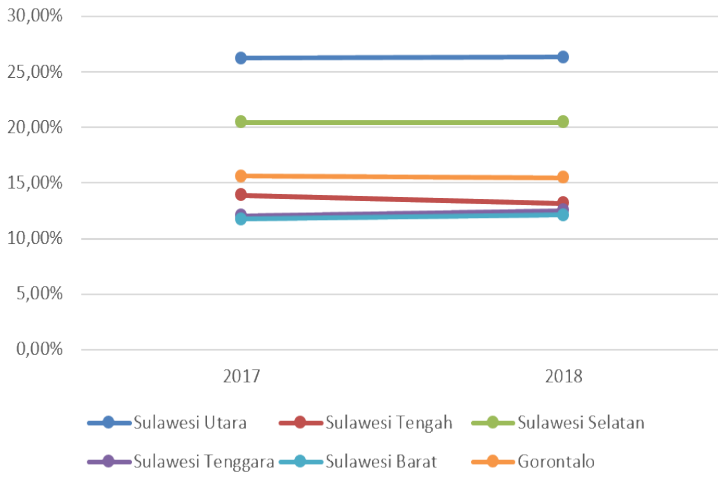

Sumber: BPS

lebih rendah daripada TPT nasional (5,34%), kecuali TPT provinsi Sulawesi Utara (6,86%). Adapun provinsi yang mencatatkan angka TPT paling rendah adalah Sulawesi Barat (3,16%). Dibandingkan tahun 2017, angka TPT tahun 2018 pada seluruh provinsi regional Sulawesi mengalami penurunan yang beragam yaitu berkisar antara 0,04%-0,38%. Penurunan angka TPT tersebut seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang bergerak positif. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan perekonomian di regional Sulawesi memiliki multiplier effect dalam membuka lapangan pekerjaan, sehingga mengurangi jumlah pengangguran terbuka.

Pada tahun 2018, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi di regional Sulawesi yang mengalami penurunan angka TPT tertinggi yaitu sebesar 0,38%. Penurunan tersebut sejalan dengan pertumbuhan PDRB sektor pertanian yang tumbuh dari 9,53% tahun 2017 menjadi 17,99% pada tahun 2018. Beberapa faktor ditengarai pendorong peningkatan tenaga kerja di sektor pertanian antara lain: (1) penyediaan lahan untuk pertanian; (2) produksi jagung meningkat; (3) naiknya Nilai Tukar Petani; dan (4) semakin meningkatnya bantuan pemerintah ke petani.

2.IV. KEMISKINAN

Hampir seluruh provinsi regional Sulawesi pada tahun 2018 memiliki persentase penduduk miskin di atas rata-rata nasional (9,66%), kecuali provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yang masing-masing sebesar 7,59% dan 8,87%. Persentase tersebut menunjukkan bahwa Sulawesi Utara

GAMBAR 93. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017 DAN 2018

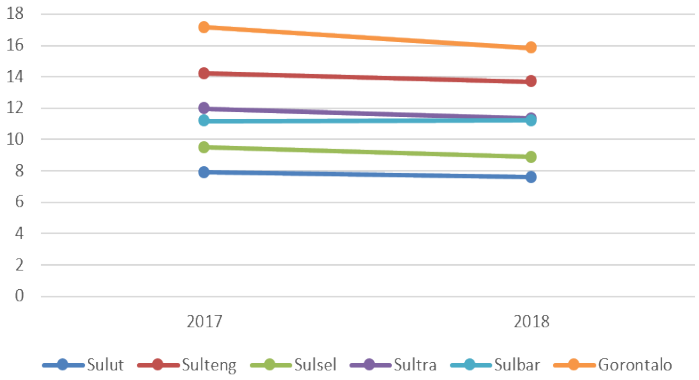

Sumber: BPS

merupakan provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di lingkup regional Sulawesi. Beberapa faktor yang ditengarai berperan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara diantaranya yaitu: (1) Kebijakan pengintegrasian program-program penanggulangan kemiskinan dari Pemerintah Pusat, yang antara lain berupa perbaikan basis data untuk targeting dan penyaluran non tunai melalui satu kartu, penyaluran PKH yang terintegrasi dengan bantuan lain untuk mendorong akumulasi aset/tabungan dan akses layanan lainnya, reformasi subsidi pangan dan energi tepat sasaran; dan optimalisasi penggunaan dana desa; (2) keberhasilan program Pemerintah Daerah "ODSK" Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara; dan (3) Tingkat inflasi yang stabil pada dua tahun terakhir, dimana Pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga, terutama pada komponen makanan.

Dibandingkan tahun 2017, persentase jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduk pada regional Sulawesi di tahun 2018 pada umumnya mengalami penurunan. Hampir seluruh provinsi di regional Sulawesi mengalami penurunan persentase jumlah penduduk miskin dibandingkan tahun sebelumnya, kecuali Provinsi Sulawesi Barat. Penurunan persentase jumlah penduduk miskin terbesar terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 0,65%. Penurunan tersebut selaras dengan semakin menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin terbukanya lapangan pekerjaan akan semakin mengurangi jumlah penduduk miskin pada suatu daerah.

Adapun kenaikan persentase penduduk miskin hanya terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dengan kenaikan persentase sebesar 0,04% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan persentase penduduk miskin ini seiring dengan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018 sebesar 0,44%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi dapat menjadi instrumen yang cukup berpengaruh untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

3. PELAKSANAAN APBN

Target penerimaan perpajakan tahun 2018 sebesar Rp23,219 triliun, turun dari tahun sebelumnya sebesar Rp35,144 triliun. Dari target tahun 2018 tersebut realisasi penerimaan hanya tercapai 59,86%, sehingga realisasi penerimaan perpajakan turun 40,14% dari target masing-masing tahun yang bersangkutan. Demikian juga halnya realisasi PNBP mengalami penurunan

TABEL 47. REALISASI APBN REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara						
Penerimaan Perpajakan	35.144,09	19.141,88	54,47	23.218,90	13.898,95	59,86%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.793,00	4.142,21	109,21	3.197,36	2.966,08	92,77%
Pendapatan Hibah	2,45	-	0,00	0,00	0,00	0,00%
Jumlah Pendapatan Negara	38.939,54	23.284,09	59,80	26.416,26	16.865,02	63,84%
Belanja Negara						
Belanja Pemerintah Pusat	42.285,92	37.984,61	89,83	56.434,17	38.113,52	67,54%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	92.383,06	85.409,77	92,45	90.178,17	87.590,50	97,13%
Jumlah Belanja Negara	134.668,98	123.394,38	91,63	146.612,34	125.704,02	85,74%

Sumber: DJPb dan DJPK (diolah)

7,23% dari masing-masing target tahun yang bersangkutan. Pada sisi belanja pemerintah pusat, pagu naik menjadi Rp56,434 triliun dari tahun sebelumnya Rp42,285 triliun. Tingkat realisasi anggaran mengalami penurunan menjadi 85,74% jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Melihat dari sisi fiskal, capaian realisasi PNBP Tahun Anggaran 2018 yang secara nominal tidak melebihi realisasi TA 2017 yaitu sebesar Rp2,966 triliun, ternyata tidak cukup membantu ruang gerak fiskal pemerintah pusat karena pemanfaatan PNBP tersebut hanya dapat digunakan dengan mengikuti ketentuan khusus dan tidak dapat digunakan sebagaimana penerimaan perpajakan.

TABEL 48. REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT BERDASARKAN FUNGSI REGIONAL SULAWESI TA 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

Uraian	2017	2018
AGAMA	1.131,35	759,54
EKONOMI	17.013,09	11.127,71
KESEHATAN	2.406,46	2.206,99
KETERTIBAN DAN KEAMANAN	7.098,08	4.441,63
LINGKUNGAN HIDUP	912,83	937,52
PARIWISATA DAN BUDAYA	8,92	67,35
PELAYANAN UMUM	21.310,96	14.258,99
PENDIDIKAN	8.801,51	8.206,91
PERLINDUNGAN SOSIAL	174,22	176,24
PERTAHANAN	3.397,28	3.950,83
PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	2.174,65	2.302,96
Real Estate	2,61%	3,54%
Jasa Perusahaan	0,81%	0,46%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,51%	4,50%
Jasa Pendidikan	4,53%	6,05%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,99%	2,06%
Jasa lainnya	1,32%	1,53%

Sumber : DJPb dan DJPK (diolah)

Persentase realisasi belanja negara secara akumulatif mengalami penurunan sebesar 5,89% dari 91,63% menjadi 85,74%. Namun demikian, realisasi dana transfer dan dana desa TA 2018 secara nominal memiliki realisasi lebih tinggi daripada TA 2017 sehingga persentase realisasinya mengalami peningkatan sebesar 4,68%. Adapun belanja pemerintah pusat, baik pagu maupun realisasinya semakin meningkat pada TA 2018 walaupun alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa semakin besar nominalnya.

Realisasi belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi pada regional Sulawesi tahun 2017 dan 2018 masih didominasi pengeluaran dalam rangka pelaksanaan fungsi pelayanan umum, ekonomi dan pendidikan. Tingginya realisasi anggaran pada ketiga fungsi

TABEL 49. REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	331.427,60	313.945,53	94,73%	17.022,80	16.528,38	97,10%
Belanja Barang	319.207,76	292.232,37	91,55%	24.086,30	22.018,56	91,42%
Belanja Modal	236.356,00	205.648,25	87,01%	15.446,92	13.473,28	87,22%
Belanja Bantuan Sosial	219.196,34	216.567,74	98,80%	88,99	88,15	99,06%
Total	**1.106.187,70**	**1.028.393,89**	**92,97%**	**56.645,01**	**52.108,37**	**91,99%**

Sumber: DJPb (diolah)

tersebut memang tidak lepas dari program pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan daya dukung infrastruktur dan amanat konstitusi untuk peningkatan anggaran bagi pendidikan. Besarnya alokasi fungsi Pelayanan Umum dikarenakan belanja pegawai (gaji) dibebankan pada fungsi tersebut, sedangkan fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan memperoleh proporsi anggaran yang relatif besar selaras dengan *Millenium Development Goal* yang target utamanya adalah memberantas kemiskinan dan penyediaan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat.

Fungsi pariwisata dan budaya serta fungsi perlindungan sosial merupakan fungsi dengan realisasi anggaran terkecil yaitu sebesar Rp67,35 miliar untuk fungsi pariwisata dan budaya, serta Rp176,24 miliar untuk fungsi perlindungan sosial. Melihat masih rendahnya tingkat realisasi anggaran pada fungsi pariwisata dan budaya, memperlihatkan bahwa pemerintah pusat belum menjadikan sektor pariwisata dan budaya menjadi salah satu lead sektor pada regional Sulawesi. Bentuk dukungan pemerintah tidak secara langsung pada fungsi pariwisata tersebut, namun pemerintah mendukung melalui program penyediaan infrastruktur untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka memajukan kepariwisataan kawasan.

Proporsi alokasi belanja pemerintah pusat di regional Sulawesi tahun 2018 menurut jenis belanja yaitu 30,05% untuk belanja pegawai, 42,52% untuk belanja barang, 27,27% untuk belanja modal dan 0,16% untuk belanja bantuan sosial. Komposisi tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar belanja berfokus pada belanja barang, antara lain untuk belanja barang operasional, belanja barang

TABEL 50. REALISASI BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Dana Bagi Hasil	6.354,16	3.099,48	48,78%	3.444,34	3.073,62	89,24%
Dana Alokasi Umum	53.992,58	53.992,58	100,00%	54.538,21	54.500,56	99,93%
Dana Alokasi Khusus	24.008,21	22.575,96	94,03%	23.875,64	22.956,29	96,15%
Dana Otsus, Dana Keistimewaan DIY, dan DID	932,82	932,82	100,00%	7.524,34	1.411,00	18,75%
Dana Desa	6.872,79	6.855,95	99,75%	6.845,67	6.838,36	99,89%
Jumlah	92.160,56	87.456,79	94,90%	96.228,20	88.779,83	92,26%
Total	**33.592,26**	**31.701,42**	**94,4%**	**49.260,99**	**48.548,91**	**98,6%**

Sumber: DJPb dan DJPK (diolah)

non operasional, belanja barang persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi. Tingkat realisasi seluruh jenis belanja pada tahun 2018 mengalami peningkatan kecuali belanja barang yang masing-masing peningkatannya sebesar 2,37%, 0,21%, dan 0,26% dibandingkan tahun 2017.

Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp4.067,64 miliar atau 4,41% dibandingkan tahun 2017. Alokasi terbesar berasal dari Dana Alokasi Umum yang mencapai 56,68% dari total alokasi anggaran tersebut. Dana Alokasi Umum tersebut pada umumnya digunakan Pemerintah Daerah untuk pembayaran belanja pegawai. Realisasi anggaran tahun 2018 untuk masing-masing jenis Transfer ke Daerah mencapai di atas 90% kecuali untuk Dana Bagi Hasil dan Dana Otsus, Dana Keistimewaan DIY, dan DID yang masing-masing memiliki tingkat penyerapan sebesar 89,24% dan 18,75%.

3.I. BADAN LAYANAN UMUM

Jumlah satker BLU di Sulawesi pada tahun 2018 sebanyak 25 satker yang terbagi dalam dua jenis layanan yaitu 8 satker untuk layanan kesehatan dan 17 satker untuk layanan pendidikan. BLU dengan layanan kesehatan diantaranya adalah Balai Kesehatan Mata Masyarakat Sulawesi Selatan, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Sulawesi Selatan, Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, Rumkit Bhayangkara Makassar, dan Rumah Sakit Umum Pusat Prof. DR.R.D.Kandou. Adapun BLU dengan layanan pendidikan diantaranya

GAMBAR 94. JUMLAH SATKER BLU MENURUT LAYANAN REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017 DAN 2018

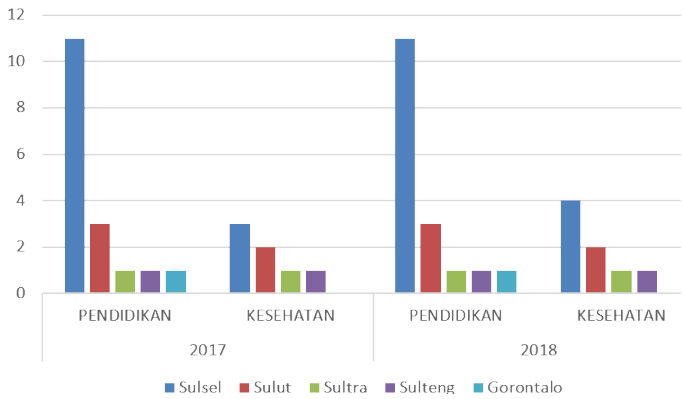

Sumber: DJPb

adalah Universitas Hasanuddin, Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar, Universitas Sam Ratulangi Manado, dan Universitas Tadulako.

4. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan APBD regional Sulawesi pada tahun 2018 sebesar Rp51,262 triliun, turun 51,47% dari tahun sebelumnya sebesar Rp105,62 triliun. Penurunan realisasi pendapatan terbesar dikontribusikan oleh penurunan pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang masing-masing mencapai 59,91% dan 79,51% dari pendapatan tahun sebelumnya. Apabila dilihat per komponen pendapatan, realisasi pendapatan pada TA 2018 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yang mencapai 68,58% dari total pendapatan, sedangkan PAD hanya mencapai 30,23% dan lain-lain pendapatan yang sah (L2PYS) sebesar 1,19% dari total pendapatan. Tingginya perbandingan antara pendapatan transfer terhadap total pendapatan yang mencapai 68,58% mengindikasikan ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi dan tidak

TABEL 51. REALISASI APBD REGIONAL SULAWESI TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan						
PAD	15.027,54	14.956,30	99,53	9.571,43	15.495,38	161,89
Pendapatan Transfer	79.255,34	87.678,31	110,63	35.475,38	35.154,29	99,09
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	11.429,97	2.987,63	26,14	1.022,12	612,07	59,88
Jumlah Pendapatan	**105.712,86**	**105.622,25**	**99,91**	**46.068,92**	**51.261,74**	**111,27**
Belanja						
Belanja Pegawai	43.071,61	37.323,08	86,65	16.034,39	14.991,24	93,49
Belanja Barang	22.194,42	23.784,43	107,16	10.270,24	9.986,62	97,24
Belanja Modal	23.585,14	24.193,11	102,58	9.590,68	8.203,72	85,54
Belanja Lainnya	20.211,26	8.752,98	43,31	48.287,12	43.596,23	90,29
Jumlah Belanja	**109.062,43**	**94.053,60**	**86,24**	**84.182,43**	**76.777,81**	**91,20**
Surplus/Defisit	-3.349,57	11.568,64		-38.113,51	-25.516,07	

Sumber: DJPb dan DJPK (diolah)

mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya dengan rasio sebesar 83,01%. Dari sisi kemandirian keuangan daerah dapat dilihat dengan membandingkan PAD terhadap pendapatan transfer. Pada tahun 2017 rasio kemandirian keuangan daerah regional Sulawesi sebesar 17,06% dan tahun 2018 naik menjadi 44,08%. Hal ini menunjukkan tingkat kemandirian keuangan daerah regional Sulawesi pada tahun 2018 masih tergolong rendah.

4.I. BELANJA DAERAH

Untuk realisasi belanja APBD regional Sulawesi mencapai Rp76,778 triliun, menurun 18,37% dari tahun sebelumnya sebesar Rp94,054 triliun. Realisasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal menurun dari tahun sebelumnya, namun untuk belanja lain realisasinya meningkat sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tingkat realisasi belanja daerah (APBD) pada regional Sulawesi sebesar 91,2% dari total pagu Rp84,182 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat realisasi belanja pemerintah daerah (APBD) tahun 2017 sebesar 86,24%. Namun demikian, secara nominal realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp17,276 triliun.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, APBD regional Sulawesi tahun 2018 mengalami defisit sebesar Rp25,516 triliun. Angka defisit ini menunjukkan bahwa terdapat program/ kegiatan yang tidak direncanakan tetapi dapat terlaksana pada tahun 2018.

Rasio realisasi setiap jenis belanja terhadap total belanja pada tahun 2018 mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2017, yaitu sekitar 15,94% untuk belanja pegawai, 10,62% untuk belanja barang dan jasa, 8,72% untuk belanja modal, dan 46,35% untuk belanja lain. Dengan cukup tingginya peningkatan belanja lain-lain terutama untuk subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bunga, transfer, dan belanja tidak terduga di regional Sulawesi, diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat serta mengurangi

pengangguran dan kemiskinan sehingga dapat memberikan *multiplier effect* bagi pertumbuhan ekonomi di regional Sulawesi

5. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL

Perekonomian di regional Sulawesi terus mengalami perkembangan. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang bergerak mengikuti tren positif. Salah satu yang menopang perekonomian regional Sulawesi berada di Sektor Pertanian, Kelautan, dan Perikanan. Untuk itu, sektor-sektor tersebut harus terus didorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, beberapa sektor lain seperti sektor pertambangan, sektor pariwisata, sektor konstruksi, serta sektor industri makanan dan minuman juga mulai mendapat perhatian. Pada sektor pertambangan, misalnya peningkatan nilai tambah hasil pertambangan dan tata kelola mulai diperbaiki. Demikian juga, sektor pariwisata juga sudah mulai menggeliat dimana beberapa obyek wisata telah menjadi destinasi utama pariwisata nasional dan internasional.

5.I. PERTANIAN

Berdasarkan komposisi PDRB regional Sulawesi, Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih memiliki kontribusi terbesar terhadap total PDRB dibandingkan sektor-sektor lainnya. Sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan pada seluruh provinsi di regional Sulawesi karena sebagian besar wilayahnya merupakan daerah agraris dan sebagian besar masyarakatnya masih bertumpu pada sektor pertanian.

Sebagai contoh, di Provinsi Sulawesi Selatan, Struktur PDRB pada tahun 2018 masih ditopang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar Rp104,01 triliun atau sekitar 22,50% dari seluruh sektor. Jumlah angkatan kerja di Sulawesi Selatan periode Agustus 2018 sebanyak 3.988.029 orang dan penyerapan tenaga kerja pada sektor pertanian cukup mendominasi sekitar 37,79% atau 1.507.076 tenaga kerja dari seluruh sektor ekonomi. Tidak salah dikatakan bahwa sektor pertanian masih menjadi tumpuan ekonomi mayoritas penduduk Sulawesi Selatan. Dominasi subsektor ini ditandai dengan pertumbuhan 5,32% pada tahun 2018 yang didukung oleh tiga komoditas utama. Komoditas utama pertanian tersebut adalah padi, jagung dan ubi kayu. Sulawesi Selatan merupakan lumbung pangan nasional di Indonesia Timur. Daerah penyokongnya adalah Kab. Bone, Kab. Soppeng, Kab. Wajo, Kab. Sidrap, Kab. Pinrang, Kab. Luwu, Kab. Bulukumba, Kab. Bantaeng, Kab. Jeneponto, Kab. Takalar dan Kab. Maros. Dari data sensus Pertanian BPS sampai dengan tahun 2015 terlihat tren perkembangan yang semakin meningkat dari jumlah luas area panen dan jumlah produksi pertanian padi dan palawija. Peningkatan jumlah produksi pertanian terutama padi dari tahun ke tahun merupakan hasil dari kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Gerakan Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan dan Surplus Beras Tahun 2008 s.d 2018. Melalui gerakan tersebut dilakukan dilakukan strategi peningkatan produksi

kegiatan penyuluhan pertanian, peningkatan luas areal lahan dengan membuka lahan baru, serta pengembangan agribisnis agar para petani tertarik mengembangkan usaha pertaniannya.

Perkembangan Sektor Pertanian dan perkebunan sangat dominan, sehingga dalam mengatasi dampak bencana yang krisis ekonomi dibutuhkan peningkatan nilai produksi dari sektor pertanian unggulan yang dimiliki Propinsi Sulawesi Tengah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki sekitar delapan komoditas unggulan daerah pada sektor perkebunan. Delapan komoditas unggulan yakni kakao, kelapa dalam, cengkeh, kopi, pala, kelapa sawit, karet dan lada yang dipandang mendukung pengembangan sektor perkebunan di Sulteng, Sulteng memiliki wilayah daratan seluas 61.849 kilometer persegi dan perairan seluas 193.923 kilometer persegi, terdiri dari 12 kabupaten dan 1 kota dengan jumlah penduduk sebanyak 2.785.488 jiwa. Dari luas daratan, tercatat untuk penggunaan lahan sawah irigasi dan tadah hujan seluas 168,250 hektare dan untuk penggunaan lahan perkebunan seluas 681.685 hektar.

Peran strategis sektor pertanian di Sulawesi Utara, khususnya perkebunan adalah dari aspek peran di bidang ekspor. Setidaknya Sulawesi Utara memiliki 10 komoditas unggulan yang diekspor ke berbagai negara. Komoditas paling banyak diminati yakni minyak kelapa kasar atau *Crude Coconut Oil* (CCO), tepung kelapa, biji pala dan bunga pala. Capaian produksi beras Sulawesi Utara melampaui target. Capaian tersebut terutama ditopang tingginya panen di daerah penghasil beras yaitu Kab. Bolaang Mongondow. Sementara itu, sebagai pengganti makanan pokok, penanaman singkong belum begitu diminati petani di daerah ini. Kondisi tersebut tercermin pada produksinya yang hanya mencapai 79%, padahal konsumsi singkong perkapita/kg di Sulawesi Utara ternyata lebih besar dari produksi perkapita/kg. Dalam rangka mendukung pencapaian target-target produksi pangan di Sulawesi Utara, pemerintah pusat telah melaksanakan beberapa prioritas, seperti pembangunan irigasi seluas 12.598 ha dan rehabilitasi seluas 4.460 ha, di samping pembangunan bendungan Kuwil. Namun demikian perdagangan luar negeri dari ekspor hasil pertanian sedikit melambat seiring dengan penurunan harga kopra, tren menurunnya harga CNO dunia, serta penurunan produktivitas tanaman kelapa yang dibudidayakan petani.

Perekonomian Provinsi Gorontalo masih didominasi oleh sektor pertanian dengan kontribusi terbesar pada PDRB yaitu sebesar 38 persen dari total PDRB dengan kontributor terbesar ada di sub sektor tanaman pangan sebesar 52,5%. Kenaikan produksi di sektor pertanian ini sangat didukung kinerja yang sangat positif pada tanaman pangan terutama jagung yang telah berhasil diekspor ke luar negeri terutama ke negara tetangga yaitu Malaysia dan Filipina sebanyak 2.530 ton. Keberhasilan ekspor ini sangat mendukung dalam pencapaian target pemerintah pusat dalam rangka swasembada jagung.

Potensi sektor Pertanian di Sulawesi Tenggara

juga cukup menjanjikan. Secara keseluruhan luas lahan sawah kurang lebih 121.222 ha dengan rincian 26.633 ha satu kali tanam dan dua kali tanam/lebih 69.300 ha. Komoditi yang menjadi unggulan Sulawesi Tenggara adalah padi dan jagung, dimana produksi padi pada tahun 2017 sebesar 696.594 ton dan jagung menghasilkan 90.007 ton. Dari sektor perkebunan, Sulawesi Tenggara juga menghasilkan tanaman kedelai yang merupakan salah satu komoditi yang memiliki prospek ekonomi tinggi untuk dikembangkan. Jumlah produksi kedelai pada tahun 2017 mencapai 16.136 ton.

5.II. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sebagai daerah maritim, produksi perikanan Sulawesi dapat dikatakan cukup tinggi. Sulawesi Selatan merupakan salah satu produsen perikanan di Indonesia. Ada 15 kabupaten/ Kota yang merupakan daerah produsen ikan di Sulawesi Selatan. Kabupaten Takalar menjadi penyumbang terbesar produksi ikan Sulawesi Selatan, yaitu sebesar 33,42%. Nilai produksi perikanan yang meningkat tiap tahun merupakan hasil dari kebijakan pemerintah Sulawesi Selatan menerapkan pembatasan penangkapan oleh nelayan asing serta memperbaiki jalur distribusi komoditas perikanan.

Sulawesi Tengah merupakan wilayah yang memiliki potensi kelautan dan perikanan yang cukup besar, karena menjadi satu-satunya provinsi yang memiliki tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) sekaligus yang tidak dimiliki oleh provinsi-provinsi lainnya di Kepulauan Sulawesi, perairan-perairan itu adalah Teluk Tomini, Teluk Tolo dan Selat Makassar/ Laut Sulawesi. Bahkan jika dipandang dari keberadaan tiga wilayah perairan tersebut maka seharusnya Provinsi Sulawesi Tengah adalah termasuk daerah yang mengandalkan sumberdaya hasil perikanan sebagai aset pendapatan daerah. Sulawesi Tengah sebagai provinsi yang memiliki keunggulan di sektor kelautan dan perikanan selalu berusaha meningkatkan produksi potensi kelautan dan perikanannya.

Komoditi lain di sektor kelautan dan perikanan yaitu jenis-jenis ikan yang bernilai ekonomi tinggi (udang, kepiting, dan cumi-cumi), kerapu, lobster, mollusca serta rumput laut. Di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki potensi dan sumber daya alam kelautan dan perikanan tersebut. Dengan wilayah daratan seluas 38.140 km² (3.814.000 ha) dan perairan (laut) seluas 110.000 km² (11.000.000 ha), hampir semua kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara memiliki garis pantai, kecuali kolaka timur. Panjang garis pantai Sulawesi Tenggara adalah 1.740 km. Secara keseluruhan jumlah produksi perikanan mengalami peningkatan dari awal hingga akhir tahun 2018. Apabila jumlah produksi kelautan dan perikanan Sulawesi Tenggara dibandingkan dengan total produksi kelautan dan perikanan Indonesia maka kontribusi produksi kelautan dan perikanan Sulawesi Tenggara sebesar 4,01% untuk perikanan tangkap dan 3,52% untuk perikanan budidaya terhadap total produksi kelautan dan perikanan Indonesia. Produksi perikanan budi daya rumput laut merupakan komponen terbesar (80%) dari produksi perikanan budi daya di Sulawesi Tenggara.

Budi daya rumput laut hampir tumbuh di semua wilayah laut Sulawesi Tenggara. Sentra utama produksi rumput laut adalah Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, dan Kabupaten Bombana.

Posisi geografis Provinsi Sulbar yang mayoritas berbatasan dengan wilayah perairan laut menyiratkan potensi besar di subsektor perikanan. Garis pantai yang membentang sepanjang 617,5 kilometer menjadi salah satu aset alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Keunggulan subsektor Perikanan di Sulbar nampak pada komparasi dengan perkembangan di tingkat nasional. Dalam tiga tahun terakhir, subsektor Perikanan di Sulbar mengungguli capaian di tingkat nasional, baik dari sisi laju pertumbuhan maupun kontribusi terhadap total PDRB. Namun, Sumber daya perikanan yang melimpah tersebut belum sepenuhnya tergali. Pemerintah daerah dapat berkontribusi dengan menyediakan fasilitas pembiayaan terjangkau dan kemudahan perizinan.

6. TANTANGAN FISKAL REGIONAL

Kondisi geografis, demografis, dan berbagai sektor ekonomi yang menjadi unggulan maupun berpotensi untuk meningkatkan roda perekenomian dan kesejahteraan masyakarat di regional Sulawesi menjadi tantangan tersendiri bagi masing-masing pemerintah daerah untuk merumuskan dan menjalankan kebijakan terkait belanja maupun penerimaan daerah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki.

6.I. URGENSI PEMERATAAN POLA PENYERAPAN ANGGARAN

Tantangan dalam penyerapan anggaran yang disebut *slow back-loaded absorption*. Penyerapan anggaran pemerintah di regional Sulawesi cenderung menumpuk di akhir tahun. Penyerapan anggaran cenderung rendah di awal sampai tengah tahun anggaran kemudian melonjak memasuki akhir tahun. Tren penyerapan yang menumpuk di akhir tahun menyebabkan kurang optimalnya manfaat dan efek stimulus ekonomi yang ditimbulkan. Penumpukan realisasi belanja di ujung tahun memberikan kesan seolah penyerapan anggaran adalah target alokasi anggaran. Padahal, keberhasilan kinerja pelaksanaan anggaran dalam kerangka *Performanced Based Budgeting* diukur dengan kinerja capaian *output* dan *outcome*, bukan besaran penyerapan anggaran.

6.II. INFRASTRUKTUR

Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai menjadi hal penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di suatu negara atau daerah. Tanpa adanya infrastruktur yang memadai, gerak roda perekonomian menjadi tidak efisien. Biaya logistik yang menjadi komponen penting interaksi ekonomi antar daerah menjadi sangat tinggi. Selain itu, infrastruktur yang tidak

memadai dapat mempengaruhi iklim investasi. Masalah logistik yang tidak efisien tersebut dapat memicu keengganan pelaku bisnis untuk membuka peluang usaha di suatu daerah. Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami bencana alam pada bulan September 2018. Kalau dilihat dari kacamata potensi ekonomi regional, di mana pertanian menjadi salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Sulawesi Tengah terkena dampak kerusakan yang cukup besar, tentu saja hal ini akan sangat mempengaruhi perekonomian secara umum. Sektor Konstruksi berperan strategis dalam pembangunan utamanya adalah dukungan infrastruktur dalam meningkatkan akses dan ruang gerak (mobilitas) kegiatan masyarakat baik secara sosial dan utamanya ekonomi.

6.III. KETIMPANGAN ANTAR DAERAH

Adanya peningkatan Rasio Gini di beberapa daerah mencerminkan adanya gap yang semakin besar antar kelompok masyarakat yang kaya dan miskin atau dengan kata lain terjadi kenaikan kesenjangan pendapatan/ekonomi di masyarakat. Sebagai contoh peningkatan Rasio Gini di Sulawesi Utara semakin melebar yang disebabkan antara lain: (1) terkonsentrasinya investasi dan ketersediaan sarana dan prasarana pada kabupaten/kota tertentu seperti Manado, Bitung, Minahasa dan Minahasa Utara. Kombinasi keempat daerah tersebut berkontribusi terhadap PDRB Sulut sebesar 65%; (2) kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan; (3) kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar kabupaten/kota; khususnya pembangunan daerah perbatasan, dan kepulauan. Contohnya, jarak antara Kabupaten Bolaang Mongondow dengan Kota Manado yang cukup jauh dengan medan yang berbukit, menjadikan sulit untuk berinteraksi dengan Kota Manado. Dan hal tersebut juga yang mengakibatkan pertumbuhan daerah tengah-barat Sulawesi Utara menjadi rendah/lambat pertumbuhan ekonominya.

Jika diukur secara teoritis angka ketimpangan Gorontalo masuk dalam kategori sedang. Namun jika dilakukan pengelompokkan kategori tingkat ketimpangannya termasuk tinggi di atas gini rasio Nasional (0,391). Tingginya angka Gini Rasio akan menghambat penurunan angka kemiskinan. Salah satu faktor pendorong ketimpangan yang cukup tinggi di Gorontalo adalah kegiatan ekonomi cenderung terpusat di dua daerah yang bersebelahan, yakni Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo. Lebih dari separuh belanja APBN yang realisasi pada tahun 2017 mencapai sebesar Rp12 triliun berputar di wilayah Kota Gorontalo. sehingga mengakibatkan distribusi kegiatan ekonomi terlalu/banyak terpusat di Kota Gorontalo.

6.IV. REALISASI PENDAPATAN YANG KURANG OPTIMAL

Pada umumnya, kemampuan Pemda dalam memaksimalkan sumber-sumber pendapatan terutama PAD di daerahnya belum optimal, sehingga menyebabkan keterbatasan kemampuan APBD dalam membiayai program-program prioritas pemda sesuai kebutuhan masyarakat. Beberapa daerah yang mengandalkan pendapatan dari

aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam mengalami realisasi pendapatan yang kurang optimal. Diperlukan terobosan agar sektor-sektor perekonomian dapat lebih tumbuh dan berkembang sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.

Sebagai contoh di Gorontalo, ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat disebabkan Pendapatan Asli Daerah yang belum digarap secara maksimal. Sebagai provinsi hasil pemekaran Provinsi Sulawesi Utara dan sebagai wilayah yang sangat tergantung dari sektor pertanian tentu akan sulit sekali untuk meraup PAD yang tinggi. Mengingat pola kegiatan pertanian banyak dilakukan di perdesaan dengan keterbatasan modal, penyediaan bibit unggul, pupuk, kualitas SDM yang rendah, serta kualitas produksi dan pemasaran yang rendah. Hampir semua Rasio PAD Pemprov/Kab/Kota di Gorontalo pada tahun 2017 berada di bawah 0,25. Hanya Pemerintah Provinsi Gorontalo paling tinggi rasio PAD nya. Hal ini disebabkan pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Rasio tersebut juga masih di bawah angka rasio regional Sulawesi. Hal tersebut menunjukkan masih besarnya ketergantungan Gorontalo terhadap dana transfer pemerintah.

7. SOLUSI FISKAL REGIONAL

Solusi yang dapat diberikan atas tantangan fiskal regional tersebut diatas dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, APBN, APBD, dan sektor unggulan di regional Sulawesi diantaranya sebagai berikut:

7.I. INFRASTRUKTUR

Pembangunan infrastruktur merupakan prasyarat mutlak untuk mendukung bergeraknya perekonomian masyarakat. Proyek-proyek infrastruktur akan mendorong adanya peningkatan investasi di suatu daerah. Peningkatan infrastruktur fisik dan non fisik juga akan memfasilitasi dan meningkatkan kelancaran kegiatan produksi, distribusi dan pemasaran.

Di Sulawesi Selatan, proyek-proyek strategis terus dilaksanakan antara lain Makassar New Port (MNP), merupakan salah satu proyek yang didanai oleh BUMN. Pelabuhan ini termasuk kategori pelabuhan perdagangan kelas dunia yang terletak di Kota Makassar dan direncanakan menjadi hub perdagangan di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Pelabuhan ini direncanakan akan memiliki kapasitas sebesar 500.000 CBUs. Selain MNP, terdapat beberapa proyek strategis lainnya yang diharapkan dapat menopang kebutuhan investasi di Sulawesi Selatan. Di antaranya Proyek KA Makassar-Parepare, bagian dari proyek perkeretaapian Trans Sulawesi yang ditargetkan akan sepanjang 2.000 km dari Makassar ke Manado, merupakan tahap awal pembangunan *Sulawesi Railway* yang direncanakan menghubungkan kota-kota utama dari ujung selatan sampai ujung utara Pulau Sulawesi. Selanjutnya proyek strategis Pelebaran Jalan Maros-Watampone, Pembangunan *Elevated Road* Segmen I, Pembanguan Jalan dan Jembatan Bypass Mamminasata, serta Pembanguan Jalan dan

Jembatan *Midle Ring Road*.

Pelebaran Jalan Maros-Watampone merupakan suatu solusi permasalahan konektivitas kesenjangan pertumbuhan antara pantai barat dan timur Sulawesi Selatan. Sebagaimana dimaklumi, daerah di pantai timur merupakan daerah penghasil komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan. Pengembangan daerah-daerah tersebut terkendala oleh sempitnya ruas jalan yang menjadi penghubung ke kota Makassar. Dengan pelebaran jalan tersebut, diharapkan kendaraan-kendaraan besar dapat digunakan untuk pergerakan uang dan barang yang memungkinkan biaya distribusi barang dapat ditekan.

Optimalisasi penyerapan DAK Fisik di Sulawesi Barat khususnya untuk pembangunan infrastruktur sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, dan perhubungan. Di tengah keterbatasan ruang fiskal APBD Provinsi Sulawesi Barat, penyerapan DAK Fisik menjadi solusi fiskal untuk mendorong pembangunan infrastuktur yang merupakan sarana dan prasarana publik. Kebijakan fiskal di Sulawesi Barat juga diarahkan kepada belanja yang dapat meningkatkan produktivitas seperti pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan pertumbuhan industri sehingga diharapkan dapat pula menyeimbangkan percepatan pertumbuhan ekspor dan impor.

Lebih lanjut, pemerintah dapat meningkatkan kegiatan pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan realisasi anggaran belanja modal yang tersedia. Pada tahun 2018, realisasi belanja infrastruktur APBN di Sulbar berada di atas rata-rata penyerapan lingkup Sulawesi. Melalui upaya-upaya di atas, ruang fiskal di Sulbar dapat diperluas dan memberikan ruang lebih bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran infrastruktur guna memberikan multipier effect yang lebih besar terhadap perekonomian di Sulbar.

Untuk Provinsi Sulawesi Utara, Perlu dikembangkan titik-titik pertumbuhan baru di Sulawesi Utara bagian Tengah dan Barat untuk dapat mengangkat pertumbuhan di daerah tersebut sekaligus pertumbuhan regional Sulawesi Utara. Peran Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Pemerintah Daerah mutlak diperlukan untuk menginisiasi tumbuhnya industri-industri baru yang terintegrasi baik melalui kebijakan strategis,peningkatan dan perbaikan infrastruktur, serta pengalokasian belanja daerah yang mampu memicu investasi. Kebijakan tersebut juga menjadi untuk menjawab tantangan permasalahan mengenai: (1) terkonsentrasinya investasi dan ketersediaan sarana dan prasarana pada kabupaten/kota tertentu seperti Manado, Bitung, Minahasa dan Minahasa Utara; (2) kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan; dan (3) kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar kabupaten/kota; khususnya pembangunan daerah perbatasan, dan kepulauan. Selain itu, Sulawesi Utara bersama dengan pemerintah pusat juga tengah mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung yang diproyeksikan sebagai pintu gerbang perdagangan dan arus barang di bagian Utara dan Timur Indonesia. Selain itu, lokasi KEK Bitung juga akan diintegrasikan

dengan rencana pengembangan *International Hub Port* (IHP).

Kinerja pelaksanaan APBN tahun 2018 di Provinsi Gorontalo menunjukan prestasi yang baik. Hal itu tidak terlepas dari kontribusi kegiatan pembangunan sejumlah proyek strategis seperti Gorontalo Outer Ring Road, revitalisasi danau Limboto, peningkatan jalan Trans Sulawesi dan beberapa proyek strategis Nasional lainnya. Sektor konstruksi sebagai sektor potensial harus memberikan hal positif terhadap masyarakat Gorontalo. Pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebisa mungkin dilaksanakan oleh perusahaan konstruksi lokal.

7.II. INVESTASI

Diperlukan kebijakan dari Pemerintah Daerah yang mendukung peningkatan investasi serta pengembangan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengolah bahan komoditas menjadi barang jadi dan setengah jadi. Demikian juga diperlukan dukungan terhadap pengusaha lokal untuk membangkitkan perekonomian di daerahnya dan pengembangkan potensi pariwisata. Sebagai contoh, investasi untuk pengembangan industri pengolahan berbahan baku laut menjadi kebutuhan mendesak Provinsi Sulawesi Tengah agar penerimaan daerahnya tidak saja berbasis pada sumber daya alam (resource base oriented).

Faktor utama yang menjadi pertimbangan bagi investor atau calon investor untuk berinvestasi di Sulut adalah ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah. Jenis infrastruktur yang menjadi penunjang utama bagi keberlangsungan investasi adalah sarana transportasi seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, sarana listrik, media komunikasi dan sebagainya. Sementara yang menjadi pertimbangan dan merupakan prioritas utama kedua investasi dan calon investor dalam melakukan investasi di Sulut adalah indikator potensi daerah, potensi ekonomi dan tenaga kerja, dan kondisi sosial politik.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Fiskal Regional Maluku Papua

Pertumbuhan ekonomi di regional Maluku dan Papua di tahun 2018 mencatatkan kenaikan sebesar 1,33% dari tahun sebelumnya atau dari 5,53% di tahun 2017 menjadi 6,86% di tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17% di tahun yang sama. Pertumbuhan pada seluruh sektor lapangan usaha, khususnya sektor perdagangan dan real estate didukung termasuk semakin menggeliatnya kegiatan produksi pengolahan hasil tambang dan peningkatan produksi bijih logam menjadi penyebab tingginya pertumbuhan ekonomi pada regional Maluku dan Papua. Inflasi di regional Maluku dan Papua pada tahun 2018 mencapai titik tertinggi dalam 3 tahun terakhir yaitu sebesar 4,43% atau meningkat sebesar 129% dari tahun sebelumnya yang sebesar 1,98%. Indeks pembangunan kesejahteraan manusia di regional Maluku dan Papua menunjukkan tren meningkat di tahun 2018 ditandai oleh beberapa indikator seperti Indikator Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat sebesar 1,17%, angka tenaga kerja yang meningkat sebesar 4,7% diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran sebesar 12,99% dan angka kemisikan sebesar 1,39%. Meskipun begitu, indeks pembangunan kesejahteraan manusia di regional Maluku dan Papua masih jauh tertinggal dari rata-rata nasional, termasuk angka ketimpangan yang justru meningkat 1,04% dari tahun sebelumnya.

Kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara pada regional Maluku dan Papua pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan dari tahun 2017. Peningkatan pendapatan negara tahun sebesar 15,9% dari tahun 2017 menjadi 105,9% berasal penerimaan pajak dengan kontribusi sebesar 84.3%, PNBP menyumbang 7.4% dan pendapatan hibah berkontribusi 8.3%. Pada alokasi belanja negara yang terdiri dari anggaran belanja pemerintah pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) juga menunjukkan peningkatan baik dari sisi pagu alokasi sebesar 4,6% maupun prosentase penyerapan menjadi 96,2%. Berdasarkan jenis belanja, total penyerapan belanja negara tahun 2018 meningkat menjadi 93,4%, dengan porsi alokasi terbesar terletak pada belanja barang sebesar Rp16,06 Triliun (naik sebesar 40,89% dari tahun sebelumnya) dan terealisasi sebesar 90,2%. Sedangkan pada belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), pagu alokasi belanja turun sebesar Rp414 miliar namun dengan realisasi penyerapan yang meningkat sebesar 4,85% dibandingkan tahun 2017. Adapun prosentase penyerapan tertinggi ada pada DBH (99,16%) dan DAU (99,06%), sedangkan realisasi terendah ada pada DAK Fisik (87,43%).

Pada APBD Regional Maluku Papua tahun 2018, target PAD naik 12,82% dengan realisasi mencapai 87,86% sementara pagu belanja naik 8,97% dengan realisasi sebesar 88,87%. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan rasio kemandirian keuangan pada tahun 2018 regional Maluku Papua tidak menunjukkan perbaikan signifikan, dengan indikasi bahwa rasio belanja pegawai meningkat dan rasio kemandirian keuangan daerah hanya meningkat tipis sebesar 1,15% dibanding tahun sebelumnya (4,96%).

1. PERTUMBUHAN EKONOMI

Regional Maluku dan Papua mencatatkan kenaikan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan pada tahun 2018, dengan rata-rata kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 2,46% pada regional Papua, sedangkan pada regional Maluku sebesar 0,19%. Pada Provinsi Papua, pertumbuhan ekonomi meningkat pesat hingga 7,33%, setelah sebelumnya hanya mencapai level 4,52% dan 4,01% pada tahun 2016 dan 2017. Hal ini ditopang oleh produksi bijih logam selama tahun 2018 yang cukup tinggi. Sedangkan pada Provinsi Papua Barat pertumbuhan ekonomi naik pada tahun 2018 mencapai 6,24% atau naik sebesar 2,23% dari tahun 2017, hal ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan pada seluruh sektor lapangan usaha, khususnya sektor perdagangan dan real estate. Pada regional Maluku, Provinsi Maluku Utara menjadi Provinsi yang memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi dari seluruh provinsi di Indonesia (7,92%) yang disebabkan oleh kegiatan produksi pengolahan hasil tambang pasca beroperasinya smelter di Maluku Utara. Selain itu adanya relaksasi kebijakan ekspor minerba juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara.

TABEL 52. PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2016, 2017 DAN 2018

REGIONAL	PROVINSI	2016	2017	2018
Maluku	Maluku	5.73%	5.81%	5.94%
	Maluku Utara	5.77%	7.67%	7.92%
Papua	Papua Barat	4.52%	4.01%	6.24%
	Papua	9.14%	4.64%	7.33%

SUMBER: BPS

Dari sisi permintaan, faktor dominan yang mendorong pertumbuhan ekonomi regional Maluku dan Papua yaitu konsumsi rumah tangga (30%), konsumsi pemerintah (15%), ekspor luar negeri (21%), dan investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) (19%). Secara umum, pembayaran gaji 13 dan Tunjangan Hari Raya serta kenaikan remunerasi pada beberapa Kementerian bagi Pegawai ASN mempengaruhi kenaikan konsumsi rumah tangga. Pada regional Papua, peningkatan konsumsi rumah tangga juga dipicu adanya perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Selain itu, pada bulan Desember yang lalu Pemerintah Provinsi Papua juga memberikan kebijakan libur tambahan untuk memperingati Natal dan Tahun Baru serta bertepatan juga dengan libur anak sekolah. Banyaknya even nasional maupun internasional juga turun mempengaruhi pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

GAMBAR 95. KOMPOSISI PDRB ADHK DARI SISI PERMINTAAN, REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2018

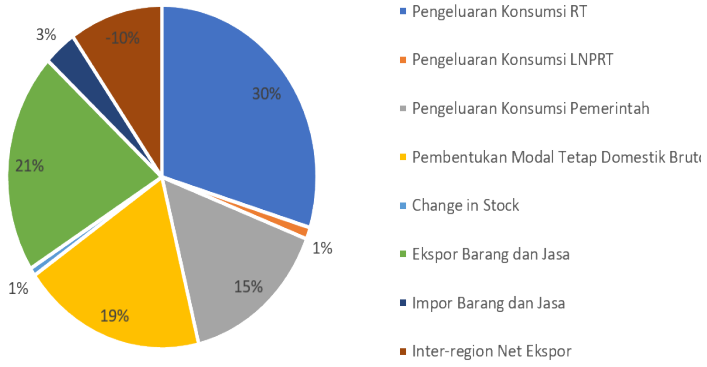

Sumber: BPS

Laju pertumbuhan PDRB tertinggi dari sisi permintaan pada regional Maluku dan Papua pada tahun 2018 terdapat pada inter-region net ekspor yang tercatat sebesar 41,61%. Sedangkan, pada impor barang dan jasa,

TABEL 53. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI PERMINTAAN, REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2017 DAN 2018

URAIAN	2017	2018
Konsumsi Rumah Tangga	5.90%	5.63%
Konsumsi LNPRT	8.11%	6.47%
Konsumsi Pemerintah	3.38%	3.58%
PMT Domestik Bruto	6.08%	7.33%
Change in Stock	12.71%	-25.43%
Ekspor Barang dan Jasa	8.45%	32.31%
Impor Barang dan Jasa	-40.48%	17.28%
Inter-region Net Ekspor	35.56%	41.61%

Sumber: BPS

tahun 2017 memiliki laju pertumbuhan yang minus (-40,48%), namun di tahun 2018 laju pertumbuhan telah berubah menjadi posisif (17,28%). Laju pertumbuhan konsumsi Rumah Tangga menurun di tahun 2018. Di Provinsi Maluku Utara, tertahannya harga komoditi utama seperti kopra, pala, dan cengkeh turut memberikan andil terhadap turunnya komsumsi rumah tangga. Sementara itu, laju pertumbuhan konsumsi pemerintah dan PMT domestik bruto dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pelaksanaan proyek-proyek MP3EI, proyek multi years pemerintah, pembangunan dan perbaikan fasilitas bandara dan pelabuhan, pembangunan sarana irigasi, serta proyek Trans Papua dan Trans Maluku, serta sarana pendukungnya.

Sementara itu, dilihat dari sisi penawaran, PDRB Regional Maluku dan Papua sebagian besar ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian (40,9%), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (10,6%), serta sektor konstruksi (10,7%).

TABEL 54. LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI DARI SISI PENAWARAN, REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2016, 2017 DAN 2018

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.83%	3.82%	3.23%
Pertambangan dan Penggalian	11.44%	3.71%	9.43%
Industri Pengolahan	4.19%	5.24%	4.83%
Pengadaan Listrik dan Gas	6.86%	2.31%	5.60%
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.28%	5.85%	5.39%
Konstruksi	7.92%	5.01%	4.92%
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.20%	5.72%	5.88%
Transportasi dan Pergudangan	7.48%	5.78%	7.49%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.86%	5.56%	5.19%
Informasi dan Komunikasi	3.72%	6.73%	3.69%
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.12%	2.97%	4.91%
Real Estate	6.40%	5.17%	5.96%
Jasa Perusahaan	5.52%	5.67%	6.44%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.65%	4.12%	3.83%
Jasa Pendidikan	6.93%	5.11%	4.11%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.36%	5.01%	5.48%
Jasa Lainnya	6.18%	5.59%	6.98%

Sumber: BPS

GAMBAR 96. KOMPOSISI PDRB ADHK DARI SISI PENAWARAN, REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2018

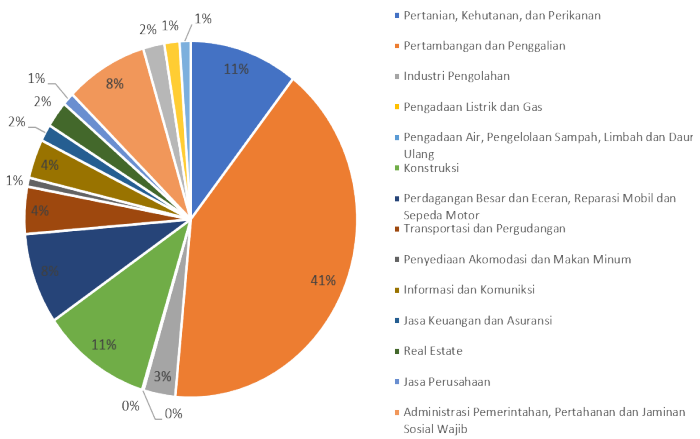

Sumber: BPS

Selain memiliki kontribusi terbesar pada PDRB regional Maluku dan Papua, sektor pertambangan dan penggalian memiliki laju pertumbuhan paling tinggi yaitu 9,43%, setelah pada tahun 2017, laju pertumbuhan tertinggi ada pada sektor konstruksi. Adapun sektor dengan kontribusi paling rendah terhadap PDRB tahun 2018 ada pada sektor pengadaan listrik dan gas dan sektor pengadaan air, sektor pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dan sektor Penyediaan Akomodasi dan

Makan Minum yaitu kurang dari 1%.

Laju pertumbuhan dari sisi penawaran berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2018 bervariasi dari 3,23% s.d 9,43%. Laju pertumbuhan terendah ada pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sedangkan sektor dan laju pertumbuhan tertinggi ada pada sektor pertambangan dan penggalian, setelah pada tahun 2017, sektor ini hanya bertumbuh 3,71%. Sektor konstruksi, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, informasi kan komunikasi, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan jasa Pendidikan merupakan sektor yang memiliki laju pertumbuhan yang justru menurun dari laju pertumbuhan pada tahun 2017.

1.I. INFLASI

Inflasi regional Maluku dan Papua pada tahun 2018 mengalami peningkatan bahkan mencapai angka tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Berbeda dengan tahun 2017, dimana seluruh Provinsi memiliki tingkat inflasi di bawah tingkat inflasi nasional, pada tahun 2018 seluruh Provinsi, baik Provinsi Maluku Utara (4,12%), Maluku (3,35%), Papua Barat (5,21%) dan Provinsi Papua (6,36%) memiliki tingkat inflasi yang lebih tinggi dari tingkat nasional (3,13%).

Kenaikan inflasi pada regional Maluku dan Papua terdorong adanya inflasi pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan, yang salah satunya dipicu oleh adanya kenaikan tarif penerbangan, khusunya pada libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu berkurangnya frekuensi penerbangan atau bahkan sudah tidak beroperasinya beberapa rute penerbangan pada beberapa maskapai penerbangan juga mengakibatkan harga tiket angkutan udara meningkat tajam. Hal ini dilatarbelakangi konektifitas antar kota dan provinsi pada regional Maluku dan Papua masih didominasi lewat jalur udara. Selain itu, peningkatan inflasi juga terjadi pada kelompok sandang, seiring dengan tingginya permintaan pakaian baru untuk perayaan Hari Natal.

GAMBAR 97. TINGKAT INFLASI REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2015 S.D. 2018 (DALAM %)

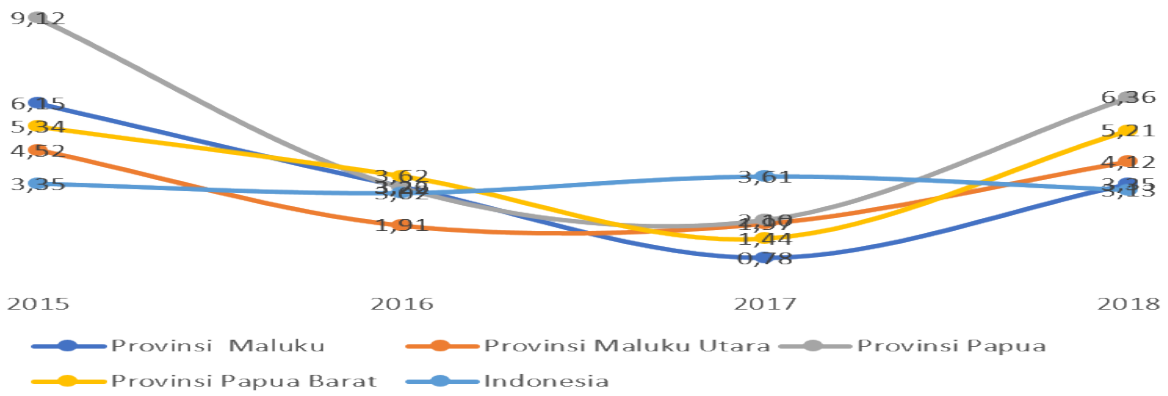

Sumber: BPS

2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

2.I. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, nilai IPM regional Maluku dan Papua terus menunjukkan peningkatan, namun demikian nilainya masih berada dibawah nilai IPM nasional. Fasilitas kesehatan yang kurang optimal, akses pendidikan yang terbatas, kurangnya tenaga pendidik, dan pengaruh rendahnya pendapatan perkapita menyebabkan rendahnya nilai IPM pada regional Maluku dan Papua.

GAMBAR 98. IPM REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2013 S.D. 2018

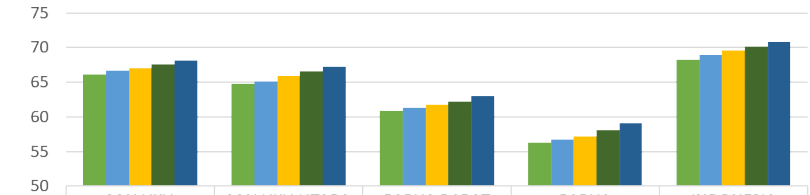

	MALUKU	MALUKU UTARA	PAPUA BARAT	PAPUA	INDONESIA
2013	66,09	64,78	60,91	56,25	68,31
2014	66,74	65,18	61,28	56,75	68,9
2015	67,05	65,91	61,73	57,25	69,55
2016	67,6	66,63	62,21	58,05	70,18
2017	68.19	67.2	62.99	59.09	70.81

Berdasarkan nilai capaian IPM per-Provinsi, 3 Provinsi dalam regional Maluku dan Papua masuk dalam kategori IPM sedang, yaitu Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Papua Barat. Sedangkan Provinsi Papua merupakan Provinsi dengan capaian IPM terendah dalam regional Maluku Papua dan tergolong kedalam kategori IPM rendah. Namun demikian, Papua merupakan Provinsi dengan peningkatan IPM tertinggi se-Indonesia pada tahun 2018. Kemajuan pembangunan manusia di Papua didorong oleh peningkatan dimensi pendidikan baik formal maupun non formal yaitu dengan adanya berbagai program pemberdayaan masyarakat yang didanai dari Dana Desa.

Melihat angka capaian IPM, baik IPM nasional maupun provinsi pada regional Maluku dan Papua memiliki tren linear positif dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan keberhasilan upaya peningkatan IPM pada tiga komponen seperti kesehatan, pendidikan dan perekonomian. Namun kedepannya masih tetap dibutuhkan upaya Pemerintah untuk meningkatkan angka capaian IPM khususnya pada Provinsi dengan kategori rendah melalui beberapa strategi seperti peningkatan layanan kesehatan, kualitas pendidikan, lapangan pekerjaan maupun pembangunan infrastruktur terutama di daerah tertinggal dan terpencil.

2.II. RASIO GINI

Pada tahun 2018, indeks rasio gini (angka ketimpangan) pada regional Maluku Papua mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017 (kecuali Provinsi Papua yang memiliki indeks rasio gini yang sama dengan tahun 2017). Namun demikian, peningkatan indeks rasio gini pada regional Maluku, baik pada Provinsi Maluku (0,326) dan Maluku Utara (0,336) masih jauh lebih rendah dari indeks rasio gini nasional (0,384). Hal ini menunjukkan distribusi pendapatan pada regional Maluku lebih baik dibandingkan nasional. Sedangkan rasio gini pada regional Papua, baik Provinsi Papua (0,398) dan Provinsi

GAMBAR 99. RASIO GINI REGIONAL MALUKU DAN PAPUA TAHUN 2014 S.D 2018

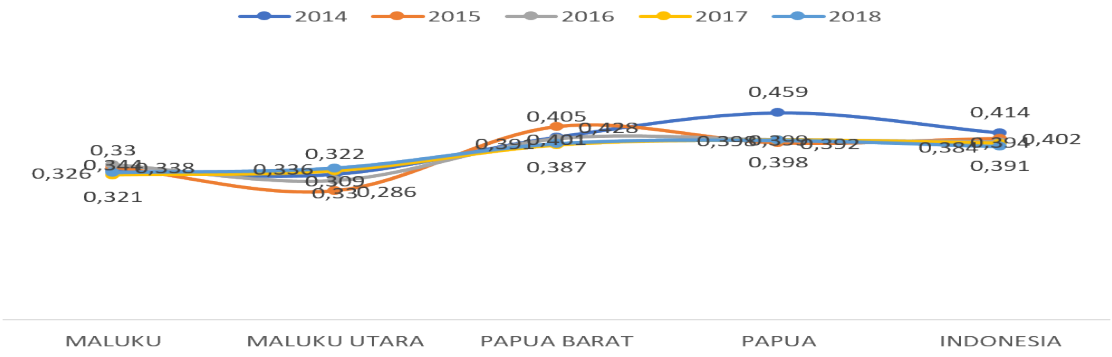

Papua Barat (0,391) memiliki indeks yang lebih tinggi dari indeks rasio gini nasional.

Dilihat dari perbandingan indeks rasio gini perdesaan dan perkotaan, regional Maluku memiliki karakter yang sama dengan regional lain di Indonesia, dimana rasio gini perkotaan lebih tinggi dari rasio gini perdesaan. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di kota relatif lebih tinggi dari desa, mengingat pekerjaan masyarakat perkotaan yang lebih beragam dibanding di pedesaan sehingga menyebabkan ketimpangan/gap pendapatan yang lebih tinggi. Sementara itu, regional Papua memiliki perbandingan indeks rasio gini yang berbeda, dimana rasio gini perdesaan justru lebih tinggi dari rasio gini perkotaan.

3. KETENAGAKERJAAN

Pada tahun 2018, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja pada seluruh Provinsi pada regional Maluku dan Papua bila dibandingkan tahun 2017. Peningkatan jumlah angkatan kerja tertinggi ada pada Provinsi Papua sebanyak 73.122 orang, sedangkan peningkatan jumlah angkatan kerja terendah ada pada Provinsi Papua Barat sebanyak 15.018 orang. Peningkatan jumlah angkatan kerja menunjukkan pengaruh positif dari upaya pengurangan pengangguran yang dilakukan oleh Pemerintah. Adapun beberapa sektor yang banyak menyerap tenaga kerja di regional Maluku dan Papua antara lain: Sektor perdagangan, sektor konstruksi, sektor jasa kemasyarakatan, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

TABEL 55. JUMLAH ANGKATAN KERJA REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2015-2018

PROVINSI	Agt 2015	Agt 2016	Agt 2017	Agt 2018
Maluku	727,259	743,149	707,796	755,034
Maluku Utara	513,601	524,526	516,231	541,446
Papua Barat	413,635	434,817	430,478	445,630
Papua	1,741,945	1,722,162	1,762,841	1,835,963

Sumber: BPS

Sejalan dengan tahun 2017, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2018 pada provinsi Maluku (7,27%) dan Papua Barat (6,30) berada di atas level nasional (5,34%). Sedangkan Provinsi Maluku Utara (4,77%) dan Papua (3,20%) berada di bawah TPT nasional. Pada Agustus 2018, nilai TPT regional Maluku dan Papua mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi telah mampu menyerap tenaga kerja. TPT pada Provinsi Maluku mengalami penurunan dari 9,29% (2017) menjadi 7,27% (2018). Penurunan TPT

GAMBAR 100. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2015 S.D 2018 (DALAM %)

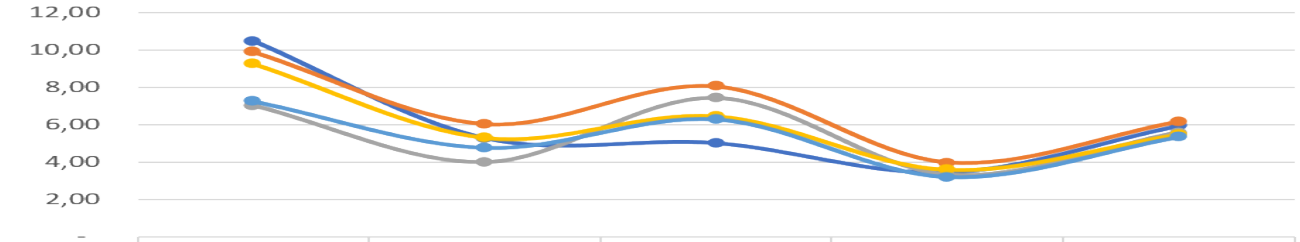

	Maluku	Maluku Utara	Papua Barat	Papua	Indonesia
2014	10,51	5,29	5,02	3,44	5,94
2015	9,93	6,05	8,08	3,99	6,18
2016	7,05	4,01	7,46	3,35	5,61
2017	9,29	5,33	6,49	3,62	5,50
2018	7,27	4,77	6,30	3,20	5,34

ini dipicu oleh meningkatnya penyerapan tenaga kerja pada sektor industri, khususnya pada industri jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan, industri kayu, barang dari kayu dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya, serta industri makanan. Pada Provinsi Maluku Utara, terjadi penurunan TPT pada 2018 menjadi 4,77% dari 5,33% pada tahun 2017 dengan penyerapan tenaga kerja terbesar ada pada sektor pertanian. Hal tersebut selaras dengan distribusi PDRB Malut yang didominasi sektor pertanian.

4. KEMISKINAN

Dilihat dari grafik tingkat kemiskinan regional Maluku dan Papua di bawah ini, dalam 5 tahun terakhir terjadi penurunan tingkat kemiskinan pada seluruh Provinsi pada regional Maluku dan Papua, meskipun kondisi pada tahun 2018 relatif sama dengan kondisi kemiskinan pada tahun 2017. Terdapat 3 Provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin yang jauh lebih tinggi dari angka nasional, yaitu Provinsi Maluku (17,85%), Papua Barat (22,66%) dan Papua (27,43%), bahkan Provinsi Papua Barat dan Papua memiliki tingkat kemiskinan lebih dari dua kali tingkat kemiskinan nasional (9,66%). Sedangkan Provinsi Maluku Utara (6,62%) memiliki prosentase jumlah penduduk miskin yang lebih rendah daripada angka nasional.

GAMBAR 101. KEMISKINAN REGIONAL MALUKU DAN PAPUA TAHUN 2014 S.D 2018 (DALAM %)

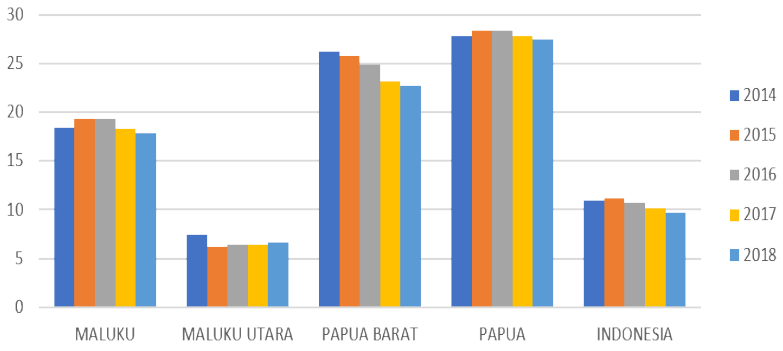

GAMBAR 102. PERBANDINGAN TINGKAT KEMISKINAN DAERAH PERDESAAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2018

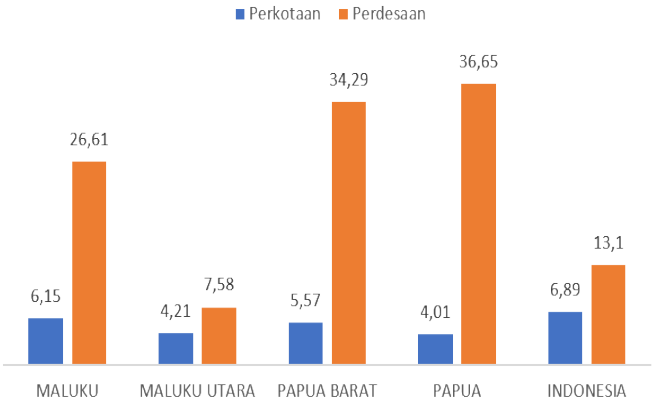

Terlihat bahwa penduduk miskin lebih terkonsentrasi di daerah perdesaan daripada daerah perkotaan. Kondisi ini terjadi pada seluruh Provinsi dan juga pada level nasional. Melihat kondisi tersebut program-program Pemerintah ke depannya dapat lebih difokuskan ke daerah perdesaan baik dalam rangka investasi ekonomi yang bersifat produktif maupun investasi di bidang pendidikan, kesehatan, perumahan dan layanan sosial lainnya. Selain itu, program-program pengentasan kemiskinan yang digalakkan pemerintah daerah harus bermula dari pedesaan untuk menstimulus kesejahteraan masyarakat desa. Selain itu, pemanfaatan dana transfer baik itu dalam bentuk dana alokasi maupun dana desa harus dapat dimanfaatkan secara produktif untuk menciptakan pusat-pusat pendidikan dan perekonomian di desa, sehingga dapat memperluas akses dan mendorong penduduk daerah perdesaan keluar dari garis kemiskinan sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan.

5. PELAKSANAAN APBN

Kinerja APBN pada regional Maluku dan Papua pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penerimaan pajak masih menjadi sumber utama pendapatan negara dibandingkan dengan sumber pendapatan yang lain. Realisasi penerimaan pajak memberikan kontribusi sekitar 84.3%, PNBP menyumbang 7.4% dan pendapatan hibah berkontribusi 8.3% dari total pendapatan negara pada regional Maluku Papua tahun 2018.

Pada tahun 2018, realisasi penerimaan pajak mencapat 106.7%, meningkat dari tahun 2017 yang hanya mencapai 86.5%, sehingga prosentase realisasi atas pendapatan dapat mencapai 105.9%, meningkat dari tahun 2017 (90%). Di Provinsi Papua, salah satu faktor yang mendongkrak penerimaan perpajakan yaitu melonjaknya penerimaan Pajak Perdagangan Internasional khususnya Bea Keluar, sedangkan pada Provinsi Maluku Utara, peningkatan realisasi pajak disumbang dari pajak perdagangan internasional yang meningkat signifikan dari realisasi tahun 2017. Hal ini merupakan imbas positif meningkatnya aktivitas ekspor hasil pengolahan nikel dan impor komoditi pendukung operasional smelter.

Dari sisi belanja negara, secara kumulatif, realisasi belanja Negara tahun 2018

TABEL 56. REALISASI APBN REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan Negara						
Penerimaan Perpajakan	15648.97	13530.44	86.5%	15490.57	16526.69	106.7%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	1100.06	1403.62	127.6%	1173.652	1454.35	123.9%
Pendapatan Hibah	799.98	855.14	106.9%	1850.98	1629.43	88.0%
Jumlah Pendapatan Negara	**17549.01**	**15789.2**	**90.0%**	**18515.2**	**19610.47**	**105.9%**
Belanja Negara						
Belanja Pemerintah Pusat	33927.9	31387.5	92.5%	38687.14	35988.72	93.0%
Transfer ke Daerah dan Dana Desa	87552.89	79860.18	91.2%	87087.76	84945.32	97.5%
Jumlah Belanja Negara	**121480.8**	**111247.7**	**91.6%**	**125774.9**	**120934**	**96.2%**

Sumber: KFR (diolah)

mencapai Rp120.934 triliun atau 96,2% dari total alokasi pagu, dengan porsi realisasi pada transfer daerah dan Dana Desa menyumbang 70.2% dan realisasi belanja pemerintah pusat menyumbang 29,8% atas realisasi belanja negara. Peningkatan jumlah realisasi anggaran ini merupakan akibat dari kebijakan pembangunan infrastruktur yang masif di kawasan Indonesia timur sebagai bentuk pemerataan pembangunan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, sekaligus bentuk investasi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing di regional Maluku Papua. Meskipun prosentase realisasi sudah menunjukkan kinerja penyerapan yang sangat baik, masih terdapat hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu pola penyerapan anggaran yang menumpuk pada akhir tahun anggaran.

TABEL 57. PAGU DAN REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI PADA REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	2017	2018	%
AGAMA	535.81	547.50	102.2%
EKONOMI	14,594.15	14,622.56	100.2%
KESEHATAN	723.98	686.15	94.8%
KETERTIBAN & KEAMANAN	4,859.96	5,110.71	105.2%
LINGKUNGAN HIDUP	803.35	589.87	73.4%
PARIWISATA & BUDAYA	7.38	9.65	130.7%
PELAYANAN UMUM	23,161.85	21,388.46	92.3%
PENDIDIKAN	3,566.38	3,373.79	94.6%
PERLINDUNGAN SOSIAL	154.88	138.37	89.3%
PERTAHANAN	4,210.98	3,688.12	87.6%
PERUMAHAN & FASUM	1,845.59	2,257.26	122.3%
TOTAL	**54,464.31**	**52,412.42**	**96.2%**

Dari data Pagu dan Realisasi APBN tahun 2018 berdasarkan fungsi, maka fungsi Pelayanan Umum dan Ekonomi mempunyai porsi terbesar di Regional Maluku Papua, yaitu sebesar 42,5% dan 26,8%. Sedangkan fungsi yang memiliki porsi paling kecil adalah fungsi Pariwisata dan Budaya (0,01%), namun demikian fungsi tersebut memiliki prosentase realisasi yang paling tinggi (130,7%). Alokasi untuk fungsi pariwisata dan budaya dapat dikatakan sangat kecil baik untuk regional Papua maupun Maluku, mengingat wilayahnya yang sangat luas. Ke depannya Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan alokasi pagu pada fungsi Pariwisata dan Budaya dalam rangka mendorong pengembangan potensi wisata alam dan budaya pada regional Maluku dan Papua. Sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan diharapkan dapat mendatangkan banyak wisatawan baik dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya akan dapat menambah pendapatan daerah.

Pada tahun 2018, terjadi peningkatan pagu alokasi pada belanja pegawai dan belanja barang dibandingkan tahun 2017. Sedangkan penurunan jumlah alokasi anggaran terjadi pada belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja lain-lain di Regional Maluku Papua. Jika pada tahun 2017, alokasi terbesar terdapat pada Belanja Modal (40%) dari total pagu alokasi, maka pada tahun 2018, porsi alokasi terbesar terdapat pada belanja barang (41,7%). Kenaikan alokasi pada belanja barang sebesar Rp4.662triliun pada anggaran tahun 2018 disebabkan karena adanya pembiayaan pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 dan persiapan penyelenggaran Pemulu Legislatif dan Presiden pada tahun 2019.

Apabila dilihat dari prosentase realisasi pada tahun 2018, seluruh belanja memiliki

TABEL 58. REALISASI BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT JENIS BELANJA REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILYAR RUPIAH)

URAIAN JENIS BELANJA	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	8,776.29	8,186.79	93.28%	9,409.06	9,106.43	96.8%
Belanja Barang	11,401.12	10,233.64	89.76%	16,063.02	14,496.11	90.2%
Belanja Modal	13,535.41	12,809.75	94.64%	12,873.89	12,242.36	95.1%
Belanja Bantuan Sosial	92.48	87.46	94.58%	85.43	84.22	98.6%
Belanja Lain-lain	88.72	38.46	43.35%	88.72	59.30	66.8%
JUMLAH	**33,894.02**	**31,356.11**	**92.51%**	**38,520.11**	**35,988.43**	**93.4%**

Sumber: DJPb (diolah)

prosentase realisasi berada di atas 90%, dengan rata-rata sebesar 93,49% (kecuali belanja lain-lain dengan realisasi 66,8%). Angka ini meningkat dari tahun 2017 dengan prosentase sebesar 92,51%. Hal tersebut menunjukkan kinerja pelaksanaan belanja yang sudah cukup baik pada regional Maluku dan Papua.

Pagu transfer ke daerah dan dana desa pemerintah pusat ke Regional Maluku Papua tahun 2018 turun sekitar Rp414 miliar dibandingkan periode sebelumnya. Adapun penurunan terbesar terdapat pada alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yaitu turun sebesar 40,37%, namun dengan realisasi yang jauh lebih tinggi (99,16%) dibandingkan tahun sebelumnya (54,62%). Penurunan alokasi ini terjadi pada seluruh Provinsi di regional Maluku dan Papua. Adapun realisasi penyerapan dana transfer tahun 2018 meningkat 4,85% dibandingkan tahun 2017, dengan prosentase penyerapan tertinggi ada pada DBH (99,16%) dan DAU (99,06%), sedangkan realisasi terendah ada pada DAK Fisik (87,43%). Hal ini antara lain disebabkan adanya permasalahan jaringan yang menyebabkan Pemda kesulitan mengupload dokumen persyaratan penyaluran, adanya keterlambatan proses pengadaan barang/ jasa, minimnya sumber daya manusia yang mengelola DAK Fisik di Pemda, dan kendala teknis lainnya.

5.I. BADAN LAYANAN UMUM

Pada tahun 2018, terdapat penambahan 1 satker BLU pada regional Maluku dan Papua menjadi 5 Satker BLU.

Unpatti ditetapkan sebagai instansi

TABEL 59. REALISASI BELANJA TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	2017			2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Dana Bagi Hasil	11,068.59	6,045.81	54.62%	6,599.32	6,543.74	99.16%
Dana Alokasi Umum	44,234.55	44,234.55	100.00%	44,729.78	44,322.78	99.09%
Dana Alokasi Khusus Fisik	10,307.75	8,779.92	85.18%	10,367.17	9,064.26	87.43%
Dana Otsus, Dana K. DIY, DID	12,025.57	12,025.57	100.00%	14,650.24	14,275.86	97.44%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3,838.77	3,566.05	92.90%	4,697.54	4,366.32	92.95%
Dana Desa	7,459.37	7,369.77	98.80%	7,475.95	7,359.65	98.44%
Jumlah	**88,934.61**	**82,021.67**	**92.23%**	**88,520.01**	**85,932.61**	**97.08%**

Sumber: DJPBN dan DJPK (diolah)

TABEL 60. PENAMBAHAN SATKER BLU PADA REGIONAL MALUKU DAN PAPUA MENJADI 5 SATKER BLU

No	Satker BLU	Provinsi	Aset (Miliar)
1	Bandar Udara Sentani di Jayapura	Papua	3.238,07
2	Balai Pendidikan dan Latihan Penerbangan Jayapura	Papua	357,51
3	Rumkit Bhayangkara Jayapura	Papua	48,95
4	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Sorong	Papua Barat	414,9
5	Universitas Pattimura (Unpatti)	Maluku	2.530,84

Sumber: KFR

pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU secara penuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 291/KMK.05/2018 tanggal 29 Maret 2018. Dilihat dari pengelolaan asset pada Satker BLU di atas, pada tahun 2018, seluruh Satker BLU pada regional Maluku dan Papua membukukan pertumbuhan aset yang positif dan meningkat dari tahun sebelumnya.

6. PELAKSANAAN APBD

6.I. PENDAPATAN DAERAH

Realisasi pendapatan APBD Regional Maluku Papua pada tahun 2018 sebesar Rp91.351,22 miliar, turun 4,53% dari tahun sebelumnya sebesar Rp95.682,88 miliar. Penurunan ini didorong oleh turunnya pendapatan transfer sebesar 6,28% atau Rp5.659,57 miliar dari tahun 2017. Meskipun secara kumulatif pendapatan mengalami penurunan, tetapi pada komponennya terjadi beberapa peningkatan. Penurunan pada realisasi pendapatan merupakan kontribusi dari penurunan pendapatan transfer, sedangkan pendorong adanya peningkatan berasal dari PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah berturut-turut sebesar 15,42% dan 56,29% dari tahun sebelumnya. Dari rincian sisi pendapatan, realisasi pendapatan pada tahun 2018 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yang mencapai 92,41% dari total pendapatan, sedangkan realisasi PAD hanya memberikan kontribusi sebesar 5,64% lebih tinggi dari kontribusi lain-lain pendapatan daerah yang sah yang hanya sebesar 1,94%. Tingginya kontribusi pendapatan transfer terhadap total pendapatan mengindikasikan ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih sangat tinggi. Dari sisi kemandirian keuangan daerah dengan

TABEL 61. REALISASI APBD REGIONAL MALUKU PAPUA TAHUN 2017 DAN 2018 (DALAM MILIAR RUPIAH)

URAIAN	TA 2017			TA 2018		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
Pendapatan						
PAD	5.199,82	4.465,83	85,88	5.866,58	5.154,52	87,86
Pendapatan Transfer	86.804,02	90.081,41	103,78	86.933,12	84.421,84	97,11
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	2.773,74	1.135,64	40,94	5.340,82	1.774,86	33,23
Jumlah Pendapatan	**94.777,58**	**95.682,88**	**100,96**	**98.140,53**	**91.351,22**	**93,08**
Belanja						
Belanja Pegawai	21.065,79	21.298,51	101,10	26.712,98	20.073,74	74,88
Belanja Barang	26.495,40	24.441,28	92,25	24.650,64	27.229,03	110,46
Belanja Modal	20.176,10	19.901,78	98,64	24.054,38	19.885,79	82,67
Belanja Lainnya	26.680,09	23.278,96	87,25	27.472,43	24.317,34	88,52
Jumlah Belanja	**94.417,38**	**88.920,53**	**94,18**	**102.890,43**	**91.435,90**	**88,87**
Surplus/Defisit	360,20	6.762,35	1.877,39	(4.749,90)	(84,68)	1,78

Sumber: DJPBN dan DJPK (diolah)

membandingkan PAD terhadap pendapatan transfer tidak menunjukkan perubahan atau bahkan perbaikan karena yang terjadi adalah peningkatan besaran. Rasio kemandirian keuangan daerah regional Maluku Papua pada tahun 2018 sebesar 6,11% lebih tinggi dari tahun 2017 (4,96%).

6.II. BELANJA DAERAH

Belanja pemerintah daerah regional Maluku Papua terealisasi sejumlah Rp91.435,90 miliar meningkat 2,83% dari tahun sebelumnya yang terealisasi Rp88.920,53 miliar. Adanya peningkatan kinerja belanja dari sisi nominal tidak sejalan dengan kinerja realisasi belanja daerah dari sisi persentase yang menunjukkan penurunan. Kinerja realisasi belanja daerah (APBD) regional Maluku Papua tahun 2018 sebesar 88,87% dari total pagu Rp102.890,43 miliar lebih rendah dibanding 2017 yang mencapai 94,18% dari total pagu belanja APBD Rp94.417,38 miliar. Penurunan kinerja realisasi belanja daerah dipicu oleh penurunan kinerja realisasi belanja pegawai dan belanja modal, baik dari sisi nominal maupun persentase. Penurunan nilai terbesar dialami oleh Belanja Pegawai dengan realisasi sebesar Rp20.003,74 miliar yang secara nominal lebih kecil dari tahun sebelumnya (Rp21.298,51 miliar) dan persentase yang juga menurun (74,88%) dibandingkan tahun 2017 (101,10%). Sementara pada Belanja Modal dengan realisasi sebesar Rp19.885,79 miliar (82,67%) lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp19.901,78 miliar (98,64%). Rasio realisasi setiap jenis belanja terhadap total belanja pada tahun 2017 dan 2018 tidak banyak berubah dan relatif merata, yaitu sekitar 22%-24% untuk belanja Pegawai; 27%-29% untuk belanja Barang dan Jasa; 21%-22% untuk belanja Modal; serta 26%-27% untuk Belanja Lainnya yang didalamnya terdapat belanja transfer dari pemerintah pusat.

6.II.A. SURPLUS/DEFISIT

Realisasi APBD regional Maluku Papua tahun 2018 mengalami defisit sebesar Rp84,68 miliar. Angka defisit ini dikontribusikan oleh seluruh wilayah yang ada di regional Papua Maluku. Angka defisit yang lebih kecil dari target ini dapat berarti positif jika dilihat dari presentase terhadap pagu serta perbandingan antara realisasi pendapatan dan belanja, karena target yang ditetapkan adalah defisit sebesar Rp4.749,91 miliar. Namun demikian, kondisi defisit yang kecil juga dapat berarti negatif karena realisasi belanja yang rendah. Dari sisi pendapatan, kondisi defisit terjadi karena capaian realisasi pendapatan yang dibawah target yang ditetapkan, atau hanya mencapai angka 93,08%. Sementara itu, jika dilihat dari sisi belanja, kondisi defisit yang rendah ini mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelaksanaan belanja, yaitu terdapat program/kegiatan yang sudah direncanakan pada tahun 2018 yang tidak dapat terlaksana sehingga membuat tingkat realisasi terhadap pagu yang rendah (88,87%). Beberapa hal yang diperkirakan menjadi penyebab terhambatnya belanja tersebut antara lain: proses pelelangan dan pengadaan barang dan jasa (belanja modal) serta penyaluran dana transfer yang tidak optimal pada beberapa daerah.

7. SEKTOR UNGGULAN REGIONAL

Sektor perekonomian yang memiliki distribusi besar dalam struktur perekonomian menandakan sektor tersebut menjadi motor penggerak perekonomian suatu daerah dan dapat dikategorikan sebagai suatu sektor unggulan. Selain itu, sektor yang menjadi penyerapan tenaga kerja terbesar juga mengindikasikan sektor tersebut menjadi sektor unggulan. Dilihat dari sudut pandang sektoral, maka sektor yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian dan menyerap tenaga kerja terbesar pada seluruh wilayah di regional Maluku Papua relatif homogen yaitu sektor (i) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; serta (ii) Sektor Pertambangan dan Penggalian. Di luar kedua sektor tersebut, terdapat pula satu sektor unggulan lain yang potensial untuk dikembangkan, yaitu sektor pariwisata.

7.I. SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN

Berdasarkan analisis Location Quotient (LQ), Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan teridentifikasi sebagai salah satu sektor unggulan dan potensial di regional Maluku Papua. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai LQ yang lebih besar dari 1 selama 8 tahun terakhir, yaitu sebesar 1,21. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mampu memberikan kontribusi sebesar 15,21% terhadap total PDRB di regional Maluku Papua atau menjadi yang terbesar kedua setelah sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2018. Berdasarkan kontribusi terhadap PDRB, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi kontributor terbesar bagi PDRB Maluku Utara sebesar 22,6%, sedangkan bagi PDRB Maluku sebesar 23,28%. Jika di Provinsi Papua Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi kontributor terbesar ketiga setelah sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor konstruksi sebesar 10,39% maka di Provinsi Papua Barat hanya menjadi kontributor terbesar keenam (10,46%) setelah sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian, konstruksi, sektor lainnya, serta administrasi pemerintahan.

Pada Sub sektor pertanian, setiap provinsi di regional Maluku Papua memiliki komoditas unggulan dan potensial yang berbeda-beda. Komoditas pertanian untuk Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara didominasi oleh produk tanaman perkebunan. Di Provinsi Maluku Utara, meskipun masih dikelola secara tradisional, tanaman perkebunan seperti kelapa, cengkeh, pala dan kakao masih tetap menjadi komoditas unggulan dengan luas lahan keseluruhan mencapai 313,6 ribu Ha dan produksi 253 ribu ton, sehingga menjadi penyumbang pertumbuhan perekonomian (PDRB) terbesar dari sektor pertanian. Di Provinsi Papua, dengan memanfaatkan keunggulan luas wilayah dan tanah yang subur, sub sektor pertanian ditopang oleh komoditas kelapa dan tanaman padi sawah. Dari Data BPS, tercatat bahwa luas lahan kelapa mencapai 125,7 ribu Ha sedangkan lahan sawah di Provinsi Papua mencapai total 50,5 ribu Ha dengan luas lahan siap panen tahun 2018 adalah 31,1 ribu Ha yang sebagian besar berada di Kabupaten Merauke sebagai lumbung padi Provinsi. Sementara di Provinsi

Papua Barat, dengan pertimbangan nilai efek lokasi, daya saing komoditas, serta sifat spesialisasinya, terdapat beberapa tanaman yang dinilai memiliki potensi unggulan yaitu ubi jalar, kedelai, jagung, kedelai, dan padi. Sub sektor kehutanan menjadi salah satu Sub sektor unggulan dan potensial lain di regional Maluku Papua, khususnya untuk Provinsi Papua yang memiliki jumlah luas kawasan hutan yang cukup luas mencapai 32,7 juta Ha dan terjaga selama 5 tahun terakhir. Potensi yang dapat diunggulkan dari subsektor ini berasal dari produksi kayu hutan yang berada di kisaran 1,3 juta m3 per tahun dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang mencapai Rp200 Triliun per Tahun. Bia dikembangkan secara optimal, sub sektor kehutanan akan dapat berkontribusi besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di regional Maluku Papua.

Sub sektor perikanan memiliki peranan penting bagi perekonomian di regional Maluku Papua, khususnya untuk Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang memiliki karakteristik geografi bersifat kepulauan dengan wilayah perairan/ laut yang luas. Di Provinsi Maluku dengan luas wilayah laut mencapai 658.294 KM2 atau 92,4% total luas wilayah, Ikan cakalang menjadi salah satu produk unggulan dari subsektor perikanan. Ikan cakalang memiliki nilai jual dan produksi yang lebih tinggi dibandingkan jenis ikan lainnya seperti Kembung, Layang, Tuna, Selar, Julung, dan Teri. Nilai produksi Ikan cakalang mencapai 10% produksi total perikanan laut Provinsi Maluku. Sementara di Provinsi Maluku Utara dengan luas wilayah laut mencapai 100.719,4 KM2 atau 69,08% total luas wilayah, memiliki potensi sumber daya ikan yang tersedia mencapai 1,435 juta ton dengan potensi lestari sebesar 1,148 juta ton. Dilihat dari jenis komoditasnya, maka potensi perikanan dapat bersal dari 3 (tiga) kelompok ikan, yaitu: (i) ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, tongkol, kakap, dan tenggiri - baru termanfaatkan 114.321,4 ton dari potensi per tahun sebesar 385.900 ton (ii) ikan pelagis kecil seperti teri, kembung, layang, selar - baru termanfaatkan 57.852,6 ton dari potensi per tahun sebesar 896.200 ton; serta (iii) ikan demersal seperti kakap merah, lencan, ekor kuning, dan baronang – baru termanfaatkan 22.147,3 ton dari potensi per tahun sebesar 153.000 ton.

7.II. SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN

Berdasarkan analisis *Location Quotient* (LQ), Sektor Pertambangan dan Penggalian teridentifikasi sebagai sektor paling unggul dan potensial di regional Maluku Papua. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai LQ yang jauh dari angka 1 serta lebih besar dibandingkan sektor lainnya selama 8 tahun terakhir, yaitu sebesar 3,37. Pada Tahun 2018, sektor Pertambangan dan Penggalian mampu memberikan kontribusi sebesar 36,72% terhadap total PDRB di Provinsi Papua atau menjadi yang terbesar dibandingkan sektor lainnya. Sementara di Provinsi Papua Barat sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki kontribusi terbesar kedua (17,98%) setelah sektor Industri Pengelolahan. Sedangkan di provinsi Maluku dan Maluku Utara sektor tersebut tidak menjadi kontributor utama

atau kurang memberikan andil yang besar terhadap PDRB Provinsi dengan persentase sebesar 2,66% dan 9,43%. Meskipun demikian, sektor ini memiliki potensi yang cukup besar untuk terus dikembangkan, terlihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi sektor ini di kedua Provinsi tersebut.

Di Provinsi Papua, Sektor Pertambangan dan Penggalian selalu mengalami peningkatan dan menunjukkan trend pertumbuhan dalam 5 (empat) tahun terakhir. Bahkan pada tahun 2018 tumbuh sebesar 10,52% atau menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Hal ini semakin menunjukkan betapa tergantungnya pertumbuhan ekonomi dan PDRB terhadap sektor Pertambangan dan Penggalian. Dominasi sektor pertambangan terhadap perekonomian Papua terlihat dalam struktur export based Papua. Papua sangat tergantung terhadap kinerja ekspor komoditi pertambangan dengan kontribusi terhadap penerimaan devisa non migas rata-rata melampaui 80% setiap tahunnya atau menyumbang 2,81% dari penerimaan devisa nasional. Selain itu, sektor pertambangan di Papua selama ini sangat didominansi hanya oleh satu perusahaan yang bergerak di pertambangan tembaga dan emas yakni PT. Freeport yang berlokasi di Timika.

Di Provinsi Maluku, minyak dan bahan galian menjadi komoditas unggulan dan potensial di Sektor Pertambangan dan Penggalian. Potensi unggulan produk Sektor Pertambangan dan Penggalian di wilayah Provinsi Maluku tersebar pada beberapa daerah di wilayah KAPET Seram. Potensi bahan galian golongan A (minyak bumi dan gas) diketahui keberadaannya tercakup dalam cekungan Seram dengan perkiraan sumber daya tersimpan hipotetik sebesar 1.074 juta barel dan sumber daya terambil hipotetik sebesar 532 juta barel. Bahan galian golongan B (emas) tersimpan dalam wilayah tiga kabupaten di pulau seram. Terakhir, bahan galian golongan C (batu gamping/kapur, mika, sirtu, lempung dan andesit banyak tersebar di Pulau Seram.

Di Provinsi Maluku Utara, Sektor pertambangan dan penggalian sangat vital perannya bagi perekonomian Maluku Utara engan rata-rata kontribusi terhadap PDRB sebesar 10,06% selama kurun waktu Tahun 2012-2018. Ditambah dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mencapai 11,43% pada tahun 2018 dan menduduki urutan ketiga pendorong pertumbuhan. Selain kaya akan nikel yang memiliki potensi 3.610.332.800 ton, Provinsi Maluku Utara memiliki kekayaan mineral lainnya, seperti emas dengan potensi 1,050 ton, pasir besi dengan potensi 479.083.898 ton, mangan dengan potensi 347.974 ton, minyak dengan potensi 0,178 juta barel serta gas bumi dengan potensi 0,2016 TSCF yang tersebar hampir di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara, kecuali Ternate.

7.III. SEKTOR PARIWISATA

Pembangunan kepariwisataan di Indonesia diarahkan agar kegiatan pariwisata menjadi sektor andalan yang mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lain yang berkaitan erat, seperti menghidupkan sektor angkutan, perhotelan, industri makanan minuman, serta industri kreatif lainnya. Regional Maluku

Papua memiliki potensi unggulan yang sangat besar di Sektor Pariwisata. Provinsi Maluku memiliki potensi kepariwisataan berupa keindahan alam, misalnya berupa daya tarik pemandangan bawah laut, gunung api, perbukitan, teluk, danau, serta keramahtamahan masyarakat yang masih belum dieksplorasi secara maksimal. Tercatat bahwa kunjungan wisatawan tahun 2018 ke wilayah Maluku mencapai lebih dari 25 ribu orang, sedangkan Maluku Utara terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya dengan jumlah pengunjung mencapai 350 ribu orang wisatawan. Provinsi Maluku Utara memiliki potensi berupa wisata alam pantai di morotai, wisata festival budaya ternate/tidore/bacan, wisata situs dan napak tilas sejarah perang dunia, wisata minat khusus (bird watching), wisata rempah-rempah, serta event wisata khusus berskala internasional seperti Sail Morotai dan Widi International Fishing Tournament. Pengembangan wisata di Maluku Utara didukung oleh ditetapkannya Maluku Utara sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Provinsi Papua memiliki potensi sektor Pariwisata yang lengkap dengan berbagai macam/jenis wisata yang ditawarkannya, misalnya wisata sejarah, keindahan alam flora dan fauna, pantai, pegunungan,serta event kebudayaan tahunan (festival lembah baliem, festival budaya sentani, dll). Pembangunan sarana prasarana perhubungan seperti pembangunan jalur trans papua serta penyediaan transportasi penghubung diprediksi akan berperan memajukan sektor pariwisata di Provinsi Papua. Di Provinsi Papua Barat, pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Sorong disinyalir akan mendorong tumbuhnya industri berbasis wisata bahari.

8. TANTANGAN FISKAL REGIONAL

8.I. RENDAHNYA IPM REGIONAL MALUKU PAPUA

IPM Regional Maluku Papua dengan rata-rata sebesar 64,37 memiliki posisi yang lebih rendah dari capaian IPM Nasional (70,81). Bahkan pada tahun 2017, dari 34 Provinsi di Indonesia, Papua merupakan satu-satunya provinsi dengan capaian IPM yang masih berstatus rendah (IPM kurang dari 60) sebesar 59,09. Penyumbang rendahnya IPM diantaranya adalah adalah angka harapan hidup dan rata-rata lama sekolah yang lebih rendah dari nasional. Rendahnya angka harapan hidup karena terbatasnya tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan. Selain keterbatasan, penyebaran tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan juga tidak merata. Begitupula dengan pendidikan, regional Maluku Papua masih memiliki keterbatasan guru dan fasilitas pendidikan yang belum memadai. Rendahnya IPM mencerminkan adanya keterbatasan kualitas Sumber Daya Manusia di wilayah Maluku Papua.

8.II. RENDAHNYA KEMANDIRIAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Kemandirian Keuangan daerah di seluruh Pemda di regional Maluku Papua masih rendah. Hal tersebut tercermin dari ketergantungan yang besar dari setiap daerah terhadap pendapatan yang berasal

dari Dana Transfer yang berasal dari pusat. Dana transfer merupakan sumber utama pendapatan seluruh Pemda di Regional Maluku Papua dengan persentase sebesar 92,41% dari keseluruhan pendapatan. Di sisi lain, peranan Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil sebesar 5,64% pada tahun 2018. Pemerintah daerah tidak mampu membiayai kebutuhannya melalui sumber pendapatan sendiri. Kemampuan Pemda dalam memaksimalkan sumber-sumber pendapatan terutama PAD belum dioptimalkan sehingga menyebabkan keterbatasan kemampuan APBD dalam membiayai program-program yang menjadi prioritas yang dapat menunjang perekonomian dan sesuai kebutuhan masyarakat. Bahkan, dari target lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp1.774,86 miliar hanya tercapai 33,23%. PAD yang sangat rendah dapat disebabkan kemampuan memungut pajak yang masih rendah yang salah satu kontributor utama penyebabnya adalah masih lemahnya regulasi untuk memperkuat *local taxing power.* Selain itu, tingginya ketergantungan pemda regional Maluku Papua pada pendapatan yang berasal dari sumber daya alam rentan terhadap fluktuasi kenaikan harga maupun keterbatasan *resources* itu sendiri. Sebagai contoh di Provinsi Papua, adanya penurunan produksi pertambangan dan penggalian sebesar 43,68% membawa pada pertumbuhan ekonomi yang negatif 17,79%.

8.III. PENGELOLAAN APBD YANG BELUM OPTIMAL

Pengelolaan APBD di regional Maluku Papua belum dilaksanakan secara optimal. Dari sisi perencanaan APBD, tantangan terletak pada belum diarahkannya pengalokasian anggaran untuk program/kegiatan yang mendukung pengembangan sektor yang prioritas, potensial dan bersifat investasi. Sebagian besar alokasi belanja APBD masih digunakan untuk membiayai belanja pegawai serta barang/jasa yang kurang memberikan multiplier effect kepada perekonomian. Pada tahun 2018, dari keseluruhan belanja APBD regional Maluku Papua porsi terbesar dimiliki oleh belanja barang dan jasa yang mencapai 30% dan menjadi belanja dengan realisasi terbesar (110,46%). Dari sisi pelaksanaan anggaran, terjadi tantangan berupa ketimpangan pola penyerapan APBD yang cenderung menumpuk di akhir tahun sehingga dapat membawa permasalahan perekonomian regional maupun berdampak nasional. Pola belanja yang tidak ideal dan cenderung overspending pada periode tertentu memicu inflasi di daerah. Selain itu, kondisi menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah regional Maluku Papua dalam mengeksekusi belanja juga masih lemah. Belum optimalnya penyerapan anggaran dan belum baiknya kualitas belanja daerah, pada akhirnya terjadi surplus belanja yang cukup besar pada akhir tahun. Surplus belanja tersebut akhirnya mendorong terjadinya pengendapan dana di perbankan yang cukup tinggi. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah secara serius karena meskipun atas dana yang mengendap tersebut Pemerintah Daerah mendapatkan hasil berupa pendapatan bunga, tapi akan jauh lebih optimal jika dapat direalisasikan

untuk belanja barang dan modal. Dengan demikian akan menambah kuantitas dan kualitas dengan output pelayanan masyarakat dan mendorong perekonomian daerah.

8.IV. PARADOKS *NATURAL RESOURCE CURSE*

Kepemilikan sumber daya alam (natural resources) yang melimpah seharusnya berbanding lurus dengan kemajuan pembangunan suatu wilayah. Sumber daya alam dieksploitasi secara intensif namun tidak diberikan nilai tambah (value added) dimana hanya diekspor sebagai bahan baku (raw materials). Pemerintah daerah di regional Maluku Papua secara umum merupakan daerah berkembang yang mengandalkan sumber daya alam sebagai sumber pendapatan daerahnya. Sumber daya alam dieksploitasi secara intensif namun tidak diberikan nilai tambah (value added), lalu diekspor dalam bentuk bahan baku (raw materials) bukan bahan olahan. Kegiatan eksploitasi secara berlebihan akan mengancam keberlanjutan dari pembangunan ekonomi karena cepat atau lambat sumber daya alam itu dapat habis sama sekali (depletable resources). Selain itu, kegiatan eksploitasi sumber daya alam besar-besaran (booming sector) yang berdampak pada menurunnya daya saing barang yang dihasilkan dari sektor lain.

Fenomena Natural Resource Curse terjadi di Provinsi Papua Barat. Provinsi ini memiliki sumber daya alam melimpah namun dari segi tingkat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi cenderung lebih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain yang tidak memiliki sumber daya alam. Provinsi Papua Barat memiliki cadangan gas terbesar yang diekspor sebagai raw material ke berbagai negara. LNG Tangguh merupakan mega proyek yang membangun kilang LNG di Teluk Bintuni untuk menampung gas alam yang berasal dari beberapa Blok di sekitar Teluk Bintuni seperti Blok Berau, Blok Wiriagar dan Blok Muturi. Mega proyek tersebut merupakan kegiatan pengeboran untuk menarik cadangan gas sebesar 14,4 triliun kaki kubik.

8.V. KETERSEDIAAN INFRA STRUKTUR PENDUKUNG

Pembangunan infrastruktur merupakan fondasi bagi pembangunan ekonomi. Di wilayah regional Maluku Papua, pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang memiliki tantangan khusus, seperti kondisi geografis wilayah papua dengan variasi topografi serta medan akses yang berat, serta hak ulayat dalam pembebasan lahan. Kondisi ini merupakan salah satu elemen yang menjadi barrier pembangunan infrastruktur, terutama infrastruktur transportasi antar wilayah di regional Maluku Papua. Investor cenderung berpikir ulang untuk melakukan investasi atau bahkan menarik diri karena permasalahan penggantian hak ulayat. Tanah ulayat dalam masyarakat diyakini sebagai peninggalan alam nenek moyang kepada masyarakat hukum adat sehingga masyarakat memiliki hubungan lahiriah dan batiniah serta berhak atas pemanfaatan dari sumber daya alam termasuk tanahnya.

8.VI. SOLUSI FISKAL REGIONAL

Solusi yang dapat diberikan atas tantangan

fiskal regional dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian, APBN, APBD, dan sektor unggulan pada regional Maluku Papua di antaranya sebagai berikut:

Pertama, Terkait rendahnya capaian IPM regional Maluku Papua, Pemerintah Daerah perlu memperhatikan prioritas pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. APBD yang disusun diharapkan dapat berpihak untuk kepentingan masyarakat luas khususnya bagi masyarakat yang masih menghadapi kendala akses pendidikan dan kesehatan. Apabila SDM yang berkualitas jumlahnya tidak memadai, maka pembangunan fisik akan berjalan menjadi kurang efisien dan efektif dimana mesin-mesin produksi yang ada menjadi cepat rusak, bahan-bahan banyak yang terbuang dan kualitas dari produksi yang dihasilkan sangat rendah. Oleh karena itu, program perluasan pengadaan layanan kesehatan dan akses pendidikan harus lebih ditingkatkan. Pemerintah Daerah harus mengevaluasi kembali kebijakan kepegawaian, dengan memprioritaskan penerimaan pegawai untuk tenaga kesehatan dan pendidikan serta menjamin pemerataan penempatan tenaga kesehatan dan pendidikan. Selain itu dana desa dapat dioptimalkan untuk pembangunan fasilitas kesehatan berupa polindes. Tersedianya satu polindes setiap desa akan mempermudah akses kesehatan masyarakat desa.

Kedua, Terkait optimalisasi pendapatan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat menggali berbagai potensi PAD. Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang sehat sehingga stabilitas perekonomian dan keamanan dapat terjaga dan investasi dapat masuk yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan daerah. Pemerintah daerah melakukan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi diantaranya melalui: 1) menciptakan kondisi yang kondusif sehingga pajak daerah dapat terealisasi dan mengurangi biaya pemungutan pajak; 2) memperluas basis penerimaan pajak daerah melalui sistem komputerisasi secara terpadu dan mengintensifkan penerimaan pajak. Selain itu, Pemerintah Daerah juga didorong untuk mengembangkan sektor-sektor unggulan dan potensial yang dapat ememberikan kontribusi bagi penerimaan daerah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui transfer bagi hasil dari pemerintah pusat.

Ketiga, Terkait optimalisasi pengelolaan APBD, pemerintah daerah melakukan perbaikan proses penganggaran, Pemerintah daerah harus melakukan efisiensi pos-pos anggaran yang tidak berdampak pada publik, efisiensi ini dilakukan secara berkelanjutan dan digunakan untuk penambahan anggaran program prioritas dan berdampak luas pada perekonomian. Perbaikan pola penyerapan belanja melalui percepatan proses perencanaan dan pengesahan APBD, pelaksanaan proses lelang sebelum tahun anggaran berjalan, serta peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi secara menyeluruh dan tersistem agar permasalahan pelaksanaan anggaran dapat diketahui dan diatasi. Upaya lainnya yang penting dilakukan adalah meningkatkan kapasitas pengelola

keuangan daerah.

Keempat, Salah satu syarat dari keberhasilan pembangunan yaitu adanya penegakkan hukum (Law Enforcement) di semua aspek kehidupan bermasyarakat. Berbeda dari daerah lain, Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki dua sumber hukum yang berbeda yaitu hukum positif dan hukum adat. Hukum positif merupakan hukum yang bersumber dari peraturan perundangan, sedangkan hukum adat merupakan hukum yang bersumber dari keputusan adat. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mendorong penerapan hukum positif yang adil sehingga paradigma bahwa yang hukum adat lebih menguntungkan korban atau penggugat daripada hukum positif dapat berubah.

Kelima, Terkait dengan kutukan sumber daya alam, pemerintah daerah perlu menerapkan beberapa kebijakan sebagai langkah antisipatif, misalnya: mengatur batas eksploitasi sumber daya alam, menegoisasi perjanjian dengan pihak korporasi terkait penggunaan dan pemanfaatan hasil eksploitasi untuk keperluan kawasan/wilayah, pembangunan industri pengolahan/smelter untuk menunjang proses added value dari hasil eksplorasi sumber daya alam, serta mendorong berkembangnya sektor selain pertambangan dan penggalian.

Keenam, terkait dengan pembangunan dan pengembangan infrastruktur pendukung, pemerintah perlu memprioritaskan alokasi APBN dan APBD dalam jumlah besar untuk bidang infrastruktur guna mengakselerasi pembangunan konektivitas di Maluku dan Papua. Selanjutnya, alokasi yang ada harus dioptimalkan atau digunakan secara maksimal. Sebelum proyek infrastruktur dijalankan, pemerintah daerah harus memastikan kesiapan pelaksanaannya, misalnya menjamin legalitas kepemilikan lahan (sertifikasi), serta berkoordinasi/bersepakat dengan pemangku adat agar pekerjaan pembangunan infrastruktur berjaalan lancar.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB 4

ANALISIS KESEHATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

hal. 240
PENDAPATAN DAERAH

hal. 243
BELANJA DAERAH

Penilaian ini dilakukan pada konsolidasi pagu dan realisasi anggaran pemerintah daerah tahun 2018 per provinsi dengan mempergunakan beberapa rasio untuk menilai kesehatan pengelolaan keuangan daerah dari sisi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan. Beberapa rasio yang digunakan menganalisis adalah rasio efektivitas PAD, rasio PAD, rasio Pertumbuhan PAD, rasio belanja modal, rasio belanja pegawai, rasio penyerapan anggaran, dan rasio kemampuan daerah merealisasikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dalam mendanai belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Ketergantungan fiskal pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi pada sebagian besar pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari rasio PAD terhadap total pendapatan daerah yang mencatatkan 24 provinsi berada pada rasio s.d. 20%. Pemerintah Daerah berhasil merealisasikan PAD minimal 80% dari targetnya, sehingga cukup efektif dalam rasio efektifitas PAD. Namun, dalam hal rasio pertumbuhan PAD terdapat 20 provinsi yang bernilai negatif atau jumlah PAD lebih kecil dari tahun 2017. sehingga harapan agar pemerintah daerah makin mandiri masih sulit tercapai berdasarkan data-data PAD tersebut.

Dari sisi belanja daerah, pemerintah daerah belum dapat mendukung program pemerintah pusat untuk percepatan pembangunan infrastruktur, ini terlihat dari rasio belanja modal terhadap total belanja pada seluruh wilayah di Indonesia hanya berkisar 16% s.d. 35. Sisi yang lain rasio belanja pegawai pada sebagian besar wilayah berada pada kisaran rasio 31% s.d. 50%, hanya terdapat 2 provinsi yang belanja pegawainya di bawah 30%.

Berdasarkan rasio indikator yang ada, sebagian besar provinsi masih memiliki kesehatan pengelolaan keuangan yang kurang baik baik itu dari sisi pendapatan daerah maupun dari sisi pemanfaatan dana melalui pengalokasian belanja daerah.

1. PENDAPATAN DAERAH

Otonomi fiskal yang diberikan kepada daerah merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Otonomi fiskal ini akan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD seperti pajak daerah, retribusi, dan lain-lain. Pemerintah daerah dituntut untuk siap menerima beban dan tanggung jawab yang berkaitan dengan potensi yang dimilki dalam mengatur urusan daerahnya sendiri. Artinya daerah didorong untuk mampu meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan transfer dana pusat, peluang yang ada, serta menggali sumber-sumber baru yang potensial untuk meningkatkan PAD.

Sumber-sumber pendapatan suatu daerah adalah dari PAD, pendapatan transfer, dan pendapatan lainnya. Salah satu unsur penilaian kesehatan pengelolaan keuangan daerah dari sisi kemandirian atau pendapatan daerah adalah dengan melihat seberapa besar PAD yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah.

Daerah dengan keterbatasan PAD tentunya akan mengakibatkan mempersempit ruang fiskal bagi daerah untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana penunjang bagi tumbuh dan berkembangnya investasi, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat menjadi tinggi, dibanding dengan daerah yang memiliki PAD memadai.

1.I. EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH

Rasio ini menggambarkan berapa besar pendapatan daerah yang terealisasi dibandingkan dengan yang direncanakan.

TABEL 62. RASIO EFEKTIVITAS PAD TAHUN 2018 (REALISASI PAD/TARGET PENERIMAAN PAD)

No	Rasio (%)	Jumlah Provinsi
1	≤ 25	0
2	26 - 50	0
3	51 - 80	3
4	81 - 100	19
5	> 100	12
	TOTAL	**34**

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

Penetapan target PAD dan upaya pemerintah daerah dalam mencapai target penerimaannya cukup efektif dengan realisasi PAD pada sebagian besar wilayah berada pada rasio di atas 80%, bahkan beberapa provinsi bisa melampaui targetnya.

TABEL 63. LIMA PROVINSI DENGAN RASIO EFEKTIVITAS PAD TERTINGGI TAHUN 2018

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Kalimantan Timur	120
2	DIY	116
3	Kalimantan Barat	115
4	Jawa Timur	113
5	Banten	108

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

Kelima provinsi di atas memiliki Rasio Efektifitas PAD di atas Rasio Efektifitas Nasional sebesar 100%, dengan nilai PAD tertinggi pada provinsi Jawa Timur sebesar Rp 37,24Triliun. Yang menjadi perhatian adalah rasio pada provinsi Kalimantan Barat, peningkatan efektivitas dikarenakan Provinsi Kalimantan Barat menurunkan target PAD tahun 2018 sebesar 507,45 Miliar dari target 2017.

Dari lima provinsi dengan rasio efektifitas

TABEL 64. LIMA PROVINSI DENGAN RASIO EFEKTIVITAS PAD TERENDAH TAHUN 2018

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Bengkulu	82
2	Sulawesi Tenggara	81
3	Sulawesi Tenggah	76
4	Maluku	62
5	Maluku Utara	61

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

PAD terendah, terdapat tiga provinsi yang rasio efektifitas PAD-nya di bawah 80%, yaitu Sulawesi Tenggah, Maluku, dan Maluku Utara. Dengan tahun 2017, Maluku Utara menjadi daerah yang memperoleh rasio terendah selama dua tahun.

1.II. RASIO PENDAPATAN ASLI DAERAH

Secara umum kemandirian fiskal merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah, kemandirian fiskal suatu daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD.

Rasio kemandirian dapat ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan atau rasio transfer ke daerah (termasuk di dalamnya dana perimbangan) terhadap total pendapatan. Untuk rasio yang digunakan dalam analisis ini adalah analisa yang menunjukkan kemandirian daerah dengan mengambil nilai PAD dibandingkan dengan total pendapatan, semakin besar angka rasio

TABEL 65. RASIO PAD TAHUN 2018 REALISASI PAD/ REALISASI TOTAL PENDAPATAN DAERAH)

No	Rasio (%)	Jumlah Provinsi
1	0 – 20	24
2	21 – 40	7
3	41 – 60	2
4	> 60	1
	JUMLAH	**34**

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

PAD maka kemandirian daerah semakin besar. Oleh karena itu, daerah yang memiliki tingkat kemandirian yang baik adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi. Baik 5 provinis tertinggi maupun 5 provinsi terendah, memiliki komposisi yang sama dengan tahun 2017

TABEL 66. LIMA PROVINSI DENGAN RASIO PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERTINGGI TAHUN 2018

No	Provinsi	Rasio (%)
1	DKI Jakarta	71
2	Bali	46
3	Banten	44
4	Jawa Barat	35
5	Jawa Timur	30

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

DKI Jakarta menjadi satu-satunya wilayah yang rasio PAD-nya lebih dominan dibandingkan sumber pendapatan daerah yang lain yaitu 71%. Provinsi lain yang ketergantungannya tidak terlalu tinggi terhadap dana transfer pemerintah pusat adalah Bali dengan rasio 46% dan Banten dengan rasio 43%. Sedangkan wilayah propinsi lain masih harus berjuang untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerahnya. Bahkan terdapat 24 wilayah provinsi yang rasio PAD dibanding total pendapatannya kurang dari 21%. Di wilayah ini, dana transfer pemerintah pusat masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Selain itu, daerah belum mampu meningkatkan sektor-sektor unggulan dalam upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Lima Provinsi di atas memiliki Rasio PAD tertinggi di atas Rasio Nasional sebesar 25%. Bila dibandingkan dengan tahun 2017, provinsi Bali mengalami peningkatan rasio tertinggi

(10%) dibandingkan 4 provinsi lainnya.

Selanjutnya provinsi di kawasan timur Indonesia masih menunjukkan rasio PAD terendah yang tidak sampai 2 digit, hal tersebut dapat menjelaskan persepsi umum atas ketertinggalan wilayah timur Indonesia

TABEL 67. LIMA PROVINSI DENGAN RASIO PAD TERENDAH TAHUN 2018

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Sulawesi Barat	9
2	Maluku	7
3	Maluku Utara	6
4	Papua Barat	5
5	Papua	4

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

1.III. RASIO PERTUMBUHAN PAD

Besarnya tingkat ketergantungan fiskal sebagian besar wilayah di Indonesia harus dapat diatasi melalui percepatan pertumbuhan PAD dari masing-masing daerah. Percepatan pertumbuhan PAD tersebut diukur dengan membandingkan selisih kenaikan/penurunan PAD tahun anggaran yang bersangkutan dari tahun sebelumnya terhadap PAD tahun anggaran sebelumnya. Namun terjadi fenomena penurunan pertumbuhan PAD di sebagian besar provinsi yang juga berdampak secara nasional. Kumulatif pertumbuhan PAD secara nasional bernilai negatif (-1,1%) pada tahun 2018

TABEL 68. RASIO PERTUMBUHAN PAD TAHUN 2018 (PADT1 - PADT0)/PADT0)

No	RASIO (%)	JUMLAH PROVINSI
1	< 0	20
2	0 – 10	11
3	11 – 20	3
4	21 – 50	0
5	> 50	0
	Jumlah	**34**

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

20 provinsi memiliki pertumbuhan angka PAD dibawah 0% pada tahun 2018, termasuk provinsi yang memiliki rasio PAD yang tinggi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Pertumbuhan PAD tertinggi di dominasi oleh daerah di pulau Kalimantan yang dipimpin oleh Provinsi Kalimantan Timur. Peningkatan tersebut dipengarui oleh pertumbuhan penerimana pajak daerah.

TABEL 69. LIMA PROVINSI DENGAN RASIO PERTUMBUHAN PAD TERTINGGI TAHUN 2018

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Kalimantan Timur	14
2	Kalimantan Selatan	12
3	Kepulauan Riau	12
4	Kalimantan Utara	10
5	Bangka Belitung	6

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

Provinsi Papua dan Sulawesi Tenggah secara berturut-turut menjadi daerah yang memiliki pertumbuhan PAD terendah pada 2017-2018. Pemda belum mampu meningkatan PAD baik dari sisi Pendapatan Pajak Daerah, Restribusi, Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan maupun pendapatan yang sah lainnya. Sehingga dibutuhkan stimulus berupa kebijakan yang mampu menciptakan iklim perekonomian yang kondusif. Sektor riil seperti perindustrian, perdagangan dan perkembangan usaha kecil dan menengah yang selama ini masih belum optimal, harus diberi dukungan kebijakan dari pemerintah

TABEL 70. LIMA PROVINSI DENGAN RASIO PERTUMBUHAN PAD TERENDAH TAHUN 2018

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Nusa Tenggara Barat	(14)
2	Papua	(14)
3	Sulawesi Tenggah	(16)
4	Nusa Tenggara Timur	(23)
5	Maluku Utara	(26)

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

terutama kebijakan pemanfaatan dana transfer daerah untuk sektor-sektor yang produktif. Lima provinsi dengan rasio pertumbuhan PAD terendah, tidak dapat meningkatkan realisasi PADnya dibandingkan dengan PAD tahun sebelumnya.

2. BELANJA DAERAH

Belanja daerah yang berkualitas diharapkan dapat menjadi injeksi bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat daerah. Oleh karena, perlu disusun rencana belanja untuk melaksanakan program/ kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pendapatan, serta pembangunan di berbagai sektor.

Namun adanya keterbatasan sumber-sumber pendapatan daerah, prioritas belanja dan perencanaan yang baik multak harus dilakukan. Hal itu menjadi kunci untuk menyiasati kendala penganggaran, terutama kegiatan yang dapat direalisasikan secara bertahap.

2.I. RASIO BELANJA MODAL

Rasio ini untuk mengukur porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah. Rasio ini mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk belanja modal.

TABEL 71. RASIO BELANJA MODAL APBD TAHUN 2018 (REALISASI BELANJA MODAL/ REALISASI TOTAL BELANJA APBD)

No	Rasio (%)	Jumlah Provinsi
1	≤ 15	0
2	16 - 25	29
3	26 - 35	5
4	36 - 50	0
5	> 50	0
	Jumlah	**34**

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

Belanja modal ditambah belanja barang dan jasa, merupakan belanja pemerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Secara nasional rata-rata rasio Belanja Modal APBD sebesar 22% menurun dari tahun 2017 sebesar 25%. Rasio seluruh provinsi masih berkisar antara 16% s.d. 35%, dimana 29 provinsi diantaranya mempunyai rasio belanja modal berkisar antara 16% s.d. 25%. Kondisi ini menunjukkan sebagian besar provinsi di Indonesia masih menganggarkan belanja modal dengan proporsi yang kecil.

TABEL 72. LIMA PROVINSI DENGAN RASIO BELANJA MODAL APBD TERTINGGI TAHUN 2017

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Papua Barat	32
2	Kalimantan Timur	30
3	Lampung	28
4	Kalimantan Tenggah	27
5	Maluku Utara	27
	Jumlah	**27**

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

Rasio belanja modal terhadap total belanja daerah tertinggi di Papua Barat yaitu 32% diikuti oleh Provinsi Kalimantan Timur 30%. Hal ini seiring dengan maraknya pembangunan fisik di wilayah luar jawa terutama kawasan timur Indonesia, bahkan Papua Barat merupakan salah satu provinsi baru di Indonesia yang sedang giat melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Beberapa wilayah provinsi di Jawa (Jatim, Jateng, dan Jabar), Raiu dan Bali justru

TABEL 73. LIMA PROVINSI DENGAN RASIO BELANJA MODAL APBD TERENDAH TAHUN 2017

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Jawa Timur	19
2	Riau	19
3	Jawa Tenggah	18
4	Jawa Barat	18
5	Bali	15

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

mencatatkan rendahnya angka rasio belanja modal terhadap total belanja daerah, sehingga nilai yang dicatatkan masing-masing tidak mencapai angka 21% (di bawah rata-rata rasio belanja modal nasional).

2.II. RASIO BELANJA PEGAWAI

Rasio ini mengukur porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah. Semakin tinggi angka rasio belanja pegawai, maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan begitu sebaliknya. Belanja pegawai yang dihitung dalam rasio ini melipui belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tidak langsung. Semakin rendah angka rasionya, semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi karena sebagian belanja dapat dialihkan untuk belanja modal. Semakin tinggi angka rasionya maka penilaian kesehatan pengelolaan keuangan akan semakin jelek.

TABEL 74. RASIO BELANJA PEGAWAI APBD TAHUN 2018 (REALISASI BELANJA PEGAWAI/REALISASI TOTAL BELANJA APBD)

No	Provinsi	Rasio (%)
1	> 50	-
2	41 - 50	15
3	31 - 40	17
4	21 - 30	2
5	≤ 20	-
	JUMLAH	**34**

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

Secara agregat seluruh provinsi, kabupaten dan kota, rata-rata rasio belanja pegawai terhadap total belanja daerah tahun 2018 adalah 39%. Berdasar Rasio belanja pegawai agregat, tersebut terdapat 15 provinsi yang rasionya lebih rendah dari rata-rata nasional, sedangkan 19 provinsi yang lain memiliki rasio belanja pegawai yang lebih di atas rata-rata nasional.

TABEL 76. LIMA PROVINSI DENGAN RASIO BELANJA PEGAWAI APBD TERTINGGI TAHUN 2018

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Sulawesi Tengah	47
2	Jambi	47
3	Bengkulu	46
4	Nusa Tenggara Timur	46
5	Sumatera Barat	45

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

Provinsi yang memiliki rasio belanja pegawai paling kecil adalah Provinsi Papua Barat, yaitu sebesar 25%, sedangkan provinsi yang memiliki angka rasio yang paling besar adalah Provinsi Sulawesi Tengah dengan rasio sebesar 47%. Sama dengan tahun sebelumnya, tahun 2018 ini tidak ada provinsi yang memiliki rasio belanja pegawai lebih dari 50%, hal ini berarti bahwa tidak ada daerah yang belanjanya masih didominasi oleh belanja pegawai.

TABEL 75. LIMA PROVINSI DENGAN RASIO BELANJA PEGAWAI APBD TERENDAH TAHUN 2018

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Maluku	36
2	Banten	35
3	Maluku Utara	31
4	Papua	26
5	Papua Barat	25

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

Kondisi ini perlu dipertahankan atau bahkan lebih ditingkatkan lagi, karena secara implisit provinsi-provinsi yang menganggarkan

sebagian kecil APBD-nya untuk belanja pegawai akan dapat mendanai lebih banyak program dan kegiatan daerah di luar belanja pegawai, khususnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

2.III. RASIO PENYERAPAN ANGGARAN

Rasio ini menggambarkan berapa besar belanja daerah yang dapat terealisasi dibandingkan dengan pagu yang direncanakan pemerintah. Rasio realisasi belanja APBD dinilai baik apabila mendekati angka 100% atau sama dengan pagu yang direncanakan.

TABEL 77. RASIO PENYERAPAN APBD TAHUN 2018 (REALISASI BELANJA APBD/PAGU BELANJA APBD)

No	Rasio (%)	Jumlah Provinsi
1	< 60	-
2	60 - 75	9
3	76 - 85	23
4	86 - 95	2
5	96 - 100	0
	JUMLAH	**34**

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

Rata-rata rasio realisasi penyerapan anggaran seluruh pemerintah daerah di Indonesia tahun 2017 adalah sebesar 79%. Terdapat 22 wilayah yang dapat mencapai angka rasio tersebut, sedangkan sisanya sebanyak 12 wilayah belum. Wilayah Kepulauan Riau menjadi wilayah dengan penyerapan anggaran yang paling tinggi disusul Sumatera Selatan dan Gorontalo.

TABEL 78. LIMA PROVINSI DENGAN RASIO PENYERAPAN APBD TERTINGGI TAHUN 2018

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Kepulauan Riau	86
2	Sumatera Selatan	86
3	Gorontalo	85
4	D I Yogyakarta	85
5	Nusa Tenggara Barat	83

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

TABEL 79. LIMA PROVINSI DENGAN RASIO PENYERAPAN APBD TERENDAH TAHUN 2017

No	Provinsi	Rasio (%)
1	Kalimantan Utara	74
2	Bali	73
3	Papua	72
4	Aceh	72
5	Papua Barat	65

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

Terdapat lima provinsi yang memiliki rasio penyerapan APBD paling rendah yaitu Papua Barat (65%), Aceh (72%), Papua (72%), Bali (73%), dan Kalimantan Utara (74%).

2.IV. RASIO KEMAMPUAN MEREALISASIKAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN PENERIMAAN

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA ini erat hubungannya dengan kemampuan keuangan daerah untuk merealisasikan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dalam mendanai belanja dan pengeluaran pembiayaannya.

Seluruh wilayah provinsi mencatatkan angka yang positif terhadap rasio ini. Hal ini berarti seluruh wilayah memiliki kemampuan untuk mendanai belanjanya melalui upaya untuk mendapatkan pendapatan dan penerimaan pembiayaan. Secara rata-rata nasional angka rasio ini adalah sebesar 124%.

Terdapat 18 provinsi yang memiliki rasio kemampuan merealisasikan pendapatan dan pembiayaan Penerimaan di atas rata-rata nasional, dan sisanya terdapat 16 provinsi yang memiliki rasio di bawah rata-rata nasional.

TABEL 80. RASIO KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH MEREALISASIKAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DALAM MENDANAI BELANJA DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN TAHUN 2018

(Realisasi Pendapatan Daerah + Realisasi Penerimaan Pembiayaan) /(Realisasi Belanja Daerah + Realisasi Pengeluaran Pembiayaan)

No	Provinsi	Rasio (%)	No	Provinsi	Rasio (%)
1	Papua	150	18	Riau	124
2	Jawa Timur	136	19	Sulawesi tenggah	123
3	Aceh	134	20	Sulawesi Utara	122
4	Kalimantan Timur	134	21	Gorontalo	120
5	Papua Barat	134	22	Bengkulu	120
6	Kalimantan Selatan	132	23	Nusa Tenggara Barat	119
7	Jawa Barat	131	24	DKI Jakarta	119
8	Jambi	130	25	Sulawesi Tenggara	119
9	Bali	129	26	Sumatera Utara	118
10	Jawa tenggah	128	27	Sumatera Barat	118
11	Bangka Belitung	128	28	Sulawesi barat	118
12	Nusa Tenggara Timur	127	29	Kalimantan Utara	118
13	DI Yogyakarta	126	30	Sulawesi Selatan	118
14	Kalimantan Tenggah	124	31	Maluku Utara	117
15	Kalimantan Barat	124	32	Kepulauan Riau	116
16	Banten	124	33	Maluku	114
17	Sumatera Selatan	124	34	Lampung	113

Sumber: Direktorat APK, Ditjen Perbendaharaan

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

BAB 5

KINERJA PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA SERTA KETERKAITAN DENGAN BELANJA K/L

hal. 252
PELAKSANAAN PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA 2018

hal. 265
KETERKAITAN DAK FISIK DAN DANA DESA DENGAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

DANA
DESA
K/L

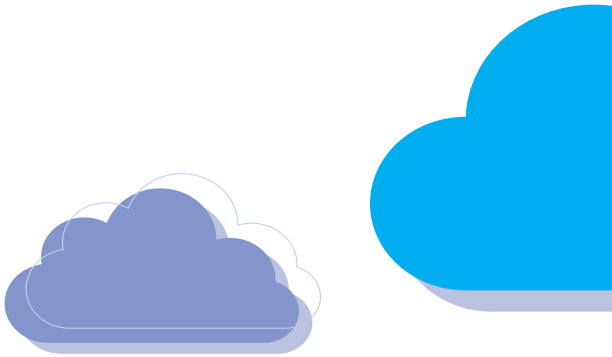

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dimana penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada TA 2018 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui 172 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia, yang berperan selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah kerjanya masing-masing.

1. PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA TAHUN 2018

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dimana penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa pada TA 2018 dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui 172 KPPN yang tersebar di seluruh Indonesia, yang berperan selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah kerjanya masing-masing.

a. Dari sisi mekanisme penyaluran, DAK Fisik bertahap disalurkan sebagai berikut:
   1. Penyaluran DAK Fisik Tahap I dilaksanakan paling cepat bulan Februari 2018 – paling lambat bulan Juli 2018, dengan dokumen persyaratan:
      a) Perda APBD TA berjalan (berupa hasil rekapitulasi Penerimaan Perda APBD dari Ditjen Perimbangan Keuangan);
      b) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA sebelumnya;
      c) Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L Teknis terkait.
      d) Daftar Kontrak Kegiatan

      Dokumen persyaratan disampaikan paling lambat 23 Juli 2018
   2. Penyaluran DAK Fisik Tahap II dilaksanakan paling cepat bulan April 2018 – paling lambat bulan Oktober 2018, dengan dokumen persyaratan laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahap I.

      Dokumen persyaratan disampaikan paling lambat 21 Oktober 2018.
   3. Penyaluran DAK Fisik Tahap III dilaksanakan paling cepat bulan September 2018 – paling lambat bulan Desember 2018, dengan dokumen persyaratan:
      a) laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70%.
      b) Laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian output 100%.

      Dokumen persyaratan disampaikan paling lambat 15 Desember 2018.

b. DAK Fisik sekaligus dilaksanakan sebagai berikut:
   1. Alokasi Bidang kurang atau sama dengan Rp 1 Miliar.
   2. Dapat dilaksanakan sekaligus sebesar kebutuhan dana dalam rangka penyelesaian output kegiatan DAK Fisik
   3. Rentang waktu penyaluran adalah bulan April – Juli 2018
   4. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat tanggal 23 Juli 2018
   5. Dokumen Persyaratan :
      a) Rekapitulasi penerimaan Perda mengenai APBD tahun anggaran

berjalan;

b) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya; dan

c) Daftar kontrak Kegiatan.

c. Penyaluran sebagian atau seluruhnya sekaligus, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Alokasi Bidang lebih dari Rp 1 Miliar.
2. Berdasarkan rekomendasi dari K/L yang diterima DJPK paling lambat bulan Februari 2018
3. DJPK menyampaikan ketetapan penyaluran yang tidak dapat dilaksanankan secara bertahap kepada KPA Penyaluran melalui Koordinator KPA.
4. Rentang waktu penyaluran sekaligus : bulan Agustus – Desember 2018
5. Dokumen Persyaratan :
   a) rekapitulasi penerimaan Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan (seluruh kegiatan sekaligus);
   b) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya (seluruh kegiatan sekaligus);
   c) Daftar kontrak Kegiatan dan
   d) Daftar BAST.

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 3 tahap dengan ketentuan: (i) 20% untuk Tahap I yang dilakukan setelah Pemda menyampaian Perda APBD dan Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; (ii) 40% untuk Tahap II yang dilakukan setelah Pemda menyampaikan Laporan realisasi penyaluran Dana Desa TA sebelumnya dan Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output TA sebelumnya, serta (iii) 40% untuk Tahap III yang dilakukan setelah minimal 75% Dana disalurkan ke rekening desa, rata-rata penyerapan 75%, serta rata-rata capaian output mencapai 50%.

1.I. KINERJA PENYALURAN DAK FISIK PER REGIONAL

DAK Fisik dialokasikan dalam APBN TA 2018 sebesar Rp62,44 Triliun terdiri dari: (i) Rp61,68 Triliun disalurkan secara bertahap,

GAMBAR 103. INFOGRAFIS PAGU & REALISASI DAK FISIK PER REGIONAL

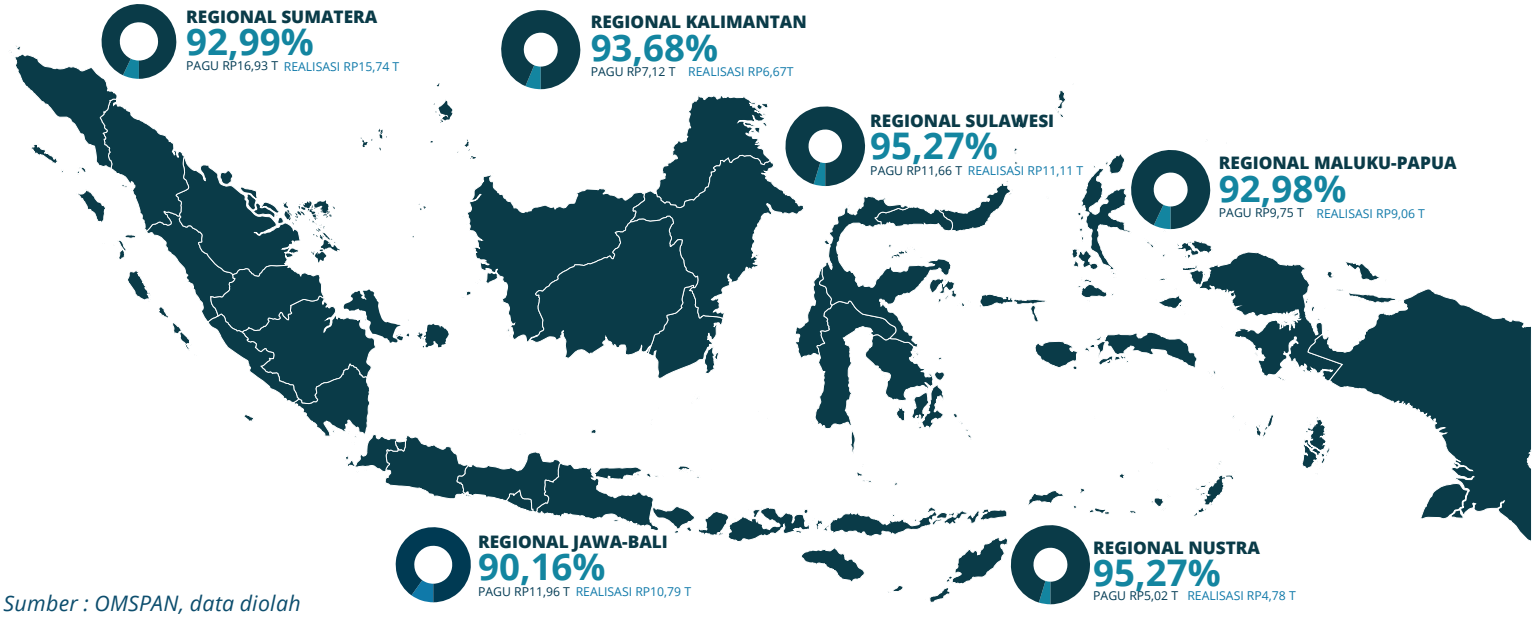

Sumber : OMSPAN, data diolah

(ii) Rp328,81 Miliar disalurkan secara sekaligus berdasarkan rekomendasi, dan (iii) Rp431,35 Miliar disalurkan secara sekaligus. Total realisasi penyaluran DAK Fisik sampai dengan akhir TA 2018 adalah sebesar Rp58,15 Triliun atau 93,13% dari pagu sebesar Rp 62,44 Triliun.

Penyaluran DAK Fisik Bertahap dilaksanakan pada 540 Pemda di 33 Provinsi (kecuali DKI Jakarta). Sampai dengan akhir tahun 2018 penyaluran DAK Fisik bertahap mencapai Rp57,48 Triliun atau 93,20% dari total pagu sebesar Rp61,68 Triliun, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penyaluran DAK Fisik Tahap I (Februari s.d 31 Juli) adalah sebesar 25%, telah direalisasikan penyaluran sebesar Rp 15,27 Triliun atau 24,76%.
2. Penyaluran DAK Fisik Tahap II (April s/d Oktober) adalah sebesar 45%, dengan nilai realisasi penyaluran mencapai sebesar Rp42,53 Triliun atau 68,94%.
3. Penyaluran DAK Fisik Tahap III (September s/d Desember) adalah sebesar selisih antara jumlah dana yg telah disalurkan s.d. Tahap II dengan nilai rencana penyelesaian kegiatan, realisasi mencapai sebesar Rp57,48 Triliun atau 93,20%.

Penyaluran DAK Fisik Rekomendasi Sekaligus dilaksanakan untuk Bidang tertentu dengan pagu di atas Rp1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah) yaitu khusus DAK Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan DAK Affirmasi Bidang Transportasi yang dapat disalurkan sebagian atau seluruhnya sekaligus. Rentang waktu penyalurannya dari bulan Agustus sampai dengan Desember 2018. Realisasi penyaluran sampai dengan akhir TA 2018 sebesar Rp283,25 Miliar atau 86,14% dari pagu sebesar Rp328,81 Miliar.

Persentase realisasi penyaluran tertinggi terdapat pada regional Jawa yaitu sebesar 92,54% dengan nilai penyaluran sebesar Rp17,05 Miliar. Sedangkan persentase realisasi penyaluran terendah pada regional Kalimantan yaitu sebesar 72,93% dengan nilai penyaluran sebesar Rp 12,13 miliar.

Penyaluran DAK Fisik Sekaligus dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juli 2018.

Realisasi DAK Fisik Sekaligus sampai dengan

GAMBAR 104. PAGU DAN REALISASI DAK FISIK REKOMENDASI SEKALIGUS PER REGIONAL

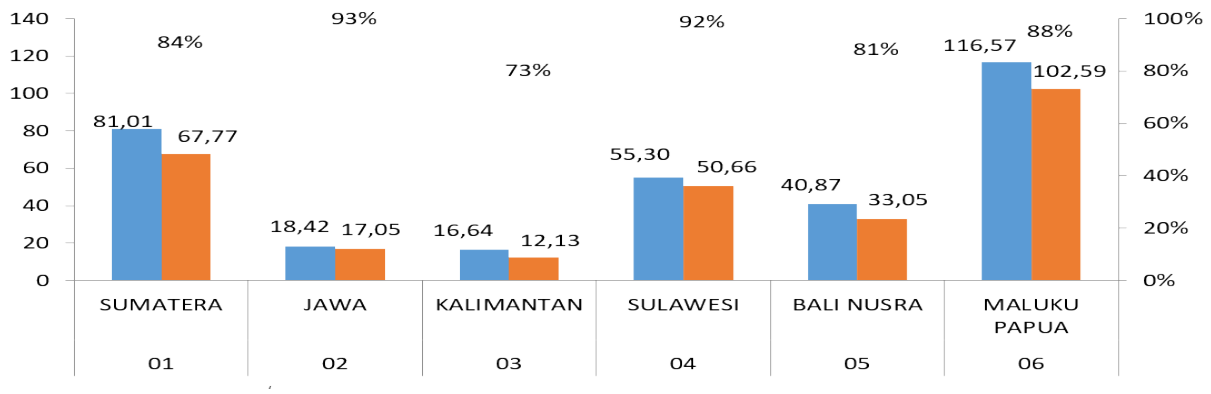

Sumber : OMSPAN, data diolah

GAMBAR 105. PAGU DAN REALISASI DAK FISIK SEKALIGUS PER REGIONAL

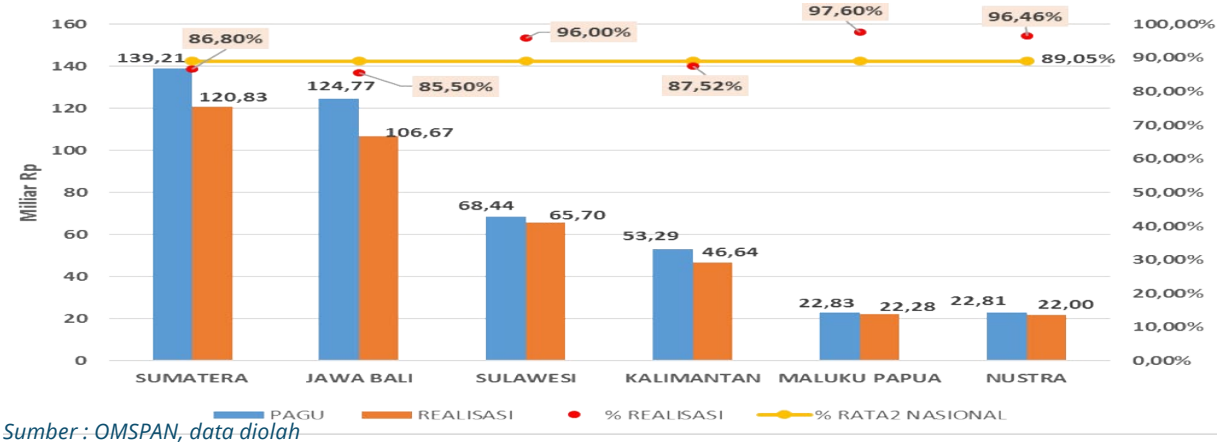

Sumber : OMSPAN, data diolah

tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp384,13 Miliar (89,05%) dari pagu sebesar Rp431,35 Miliar. Rincian realisasi DAK Fisik Sekaligus tiap regional dibandingkan dengan rata-rata realisasi nasional

Grafik tersebut menunjukkan bahwa terdapat 3 regional (Sulawesi, Maluku-Papua, dan Bali-Nusa Tenggara) yang realisasi penyalurannya berada di atas rata-rata realisasi alokasi DAK Fisik Sekaligus secara nasional yaitu 89,05%. Sementara itu terdapat 3 regional (Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan) yang realisasi penyalurannya berada di bawah rata-rata realisasi nasional.

1.II. KINERJA PENYALURAN DAK FISIK PER JENIS

Total alokasi pagu DAK Fisik TA 2018 sebesar Rp62,44 Triliun, terdiri dari 3 (tiga) jenis DAK Fisik yang meliputi jenis DAK Fisik Reguler dengan alokasi pagu sebesar Rp31,35 Triliun, DAK Fisik Penugasan dengan alokasi pagu sebesar Rp24,46 Triliun, dan DAK Fisik Affirmasi sebesar Rp6,62 Triliun. Sampai dengan akhir TA 2018, total realisasi DAK Fisik Reguler sebesar Rp29,41 Triliun atau 93,82% dari pagu, total realisasi DAK Fisik Penugasan sebesar Rp22,48 Triliun atau 91,90% dari pagu, serta total realisasi DAK Fisik Affirmasi sebesar Rp6,25 Triliun atau 94,45% dari pagu. Rincian realisasi per regional dari jenis DAK Fisik.

TABEL 81. PAGU DAN REALISASI PER JENIS DAK FISIK PER REGIONAL

KODE AKUN	JENIS DAK	REGIONAL	PAGU Rp miliar	REALISASI Rp miliar	% REALISASI
631111	DAK Reguler	SUMATERA	9,164.36	8,611.44	93.97%
		JAWA	7,890.14	7,220.68	91.52%
		BALI NUSRA	2,016.13	1,871.91	92.85%
		KALIMANTAN	3,119.77	2,930.40	93.93%
		SULAWESI	6,329.33	6,071.44	95.93%
		MALUKU PAPUA	2,831.11	2,706.10	95.58%
631212	DAK Penugasan	SUMATERA	6,606.86	6,033.67	91.32%
		JAWA	3,370.65	2,958.35	87.77%
		BALI NUSRA	2,345.12	2,221.72	94.74%
		KALIMANTAN	3,539.24	3,304.70	93.37%
		SULAWESI	4,742.75	4,498.41	94.85%
		MALUKU PAPUA	3,859.04	3,465.92	89.81%
631311	DAK Affirmasi	SUMATERA	1,155.78	1,095.14	94.75%
		JAWA	73.89	71.46	96.71%
		BALI NUSRA	1,289.02	1,226.63	95.16%
		KALIMANTAN	458.02	432.20	94.36%
		SULAWESI	586.61	536.89	91.52%
		MALUKU PAPUA	3,058	2,892.24	94.57%
		JUMLAH	**62.436,26**	**58.149,30**	**93,13%**

Sumber : OMSPAN, data diolah

1.III. KINERJA PENYALURAN DAK FISIK PER BIDANG

Total penyaluran DAK Fisik sebesar Rp58,15 Triliun atau 93,13% dari alokasi untuk 26 bidang. Penyaluran terbesar pada Bidang Pendidikan dengan persentase 96,18% dan nilai penyaluran Rp5,29 Triliun, sedangkan penyaluran terkecil pada Bidang Energi Skala Kecil dengan persentase sebesar 61,45% dan nilai penyaluran sebesar Rp307,32 Miliar.

Sampai dengan akhir TA 2018 dari realisasi penyaluran DAK Fisik per regional, realisasi t erbesar ada pada Bidang Jalan (Penugasan) hampir pada semua regional. Realisasi terbesar pada Bidang Jalan (Reguler) pada regional Sumatera sebesar Rp2,72 Triliun atau 95,78% dari total pagu sebesar Rp2,84 Triliun. Sedangkan realisasi terendah terdapat pada Bidang Pasar (Penugasan) pada regional Jawa sebesar Rp23,53 Milyar atau 80,32% dari total pagu sebesar Rp29,29 Miliar.

TABEL 82. PAGU DAN REALISASI DAK FISIK PADA RKUD PER BIDANG

	BIDANG	PAGU (miliar Rp)	REALISASI (miliar Rp)	% REALISASI
1	Pendidikan	9.137,51	5.289,07	96,18%
2	Kesehatan	17.979,71	16.626,75	92,48%
3	Perumahan & Pemukiman	1.029,60	971,85	94,39%
4	Pertanian	1.681,68	1.552,34	92,31%
5	Kelautan dan Perikanan	879,70	798,29	90,75%
6	Sentra Industri Kecil & Menengah	563,69	501,68	89,00%
7	Pariwisata	631,95	563,70	89,20%
8	Air Minum	2.070,75	1.906,12	92,05%
9	Sanitasi	2.160,99	2.062,17	95,43%
10	Jalan	18.202,86	17.358,28	95,36%
11	Pasar	1.772,69	1.575,34	88,87%
12	Irigasi	4.246,18	3.787,75	89,20%
13	Energi Skala Kecil	500,10	307,32	61,45%
14	Lingkungan Hidup & Kehutanan	500,72	394,26	78.74%
15	Transportasi	1.078,13	954,71	88,55%
	JUMLAH	**62.436,26**	**58.149,29**	**93,13%**

Sumber : OMSPAN, data diolah

GAMBAR 106. REALISASI DAK FISIK PER BIDANG PER REGIONAL

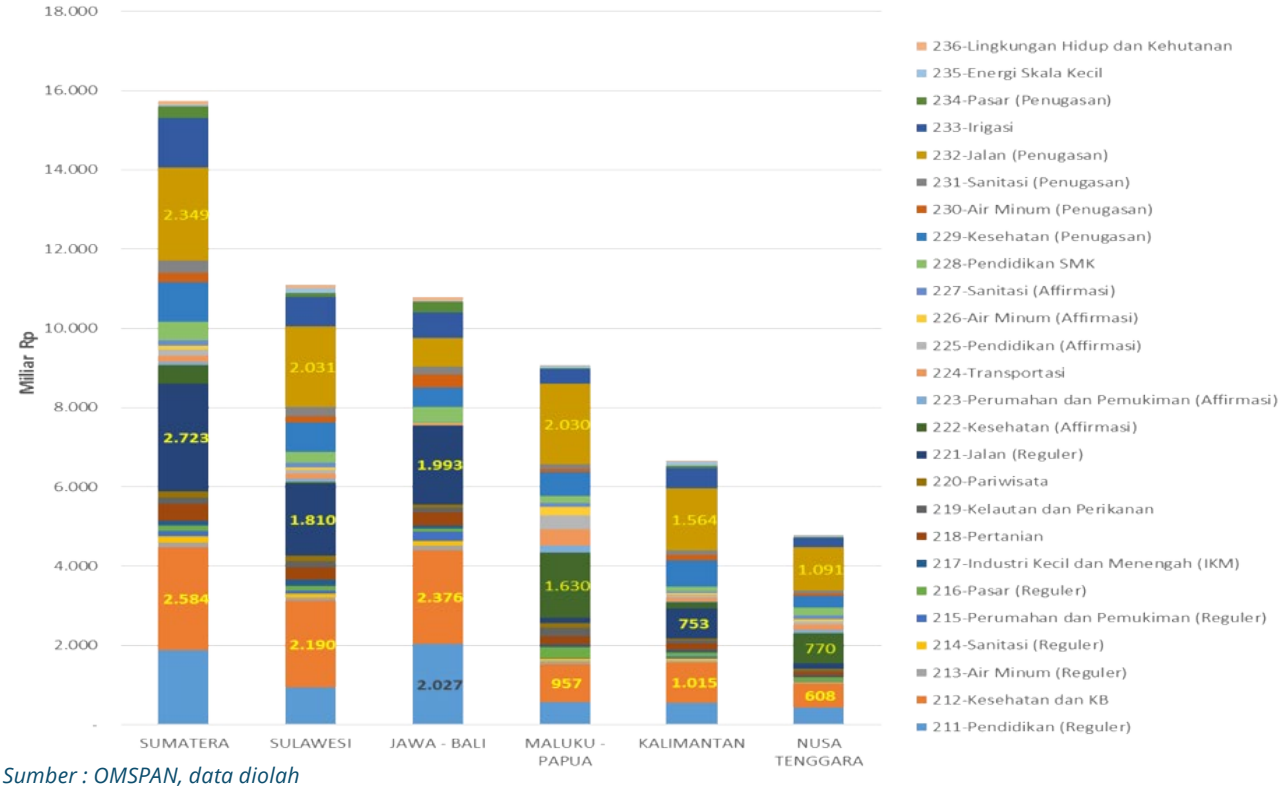

Sumber : OMSPAN, data diolah

2. PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DAK FISIK

2.I. KINERJA PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DAK FISIK PER REGIONAL

Total penyerapan/penggunaan DAK Fisik dari RKUD ke pihak ketiga (vendor) per regional sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp46,82 Triliun atau 80,52% dari dana yang diterima dari RKUN. Persentase rata-rata capaian output DAK per regional adalah sebesar 80,52%

TABEL 84. PENYERAPAN DAK FISIK (RKUD KE VENDOR) TA 2018 PER REGIONAL (MILIAR RUPIAH)

	Regional	RKUN ke RKUD	RKUD ke Vendor	% Penyerapan	% Capaian Output
1	SUMATERA	15.740,25	12.790,37	81,26%	94,54%
2	JAWA BALI	10.786,91	8.617,42	79,89%	95,67%
3	KALIMANTAN	6.667,70	5.824,81	87,36%	96,63%
4	SULAWESI	11.106,73	9.023,01	81,24%	92,33%
5	NUSA TENGGARA	4.783,85	3.725,14	77,87%	94,20%
6	MALUKU PAPUA	9.064,26	6.844,43	75,51%	88,72%
	JUMLAH	**58.149,70**	**46.825,18**	**80,52%**	**93,83%**

Sumber : OMSPAN, data diolah

Penyerapan dana yang diterima dari RKUN terbesar terdapat pada Regional Kalimantan yakni 87,36% dengan nilai penyerapan sebesar Rp5,82 Triliun. Penyerapan terendah terdapat pada Regional Maluku Papua yakni 75,51% dengan nilai penyerapan sebesar Rp6,84 Triliun. Dari rata-rata persentase capaian output DAK Fisik, terdapat 4 (empat) regional yang realisasi capaian outputnya di atas rata-rata capaian output nasional, yaitu Regional Kalimantan (96,63%), Jawa Bali (95,67%), Sumatera (94,54), dan Nusa Tenggara (94,20%), sedangkan dua regional lainnya memiliki capaian output di bawah rata-rata capaian output Nasional. Berdasarkan klasifikasi penyaluran, hanya ada satu Provinsi dengan penyerapan di atas 80%.

TABEL 83. PENYERAPAN DAK FISIK (RKUD KE VENDOR) TA 2018

NO	%PENYERAPAN	JUMLAH PROVINSI
1	> 80%	1
2	76%-80%	10
3	70%-75%	9
4	< 70%	13
	JUMLAH	**33**

Sumber : OMSPAN, data diolah

2.II. KINERJA PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DAK FISIK PER BIDANG

Total penyerapan DAK Fisik sebesar Rp46,83 Triliun atau 80,53% dari total penyaluran (RKUN ke RKUD) teralokasikan dalam 3 jenis (reguler, infrastruktur publik daerah(IPD)/ penugasan, dan afirmasi) yang terdiri dari 26 bidang. Grafik menyajikan persentase penyerapan atau penyaluran DAK Fisik dari RKUD ke pihak ketiga terbesar pada Bidang Jalan (Reguler) yaitu sebesar 94,15% dengan nilai penyerapan sebesar Rp7,12 Triliun dari pagu sebesar Rp7,56 Triliun, sementara persentase terendah pada Bidang Pendidikan (Affirmasi) yaitu sebesar 38,26% dengan nilai penyerapan sebesar Rp299,40 Miliar dari pagu sebesar Rp782,52 Miliar

rata-rata persentase capaian output DAK Fisik secara nasional adalah sebesar 93,83%. Persentase capaian output DAK Fisik terbesar pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yakni sebesar 96,96%, sementara realisasi capaian output terendah pada Bidang Perumahan dan Pemukiman (Affirmatif) sebesar 87,79%.

GAMBAR 107. REALISASI DAK FISIK PER BIDANG

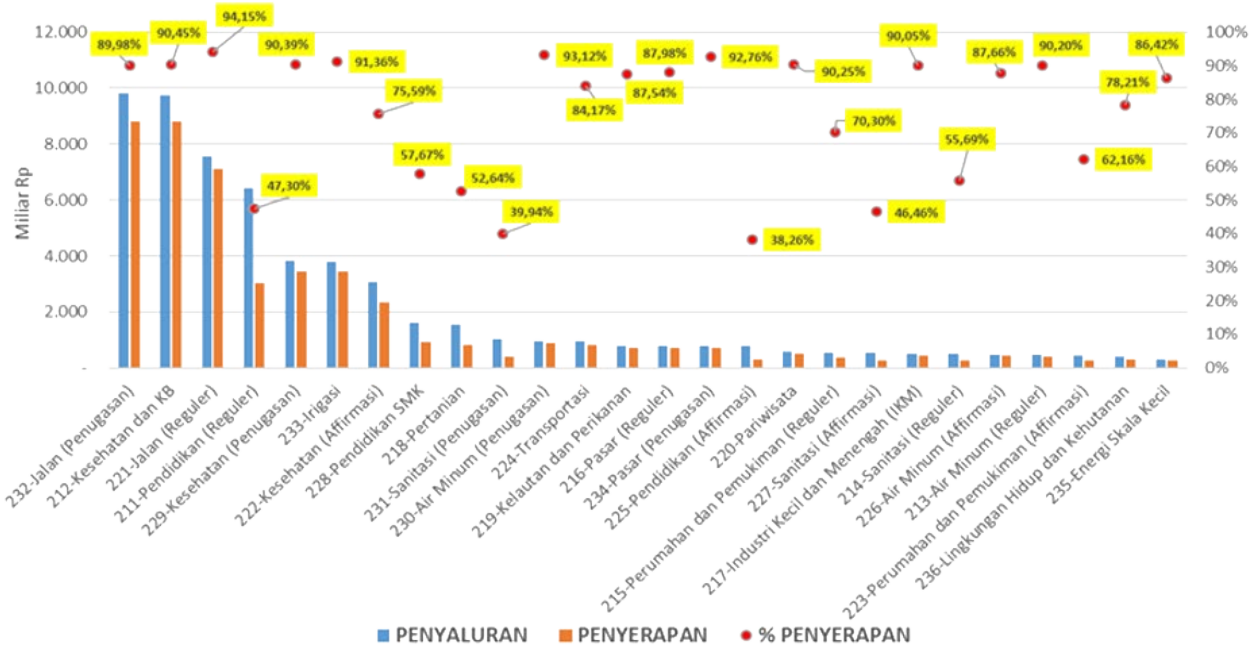

Sumber : OMSPAN, data diolah

Capaian output DAK Fisik diwujudkan dalam 15 bidang/uraian kegiatan output, yang meliputi Pendidikan, Kesehatan, Air Minum, Sanitasi, Perumahan dan Pemukiman, Pasar, Industri Kecil dan Menengah, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Jalan, Transportasi, Irigasi, Energi Skala Kecil dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sampai akhir TA 2018, bidang Pendidikan mempunyai capaian output meliputi

GAMBAR 108. PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT PER BIDANG

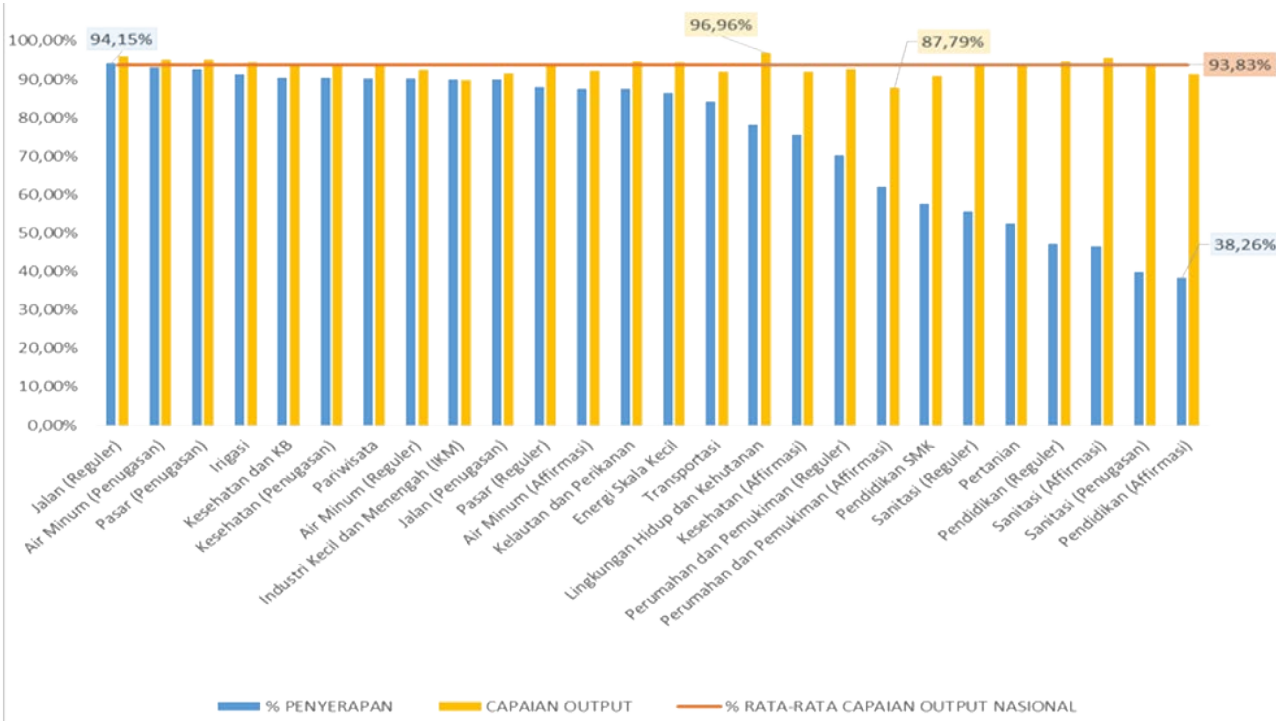

Sumber : OMSPAN, data diolah

Pembangunan Ruang Kelas sebanyak 26.369 Ruang, Pembangunan Mess/Rumah Dinas Guru sebanyak 118 Unit, Pembangunan Perpustakaan sebanyak 953 Unit, Rehabilitasi Ruang Kelas sebanyak 42.557 Ruang, Pengadaan Buku sebanyak 1.022 Paket dan Sarana Pendidikan Lainnya sebanyak 17.518 Unit. Untuk Bidang Kesehatan volume capaian output yang dihasilkan meliputi Pengadaan Ambulans sebanyak 475 Unit, Pengadaan Laboratorium sebanyak 1.310 Paket, Pembangunan Puskesmas sebanyak 91.603 Unit, Pengadaan Obat sebanyak 17.187 Paket, Pengadaan Peralatan Kesehatan sebanyak 178.055 Unit, dan Sarana Kesehatan Lainnya sebanyak 429.273 Unit. Untuk Bidang Jalan volume capaian output yang dicapai meliputi Pembangunan Jalan sepanjang 462.093 Km, Pembangunan Jembatan sebanyak 36.916,5 Meter, dan Peningkatan/Rehab Jembatan sebanyak 34.827,8 Meter.

3. PENYALURAN DANA DESA TA 2018

3.I. KINERJA PENYALURAN DANA DESA PER REGIONAL

Pada APBN TA 2018 dialokasikan Dana Desa sebesar Rp60 Triliun untuk 74.956 Desa pada 434 Pemda di 33 Provinsi yang dalam realisasinya berkurang sebanyak 5 Desa hilang yaitu pada Kab. Muna (1 desa), Kab. Konawe Kepulauan (1 desa), Kab. Mamberamo Raya (2 desa) dan Kab. Bolaang Mongondow Timur (1 desa), sehingga Dana Desa hanya dapat disalurkan untuk 74.951 Desa. Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilaksanakan oleh 169 KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dalam 3 (tiga) tahap.

Penyaluran Dana Desa tahap I dilaksanakan paling cepat bulan Januari 2018 dan paling lambat Minggu ke-3 bulan Juni 2018, sebesar 20% dari total pagu Dana Desa dengan persyaratan surat pemberitahuan bahwa Pemda yang bersangkutan telah menyampaikan Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan dan Peraturan Bupati/ Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa. Dari pagu tahap I sebesar Rp12 Triliun, telah direalisasikan sebesar Rp12 Triliun atau 100% dari pagu tahap I.

Penyaluran Dana Desa tahap II dilaksanakan paling cepat bulan Maret 2018 dan paling lambat Minggu ke-4 bulan Juni 2018, sebesar 60% dari total pagu Dana Desa dengan persyaratan Laporan realisasi penyaluran Dana Desa TA sebelumnya dan Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa TA sebelumnya. Dari pagu tahap II sebesar Rp24 Triliun, telah direalisasikan sebesar Rp23,86 Triliun atau 99,42% dari pagu tahap II.

Sedangkan realisasi penyaluran Dana Desa pada tahap III sebesar Rp24,00 Triliun atau 99,99% dari pagu tahap III (Rp24 Triliun) dilaksanakan paling cepat bulan Juli 2018 setelah persyaratan dipenuhi yaitu Laporan realisasi penyaluran Dana Desa s.d. Tahap II paling sedikit 75% dari Dana Desa yang telah diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD dan Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa s.d. Tahap II, yg

TABEL 85. PENYALURAN DANA DESA (RKUN KE RKUD) TA 2018 PER REGIONAL (MILIAR RUPIAH)

	REGIONAL	PAGU	REALISASI	% REALISASI
1	SUMATERA	17,266.85	17,188.30	99.55%
2	JAWA	19,169.00	19,144.20	99.87%
3	BALI-NUSRA	4,060.56	4,059.04	99.96%
4	KALIMANTAN	5,287.35	5,269.85	99.67%
5	SULAWESI	6,845.66	6,838.37	99.89%
6	MALUKU PAPUA	7,370.58	7,359.65	99.85%
	JUMLAH	**60,000.00**	**59,859.41**	**99.77%**

Sumber : OMSPAN, data diolah

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% dari Dana Desa yg diterima di RKUD dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50%. Sampai dengan batas akhir penyaluran Dana Desa TA 2018, total realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp59,86 Triliun atau sekitar 99,77% dari total Pagu.

Pagu Dana Desa terbesar terdapat pada regional Jawa sebesar Rp19.169 Miliar atau 31,95% dari total pagu. Persentase realisasi penyaluran tertinggi pada regional Bali-Nusra sebesar Rp4.059,04 Miliar dari pagu Rp4.060,56 Miliar atau 99,96%. Persentase penyaluran terendah terdapat pada regional Sumatera sebesar Rp17.188,30 Miliar dari pagu Rp17.266,85 Miliar atau 99.55%. Sedangkan persentase penyaluran per provinsi, dari 33 provinsi terdapat 7 provinsi dengan penyaluran 100% pagu dan tidak terdapat provinsi dengan penyaluran dibawah 97%,

TABEL 86. PENYALURAN DANA DESA (RKUN KE RKUD) TA 2018

No	% Penyaluran	Jumlah Provinsi
1	100%	7
2	98%-99%	26
3	<97%	-
	JUMLAH	**33**

Sumber : OMSPAN, data diolah

3.II. KINERJA PENYERAPAN DANA DESA DARI RKUD KE REKENING KAS DAERAH (RKD)

Pemerintah daerah harus menyalurkan dana desa yang telah diterima RKUD ke RKD selambat lambatnya 7 hari kerja. Selanjutnya Dana ini akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan prioritas dan kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.Sisa dana desa di RKUD yang tidak disalurkan ke RKD sampai dengan bulan Juni tahun berjalan, sisa dana akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran dana desa tahap II tahun anggaran berikutnya. Tabel 5.8 menunjukkan bahwa total penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebesar Rp59.859,4 Miliar, dengan penyaluran RKUD ke RKD sebesar Rp55.637,0 Miliar (92,9%) sehingga sisa Dana Desa pada RKUD adalah sebesar Rp4.222,4 Miliar (7,1%).

TABEL 87. PENYALURAN DANA DESA (RKUN KE RKUD) TA 2018 PER REGIONAL (MILIAR RUPIAH)

	REGIONAL	RKUN - RKUD	RKUD - RKD	% REALISASI
1	SUMATERA	17,188.30	16,223.67	94.39%
2	JAWA	19,144.20	18,419.08	96.21%
3	BALI-NUSRA	4,059.04	3,767.26	92.81%
4	KALIMANTAN	5,269.85	5,099.92	96.78%
5	SULAWESI	6,838.37	6,320.98	92.43%
6	MALUKU PAPUA	7,359.65	5,806.07	78.89%
	JUMLAH	**60.000,00**	**55.637,00**	**92,95%**

Sumber : OMSPAN, data diolah

Persentase penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD sebagian besar diatas 90%, kecuali di regional Maluku Papua persentase penyaluran hanya 78,9% dengan penyaluran sebesar Rp5.806,1 Miliar dari jumlah Rp7.359,6 Miliar dana di RKUD. Sedangkan persentase penyaluran per provinsi, dari 33 provinsi terdapat 5 provinsi dengan penyaluran dana

desa dari RKUD ke RKD 100%, sedangkan penyaluran kurang dari 80% hanya terjadi di 2 provinsi

TABEL 88. PENYALURAN DANA DESA DARI RKD KE RKD TA 2018

No	Rasio (%)	Jumlah Provinsi
1	100%	5
2	90%-99%	18
3	80%-89%	8
4	70%-79%	2
	JUMLAH	**33**

Sumber : OMSPAN, data diolah

3.III. KINERJA PENGGUNAAN DANA DESA

Pada prinsipnya, penggunaan dana desa diarahkan untuk membiayai pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Dana Desa dalam 5 bidang yaitu Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Sebagian besar dana yang telah disalurkan dipergunakan untuk membiayai bidang Pembangunan Desa sebesar Rp29.651 Miliar atau 89,53% dari penyerapan Dana Desa sebesar Rp33,12 Triliun atau 62,23% dari dana yang diterima di RKD.

4. KINERJA CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

Capaian output Dana Desa tersebar dalam 5 bidang yaitu Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

4.I. CAPAIAN OUTPUT BIDANG PEMBANGUNAN DESA

Capaian output untuk Bidang Pembangunan Desa diwujudkan dalam 30 item kategori capaian output, yang meliputi: Jalan Desa, Drainase, Rumah Layak Huni, Penerangan Jalan, Perpustakaan Desa, Posyandu, PAUD, Air Bersih, dan Jembatan. Sampai dengan akhir TA

GAMBAR 109. OUTPUT DANA DESA PER BIDANG

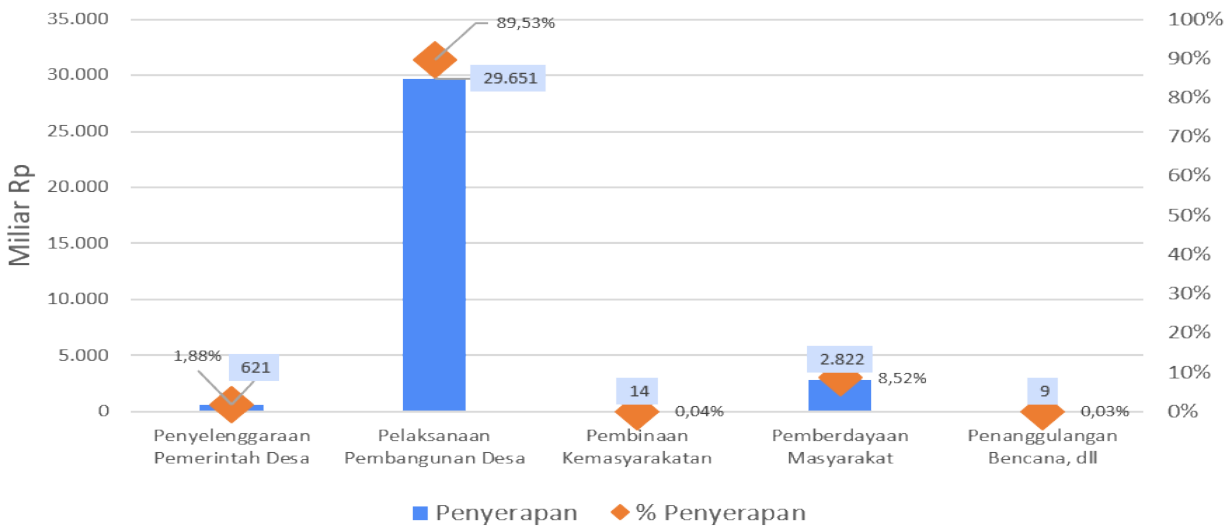

Sumber : OMSPAN, data diolah

TABEL 89. CAPAIAN OUTPUT BIDANG PEMBANGUNAN DESA

	OUTPUT	PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN OUTPUT	
			VOLUME	SATUAN
1	Air Bersih	706.871.679.221	418.157	UNIT
2	Alat Peraga Edukatif (APE)	11.444.492.887	136.421	UNIT
3	Ambulan	112.838.081.749	1.180	UNIT
4	Balai Kemasyarakatan	610.624.706.066	43.586	UNIT
5	Bantuan Pendidikan	68.096.078.508	63.958	ORANG
6	Drainase	2.243.522.945.199	2.946.189	PAKET
7	Embung	118.835.532.094	131.373	UNIT
8	Gapura/Batas Desa	96.367.235.293	36.896	UNIT
9	Gizi Balita	146.441.561.533	860.443	UNIT
10	Hutan Desa	2.653.189.837	2.938	PAKET
11	Jalan Desa	14.439.283.452.005	71.653.496	METER (M)
12	Jaringan Air Bersih	251.236.044.796	2.766.743	METER (M)
13	Jembatan	913.188.664.957	357.666	UNIT
14	MCK	597.939.552.176	201.411	UNIT
15	Operasional Polindes/PKD	305.829.896.885	287.645	PAKET
16	PAUD	767.482.142.032	259.402	UNIT
17	Pembukaan Lahan	69.300.341.157	78.879	PAKET
18	Penerangan Jalan	320.364.421.570	244.011	UNIT
19	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar	1.002.545.946.318	2.214.903	ORANG
20	Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar	1.341.111.654.977	1.597.345	UNIT
21	Peralatan Posyandu	23.205.897.902	9.866	UNIT
22	Perpustakaan Desa	224.640.823.171	392.510	UNIT
23	Polindes/PKD	225.872.070.780	63.743	UNIT
24	Posyandu	451.709.238.688	27.496	UNIT
25	Rambu Jalan Desa	4.331.871.339	4.340	UNIT
26	Rumah Layak Huni	2.217.624.487.591	161.544	UNIT
27	Saluran Limbah RT	16.192.520.015	98.670	METER (M)
28	Sanitasi	81.599.581.913	867.741	METER (M)
29	Sarana Prasarana	2.274.025.997.866	1.169.682	UNIT
30	Tanah Posyandu	5.952.289.505	64.754	M2
	JUMLAH	**29.651.132.398.030**		

Sumber : OMSPAN, data diolah

2018 total penyerapan Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp29,65 Triliun. Penyerapan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa terbesar digunakan untuk Jalan Desa sebesar Rp14,44 Triliun dengan volume capaian output sebesar 71.653,5 Km, sedangkan penggunaan terkecil untuk membiayai Hutan Desa sebesar Rp2,65 Miliar dengan volume capaian output sebesar 2.938 Paket. Berdasarkan pendekatan regional, penyerapan Dana Desa untuk Bidang Pembangunan Desa tertinggi terdapat pada regional Jawa-Bali dengan total penyerapan Rp10,37 Triliun, sementara penyerapan terendah pada regional Nusa Tenggara sebesar Rp1,54 Triliun.

4.II. CAPAIAN OUTPUT BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Capaian output untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat diwujudkan dalam 11 item

TABEL 90. CAPAIAN OUTPUT BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

	OUTPUT	PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN OUTPUT	
			VOLUME	SATUAN
1	Bantuan Pertanian/Perikanan	550.204.845.181	3.497.234	PAKET
2	BUMDesa	1.135.643.880.118	591.507	PAKET
3	Dermaga	12.542.273.760	585	UNIT
4	Honorarium	10.877.384.463	21.033	ORANG/PAKET
5	Irigasi	652.675.785.860	813.807	UNIT
6	Kolam Perikanan	23.333.418.348	104.761	UNIT
7	Lumbung Desa	27.080.603.517	14.755	UNIT
8	Pasar Desa	229.663.770.810	48.208	UNIT
9	Pelatihan BUMDesa	48.331.743.963	60.075	ORANG
10	Pelatihan Teknologi Tepat Guna	64.402.234.039	198.980	UNIT
11	Sarana Lainnya	67.305.334.512	167.106	PAKET
	JUMLAH	**2.822.061.274.571**		

Sumber : OMSPAN, data diolah

kategori capaian output, yang meliputi BUMDesa, Irigasi, Bantuan Pertanian/ Perikanan, dan Pasar Desa. Sampai dengan tanggal akhir TA 2018, total penyerapan Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebesar Rp2,82 Triliun. Penyerapan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat terbesar digunakan untuk BUMDesa sebesar Rp1,14 Triliun dengan volume capaian output sebesar 591.507 Paket, sedangkan penggunaan terkecil untuk Honorarium sebesar Rp10,88 Miliar dengan volume capaian output sebesar 21.033 Orang/paket. Berdasarkan pendekatan regional, penyerapan Dana Desa untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat tertinggi terdapat pada regional Jawa-Bali dengan total penyerapan sebesar Rp851,95 Miliar, sementara penyerapan terendah pada regional Kalimantan sebesar Rp178,45 Miliar.

4.III. CAPAIAN OUTPUT BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAH DESA

Capaian output Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa diwujudkan dalam 8 item kategori capaian output, yang meliputi Bangunan Kantor Desa, Rehab Kantor Desa, Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin, Rastra, dan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan. Sampai dengan tanggal

TABEL 91. CAPAIAN OUTPUT BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

	OUTPUT	PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN OUTPUT	
			VOLUME	SATUAN
1	Administrasi PBB	637.409.329	50	PAKET
2	Bangunan Kantor Desa	492.101.069.156	39.010	UNIT
3	Gaji-Tunjangan	27.563.990.741	16.362	ORANG/BULAN
4	Jaminan Sosial Perangkat Desa	2.961.188.100	3.095	ORANG/PAKET
5	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.913.831.187	847	PAKET
6	Rastra	5.332.014.908	11.488	KALI
7	Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin	4.683.353.008	6.219	UNIT
8	Rehab Kantor Desa	85.945.650.500	26.955	UNIT
	JUMLAH	**621.138.506.929**		

Sumber : OMSPAN, data diolah

akhir TA 2018, total penyerapan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa sebesar Rp621,14 Miliar. Penyerapan Dana Desa untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa terbesar digunakan untuk Bangunan Kantor Desa sebesar Rp492,1 Miliar dengan volume capaian output sebesar 39.010 Unit, sedangkan penggunaan terkecil untuk pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan sebesar Rp1,91 Miliar dengan volume capaian output sebesar 847 Paket. Berdasarkan pendekatan regional, penyerapan Dana Desa untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa tertinggi terdapat pada regional Sumatera dengan total penyerapan sebesar Rp345,99 Miliar, sementara penyerapan terendah pada regional Nusa Tenggara sebesar Rp17,93 Miliar.

4.IV. CAPAIAN OUTPUT BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Capaian output Bidang Pembinaan Kemasyarakatan diwujudkan dalam 3 item kategori capaian output, yang meliputi Bantuan Hukum, FKAKD, dan Operasional Rumah Ibadah. Sampai dengan tanggal akhir TA 2018, total penyerapan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebesar Rp13,78 Miliar. Penyerapan Dana Desa untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan terbesar digunakan Operasional Rumah Ibadah sebesar Rp7,21 Miliar dengan volume capaian output sebesar 2.128 Orang/paket, sedangkan penggunaan terkecil untuk FKAKD sebesar Rp1,03 Miliar dengan volume capaian output sebesar 283 Kali. Berdasarkan pendekatan regional, penyerapan Dana Desa untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan tertinggi terdapat pada regional Sumatera dengan total penyerapan sebesar Rp4,58 Miliar, sementara penyerapan terendah pada regional Sulawesi sebesar Rp728 Juta.

4.V. CAPAIAN OUTPUT BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK DESA

Capaian output Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diwujudkan dalam 2 item kategori capaian output, yang meliputi Penanganan Keadaan Darurat/Mendesak dan Penangulangan Bencana Alam. Sampai dengan tanggal akhir TA 2018, total penyerapan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa sebesar Rp9,08 Miliar. Penyerapan Dana Desa untuk Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa terbesar pada regional Jawa-Bali dengan total penyerapan sebesar Rp4,42 Miliar, sementara penyerapan terendah pada regional Maluku-Papua sebesar Rp59 Juta.

TABEL 92. CAPAIAN OUTPUT BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

	OUTPUT	PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN OUTPUT	
			VOLUME	SATUAN
1	Bantuan Hukum	5.542.124.862	7.062	KALI
2	FKAKD	1.034.047.265	283	KALI
3	Operasional Rumah Ibadah	7.205.857.483	2.128	ORANG/PAKET
	JUMLAH	**13.782.029.610**		

Sumber : OMSPAN, data diolah

TABEL 93. CAPAIAN OUTPUT BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK DESA

	OUTPUT	PENYERAPAN (Rp)	CAPAIAN OUTPUT	
			VOLUME	SATUAN
1	Keadaan Darurat/Mendesak	1.221.507.279	993	KALI
2	Penanggulangan Bencana Alam	7.856.049.897	2.052	KALI
	JUMLAH	9.077.557.176		

Sumber : OMSPAN, data diolah

5. KETERKAITAN DAK FISIK DAN DANA DESA DENGAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

5.I. KEBIJAKAN PRIORITAS PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH

Pemerintah harus mampu mewujudkan tujuan nasional melalui pembangunan. Pembangunan dimaksud dilakukan oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga atau K/L), maupun Pemerintah Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam Perencanaan Pembangunan nasional. Sesuai PP Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional menyatakan bahwa sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional adalah suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran pembangunan nasional serta pengendalian pencapaian sasaran pembangunan. Sinkronisasil dilakukan untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran sehingga lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Selanjutnya RPJM ini dijabarkan per tahun dan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP disusun dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial dengan kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program*. Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, terdapat beberapa bidang yang menjadi prioritas nasional, antara lain Bidang Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Permukiman, Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, Ketahanan Energi, Ketahanan Pangan, Penanggulangan Kemiskinan, Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman, Pembangunan Wilayah, Politik Hukum dan Hankam, Asian Games dan Asian Para Games 2018.

Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional diatas, tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat dan antara Pemerintah Kab/Kota dengan Pemerintaah Pusat dan Pemprov. Sinkronisasi kebijakan Pembangunan Daerah dengan rencana pembangunan Lainnya dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan daerah, pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, serta pembangunan antar daerah. Hasil Sinkronisasi ini lebih lanjut dituangkan dalam rancangan

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran.

5.II. KETERKAITAN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA K/L, DAK FISIK DAN DANA DESA

Sebagai satu kesatuan dalam Perencanaan Pembangunan Nasional, Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus sejalan dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat. Demikian pula pembangunan dibiayai melalui DAK Fisik dan Dana Desa. Dari berbagai kategori/bidang yang ada dan telah dialokasikan anggarannya baik oleh K/L maupun Pemda melalui DAK Fisik dan Dana Desa terdapat beberapa kategori/bidang yang dapat dikatakan selaras antara lain kategori/bidang yang terkait dengan Jalan, Irigasi, Sanitasi, Pasar, Sentra Industri Kecil dan Menengah, Air Minum, Rumah/Permukiman dan Kesehatan. Kegiatan DAK Fisik TA 2018 pada tujuh bidang sejalan dengan Bidang pada RKP 2018. Kegiatan DAK Fisik TA 2018 yang dapat dikatakan sejalan dengan pelaksanaan anggaran K/L, antara lain: terdapat Bidang Jalan dengan output berupa jalan pemda, mendukung konektivitas dengan volume 462.093 Km senilai Rp15,87 Triliun. DAK Fisik Bidang Irigasi dengan output berupa Pembangunan Jaringan Irigasi dengan volume 1.012.803 Unit senilai Rp1,04 Triliun, mendukung program kedaulatan pangan. Bidang Sanitasi dengan output berupa terbangunnya Sarana Sanitasi dengan volume 91.396 unit senilai Rp912,9 Miliar, mendukung pengembangan kawasan industri. Bidang Pasar dengan output berupa Pembangunan Pasar Rakyat dengan volume 3.029 Unit senilai Rp1,36 Triliun, mendukung pengembangan kawasan ekonomi.

Demikian juga dengan penggunaan Dana Desa pada Bidang Pembangunan dan

TABEL 94. KETERKAITAN PELAKSANAAN ANGGARAN PADA K/L, DAK FISIK DAN DANA DESA

	Kementerian dan Lembaga			DAK Fisik			Dana Desa		
	Kategori	Volume	Realisasi (miliar Rp)	Kategori	Volume	Realisasi (miliar Rp)	Kategori	Volume	Realisasi (miliar Rp)
1	Jalan Nasional	449.751,8 Km	24.082,50	Jalan Pemda	462.093 Km	15.870,00	Jalan Desa	71.653,5 Km	14.439,30
2	Irigasi	127.181 Ha	8.294,00	Pembangunan Jaringan Irigasi	1.012.803 Unit	1.044,90	Irigasi	813.807 Unit	652,7
3	Layanan Kesehatan	2.613.463 Layanan	500,9	Sanitasi	91.396 Unit	912,9	Sanitasi	867.741 Meter	81,6
4	Pasar	15.063 Unit	99,9	Pasar Rakyat	3.029 Unit	1.362,60	Pasar Desa	48.208 Unit	229,7
5	UMKM	1.130 Unit	102,9	Sentra Industri Kecil & Menengah	1.178 Unit	294,1	BUMDesa	591.507 Paket	1.135,60
6	SPAM Air Bersih	53.917 Unit	2.423,80	Pembangunan SPAM	171.732 Unit	245,9	Air Bersih	418.157 Unit	706,9
7	Rumah, Kawasan Permukiman	81.902 Unit	1.939,90	Pembangunan Rumah Swadaya	53.223 Unit	584,1	Rumah Layak Huni	161.544 Unit	2.217,60
8	Rumah Sakit (Sarana Kesehatan)	547 Unit	15,4	Puskesmas	91.603 Unit	9.000,80	Posyandu & Polindes	91.239 Unit	677,6

Sumber : OMSPAN, data diolah

Pemberdayaan Masyarakat juga terdapat output yang mendukung kegiatan prioritas pada RKP 2018. Output Dana Desa berupa Jalan Desa dengan volume 71.653,5 Km senilai Rp14,44 Triliun, mendukung konektivitas. Output berupa Irigasi dengan volume 813.807 Unit senilai Rp652,7 Miliar, mendukung program kedaulatan pangan. Output Dana Desa berupa Sarana Sanitasi dengan volume 867.741 Meter senilai Rp81,6 Miliar, mendukung pengembangan kawasan industri. Output Dana Desa berupa Pasar Desa dengan volume 48.208 Unit senilai Rp229,7 Miliar, mendukung pengembangan kawasan ekonomi. Output Dana Desa berupa BUMDesa dengan volume 591.507 Paket senilai Rp1,14 Triliun, mendukung pengembangan kawasan ekonomi. Output Dana Desa berupa Air Bersih dengan volume 418.157 Unit senilai Rp706,9 Miliar, mendukung pembinaan pelayanan kesehatan. Output Dana Desa berupa Rumah Layak Huni dengan volume 161.544 Unit dan sebesar Rp2,22 Triliun, mendukung pengembangan pariwisata serta output Dana Desa berupa Posyandu & Polindes dengan volume 91.239 Unit senilai Rp677,6 Miliar.

6. REKOMENDASI PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA

Dalam mewujudkan sinkronisasi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa peranan KPPN semakin strategis dalam pelaksanaan anggaran pusat dan Daerah, mendorong peningkatan tugas dan fungsi *Treasury Management Representatif* (TMR) dalam tugasnya sebagai pembina pelaksanaan anggaran keuangan pusat dan daerah.
2. KPPN dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat meningkatkan analisis terhadap pelaksanaan penyaluran, penyerapan, capaian output, dan outcome yang dihasilkan baik DAK Fisik maupun Dana Desa sehingga sinkronisasi pelaksanaan DAK Fisik, Dana Desa, dan Pelaksanaan Anggaran Kementerian Lembaga bisa dilaksanakan semakin baik.
3. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dapat melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah kerja masing-masing dengan bekerjasama dengan kementerian/ Lembaga terkait lainnya, seperti Pemda dan Kementerian Desa tertinggal dan Transmigrasi.
4. Ditjen Perbendaharaan bersama dengan Ditjen Perimbangan Keuangan memberikan arahan dan panduan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN, untuk melakukan koordinasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan anggaran DAK Fisik dan Dana Desa.

7. PENYALURAN DAK FISIK DAN DANA DESA TA 2019

Mengacu pada PMK Nomor 50/PMK.07/2017

jo.PMK Nomor 121/PMK.07/2018, terdapat perubahan kebijakan dalam pengelolaan DAK Fisik dan Dana Desa. Perubahan kebijakan baru yang paling menjadi perhatian adalah persyaratan penyaluran DAK Fisik berupa Laporan Realisasi dan Capaian Output yang harus melalui reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

a. Dari sisi mekanisme penyaluran, DAK Fisik bertahap disalurkan sebagai berikut:
   1. Penyaluran DAK Fisik Tahap I dilaksanakan paling cepat bulan Februari 2019 – paling lambat bulan Juli 2019, dengan dokumen persyaratan:
      a) Perda APBD TA berjalan (berupa hasil rekapitulasi Penerimaan Perda APBD dari Ditjen Perimbangan Keuangan);
      b) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik TA sebelumnya yang telah direviu APIP.
      c) Rencana Kegiatan yang telah disetujui oleh K/L Teknis terkait.
      d) Daftar Kontrak Kegiatan.
   2. Penyaluran DAK Fisik Tahap II dilaksanakan paling cepat bulan April 2019 – paling lambat bulan Oktober 2019, dengan dokumen persyaratan laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 75% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahap I yang telah direviu APIP.
   3. Penyaluran DAK Fisik Tahap III dilaksanakan paling cepat bulan September 2019 – paling lambat bulan Desember 2019, dengan dokumen persyaratan:
      a) laporan realisasi penyerapan dana yang menunjukkan paling sedikit 90% dari dana yang telah diterima di RKUD dan capaian output kegiatan DAK Fisik sampai dengan tahap II yang menunjukkan paling sedikit 70% yang telah direviu APIP.
      b) Laporan yang memuat nilai rencana penyelesaian kegiatan dalam rangka penyelesaian capaian output 100%.

b. DAK Fisik sekaligus dilaksanakan sebagai berikut:
   1. Alokasi Bidang kurang atau sama dengan Rp 1 Miliar.
   2. Dapat dilaksanakan sekaligus sebesar kebutuhan dana dalam rangka penyelesaian output kegiatan DAK Fisik.
   3. Rentang waktu penyaluran adalah bulan April – Juli 2019.
   4. Batas waktu penyampaian dokumen persyaratan paling lambat tanggal 22 Juli 2019.
   5. Dokumen Persyaratan :
      a) Rekapitulasi penerimaan Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan;
      b) Laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya yang telah direviu APIP; dan
      c) Daftar kontrak Kegiatan.

c. Penyaluran sebagian atau seluruhnya sekaligus, dengan ketentuan sebagai berikut:
   1. Alokasi Bidang kurang dari Rp 1 Miliar.

2. Berdasarkan rekomendasi dari K/L yang diterima DJPK paling lambat bulan Februari 2019.
3. DJPK menyampaikan ketetapan penyaluran yang tidak dapat dilaksanankan secara bertahap kepada KPA Penyaluran melalui Koordinator KPA.
4. Rentang waktu penyaluran sekaligus : bulan Agustus – Desember 2019.
5. Dokumen Persyaratan :
   a) rekapitulasi penerimaan Perda mengenai APBD tahun anggaran berjalan (seluruh kegiatan sekaligus);
   b) laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan DAK Fisik tahun anggaran sebelumnya (seluruh kegiatan sekaligus) yang telah direviu APIP;
   c) Daftar kontrak Kegiatan. dan
   d) Daftar BAST.

Penyaluran Dana Desa dilaksanakan dalam 3 tahap dengan ketentuan: (i) 20% untuk Tahap I yang dilakukan setelah Pemda menyampaian Perda APBD dan Perkada mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa; (ii) 40% untuk Tahap II yang dilakukan setelah Pemda menyampaikan Laporan realisasi penyaluran Dana Desa TA sebelumnya dan Laporan Konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output TA sebelumnya, serta (iii) 40% untuk Tahap III yang dilakukan setelah minimal 75% Dana disalurkan ke rekening desa, rata-rata penyerapan 75%, serta rata-rata capaian output mencapai 50%.

Penyaluran Dana Desa Tahap III tahun 2019 dapat dilakukan dua kali penyaluran. Penyaluran Tahap III batch pertama untuk desa-desa yang dalam memenuhi persyaratan penyaluran tahap III lebih awal. Disalurkan sebesar 40% dikalikan pagu desa-desa yang memenuhi persyaratan lebih awal tersebut. Penyaluran tahap III batch kedua disalurkan kepada desa-desa yang belum menerima penyaluran setelah rata-rata keseluruhan desa memenuhi persyaratan tahap III.

BAB 6

REPSON FISKAL PEMERINTAH

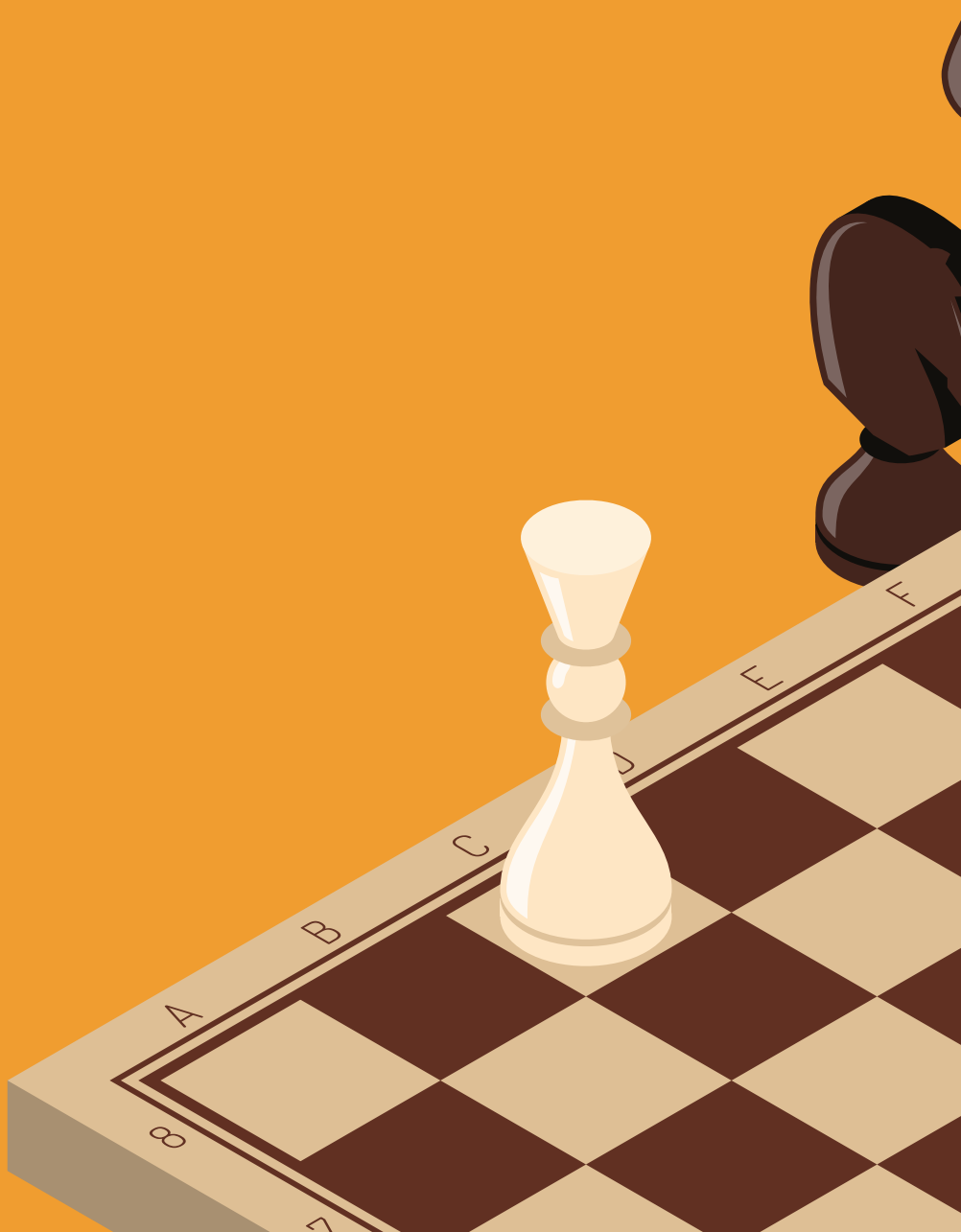

hal. 274
REGIONAL SUMATERA

hal. 276
REGIONAL JAWA

hal. 278
REGIONAL KALIMANTAN

hal. 280
REGIONAL SULAWESI

hal. 281
REGIONAL BALI-NUSRA

hal. 283
REGIONAL MALUKU-PAPUA

Pengembangan wilayah pada tahun 2018 bertujuan untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Dalam rangka mendukung tujuan tersebut, diharapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah senantiasa memperhatikan kondisi dan karakteristik masing-masing daerah dalam mengalokasikan dana (APBN dan APBD). Kemandirian fiskal daerah harus semakin ditingkatkan dengan upaya-upaya berkesinambungan, sehingga tingkat kemandirian daerah semakin tinggi. Disamping itu, sinergi dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam merumuskan kebijakan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Arah kebijakan pengembangan wilayah di tahun 2018 ditujukan untuk mendorong pertumbuhan sektor jasa-jasa, sektor industri pengolahan dan sektor pertanian, dengan mengembangkan kawasan-kawasan strategis di wilayah yang menjadi main prime mover (pendorong pertumbuhan utama) antara lain Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, Kawasan Perkotaan (megapolitan dan metropolitan), Kawasan Pariwisata serta Kawasan yang berbasis pertanian dan potensi wilayah seperti agropolitan dan minapolitan.

Pertumbuhan ekonomi pada berbagai sektor tersebut juga harus diiringi dengan pemerataan pembangunan antarwilayah. Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antara kawasan barat dan kawasan timur Indonesia termasuk wilayah perdesaan, daerah tertinggal dan perbatasan. Langkah-langkah untuk mendukung kebijakan tersebut adalah dengan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan mendorong peningkatan investasi di wilayah luar Jawa namun dengan tetap menjaga momentum pembangunan di wilayah Jawa. Dengan kebijakan tersebut diharapkan peran ekonomi di wilayah luar Jawa semakin meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan antarwilayah dapat terwujud.

Dari sisi fiskal, ketepatan dalam menyusun kebijakan atas alokasi dana ditunjukkan oleh indikator-indikator kesejahteraan antara lain menurunnya tingkat kemiskinan, menurunnya gini rasio atau menurunnya ketimpangan antara masyarakat berpenghasilan tinggi dengan yang berpenghasilan rendah, menurunnya tingkat pengangguran serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang akan berdampak langsung dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, terdapat beberapa tantangan atas respon fiskal yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, yang disebabkan karena kemungkinan kurang memperhatikan faktor-faktor seperti kondisi geografis, demografis, kondisi masyarakat setempat, serta potensi sektor unggulan daerah. Atas hal tersebut, diperlukan masukan atau rekomendasi kebijakan fiskal yang dapat melihat aspek keseluruhan daerah, sehingga kedepannya target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019 dapat tercapai.

1. REGIONAL SUMATERA

Sumatera merupakan salah satu wilayah yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Arah pembangunan infrastruktur tahun 2018 tidak jauh berbeda dengan tahun 2017 yaitu diupayakan untuk menurunkan kesenjangan, khususnya kesenjangan antara wilayah barat dan timur Sumatera. Tema pembangunan wilayah Sumatera disesuaikan dengan karakteristik geografis dan potensi sumber daya pada beberapa sektor yaitu: (1) sektor pertanian dan perkebunan dilakukan pengembangan sentra perkebunan agrobisnis kelapa sawit, karet, kopi, dan tembakau serta menjadikan wilayah Sumatera sebagai salah satu wilayah yang mendukung swasembada pangan dan lumbung pangan nasional ; (2) sektor industri pengolahan diarahkan untuk mewujudkan pusat industri yang berdaya saing antara lain industri kimia dasar, industri pangan, industri elektronika dan industri kapal ; dan (3) sektor jasa didukung dengan pengembangan kawasan metropolitan sebagai pusat-pusat serta pengembangan Kawasan Pariwisata Danau Toba dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Kelayang.

Secara umum di wilayah Sumatera, fundamental ekonomi berkembang cukup baik yang ditunjukkan dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi (YoY) pada tahun 2018 sebesar 4,54% atau meningkat sebesar 25 basis poin dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,29%. Namun demikian, capaian tersebut masih berada dibawah rata-rata nasional sebesar 5,17%. Dari sisi tingkat kesejahteraan wilayah Sumatera masih menghadapi beberapa tantangan, tingkat kemiskinan di wilayah Sumatera sebagian besar berada dibawah tingkat kemiskinan nasional. Namun demikian, 4 dari 10 provinsi di wilayah Sumatera memiliki tingkat kemiskinan yang berada diatas angka tingkat kemiskinan nasional, dengan provinsi Aceh memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah Sumatera sebesar 15,92%. Sementara itu tingkat pengangguran di wilayah Sumatera sebanyak 5 provinsi berada di bawah rata-rata tingkat pengangguran nasional sedangkan sebanyak 5 provinsi berada di atas rata-rata tingkat pengangguran nasional, dengan tingkat pengangguran tertinggi ada pada provinsi

TABEL 95. SASARAN PEMBANGUNAN DAN SASARAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2018

INDIKATOR	Pertumbuhan ekonomi		Tingkat Kemiskinan		Tingkat Pengangguran	
	Target	Real	Target	Real	Target	Realisasi
Aceh	5.00	4.61	16.00	15.92	7.00	6.57
Sumut	5.00	5.18	10.00	9.28	6.00	5.60
Sumbar	5.00	5.14	6.00	6.75	5.00	5.58
Riau	3.00	2.34	8.00	7.41	7.00	6.22
Jambi	6.00	4.71	8.00	7.90	3.00	3.87
Sumsel	5.00	6.04	13.00	13.10	4.00	4.39
Bengkulu	5.00	4.99	17.00	15.59	3.00	3.74
Lampung	6.00	5.25	13.00	13.04	4.00	4.33
Babel	5.00	4.45	5.00	5.30	3.00	3.78
Kepri	6.00	4.56	6.00	6.13	7.00	7.16

Kepri sebesar 7,16%. IPM provinsi-provinsi wilayah Sumatera secara umum masih berada dibawah IPM nasional dengan Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Barat mempunyai IPM tertinggi di regional Sumatera. Disamping itu, gini rasio semua provinsi di Sumatera berada dibawah gini rasio nasional dengan predikat sebagian besar perekonomiannya masih dalam kondisi sedang berkembang. Meskipun gini rasio semua provinsi di wilayah Sumatera berada di bawah gini rasio nasional, namun tingkat kemiskinan regional Sumatera masih cukup tinggi terutama di provinsi Aceh, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.

Melihat kondisi dan tantangan perekonomian di wilayah Sumatera di atas, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui berbagai kebijakan fiskal telah dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara menggali potensi ekonomi daerah dengan memperhatikan karakteristik geografis dan potensi sumber daya di masing-masing daerah. Dalam rangka memperbesar kapasitas perekonomian di setiap provinsi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, langkah strategis telah dilakukan pemerintah melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan membuka peluang investasi yang lebih besar di daerah. Provinsi Riau memiliki laju pertumbuhan terendah di wilayah Sumatera disebabkan adanya penurunan harga komoditas pertambangan dan perkebunan. Dana desa sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal di daerah, bagi provinsi Riau menghadirkan dampak positif yang cukup besar. Hal tersebut ditunjukkan dengan semakin berkurangnya jumlah desa tertinggal di Provinsi Riau dan menurunnya tingkat kemiskinan. Sementara itu, provinsi Aceh dengan tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah Sumatera sesungguhnya memiliki potensi untuk mengembangkan wisata syariah, sektor kelautan dan perikanan, serta kopi Arabika Gayo sebagai produk unggulan. Permasalahan utama yang menjadi kendala dan harus segera diselesaikan pemerintah adalah teknologi dan infrastruktur yang masih minim, serta belum adanya industri pengolahan kopi yang mendukung kualitas ekspor. Selanjutnya di Provinsi Kepri yang memiliki tingkat pengangguran tertinggi di wilayah Sumatera, pemerintah telah merespon dengan kebijakan di bidang kredit program yaitu penyaluran KUR untuk sektor produktif seperti perikanan, industri, pariwisata, pertanian, dan KUR TKI optimal, serta melalui kebijakan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan penurunan suku bunga KUR dari 9% menjadi 7%.

Sumatera Selatan mempunyai laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Sumatera pada tahun 2018 yaitu sebesar 6,04%. Kondisi di provinsi Sumatera Selatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya harga beberapa komoditas unggulan Sumatera Selatan, semakin berkembangnya sektor sekunder/tersier serta berbagai event skala besar yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan yang membuat perekonomian semakin menggeliat. Ditambah lagi dengan pelaksanaan Asian Games 2018 dimana Kota

Palembang menjadi tuan rumah sehingga berpengaruh besar terhadap perekonomian Sumatera Selatan diberbagai sektor, misalnya konstruksi, industri pengolahan, transportasi, penyediaan akomodasi dan makan minum, perdagangan, dan lain-lain. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa sebagian besar pendapatan APBD di regional Sumatera masih mengandalkan Transfer dari Pemerintah Pusat. Nilai transfer tersebut jauh lebih besar daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Provinsi Aceh, misalnya, masih sangat tergantung dengan Transfer dari pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Otsus dan Penyesuaian, dan Alokasi Dana Desa).

Untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut, pemerintah pusat telah mengalokasikan melalui APBN dengan meningkatkan porsi pengeluaran melalui dana transfer ke daerah (DAK). Demikian juga dalam rangka pengentasan kemiskinan, pemerintah pusat melaksanakan program-program pengentasan kemiskinan seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Rastra, Program Indonesia Pintar dan Bantuan Bidikmisi. Penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran merupakan cara yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Belanja Pemerintah Pusat di Sumatera tahun 2018 sebagian besar dialokasikan untuk fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi, dan fungsi pendidikan. Melalui alokasi dana tersebut, diyakini dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat terutama bidang perekonomian dan pendidikan yang dapat meningkatkan IPM, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, dan mengurangi tingkat kemiskinan di Regional Sumatera. Namun demikian, yang perlu jadi perhatian adalah alokasi untuk pembangunan fasilitas umum, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan teknologi komunikasi yang diharapkan dapat menghubungkan dan melancarkan komunikasi antarwilayah di Sumatera. Hal tersebut akan mengurangi biaya pertukaran, penyediaan sumber daya penunjang seperti pembangunan instalasi listrik dan penyediaan air bersih serta pembangunan pasar.

2. REGIONAL JAWA

Regional Jawa masih menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi secara nasional karena merupakan pusat dari kegiatan industri nasional dan menjadi penghubung antara kegiatan pertanian dan non pertanian.

TABEL 96. TARGET DAN CAPAIAN DARI INDIKATOR PERKEMBANGAN EKONOMI DAN TINGKAT KESEJAHTERAAN PER PROVINSI DI PULAU JAWA TAHUN 2018

INDIKATOR	Pertumbuhan Ekonomi		Tingkat Kemiskinan		Tingkat Pengangguran	
	Target RKP	Realisasi	Target RKP	Realisasi	Target RKP	Realisasi
DKI	5.00	6.17	4.00	3.55	6.00	6.24
Jabar	6.00	5.64	9.00	7.25	8.00	8.17
Jateng	5.00	5.32	13.00	11.19	4.00	4.51
DIY	5.00	6.20	14.00	11.81	3.00	3.35
Jatim	5.00	5.50	12.00	10.85	4.00	3.99
Banten	5.00	5.81	6.00	5.59	9.00	9.28

Arah pengembangan wilayah di tahun 2018 di bidang pertanian diwujudkan dengan menjadi lumbung pangan nasional serta keterhubungan antara hasil pertanian dengan industri pengolahan. Di bidang industrti, senantiasa melengkapi ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta sumber daya manusia yang memadai dan didukung posisinya secara geografis sebagai hub perdagangan domestik dan internasional. Pengembangan lainnya adalah pengembangan kawasan megapolitan dan metropolitan yang didukung kelengkapan jaringan transportasi yang terpadu untuk meningkatkan keterkaitan antar wilayah dan efisiensi ekonomi serta terus dikembangkannya sektor jasa pariwisata.

Dari tabel diatas menunjukkan perkembangan ekonomi regional Jawa sangat baik serta memberikan andil yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi secara nasional mengingat sumbangan atas Produk Domestik Bruto mencapai lebih dari 50% secara nasional. Secara keseluruhan semua provinsi di Pulai Jawa melebihi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,17%. Capaian kinerja ekonomi Regional Jawa memang berada diatas regional lainnya di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kapasitas dan perkembangan perekonomiannya jauh berada diatas skala ekonomi regional lainnya. Dari sisi letak geografis, Regional Jawa sangat diuntungkan dengan adanya DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Selain sebagai pusat pemerintahan, DKI Jakarta juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional yang dapat menjadi katalisator bagi pertumbuhan perekonomian provinsi sekitarnya. Tingginya pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada surplus APBD yang terjadi di Prov. DKI yang mecapai sekitar Rp 419 Triliun. Sedangkan Provinsi lainnya masih mengalami defisit APBD yang indikatornya masih menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap alokasi dana transfer dari Pusat kecuali di Provinsi Banten yang juga mengalami surplus APBD sekitar Rp 21 Triliun.

Dari sisi tingkat kesejahteraan, regional Jawa masih menghadapi tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan di wilayah Jawa sebagian besar berada dibawah tingkat kemiskinan nasional terutama di Provinsi DIY yang terjadi di tingkat pedesaan. Namun demikian, secara rata-rata keseluruhan provinsi di Pulau Jawa telah meunjukkan tren penurunan angka kemiskinan. Seperti yang terjadi di Prov. DKI Jakarta yang menunjukkan tingkat penurunan angka kemiskinan terbaik secara nasional. Sementara itu, tingkat pengangguran di wilayah Jawa juga dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Prov. DKI Jakarta selain berhasil menurunkan tingkat kemiskinan juga berhasil mengatasi tingkat pengangguran di tahun 2018 karena didukung oleh berbagai program Pemerintah setempat yang dapat secara cepat menyerap tenaga kerja.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara regional, pemerintah daerah perlu memudahkan investasi yang bersumber dari pihak swasta (Non APBN/ APBD). Investasi oleh pihak swasta berupa pembangunan ifrastruktur dapat berupa

pembangunan bandara, jalan, ataupun pusat-pusat perdagangan/perkantoran yang secara tidak langsung akan banyak menyerap tenaga kerja. Adapun alokasi dari APBN/ APBD selain untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga harus menyentuh potensi unggulan daerah setempat dengan konsep pembangunan dari hulu ke hilir sehingga komoditas unggulan daerah dapat segera terserap oleh pasar.

Pemberian stimulus fiskal berupa pelaksanaan program pengentasan kemiskinan, seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai dan Subsidi Rastra dan beras program rastra maupun alokasi Dana Desa harus senantiasa dibangun dengan data yang valid sehingga penyaluran bantuan sosial maupun dana desa menjadi tepat sasaran dan efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan. Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi sanggat vital dalam menyelaraskan program-program pemerintah pusat yang dijalankan di daerah melalui APBN dengan program-program yang juga dibuat oleh Pemerintah Daerah dari Alokasi APBD.

3. REGIONAL KALIMANTAN

Kalimantan merupakan salah satu wilayah strategis yang berpotensi berperan besar dalam menopang pembangunan nasional. Arah pembangunan infrastruktur tahun 2018 diupayakan untuk menurunkan kesenjangan intra wilayah, khususnya kesenjangan antara wilayah di daerah perbatasan dan dengan wilayah lainnya. Regional Kalimantan memiliki limpahan sumber daya alam yang besar, terutama dala hal kehutanan dan pertambangan. Tema pembangunan wilayah Kalimantan disesuaikan dengan karakteristik geografis dan potensi sumber daya alam yang dimilikinya yaitu: (1) mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia; (2) lumbung energi nasional, dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, termasuk pengembangan energi terbarukan; (3) pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa; dan (5) menjadikan Kalimantan sebagai salah satu lumbung pangan nasional.

Secara umum di wilayah Kalimantan, fundamental ekonomi sudah terlihat baik yang diindikasikan oleh meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi (YoY) secara signifikan pada tahun 2018 sebesar 3,91, meskipun capaian tersebut masih berada dibawah rata-rata nasional sebesar 5,17.

TABEL 97. SASARAN PEMBANGUNAN DAN SASARAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2018

INDIKATOR	Pertumbuhan Ekonomi		Tingkat Kemiskinan		Tingkat Pengangguran	
	Target RKP	Realisasi	Target RKP	Realisasi	Target RKP	Realisasi
Kalimantan Barat	6.00	5,06	7	7,37	3	4,26
Kalimantan Tengah	7.00	5,64	6	5,10	3	4,01
Kalimantan Selatan	5.00	5,13	5	4,65	4	4,50
Kalimantan Timur	1.00	2,67	5	6,06	8	6,60
Kalimantan Utara	4.00	6,04	5	6,86	5	5,22

Dari sisi tingkat kesejahteraan, tingkat kemiskinan di wilayah Kalimantan berada dibawah tingkat kemiskinan nasional, yakni 9,66. Tingkat kemiskinan di sebagian besar provinsi masih berada di atas target angka yang ditetapkan di dalam RKP. Sementara itu tingkat pengangguran di wilayah Kalimantan sebagian besar sudah berada di bawah rata-rata tingkat pengangguran nasional yakni 5,34.

Melihat kondisi dan tantangan perekonomian di wilayah Kalimantan, pemerintah daerah melalui APBD telah berupaya untuk mengatasi tantangan tersebut melalui berbagai kebijakan fiskal di daerah. Upaya dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara menggali potensi ekonomi daerah dengan membuka akses investasi bagi pihak swasta di Kalimantan. Upaya pemerintah yaitu penyediaan infrastruktur yang memadai dan sumber daya manusia yang handal sebagai pelaku-pelaku ekonomi. Penyediaan infrastruktur menjadi sangat penting untuk mendorong konektifitas antar wilayah khususnya di wilayah perbatasan, sehingga dapat menopang pertumbuhan ekonomi. Penyediaan Sumber Daya Manusia yang handal juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku ekonomi.

Secara umum APBD di regional Kalimantan pada tahun 2018 masih mengalami defisit sehubungan pendapatan pada APBD di regional Kalimantan masih didominasi oleh pendapatan yang bersumber dari Transfer dari Pemerintah Pusat. Provinsi Kalimantan Utara, misalnya, masih sangat tergantung kepada Transfer dari pemerintah Pusat, terbukti dengan pendapatan yang bersumber dari Transfer nilainya 6 (enam) kali PAD-nya dan Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 3 (tiga) kali. Sementara itu, Provinsi Kalimantan Timur memiliki kemampuan fiskal daerah yang lebih baik sehingga tidak terlalu bergantung pada Pemerintah Pusat yaitu ditunjukkan dengan jumlah transfer pemerintah pusat yang diterima hanya sebanyak 1,06 (satu koma nol enam) kali PAD-nya.

Pemerintah daerah juga mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur termasuk peningkatan infrastruktur wilayah perbatasan. Selain itu, alokasi dana fungsi pendidikan dan kesehatan dalam APBD makin ditingkatkan dan dipastikan efektif memberikan kontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang dapat bersaing dan sesuai dengan kebutuhan perekonomian. Peningkatan alokasi APBN oleh Pemerintah Pusat untuk kedua bidang tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan porsi pengeluaran melalui dana transfer ke daerah (DAK). Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi yang ditujukan untuk mempercepat penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah perbatasan juga ditingkatkan. Sektor pertambangan yang saat ini masih menjadi fokus dan ketergantungan Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan perlu dikembangkan. Diversifikasi sudah saatnya dilakukan oleh setiap Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan potensi lain yang ada di wilayahnya sehingga tidak lagi bergantung pada sektor pertambangan. Sektor pertanian, industri, jasa dan pariwisata perlu mendapat perhatian lebih. Peran sektor pertanian, kehutanan dan perikanan

masih dapat ditingkatkan sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan indikator kesejahteraan di wilayah tersebut dan mewujudkan wilayah tersebut sebagai lumbung pangan nasional. Untuk itu, guna mendukung pengembangan sektor tersebut diperlukan dukungan alokasi fiskal daerah maupun dari pemerintah pusat melalui DAK. Disamping itu juga dalam rangka mendukung program hilirasasi industri pengolahan kelapa sawit dan pengembangan pariwisata dan mengingat luasnya geografis wilayah Kalimantan, pemerintah pusat dan daerah fokus membangun infrastruktur sarana dan prasarana transportasi baik jalur air maupun darat, disamping udara.

Optimalisasi penyaluran bantuan sosial oleh pemerintah pusat melalui program-program pengentasan kemiskinan seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai dan Rastra yang tepat sasaran juga merupakan cara yang efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan.

4. REGIONAL SULAWESI

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018, arah pembangunan wilayah Regional Sulawesi tetap bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan pertambangan yang menjadi keunggulan Pulau Sulawesi. Pengembangan di sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan lumbung pangan padi nasional di bagian selatan Pulau Sulawesi dan lumbung pangan jagung nasional di bagian utara Pulau Sulawesi serta pusat perkebunan kakao berbasis bisnis di bagian tengah Pulau Sulawesi. Peningkatan peran di sektor jasa didorong dengan pengembangan kawasan metropolitan serta pengembangan akses dan infrastruktur transportasi untuk perdagangan ke luar Indonesia. Selain itu, pengembangan Kawasan Pariwisata diharapkan dapat mendorong peningkatan sektor jasa. Sedangkan peningkatan sektor industri pengolahan akan didorong dengan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan kakao dan pengembangan industri barang dari rotan serta pembangunan industri pengolahan logam dasar dan non logam dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pembangunan suatu wilayah dapat dikatakan berhasil dengan melihat pada beberapa indikator pembangunan antara lain pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan pengangguran di wilayah tersebut. Tabel dibawah merupakan target dan capaian pembangunan di wilayah Pulau Sulawesi

TABEL 98. TARGET DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PULAU SULAWESI TAHUN 2018

INDIKATOR	Pertumbuhan Ekonomi		Tingkat Kemiskinan		Tingkat Pengangguran	
	Target RKP	Realisasi	Target RKP	Realisasi	Target RKP	Realisasi
Sulut	6.00	6.01	8.00	7.59	6.00	6.70
Sultengah	10.00	6.30	13.00	13.69	3.00	3.43
Sulsel	7.00	7.07	9.00	8.87	4.00	5.34
Sultenggara	7.00	6.42	12.00	11.32	3.00	3.26
Gorontalo	6.00	6.51	17.00	15.83	3.00	4.03
Sulbar	7.00	6.23	11.00	11.22	3.00	3.16

tahun 2018 yang meberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pencapaian target sasaran pembangunan secara nasional:

Pertumbuhan ekonomi wilayah Sulawesi mengalami perlambatan dibandingkan dengan sebelumnya dimana dari angka pertumbuhan ekonomi sebesar 7,49% di tahun 2017 turun menjadi sebesar 6,18% di tahun 2018. Perlambatan ekonomi regional Sulawesi banyak dipengaruhi oleh menurunnya kinerja Lapangan Usaha (LU) di bidang pertanian karena gagal panen tanaman dan bahan makanan yang menahan pendapatan masyarakat sehingga menekan LU di bidang lainnya yaitu perdagangan. Terjadinya bencana alam berupa gempa juga sedikit banyak mempengaruhi penurunan LU industri pengolahan di pulau Sulawesi. Untuk indikator pembangunan wilayah berupa tingkat kemiskinan, terdapat dua provinsi yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat memiliki realisasi yang melebih target yang ditetapkan pada RKP disebabkan karena adanya mobilitas penduduk yang bermigrasi yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan pada tingkat pengangguran, seluruh provinsi di Sulawesi melebih target yang telah ditetapkan disebabkan adanya ledakan jumlah angkatan kerja terutama di sektor pertanian yang berbanding terbalik dengan pelemahan ekonomi di sektor tersebut sehingga banyak tenaga kerja yang tidak terserap.

Secara keseluruhan APBN wilayah Sulawesi pada tahun 2018 mengalami tantangan akibat defisit fiskal yang cukup signifikan dimana terlihat dari proporsi penerimaan lebih sedikit dari pengeluaran. Rendahnya penerimaan di wilayah Sulawesi diakibatkan kurang optimalnya penerimaan pajak dari sektor unggulan di Sulawesi terutama pertanian, kelautan dan perikanan, dan perkebunan. Tantangan berikutnya yang dihadapi di wilayah Sulawesi antara lain rendahnya investasi yang dilakukan oleh swasta di daerah Sulawesi mengalami penurunan disebabkan banyaknya ketidakpastian iklim investasi dan juga seringnya bencana alam melanda wilayah Sulawesi.

Untuk mengatasi berbagai persoalan fiskal yang menghadang dalam mencapai kemandirian ekonomi, secara garis besar respon fiskal untuk wilayah Sulawesi ditunjukkan antara lain melalui peningkatan pembiayaan untuk pembngunan infrastruktur yang menjadi salah satu prasyarat bagi tumbuh-kembangnya investasi terutama dari pihak swasta. Selanjutnya, perlu dilakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, terutama pada sektor ekonomi unggulan. Kemudian pemerintah dapat harus mengembangkan sektor yang selama ini belum secara optimal digarap yaitu pariwisata sebagai sektor potensial melalui integrasi perencanaan dan peningkatan alokasi anggaran sektor-sektor penggerak pariwisata seperti sektor penyediaan akomodasi dan makanan minum, sektor industri pengolahan, sektor informasi dan komunikasi dan sektor konstruksi.

5. REGIONAL BALI NUSRA

Peran wilayah Bali - Kepulauan Nusa Tenggara terhadap perekonomian nasional

TABEL 99. SASARAN PEMBANGUNAN WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA TAHUN 2017

INDIKATOR	Pertumbuhan Ekonomi		Tingkat Kemiskinan		Tingkat Pengangguran	
	Target RKP	Realisasi	Target RKP	Realisasi	Target RKP	Realisasi
Bali	6.00	6.35	5.00	3.91	2.00	1.37
NTT	5.00	5.13	21.00	21.03	3.00	3.01
NTB	6.00	-4.56	16.00	14.63	4.00	3.72

diharapkan meningkat di tahun 2018 dengan fokus pengembangan wilayah pada potensi dan keunggulan wilayah. Pengembangan infrastruktur dalam RKP 2018 diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intrawilayah Bali - Kepulauan Nusa Tenggara dan antar wilayah, khususnya dalam hal peningkatan konektivitas wilayah kepulauan.

Wilayah Kepulauan Bali – Nusa Tenggara memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, peternakan, perikanan, terutama pariwisata. Pengembangan kawasan metropolitan serta kawasan pariwisata Bali dan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Mandalika diharapkan dapat menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang mendorong peningkatan sektor jasa. Dari sisi pengembangan sektor pertanian diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, perikanan dan kelautan, pertanian yang berdaya saing dengan prinsip berkelanjutan melalui pengembangan kawasan minapolitan serta upaya untuk mewujudkan sebagai lumbung ternak nasional. Sementara peningkatan sektor industri pengolahan diarahkan melalui peningkatan industri pangan (pengolahan ikan, garam, kopi), industri pengolah mutiara, industri kerajinan tenun. Adapun target dan realisasi sasaran pembangunan wilayah Bali dan Nusa Tenggara tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi tahun 2018 tertinggi terjadi di Bali Nusra yang didorong oleh perbaikan kontraksi perekonomian NTB pasca terjadinya bencana gempa dan Konsumsi RT tumbuh meningkat di seluruh wilayah, di antaranya didorong oleh program sosial Pemerintah, serta aktivitas belanja untuk Pemilu. Selain konsumsi, investasi di Bali Nusra juga tumbuh karena dipengaruhi oleh penyelesaian konstruksi PSN dan non PSN, termasuk infrastruktur pendukung IMF-World Bank Annual Meeting, serta investasi swasta terkait pengembangan kelapa sawit dan pertambangan. Diantara 3 provinsi di wilayah ini, NTB sebagai satu-satunya provinsi yang memiliki angka pertumbuhan terkecil dan berada di bawah pertumbuhan nasional. Kondisi perekonomian NTB dipengaruhi oleh melemahnya produksi tambang bijih logam yang masih terjadi di tahun 2018, ditambah lagi lapangan usaha lain ikut melambat sebagai akibat dari bencana alam gempa bumi yang melanda beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara pada triwulan 3 tahun 2018, mengakibatkan pertumbuhan ekonomi NTB turun ke level -4,56 persen di tahun 2018.

Provinsi Bali selain memiliki angka pertumbuhan ekonomi paling positif dibanding dua provinsi lainnya juga memiliki tingkat kemiskinan yang berada di bawah

tingkat kemiskinan nasional. Disamping itu, laju pertumbuhan ekonomi wilayah Bali juga didukung oleh tingkat pengangguran yang cukup rendah dengan majunya sektor pariwisata di Bali dan meningkatnya jumlah pengusaha kecil yang mengakses kredit usaha rakyat (KUR) di Bali yang mampu menyerap tenaga kerja cukup banyak.

Secara umum APBD di regional Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2018 mengalami defisit fiskal dimana sebagaian besar pendapatan pada APBD di regional Bali dan Nusa Tenggara bersumber dari Transfer dari Pemerintah Pusat. Hal tersebut menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah di wilayah Bali dan Nusa Tenggara terhadap pemerintah pusat masing sangat tinggi.

Melihat kondisi dan tantangan perekonomian di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Pemerintah perlu mengembangkan regulasi, infrastruktur, dan kebijakan affirmasi bidang pertanian yang mendukung pariwisata (seperti industri agrowisata, penggunaan produk pertanian dan peternakan lokal) dan industri kreatif (seperti: usaha kuliner, barang souvenir dan usaha rintisan digital). Selain itu diperlukan pembangunan berkelanjutan infrastruktur khususnya masalah konektivitas antar wilayah seperti contoh dengan membangun bandara baru. Pertumbuhan ekonomi harus dapat diarahkan untuk pengurangan kemiskinan. Selain itu sinergitas program dan kegiatan dalam APBN dan APBD harus terus diupayakan sehingga berbagai instrumen fiskal seperti Program Keluarga Harapan, Dana Desa, Kredit Usaha Rakyat untuk UMKM dan Kredit Ultra Mikro dan Program pengurangan kemiskinan.

6. REGIONAL MALUKU PAPUA

Pada tahun 2018, fokus pengembangan infrastruktur wilayah Papua dan Maluku, diharapkan akan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, khususnya wilayah pedalaman dan pesisir pantai. Tema pembangunan wilayah Maluku Papua difokuskan pada potensi dan keunggulan wilayah. Untuk wilayah Maluku, arah kebijakan pembangunan difokuskan kepada pendayagunaan sumberdaya kelautan, daratan, serta pengembangan kawasan perbatasan berwawasan lingkungan. Tema pengembangan wilayahnya antara lain: produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional, percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri berbasis komoditas perikanan, pengembangan industri pengolahan berbasis nikel dan tembaga, serta pariwisata bahari. Sedangkan untuk wilayah Papua, arah kebijakan

TABEL 100. SASARAN PEMBANGUNAN DAN SASARAN WILAYAH MALUKU DAN PAPUA TAHUN 2018

Indikator	Pertumbuhan Ekonomi		Tingkat Kemiskinan		Tingkat Pengangguran	
	Target RKP	Realisasi	Target RKP	Realisasi	Target RKP	Realisasi
Maluku	6,00	5,94	18	17,85	7	7,27
Maluku Utara	6,00	7.92	6	6.61	4	4,77
Papua	6,00	7,33	27	27,43	4	3.62
Papua Barat	6,00	6,24	23	22,66	8	5,67

pembangunan difokuskan untuk mendukung mewujudkanpusat pengembangan wilayah berbasis kampung masyarakat adat yang didukung oleh prasarana dan sarana yang handal. Tema pengembangan wilayahnya antara lain: pengembangan industri berbasis komoditas lokal di sektor pertanian, perkebunan dan peternakan; pengembangan ekonomi kemaritiman melalui industri perikanan dan pariwisata bahari; pengembangan pariwisata budaya dan alam, pengembangan hilirisasi industri pertambangan, minyak, gas bumi dan tembaga, peningkatan konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan daerah dan masyarakat, serta pengembangan kawasa ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah masyarakat adat. Adapun sasaran pembangunan dan sasaran wilayah Maluku dan Papua Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Secara umum di wilayah Maluku-Papua (Mapua), fundamental ekonomi sudah terlihat baik yang diindikasikan oleh meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi (YoY) secara signifikan pada tahun 2018 sebesar 6,99, berada diatas rata-rata nasional sebesar 5,17. Dari sisi tingkat kesejahteraan, tingkat kemiskinan di wilayah Mapua berada diatas tingkat kemiskinan nasional, yakni 9,66. Sementara itu tingkat pengangguran di wilayah Mapua sebagian masih berada di atas rata-rata tingkat pengangguran nasional yakni 5,34.

Pengembangan wilayah Maluku Papua difokuskan pada potensi dan keunggulan wilayah ternyata belum mengalami peningkatan andilnya dalam perekonomian nasional. Hal ini dilihat dari masih besarnya defisit cash flow yang terjadi di wilayah Maluku Papua tahun 2018, yaitu di Provinsi Papua sebesar Rp102,61 triliun. Tingginya defisit tidak terlepas dari rendahnya PAD pada regional ini. Defisit cash flow menunjukkan bahwa 4 (empat) provinsi di regional Maluku Papua masih membutuhkan subsidi silang dari daerah lain di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pembangunannya. Respon fiskal oleh Pemerintah Pusat difokuskan dalam pembangunan infrastruktur, terlihat dari tingginya alokasi belanja modal, adalah sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia bagian timur.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah ini cukup beralasan, karena regional Maluku Papua masih jauh tertinggal dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata tingkat kemiskinan masyarakat Maluku Papua masih tinggi jika dibandingkan dengan regional lainnya, terutama Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain hal tersebut, Indeks Pembangunan Manusia untuk regional ini juga merupakan yang terendah dibandingkan dengan regional lainnya.

Pemerintah Pusat dalam respon fiskalnya, perlu melakukan sinergi dengan Pemerintah Daerah untuk menentukan sektor-sektor mana yang perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Papua. Prioritas strategis yang perlu ditingkatkan lagi antara lain pengembangan infrastruktur, pengembangan pariwisata, stabilisasi kondisi

sosial politik, pengembangan kapasitas SDM, pemanfaatan kondisi geografis, dan pemanfaatan sumber daya alam. Formulasi alokasi Dana Desa wilayah Maluku Papua, khususnya Papua dan Papua Barat, perlu mendapat perhatian khusus terutama pada besaran persentase alokasi afirmasi, mengingat tingginya Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan masih tertinggalnya infrastruktur desa-desa di Papua.

BAB 7

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

hal. 290 ■
KESIMPULAN

hal. 291 ■
REKOMENDASI

EBINAR
X+Y=

KESIMPULAN

Secara umum perekonomian Indonesia pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,17 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 sebesar 5,07 persen.

Sektor konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar PDB tahun 2018, yaitu sebesar 56,96 persen.

Kualitas pelaksanaan APBN tahun 2018 menunjukkan peningkatan yang tercermin dari realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.943.646,28 miliar atau 102,58 persen dari target.

Realisasi keseluruhan belanja APBD pada tahun 2018 di seluruh regional mencapai Rp955,74 triliun atau sebesar 94,14 persen. Realisasi pendapatan pada APBD secara nasional menurun sebesar 1,39 persen atau sebesar Rp14,509 miliar.

Kemandirian keuangan daerah pada tahun 2018 masih menunjukkan angka ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini ditunjukan oleh 24 provinsi dengan rasio PAD kurang dari 21 persen.

Dari sisi belanja, porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah pada tahun anggaran 2018 juga menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017.

Kinerja penyaluran DAK Fisik mencapai Rp58,15 triliun atau 93,13 persen dari total pagu sebesar Rp62,43 triliun dengan capain output rata-rata mencapai 93,83 persen.

Setiap regional memiliki sektor unggulan yang berbeda satu dengan yang lainnya.

REKOMENDASI

Sinkronisasi proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga program prioritas nasional yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat dapat tercapai sesuai target.

Penetapan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Penguatan tata kelola keuangan daerah.

Peningkatan kemandirian daerah melalui perumusan kebijakan ataupun regulasi.

Rekomendasi untuk meningkatkan perekonomian secara spesifik melalui pendekatan sektor unggulan dan kondisi fiskal pada masing-masing regional.

1. SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan umum dan analisis yang telah diulas pada Bab sebelumnya, simpulan atas kondisi fiskal regional pada tahun 2018 baik secara nasional maupun regional dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum perekonomian Indonesia pada tahun 2018 tumbuh sebesar 5,17%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2017 sebesar 5,07%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di regional Maluku dan Papua sebesar 6,66%, sedangkan kontribusi tertinggi disumbang oleh perekonomian regional Jawa, yaitu sebesar 58,82% terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi regional Sulawesi mengalami perlambatan sebesar 5,79% dibandingkan tahun 2017, namun demikian capaian tersebut masih di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya peristiwa gempa bumi yang terjadi di NTB berdampak pada penurunan perekonomian di provinsi tersebut mencapai negatif 4,56%. Hal tersebut disebabkan anjloknya kinerja sektor pariwisata yang menjadi sektor unggulan di provinsi NTB.

2. Sektor konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar PDB tahun 2018, yaitu sebesar 56,96%. Sementara itu belanja pemerintah berkontribusi sebesar 8,98 persen. Selain itu, tingkat inflasi terjaga dengan baik pada kisaran 3,13%. Selain itu, berbagai indikator ekonomi yang positif tersebut juga didukung oleh peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tercermin melalui:
   a. Penurunan tingkat kemiskinan sebesar 4,76% dari semula 10,12% pada tahun 2017, menjadi 9,66% pada tahun 2018;
   b. Penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,09% dari semula 5,50 % pada tahun 2017 menjadi 5,34% pada 2018;
   c. Peningkatan nilai IPM dari 70.81 pada tahun 2017 menjadi 71,39 pada tahun 2018; dan
   d. Penurunan tingkat ketimpangan pendapatan perkapita dari semula 0,391 pada tahun 2017 menjadi 0,384 pada tahun 2018.

3. Kualitas pelaksanaan APBN tahun 2018 menunjukkan peningkatan yang tercermin dari realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.943.646,28 miliar atau 102,58% dari target. Sementara itu, realisasi belanja negara pada tahun 2018 mencapai Rp2.208.777,03 miliar atau 99,47%, jauh lebih baik dibanding tahun anggaran 2017 yaitu sebesar 93,90 %. Jika dilihat menurut regional, hanya regional Kalimantan yang mengalami surplus anggaran sebesar Rp24.351,31 miliar yang dikontribusi oleh Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

4. Realisasi keseluruhan belanja APBD pada tahun 2018 di seluruh regional mencapai Rp955,74 triliun atau sebesar 94,14%. Realisasi pendapatan pada APBD secara nasional menurun sebesar 1,39% atau sebesar Rp14,509 miliar. Penurunan terjadi pada seluruh komponen pendapatan, terutama pada pos Lain-Lain Pendapatan

yang Sah. Namun demikian pada pos belanja mengalami kenaikan sebesar 6,55% atau sebesar Rp58.791 miliar. Kenaikan terjadi pada Belanja Operasi sebesar Rp58,949 (8,58%) dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp48 miliar (6,52%).

5. Kemandirian keuangan daerah pada tahun 2018 masih menunjukkan angka ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Hal ini ditunjukan oleh 24 provinsi dengan rasio PAD kurang dari 21%. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan rasio PAD tertinggi. Sementara itu, di tingkat regional, regional Jawa berhasil mencapai rasio PAD tertinggi, yaitu sebesar 39%, sedangkan regional Maluku Papua memperoleh rasio terkecil sebesar 5%. Disamping itu, pertumbuhan PAD juga menunjukan angka yang kurang menggembirakan, masih terdapat 20 provinsi dengan pertumbuhan PAD di bawah 0%. Kalimantan Timur berhasil membukukan pertumbuhan PAD tertinggi, yaitu sebesar 14%. Sedangkan di tingkat regional, Sulawesi merupakan regional dengan rasio pertumbuhan tertinggi yang mencapai 7%.

6. Dari sisi belanja, porsi belanja modal yang dibelanjakan terhadap total belanja daerah pada tahun anggaran 2018 juga menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun anggaran 2017. Namun demikian, porsi belanja pegawai terhadap total belanja daerah menunjukan performa yang kurang baik dengan indikasi semakin banyak jumlah provinsi yang memiliki rasio belanja pegawai pada kisaran 41% s.d. 50%. Sebagian besar APBD digunakan untuk membiayai belanja pegawai mencapai 39,8% dari total belanja daerah, sedangkan untuk belanja modal hanya teralokasi sebesar 21,9% dari total belanja daerah.

7. Kinerja penyaluran DAK Fisik mencapai Rp58,15 triliun atau 93,13% dari total pagu sebesar Rp62,43 triliun dengan capain output rata-rata mencapai 93,83%. Sementara itu, realisasi penyaluran dana desa mencapai Rp59,86 triliun atau mencapai 99,77% dengan persentase capaian output mencapai 87,07%.

8. Setiap regional memiliki sektor unggulan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan oleh karakteristik geografis serta kebijakan arah pengembangan perekonomian di tiap regional. Adapaun sektor unggulan untuk masing-masing regional adalah 1) sektor pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan yang menjadi sektor unggulan di regional Sumatera dan Sulawesi; 2) sektor pertambangan dan penggalian untuk regional Kalimantan dan Maluku dan Papua; 3) sektor industri pengolahan untuk regional Jawa; dan 4) sektor pariwisata untuk regional Bali Nusra.

2. REKOMENDASI

Rekomendasi untuk meningkatkan kesehatan fiskal dan mengembangkan potensi sektor unggulan daerah secara nasional maupun regional dapat dilakukan melalui berbagai

aktifitas kunci sebagai berikut:

1. Sinkronisasi proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga program prioritas nasional yang telah dirumuskan oleh pemerintah pusat dapat tercapai sesuai target. Untuk mewujudkan hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai strategi sebagai berikut:

   a. Pemerintah Pusat
      1) Penyederhanaan regulasi dan integrasi data perencanaan pembangunan di daerah ke dalam sistem teknologi informasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional.
      2) Meningkatkan peran serta pemerintah daerah dalam perumusan program prioritas nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah.
      3) Pemberian dana insentif daerah bagi pemerintah daerah yang memperoleh pengelolaan kinerja keuangan terbaik.

   b. Pemerintah Daerah
      1) Mengintegrasikan kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional berdasarkan perspektif pemberdayaan masyarakat dan kesinambungan pembangunan.
      2) Menyusun kerangka pembangunan jangka menengah di daerah secara komprehensif dengan mempertimbangan sektor unggulan dan kearifan lokal masing-masing daerah.
      3) Optimalisasi peran Musrenbang dalam proses perencanaan pembangunan daerah.
      4) Dokumentasi dan validasi data yang terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

2. Penetapan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Strategi yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu:

   a. Pemerintah Pusat
      1) Mendorong penggunaan teknologi informasi untuk meningkatan kapasitas produksi khususnya sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta sektor pertambangan dan penggalian.
      2) Mendorong penggunaan energi baru terbarukan dalam proses produksi.
      3) Menyediakan sarana dan prasarana dalam bentuk bantuan pemerintah untuk sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sehingga dapat mendorong peningkatan produksi di regional Sumatera dan Sulawesi.
      4) Membuka pelatihan kewirausahaan bagi penduduk usia produktif, mempermudah akses terhadap instrumen permodalan, dan perumusan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan *startup* digital.
      5) Melakukan diversifikasi dan sekaligus ekstensifikasi jenis peminatan pada sekolah menengah vokasi yang

berbasis teknologi informasi.

b. Pemerintah Daerah

1) Membuka pintu untuk investasi di wilayahnya dengan memberikan kemudahahan dalam pengurusan/ pemberian izin usaha dan insentif pajak daerah.
2) Memberikan perlindungan dan kepastian hukum atas pelaksanaan investasi di daerah.
3) Mendirikan balai latihan kerja dengan memberikan pelatihan berbasis teknologi informasi yang dapat diikuti oleh peserta yang berasal dari kategori penduduk usia produktif.

3. Penguatan tata kelola keuangan daerah melalui strategi sebagai berikut:

a. Menyediakan alokasi anggaran yang proporsional sesuai dengan sektor unggulan dan potensi ekonomi wilayah yang dimiliki masing-masing daerah;

b. Memastikan pelaksanaan kegiatan dan pembangunan daerah secara proporsional sehingag tidak terjadi lagi penumpukan pencairan anggaran di akhir tahun anggaran; dan

c. Penguatan peran APIP dalam pengawasan pelaksanaan anggaran daerah.

4. Peningkatan kemandirian daerah melalui perumusan kebijakan ataupun regulasi sebagai berikut:

a. Menggali potensi sumber pendapatan asli daerah melalui penetapan peraturan daerah yang mengatur diversifikasi subjek dan objek pajak daerah;

b. Meningkatkan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah;

c. Melaksanakan sosialisasi peraturan daerah yang terkait dengan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah; dan

d. Memberikan reward dalam bentuk insentif (tax holiday ataupun penurunan tarif) dan punishment berupa denda yang dinilai dari tingkat kepatuhan terhadap pembayaran pajak daerah.

5. Rekomendasi untuk meningkatkan perekonomian secara spesifik melalui pendekatan sektor unggulan dan kondisi fiskal pada masing-masing regional sebagai berikut:

a. Regional Sumatera

1) Perbaikan jalur distribusi pemasaran hasil pertanian, pertambangan dan penggalian peningkatan infrastruktur perhubungan seperti jalan raya, jaringan kereta api, pelabuhan laut dan pelabuhan udara.
2) Pemenuhan infrastruktur pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan alokasi anggaran pengadaan sarana dan prasarana, serta peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga pendidik dan kesehatan.
3) Memperluas target penerima bantuan sosial dan memastikan bantuan tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

b. Regional Jawa

Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian regulasi

(misal penetapan tarif UMR/UMP/UMK secara win win solution), kemudahan investasi, dan jaminan keamanan bagi para investor.

c. Regional Kalimantan

1) Mengembangkan sektor perekonomi an selain pertambangan dan penggalian yang selama ini menjadi kontributor utama dalam pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan. Sektor tersebut antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata untuk mempersiapkan alternatif sumber pendapatan asli daerah dalam jangka panjang.
2) Peningkatan infrastruktur transportasi untuk memperbesar kapasitas perekonomian regional.
3) Memastikan keterlibatan sektor swasta dan BUMN yang bergerak dalam bidang perkebunan, energi dan pertambangan untuk berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Pola kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha melalui pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibiity-CSR) untuk penyediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan di regional Kalimantan.

d. Regional Sulawesi

1) Mendorong minat investor yang berasal dari sektor swasta untuk menanamkan modal di regional Sulawesi dengan memberikan kepastian regulasi, kemudahan investasi, dan jaminan keamanan bagi para investor.
2) Membuka kawasan industri baru dengan prioritas tenaga kerja dan bahan baku lokal untuk industri pengolahan sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor bahan baku dan tenaga kerja asing.
3) Peningkatan infrstruktur transportasi untuk memperbesar kapasitas perekonomian regional.
4) Meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dengan memberikan prioritas terhadap penyediaan alokasi anggaran di bidang Pendidikan dan kesehatan yang memadai oleh pemerintah daerah.

e. Regional Bali Nusra

1) Melakukan promosi pariwisata secara internasional melalui event olahraga otomotif berskala internasional selain MotoGP yaitu Asian Road Racing Championship, World Superbike, dan Formula 1.
2) Mempersiapkan masyarakat agar mampu mengembangkan UMKM dibidang ekonomi kreatif untuk mendukung sektor pariwisata dan kunjungan wisatawan mancanegara dalam gelaran event internasional di wilayah Bali Nusra.
3) Memperbanyak proyek pem bangunan yang bersifat padat karya untuk memberikan lapangan kerja khususnya di Provinsi NTT.

f. Regional Maluku Papua

1) Prioritas pembangunan infrastruktur yang dititikberatkan pada infrastruktur transportasi, jaringan komunikasi, ketersediaan energi listrik, pendidikan, dan kesehatan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian dan kualitas kehidupan masyarakat di regional Maluku dan Papua.
2) Mendorong investasi baru di sektor pertambangan dan perkebunan dengan memberikan kepastian hukum dan jaminan keamanan bagi para investor.
3) Meningkatkan rasio tenaga pendidik dan tenaga kesehatan terhadap jumlah jumlah penduduk agar lebih proporsional.
4) Peningkatan peran komunitas masyarakat adat dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk mengurangi terjadinya konflik horizontal.

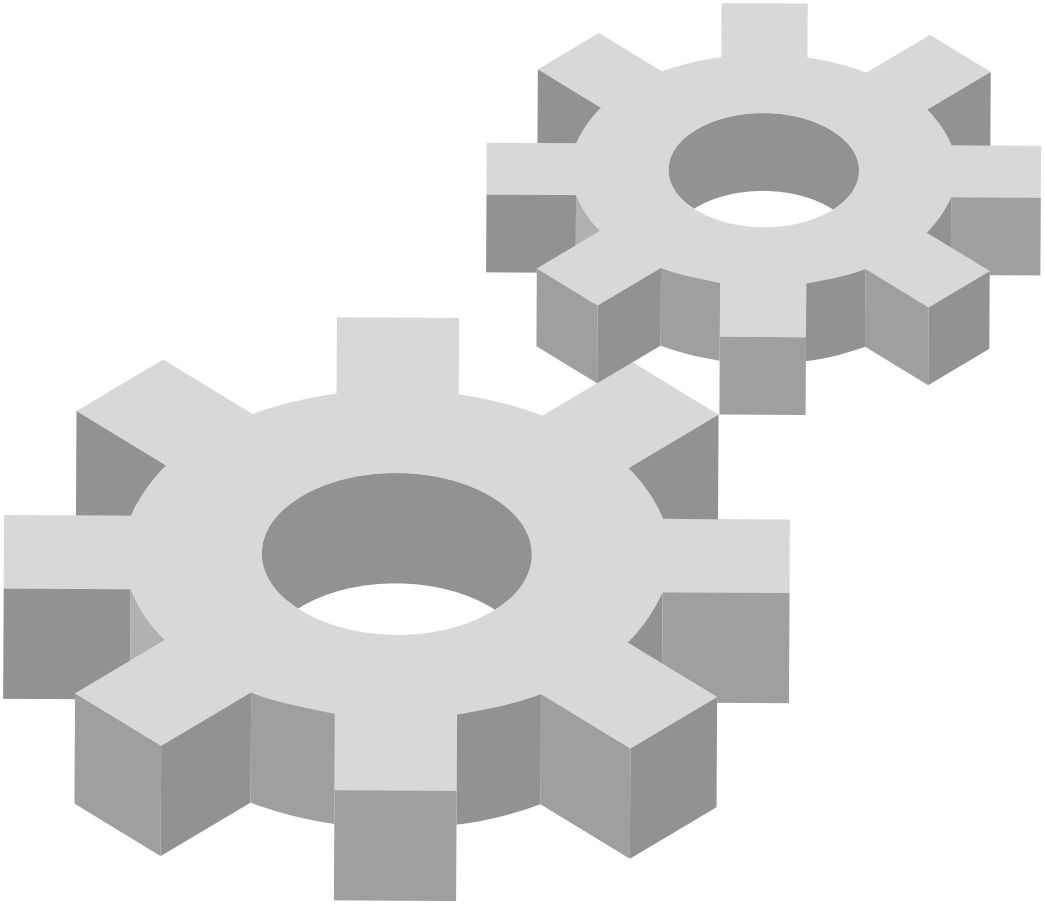

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN
DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN